BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Provinsi Riau menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021 sebagai bentuk Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021.

Berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Provinsi Riau dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa program/ kegiatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban dari suatu kegiatan untuk sebuah produk/ hasil yang mengutamakan *output*.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah maka Kepala Daerah harus menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran

   Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, surplus/ defisit dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode tertentu.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

   Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Neraca

   Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

4. Laporan Operasional

   Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Pusat/ Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

5. Laporan Arus Kas

   Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non keuangan.

6. Laporan Perubahan Ekuitas

   Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

   CaLK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan, menyajikan informasi pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Dalam CaLK juga diuraikan realisasi pencapaian target kinerja keuangan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tahun anggaran berjalan dan kebijakan akuntansi yang meliputi penjelasan yang berkaitan dengan Realisasi Pencapaian Target Pendapatan LRA, Penjelasan Pos Belanja, Pembiayaan, Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Pendapatan LO,, Beban, Aset, Kewajiban, Ekuitas, Arus Kas, dan Posisi Dana Cadangan Daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021 disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi *stakeholders* (masyarakat, DPRD, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa dan pemerintah pusat). Informasi yang dimaksud adalah informasi mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau pada Tahun Anggaran 2021 serta menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan. Laporan keuangan Pemerintah Provinsi Riau menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, surplus/ defisit, pembiayaan, kenaikan/ penurunan saldo anggaran lebih, aset, kewajiban, ekuitas dana, kenaikan/ penurunan ekuitas dan arus kas. Informasi ini disajikan agar pengguna memiliki pengetahuan mengenai:

1. Kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
2. Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
3. Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Provinsi Riau serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Upaya Pemerintah Provinsi Riau dalam mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kas;
5. Posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Provinsi Riau berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan
6. Perubahan posisi keuangan Pemerintah Provinsi Riau mengenai kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan sampai dengan 31 Desember 2021.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021 dilandasi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 4609);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 173, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 311);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6399);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 77);
18. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 2);
21. Peraturan Gubernur Riau Nomor 73 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 51 tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Riau Berbasis Akrual (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2015 Nomor 73);
22. Peraturan Gubernur Riau Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Likuidasi Perangkat Daerah selaku Entitas Akuntansi (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 46);

23. Peraturan Gubernur Riau Nomor 67 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Riau Berbasis Akrual (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 69);
24. Peraturan Gubernur Riau Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 58 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 48);
25. Peraturan Gubernur Riau Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 72);
26. Peraturan Gubernur Riau Nomor 74 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 74);
27. Peraturan Gubernur Riau Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 74 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 Nomor 8);
28. Peraturan Gubernur Riau Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 74 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 Nomor 17);
29. Peraturan Gubernur Riau Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 74 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 Nomor 26);

30. Peraturan Gubernur Riau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 74 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 Nomor 32);
31. Peraturan Gubernur Riau Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 74 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 Nomor 50); dan
32. Peraturan Gubernur Riau Nomor 56 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 74 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 Nomor 56).

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Selain itu, dalam Catatan atas Laporan Keuangan juga mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :

a. Menyajikan informasi tentang pencapaian target APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
b. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan berupa penjelasan mengenai tingkat efisiensi dan efektivitas suatu program;
c. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
d. Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos laporan keuangan; dan
e. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021, dibagi ke dalam 7 (tujuh) Bab, yaitu:

Bab 1 Pendahuluan

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1.3 Sistematika Catatan atas Laporan Keuangan

Bab 2 Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

2.1 Ekonomi Makro

2.2 Kebijakan Keuangan

2.3 Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab 3 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

3.2 Analisis Rasio Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

3.3 Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Bab 4 Kebijakan Akuntansi

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntasi Pemerintahan

Bab 5 Penjelasan Pos Pos Laporan Keuangan

5.1 Rincian Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

5.2 Rincian Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

5.3 Rincian Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional

5.4 Rincian Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

5.5 Rincian Penjelasan Pos-Pos Neraca

5.6 Rincian Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas

5.7 Penjelasan Selisih Laporan Realisasi Anggaran dengan Laporan Arus Kas

Bab 6 Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan

6.1 Gambaran Umum Pemerintah Provinsi Riau

6.2 Kepemimpinan Daerah

6.3 Strategi Pemerintah Provinsi Riau dalam Peristiwa Penanganan Bencana Non Alam Covid-19

Bab 7 Penutup

BAB 2

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Pemulihan ekonomi global yang kuat, khususnya di negara-negara mitra dagang, menjaga keberlanjutan pemulihan ekonomi Riau. Pemulihan tersebut juga didukung oleh implementasi vaksinasi *COVID-19* yang semakin intens dilakukan dalam upaya mendukung *herd immunity* di Provinsi Riau. Pada tahun 2021 perekonomian Riau tumbuh 3,36% (yoy), melanjutkan pertumbuhan positif sejak triwulan I 2021. Pemulihan ekonomi global terus berlanjut sesuai perkiraan. Pemulihan ekonomi negara mitra dagang mendorong tingginya permintaan terhadap komoditas utama Riau seperti CPO dan *pulp paper* yang merupakan bahan baku produk kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan di masa pandemi *COVID-19*. Melihat tingginya permintaan komoditas Riau di tingkat global, investor kembali melakukan realisasi investasi yang utamanya terkait dengan peningkatan kapasitas produksi. Sebagai komoditas utama dalam perekonominan Riau, tingginya permintaan terhadap CPO mampu mendorong kinerja investasi dan ekspor.

Dari sisi lapangan usaha, peningkatan aktivitas lifting minyak bumi dan tingginya perkembangan harga minyak dunia mendorong kinerja LU Pertambangan. Selain itu, berlanjutnya pembangunan proyek infrastruktur strategis turut mendorong kinerja LU Konstruksi. Namun demikian, penurunan produksi TBS sebagai bahan baku CPO menahan pertumbuhan kinerja LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, dan LU Industri Pengolahan. Pembatasan aktivitas sebagai dampak penerapan PPKM Level 3 juga menahan pertumbuhan kinerja LU Perdagangan Besar dan Eceran. Sementara itu, inflasi Riau pada tahun 2021 diperkirakan lebih tinggi, namun terjaga pada level yang rendah dan berada pada kisaran target inflasi nasional 3,0% ± 1% (yoy).

Potensi peningkatan inflasi bersumber dari permintaan yang meningkat, seiring masih tingginya harga komoditas ekspor utama Riau, yang meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat. Selain itu, peningkatan mobilitas dan aktivitas ekonomi produktif diperkirakan turut meningkatkan inflasi. Tekanan harga di antaranya bersumber dari sejumlah komoditas pangan.

Pandemi yang masih berlangsung, menuntut respons yang cepat termasuk dari Pemerintah Daerah. Untuk itu, dengan adanya perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 ke-4

sesuai Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2021 dalam rangka penanganan *COVID-19* dan dampaknya yang ditetapkan pada 13 Agustus 2021, terdapat penyesuaian pagu anggaran pendapatan Riau menjadi sebesar Rp9,35 triliun, dari sebelumnya sebesar Rp9,03 triliun. Sedangkan dari sisi belanja, pagu anggaran ditetapkan menjadi Rp9,45 triliun dari sebelumnya sebesar Rp9,13 triliun. Di sisi lain, implementasi elektronifikasi keuangan pemerintah daerah meningkatkan efisiensi dalam percepatan penyerapan anggaran. Pada tahun 2021, realisasi APBD Provinsi Riau secara umum tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan belanja daerah didukung oleh meningkatnya realisasi belanja operasi dan belanja modal. Sementara itu, dari sisi penerimaan, berlanjutnya pemulihan ekonomi dan perbaikan daya beli masyarakat mendorong realisasi pendapatan Provinsi Riau sehingga mencatatkan pertumbuhan positif. Meningkatnya realisasi penerimaan tidak terlepas dari terjaganya daya beli masyarakat, mengingat sebagian besar sumber pajak daerah berasal dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).

Asumsi dasar yang digunakan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Riau berdasarkan pada kondisi perekonomian Provinsi Riau, yang ditunjukkan dari beberapa asumsi dasar yang harus dipenuhi dalam APBD Tahun 2021 sebagai berikut:

1) Pertumbuhan ekonomi sebesar 3,36%;
2) Tingkat inflasi 1,54%;
3) Tingkat Suku Bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan sebesar 7,29%;
4) Nilai Tukar Rupiah rata-rata Rp14.265/USD;
5) Harga minyak mentah Indonesia rata-rata 73,36 US$;
6) Target produksi minyak (*lifting* minyak) rata-rata 705.000 Barel per hari; dan
7) Target produksi gas (*lifting* gas) rata-rata 1.007.000 Barel setara minyak per hari.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), perekonomian Nasional maupun Provinsi Riau tahun 2021 sama - sama mengalami pertumbuhan yang positif meskipun melambat dibandingkan dengan capaian sebelumnya. Ekonomi Indonesia pada tahun 2021 tumbuh sebesar 3,69% (*yoy*), lebih tinggi dari capaian tahun sebelumnya sebesar 2,07% (*yoy*). Pertumbuhan ekonomi nasional dan Provinsi Riau jika dilihat secara runtun waktu (*time series*) dalam 10 tahun terakhir mulai dari tahun 2012 hingga 2021 dapat dilihat pada grafik 2.1.

Sumber: BPS Provinsi Riau

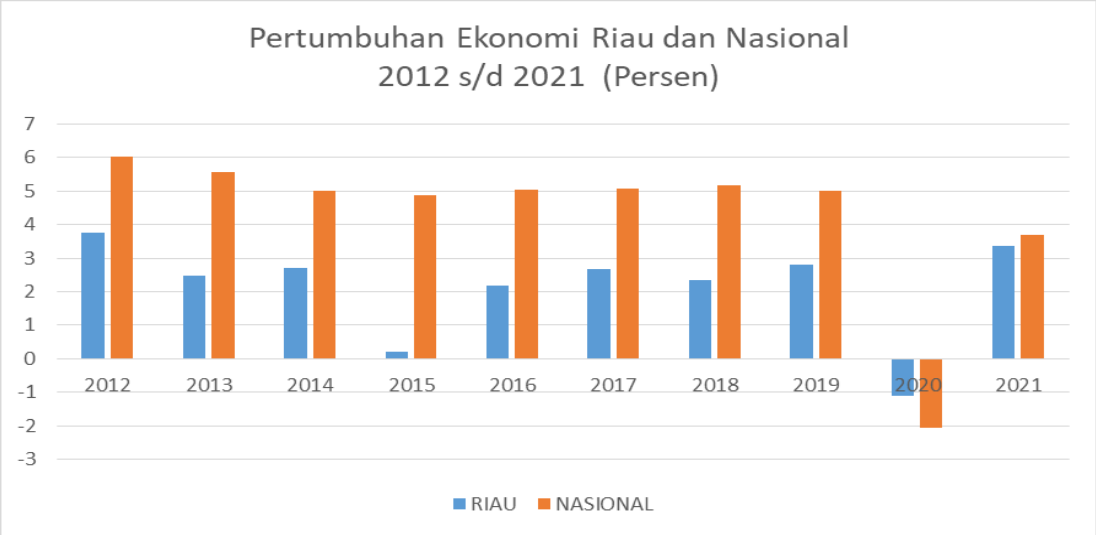

Penciptaan nilai tambah dalam perekonomian Riau dapat dilihat dari besarnya nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Nilai PDRB yang dihitung tersebut disajikan dalam dua pendekatan harga, yaitu Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK), baik untuk PDRB dengan Migas maupun PDRB tanpa Migas. PDRB ADHB dengan Migas di Provinsi Riau pada tahun 2021 sebesar Rp843,21 triliun dan untuk PDRB ADHB tanpa Migas sebesar Rp704,00 triliun. Sedangkan untuk PDRB ADHK dengan Migas pada tahun 2021 nilainya sebesar Rp506,45 triliun dan PDRB ADHK tanpa Migas sebesar Rp442,01 triliun. Nilai PDRB Provinsi Riau secara runtun waktu (*series*) dari tahun 2016-2021 selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1.
PDRB dengan Migas dan tanpa Migas Berdasarkan Harga berlaku dan Harga Konstan (triliun rupiah), 2016 – 2021

Tahun	Atas Dasar Harga berlaku		Atas Dasar Harga Konstan	
	Dengan Migas	Tanpa Migas	Dengan Migas	Tanpa Migas
2016	681,7	518,95	458,77	371,75
2017	704,71	548,13	470,98	388,63
2018	752,26	569,05	482,06	403,96
2019	760,57	602,69	495,6	423,63
2020	729,17	624,87	490,02	422,79
2021	843,21	704,00	506,45	442,01

Sumber :BPS Provinsi Riau

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai uang secara kontinyu. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi rendahnya tingkat harga.

Inflasi Riau tahun 2021 tercatat sebesar 1,54% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar 2,42% (yoy). Kondisi ini tidak sejalan dengan peningkatan inflasi Nasional dari 1,68% (yoy) pada tahun 2020 menjadi 1,87% (yoy) pada tahun 2021. Dinamika kebijakan PPKM serta produksi bahan pangan di daerah pemasok memengaruhi inflasi pada triwulan laporan. Meningkatnya permintaan seiring dengan kebijakan pelonggaran PPKM ditambah dengan ketidakstabilan pasokan komoditas pangan disinyalir menjadi penyebab tingginya tekanan harga komoditas pada hampir seluruh kelompok komoditas. Komoditas bahan pangan seperti cabai merah, ayam hidup, dan daging ayam ras memiliki andil besar dalam mendorong tekanan inflasi pada triwulan laporan. Berdasarkan kota pembentuk IHK di Provinsi Riau, tekanan inflasi tertinggi terjadi di Kota Dumai, kemudian diikuti oleh Kota Pekanbaru dan Kota Tembilahan.

Perkembangan inflasi di tingkat Nasional, Riau, dan tiga kota inflasi di Riau dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Perkembangan Inflasi Nasional, Riau, Pekanbaru, Dumai, dan Tembilahan (%) secara *Year on Year* (%)

WILAYAH	Persentase %				
	2017	2018	2019	2020	2021
Nasional	3,61	3,13	2,72	1,68	1,87
Riau	4,2	2,45	2,36	2,42	1,54
Pekanbaru	4,07	2,54	2,56	2,24	1,56
Dumai	4,85	1,85	1,28	2,88	1,66
Tembilahan	4,27	2,64	2,4	3,3	1,1

Sumber: BPS Provinsi Riau

Pelaksanaan pembangunan terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan asumsi makro, yang membawa dampak terhadap peningkatan atau penurunan. Tahun 2021 berbagai perubahan yang diakomodir didasarkan pada berbagai pertimbangan sebagai berikut:

1) Pertumbuhan ekonomi global sangat mempengaruhi pemerintah dalam mengambil kebijakan ekonomi;
2) Kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi *Covid-19*;
3) Penyesuaian Program/kegiatan guna pencapaian visi dan misi Kepala Daerah periode Tahun 2019-2024; dan
4) Merupakan upaya fungsionalisasi/optimalisasi program/kegiatan yang telah dilaksanakan.

2.2 Kebijakan Keuangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 dan Peraturan Gubernur Riau Nomor 74 Tahun 2020. Tahun 2021 Pemerintah Provinsi Riau melakukan Perubahan APBD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 dan Peraturan Gubernur Riau Nomor 50 Tahun 2021. Pemerintah Provinsi Riau juga melakukan perubahan Penjabaran APBD Tahun 2021 beberapa kali yaitu:

1. Peraturan Gubernur Riau Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 74 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021;
2. Peraturan Gubernur Riau Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 74 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021;
3. Peraturan Gubernur Riau Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 74 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021;
4. Peraturan Gubernur Riau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 74 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021;
5. Peraturan Gubernur Riau Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021, dan
6. Peraturan Gubernur Riau Nomor 56 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 74 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021.

Target pendapatan pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp9.183.690.915.424,00 dan Anggaran Belanja sebesar Rp9.715.374.904.870,00. Secara umum Pemerintah Provinsi Riau pada Tahun Anggaran 2021 menetapkan kebijakan keuangan daerah yang berkaitan dengan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

2.2.1 Kebijakan Pendapatan

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp9.183.690.915.424,00 dengan rincian pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Target Pendapatan pada APBD TA 2021

Uraian	APBD (Rp)	Perubahan APBD (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
			(Rp)	(%)
Pendapatan Asli Daerah	4.045.832.280.228,00	4.014.678.028.946,00	(31.154.251.282,00)	(0,78)
Pendapatan Transfer	5.295.495.223.579,00	5.166.277.886.478,00	(129.217.337.101,00)	(2,50)
Lain-Lain Pendapatan DaerahYang Sah	3.251.000.000,00	2.735.000.000,00	(516.000.000,00)	(18,87)
Jumlah	**9.344.578.503.807,00**	**9.183.690.915.424,00**	**(160.887.588.383,00)**	**(1,75)**

Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah antara lain:

1) Meningkatkan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Daerah melalui perluasan basis penerimaan;
2) Pengendalian atas kebocoran pendapatan; dan
3) Peningkatan efisiensi administrasi pendapatan serta diiringi dengan peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan pendapatan.

Upaya-upaya Pemerintah Daerah dalam mencapai target pendapatan antara lain:

1) Memperluas basis penerimaan, antara lain dengan mengidentifikasi wajib pajak/ retribusi baru dan potensial, memperbaiki basis data objek pajak/ retribusi, memperbaiki penilaian dan menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pajak/ retribusi daerah;

2) Memperkuat proses pemungutan, dengan melakukan review dan revisi serta mempercepat penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pemungutan serta memperkuat kapasitas SDM pemungut pajak dan retribusi;
3) Meningkatkan pengawasan dengan melakukan pemeriksaan secara insidentil maupun berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak/ retribusi;
4) Meningkatkan efisiensi administrasi pemungutan pajak/ retribusi melalui penyederhanaan prosedur administrasi pemungutan pajak/ retribusi;
5) Meningkatkan peran dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan melalui percepatan perbaikan pelayanan, membangun sinergi dan kerjasama pemungutan pajak/ retribusi dengan Kabupaten/ Kota.

2.2.2 Kebijakan Belanja

Belanja Daerah merupakan belanja yang tertuang dalam APBD yang diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan fungsi pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Dokumen APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu anggaran, serta rencana pelaksanaan semua pendapatan dan semua belanja daerah dalam rangka memenuhi target pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu.

Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2021 sesuai dengan kewenangan masing – masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan serta dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman *COVID-19* di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi.

Dalam penggunaan APBD, Pemerintah Provinsi Riau memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Riau juga mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintah Daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan kelurahan atau desa. Termasuk memprioritaskan pendanaan penanganan *COVID-19* dan dampaknya khususnya di wilayah Provinsi Riau.

Kebijakan belanja daerah Tahun Anggaran 2021 untuk mendanai pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah,sebesar Rp9.715.374.904.870,00 dengan rincian pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4

Perbandingan Belanja pada APBD dan perubahan TA.2021

Uraian	APBD (Rp)	Perubahan APBD (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
			(Rp)	(%)
Belanja Operasi	6.368.645.756.420,00	6.526.461.934.717,00	157.816.178.297,00	2,42
Belanja Modal	1.274.185.308.002,00	1.249.559.519.772,00	(24.625.788.230,00)	(1,97)
Belanja Tidak Terduga	9.160.759.492,00	46.373.907.506,00	37.213.148.014,00	80,25
Belanja Transfer	1.792.586.679.893,00	1.892.979.542.875,00	100.392.862.982,00	5,30
Jumlah	**9.444.578.503.807,00**	**9.715.374.904.870,00**	**270.796.401.063,00**	**2,79**

Kebijakan belanja daerah diarahkan mengedepankan *money follow program priority* dengan memprioritaskan program/kegiatan wajib/mengikat (antara lain gaji pegawai, air minum, listrik, air bersih), kegiatan yang memprioritaskan pada aspek layanan dasar, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana, peningkatan kualitas infrastruktur, pelestarian nilai budaya, dan program/kegiatan yang mendukung fokus tematik, yakni penurunan kemiskinan dan ketimpangan antar kelompok pendapatan, penurunan ketimpangan wilayah, kerjasama dan kemitraan, dan pemulihan sosial pasca Pandemi *Covid 19*. Adapun belanja pembangunan diarahkan untuk belanja pendukung yang secara spesifik diberikan sebatas kemampuan keuangan daerah mencukupi. Pengelolaan belanja harus diadministrasikan sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku, yang diarahkan pada Efektivitas Anggaran, Efisiensi Anggaran, Prioritas Belanja, Optimalisasi Belanja Operasi, dan Transparansi dan Akuntabel sehingga perlu diwujudkan dalam bentuk:

1) Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target kinerja yang jelas meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat Daerah;
2) Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan, dilaporkan dan dipertanggungjawabkan tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi juga dalam hal keluaran dan hasil.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) Dan Dampaknya, kebijakan perubahan belanja dilakukan dalam rangka penyesuaian pendapatan

transfer ke daerah terutama terkait dengan pendanaan penanganan *COVID-19* dan dampaknya dengan melakukan rasionalisasi belanja barang/jasa antara lain :

a. Belanja perjalanan dinas;
b. Belanja barang pakai habis keperluan kantor;
c. Belanja cetak penggandaan;
d. Belanja pakaian dinas, pakaian hari tertentu dan pakaian khusus;
e. Belanja pemeliharaan;
f. Belanja sewa sewa alat dan sewa sarana mobilitas;
g. Belanja jasa kantor dan antara lain listrik dan air, telekomunikasi, media dan peralatan;
h. Belanja konsultansi;
i. Belanja honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber;
j. Belanja uang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat;
k. Belanja makan minum serta rapat-rapat diluar kantor; dan
l. Belanja sosialisasi, workshop, seminar, bimbingan teknis dan *focus group discussion* atau pertemuan yang mengumpulkan banyak orang.

Belanja Pemerintah Provinsi memberikan prioritas alokasi kepada program secara nyata berkontribusi pada pencapaian 5 (lima) prioritas pembangunan Provinsi Riau tahun 2021. Untuk mewujudkan kelima prioritas pembangunan tersebut maka dianalisis program/kegiatan pada masing-masing OPD yang dijadikan prioritas dan ditingkatkan anggarannya. Peningkatan anggaran program prioritas yang diikuti dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang baik maka tingkat pencapaian indikator pembangunan pada tahun 2021 akan tercapai. Namun demikian, sebagai upaya penanganan *COVID-19*, prioritas belanja selanjutnya diarahkan untuk mendanai:

a. Kebutuhan anggaran untuk Penanganan *COVID-19* dan dampaknya meliputi belanja penyediaan jaring pengaman sosial, penanganan dampak ekonomi yang dialokasikan pada belanja langsung OPD, belanja bantuan sosial, belanja hibah, bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota dan Belanja Tidak Terduga.
b. Pemenuhan anggaran belanja yang bersumber dari dana *earmarking* tahun anggaran berjalan dan sisa dana *earmarking* tahun sebelumnya yang belum teralokasikan dalam APBD 2021, antara lain belanja yang bersumber dari dan DAK Fisik dan Non Fisik serta Dana Reboisasi;

c. Penganggaran kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan akibat pemberian kesempatan kepada penyedia barang/jasa menyelesaikan pekerjaan sehingga melampaui tahun anggaran 2020 sesuai peraturan perundang-undangan dan kewajiban kepada pihak ketiga yang telah berkekuatan hukum tetap;
d. Penganggaran keadaan darurat/mendesak;
e. Pemenuhan kebijakan belanja pegawai terkait dengan Belanja Tambahan Pengahasil Pegawai menjadi 12 (dua belas) bulan;
f. Penganggaran prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD, yang merupakan program strategis untuk peningkatan pelayanan publik dan dapat diselesaikan dalam tahun anggaran 2021.

2.2.3 Kebijakan Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah, yang perlu dibayar atau yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran.

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 bersumber dari penerimaan dari sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya (SiLPA) Tahun 2020 sebesar Rp531.683.989.445,73.

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (Investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, dan pemberian pinjaman daerah kepada Pemerintah Daerah lain sesuai dengan akad pinjaman. Tahun Anggaran 2021 tidak terdapat penganggaran pada pos pengeluaran pembiayaan daerah.

2.3. Pencapaian Target Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pencapaian target kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021 dapat terlihat pada indikator keberhasilan pelaksanaan

program dan kegiatan pada tahun pelaporan berdasarkan urusan pemerintahan daerah yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. Realisasi pencapaian target kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Riau membandingkan antara pergeseran APBD terakhir dengan Realisasi APBD sampai dengan 31 Desember 2021 yaitu sebagai berikut:

2.3.1. Pencapaian Target Kinerja Pendapatan

Peningkatan target kinerja di bidang pendapatan dibagi menurut jenis yang diperoleh dari 28 OPD penghasil pendapatan yang mempunyai target pendapatan yang telah dikonsolidasikan, dengan realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp9.383.001.507.905,44 atau 102,17% dari target pendapatan sebesar Rp9.183.690.915.424,00 dengan rincian pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5

Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2021

Uraian	Perubahan APBD (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran	
			(Rp)	%
Pendapatan Asli Daerah	4.014.678.028.946,00	4.050.468.561.143,44	(35.790.532.197,44)	100,89
Pendapatan Transfer	5.166.277.886.478,00	5.324.745.236.758,00	(158.467.350.280,00)	103,07
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	2.735.000.000,00	7.787.710.004,00	(5.052.710.004,00)	284,74
Jumlah	**9.183.690.915.424,00**	**9.383.001.507.905,44**	**(199.310.592.481,44)**	**102,17**

Pendapatan Asli Daerah

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp4.050.468.561.143,44 atau 100,89% dari anggaran sebesar Rp4.014.678.028.946,00 dengan rincian Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari:

(1) Pajak Daerah

Realisasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar 3.327.500.336.694,85 atau 100,46% dari anggaran sebesar Rp3.312.414.331.190,00 dengan rincian pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6

Realisasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021

Uraian	Perubahan APBD	Realisasi	Sisa Anggaran	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
Pajak Kendaraan Bermotor	1.276.770.171.663,00	1.224.103.784.037,00	52.666.387.626,00	95,88
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	775.429.287.546,00	887.056.637.195,00	(111.627.349.649,00)	114,40
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	742.920.282.437,00	764.782.831.375,85	(21.862.548.938,85)	102,94
Pajak Air Permukaan	52.506.777.155,00	44.805.652.197,00	7.701.124.958,00	85,33
Pajak Rokok	464.787.812.389,00	406.751.431.890,00	58.036.380.499,00	87,51
Jumlah	**3.312.414.331.190,00**	**3.327.500.336.694,85**	**(15.086.005.504,85)**	**100,46**

(2) Retribusi Daerah

Realisasi Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp13.790.515.597,00 atau 80,10% dari anggaran sebesar Rp17.215.784.040,00 dengan rincian pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7

Realisasi Retribusi Tahun Anggaran 2021

Uraian	Perubahan APBD	Realisasi	Sisa Anggaran	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
Retribusi Jasa Umum	3.591.250.000,00	2.312.141.000,00	1.279.109.000,00	64,38
Retribusi Jasa Usaha	13.099.534.040,00	11.027.890.297,00	2.071.643.743,00	84,19
Retribusi Perizinan Tertentu	525.000.000,00	450.484.300,00	74.515.700,00	85,81
Jumlah	**17.215.784.040,00**	**13.790.515.597,00**	**3.425.268.443,00**	**80,10**

(3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp117.417.430.069,00 atau 100,01% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp177.402.606.804,00 dapat dirincikan pada Tabel 2.8.

Tabel 2.8

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Tahun Anggaran 2021

Uraian	Perubahan APBD	Realisasi	Sisa Anggaran	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD	117.402.606.804,00	117.417.430.069,00	(14.823.265,00)	100,01
Jumlah	**117.402.606.804,00**	**117.417.430.069,00**	**(14.823.265,00)**	**100,01**

(4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp591.760.278.782,59 atau 104,25% dari anggaran sebesar Rp567.645.306.912,00 dengan rincian pada Tabel 2.9.

Tabel 2.9
Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Tahun Anggaran 2021

Uraian	APBD	Realisasi	Sisa Anggaran	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan	1.112.500.000,00	23.997.100,00	1.088.502.900,00	2,16
Hasil Kerja Sama Daerah	47.503.468.000,00	10.132.000,00	47.493.336.000,00	0,02
Jasa Giro	6.700.000.000,00	9.619.437.828,00	(2.919.437.828,00)	143,57
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	99.509.107,84	(99.509.107,84)	0,00
Pendapatan Bunga	38.500.000.000,00	67.663.558.590,10	(29.163.558.590,10)	175,75
Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain	62.413.780.000,00	64.590.278.982,37	(2.176.498.982,37)	103,49
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.627.065.255,00	1.316.823.457,38	310.241.797,62	80,93
Pendapatan Denda Pajak	95.377.652.024,00	45.580.033.227,00	49.797.618.797,00	47,79
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	3.944.987.580,00	4.258.868.416,00	(313.880.836,00)	107,96
Pendapatan dari Pengembalian	6.325.584.053,00	1.235.986,00	6.324.348.067,00	0,02
Pendapatan BLUD	304.140.270.000,00	398.596.404.087,90	(94.456.134.087,90)	131,06
Jumlah	**567.645.306.912,00**	**591.760.278.782,59**	**(24.114.971.870,59)**	**104,25**

Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp5.324.745.236.758,00 atau 103,07% dari anggaran sebesar Rp5.166.277.886.478,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

(1) Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp5.292.276.537.758,00 atau 103,09% dari anggaran sebesar Rp5.133.809.187.478,00, dengan rincian sebagai berikut:

(a) Dana Bagi Hasil Pajak

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.394.547.926.246,00 atau 118,98% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp1.172.066.030.292,00, dengan rincian pada Tabel 2.10.

Tabel 2.10

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2021

Uraian	APBD	Realisasi	Sisa Anggaran	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	933.326.406.292,00	1.155.819.524.234,00	(222.493.117.942,00)	123,84
Bagi Hasil PPh Pasal 21	229.147.667.300,00	229.147.667.300,00	0,00	100,00
Bagi Hasil PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	9.580.656.700,00	9.580.656.700,00	0,00	100,00
Bagi Hasil dari Cukai Hasil Tembakau	11.300.000,00	78.012,00	11.221.988,00	0,69
Jumlah	**1.172.066.030.292,00**	**1.394.547.926.246,00**	**(222.481.895.954,00)**	**118,98**

(b) Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA)

Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp446.588.672.066,00 atau 104,82% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp426.037.614.186,00 dengan rincian pada Tabel 2.11.

Tabel 2.11

Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) Tahun Anggaran 2021

Uraian	APBD	Realisasi	Sisa Anggaran	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	357.703.979.000,00	357.703.979.000,00	0,00	100,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	7.765.709.400,00	11.406.366.606,00	(3.640.657.206,00)	146,88
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	939.635.175,00	939.635.175,00	0,00	100,00

Uraian	APBD	Realisasi	Sisa Anggaran	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	9.738.335.175,00	11.394.865.371,00	(1.656.530.196,00)	117,01
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	41.103.211.756,00	56.235.083.743,00	(15.131.871.987,00)	136,81
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)	1.520.454.805,00	1.520.990.334,00	(535.529,00)	100,04
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	7.266.288.875,00	7.387.751.837,00	(121.462.962,00)	101,67
Jumlah	**426.037.614.186,00**	**446.588.672.066,00**	**(20.551.057.880,00)**	**104,82**

(c) Dana Alokasi Umum (DAU)

Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.455.383.959.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp1.455.383.959.000,00, dengan rincian pada Tabel 2.12.

Tabel 2.12

Realisasi Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2021

Uraian	APBD	Realisasi	Sisa Anggaran	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
Dana Alokasi Umum (DAU)	1.455.383.959.000,00	1.455.383.959.000,00	0,00	100,00
Jumlah	**1.455.383.959.000,00**	**1.455.383.959.000,00**	**0,00**	**100,00**

(d) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.995.755.980.446,00 atau 95,93% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp2.080.321.584.000,00, dengan rincian pada Tabel 2.13.

Tabel 2.13

Realisasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2021

Uraian	APBD	Realisasi	Sisa Anggaran	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
Dana Alokasi Khusus Fisik	**308.779.222.000,00**	**254.119.352.389,00,00**	**54.659.869.611,00**	**82,30**
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	169.014.133.000,00	57.145.244.493,00	111.868.888.507,00	33,81
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB	2.054.470.000,00	1.004.606.756,00	1.049.863.244,00	48,90

Uraian	APBD	Realisasi	Sisa Anggaran	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	1.000.000.000,00	748.793.596,00	251.206.404,00	74,88
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	26.350.883.000,00	21.898.560.318,00	4.452.322.682,00	83,10
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	5.027.774.000,00	3.533.280.523,00	1.494.493.477,00	70,28
DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	6.299.789.000,00	4.250.115.115,00	2.049.673.885,00	67,46
DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	4.784.360.000,00	3.345.810.598,00	1.438.549.402,00	69,93
DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	21.783.305.000,00	19.229.767.972,00	2.553.537.028,00	88,28
DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	69.729.850.000,00	45.634.437.026,00	24.095.412.974,00	65,44
DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan	2.734.658.000,00	2.480.398.452,00	254.259.548,00	90,70
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Sekolah Menengah Kejuruan	0,00	93.424.107.041,00	(93.424.107.041,00)	0,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Sekolah Menengah Kejuruan	0,00	1.424.230.499,00	(1.424.230.499,00)	0,00
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	**1.771.542.362.000,00**	**1.741.636.628.057,00**	**29.905.733.943,00**	**98,31**
DAK Non Fisik-BOS Reguler	1.448.911.210.000,00	1.430.410.284.000,00	18.500.926.000,00	98,72
DAK Non Fisik-BOS Afirmasi	18.060.000.000,00	18.060.000.000,00	0,00	100,00
DAK Non Fisik-BOS Kinerja	13.980.000.000,00	9.050.000.000,00	4.930.000.000,00	64,74
DAK Non Fisik-TPG PNSD	275.564.331.000,00	275.564.331.000,00	0,00	100,00
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.473.000.000,00	1.473.000.000,00	0,00	100,00
DAK Non Fisik-TKG PNSD	892.302.000,00	892.302.000,00	0,00	100,00
DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	1.300.000.000,00	701.146.177,00	598.853.823,00	53,93
DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya	1.400.000.000,00	1.301.400.864,00	98.599.136,00	92,96
DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	5.396.188.000,00	0,00	5.396.188.000,00	0,00
DAK Non Fisik-PK2UKM	2.352.080.000,00	2.131.649.256,00	220.430.744,00	90,63

Uraian	APBD	Realisasi	Sisa Anggaran	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.225.554.000,00	1.064.817.760,00	160.736.240,00	86,88
DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	533.102.000,00	533.102.000,00	0,00	100,00
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	454.595.000,00	454.595.000,00	0,00	100,00
DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan DAN Pertanian	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	**2.080.321.584.000,00**	**1.995.755.980.446,00**	**84.565.603.554,00**	**95,93**

(2) Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp32.468.699.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp32.468.699.000,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

a) Dana Insentif Daerah (DID)

Realisasi Dana Isentif Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp32.468.699.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp32.468.699.000,00. Dapat dirincikan pada Tabel 2.14:

Tabel 2.14

Realisasi Dana Penyesuaian Tahun Anggaran 2021

Uraian	APBD	Realisasi	Sisa Anggaran	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
Dana Insentif Daerah (DID)	32.468.699.000,00	32.468.699.000,00	0,00	100,00
Jumlah	**32.468.699.000,00**	**32.468.699.000,00**	**0,00**	**100,00**

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp7.787.710.004,00 atau 284,74% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp2.735.000.000,00. dengan rincian pada Tabel 2.15.

Tabel 2.15

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Tahun Anggaran 2021

Uraian	APBD	Realisasi	Sisa Anggaran	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	2.735.000.000,00	2.735.000.004,00	(4,00)	100,00
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	0,00	5.052.710.000,00	(5.502.710.000,00)	0,00
Jumlah	**2.735.000.000,00**	**7.787.710.004,00**	**(5.052.710.004,00)**	**284,74**

2.3.2. Indikator Pencapaian Target Kinerja Belanja

Indikator pencapaian target kinerja belanja yang sudah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Riau dapat dilihat pada Tabel 2.16.

Tabel 2.16

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2021

Uraian	APBD	Realisasi	Sisa Anggaran	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
Belanja Operasi	6.526.461.934.717,00	6.062.992.053.173,52	463.469.881.543,48	92,90
Belanja Modal	1.249.559.519.772,00	1.018.455.078.253,37	231.104.441.518,63	81,51
Belanja Tidak Terduga	46.373.907.506,00	245.808.686,00	46.128.098.820,00	0,53
Belanja Transfer	1.892.979.542.875,00	1.850.011.226.337,66	42.968.316.537,34	97,73
Jumlah	**9.715.374.904.870,00**	**8.931.704.166.450,55**	**783.670.738.419,45**	**91,93**

Realisasi Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp6.062.992.053.173,52 atau 92,90% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp6.526.461.934.717,00 dengan rincian pada Tabel 2.17.

Tabel 2.17

Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2021

Uraian	APBD	Realisasi	Sisa Anggaran	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
Belanja Pegawai	2.318.661.485.990,00	2.213.182.776.667,00	105.478.709.323,00	95,45
Belanja Barang dan Jasa	2.749.750.400.302,00	2.448.186.175.191,09	301.564.225.110,91	89,03
Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah	1.396.520.518.425,00	1.349.812.571.315,43	46.707.947.109,57	96,66
Belanja Bantuan Sosial	61.529.530.000,00	51.810.530.000,00	9.719.000.000,00	84,20
Jumlah	**6.526.461.934.717,00**	**6.062.992.053.173,52**	**463.469.881.543,48**	**92,90**

Realisasi Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.018.455.078.253,37 atau 81,51% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp1.249.559.519.772,00, dengan rincian pada Tabel 2.18.

Tabel 2.18

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2021

Uraian	APBD	Realisasi	Sisa Anggaran	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
Belanja Modal Tanah	801.982.178,00	801.221.880,00	760.298,00	99,91
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	340.432.504.177,00	259.296.406.464,29	81.136.097.712,71	76,17
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	280.525.464.255,00	239.980.341.418,23	40.545.122.836,77	85,55
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	577.701.191.645,00	470.432.878.695,85	107.236.312.949,15	81,43
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	50.098.377.517,00	47.944.229.795,00	2.154.147.722,00	95,70
Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	**1.249.559.519.772,00**	**1.018.455.078.253,37**	**231.104.441.518,63**	**81,51**

Realisasi Tidak Terduga

Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp245.808.686,00 atau 0,53% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp46.373.907.506,00, dengan rincian pada Tabel 2.19.

Tabel 2.19

Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2021

Uraian	APBD	Realisasi	Sisa Anggaran	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
Belanja Tidak Terduga	46.373.907.506,00	245.808.686,00	46.128.098.820,00	0,53
Jumlah	**46.373.907.506,00**	**245.808.686,00**	**46.128.098.820,00**	**0,53**

Realisasi Transfer

Realisasi Transfer Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.850.011.226.337,66 atau 97,73% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp1.892.979.542.875,00, dengan rincian pada Tabel 2.20.

Tabel 2.20

Realisasi Belanja Transfer Tahun Anggaran 2021

Uraian	APBD	Realisasi	Sisa Anggaran	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
TRANSFER-BAGI HASIL PENDAPATAN KE KAB/KOTA	**1.512.628.905.875,00**	**1.498.191.320.346,70**	**14.437.585.528,30**	**99,05**
Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	1.512.628.905.875,00	1.498.191.320.346,70	14.437.585.528,30	99,05
TRANSFER-BANTUAN KEUANGAN	**380.350.637.000,00**	**351.819.905.990,96**	**42.968.316.537,34**	**92,50**
Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	221.250.637.000,00	193.927.652.104,96	27.322.984.895,04	87,65
Bantuan Keuangan ke Desa	159.100.000.000,00	157.892.253.886,00	1.207.746.114,00	99,24
Jumlah	**1.892.979.542.875,00**	**1.850.011.226.337,66**	**42.968.316.537,34**	**97,73**

BAB 3

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Riau per 31 Desember 2021 disajikan sesuai dengan format sebagaimana diatur dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

3.1.1 Ikhtisar Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2021

Berikut disajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan untuk Pendapatan Daerah Provinsi Riau per 31 Desember 2021 setelah dikonversi sesuai dengan Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Riau per 31 Desember 2021 sebesar Rp4.050.468.591.143,44 atau 100,89% dari anggaran.

Tabel 3.1
Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan (Pendapatan)
Tahun Anggaran 2021

No.	Uraian	P-APBD (Rp)	Realisasi 2021	Realisasi 2020
			(Rp)	(Rp)
A	**Pendapatan Asli Daerah**	**4.014.678.028.946,00**	**4.050.468.561.143,44**	**3.333.176.032.497,57**
1	Pendapatan Pajak Daerah	3.312.414.331.190,00	3.327.500.336.694,85	2.783.421.363.943,00
2	Pendapatan Retribusi Daerah	17.215.784.040,00	13.790.515.597,00	12.480.391.250,00
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	117.402.606.804,00	117.417.430.069,00	88.442.501.751,00
4	Lain-lain PAD Yang Sah	567.645.306.912,00	591.760.278.782,59	448.831.775.553,57
B	**Pendapatan Transfer**	**5.166.277.886.478,00**	**5.324.745.236.758,00**	**5.286.397.816.405,00**
B.1	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan**	**5.133.809.187.478,00**	**5.292.276.537.758,00**	**5.266.154.198.405,00**
1	Dana Bagi Hasil Pajak	1.172.066.030.292,00	1.394.547.926.246,00	757.212.987.667,00
2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	426.037.614.186,00	446.588.672.066,00	1.075.685.391.564,00
3	Dana Alokasi Umum	1.455.383.959.000,00	1.455.383.959.000,00	1.432.349.278.000,00
4	Dana Alokasi Khusus	2.080.321.584.000,00	1.995.755.980.446,00	2.000.906.541.174,00
B.2	**Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya**	**32.468.699.000,00**	**32.468.699.000,00**	**20.243.618.000,00**
5	Dana Insentif Daerah	32.468.699.000,00	32.468.699.000,00	20.243.618.000,00
C	**Lain-lain Pendapatan Yang Sah**	**2.735.000.000,00**	**7.787.710.004,00**	**3.251.000.004,00**

No.	Uraian	P-APBD (Rp)	Realisasi 2021	Realisasi 2020
			(Rp)	(Rp)
1	Pendapatan Hibah	2.735.000.000,00	7.787.710.004,00	3.251.000.004,00
2	Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00
3	Pendapatan lainnya	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pendapatan	**9.183.690.915.424,00**	**9.383.001.507.905,44**	**8.622.824.848.906,57**

a. Pendapatan Asli Daerah

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Riau sebesar Rp4.050.468.561.143,44 atau 100,89% dari target. Komposisi Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain PAD yang Sahsebagaimana pada Tabel 3.1 di atas. Penerimaan terbesar Pendapatan Asli Daerah berasal dari Pajak Daerah sebesar Rp3.327.500.336.694,85 atau 100,46%, diikuti Pendapatan Lain lain PAD yang sah sebesar Rp591.760.278.782,59 atau 104,25%, sedangkan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp117.417.430.069,00 atau 100,01% dan Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp13.790.515.597,00 atau 80,10%.

b. Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp5.324.745.236.758,00 atau 103,07% dari target yang terdiri dari Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan sebesar Rp5.292.276.537.758,00. Sedangkan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya sebesar Rp32.468.699.000,00. Dengan demikian, kontribusi masing-masing sumber penerimaan dari dana perimbangan cukup besar terhadap APBD Pemerintah Provinsi Riau, berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam dan Dana Alokasi Khusus.

c. Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang sah sebesar Rp7.787.710.004,00 dari target Rp2.735.000.000,00 atau 284,74%.

Grafik 3.1 Komposisi Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2021

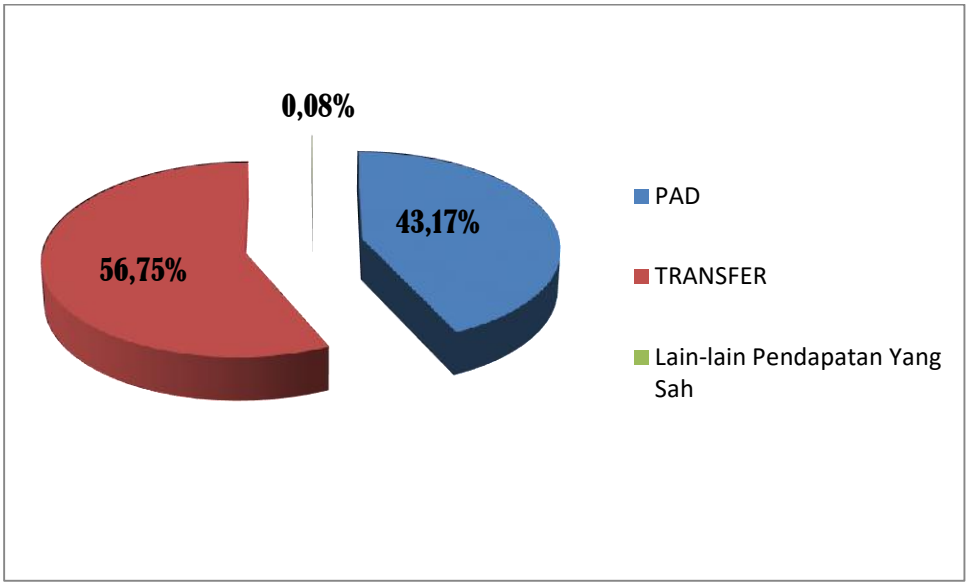

Masing-masing komponen sumber pendapatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021 pada grafik 3.1 tentang Komposisi Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2021 menunjukkan kontribusi terbesar yaitu Pendapatan Transfer dengan porsi mencapai 56,75%. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2021 mencapai 43,17% dan komponen Lain-lain Pendapatan Yang Sah sebesar 0,08% atau merupakan komponen yang memberikan kontribusi paling sedikit.

3.1.2 Ikhtisar Realisasi Belanja per 31 Desember 2021

Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. Perlindungan dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Belanja daerah mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, tolak ukur kinerja dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Struktur belanja dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau per 31 Desember 2021 diklasifikasikan menurut urusan

pemerintah daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggungjawab melaksanakan urusan pemerintahan tersebut sesuai peraturan perundang-undangan, terdiri dari beberapa urusan yaitu urusan wajib pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh 6 (enam) OPD, urusan wajib non pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh 11 (sebelas) OPD, urusan pilihan yang dilaksanakan oleh 6 (enam) OPD, penunjang urusan yang dilaksanakan oleh 6 (enam) OPD, pendukung yang dilaksanakan oleh 2 (dua) OPD dan pengawasan yang dilaksanakan oleh 1 (satu) OPD serta pemerintahan umum 1 (satu) OPD.

Berikut disajikan realisasi target kinerja Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021 setelah dikonversi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Realisasi Belanja disajikan pada Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2
Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan (Belanja)
Tahun Anggaran 2021

No	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
5.	**BELANJA & TRANSFER**	**9.715.374.904.870,00**	**8.931.704.166.450,55**	**8.172.706.474.595,31**
5.1.	**Belanja Operasional**	**6.526.461.934.717,00**	**6.062.992.053.173,52**	**5.530.031.193.127,87**
5.1.1.	Belanja Pegawai	2.318.661.485.990,00	2.213.182.776.667,00	2.153.065.317.382,00
5.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.749.750.400.302,00	2.448.186.175.191,09	2.077.147.295.142,17
5.1.3	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00
5.1.4	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
5.1.5	Hibah	1.396.520.518.425,00	1.349.812.571.315,43	1.270.812.795.429,70
5.1.6	Bantuan Sosial	61.529.530.000,00	51.810.530.000,00	29.005.785.174,00
5.2.	**Belanja Modal**	**1.249.559.519.772,00**	**1.018.455.078.253,37**	**919.245.593.570,52**
5.2.1.	Belanja Tanah	801.982.178,00	801.221.880,00	10.060.769.600,00
5.2.2.	Belanja Peralatan dan Mesin	340.432.504.177,00	259.296.406.464,29	281.774.431.712,00
5.2.3.	Belanja Gedung dan Bangunan	280.525.464.255,00	239.980.341.418,23	172.213.274.099,21
5.2.4.	Belanja Jalan. Irigasi. dan Jaringan	577.701.191.645,00	470.432.878.695,85	403.654.823.625,31
5.2.5.	Belanja Aset Tetap Lainnya	50.098.377.517,00	47.944.229.795,00	51.395.454.534,00
5.2.6.	Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00	146.840.000,00

No	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
5.3.	**Belanja Tidak Terduga**	**46.373.907.506,00**	**245.808.686,00**	**99.091.636.754,00**
5.3.1	Belanja Tak Terduga	46.373.907.506,00	245.808.686,00	99.091.636.754,00
5.4.	**Transfer**	**1.892.979.542.875,00**	**1.850.011.226.337,66**	**1.624.338.051.142,92**
	TRANSFER-BAGI HASIL PENDAPATAN KE KAB/KOTA	**1.512.628.905.875,00**	**1.498.191.320.346,70**	**1.194.074.600.669,92**
5.4.1	Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	1.512.628.905.875,00	1.498.191.320.346,70	1.194.074.600.669,92
	TRANSFER-BANTUAN KEUANGAN	**380.350.637.000,00**	**351.819.905.990,96**	**430.263.450.473,00**
5.4.2	Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	221.250.637.000,00	193.927.652.104,96	295.460.920.473,00
5.4.3	Bantuan Keuangan ke Desa	159.100.000.000,00	157.892.253.886,00	134.802.530.000,00
5.4.4	Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	0,00	0,00

Secara keseluruhan, realisasi belanja dan transfer sebesar Rp8.931.704.166.450,55 atau 91,93% dari anggaran Rp9.715.374.904.870,00 dengan rincian sebagai berikut.

a. Belanja Operasi

Realisasi belanja operasi secara keseluruhan sebesar Rp6.062.992.053.173,52 atau 92,90% dari anggaran. Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp2.213.182.776.667,00 atau 95,45% dari anggaran. Belanja barang dan jasa sebesar Rp2.448.186.175.191,09 atau 89,03% dari anggaran. Belanja hibah sebesar Rp1.349.812.571.315,43 atau 96,66% dan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp51.810.530.000,00 atau 84,20% dari anggaran.

b. Belanja Modal

Realisasi belanja modal secara keseluruhan sebesar Rp1.018.455.078.253,37 atau 81,51% dari anggaran. Belanja modal terdiri dari Belanja tanah sebesar Rp801.221.880,00 atau 99,91% dari anggaran. Belanja peralatan dan mesin sebesar Rp259.296.406.464,29 atau 76,17% dari anggaran. Belanja gedung dan bangunan sebesar Rp239.980.341.418,23 atau 85,55% dari anggaran. Belanja jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp470.432.878.695,85 atau

81,43% dari anggaran, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp47.944.229.795,00 atau 95,70% dari anggaran.

c. Belanja Tak Terduga

Realisasi Belanja Tak Terduga sebesar Rp245.808.686,00 atau 0,53% dari dari anggaran Rp46.373.907.506,00.

d. Belanja Transfer

Realisasi belanja Transfer secara keseluruhan sebesar Rp1.850.011.226.337,66 atau 97,73% dari anggaran. Belanja Transfer terdiri dari Transfer-bagi Hasil Pendapatan ke Kabupaten/ Kota yaitu Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/ Kota terealisasi sebesar Rp1.498.191.320.346,70 atau 99,05% dari anggaran dan Transfer-Bantuan Keuangan yaitu Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya terealisasi sebesar Rp193.927.652.104,96 atau 87,65% dan Bantuan Keuangan ke Desa terealisasi sebesar Rp157.892.253.886,00 atau 99,24% dari anggaran.

Grafik 3.2 Komposisi Realisasi Belanja per 31 Desember 2021

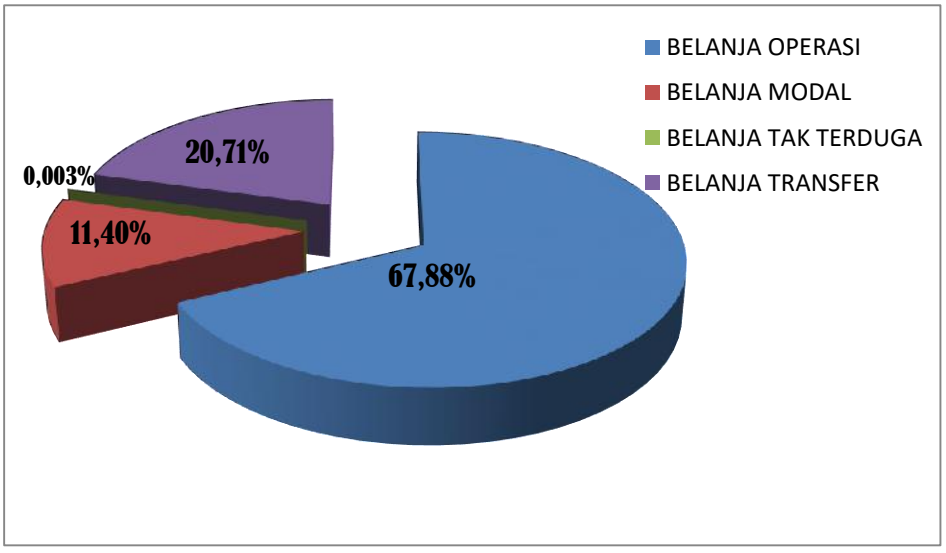

Masing-masing komponen belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021 pada grafik 3.2 tentang Komposisi Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2021 menunjukkan kontribusi terbesar yaitu Belanja Operasi dengan porsi mencapai 67,88%. Realisasi Belanja transfer Tahun Anggaran 2021 mencapai 20,71%, Realisasi Belanja Modal sebesar 11,40% dan Realisasi Belanja Tak Terduga sebesar 0,003% atau merupakan komponen yang memberikan kontribusi paling sedikit.

3.1.3 Ikhtisar Realisasi Pembiayaan per 31 Desember 2021

Realisasi Pembiayaan disajikan pada Tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.3

Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan (Pembiayaan)

Tahun Anggaran 2021

No.	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
A	**Penerimaan Pembiayaan**	**531.683.989.446,00**	**532.669.756.266,73**	**100,19**	**81.565.615.134,47**
1	Penggunaan SiLPA	531.683.989.446,00	531.683.989.445,73	100,00	81.216.115.134,47
2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	985.766.821,00	0,00	349.500.000,00
9	Penerimaan Pembiayaan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
B	**Pengeluaran Pembiayaan**	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Pembayaran Pinjaman dari Masyarakat (Obligasi Daerah)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00

Pembiayaan adalah upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam rangka menutup defisit anggaran atau memanfaatkan surplus anggaran. APBD Provinsi Riau menganggarkan penerimaan pembiayaan sebesar Rp531.683.989.446,00 dan terealisasi 100,19% pada Tahun Anggaran 2021. Tidak terdapat Pengeluaran Pembiayaan pada Tahun Anggaran 2021, sehingga SiLPA Tahun Anggaran berkenaan APBD Tahun 2021 sebesar Rp983.967.097.721,62.

Sesuai dengan Penjelasan Pasal 9 huruf Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, termasuk prestasi kerja yang dicapai atas penggunaan anggaran. Sementara itu, ketentuan penyajian prestasi kerja dinyatakan dalam Penjelasan Pasal 30 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang berbunyi ”Laporan Realisasi Anggaran selain menyajikan realisasi pendapatan dan belanja juga menjelaskan prestasi kerja setiap kementerian negara/ lembaga”. Istilah prestasi kerja yang dimaksud pada kedua undang-undang tersebut oleh Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah mendefinisikan Kinerja sebagai “keluaran/ hasil dari kegiatan/ program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur”.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah mempertegas kewajiban instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan prestasi kerja yang dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/ APBD, setiap entitas pelaporan wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan dan laporan kinerja. Pengungkapan informasi tentang kinerja ini adalah relevan dengan perubahan paradigma penganggaran pemerintah yang ditetapkan dengan melakukan identifikasi secara jelas terhadap keluaran (*output*) dari setiap kegiatan dan hasil (*outcome*) dari setiap program. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan. Sedangkan hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

3.2 Analisis Rasio Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

1. Rasio Kemandirian Keuangan Pemda

Kemandirian keuangan daerah dapat dilihat besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan penerimaan transfer dari pusat. PAD merupakan unsur utama dalam mengukur kemandirian keuangan daerah. Menurut Halim (2007:96) “PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber

ekonomi asli daerah". PAD bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah. Sehubungan dengan hal di atas setiap daerah diharapkan mampu meningkatkan PAD untuk mencapai daerah yang mandiri. Menurut Halim (2007: 232) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\textit{Rasio Kemandirian Daerah} = \frac{\textit{PAD}}{\textit{Bantuan Pusat + Pinjaman}}$$

Tabel 3.4
Kriteria Pola Hubungan Tingkat Kemandirian Dan Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0 - 25	Instruktif
Rendah	> 25 - 50	Konsultatif
Sedang	> 50 - 75	Partisipatif
Tinggi	> 75 - 100	Delegatif

Sumber: Hersey dan Kenneth (dalam Halim, 2001: 168)

1. Pola hubungan instruktif, yaitu peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah;
2. Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang dan lebih banyak pada pemberian konsultasi;
3. Pola hubungan partisipatif, yaitu pola dimana peranan pemerintah semakin berkurang mengingat tingkat kemandirian daerah otonom bersangkutan mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi; dan
4. Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada lagi karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

Tabel 3.5

Rasio Kemandirian Keuangan

Tahun	Realisasi PAD	Bantuan Pusat + Pinjaman	Rasio	Kemampuan Keuangan/Pola Hubungan
2017	3.110.656.139.756,52	3.832.270.533.335,00	81,17	Tinggi / Delegatif
2018	3.360.008.975.199,29	4.542.464.717.184,00	73,97	Sedang / Partisipatif
2019	3.638.995.740.121,15	4.839.995.284.845,00	75,19	Tinggi / Delegatif
2020	3.333.176.032.497,57	5.286.397.816.405,00	63,05	Sedang / Partisipatif
2021	4.050.468.561.143,44	5.324.745.236.758,00	76,07	Tinggi / Delegatif
Jumlah	**17.493.305.448.718,00**	**23.825.873.588.527,00**	**73,42**	**Sedang / Partisipatif**
Rata-Rata	**3.498.661.089.743,59**	**4.765.174.717.705,40**	**73,42**	**Sedang / Partisipatif**

Berdasarkan Tabel 3.5 di atas, diketahui bahwa Rasio Kemandirian Pemerintah Provinsi Riau rata – rata dari tahun 2017 hingga tahun 2021 sebesar 73,42%. Dimana Pemerintah Provinsi Riau memiliki Kriteria pola hubungan tingkat kemandirian dan kemampuan keuangan daerah yaitu partisipatif.

2. Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas berada pada kategori efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100%. Semakin tinggi Rasio Efektifitas memberikan makna bahwa kemampuan daerah semakin baik. (Halim, 2002: 129).

Rumus Rasio Efektifitas adalah sebagai berikut:

$$\frac{\textit{REALISASI PENERIMAAN PAD}}{\textit{TARGET PAD YANG DITETAPKAN}} \quad \textit{X} \quad \textit{100\%}$$

Tabel 3.6

Efektifitas Kinerja Keuangan

Kinerja Keuangan (%)	Kriteria
>100	Sangat Efektif
90-100	Efektif
80 - 90	Cukup Efektif
60 -80	Kurang Efektif
< 60	Tidak Efektif

Sumber: Kepmendagri Nomor 600.900.327 tahun 1996

Tabel 3.7

Rasio Efektifitas Keuangan

Tahun	Realisasi PAD	Target PAD	Rasio	KRITERIA
2017	3.360.008.975.199,29	3.859.298.000.000,00	87,06	Cukup Efektif
2018	3.638.995.740.121,15	3.963.964.459.139,25	91,80	Efektif
2019	3.558.210.585.339,97	3.609.065.922.066,65	98,59	Efektif
2020	3.333.176.032.497,57	3.316.666.329.545,05	100,50	Sangat Efektif
2021	4.050.468.561.143,44	4.014.678.028.946,00	100,89	Sangat Efektif
Jumlah	**17.940.859.894.301,40**	**18.763.672.739.696,90**	**95,61**	**Efektif**
Rata-Rata	**3.588.171.978.860,28**	**3.752.734.547.939,39**	**95,61**	**Efektif**

Dari perhitungan rasio efektivitas dapat dilihat bahwa efektivitas tahun 2017 sebesar 87,06%, pada tahun 2018 dan 2021 mengalami kenaikan efektifitas, dimana masing masingnya 2018 sebesar 91,80%, 2019 sebesar 98,59%, 2020 naik menjadi 100,50%, dan 2021 menjadi 100,89%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Provinsi Riau pada tahun 2021 sangat efektif dalam mengelola PAD nya.

3. Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100 persen. Semakin kecil rasio efisiensi menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah sebagai berikut:

Rasio Efisiensi = Realisasi Belanja / Target Pendapatan Daerah X 100 %

Tabel 3.8

Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

Kinerja Keuangan (%)	Kriteria
>100	Tidak Efisien
90-100	Kurang Efisien
80 - 90	Cukup Efesien
60 -80	Efisien
< 60	Sangat Efisien

Sumber: Kepmendagri Nomor 600.900.327 tahun 1996

Tabel 3.9

Rasio Efisiensi

Tahun	Realisasi Belanja	Target Pendapatan	Rasio	Kriteria
2017	7.381.284.086.264,57	9.055.407.856.981,00	81,51	Cukup Efisien
2018	6.809.189.205.683,28	9.236.880.300.120,25	73,72	Cukup Efisien
2019	6.852.842.437.187,00	9.426.063.395.934,65	72,70	Cukup Efisien
2020	6.548.368.423.452,39	8.736.933.522.998,05	74,95	Cukup Efisien
2021	7.081.692.940.112,89	9.183.690.915.424,00	77,11	**Sangat Efisien**
Jumlah	**34.673.377.092.700,10**	**45.638.975.991.457,90**	**75,97**	**Efisien**
Rata rata	**6.934.675.418.540,03**	**9.127.795.198.291,59**	**75,97**	**Efisien**

Berdasarkan hasil analisis Rasio efisiensi Provinsi Riau 2017 hingga 2021 diketahui bahwa pada periode anggaran tersebut Pemerintah Provinsi Riau dalam hal menjalankan tugas terkait perbandingan realisasi belanja terhadap pendapatan sudah termasuk dalam kategori efisien, dengan rata-rata Rasio 75,97%.

Rasio efisiensi Pemerintah Provinsi Riau tahun 2017 sebesar 81,51%, tahun 2018 sebesar 73,72%, tahun 2019 sebesar 72,70%, tahun 2020 sebesar 74,95%, tahun 2021 sebesar 77,11%.

4. Rasio Keserasian

Rasio keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunannya secara optimal. Menurut Halim (2012: 236) semakin tinggi presentase dana yang

dialokasikan untuk belanja rutin berarti presentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Selanjutnya rasio keserasian dapat di formulasikan sebagai berikut:

a. ***Rasio Belanja Operasi =***
   Total Belanja Operasi/ Total Belanja Daerah X 100
b. ***Rasio belanja modal =***
   Total Belanja Modal/ Total Belanja Daerah X 100

Rasio belanja operasional Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2021 dapat dilihat pada Tabel 3.10 berikut:

Tabel 3.10

Rasio Belanja Operasional

Tahun	Belanja Operasi	Belanja Modal	Total Belanja	Rasio
2017	5.440.068.904.417,82	1.941.215.181.846,75	7.381.284.086.264,57	73,70
2018	5.762.336.484.766,46	1.046.852.720.916,82	6.809.189.205.683,28	84,63
2019	5.691.804.968.334,82	1.161.037.468.852,18	6.852.842.437.187,00	83,06
2020	5.530.031.193.127,87	919.245.593.570,52	6.449.276.786.698,39	85,75
2021	6.062.992.053.173,52	1.018.455.078.253,37	7.081.447.131.426,89	85,62
Jumlah	**28.487.233.603.820,50**	**6.086.806.043.439,64**	**34.574.039.647.260,10**	**82,39**
Rata-Rata	**5.697.446.720.764,10**	**1.217.361.208.687,93**	**6.914.807.929.452,03**	**82,39**

Dari rasio diatas diketahui bahwa belanja operasional pemerintah masih mendominasi jumlah belanja APBD tahun 2017 sampai dengan 2021, namun persentase belanja operasional dibandingkan total belanja menunjukkan tren kenaikan dari 73,70% ditahun 2017 menjadi 84,63% di tahun 2018. Pada tahun berikutnya mengalami penurunan menjadi 83,06% di tahun 2019. Pada tahun 2020 Rasio belanja operasional pemerintah mengalami kenaikan menjadi 85,75%, akan tetapi ditahun 2021 turun menjadi 85,62%. Persentase rata rata Rasio Belanja Operasional Pemerintah Provinsi Riau selama lima tahun dari tahun 2017 – 2021 sebesar 82,39.

Tabel 3.11

Rasio Belanja Modal

Tahun	Belanja Operasi	Belanja Modal	Total Belanja	Rasio
2017	5.440.068.904.417,82	1.941.215.181.846,75	7.381.284.086.264,57	26,30
2018	5.762.336.484.766,46	1.046.852.720.916,82	6.809.189.205.683,28	15,37
2019	5.691.804.968.334,82	1.161.037.468.852,18	6.852.842.437.187,00	16,94
2020	5.530.031.193.127,87	919.245.593.570,52	6.449.276.786.698,39	14,25
2021	6.062.992.053.173,52	1.018.455.078.253,37	7.081.447.131.426,89	14,38
Jumlah	**28.487.233.603.820,50**	**6.086.806.043.439,64**	**34.574.039.647.260,10**	**17,61**
Rata-Rata	**5.697.446.720.764,10**	**1.217.361.208.687,93**	**6.914.807.929.452,03**	**17,61**

Berdasarkan rasio di atas diketahui bahwa belanja modal pemerintah dari tahun 2017 – 2018 mengalami penurunan. Ditahun 2019 Rasio Belanja Modal mengalami kenaikan menjadi sebesar 16,94%, akan tetapi ditahun 2020 Rasio Belanja Modal kembali mengalami penurunan persentasenya menjadi 14,25% dan hingga Tahun Anggaran 2021 Rasio Belanja Modal berada pada angka 14,38%. Rata – rata Rasio Belanja Modal untuk tahun 2017 – 2021 sebesar 17,61%.

Berdasarkan rasio ini, pembaca laporan keuangan dapat mengetahui porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dengan bentuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan. Belanja modal memberikan manfaat jangka menengah dan panjang juga bersifat rutin.

Belum ada patokan yang pasti berapa besarnya Rasio Belanja Operasi maupun Modal terhadap APBD ideal, karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan.

5. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai selama beberapa periode (Abdul Halim, 2012) . Jika pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran sudah diketahui, maka dapat digunakan untuk menilai potensi mana yang perlu mendapat perhatian. Rasio Pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau

selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negatif.

Menurut (Halim, 2008: 241) untuk rasio pertumbuhan yang semakin tinggi nilai Total Pendapatan Daerah, PAD, dan Belanja Modal yang diikuti oleh semakin rendahnya Belanja Operasi, maka pertumbuhannya adalah positif. Artinya bahwa daerah yang bersangkutan telah mampu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhannya dari periode yang satu ke periode berikutnya.

Rasio pertumbuhan = PAD t 1 – PAD t0 / PAD t 0 X 100%

Tabel 3.12.

Rasio Persentase Pertumbuhan PAD

Tahun	PAD tahun p-1	PAD tahun p	Rasio
1	2	3	4= (3-2) /2
2017	3.110.656.139.756,52	3.360.008.975.199,29	8,02
2018	3.360.008.975.199,29	3.638.995.740.121,15	8,30
2019	3.638.995.740.121,15	3.558.210.585.339,97	(2,22)
2020	3.558.210.585.339,97	3.333.176.032.497,57	(6,32)
2021	3.333.176.032.497,57	4.050.468.561.143,44	21,52
Jumlah	**17.001.047.472.914,50**	**17.940.859.894.301,40**	**5,53**
Rata-Rata	**3.400.209.494.582,90**	**3.588.171.978.860,28**	**5,53**

Dari perhitungan di atas dapat diketahui pertumbuhan APBD Provinsi Riau pada Tahun 2017, 2018 dan 2021 menunjukkan pertumbuhan positif. Sedangkan pada Tahun 2019 dan 2020 rasio pertumbuhan APBD Provinsi Riau mengalami pertumbuhan negatif, hingga pada Tahun Anggaran 2021 rasio pertumbuhan APBD Provinsi Riau mengalami pertumbuhan positif. Pertumbuhan pendapatan Provinsi Riau pada Tahun 2021merupakan pertumbuhan yang paling tinggi disebabkan karena meningkatnya Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Pendapatan Dana Perimbangan, Pendapatan Dana Penyesuaian.

6. Rasio Solvabilitas Pelayanan

Solvabilitas layanan menunjukkan kapasitas keuangan Pemerintah Daerah untuk menyediakan dan mempertahankan kualitas pelayanan publik yang dibutuhkan

dan diinginkan oleh masyarakat (Wang et al, 2007 dalam Ritonga, 2014). Indikator ini dihitung berdasar 5 rasio yaitu:

A. Total Ekuitas/ Jumlah Penduduk Rasio

Rasio total ekuitas per kapita merupakan perbandingan aktiva bersih yang dimiliki pemerintah keseluruhan terhadap jumlah penduduk. Aktiva bersih ini diperoleh dari selisih antara jumlah aset dengan kewajiban sehingga tersedia untuk memberikan layanan dimasa depan kepada masyarakat (IT. Ritonga, 2013) .

Tabel 3.13

Rasio Solvabilitas (A)

Tahun	Total Ekuitas (Rp)	Total Penduduk (Jiwa)	Rasio (Rp) / Jiwa
2017	31.401.554.120.424,60	6.657.911,00	4.716.427,44
2018	31.966.573.228.148,50	6.814.909,00	4.690.682,33
2019	32.734.736.335.268,70	6.971.745,00	4.695.343,32
2020	32.811.787.287.703,70	6.394.087,00	5.131.582,87
2021	32.347.067.347.275,80	6.493.597,00	4.981.378,94
Jumlah	**161.261.718.318.821,00**	**33.332.249,00**	**4.838.008,93**
Rata-Rata	**32.252.343.663.764,30**	**6.666.449,80**	**4.838.008,93**

Dari Tabel 3.13 Rasio Solvabilitas (A) tampak bahwa Rata – Rata Rasio Solvabilitas tahun 2017 s/d 2021 Pemerintah Provinsi Riau sebesar 4.838.008,93 Rupiah/ Jiwa dengan asumsi data jumlah penduduk masih merujuk pada data Hasil Sensus Penduduk Tahun 2021. Jadi, semakin tinggi rasio ekuitas terhadap jumlah penduduk maka semakin tinggi kemampuan Pemerintah daerah untuk melayani masyarakat di masa yang akan datang (IT. Ritonga, 2013).

B. Total Aset/ Jumlah Penduduk Rasio

Rasio total aset per kapita merupakan perbandingan jumlah sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah secara keseluruhan terhadap jumlah penduduk. Rasio ini mengukur potensi yang dimiliki pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (IT. Ritonga, 2013) .

Tabel 3.14

Rasio Solvabilitas (B)

Tahun	Total Aset (Rp)	Total Penduduk (Jiwa)	Rasio (Rp) /Jiwa
2017	31.546.206.684.045,20	6.657.911,00	4.738.153,86
2018	32.205.806.712.106,70	6.814.909,00	4.725.786,76
2019	33.062.037.908.475,40	6.971.745,00	4.742.290,19
2020	33.046.060.172.047,20	6.394.087,00	5.168.221,85
2021	32.661.359.359.579,40	6.493.597,00	5.029.779,24
Jumlah	**162.521.470.836.254,00**	**33.332.249,00**	**4.875.802,73**
Rata-Rata	**32.504.294.167.250,80**	**6.666.449,80**	**4.875.802,73**

Rata – rata Rasio Total Aset terhadap Jumlah Penduduk dari tahun 2017 hingga 2021 adalah sebesar 4.875.802,73 Rupiah/ Jiwa, dengan demikian semakin tinggi Rasio Aset terhadap Jumlah Penduduk maka semakin tinggi pula kemampuan Pemerintah daerah untuk melayani masyarakat menggunakan sumber daya yang dimiliki.

C. Total Aset Tetap/ Jumlah Penduduk Rasio

Rasio total aktiva tetap per kapita merupakan perbandingan akumulasi total aktiva tetap yang dimiliki pemerintah daerah secara keseluruhan terhadap jumlah penduduk. Total aktiva tetap adalah akumulasi sumber daya yang tersedia yang memiliki umur fungsional lebih dari dua belas bulan yang digunakan untuk pelayanan publik (IT. Ritonga, 2013) .

Tabel 3.15

Rasio Solvabilitas (C)

Tahun	Total Aset Tetap (Rp)	Total Penduduk (Jiwa)	Rasio (Rp) /Jiwa
2017	29.370.520.803.339,00	6.657.911,00	4.411.371,80
2018	29.762.874.683.846,80	6.814.909,00	4.367.317,99
2019	29.874.299.560.328,40	6.971.745,00	4.285.053,39
2020	30.035.685.584.228,50	6.394.087,00	4.697.415,84
2021	29.337.967.893.095,60	6.493.597,00	4.517.984,08
Jumlah	**148.381.348.524.838,00**	**33.332.249,00**	**4.451.585,27**
Rata-Rata	**29.676.269.704.967,60**	**6.666.449,80**	**4.451.585,27**

Dari Tabel 3.15 Rasio Solvabilitas (C) tampak bahwa Rata – Rata Rasio Solvabilitas tahun 2017 hingga 2021 Pemerintah Provinsi Riau sebesar 4.451.585,27 Rupiah/ Jiwa.

D. Total Belanja (harga konstan)/ Jumlah Penduduk Rasio

Rasio total belanja per kapita merupakan perbandingan antara jumlah pengeluaran umum dengan jumlah penduduk dimana, total pengeluaran yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa yang diberikan kepada masyarakat (IT. Ritonga, 2013) .

Tabel 3.16

Rasio Solvabilitas (D)

Tahun	Total Belanja (Rp)	Total Penduduk (Jiwa)	Rasio (Rp) /Jiwa
2017	9.188.724.957.588,14	6.657.911,00	1.380.121,33
2018	8.469.560.058.792,41	6.814.909,00	1.242.798,70
2019	8.690.390.951.116,70	6.971.745,00	1.246.515,89
2020	8.172.706.474.595,31	6.394.087,00	1.278.166,29
2021	8.931.704.166.450,55	6.493.597,00	1.375.463,27
Jumlah	**43.453.086.608.543,10**	**33.332.249,00**	**1.303.635,01**
Rata-Rata	**8.690.617.321.708,62**	**6.666.449,80**	**1.303.635,01**

Rata – rata Rasio Total Belanja terhadap Jumlah Penduduk dari tahun 2017 hingga realisasi Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar 1.303.635,01 Rupiah/ Jiwa. Semakin tinggi nilai rasio ini akan menunjukkan bahwa Pemerintah daerah tersebut semakin tidak efisien yang artinya total belanja/pengeluaran Pemerintah daerah baik dari internal maupun eksternal lebih besar dari jumlah penduduk yang ada (IT. Ritonga, 2013).

E. Total Belanja Modal/ Jumlah Penduduk

Rasio total belanja modal perkapita merupakan perbandingan antara jumlah belanja modal yang dialokasikan dibandingkan dengan jumlah penduduk dalam satu wilayah (IT. Ritonga, 2013) .

Tabel 3.17

Rasio Solvabilitas (E)

Tahun	Total Belanja Modal (Rp)	Total Penduduk (Jiwa)	Rasio (Rp) /Jiwa
2017	1.941.215.181.846,75	6.657.911,00	291.565,20
2018	1.046.852.720.916,82	6.814.909,00	153.612,13
2019	1.161.037.468.852,18	6.971.745,00	166.534,70
2020	919.245.593.570,52	6.394.087,00	143.764,95
2021	1.018.455.078.253,37	6.493.597,00	156.839,90
Jumlah	**6.086.806.043.439,64**	**33.332.249,00**	**182.610,12**
Rata-Rata	**1.217.361.208.687,93**	**6.666.449,80**	**182.610,12**

Berdasarkan Tabel 3.17 diatas, diketahui bahwa Rasio Solvabilitas rata – rata rasio total belanja modal terhadap jumlah penduduk dari tahun 2017 hingga realisasi pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar 182.610,12 Rupiah/ Jiwa.

Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Belanja Modal, hal ini berarti bahwa semakin tinggi Jumlah Penduduk suatu daerah, maka semakin tinggi pula Belanja Modal yang dikeluarkan pemerintah daerah tersebut. Mengingat bahwa besarnya jumlah penduduk akan berhadapan dengan seberapa cepat kemampuan bertambahnya jumlah alat-alat pemuas kebutuhan serta sarana dan prasarana (infrastruktur) untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

3.3 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

3.3.1 Permasalahan dan Solusi Penerimaan

Dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdapat berbagai hambatan dan permasalahan terutama menyangkut:

a. Keterbatasan sumber daya manusia di tingkat aparatur baik dari segi kuantitas maupun kualifikasi dalam bidang pengelolaan pendapatan daerah;
b. Kurangnya sosialisasi ke wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran membayar pajak;
c. Kurangnya kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak akan pentingnya pajak sebagai sumber anggaran dalam pembangunan daerah;
d. Tingginya faktor kesulitan yang dihadapi di lapangan sehingga pemungut pajak dan retribusi belum optimal dalam mencapai target;

e. Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang yang tersedia untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan bagi pemungut pajak;
f. Presentase Wajib Pajak yang melakukan pendaftaran ulang kendaraan mereka setelah pendaftaran pertama masih relatif rendah;
g. Animo Wajib Pajak untuk melakukan balik nama kendaraan mereka (BBN-KB II) masih rendah;
h. Masih adanya konsumen akhir yang memenuhi kebutuhan BBM nya tidak melalui Wajib Pungut (wapu) yang terdaftar;
i. Jumlah perusahaan Wajib Pajak Air Permukaan yang menggunakan alat ukur air permukaan yang tersegel dan terkalibrasi masih sedikit; dan
j. Masih banyak Wajib Pajak Air Permukaan yang belum terdata.

Upaya-upaya yang telah dilakukan dan yang akan dilakukan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerah adalah:

a. Meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan dan retribusi daerah melalui penyempurnaan regulasi, penyederhanaan prosedur, kemudahan akses pelayanan perpajakan/ retribusi daerah berbasis teknologi informasi;
b. Memperluas basis penerimaan, antara lain dengan mengidentifikasi wajib pajak/ retribusi baru dan potensial, memperbaiki basis data objek pajak/ retribusi, mendesain ulang dasar pengenaan pajak dan struktur besaran tarif retribusi, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pajak/ retribusi daerah dan memberikan insentif berupa pengurangan maupun pembebasan tarif pajak sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
c. Memperkuat proses pemungutan, dengan melakukan *review* dan revisi serta mempercepat penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pemungutan serta memperkuat kapasitas SDM pemungut pajak dan retribusi;
d. Meningkatkan pengawasan dengan melakukan pemeriksaan secara insidentil maupun berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak/ retribusi;
e. Meningkatkan efisiensi administrasi pemungutan pajak/ retribusi melalui penyederhanaan prosedur administrasi pemungutan pajak/ retribusi;

f. Meningkatkan peran dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan melalui perbaikan pelayanan, membangun sinergi dan kerjasama pemungutan pajak/ retribusi dengan Kabupaten/ Kota;
g. Meningkatkan kontribusi BUMD dalam penerimaan PAD;
h. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait optimalisasi penerimaan dana bagi hasil, DAU dan DAK;
i. Meningkatkan kinerja pemerintah daerah untuk mendapatkan Dana Insentif Daerah.

Upaya-upaya tersebut diatas merupakan bentuk usaha yang akan dilakukan untuk meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengelola potensi fiskal daerah, dimana pada dasarnya untuk meningkatan kemampuan pengelolaan fiskal dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah sebagai berikut:

1. Intensifikasi Pendapatan Daerah

Intensifikasi pendapatan daerah adalah upaya peningkatan pendapatan daerah melalui optimalisasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah. Upaya ini dilakukan untuk memaksimalkan pungutan penerimaan daerah yang berasal dari Penerimaan Asli Daerah (PAD). Upaya intensifikasi pendapatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

a. Penyempurnaan dasar hukum (regulasi) pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah, penyederhanaan prosedur, kemudahan akses pelayanan perpajakan/ retribusi daerah berbasis teknologi informasi;
b. Membuat kebijakan relaksasi pajak dengan pemberian keringanan atas denda/ sanksi dan tunggakan pajak/ retribusi daerah dan pembebasan pembayaran untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
c. Optimalisasi pendapatan pajak daerah dengan menerapan aplikasi penerimaan pajak secara elektronik (*on-line system*) serta peningkatkan pengelolaan penerimaan retribusi daerah berbasis elektronik;
d. Optimalisasi penerapan SIGNAL (Samsat Digital Nasional) dengan kanal pembayaran melalui *mobile banking* dan penambahan *multichannel* bank;
e. Optimalisasi pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui penambahan unit Samsat Keliling, Samsat Transaksi Antar Jemput Antar

Kampung (Samsat Tanjak), *Samsat Drive Thru*, Mall Pelayanan Publik dan *Samsat Payment Point* bekerjasama dengan Bank Riau Kepri;

f. Optimalisasi kinerja BUMD untuk mendukung peningkatan pendapatan dan daya saing daerah serta peningkatan kinerja pengelolaan BLUD;
g. Inventarisasi, optimalisasi dan pemberdayaan/ revitalisasi aset daerah untuk peningkatan pendapatan dan mendukung prioritas pembangunan daerah (Kemiskinan, Pengangguran dan Pangan);
h. Pemutakhiran data objek pajak/ retribusi melalui Pendataan wajib pajak/ retribusi dan Pemutakhiran data administrasi wajib pajak kendaraan bermotor;
i. Verifikasi dan pemeriksaan terhadap wajib pajak *self assessment*;
j. Monitoring, evaluasi dan pemeriksaan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi di tingkat OPD/ unit kerja;
k. Penagihan piutang pajak dan pemberian sanksi administratif dan penegakan hukum terhadap wajib pajak/ rertibusi;
l. Penagihan deviden kepada BUMD yang belum menyetorkan deviden ke kas daerah;
m. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan pajak melalui peningkatan kemampuan aparat pemungut pajak /retribusi, pembenahan dan standarisasi ruang pelayanan Samsat, melaksanakan transaksi non tunai/ *cashless* untuk seluruh jenis penerimaan daerah serta pengembangan standar operasional dan prosedur di setiap kantor unit pelayanan pendapatan.

2. Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Ekstensifikasi pendapatan daerah adalah upaya peningkatan pendapatan daerah melalui perluasan dan atau penambahan objek pungutan baru. Upaya ekstensifikasi pendapatan daerah dilakukan sebagai berikut:

a. Penambahan objek pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan baru serta penyesuaian tarif dengan pemberlakukan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah;
b. Penambahan Unit Pelayanan Kesamsatan ke daerah-daerah potensi yang jauh dari jangkauan serta serta pengembangan titik layanan yang melibatkan partisipasi masyarakat di pedesaan;

c. Kerjasama pertukaran data konsumsi konsumen pengguna bahan bakar dengan Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas, serta mengupayakan integrasi sistem pertukaran data dan informasi secara *real time*;
d. Kerjasama dengan stakeholder dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak serta melakukan sosialisasi kepada wajib pajak dan wajib retribusi;
e. Peningkatan kerjasama dengan instansi vertikal dalam rangka optimalisasi peningkatan penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak, DAU dan DAK serta mengajukan permohonan ke Pemerintah Pusat untuk menyalurkan Kewajiban kurang bayar Dana Bagi Hasil kepada daerah;
f. Optimalisasi realisasi dari potensi PBB-P3 dan PPh melalui kerjasama dengan Kantor Wilayah Direktur Jenderal Pajak Riau Kepri; dan
g. Mengupayakan memasukkan DBH Kelapa Sawit kedalam rancangan revisi Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dimana salah satunya pasal 11 ayat 3 dengan menambahkan satu poin sektor perkebunan kelapa sawit yang merupakan Sumber Daya Alam yang dapat diperbaharui seperti sektor kehutanan dengan Sumber Daya Hutan Tanaman Industri (HTI) dan sektor perikanan seperti budidaya perikanan., disebabkan daerah penghasil perkebunan berhak memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya terhadap potensi perkebunan dengan mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosial.

3.3.2 Permasalahan dan Solusi Pengeluaran

Terdapat beberapa permasalahan yang masih dihadapi dalam pengelolaan belanja Pemerintah Daerah Provinsi Riau pada tahun anggaran 2021, antara lain:

a. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mengalami keterlambatan disebabkan oleh proses pelaksanaan anggaran yang belum sepenuhnya dapat mengikuti jadwal waktu (*time schedule*) yang ideal. Hal memiliki hubungan secara langsung dengan adanya perubahan regulasi yang mengatur tentang pengelolaaan keuangan daerah yaitu dengan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

b. Berlakunya Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang juga berlaku bagi seluruh Pemerintah Daerah di Indonesia tanpa terkecuali menyebabkan waktu yang tersedia untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berkurang, sehingga berakibat lebih lanjut pada dana yang ada dan telah dialokasikan untuk kegiatan pembangunan tidak dapat dimanfaatkan secara optimal;
c. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur dikaitkan dengan beban kerja yang ada, sehingga program dan kegiatan sebagian tidak tertangani secara optimal;
d. Faktor eksternal yang dapat dikendalikan yaitu menyangkut kemampuan kontraktor dalam menyelesaikan kontrak/ perjanjian;
e. Defisit yang terjadi pada kas negara yang menyebabkan adanya penundaan pada penyaluran Dana Bagi Hasil Pusat di setiap daerah;
f. Adanya rasionalisasi anggaran, sehingga terdapat beberapa belanja pada Organisasi Perangkat Daerah tidak dapat direalisasikan pada Tahun Anggaran 2021; dan
g. Faktor Bencana Non Alam berupa Pandemi COVID-19 yang masih terus berlangsung sepanjang tahun 2021 baik secara langsung maupun tidak langsung telah menekan beberapa sektor kegiatan yang seyogyanya bisa menyerap anggaran yang telah di alokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021.

Untuk memperbaiki permasalahan tersebut. Langkah strategis yang akan diambil adalah:

a. Proses penganggaran dilaksanakan sesuai dengan jadwal waktu yang ditentukan menurut peraturan perundang-undangan, sehingga dana yang tersedia dapat digunakan seoptimal mungkin untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
b. Meningkatkan kemampuan aparatur melalui berbagai pendidikan dan pelatihan baik formal maupun informal sehingga tercapai efisiensi dan efektivitas kinerja SDM aparatur;

c. Membentuk tim evaluasi percepatan penyerapan APBD dengan terus melakukan evaluasi secara berkelanjutan guna mengetahui permasalahan yang terjadi dan mencari solusinya;
d. Meningkatkan evaluasi dan pengawasan terhadap kualifikasi dan kemampuan kontraktor sehingga kualitas pemilihan rekanan pelaksana pekerjaan menjadi lebih baik; dan
e. Sehubungan dengan Pandemi COVID-19 pada Tahun Anggaran 2021 hal-hal yang berkaitan dengan sektor kegiatan yang terdampak oleh pembatasan aktifitas yang berkenaan langsung dalam upaya mencegah penularan yang lebih luas di sikapi dengan mengalihkan dan menyesuaikan pada kegiatan yang lebih memungkinkan untuk di realisasikan pada Era *New Normal*.

Pemerintah Provinsi Riau berupaya mengatasi keterbatasan-keterbatasan dalam pengelolaan keuangan daerah dengan menyempurnakan manajemen keuangan, mengoptimalkan kualitas sumber daya manusia yang ada, melakukan efisiensi dan penghematan, mempertajam prioritas dan berupaya untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang baru dan meningkatkan penerimaan keuangan baik dari pemerintah pusat maupun dari daerah sendiri.

BAB 4
KEBIJAKAN AKUNTANSI

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan bahwa Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
2. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang ber asal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan etitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode berjalan.

Sedangkan tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
2. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021 menggunakan basis akrual yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang di sempurnakan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Peraturan Gubernur Riau Nomor 67 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 41 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Riau Berbasis Akrual yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL);
3. Neraca;
4. Laporan Operasional (LO);
5. Laporan Arus Kas (LAK);
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan;
7. Catatan atas Laporan Keuangan.

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas akuntansi kecuali Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh OPD yang mempunyai fungsi perbendaharaan yaitu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau, sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Badan Layanan Umum Daerah.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber

daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 merupakan konsolidasi dari Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku entitas akuntansi sebanyak 33 SKPD. Proses konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang ada antara SKPD dengan SKPD lainnya dengan atau tanpa mengeliminasi akun timbal balik. Sistem akuntansi pemerintahan daerah pada tingkat pemerintah daerah, dilaksanakan oleh SKPKD yang berada pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau. Sedangkan Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah pada tingkat SKPD dilaksanakan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD).

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan

Organisasi Perangkat kerja Daerah (OPD) Dinas Pendidikan, Dinas kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Sekretariat Daerah, Inspektorat, Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Lingkuangan Hidup dan Kehutanan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kepemudaan dan Olah Raga, Dinas Kebudayaan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata, Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan

Pengembangan, Badan Pendapatan Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pengembangan Sumber daya Manusia, Badan Penghubung, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, merupakan entitas akuntansi yang menyusun Laporan keuangan yang terdiri dari LRA, Neraca, LO, LPE dan CaLK, disusun berdasarkan struktur anggaran APBD sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Untuk menyusun laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), dilakukan konversi sesuai susunan akun yang ditetapkan dalam SAP dan Bagan Akun Standar (BAS) yang ditetapkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 238/PMK.05/2011 Tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku BUD yang diselenggarakan oleh SKPKD merupakan entitas pelaporan yang membuat Laporan keuangan yang terdiri dari LRA, LPSAL, Neraca, LO, LPE, LAK, dan CaLK, disusun berdasarkan struktur anggaran APBD sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Untuk menyusun laporan keuangan sesuai SAP, dilakukan konversi sesuai susunan akun yang ditetapkan dalam SAP dan BAS yang ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Dalam penyusunan Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, dan Laporan Operasional Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Daerah melalakukan pemetaan program dan kegiatan menurut Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur sesuai dengan Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Pemerintah Provinsi Riau telah menerapkan PSAP Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum dan Pasal 119 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yakni Laporan Arus Kas BLUD dikonsolidasikan pada Laporan Arus Kas unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2020 adalah Basis Akrual sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan. Beban diakui pada saat timbul kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan pemerintah daerah menggunakan nilai perolehan historis. Penggunaan nilai histors lebih dapat diandalkan daripada nilai yang lain, karena nilai perolehan lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang Rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu (menggunakan kurs tengah Bank Indonesia) dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah yang mengacu kepada Standar Akuntansi Pemerintah dan Buletin Teknisnya. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Riau telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 67 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 104 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Riau Berbasis Akrual.

Pemerintah Provinsi Riau dalam menyusun Laporan Keuangan tidak melakukan eliminasi terhadap transaksi antar SKPD seperti belanja bagi Dinas Kesehatan Provinsi Riau dan Pendapatan bagi RSUD Arifin Achmad kecuali Rekening Koran (RK PPKD dengan RK SKPD) agar tetap tersaji berapa belanja dan pendapatan masing-masing SKPD tersebut.

Kebijakan akuntansi berkaitan dengan Laporan keuangan dapat diikhtisarkan sebagai berikut:

4.4.1 Pendapatan-LRA

a. Definisi

1. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.
2. Pendapatan Transfer adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah daerah lain.
3. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung penerimaan daerah dan membayar pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

b. Pengakuan

1. Pendapatan-LRA diakui pada saat telah diterima di Rekening Kas Umum Daerah dan/atau diterima oleh Bendahara penerimaan SKPD.

2. Pendapatan yang telah diakui berarti pendapatan tersebut telah dicatat dalam catatan akuntansi untuk dilaporkan di dalam laporan realisasi anggaran.
3. Pencatatan dari setiap jenis pendapatan-LRA dan masing-masing nilai pendapatannya dicatat sampai dengan rincian obyek.
4. Koreksi dan pengembalian pendapatan yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan maupun periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA.
5. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA pada periode yang sama.
6. Koreksi dan pengembalian pendapatan yang tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan hanya oleh PPKD sebagai Belanja Tak Terduga pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.
7. Pendapatan berupa barang atau jasa tidak diakui di dalam LRA, melainkan diakui di dalam Laporan Operasional.

c. Pengukuran

1. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas *bruto*, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah *nettonya* (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
2. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan *bruto* (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka azas *bruto* dapat dikecualikan.
3. Pendapatan hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Sentral.

d. Pengungkapan

1. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan yang disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
2. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah.
3. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus.

4.4.2 Belanja

a. Definisi

1. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.
2. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah Pusat/Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
3. Belanja Langsung adalah belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan program/kegiatan.
4. Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program/kegiatan.
5. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud.
6. Belanja lain-lain/tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan daerah.
7. Belanja Transfer adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.

8. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung penerimaan daerah dan membayar pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

b. Pengakuan

1. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD.

2. Pengeluaran belanja yang dibayar dengan mekanisme LS (Langsung), yaitu belanja yang dibayar langsung dari Rekening Kas Umum Daerah, diakui pada saat SP2D-LS diterbitkan dan/atau diserahkan ke Bank untuk dicairkan.

3. Khusus pengeluaran belanja melalui bendahara pengeluaran, dengan menggunakan UP/GU/TU, pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dan/ atau oleh BUD/Kuasa BUD.

c. Pengukuran

1. Belanja dicatat sebesar nilai nominal brutonya, berdasarkan dokumen pengeluaran yang sah.

2. Nilai nominal *bruto* sebagaimana dimaksud pada paragraf di atas yaitu jumlah sebelum dikurangi dengan potongan-potongan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) seperti PPh, PPN, Iuran Taspen, Askes, dan potongan sejenis lainnya. Dokumen yang menjadi dasar pencatatan antara lain berupa SP2D-LS, bukti-bukti pengeluran SPJ belanja UP/GU/TU.

d. Pengungkapan

1. Pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.

2. Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah.

4.4.3 Pembiayaan

a. Definisi

1. Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
2. Surplus/defisit LRA adalah selisih lebih/kurang anatara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

b. Pengakuan

1. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada Rekening Kas Umum Daerah kecuali untuk SiLPA.
2. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah *nettonya* (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
3. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

c. Pengukuran

1. Pembiayaan dicatat sebesar kas yang diterima/dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
2. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah *nettonya* (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
3. Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas *bruto*.

d. Pengungkapan

1. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
2. Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah daerah.
3. Pengungkapan informasi lainya yang dianggap perlu.

4.4.4 Aset Lancar

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau berupa kas atau setara kas. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.

1. Kas dan Setara Kas

a. Definisi

1. Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah/investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

2. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan uang persediaan (UYHD-UP), saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

3. Kas terdiri dari Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas di Badan Layanan Umum Daerah.

4. Setara Kas terdiri dari simpanan di bank dalam bentuk deposito yang jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang dan investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid, bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan, serta memiliki masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang.

b. Pengukuran

Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing,

dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

c. Pengakuan

1. Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
2. Pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

2. Investasi Jangka Pendek

a. Definisi

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.

Investasi Jangka Pendek memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
2. Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas;
3. Berisiko rendah; dan
4. Jatuh tempo di atas 3 (tiga) bulan s.d. 12 (dua belas) bulan.

Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara lain terdiri atas:

1. Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*); dan
2. Pembelian Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek oleh pemerintah daerah dan pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

b. Pengukuran dan Penilaian

1. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya

perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

2. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

3. Investasi jangka pendek dalam bentuk nonsaham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

4. Penilaian investasi jangka pendek pemerintah daerah dilakukan dengan metode biaya.

c. Pengakuan

1. Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi salah satu kriteria :

b. Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah; dan

c. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

2. Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah daerah dan tidak diakui sebagai belanja maupun pengeluaran pembiayaan di dalam Laporan Realisasi Anggaran.

3. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan dividen tunai (*cash dividend*) dicatat sebagai pendapatan.

3. Piutang

a. Definisi

Piutang adalah hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Piutang diklasifikasikan sebagai aset lancar apabila diharapkan dapat diterima pembayarannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

b. Pengakuan

1. Secara umum, piutang diakui (dicatat) pada saat timbulnya hak tagih pemda yang dapat berasal dari pungutan pendapatan daerah, perikatan, transfer antar pemerintahan, maupun dari tuntutan ganti kerugian daerah.
2. Untuk pendapatan pajak daerah yang didahului dengan penerbitan surat ketetapan, piutang pajak daerah akan diakui seiring dengan pengakuan pendapatan pajak daerah pada saat penerbitan surat ketetapan pajak daerah yang bersangkutan.
3. Untuk pendapatan retribusi yang didahului dengan penerbitan surat ketetapan, piutang akan diakui pada akhir tahun bila terdapat selisih kurang bayar antara jumlah yang seharusnya diterima berdasarkan surat ketetapan retribusi daerah dengan jumlah yang telah diterima Pemda.
4. Untuk pendapatan transfer dari pemerintah pusat, seperti dana perimbangan (DAU, DBH, DAK) dan transfer lainnya, piutang akan diakui bila terdapat dokumen yang mengakui adanya kurang salur dari entitas penyalur.
5. Piutang yang berasal dari pemberian pinjaman kepada Pemda/institusi lain diakui pada saat dikeluarkannya kas dari Rekening Kas umum Daerah kepada institusi yang mendapat pinjaman.
6. Pinjaman Jangka Panjang kepada BUMD/Perusahaan Daerah (Investasi NonPermanen) yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun ke depan sejak tanggal pelaporan Neraca dapat direklasifikasikan ke dalam akun Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMD/Perusahaan Daerah (aset lancar).

7. Jumlah pada akun Tagihan Penjualan Angsuran (Aset Lainnya) yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun ke depan sejak tanggal pelaporan Neraca dapat direklasifikasikan ke akun Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (aset lancar-piutang lainnya).

8. Jumlah pada akun Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Daerah (Aset Lainnya) yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun ke depan sejak tanggal pelaporan Neraca dapat direklasifikasikan ke akun Bagian Lancar Tagihan Ganti Rugi atas Kekayaan Daerah (aset lancar-Piutang Lainnya).

9. Piutang Lainnya digunakan untuk mencatat piutang lainnya yang tidak dapat dicatat tersendiri dalam akun piutang di atas.

10. Penghentian pengakuan piutang (penghapusbukuan piutang) dilakukan bila piutang tersebut telah dilunasi berdasarkan bukti pembayaran yang sah. Selain itu, penghentian pengakuan piutang juga dapat terjadi karena penghapustagihan piutang (*write-off*) yang berarti hak tagih pemerintah dihapuskan, atau penghapusbukuan (*write-down*) saja yang berarti hak tagih pemerintah tetap masih ada. Penghentian pengakuan piutang (penghapusbukuan piutang) akibat penghapus tagihan maupun penghapusbukuan harus didukung dengan bukti yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, misalnya berupa keputusan pejabat yang berwenang untuk menghapustagih piutang dan/atau berita acara penghapusbukuan piutang.

c. Pengukuran

1. Secara umum, piutang dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

2. Piutang pajak/retribusi daerah dicatat sebesar jumlah pajak/retribusi daerah yang sudah ditetapkan di dalam Surat Ketetapan Pajak/Retribusi daerah yang sampai akhir periode (akhir tahun anggaran) belum dibayar oleh wajib pajak/retibusi daerah. Bila terdapat sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran pajak/retibusi daerah oleh wajib

pajak/retribusi daerah, jumlah sanksi administrasi tersebut dapat ditambahkan ke akun piutang pajak/retribusi daerah.

3. Piutang pendapatan transfer dari pemerintah pusat, seperti dana perimbangan (DAU, DBH, DAK) dan transfer lainnya, dicatat sebesar nilai nominal yang dinyatakan dalam dokumen kurang salur yang diterbitkan oleh entitas penyalur.

4. Bagian Lancar Pinjaman Jangka Panjang kepada BUMD/Perusahaan Daerah dicatat sebesar Pinjaman Jangka Panjang kepada BUMD/Perusahaan Daerah (kelompok Investasi Non Permanen) yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun ke depan sejak tanggal pelaporan Neraca.

5. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran dicatat sebesar jumlah Tagihan Penjualan Angsuran (kelompok Aset Lainnya) yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun ke depan sejak tanggal pelaporan Neraca.

6. Bagian Lancar Tagihan Ganti Rugi Kerugian Daerah dicatat sebesar jumlah Tuntutan Ganti Rugi Kerugaian Daerah (kelompok Aset Lainnya) yang akan akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun ke depan sejak tanggal pelaporan Neraca.

d. Penyisihan Piutang Tak Tertagih

1. Penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan estimasi persentase ketidaktertagihan terhadap saldo piutang yang masih ada pada akhir tahun.

2. Bersarnya estimasi persentase ketidaktertagihan piutang ditentukan berdasarkan umur piutang dan jenis piutang, dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Estimasi persentase ketidaktertagihan piutang berdasarkan umur piutang

No.	Uraian	Estimasi persentase ketidaktertagihan Piutang Berdasarkan Umur Piutang			
		0,5%	10%	50%	100%
		(Lancar)	(Kurang Lancar)	(Diragukan)	(Macet)
1.	Piutang Pajak	≤ 1 Tahun	>1 s.d. 2 Tahun	> 2 s.d. 5 Tahun	> 5 Tahun
2.	Piutang Retibusi	≤ 1 Bulan	> 1 s.d. 2 Bulan	> 3 s.d. 12 Bulan	> 1 Tahun
3.	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	≤ 1 Bulan	> 1 s.d. 2 Bulan	> 3 s.d. 12 Bulan	> 1 Tahun
4.	Piutang Lain-lain	Tanggal Jatuh Tempo s.d Tagihan Pertama	1 Bulan Sejak Tagihan Pertama	1 Bulan Sejak Tagihan Kedua	1 Bulan sejak Tagihan Ketiga

e. Penyajian

Penyajian nilai piutang di neraca disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu nilai nominal piutang dikurangi penyisihan piutang tak tertagih.

4. Persediaan

a. Definisi

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

b. Pengakuan

1. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

2. Pada akhir periode akuntansi (akhir tahun anggaran), persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*).

c. Pengukuran

1. Persediaan disajikan sebesar:
    a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
    b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; dan
    c. Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.
2. Persediaan dapat dinilai dengan menggunakan harga pembelian terakhir apabila setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis.
3. Persediaan yang memiliki nilai per unitnya relatif material, seperti peralatan/bangunan yang akan diserahkan/dijual kepada pihak ketiga/masyarakat dinilai dengan nilai perolehan per-unitnya masing-masing.
4. Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, seperti karcis peron, dinilai dengan biaya perolehan terakhir.

d. Pengungkapan

Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan berkaitan dengan persediaan adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
2. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
3. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

4.4.5 Investasi Jangka Panjang

a. Definisi

1. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari:

a. Investasi Permanen

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

b. Investasi NonPermanen

Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

b. Pengakuan

1. Suatu pengeluaran kas atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria berikut:

a. Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah; dan

b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

2. Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan di LRA dan diakui sebagai aset berupa Investasi Jangka Panjang di Neraca.

c. Pengukuran dan Penilaian

1. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

2. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah daerah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah daerah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

3. Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode, yaitu:

    a. Metode Biaya

    Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Pendapatan dari investasi tersebut (bagi hasil dari kekayaan daerah yang dipisahkan) dicatat sebesar bagian hasil yang diterima pemerintah daerah; dan tidak mempengaruhi besarnya akun investasi jangka panjang terkait.

    b. Metode Ekuitas

    Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

4. Penggunaan metode di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:
    a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
    b. Kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
    c. Kepemilikan 20% atau lebih menggunakan metode ekuitas; dan
    d. Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

5. Penyajian nilai investasi Dana Bergulir di Neraca berdasar nilai yang dapat direalisasi, yaitu nilai bruto dana bergulir dikurangi penyisihan dana bergulir tak tertagih.
6. Penyisihan dana bergulir tak tertagih dihitung berdasarkan estimasi persentase ketidaktertagihan terhadap saldo dana bergulir yang masih ada pada akhir tahun.
7. Bersarnya estimasi persentase ketidaktertagihan dana bergulir ditentukan berdasarkan kriteria kolektibilitas dana bergulir yang telah disalurkan.
8. Kriteria kolektibilitas dan persentase penyisihan untuk dana bergulir yang disalurkan melalui Bank Pembangunan Daerah Riau (PT Bank Riau Kepri), dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2
Kriteria Kolektibilitas Dan Persentase Penyisihan Untuk Dana Bergulir yang Disalurkan Melalui Bank Pembangunan Daerah Riau (Bank Riau Kepri)

No.	Kriteria	Kondisi	Prosentase Penyisihan
1.	Lancar	Tidak terjadi tunggakan (belum jatuh tempo)	1%
2.	Kurang Lancar	Tunggakan lebih dari 90 hari s.d. 180 hari	15%
3.	Diragukan	Tunggakan lebih dari 180 hari s.d. 270 hari	50%
4.	Macet	Tunggakan lebih dari 270 hari	100%

9. Kriteria kolektibilitas dan persentase penyisihan untuk dana bergulir yang disalurkan melalui Dinas Koperasi dan/atau SKPD Teknis lainnya, dapat dilihat pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3
Kriteria Kolektibilitas dan Persentase Penyisihan untuk Dana Bergulir yang disalurkan melalui Bank Pembangunan Daerah Riau (Bank Riau Kepri)

No.	Kriteria	Kondisi	Prosentase Penyisihan
1.	Lancar	Tunggakan 1 s.d. 3 bulan	0,5%
2.	Kurang Lancar	Tunggakan lebih dari 3 bulan s.d. 6 bulan	10%
3.	Diragukan	Tunggakan lebih dari 6 bulan s.d. 12 bulan	50%
4.	Macet	Tunggakan lebih dari 12 bulan	100%

d. Pengakuan Hasil Investasi

1. Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi.

2. Apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba yang diumumkan oleh investee akan diakui sebagai pendapatan investasi di Laporan Operasional dan menambah nilai investasi pemerintah daerah, sebesar bagian laba yang diumumkan dikalikan tingkat kepemilikan pemerintah daerah. Sebaliknya jika investee mengalami kerugian maka akan diakui sebagai kerugian investasi di Laporan Operasional dan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah. Sedangkan pembagian dividen tunai yang diterima oleh pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi di LRA dan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah.

3. Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak akan menambah nilai investasi pemerintah daerah.

e. Pelepasan dan Pemindahan Investasi

1. Pelepasan investasi pemerintah daerah dapat terjadi karena penjualan, dan pelepasan hak karena peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya.

2. Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada keuntungan/rugi (surplus/defisit) pelepasan investasi. Keuntungan/rugi pelepasan investasi disajikan dalam laporan operasional.

3. Penerimaan dari pelepasan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan.

f. Pengungkapan

Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah berkaitan dengan investasi pemerintah, antara lain:

1. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
2. Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen;

3. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
4. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut; dan
5. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya; Perubahan pos investasi.

4.4.6 Aset Tetap

a. Definisi

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

1. Tanah

   Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

2. Peralatan dan Mesin

   Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

3. Gedung dan Bangunan

   Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

   Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

5. Aset Tetap Lainnya

   Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

6. Konstruksi dalam Pengerjaan

   Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

b. Batasan Minimal Biaya Kapitalisasi

1. Sebuah aset berwujud untuk dapat dikategorikan sebagai aset tetap harus memiliki nilai lebih besar dari batas minimal kapitalisasi (*capitalization threshold*).

2. Batas minimal kapitalisasi aset tetap ditetapkan sebagai berikut:

   a. Pengeluaran untuk perolehan peralatan dan mesin dapat dikapitalisasi apabila nilai perolehannya di atas Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per unit;

   b. Pengeluaran untuk perolehan gedung dan bangunan dapat dikapitalisasi bila nilai perolehannya di atas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

3. Batas minimal kapitalisasi aset tetap di atas, dikecualikan untuk perolehan aset tetap berupa tanah, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya berupa buku koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

c. Pengakuan

1. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal, dengan kriteria sebagai berikut :

   a. Berwujud;
   b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
   c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
   d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
   e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

2. Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

3. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah daerah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual/ dihibahkan kepada masyarakat.

d. Pengukuran dan Penilaian

1. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

2. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau biaya konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

3. Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

4. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

e. Komponen Biaya

1. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau biaya konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

2. Biaya perolehan tanah mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan maupun yang masih harus dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

3. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dan yang masih harus dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
4. Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris.
5. Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.
6. Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.
7. Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli.
8. Biaya lain (selain harga beli/biaya konstruksi) yang dibayarkan dalam rangka memperoleh beberapa jenis aset tetap sekaligus akan dialokasikan ke jenis-jenis aset yang diperoleh tersebut berdasarkan perbandingan harga belinya. Contoh honor panitia pengadaan barang/PPTK atas pengadaan beberapa jenis item barang secara paket.
9. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

f. Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

g. Pertukaran Aset

1. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/ diserahkan.

2. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

3. Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas atau kewajiban lainnya, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

h. Aset Donasi

1. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

2. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah daerah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

3. Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.

4. Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut dapat diakui sebagai pendapatan pemerintah daerah di dalam Laporan Operasional dengan penjelasan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

i. Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)

1. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan apabila jumlahnya memenuhi batas minimal kapitalisasi.

2. Pengeluaran setelah perolehan aset tetap yang bersifat rutin dan ditujukan agar aset tetap dapat dioperasikan atau digunakan dalam keadaan yang normal dicatat sebagai belanja pemeliharaan, atau tidak menambah masa manfaat aset, tidak menambah nilai aset tetap yang bersangkutan.

j. Pengukuran Berikutnya Terhadap Pengakuan Awal (*Subsequent Measurement*)

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

k. Penyusutan

1. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

2. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

3. Penyusutan dilakukan terhadap aset tetap berupa:

   a. Peralatan dan Mesin;

   b. Gedung dan Bangunan;

   c. Jalan, Irigasi dan Jaringan; dan

   d. Aset Tetap Lainnya, berupa aset renovasi dan alat musik modern.

4. Penyusutan tidak dilakukan terhadap:

   a. Tanah;

   b. Konstruksi dalam Pengerjaan;

   c. Aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusan; dan

   d. Aset tetap yang rusak berat/usang dan telah diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusan.

5. Nilai yang dapat disusutkan pertama kali untuk aset tetap yang diperoleh sebelum tahun dimulainya penyusutan adalah nilai tercatat pada akhir tahun sebelum tahun dimulainya penerapan penyusutan aset tetap

6. Nilai yang dapat disusutkan untuk aset tetap yang diperoleh pada tahun dimulainya penyusutan dan tahun-tahun berikutnya adalah nilai perolehannya.

7. Penyusutan aset tetap dihitung terhadap harga perolehan secara semesteran. Hal ini berarti jika aset tetap diperoleh antara bulan Januari s.d. Juni, maka aset tersebut disusutkan satu tahun penuh. Sedangkan, jika aset tetap diperoleh antara bulan Juli s.d. Desember, maka aset tersebut disusutkan untuk setengah tahun.

8. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus untuk semua jenis aset tetap yang disusutkan, dengan formula:

$$\text{PENYUSUTAN} = \frac{\text{NILAI PEROLEHAN}}{\text{MASA MANFAAT}}$$

9. Nilai aset tetap yang dapat disusutkan tidak memperhitungkan nilai residu, diasumsikan bahwa aset tetap tidak memiliki nilai residu
10. Masa manfaat aset tetap yang disusutkan untuk masing-masing kelompok aset tetap dapat dilihat pada tabel Tabel 4.4.

Tabel 4.4
Masa Manfaat Aset Tetap

No	Uraian	Masa Manfaat (tahun)
	Alat Besar	
1	Alat Besar Darat	10
2	Alat Besar Apung	8
3	Alat Bantu	7
	Alat Angkutan	
4	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
5	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2
6	Alat Angkutan Apung Bermotor	10
7	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	3
8	Alat Angkutan Bermotor Udara	20
9	Alat Bengkel Bermesin	10
10	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
11	Alat Ukur	5
	Alat Pertanian	
12	Alat Pengolahan	4
	Alat Kantor dan Rumah Tangga	
13	Alat Kantor	5
14	Alat Rumah Tangga	5
	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	
15	Alat Studio	5
16	Alat Komunikasi	5
17	Peralatan Pemancar	10
18	Peralatan Komunikasi Navigasi	15
	Alat Kedokteran dan Kesehatan	
19	Alat Kedokteran	5

No	Uraian	Masa Manfaat (tahun)
20	Alat Kesehatan Umum	5
	Alat Laboratorium	
21	Unit Alat Laboratorium	8
22	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
23	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/elektronika	15
24	Alat Proteksi Radiasi/proteksi Lingkungan	10
25	Radiation Application & Non Destructive Testing Laboratory	10
26	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
27	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	15
28	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi & Instrumentasi	10
	Alat Persenjataan	
29	Senjata Api	10
30	Persenjataan Non Senjata Api	3
31	Senjata Sinar	5
32	Alat Khusus Kepolisian	4
	Komputer	
33	Komputer Unit	4
34	Peralatan Komputer	4
	Alat Eksplorasi	
35	Alat Eksplorasi Topografi	5
36	Alat Eksplorasi Geofisika	10
	Alat Pengeboran	
37	Alat Pengeboran Mesin	10
38	Alat Pengeboran Non Mesin	10
	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	
39	Sumur	10
40	Produksi	10
41	Pengolahan Dan Pemurnian	15
	Alat Bantu Eksplorasi	
42	Alat Bantu Eksplorasi	10
43	Alat Bantu Produksi	10
	Alat Keselamatan Kerja	
44	Alat Deteksi	5
45	Alat Pelindung	5
46	Alat Sar	2

No	Uraian	Masa Manfaat (tahun)
47	Alat Kerja Penerbangan	10
	Alat Peraga	
48	Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan	10
	Peralatan Proses/Produksi	
49	Unit Peralatan Proses/produksi	8
	Rambu-Rambu	
50	Rambu-rambu Lalu Lintas Darat	7
51	Rambu-rambu Lalu Lintas Udara	5
52	Rambu-rambu Lalu Lintas Laut	15
	Peralatan Olah Raga	
53	Peralatan Olah Raga	3
	Bangunan Gedung	
54	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
55	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
	Monumen	
56	Candi/tugu Peringatan/prasasti	50
	Bangunan Menara	
57	Bangunan Menara Perambuan	40
	Tugu Titik Kontrol/Pasti	
58	Tugu/tanda Batas	50
	Jalan dan Jembatan	
59	Jalan	10
60	Jembatan	50
	Bangunan Air	
61	Bangunan Air Irigasi	50
62	Bangunan Pengairan Pasang Surut	50
63	Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder	25
64	Bangunan Pengaman Sungai/pantai & Penanggulangan Bencana Alam	10
65	Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah	30
66	Bangunan Air Bersih/air Baku	40
67	Bangunan Air Kotor	40
	Instalasi	
68	Instalasi Air Bersih / Air Baku	30
69	Instalasi Air Kotor	30

No	Uraian	Masa Manfaat (tahun)
70	Instalasi Pengolahan Sampah	10
71	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
72	Instalasi Pembangkit Listrik	40
73	Instalasi Gardu Listrik	40
74	Instalasi Pertahanan	30
75	Instalasi Gas	30
76	Instalasi Pengaman	20
77	Instalasi Lain	5
	Jaringan	
78	Jaringan Air Minum	30
79	Jaringan Listrik	40
80	Jaringan Telepon	20
81	Jaringan Gas	30
	Barang Bercorak Kesenian	
82	Barang Bercorak Kesenian	4
83	**Aset dalam Renovasi**	5
84	**Alat Musik Modern**	5

11. Aset tetap yang mengalami *overhaul*/renovasi/perbaikan yang sifatnya dapat menambah masa manfaat, dapat berpatokan pada tabel 4.5.

Tabel 4.5
Penambahan Masa Manfaat Aset Tetap Overhaul/Renovasi

No	Uraian	Jenis	Persentasi biaya overhaul/ renovasi aset dari biaya perolehan sebelum overhaul/renovasi	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
	Alat Besar			
1	Alat Besar Darat	Overhaul	> 0% s.d 30%	1
			> 30% s.d 45%	3
			> 45% s.d 65%	5
			> 65%	6
2	Alat Besar Apung	Overhaul	> 0% s.d 30%	1
			> 30% s.d 45%	2
			> 45% s.d 65%	4

No	Uraian	Jenis	Persentasi biaya overhaul/ renovasi aset dari biaya perolehan sebelum overhaul/renovasi	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
			> 65%	5
3	Alat Bantu	Overhaul	> 0% s.d 30%	1
			> 30% s.d 45%	2
			> 45% s.d 65%	4
			> 65%	5
	Alat Angkutan			
4	Alat Angkutan Darat Bermotor	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	3
			> 75% s.d 100%	4
5	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	renovasi	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	1
			> 75% s.d 100%	1
6	Alat Angkutan Apung Bermotor	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	3
			> 50% s.d 75%	4
			> 75% s.d 100%	6
7	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	renovasi	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	1
			> 75% s.d 100%	2
8	Alat Angkutan Bermotor Udara	overhaul	> 0% s.d 25%	3
			> 25% s.d 50%	6
			> 50% s.d 75%	9
			> 75% s.d 100%	12

No	Uraian	Jenis	Persentasi biaya overhaul/ renovasi aset dari biaya perolehan sebelum overhaul/renovasi	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
	Alat Bengkel dan Alat Ukur			
9	Alat Bengkel Bermesin	overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	3
			> 75% s.d 100%	4
10	Alat Bengkel Tak Bermesin	renovasi	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	0
			> 50% s.d 75%	1
			> 75% s.d 100%	1
11	Alat Ukur	overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	2
			> 75% s.d 100%	3
	Alat Pertanian			
12	Alat Pengolahan	Overhaul	> 0% s.d 20%	1
			> 20% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	3
			> 75%	3
	Alat Kantor dan Rumah Tangga			
13	Alat Kantor	overhaul	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	2
			> 75% s.d 100%	3
14	Alat Rumah Tangga	overhaul	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	2
			> 75% s.d 100%	3

No	Uraian	Jenis	Persentasi biaya overhaul/ renovasi aset dari biaya perolehan sebelum overhaul/renovasi	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar			
15	Alat Studio	overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	2
			> 75% s.d 100%	3
16	Alat Komunikasi	overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	2
			> 75% s.d 100%	3
17	Peralatan Pemancar	overhaul	> 0% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	3
			> 50% s.d 75%	4
			> 75% s.d 100%	5
18	Peralatan Komunikasi Navigasi	overhaul	> 0% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	5
			> 50% s.d 75%	7
			> 75% s.d 100%	9
	Alat Kedokteran dan Kesehatan			
19	Alat Kedokteran	overhaul	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	2
			> 75% s.d 100%	3
20	Alat Kesehatan Umum	overhaul	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	2
			> 75% s.d 100%	3
	Alat Laboratorium			

No	Uraian	Jenis	Persentasi biaya overhaul/ renovasi aset dari biaya perolehan sebelum overhaul/renovasi	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
21	Unit Alat Laboratorium	overhaul	> 0% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	3
			> 50% s.d 75%	4
			> 75% s.d 100%	4
22	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	overhaul	> 0% s.d 25%	3
			> 25% s.d 50%	5
			> 50% s.d 75%	7
			> 75% s.d 100%	8
23	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/elektronika	overhaul	> 0% s.d 25%	3
			> 25% s.d 50%	5
			> 50% s.d 75%	7
			> 75% s.d 100%	8
24	Alat Proteksi Radiasi / proteksi Lingkungan	overhaul	> 0% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	4
			> 50% s.d 75%	5
			> 75% s.d 100%	5
25	Radiation Application & Non Destructive Testing Laboratory	overhaul	> 0% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	4
			> 50% s.d 75%	5
			> 75% s.d 100%	5
26	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	3
			> 75% s.d 100%	4
27	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	overhaul	> 0% s.d 25%	3
			> 25% s.d 50%	5
			> 50% s.d 75%	7

No	Uraian	Jenis	Persentasi biaya overhaul/ renovasi aset dari biaya perolehan sebelum overhaul/renovasi	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
			> 75% s.d 100%	8
28	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi & Instrumentasi	overhaul	> 0% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	4
			> 50% s.d 75%	5
			> 75% s.d 100%	5
	Alat Persenjataan			
29	Senjata Api	overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	3
			> 75% s.d 100%	4
30	Persenjataan Non Senjata Api	renovasi	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	0
			> 50% s.d 75%	1
			> 75% s.d 100%	1
31	Senjata Sinar	overhaul	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	0
			> 50% s.d 75%	0
			> 75% s.d 100%	2
32	Alat Khusus Kepolisian	overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	2
			> 75% s.d 100%	2
	Komputer			
33	Komputer Unit	overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	2
			> 75% s.d 100%	2

No	Uraian	Jenis	Persentasi biaya overhaul/ renovasi aset dari biaya perolehan sebelum overhaul/renovasi	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
34	Peralatan Komputer	overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	2
			> 75% s.d 100%	2
	Alat Eksplorasi			
35	Alat Eksplorasi Topografi	overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	2
			> 75% s.d 100%	3
36	Alat Eksplorasi Geofisika	overhaul	> 0% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	4
			> 50% s.d 75%	5
			> 75% s.d 100%	5
	Alat Pengeboran			
37	Alat Pengeboran Mesin	overhaul	> 0% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	4
			> 50% s.d 75%	6
			> 75% s.d 100%	7
38	Alat Pengeboran Non Mesin	renovasi	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	1
			> 75% s.d 100%	2
	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian			
39	Sumur	renovasi	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	1
			> 75% s.d 100%	2

No	Uraian	Jenis	Persentasi biaya overhaul/ renovasi aset dari biaya perolehan sebelum overhaul/renovasi	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
40	Produksi	renovasi	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	1
			> 75% s.d 100%	2
41	Pengolahan Dan Pemurnian	overhaul	> 0% s.d 25%	3
			> 25% s.d 50%	5
			> 50% s.d 75%	7
			> 75% s.d 100%	8
	Alat Bantu Eksplorasi			
42	Alat Bantu Eksplorasi	overhaul	> 0% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	4
			> 50% s.d 75%	6
			> 75% s.d 100%	7
43	Alat Bantu Produksi	overhaul	> 0% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	4
			> 50% s.d 75%	6
			> 75% s.d 100%	7
	Alat Keselamatan Kerja			
44	Alat Deteksi	overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	2
			> 75% s.d 100%	3
45	Alat Pelindung	renovasi	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	0
			> 50% s.d 75%	1
			> 75% s.d 100%	2
46	Alat Sar	renovasi	> 0% s.d 25%	0

No	Uraian	Jenis	Persentasi biaya overhaul/ renovasi aset dari biaya perolehan sebelum overhaul/renovasi	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	1
			> 75% s.d 100%	1
47	Alat Kerja Penerbangan	overhaul	> 0% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	3
			> 50% s.d 75%	4
			> 75% s.d 100%	6
	Alat Peraga			
48	Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan	overhaul	> 0% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	4
			> 50% s.d 75%	5
			> 75% s.d 100%	5
	Peralatan Proses/Produksi			
49	Unit Peralatan Proses/produksi	overhaul	> 0% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	3
			> 50% s.d 75%	4
			> 75% s.d 100%	4
	Rambu-Rambu			
50	Rambu-rambu Lalu Lintas Darat	overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	3
			> 75% s.d 100%	4
51	Rambu-rambu Lalu Lintas Udara	overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	2
			> 75% s.d 100%	4
52	Rambu-rambu Lalu Lintas Laut	overhaul	> 0% s.d 25%	1

No	Uraian	Jenis	Persentasi biaya overhaul/ renovasi aset dari biaya perolehan sebelum overhaul/renovasi	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
			> 25% s.d 50%	5
			> 50% s.d 75%	7
			> 75% s.d 100%	9
	Peralatan Olah Raga			
53	Peralatan Olah Raga	overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	2
			> 75% s.d 100%	2
	Bangunan Gedung			
54	Bangunan Gedung Tempat Kerja	renovasi	> 0% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 75%	15
			> 75% s.d 100%	50
55	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	renovasi	> 0% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 75%	15
			> 75% s.d 100%	50
	Monumen			
56	Candi/tugu Peringatan/prasasti	renovasi	> 0% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 65%	15
			> 65%	50
	Bangunan Menara			
57	Bangunan Menara Perambuan	renovasi	> 0% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 65%	15
			> 65%	40

No	Uraian	Jenis	Persentasi biaya overhaul/ renovasi aset dari biaya perolehan sebelum overhaul/renovasi	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
	Tugu Titik Kontrol/Pasti			
58	Tugu/tanda Batas	renovasi	> 0% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 65%	15
			> 65%	50
	Jalan dan Jembatan			
59	Jalan	renovasi	> 0% s.d 30%	2
			> 30% s.d 60%	5
			> 60% s.d 100%	10
60	Jembatan	renovasi	> 0% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 65%	15
			> 65%	50
	Bangunan Air			
61	Bangunan Air Irigasi	renovasi	> 0% s.d 5%	2
			> 5% s.d 10%	5
			> 10% s.d 20%	10
			> 20%	20
62	Bangunan Pengairan Pasang Surut	renovasi	> 0% s.d 5%	2
			> 5% s.d 10%	5
			> 10% s.d 20%	10
			> 20%	20
63	Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder	renovasi	> 0% s.d 5%	1
			> 5% s.d 10%	3
			> 10% s.d 20%	5
			> 20%	10
64	Bangunan Pengaman Sungai/pantai &	renovasi	> 0% s.d 5%	1

No	Uraian	Jenis	Persentasi biaya overhaul/ renovasi aset dari biaya perolehan sebelum overhaul/renovasi	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
	Penanggulangan Bencana Alam			
			> 5% s.d 10%	2
			> 10% s.d 20%	3
			> 20%	5
65	Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah	renovasi	> 0% s.d 5%	1
			> 5% s.d 10%	2
			> 10% s.d 20%	3
			> 20%	10
66	Bangunan Air Bersih/air Baku	renovasi	> 0% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 65%	15
			> 65%	40
67	Bangunan Air Kotor	renovasi	> 0% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 65%	15
			> 65%	40
	Instalasi			
68	Instalasi Air Bersih / Air Baku	renovasi	> 0% s.d 30%	2
			> 30% s.d 45%	7
			> 45% s.d 65%	10
			> 65%	30
69	Instalasi Air Kotor	renovasi	> 0% s.d 30%	2
			> 30% s.d 45%	7
			> 45% s.d 65%	10
			> 65%	30
70	Instalasi Pengolahan Sampah	renovasi	> 0% s.d 30%	1
			> 30% s.d 45%	3

No	Uraian	Jenis	Persentasi biaya overhaul/ renovasi aset dari biaya perolehan sebelum overhaul/renovasi	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
			> 45% s.d 65%	5
			> 65%	10
71	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	renovasi	> 0% s.d 30%	1
			> 30% s.d 45%	3
			> 45% s.d 65%	5
			> 65%	10
72	Instalasi Pembangkit Listrik	renovasi	> 0% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 65%	15
			> 65%	40
73	Instalasi Gardu Listrik	renovasi	> 0% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 65%	15
			> 65%	40
74	Instalasi Pertahanan	renovasi	> 0% s.d 30%	1
			> 30% s.d 45%	3
			> 45% s.d 65%	5
			> 65%	30
75	Instalasi Gas	renovasi	> 0% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 65%	15
			> 65%	30
76	Instalasi Pengaman	renovasi	> 0% s.d 30%	1
			> 30% s.d 45%	1
			> 45% s.d 65%	3
			> 65%	20
77	Instalasi Lain	renovasi	> 0% s.d 30%	1

No	Uraian	Jenis	Persentasi biaya overhaul/ renovasi aset dari biaya perolehan sebelum overhaul/renovasi	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
			> 30% s.d 45%	1
			> 45% s.d 65%	3
			> 65%	5
	Jaringan			
78	Jaringan Air Minum	overhaul	> 0% s.d 30%	2
			> 30% s.d 45%	7
			> 45% s.d 65%	10
			> 65%	30
79	Jaringan Listrik	overhaul	> 0% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 65%	15
			> 65%	40
80	Jaringan Telepon	overhaul	> 0% s.d 30%	2
			> 30% s.d 45%	5
			> 45% s.d 65%	10
			> 65%	20
81	Jaringan Gas	overhaul	> 0% s.d 30%	2
			> 30% s.d 45%	7
			> 45% s.d 65%	10
			> 65%	30
	Barang Bercorak Kesenian			
82	Alat Musik Modern/Band	overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	2
			> 75% s.d 100%	2
	Aset Tetap Renovasi			
83	Aset Tetap Renovasi - Peralatan Dan Mesin	overhaul	> 0% s.d 100%	2
84	Aset Tetap Renovasi - Gedung Dan Bangunan	renovasi	> 0% s.d 30%	5

No	Uraian	Jenis	Persentasi biaya overhaul/ renovasi aset dari biaya perolehan sebelum overhaul/renovasi	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
			> 30% s.d 45%	5
			> 45% s.d 65%	5
			> 65%	5
85	Aset Tetap Renovasi - Jalan, Irigasi, Dan Jaringan	renovasi/ overhaul	> 0% s.d 100%	5

l. Penilaian Kembali Aset Tetap (*Revaluasi*)

Penilaian kembali nilai aset tetap (revaluasi) hanya diizinkan dalam rangka penyusunan neraca pembukaan (neraca yang pertama kali disusun) dan apabila ada peraturan pemerintah yang mengharuskan dilakukannya revaluasi aset tetap secara nasional.

m. Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap (*Retirement* and *Disposal*)

1. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik di masa yang akan datang.

2. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

3. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

n. Konstruksi Dalam Pengerjaan

1. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada akhir periode (tanggal neraca) belum selesai dibangun/diperoleh seluruhnya.

2. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada

umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.

3. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

4. Konstruksi dalam pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahterimakan, yang didukung dengan bukti Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, akan direklasifikasi/dicatat ke akun aset tetap yang definitif sesuai dengan jenis asetnya.

5. Apabila sebagian aset yang sedang dibangun telah selesai, dan bagian aset tersebut telah digunakan, maka bagian aset yang telah digunakan tersebut masih tetap dicatat sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan.

o. Kontrak Konstruksi

1. Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama.

2. Kontrak konstruksi dapat meliputi :

   a. Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;

   b. Kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;

   c. Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan *value engineering*; dan

   d. Kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.

p. Penyatuan dan Segmentasi Kontrak Konstruksi

1. Ketentuan-ketentuan dalam kebijakan ini diterapkan secara terpisah untuk setiap kontrak konstruksi. Namun, dalam keadaan tertentu, adalah perlu untuk menerapkan kebijakan ini pada suatu komponen kontrak konstruksi tunggal yang dapat diidentifikasi secara terpisah atau suatu kelompok

kontrak konstruksi secara bersama agar mencerminkan hakikat suatu kontrak konstruksi atau kelompok kontrak konstruksi.

2. Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset, konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah apabila semua syarat di bawah ini terpenuhi :

   a. Proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset;

   b. Setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut; dan

   c. Biaya masing-masing aset dapat diidentifikasikan.

3. Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah sehingga konstruksi aset tambahan dapat dimasukkan ke dalam kontrak tersebut. Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi terpisah jika :

   a. Aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula; atau

   b. Harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula.

q. Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan

1. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan jika:

   a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;

   b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan

   c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

2. Konstruksi dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh

masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.

3. Konstruksi dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut terpenuhi :

   a. Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan

   b. Dapat memberikan manfaat/ jasa sesuai dengan tujuan perolehan.

r. Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan

1. Konstruksi dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan.

2. Nilai konstruksi dalam pengerjaan yang dikerjakan secara swakelola diukur berdasarkan jumlah uang yang telah dikeluarkan dan tidak memperhitungkan jumlah uang yang masih diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung yang dapat diatribusikan dengan kegiatan konstruksi.

3. Biaya langsung konstruksi dengan swakelola antara lain:

   a) Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;

   b) Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;

   c) Biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;

   d) Biaya penyewaan sarana dan peralatan; dan

   e) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.

4. Biaya tidak langsung yang dapat diatribusikan ke konstruksi dengan swakelola antara lain:

   a) Asuransi, misalnya asuransi kebakaran;

   b) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan

c) Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk konstruksi yang bersangkutan, seperti biaya inspeksi.

5. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:

   a) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;

   b) Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan; dan

   c) Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanan kontrak konstruksi.

6. Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasikan dan ditetapkan secara andal.

7. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi

8. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang bersangkutan.

9. Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.

10. Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat force majeur maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.

11. Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman

hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.

s. Aset Bersejarah (*Heritage Assets*)

1. Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (*archaeological sites*) seperti candi, dan karya seni (*works of art*).
2. Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dengan tanpa nilai.
3. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.
4. Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap pada umumnya.
5. Penyusutan untuk aset bersejarah yang digunakan dalam operasional kantor Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada paragraf 95 dihitung berdasarkan estimasi nilai wajar dibagi dengan estimasi masa manfaat sejak aset tetap tersebut mulai digunakan untuk operasional kantor.
6. Untuk aset bersejarah lainnya, potensi manfaatnya terbatas pada karakteristik sejarahnya, sebagai contoh monumen dan reruntuhan (*ruins*).

t. Pengungkapan

1. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut :
   a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat *(carrying amount*);

b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan :

1) Penambahan;

2) Pelepasan;

3) akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada; dan

4) mutasi aset tetap lainnya.

2. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan :

a) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;

b) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;

c) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan

d) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

3. Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi :

a) Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;

b) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;

c) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;

d) Uang muka kerja yang diberikan; dan

e) Retensi.

4. Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan :

a) Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;

b) Tanggal efektif penilaian kembali;

c) Jika ada, nama penilai independen; dan

d) Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti.

4.4.7 Dana Cadangan

a. Definisi

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

b. Pengakuan

1. Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan beberapa tahun anggaran untuk kebutuhan belanja pada masa datang.
2. Pembentukan maupun peruntukan dana cadangan harus diatur dengan peraturan daerah, sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain. Peruntukan dana cadangan biasanya digunakan untuk pembangunan aset, misalnya rumah sakit, pasar induk, atau gedung olahraga.
3. Dana cadangan dapat dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan. Apabila terdapat lebih dari satu peruntukan, maka dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.
4. Pembentukan Dana cadangan diakui pada saat terjadi pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Dana Cadangan berdasarkan bukti yang sah, seperti nota kredit rekening koran dan/atau SP2D, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Pengukuran dan Penilaian

1. Pencairan Dana cadangan dicatat sebesar jumlah yang dipindahbukukan dari Rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah berdasarkan bukti yang sah, seperti rekening koran bank dan/atau SP2D, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Penerimaan hasil bunga/dividen rekening dana cadangan dan penempatan dalam portofolio dicantumkan sebagai penambah dana cadangan berkenaan.

d. Pengungkapan

Pengungkapan informasi dana cadangan di dalam CaLK antara lain menyangkut tujuan pembentukan dana cadangan, dasar hukum, jangka waktu pencairan,

rekening tempat menyimpan dana cadangan dan sebagainya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4.4.8 Aset Lainnya

a. Definisi

1. Aset Lainnya adalah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.
2. Klasifikasi Aset Lainnya terdiri dari:
   a) Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;
   b) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
   c) Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
   d) Aset Tidak Berwujud; dan
   e) Aset Lain-Lain.
3. Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.
4. Tagihan Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses penagihan yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.
5. Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses penagihan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

6. Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.
7. Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa :
    a) Bangun, Guna, Serah (BGS); dan
    b) Bangun, Serah, Guna (BSG).
8. Bangun, Guna, Serah (BGS) adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi).
9. Bangun, Serah, Guna (BSG) adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
10. Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud antara lain adalah software aplikasi komputer, hak paten, hak cipta, hak merek, biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah.
11. Aset tidak berwujud antara lain meliputi:
    a) *Software* aplikasi komputer yang dipergunakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun, yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari *hardware* komputer.

b) Lisensi

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

c) Hak cipta (*copyright*) dan hak paten

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan.

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor (penemu) atas hasil invensi (temuan) di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

d) Hasil kajian/ penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang

Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau penelitian yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial di masa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset. Apabila hasil kajian tidak dapat diidentifikasi dan tidak memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial maka tidak dapat dikapitalisasi sebagai aset tidak berwujud.

Contoh bentuk hasil penelitian yang diakui sebagai aset tak berwujud, antara lain yaitu peta digital yang dikembangankan oleh beberapa instansi pemerintah pusat.

e) Aset tak berwujud dalam pengembangan

Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas

pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai aset tak berwujud dalam pengerjaan. Setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tak berwujud yang bersangkutan.

12. Pos Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, dan aset lain-lain. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang direklasifikasi ke aset lainnya karena dihentikan dari penggunaan aktif oleh SKPD dan belum dihapuskan

b. Pengakuan

1. Tagihan penjualan angsuran dicatat pada saat telah terjadinya penjualan angsuran yang ditetapkan dengan ditandatanganinya berita acara penjualan dan/ atau dokumen lainnya yang sah.

2. Tagihan TP/TGR diakui apabila telah memenuhi kriteria:

a) Telah ditanda tanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);

b) Telah diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) kepada pihak yang dikenakan tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah; atau

c) Telah ada putusan Lembaga Peradilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang menghukum seseorang untuk membayar sejumlah uang kepada pemerintah.

3. Aset kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap (tanah) menjadi aset lainnya (aset kemitraan).

4. Aset kemitraan berupa gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dalam rangka kerja sama BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan/ dioperasikan.

5. Setelah masa perjanjian kerja sama berakhir, aset kerjasama/kemitraan harus diaudit oleh aparat pengawas fungsional sebelum diserahkan kepada pengelola barang. Penyerahan kembali objek kerja sama beserta fasilitasnya kepada pengelola barang dilaksanakan setelah berakhirnya perjanjian dan dituangkan dlam berita acara serah terima barang.
6. Klasifikasi aset hasil kerja sama/kemitraan berubah dari 'Aset Lainnya' menjadi 'Aset Tetap' sesuai jenisnya, setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya oleh Kepala Daerah.
7. Untuk dapat diakui sebagai aset tak berwujud harus dapat dibuktikan bahwa aktivitas/kegiatan tersebut telah memenuhi definisi aset tak berwujud dan kriteria pengakuan.
8. Aset tak berwujud harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
    a) Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari aset tak berwujud tersebut akan mengalir/dinikmati oleh entitas; dan
    b) Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.
9. Aset tetap yang direklasifikasi menjadi aset lain-lain diakui/dicatat pada saat aset tetap tersebut dihentikan dari penggunaan aktif dan direklasifikasi ke aset lain-lain.

c. Pengukuran

1. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari perjanjian/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
2. Piutang TP/TGR dicatat sebesar tagihan sebagaimana yang ditetapkan dalam surat keterangan/ketetapan/keputusan adanya kerugian negara/daerah.
3. Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah.

4. Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) atau Surat Keputusan lain yang dipersamakan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.
5. Aset yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah untuk diusahakan dalam perjanjian kerja sama/kemitraan harus dicatat sebagai aset kerja sama/kemitraan sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
6. Dana yang ditanamkan Pemerintah Daerah dalam kerja sama/kemitraan dicatat sebagai penyertaan kerja sama/kemitraan. Di sisi lain, investor mencatat dana yang diterima tersebut sebagai kewajiban.
7. Aset hasil kerja sama yang telah diserahkan kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya, dicatat sebesar nilai bersih yang tercatat atau sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diserahkan, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
8. Aset tetap yang direklasifikasi ke aset lainnya dicatat sebesar nilai tercatatnya.

d. Amortisasi

1. Terhadap aset tak berwujud dapat dilakukan amortisasi selama masa manfaatnya, kecuali untuk aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tidak terbatas (misalnya, merek dagang).
2. Metode amortisasi menggunakan metode garis lurus.
3. Masa manfaat aset tak berwujud ditentukan pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6
Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

No	Uraian	Tahun
1	Software Komputer	4
2	Lisensi	10
3	Franchise	5
4	Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70
5	Hak Paten Sederhana	10

No	Uraian	Tahun
6	Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II	50
7	Hak Cipta Karya Seni Terapan	25
8	Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan	50
9	Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
10	Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran	20
11	Paten Biasa	20
12	Merk	10
13	Desain Industri	10
14	Rahasia Dagang	10
15	Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
16	Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
17	Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25

4. Aset tak berwujud yang tidak diamortisasi harus dievaluasi setiap tahun, apabila diperkirakan tidak memberikan manfaat ekonomi lagi di masa datang, aset tak berwujud tersebut dihapuskan dari pembukuan.

e. Pengungkapan

Hal-hal yang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) atas aset lainnya antara lain sebagai berikut:

1. Kebijakan akuntansi aset lainnya.
2. Penambahan maupun penurunan nilai tercatat aset lainnya selama tahun berjalan, sebagai akibat dari perolehan/ penambahan baru maupun penghapusan.
3. Hal-hal lainnya yang perlu diungkapkan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan.

4.4.9 Kewajiban

a. Definisi

1. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
2. Kewajiban jangka pendek adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang jatuh temponya dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

3. Kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang jatuh temponya lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

4. Utang PFK yaitu utang pemerintah daerah kepada fihak lain sehubungan kedudukan pemerintah daerah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti PPh, PPN, iuran Taspen, Askes, Taperum.

5. Utang Kepada Pihak Ketiga yaitu utang yang terkait dengan transaksi pengadaan barang dan jasa yang sudah diterima namun belum dibayar sampai dengan akhir tahun anggaran.

6. Utang bunga terjadi karena adanya penarikan pinjaman oleh pemerintah daerah. Sebagai contoh, utang bunga pinjaman kepada Pemerintah Pusat, utang bunga pinjaman kepada bank/lembaga keuangan lainnya, utang bunga pinjaman kepada pemerintah daerah lain, utang bunga obligasi daerah.

7. Utang transfer yaitu utang yang berasal dari belanja bagi hasil Pemda ke entitas pelaporan lainnya (pemerintah daerah lainnya/desa) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Bagian lancar utang jangka panjang adalah akun kewajiban yang merupakan reklasifikasi dari kewajiban jangka panjang yang akan dibayar (jatuh tempo) dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

9. Kewajiban jangka pendek lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban jangka pendek lainnya antara lain penerimaan pembayaran di muka atas transaksi penjualan barang/jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

10. Nilai nominal adalah nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah.

11. Nilai tercatat (*carrying amount*) kewajiban adalah nilai buku kewajiban yang dihitung dari nilai nominal setelah dikurangi atau ditambah diskonto atau premium yang belum diamortisasi.

b. Pengakuan

1. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada saat ini, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

2. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dapat timbul dari:
   a) Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*);
   b) Transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan;
   c) Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*); dan
   d) Kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).

3. Utang PFK diakui apabila pada akhir periode pelaporan (akhir tahun anggaran) masih terdapat saldo pungutan/potongan PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain yang terkait.

4. Utang kepada Pihak Ketiga yang diakui antara lain belanja langganan daya dan jasa seperti tagihan atas rekening listrik, telpon, air. Utang langganan daya dan jasa diakui pada saat tagihan dari pihak ketiga diterima.

5. Utang bunga diakui apabila pada akhir periode pelaporan telah muncul biaya bunga yang telah terjadi atau yang sudah menjadi kewajiban pemerintah daerah namun belum dibayar.

6. Kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan ke depan sejak tanggal pelaporan dapat direklasifikasi ke akun Bagian Lancar Kewajiban jangka Panjang yang dilaporkan di bawah kelompok Kewajiban jangka Pendek.

7. Kewajiban yang berasal dari penarikan pinjaman diakui pada saat dana diterima di rekening Kas Umum Daerah atau sesuai dengan yang dinyatakan di dalam kontrak perjanjian pinjaman.

c. Pengukuran

1. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
2. Utang PFK dicatat sebesar jumlah pungutan/ potongan PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain yang terkait sampai dengan akhir periode pelaporan (akhir tahun anggaran).
3. Utang bunga dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi atau yang sudah menjadi kewajiban pemerintah daerah, namun belum dibayar sampai dengan akhir periode pelaporan.
4. Bagian Lancar Kewajiban jangka Panjang dicatat sebesar jumlah kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan ke depan sejak tanggal pelaporan Neraca.
5. Kewajiban yang berasal dari penarikan pinjaman dicatat sebesar dana yang diterima di rekening Kas Umum Daerah.
6. Utang kepada Pihak Ketiga dicatat sebesar nilai pengadaan barang dan jasa yang sudah diterima oleh pemerintah daerah, namun belum dibayarkan sampai akhir periode pelaporan (akhir tahun anggaran).

d. Penyelesaian Kewajiban Sebelum Jatuh Tempo

e. Penyajian dan Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan antara lain adalah:

1. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman.
2. Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah daerah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah daerah dan jatuh temponya.
3. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku.
4. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo.
5. Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:

a) Pengurangan pinjaman;

b) Modifikasi persyaratan utang;

c) Pengurangan tingkat bunga pinjaman;

d) Pengunduran jatuh tempo pinjaman;

e) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan

f) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.

6. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umum utang berdasarkan kreditur.

4.4.10 Ekuitas

a. Definisi

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

b. Pengakuan/Pengukuran

1. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

2. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:

a) Ekuitas awal;

b) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;

c) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan, misalnya:

1) Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;

2) Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap; dan

3) Koreksi belanja/beban yang berasal dari periode sebelumnya setelah laporan keuangan diterbitkan.

d) Ekuitas akhir

Ekuitas akhir di dalam Laporan Perubahan Ekuitas dihitung dengan menambah/mengurangi saldo ekuitas awal tahun dengan surplus/defisit LO tahun berjalan dan koreksi-koreksi yang secara langsung menambah/mengurangi ekuitas.

4.4.11 Pendapatan-LO

a. Definisi

Pendapatan-LO, merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

b. Pengakuan

1. Secara umum, pengakuan pendapatan LO diakui pada saat:

a) Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); dan

b) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*) maupun masih berupa piutang (*realizable*).

2. Pendapatan Asli Daerah-LO

a) Pendapatan pajak daerah yang tidak didahului dengan surat penetapan akan diakui pada saat pendapatan tersebut telah diterima pembayarannya di Rekening Kas Umum Daerah dan/ atau diterima oleh bendahara penerimaan SKPD.

b) Pendapatan pajak daerah yang didahului dengan surat penetapan diakui pada saat penerbitan surat ketetapan pajak daerah (SKP Daerah) atau dokumen lain yang dipersamakan yang menunjukkan hak pemerintah daerah untuk memungut pajak tersebut.

c) Pendapatan pajak daerah dengan sistem *self-assessment* diakui pada saat diterima pembayaran dari wajib pajak dan pada saat diterbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar. Apabila wajib pajak ternyata lebih bayar, diterbitkan surat ketetapan pajak lebih bayar sebagai dasar untuk restitusi dan jurnal koreksi pengembalian pendapatan yang bersifat normal dan berulang.

d) Pendapatan Retribusi-LO akan diakui pada saat pendapatan tersebut telah diterima pembayarannya di Rekening Kas Umum Daerah dan/atau diterima oleh bendahara penerimaan SKPD. Khusus untuk retribusi yang didahului dengan penerbitan surat ketetapan/tagihan, jika terdapat jumlah retribusi yang masih belum diterima pembayarannya sampai akhir tahun anggaran, akan diakui sebagai pendapatan retribusi bersamaan dengan pengakuan piutang retribusi pada akhir tahun.

e) Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO diakui pada saat telah ada penetapan resmi hasil RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dan/atau berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang mengenai pembagian dividen.

f) Lain-Lain PAD yang Sah-LO yang didahului dengan surat ketetapan, pengakuannya dilakukan setelah SK tersebut ditetapkan.

g) Lain-Lain PAD yang Sah-LO tanpa surat ketetapan, pengakuannya dilakukan pada saat kas diterima.

3. Pendapatan Transfer-LO

a) Pendapatan transfer-LO dari pemerintah pusat berupa dana perimbangan (Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus) dan dana penyesuaian diakui pada saat pendapatan tersebut telah diterima di Rekening Kas Umum Daerah dan/atau bila terdapat surat ketetapan kurang salur dari entitas penyalur dana perimbangan/dana penyesuaian.

b) Pendapatan transfer-LO dari pemerintah daerah lainnya berupa bantuan keuangan, baik bantuan dengan syarat maupun tanpa syarat, diakui pada saat pendapatan tersebut telah diterima di Rekening Kas Umum Daerah.

4. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO

a) Pendapatan hibah diakui pada saat berita acara serah terima hibah telah ditandatangani oleh para pihak yang terkait.

b) Pendapatan hibah dalam bentuk kas dan/atau barang diakui saat naskah perjanjian hibah/berita acara hibah ditandatangani dan/atau pada saat kas/barang diterima pemerintah daerah.

c) Dana Darurat diakui pada saat telah diterima di rekening Kas Umum Daerah.

c. Pengukuran

1. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan nilai nominal pendapatan sebelum dikurangi dengan pengeluaran yang terkait dengan pendapatan tersebut.

2. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat di estimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

3. Pendapatan yang diakui setelah diterbitkannya surat ketetapan akan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum di dalam surat ketetapan dimaksud. Surat ketetapan sebagaimana dimaksud dapat berupa surat ketetapan pajak/ retribusi.

4. Demikian halnya pendapatan yang diakui tanpa surat ketetapan akan dicatat sebesar nilai nominalnya. Contoh, pendapatan jasa giro/bunga deposito akan dicatat sebesar nilai nominal kas yang diterima pemda.

5. Pendapatan berupa barang/jasa akan dicatat sebesar estimasi nilai wajar dari barang/jasa yang diterima pada tanggal transaksi. Contoh pendapatan hibah berupa barang atau hibah berupa jasa konsultasi.

6. Transaksi pendapatan dalam mata uang asing dicatat dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

d. Pengungkapan

Hal-hal yang perlu diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) terkait dengan pendapatan LO, antara lain mencakup:

1. Kebijakan akuntansi pengakuan dan pengukuran pendapatan LO;
2. Rincian dari setiap jenis pendapatan yang dilaporkan;

3. Informasi tambahan atas Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah (seperti informasi tentang pemberi hibah, bantuan keuangan, dsb);
4. Pendapatan berupa barang/jasa (jika ada); dan
5. Koreksi pendapatan (jika ada).

4.4.12 Beban-LO

a. Definisi

1. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

2. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, terdiri dari:

a) Beban pegawai;

b) Beban barang dan jasa;

c) Beban bunga;

d) Beban subsidi;

e) Beban hibah;

f) Beban bantuan sosial;

g) Beban penyusutan aset tetap/ amortisasi;

h) Beban transfer; dan

i) Beban tak terduga.

b. Pengakuan

1. Secara umum beban diakui pada saat:

a) timbulnya kewajiban;

b) terjadinya konsumsi aset; dan

c) terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

2. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak atau penyerahan barang/jasa dari pihak lain ke pemda tanpa diikuti keluarnya kas

dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemda.

3. Saat terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/ atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.

4. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan aset tetap.

5. Beban pegawai yang dibayar dengan mekanisme pembayaran langsung (LS), diakui pada saat SP2D-LS diterbitkan dan/atau diserahkan ke bank untuk dicairkan.

6. Beban pegawai yang dibayar oleh bendahara pengeluaran dengan menggunakan dana UP/GU/TU diakui setelah disahkannya SPJ belanja UP/GU/TU bendahara pengeluaran oleh PA/KPA.

7. Beban barang dan jasa yang dibayar oleh bendahara pengeluaran dengan menggunakan UP/GU/TU diakui setelah disahkannya SPJ belanja UP/GU/TU bendahara pengeluaran oleh PA/KPA.

8. Beban barang dan jasa yang dibayarkan secara LS diakui saat SP2D-LS diteribitkan dan/atau diserahkan ke bank.

9. Beban langganan daya dan jasa, seperti biaya listrik, telpon, internet, langganan air, dan sejenisnya diakui ketika tagihan beban langganan daya dan jasa tersebut telah diterima Pemda/SKPD.

10. Beban langganan daya dan jasa, seperti biaya listrik, telpon, internet, langganan air, dan sejenisnya untuk bulan Desember diakui sebagai utang beban pada tahun berkenaan sebesar tagihan yang diterima pada bulan Januari tahun berikutnya.

11. Beban persediaan yang diakui dalam laporan operasional (LO) adalah nilai persediaan yang telah dikonsumsi dan/atau yang dalam kondisi rusak/kedaluwarsa selama tahun berjalan.

12. Belanja yang dibayar dimuka, seperti belanja sewa kendaraan, diakui sebagai beban sewa untuk periode yang telah digunakan pemanfaatannya oleh pemda.

13. Beban penyusutan aset tetap dihitung semesteran, yaitu dengan asumsi jika aset diperoleh antara bulan Januari s.d. Juni, maka penyusutan pada tahun perolehan aset tersebut disusutkan satu tahun penuh. Sedangkan, jika aset diperoleh antara bulan Juli s.d. Desember, maka penyusutan pada tahun perolehan aset tersebut disusutkan untuk setengah tahun.

14. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih timbul dari adanya pembentukan penyisihan piutang tak tertagih yang bertujuan agar nilai piutang yang dilaporkan di dalam neraca menunjukkan nilai bersih yang dapat direalisasikan.

15. Beban bunga untuk suatu periode akuntansi diakui berdasarkan jumlah waktu pinjaman yang terhitung dalam periode bersangkutan.

16. Beban subsidi, hibah, bantuan keuangan, bantuan sosial, beban tak terduga, yang umumnya dibayar dengan mekanisme LS, diakui pada tanggal penerbitan SP2D LS atau tanggal penyerahan SP2D LS ke Bank.

17. Beban bagi hasil diakui pada tanggal penerbitan SP2D LS atau pada saat kewajiban Pemda timbul, apabila dokumen untuk pengakuan kewajiban tersebut memadai. Dalam hal pada akhir tahun anggaran terdapat pendapatan yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai utang beban.

18. Beban Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih timbul dari adanya pembentukan penyisihan dana bergulir tak tertagih yang bertujuan agar nilai dana bergulir yang dilaporkan di dalam neraca menunjukkan nilai bersih yang dapat direalisasikan.

c. Pengukuran

1. Beban-beban yang merupakan pengeluaran kas dicatat sebesar nilai nominal brutonya, berdasarkan dokumen pengeluaran yang sah.

2. Beban-beban yang bukan merupakan pengeluaran kas (non-kas), seperti beban penyusutan, beban persediaan, beban penyisihan piutang tak tertagih, dicatat berdasarkan nilai dari hasil perhitungan dengan menggunakan metode sebagaimana ditetapkan berdasarkan kebijakan akuntansi yang terkait.

3. Transaksi beban yang dibayar menggunakan mata uang asing dicatat dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

d. Pengungkapan

Hal-hal yang perlu diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) terkait dengan beban antara lain mencakup:

1. Kebijakan akuntansi pengakuan dan pengukuran beban;
2. Penjelasan tentang beban penyusutan aset tetap;
3. Kebijakan akuntansi persediaan;
4. Kebijakan akuntansi penyisihan piutang tak tertagih; dan
5. Koreksi beban (jika ada).

4.4.13 Surplus/Defisit-LO

a. Definisi

1. Surplus/Defisit secara umum diartikan sebagai selisih antara pendapatan dan beban.
2. Surplus/defisit dari penjualan aset non lancar adalah selisih antara hasil penjualan dengan nilai tercatat (nilai buku) dari aset non lancar

b. Pengukuran

1. Surplus/defisit dari kegiatan operasional adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan.
2. Selisih dari pendapatan-LO dan beban yang sifatnya tidak rutin dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.

3. Surplus/Defisit sebelum pos luar biasa merupakan penjumlahan antara surplus/defisit dari kegiatan operasional dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional.
4. Surplus/Defisit-LO merupakan penjumlahan antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan pos kejadian luar biasa.

4.4.14 Pos Luar Biasa

a. Definisi

Pos Luar Biasa merupakan pos yang memuat transaksi kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1. kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran; dan
2. tidak diharapkan terjadi berulang-ulang; dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah.

b. Penyajian dan Pengungkapan

1. Pos Luar Biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa.
2. Sifat dan jumlah rupiah kejadian luar biasa harus diungkapkan pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

BAB 5

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Rincian dan penjelasan masing-masing pos Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut.

5.1 Penjelasan Pos – Pos Laporan Realisasi Anggaran

Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Selanjutnya untuk pelaksanaan di Pemerintah Provinsi Riau ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan yaitu Peraturan Gubernur Riau Nomor 67 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 41 tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Riau Berbasis Akrual.

Penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sepenuhnya disajikan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Realisasi anggaran untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

5.1.1 Pendapatan Asli Daerah - Pajak Daerah

Tahun Anggaran 2021 merupakan tahun awal implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Sehingga berdampak pada perubahan Kodefikasi Rekening Akun pada APBD.

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2021 sebesar Rp3.327.500.336.694,85 atau 100,46% dari target sebesar Rp3.312.414.331.190,00. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2021 meningkat sebesar Rp544.078.972.751,85 atau 19,55% dibandingkan Tahun 2020 sebesar Rp2.783.421.363.943,00. Rincian Pajak Daerah adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)
Pajak Daerah	**3.312.414.331.190,00**	**3.327.500.336.694,85**	**100,46**	**2.783.421.363.943,00**
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	**1.276.770.171.663,00**	**1.224.103.784.037,00**	**95,88**	**1.109.848.684.824,00**
PKB-Mobil Penumpang-Sedan	**28.836.056.244,00**	**19.923.084.672,00**	**69,09**	**0,00**
PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi	27.354.805.589,00	19.676.659.172,00	71,93	0,00
PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Umum	1.139.309.400,00	42.548.500,00	3,73	0,00
PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Daerah	341.941.255,00	203.877.000,00	59,62	0,00
PKB-Mobil Penumpang-Jeep	**134.864.163.722,00**	**145.589.483.623,00**	**107,95**	**0,00**
PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pribadi	133.509.063.194,00	144.221.132.123,00	108,02	0,00
PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Umum	12.664.490,00	5.544.500,00	43,78	0,00
PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Daerah	1.342.436.038,00	1.362.807.000,00	101,52	0,00
PKB-Mobil Penumpang-Minibus	**533.390.363.739,00**	**539.146.339.061,00**	**101,08**	**0,00**
PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi	526.551.538.647,00	533.232.735.936,00	101,27	0,00
PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Umum	481.250.654,00	309.769.500,00	64,37	0,00
PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Daerah	6.357.574.438,00	5.603.833.625,00	88,14	0,00
PKB-Mobil Bus-Microbus	**4.888.493.492,00**	**4.075.320.500,00**	**83,37**	**0,00**
PKB-Mobil Bus-Microbus-Pribadi	3.622.044.400,00	2.996.737.500,00	82,74	0,00
PKB-Mobil Bus-Microbus-Umum	797.862.927,00	682.102.500,00	85,49	0,00
PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Daerah	468.586.165,00	396.480.500,00	84,61	0,00
PKB-Mobil Bus-Bus	**747.204.964,00**	**727.186.500,00**	**97,32**	**0,00**
PKB-Mobil Bus-Bus-Pribadi	316.612.272,00	287.650.500,00	90,85	0,00
PKB-Mobil Bus-Bus-Umum	392.599.218,00	419.825.000,00	106,93	0,00
PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Daerah	37.993.474,00	19.711.000,00	51,88	0,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	**151.226.685.980,00**	**138.244.390.491,00**	**91,42**	**0,00**
PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pribadi	148.985.071.090,00	135.871.581.491,00	91,20	0,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Umum	12.664.490,00	24.976.000,00	197,21	0,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pemerintah Daerah	2.228.950.400,00	2.347.833.000,00	105,33	0,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	**26.228.160.679,00**	**19.996.314.556,00**	**76,24**	**0,00**
PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pribadi	22.289.504.005,00	15.295.250.500,00	68,62	0,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Umum	3.875.334.220,00	4.612.256.556,00	119,02	0,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pemerintah Daerah	63.322.454,00	88.807.500,00	140,25	0,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Truck	**152.556.967.461,00**	**146.086.668.257,00**	**95,76**	**0,00**
PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pribadi	96.302.288.394,00	80.049.104.482,00	83,12	0,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Umum	55.596.125.539,00	65.264.352.775,00	117,39	0,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pemerintah Daerah	658.553.528,00	773.211.000,00	117,41	0,00

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)
PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	**243.791.450.054,00**	**210.119.076.577,00**	**86,19**	**196.996.155.599,00**
PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pribadi	242.765.626.290,00	209.131.636.077,00	86,15	0,00
PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Daerah	1.025.823.764,00	987.440.500,00	96,26	0,00
Kendaraan Bermotor Roda 2	0,00	0,00	0,00	196.996.155.599,00
PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	**202.631.855,00**	**186.042.000,00**	**91,81**	**175.278.000,00**
PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pribadi	177.302.875,00	168.889.000,00	95,25	**0,00**
PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Umum	12.664.490,00	0,00	0,00	0,00
PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Daerah	12.664.490,00	17.153.000,00	135,44	0,00
Kendaraan Bermotor Roda 3	0,00	0,00	0,00	175.278.000,00
PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air	**37.993.473,00**	**9.877.800,00**	**26,00**	**9.877.800,00**
PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Pribadi	12.664.490,00	5.831.250,00	46,04	0,00
PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Umum	12.664.490,00	4.046.550,00	31,95	0,00
PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Pemerintah Daerah	12.664.493,00	0,00	0,00	0,00
Pajak Kendaraan Di Air……	0,00	0,00	0,00	9.877.800,00
PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.336.060.593,00**
Alat-alat Berat/Besar	0,00	0,00	0,00	3.336.060.593,00
PKB-Sedan, Jeep,Minibus, Bus, Micro Bus, Truck, Light Truck, Pick up	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**909.331.312.832,00**
A-1 Sedan, Jeep, Minibus (Pribadi)	0,00	0,00	0,00	626.967.331.150,00
A-2 Sedan, Jeep, Minibus (Umum)	0,00	0,00	0,00	404.193.500,00
B-1 Bus, Micro Bus (Pribadi)	0,00	0,00	0,00	3.534.003.555,00
B-2 Bus, Micro Bus (Umum)	0,00	0,00	0,00	944.168.000,00
C-1 Truck, Light Truck, Pick Up (Pribadi)	0,00	0,00	0,00	218.502.585.682,00
C-2 Truck, Light Truck, Pick up (Umum)	0,00	0,00	0,00	58.979.030.945,00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	**775.429.287.546,00**	**887.056.637.195,00**	**114,40**	**558.925.504.891,00**
BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	**6.012.550.784,00**	**2.582.357.500,00**	**42,95**	**0,00**
BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	6.012.550.784,00	2.582.357.500,00	42,95	0,00
BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	**76.460.448.640,00**	**98.277.582.280,00**	**128,53**	**0,00**
BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	76.460.448.640,00	98.277.582.280,00	128,53	0,00
BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	**290.989.715.368,00**	**330.460.567.525,00**	**113,56**	**0,00**
BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	290.989.715.368,00	330.460.567.525,00	113,56	0,00
BBNKB-Mobil Bus-Microbus	**2.583.536.735,00**	**1.582.014.000,00**	**61,23**	**0,00**
BBNKB-Mobil Bus-Microbus	2.583.536.735,00	1.582.014.000,00	61,23	0,00
BBNKB-Mobil Bus-Bus	**362.246.266,00**	**115.338.600,00**	**31,84**	**0,00**
BBNKB-Mobil Bus-Bus	362.246.266,00	115.338.600,00	31,84	0,00

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	**81.862.587.740,00**	**92.822.868.300,00**	**113,39**	**0,00**
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	81.862.587.740,00	92.822.868.300,00	113,39	0,00
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	**3.458.589.353,00**	**2.506.790.000,00**	**72,48**	**0,00**
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	3.458.589.353,00	2.506.790.000,00	72,48	0,00
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck	**72.486.461.259,00**	**91.218.839.512,00**	**125,84**	**0,00**
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck	72.486.461.259,00	91.218.839.512,00	125,84	0,00
BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	**240.756.031.112,00**	**267.017.794.078,00**	**110,91**	**175.341.594.192,00**
BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	240.756.031.112,00	267.017.794.078,00	110,91	175.341.594.192,00
BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	**405.370.822,00**	**472.485.400,00**	**116,56**	**402.824.500,00**
BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	405.370.822,00	472.485.400,00	116,56	402.824.500,00
BBNKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air	**51.749.467,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
BBNKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air	51.749.467,00	0,00	0,00	0,00
BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**176.353.357,00**
BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat	0,00	0,00	0,00	176.353.357,00
BBNKB-Sedan, Jeep,Minibus, Bus, Micro Bus, Truck, Light Truck, Pick up	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**383.004.732.842,00**
A-1 Sedan, Jeep, Minibus (Pribadi)	0,00	0,00	0,00	267.207.885.312,00
A-2 Sedan, Jeep, Minibus (Umum)	0,00	0,00	0,00	56.474.500,00
B-1 Bus, Micro Bus (Pribadi)	0,00	0,00	0,00	1.513.899.450,00
B-2 Bus, Micro Bus (Umum)	0,00	0,00	0,00	666.780.500,00
C-1 Truck, Light Truck, Pick Up (Pribadi)	0,00	0,00	0,00	73.383.768.100,00
C-2 Truck, Light Truck, Pick up (Umum)	0,00	0,00	0,00	40.175.924.980,00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	**742.920.282.437,00**	**764.782.831.375,85**	**102,94**	**645.163.654.363,00**
PBBKB-Bahan Bakar Bensin	**231.304.460.439,00**	**68.260.981.519,00**	**29,51**	**193.154.154.326,00**
PBBKB Bahan Bakar Bensin	231.304.460.439,00	68.260.981.519,00	29,51	193.154.154.326,00
PBBKB-Bahan Bakar Solar	**101.142.644.253,00**	**101.326.352.234,85**	**100,18**	**53.292.716.537,00**
PBBKB Bahan Bakar Solar	101.142.644.253,00	101.326.352.234,85	100,18	53.292.716.537,00
PBBKB-Bahan Bakar Lainnya	**410.473.177.745,00**	**595.195.497.622,00**	**145,00**	**398.716.783.500,00**
PBBKB Bahan Bakar Lainnya	410.473.177.745,00	595.195.497.622,00	145,00	398.716.783.500,00
Pajak Air Permukaan	**52.506.777.155,00**	**44.805.652.197,00**	**85,33**	**34.695.707.476,00**
Pajak Air Permukaan	52.506.777.155,00	44.805.652.197,00	85,33	34.695.707.476,00
Pajak Rokok	**464.787.812.389,00**	**406.751.431.890,00**	**87,51**	**434.787.812.389,00**
Pajak Rokok	464.787.812.389,00	406.751.431.890,00	87,51	434.787.812.389,00
Jumlah	**3.312.414.331.190,00**	**3.327.500.336.694,85**	**100,46**	**2.783.421.363.943,00**

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa objek pendapatan pada realisasi 31 Desember 2020 merupakan rekening yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang diperbandingkan dengan objek pendapatan sesuai dengan rekening APBD tahun 2021 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021.

Kontribusi Pajak Daerah Tahun 2021 sebesar Rp3.327.500.336.694,85 atau 35,46% terhadap seluruh pendapatan Tahun 2021.

Adapun Dasar Penetapan Pajak Daerah sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
2. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Retribusi Daerah;
3. Peraturan Gubernur Riau Nomor 08 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB);
4. Peraturan Gubernur Riau Nomor 09 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
5. Peraturan Gubernur Riau Nomor 17 Tahun 2020 tentang Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan Nilai Jual Ubah Kendaraan Bermotor Pembuatan Sebelum Tahun 2020;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/PMK.07/2013 Tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102/PMK.07/2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 Tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Air Permukaan, Pajak Air Tanah, dan Pajak Penerangan Jalan Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang dibayarkan oleh Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 41/PMK.07/2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 Tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok;
10. Peraturan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 11/PMK.07/2017 Tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 Tentang Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok; dan

11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/PMK.07/2018 Tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Rokok sebagai Kontribusi Dukungan Program Jaminan Kesehatan.

Jika dilihat dari data di atas, beberapa objek Pajak Daerah mengalami pelampauan dari target Tahun 2021 antara lain Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

Sedangkan objek Pajak Daerah yang realisasinya kurang optimal dari target pada Tahun 2021 yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Menurut Pengelola Pajak Daerah hal ini masih terkait Kondisi Ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya kondusif akibat Covid 19 sehingga sebagian masyarakat masih mengalokasikan pembiayaan untuk kebutuhan hidup (primer).

5.1.2 Pendapatan Asli Daerah - Retribusi Daerah

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2021 sebesar Rp13.790.515.597,00 atau 80,10% dari target sebesar Rp17.215.784.040,00. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2021 meningkat sebesar Rp1.310.124.347,00 atau 10,50% dibandingkan Tahun 2020 sebesar Rp12.480.391.250,00. Rincian Pendapatan Retribusi sebagai berikut.

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)
Retribusi Daerah	**17.215.784.040,00**	**13.790.515.597,00**	**80,10**	**12.480.391.250,00**
Retribusi Jasa Umum	**3.591.250.000,00**	**2.312.141.000,00**	**64,38**	**1.870.294.150,00**
Retribusi Pelayanan Kesehatan	**3.468.000.000,00**	**2.294.591.000,00**	**66,16**	**1.841.654.150,00**
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	3.468.000.000,00	2.294.591.000,00	66,16	1.841.654.150,00
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	**63.750.000,00**	**1.000.000,00**	**1,57**	**0,00**
Retribusi Penyediaan Peta Tematik	63.750.000,00	1.000.000,00	1,57	0,00
Retribusi Pelayanan Pendidikan	**59.500.000,00**	**16.550.000,00**	**27,82**	**28.640.000,00**
Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis	59.500.000,00	16.550.000,00	27,82	28.640.000,00
Retribusi Jasa Usaha	**13.099.534.040,00**	**11.027.890.297,00**	**84,19**	**10.102.787.100,00**
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	**6.951.325.960,00**	**5.346.827.820,00**	**76,92**	**5.819.348.050,00**
Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	1.115.497.500,00	226.446.000,00	20,30	0,00
Retribusi Penyewaan Tanah	59.940.000,00	2.400.000,00	4,00	0,00
Retribusi Penyewaan Bangunan	360.466.000,00	273.353.000,00	75,83	0,00
Retribusi Pemakaian Laboratorium	2.550.487.460,00	3.152.956.420,00	123,62	0,00
Retribusi Pemakaian Ruangan	1.360.655.000,00	1.199.007.400,00	88,12	0,00
Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	1.504.280.000,00	492.665.000,00	32,75	0,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	0,00	0,00	5.819.348.050,00
Retribusi Tempat Khusus Parkir	**128.800.000,00**	**3.110.000,00**	**2,41**	**0,00**

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)
Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	**128.800.000,00**	**3.110.000,00**	**2,41**	0,00
Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	**135.150.000,00**	**76.175.000,00**	**56,36**	**65.500.000,00**
Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	135.150.000,00	76.175.000,00	56,36	65.500.000,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	**44.965.000,00**	**1.340.000,00**	**2,98**	**0,00**
Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	44.965.000,00	1.340.000,00	2,98	0,00
Retribusi Penyeberangan di Air	**2.578.553.080,00**	**2.681.418.000,00**	**103,99**	**2.261.851.000,00**
Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang	2.578.553.080,00	2.681.418.000,00	103,99	2.261.851.000,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	**3.259.740.000,00**	**2.919.019.477,00**	**89,55**	**1.956.088.050,00**
Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	615.740.000,00	285.042.600,00	46,29	0,00
Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak	269.450.000,00	575.292.000,00	213,51	0,00
Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	654.650.000,00	860.358.200,00	131,42	111.024.550,00
Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	1.719.900.000,00	1.198.326.677,00	69,67	0,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	0,00	0,00	0,00	1.762.053.500,00
Retribusi Usaha Pertanian	0,00	0,00	0,00	83.010.000,00
Retribusi Perizinan Tertentu	**525.000.000,00**	**450.484.300,00**	**85,81**	**507.310.000,00**
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	**0,00**	**112.400.000,00**	**0,00**	**507.310.000,00**
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	**0,00**	**112.400.000,00**	**0,00**	507.310.000,00
Retribusi Izin Usaha Perikanan	**100.000.000,00**	**106.343.300,00**	**106,34**	**0,00**
Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Penangkapan Ikan	100.000.000,00	106.343.300,00	106,34	0,00
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	**425.000.000,00**	**231.741.000,00**	**54,53**	**0,00**
Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	425.000.000,00	231.741.000,00	54,53	0,00
Jumlah	**17.215.784.040,00**	**13.790.515.597,00**	**80,10**	**12.480.391.250,00**

Kontribusi Retribusi Daerah Tahun 2021 sebesar Rp13.790.515.597,00 atau 0,15% terhadap seluruh pendapatan Tahun 2021.

Jika dilihat dari data diatas, semua realisasi objek retribusi kurang optimal dari target APBD Tahun 2021 diantaranya Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. Pengelola retribusi menjelaskan beberapa hal sebagai berikut:

Rekapitulasi Pendapatan Retribusi menurut OPD adalah:

No	Organisasi Perangkat Daerah	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	21.200.000,00	20.000.000,00	(1.200.000,00)	94,34	36.100.000,00
2	Dinas Kesehatan	2.884.500.000,00	1.810.764.000,00	(1.073.736.000,00)	62,78	1.922.294.150,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	4.007.760.000,00	2.932.904.000,00	(1.074.856.000,00)	73,18	2.800.768.500,00
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	3.600.000,00
5	Dinas Sosial	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	9.600.000,00
6	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	447.500.000,00	252.741.000,00	(194.759.000,00)	56,48	424.880.000,00
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	0,00	146.000.000,00
8	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	298.109.960,00	363.443.020,00	65.333.060,00	121,92	544.441.580,00
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	350.930.000,00	43.521.000,00	(307.409.000,00)	12,40	37.526.000,00
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	2.400.000,00
11	Dinas Perhubungan	2.578.553.080,00	2.797.818.000,00	219.264.920,00	108,50	2.417.181.000,00
12	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	743.750.000,00	150.900.000,00	(592.850.000,00)	20,29	152.169.000,00
13	Dinas Kebudayaan	3.200.000,00	3.440.000,00	240.000,00	107,50	11.167.500,00
14	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00	9.160.000,00
15	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.300.000.000,00	1.852.694.500,00	552.694.500,00	142,51	1.317.421.050,00
16	Dinas Pariwisata	171.690.000,00	16.600.000,00	(155.090.000,00)	9,67	38.700.800,00
17	Dinas Perkebunan	1.700.900.000,00	973.026.677,00	(727.873.323,00)	57,21	457.712.770,00
18	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1.020.450.000,00	1.118.903.000,00	98.453.000,00	109,65	741.556.500,00
19	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	133.350.000,00	22.530.000,00	(110.820.000,00)	16,90	194.380.000,00
20	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	430.000.000,00	662.465.400,00	232.465.400,00	154,06	475.832.400,00
21	Sekretariat Daerah	617.200.000,00	248.300.000,00	(368.900.000,00)	40,23	70.000.000,00
22	Sekretariat DPRD	26.000.000,00	32.000.000,00	6.000.000,00	123,08	32.000.000,00
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	4.800.000,00

No	Organisasi Perangkat Daerah	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)
24	Badan Pendapatan Daerah	265.000.000,00	256.042.000,00	(8.958.000,00)	96,62	259.920.000,00
25	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	30.166.000,00	29.453.000,00	(713.000,00)	97,64	258.040.000,00
26	Badan Kepegawaian Daerah	10.250.000,00	85.770.000,00	75.520.000,00	836,78	20.240.000,00
27	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.300.000,00	2.450.000,00	(850.000,00)	74,24	12.600.000,00
28	Badan Penghubung	149.675.000,00	90.050.000,00	(59.625.000,00)	60,16	77.500.000,00
29	Inspektorat	2.400.000,00	4.800.000,00	2.400.000,00	200,00	2.400.000,00
	Jumlah	**17.215.784.040,00**	**13.790.515.597,00**	**(3.425.268.443,00)**	**80,10**	**12.480.391.250,00**

Masing-masing realisasi akun Pendapatan Retribusi menurut OPD dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)
Retribusi Daerah	**21.200.000,00**	**20.000.000,00**	**(1.200.000,00)**	**94,34**	**36.100.000,00**
Retribusi Jasa Usaha	**21.200.000,00**	**20.000.000,00**	**(1.200.000,00)**	**94,34**	**36.100.000,00**
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	**21.200.000,00**	**20.000.000,00**	**(1.200.000,00)**	**94,34**	**36.100.000,00**
Retribusi Penyewaan Bangunan	21.200.000,00	20.000.000,00	(1.200.000,00)	94,34	36.100.000,00
Jumlah	**21.200.000,00**	**20.000.000,00**	**(1.200.000,00)**	**94,34**	**36.100.000,00**

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah pada Dinas Pendidikan Tahun 2021 sebesar Rp20.000.000,00 atau 94,34% dari target sebesar Rp21.200.000,00. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2021 menurun sebesar Rp16.100.000,00 atau 44,60% dibandingkan Tahun 2020 sebesar Rp36.100.000,00.

Kurang optimalnya pencapaian realisasi retribusi daerah pada Dinas Pendidikan Tahun 2021 disebabkan oleh Pandemi Virus COVID-19 yang menyebabkan kantin telat setor untuk waktu sewa 3 bulan terakhir ditahun 2021.

2. Dinas Kesehatan

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)
Retribusi Daerah	**2.884.500.000,00**	**1.810.764.000,00**	**(1.073.736.000,00)**	**62,78**	**1.922.294.150,00**
Retribusi Jasa Umum	**2.847.500.000,00**	**1.777.564.000,00**	**(1.069.936.000,00)**	**62,43**	**1.870.294.150,00**
Retribusi Pelayanan Kesehatan	**2.788.000.000,00**	**1.761.014.000,00**	**(1.026.986.000,00)**	**63,16**	**1.841.654.150,00**
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	2.788.000.000,00	1.761.014.000,00	(1.026.986.000,00)	63,16	1.841.654.150,00
Retribusi Pelayanan Pendidikan	**59.500.000,00**	**16.550.000,00**	**(42.950.000,00)**	**27,82**	**28.640.000,00**
Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis	59.500.000,00	16.550.000,00	(42.950.000,00)	27,82	28.640.000,00
Retribusi Jasa Usaha	**37.000.000,00**	**33.200.000,00**	**(3.800.000,00)**	**89,73**	**52.000.000,00**
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	**37.000.000,00**	**33.200.000,00**	**(3.800.000,00)**	**89,73**	**52.000.000,00**
Retribusi Penyewaan Bangunan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	52.000.000,00
Retribusi Pemakaian Ruangan	25.000.000,00	9.200.000,00	(15.800.000,00)	36,80	0,00
Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	6.000.000,00	18.000.000,00	12.000.000,00	300,00	0,00
Jumlah	**2.884.500.000,00**	**1.810.764.000,00**	**(1.073.736.000,00)**	**62,78**	**1.922.294.150,00**

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah pada Dinas Kesehatan Tahun 2021 sebesar Rp1.810.764.000,00 atau 62,78% dari target sebesar Rp2.884.500.000,00. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2021 menurun sebesar Rp111.530.150,00 atau 5,80% dibandingkan Tahun 2020 sebesar Rp1.922.294.150,00.

Kurang optimalnya pencapaian realisasi retribusi daerah pada Dinas Kesehatan Tahun 2021 disebabkan oleh:

1. Ketakutan dari masyarakat akibat Pandemi Virus COVID-19 untuk melakukan pemeriksaan di Laboratorium Kesehatan Daerah.
2. Akreditasi dari KAN (Komite Akreditasi Nasional) di UPT Labkesling telah berakhir, sehingga perusahaan besar yang ada di Riau beralih ke laboratorium swasta untuk pemeriksaan lingkungan.

3. Dengan adanya Pandemi Covid-19 menyebabkan terhentinya kegiatan magang dan penelitian dari pelajar dan mahasiswa ke UPT Labkesling, sehingga menyebabkan penurunan pendapatan di Retribusi Pelayanan Pendidikan.

3. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)
Retribusi Daerah	**4.007.760.000,00**	**2.932.904.000,00**	**(1.074.856.000,00)**	**73,18**	**2.800.768.500,00**
Retribusi Jasa Usaha	**4.007.760.000,00**	**2.932.904.000,00**	**(1.074.856.000,00)**	**73,18**	**2.800.768.500,00**
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	**4.007.760.000,00**	**2.932.904.000,00**	**(1.074.856.000,00)**	**73,18**	**2.800.768.500,00**
Retribusi Pemakaian Laboratorium	2.040.000.000,00	2.255.909.000,00	215.909.000,00	110,58	2.800.768.500,00
Retribusi Pemakaian Ruangan	522.760.000,00	515.360.000,00	(7.400.000,00)	98,58	0,00
Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	1.445.000.000,00	161.635.000,00	(1.283.365.000,00)	11,19	0,00
Jumlah	**4.007.760.000,00**	**2.932.904.000,00**	**(1.074.856.000,00)**	**73,18**	**2.800.768.500,00**

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2021 sebesar Rp2.932.904.000,00 atau 73,18% dari target sebesar Rp4.007.760.000,00. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2021 meningkat sebesar Rp132.135.500,00 atau 4,72% dibandingkan Tahun 2020 sebesar Rp2.800.768.500,00.

Kurang optimalnya pencapaian realisasi retribusi daerah pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2021 disebabkan oleh terjadinya Pandemi Virus COVID-19 yang menyebabkan penyewaan gedung untuk kegiatan resepsi pernikahan berkurang.

4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)
Retribusi Daerah	**3.600.000,00**	**3.600.000,00**	**0,00**	**100,00**	**3.600.000,00**
Retribusi Jasa Usaha	**3.600.000,00**	**3.600.000,00**	**0,00**	**100,00**	**3.600.000,00**
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	**3.600.000,00**	**3.600.000,00**	**0,00**	**100,00**	**3.600.000,00**
Retribusi Penyewaan Bangunan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	3.600.000,00
Jumlah	**3.600.000,00**	**3.600.000,00**	**0,00**	**100,00**	**3.600.000,00**

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021 sebesar Rp3.600.000,00 atau 100,00% dari target. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2021 sama dengan Tahun 2020 sebesar Rp3.600.000,00.

5. Dinas Sosial

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)
Retribusi Daerah	**3.600.000,00**	**3.600.000,00**	**0,00**	**100,00**	**9.600.000,00**
Retribusi Jasa Usaha	**3.600.000,00**	**3.600.000,00**	**0,00**	**100,00**	**9.600.000,00**
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	**3.600.000,00**	**3.600.000,00**	**0,00**	**100,00**	**9.600.000,00**
Retribusi Penyewaan Bangunan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	9.600.000,00
Jumlah	**3.600.000,00**	**3.600.000,00**	**0,00**	**100,00**	**9.600.000,00**

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah pada Dinas Sosial Tahun 2021 sebesar Rp3.600.000,00 atau 100,00% dari target. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2021 menurun sebesar Rp6.000.000,00 atau 62,50% dibandingkan Tahun 2020 sebesar Rp9.600.000,00.

6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)
Retribusi Daerah	**447.500.000,00**	**252.741.000,00**	**(194.759.000,00)**	**56,48**	**424.880.000,00**
Retribusi Jasa Usaha	**22.500.000,00**	**21.000.000,00**	**(1.500.000,00)**	**93,33**	**71.400.000,00**
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	**22.500.000,00**	**21.000.000,00**	**(1.500.000,00)**	**93,33**	**71.400.000,00**
Retribusi Penyewaan Bangunan	22.500.000,00	21.000.000,00	(1.500.000,00)	93,33	71.400.000,00
Retribusi Perizinan Tertentu	**425.000.000,00**	**231.741.000,00**	**(193.259.000,00)**	**54,53**	**353.480.000,00**
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	**425.000.000,00**	**231.741.000,00**	**(193.259.000,00)**	**54,53**	**353.480.000,00**
Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	425.000.000,00	231.741.000,00	(193.259.000,00)	54,53	353.480.000,00
Jumlah	**447.500.000,00**	**252.741.000,00**	**(194.759.000,00)**	**56,48**	**424.880.000,00**

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2021 sebesar Rp252.741.000,00 atau 56,48% dari target sebesar Rp447.500.000,00. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2021 menurun

sebesar Rp172.139.000,00 atau 40,51% dibandingkan Tahun 2020 sebesar Rp424.880.000,00.

Kurang optimalnya pencapaian realisasi retribusi daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2021 disebabkan oleh PERDA PPTKA masih divalidasi Mendagri, maka sejak bulan Oktober 2021 Pendapatan PPTKA menjadi milik pusat. Sedangkan untuk Retribusi Penyewaan Bangunan disebabkan karena penyewa kantin tidak melanjutkan lagi sewanya.

7. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)
Retribusi Daerah	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**146.000.000,00**
Retribusi Jasa Usaha	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**146.000.000,00**
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**146.000.000,00**
Retribusi Penyewaan Bangunan	0,00	0,00	0,00	**0,00**	146.000.000,00
Jumlah	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**146.000.000,00**

Pendapatan Retribusi Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tidak dianggarkan untuk Tahun 2021. Namun, pada Tahun 2020 Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp146.000.000,00.

8. Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)
Retribusi Daerah	**298.109.960,00**	**363.443.020,00**	**65.333.060,00**	**121,92**	**544.441.580,00**
Retribusi Jasa Usaha	**298.109.960,00**	**363.443.020,00**	**65.333.060,00**	**121,92**	**461.431.580,00**
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	**101.604.960,00**	**309.674.420,00**	**208.069.460,00**	**304,78**	**461.431.580,00**
Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	37.017.500,00	23.100.000,00	(13.917.500,00)	62,40	0,00
Retribusi Penyewaan Bangunan	21.400.000,00	21.400.000,00	0,00	100,00	0,00
Retribusi Pemakaian Laboratorium	43.187.460,00	265.174.420,00	221.986.960,00	614,01	0,00
Retribusi Tempat Khusus Parkir	**28.800.000,00**	**1.885.000,00**	**(26.915.000,00)**	**6,55**	**0,00**
Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	28.800.000,00	1.885.000,00	(26.915.000,00)	6,55	0,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	**44.965.000,00**	**0,00**	**(44.965.000,00)**	**0,00**	**0,00**

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)
Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	44.965.000,00	0,00	(44.965.000,00)	0,00	0,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	**122.740.000,00**	**51.883.600,00**	**(70.856.400,00)**	**42,27**	**83.010.000,00**
Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	122.740.000,00	51.883.600,00	(70.856.400,00)	42,27	83.010.000,00
Jumlah	**298.109.960,00**	**363.443.020,00**	**65.333.060,00**	**121,92**	**544.441.580,00**

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah pada Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2021 sebesar Rp363.443.020,00 atau 121,92% dari target sebesar Rp298.109.960,00. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2021 menurun sebesar Rp180.998.560,00 atau 33,24% dibandingkan Tahun 2020 sebesar Rp544.441.580,00.

9. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)
Retribusi Daerah	**350.930.000,00**	**43.521.000,00**	**(307.409.000,00)**	**12,40**	**37.526.000,00**
Retribusi Jasa Usaha	**350.930.000,00**	**43.521.000,00**	**(307.409.000,00)**	**12,40**	**37.526.000,00**
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	**350.930.000,00**	**43.521.000,00**	**(307.409.000,00)**	**12,40**	**37.526.000,00**
Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	334.730.000,00	35.671.000,00	(299.059.000,00)	10,66	37.526.000,00
Retribusi Penyewaan Bangunan	16.200.000,00	7.850.000,00	(8.350.000,00)	48,46	0,00
Jumlah	**350.930.000,00**	**43.521.000,00**	**(307.409.000,00)**	**12,40**	**37.526.000,00**

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021 sebesar Rp43.521.000,00 atau 12,40% dari target sebesar Rp350.930.000,00. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2021 meningkat sebesar Rp5.995.000,00 atau 15,98% dibandingkan Tahun 2020 sebesar Rp37.526.000,00.

Kurang optimalnya pencapaian realisasi retribusi daerah pada Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021 disebabkan oleh terjadinya Pandemi Virus COVID-19 pengunjung objek wisata di UPT KPHP Minas Tahura tidak ramai, kemudian target dari hasil budi daya madu dan hasil hutan tidak tercapai karena bergantung dari hasil madu/ hutan yang belum produktif.

10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencataan Sipil

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)
Retribusi Daerah	**2.400.000,00**	**2.400.000,00**	**0,00**	**100,00**	**2.400.000,00**
Retribusi Jasa Usaha	**2.400.000,00**	**2.400.000,00**	**0,00**	**100,00**	**2.400.000,00**
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	**2.400.000,00**	**2.400.000,00**	**0,00**	**100,00**	**2.400.000,00**
Retribusi Penyewaan Tanah	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	2.400.000,00
Jumlah	**2.400.000,00**	**2.400.000,00**	**0,00**	**100,00**	**2.400.000,00**

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencataan Sipil Tahun 2021 sebesar Rp2.400.000,00 atau 100,00% dari target sebesar Rp2.400.000,00. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2021 sama dengan Tahun 2020.

11. Dinas Perhubungan

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)
Retribusi Daerah	**2.578.553.080,00**	**2.797.818.000,00**	**219.264.920,00**	**108,50**	**2.417.181.000,00**
Retribusi Jasa Usaha	**2.578.553.080,00**	**2.685.418.000,00**	**106.864.920,00**	**104,14**	**2.263.351.000,00**
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	**0,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**0,00**	**1.500.000,00**
Retribusi Penyewaan Bangunan	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	1.500.000,00
Retribusi Penyeberangan di Air	**2.578.553.080,00**	**2.681.418.000,00**	**102.864.920,00**	**103,99**	**2.261.851.000,00**
Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang	2.578.553.080,00	2.681.418.000,00	102.864.920,00	103,99	2.261.851.000,00
Retribusi Perizinan Tertentu	**0,00**	**112.400.000,00**	**112.400.000,00**	**0,00**	**153.830.000,00**
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	**0,00**	**112.400.000,00**	**112.400.000,00**	**0,00**	**153.830.000,00**
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	0,00	112.400.000,00	112.400.000,00	0,00	153.830.000,00
Jumlah	**2.578.553.080,00**	**2.797.818.000,00**	**219.264.920,00**	**108,50**	**2.417.181.000,00**

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah pada Dinas Perhubungan Tahun 2021 sebesar Rp2.797.818.000,00 atau 108,50% dari target sebesar Rp2.578.553.080,00.

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2021 meningkat sebesar Rp380.637.000,00 atau 15,75% dibandingkan Tahun 2020 sebesar Rp2.417.181.000,00.

12. Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)
Retribusi Daerah	**743.750.000,00**	**150.900.000,00**	**(592.850.000,00)**	**20,29**	**152.169.000,00**
Retribusi Jasa Usaha	**743.750.000,00**	**150.900.000,00**	**(592.850.000,00)**	**20,29**	**152.169.000,00**
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	**743.750.000,00**	**149.675.000,00**	**(594.075.000,00)**	**20,12**	**152.169.000,00**
Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	743.750.000,00	149.675.000,00	(594.075.000,00)	20,12	152.169.000,00
Retribusi Tempat Khusus Parkir	**0,00**	**1.225.000,00**	**1.225.000,00**	**0,00**	**0,00**
Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	0,00	1.225.000,00	1.225.000,00	0,00	0,00
Jumlah	**743.750.000,00**	**150.900.000,00**	**(592.850.000,00)**	**20,29**	**152.169.000,00**

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2021 sebesar Rp150.900.000,00 atau 20,29% dari target sebesar Rp743.750.000,00. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2021 menurun sebesar Rp1.269.000,00 atau 0,83% dibandingkan Tahun 2020 sebesar Rp152.169.000,00.

Kurang optimalnya pencapaian realisasi retribusi daerah pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2021 disebabkan selama pandemi Covid-19 Venue-venue Olahraga tidak boleh disewakan, dan kondisi bangunan banyak mengalami kerusakan sehingga calon penyewa keberatan/ tidak berminat untuk menyewa.

13. Dinas Kebudayaan

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)
Retribusi Daerah	**3.200.000,00**	**3.440.000,00**	**240.000,00**	**107.50**	**11.167.500,00**
Retribusi Jasa Usaha	**3.200.000,00**	**3.440.000,00**	**240.000,00**	**107,50**	**11.167.500,00**
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	**3.200.000,00**	**2.100.000,00**	**(1.100.000,00)**	**65,63**	**11.167.500,00**
Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	11.167.500,00
Retribusi Penyewaan Bangunan	3.200.000,00	600.000,00	(2.600.000,00)	18,75	0,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	**0,00**	**1.340.000,00**	**1.340.000,00**	**0,00**	**0,00**
Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	0,00	1.340.000,00	1.340.000,00	0,00	0,00
Jumlah	**3.200.000,00**	**3.440.000,00**	**240.000,00**	**107,50**	**11.167.500,00**

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah pada Dinas Kebudayaan Tahun 2021 sebesar Rp3.440.000,00 atau 107,50% dari target sebesar Rp3.200.000,00. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2021 menurun sebesar Rp7.727.500,00 atau 69,20% dibandingkan Tahun 2020 sebesar Rp11.167.500,00.

14. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)
Retribusi Daerah	**5.500.000,00**	**5.500.000,00**	**0,00**	**100,00**	**9.160.000,00**
Retribusi Jasa Usaha	**5.500.000,00**	**5.500.000,00**	**0,00**	**100,00**	**9.160.000,00**
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	**5.500.000,00**	**5.500.000,00**	**0,00**	**100,00**	**9.160.000,00**
Retribusi Penyewaan Bangunan	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00	9.160.000,00
Jumlah	**5.500.000,00**	**5.500.000,00**	**0,00**	**100,00**	**9.160.000,00**

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2021 sebesar Rp5.500.000,00 atau 100,00% dari target sebesar Rp5.500.000,00. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2021 menurun sebesar Rp3.660.000,00 atau 39,96% dibandingkan Tahun 2020 sebesar Rp9.160.000,00.

15. Dinas Kelautan dan Perikanan

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)
Retribusi Daerah	**1.300.000.000,00**	**1.852.694.500,00**	**552.694.500,00**	**142,51**	**1.317.421.050,00**
Retribusi Jasa Usaha	**1.200.000.000,00**	**1.746.351.200,00**	**546.351.200,00**	**145,53**	**1.317.421.050,00**
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	**94.350.000,00**	**426.768.000,00**	**332.418.000,00**	**452,32**	**120.325.000,00**
Retribusi Pemakaian Laboratorium	1.000.000,00	1.878.000,00	878.000,00	187,80	120.325.000,00
Retribusi Pemakaian Ruangan	40.070.000,00	111.860.000,00	71.790.000,00	279,16	0,00
Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	53.280.000,00	313.030.000,00	259.750.000,00	587,52	0,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	**1.000.000,00**	**0,00**	**(1.000.000,00)**	**0,00**	**0,00**
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0,00	0,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	**1.104.650.000,00**	**1.319.583.200,00**	**214.933.200,00**	**119,46**	**1.197.096.050,00**
Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	654.650.000,00	860.358.200,00	205.708.200,00	131,42	1.086.071.500,00
Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau	450.000.000,00	459.225.000,00	9.225.000,00	102,05	111.024.550,00

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)
Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan					
Retribusi Perizinan Tertentu	**100.000.000,00**	**106.343.300,00**	**6.343.300,00**	**106,34**	**0,00**
Retribusi Izin Usaha Perikanan	**100.000.000,00**	**106.343.300,00**	**6.343.300,00**	**106,34**	**0,00**
Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Penangkapan Ikan	100.000.000,00	106.343.300,00	6.343.300,00	106,34	0,00
Jumlah	**1.300.000.000,00**	**1.852.694.500,00**	**552.694.500,00**	**142,51**	**1.317.421.050,00**

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2021 sebesar Rp1.852.694.500,00 atau 142,51% dari target sebesar Rp1.300.000.000,00. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2021 meningkat sebesar Rp535.273.450,00 atau 40,63% dibandingkan Tahun 2020 sebesar Rp1.317.421.050,00.

16. Dinas Pariwisata

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)
Retribusi Daerah	**171.690.000,00**	**16.600.000,00**	**(155.090.000,00)**	**9,67**	**38.700.800,00**
Retribusi Jasa Usaha	**171.690.000,00**	**16.600.000,00**	**(155.090.000,00)**	**9,67**	**38.700.800,00**
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	**71.690.000,00**	**16.600.000,00**	**(55.090.000,00)**	**23,16**	**38.700.800,00**
Retribusi Penyewaan Tanah	54.740.000,00	0,00	(54.740.000,00)	0,00	38.700.800,00
Retribusi Penyewaan Bangunan	16.950.000,00	16.600.000,00	(350.000,00)	97,94	0,00
Retribusi Tempat Khusus Parkir	**100.000.000,00**	**0,00**	**(100.000.000,00)**	**0,00**	**0,00**
Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	0,00	0,00
Jumlah	**171.690.000,00**	**16.600.000,00**	**(155.090.000,00)**	**9,67**	**38.700.800,00**

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah pada Dinas Pariwisata Tahun 2021 sebesar Rp16.600.000,00 atau 9,67% dari target sebesar Rp171.690.000,00. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2021 menurun sebesar Rp22.100.800,00 atau 57,11% dibandingkan Tahun 2020 sebesar Rp38.700.800,00.

Kurang optimalnya pencapaian realisasi retribusi daerah pada Dinas Pariwisata Tahun 2021 disebabkan oleh terjadinya Pandemi Virus COVID-19, dimana masyarakat dilarang untuk berkumpul dan sulit untuk mendapatkan izin membuat acara dari aparat yang berwenang, sehingga tidak banyak masyarakat yang menyewa gedung maupun lapangan MTQ.

17. Dinas Perkebunan

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)
Retribusi Daerah	**1.700.900.000,00**	**973.026.677,00**	**(727.873.323,00)**	**57,21**	**457.712.770,00**
Retribusi Jasa Usaha	**1.700.900.000,00**	**973.026.677,00**	**(727.873.323,00)**	**57,21**	**457.712.770,00**
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**230.562.770,00**
Retribusi Penyewaan Bangunan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	230.562.770,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	**1.694.900.000,00**	**967.026.677,00**	**(727.873.323,00)**	**57,06**	**227.150.000,00**
Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	425.000.000,00	227.925.000,00	(197.075.000,00)	53,63	227.150.000,00
Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	1.269.900.000,00	739.101.677,00	(530.798.323,00)	58,20	0,00
Jumlah	**1.700.900.000,00**	**973.026.677,00**	**(727.873.323,00)**	**57,21**	**457.712.770,00**

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah pada Dinas Perkebunan Tahun 2021 sebesar Rp973.026.677,00 atau 57,21% dari target sebesar Rp1.700.900.000,00. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2021 meningkat sebesar Rp515.313.907,00 atau 112,58% dibandingkan Tahun 2020 sebesar Rp457.712.770,00.

Kurang optimalnya pencapaian realisasi retribusi daerah pada Dinas Perkebunan 2021 disebabkan oleh tingginya harga TBS, banyak petani dan perusahaan menunda peremajaan kebun sehingga PAD sertifikasi tidak tercapai.

18. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)
Retribusi Daerah	**1.020.450.000,00**	**1.118.903.000,00**	**98.453.000,00**	**109,65**	**741.556.500,00**
Retribusi Jasa Umum	**680.000.000,00**	**533.577.000,00**	**(146.423.000,00)**	**78,47**	**0,00**
Retribusi Pelayanan Kesehatan	**680.000.000,00**	**533.577.000,00**	**(146.423.000,00)**	**78,47**	**0,00**
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	680.000.000,00	533.577.000,00	(146.423.000,00)	78,47	0,00
Retribusi Jasa Usaha	**340.450.000,00**	**585.326.000,00**	**244.876.000,00**	**171,93**	**741.556.500,00**
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	**3.000.000,00**	**4.800.000,00**	**1.800.000,00**	**160,00**	**741.556.500,00**
Retribusi Penyewaan Bangunan	3.000.000,00	4.800.000,00	1.800.000,00	160,00	741.556.500,00

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	**337.450.000,00**	**580.526.000,00**	**243.076.000,00**	**172,03**	**0,00**
Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	68.000.000,00	5.234.000,00	(62.766.000,00)	7,70	0,00
Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak	269.450.000,00	575.292.000,00	305.842.000,00	213,51	0,00
Jumlah	**1.020.450.000,00**	**1.118.903.000,00**	**98.453.000,00**	**109,65**	**741.556.500,00**

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2021 sebesar Rp1.118.903.000,00 atau 109,65% dari target sebesar Rp1.020.450.000,00. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2021 meningkat sebesar Rp377.346.500,00 atau 50,89% dibandingkan Tahun 2020 sebesar Rp741.556.500,00.

19. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)
Retribusi Daerah	**133.350.000,00**	**22.530.000,00**	**(110.820.000,00)**	**16,90**	**194.380.000,00**
Retribusi Jasa Umum	**63.750.000,00**	**1.000.000,00**	**(62.750.000,00)**	**1,57**	**0,00**
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	**63.750.000,00**	**1.000.000,00**	**(62.750.000,00)**	**1,57**	**0,00**
Retribusi Penyediaan Peta Tematik	63.750.000,00	1.000.000,00	(62.750.000,00)	1,57	0,00
Retribusi Jasa Usaha	**69.600.000,00**	**21.530.000,00**	**(48.070.000,00)**	**30,93**	**194.380.000,00**
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	**69.600.000,00**	**21.530.000,00**	**(48.070.000,00)**	**30,93**	**194.380.000,00**
Retribusi Penyewaan Bangunan	3.300.000,00	4.800.000,00	1.500.000,00	145,45	194.380.000,00
Retribusi Pemakaian Laboratorium	66.300.000,00	16.730.000,00	(49.570.000,00)	25,23	0,00
Jumlah	**133.350.000,00**	**22.530.000,00**	**(110.820.000,00)**	**16,90**	**194.380.000,00**

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2021 sebesar Rp22.530.000,00 atau 16,90% dari target sebesar Rp133.350.000,00. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2021 menurun sebesar Rp171.850.000,00 atau 88,41% dibandingkan Tahun 2020 sebesar Rp194.380.000,00.

Kurang optimalnya pencapaian realisasi retribusi daerah pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2021 disebabkan oleh terjadinya Pandemi Virus

COVID-19, dan belum adanya pelimpahan kewenangan dari pusat ke provinsi terkait pengelolaan minerba.

20. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)
Retribusi Daerah	**430.000.000,00**	**662.465.400,00**	**232.465.400,00**	**154,06**	**475.832.400,00**
Retribusi Jasa Usaha	**430.000.000,00**	**662.465.400,00**	**232.465.400,00**	**154,06**	**475.832.400,00**
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	**430.000.000,00**	**662.465.400,00**	**232.465.400,00**	**154,06**	**27.000.400,00**
Retribusi Pemakaian Laboratorium	400.000.000,00	613.265.000,00	213.265.000,00	153,32	27.000.400,00
Retribusi Pemakaian Ruangan	30.000.000,00	49.200.400,00	19.200.400,00	164,00	0,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**448.832.000,00**
Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	448.832.000,00
Jumlah	**430.000.000,00**	**662.465.400,00**	**232.465.400,00**	**154,06**	**475.832.400,00**

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tahun 2021 sebesar Rp662.465.400,00 atau 154,06% dari target sebesar Rp430.000.000,00. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2021 meningkat sebesar Rp186.633.000,00 atau 39,22% dibandingkan Tahun 2020 sebesar Rp475.832.400,00.

21. Sekretariat Daerah

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)
Retribusi Daerah	**617.200.000,00**	**248.300.000,00**	**(368.900.000,00)**	**40,23**	**70.000.000,00**
Retribusi Jasa Usaha	**617.200.000,00**	**248.300.000,00**	**(368.900.000,00)**	**40,23**	**70.000.000,00**
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	**617.200.000,00**	**248.300.000,00**	**(368.900.000,00)**	**40,23**	**70.000.000,00**
Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	0,00	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	70.000.000,00
Retribusi Penyewaan Tanah	2.800.000,00	0,00	(2.800.000,00)	0,00	0,00
Retribusi Penyewaan Bangunan	94.800.000,00	9.600.000,00	(85.200.000,00)	10,13	**0,00**
Retribusi Pemakaian Ruangan	519.600.000,00	222.200.000,00	(297.400.000,00)	42,76	0,00
Jumlah	**617.200.000,00**	**248.300.000,00**	**(368.900.000,00)**	**40,23**	**70.000.000,00**

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah pada Sekretariat Daerah Tahun 2021 sebesar Rp248.300.000,00 atau 40,23% dari target sebesar Rp617.200.000,00. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2021 meningkat sebesar Rp178.300.000,00 atau 254,71% dibandingkan Tahun 2020 sebesar Rp70.000.000,00.

Kurang optimalnya pencapaian realisasi retribusi daerah pada Sekretariat Daerah tahun 2021 disebabkan karena kontrak sewa kantin belum ada dan sewa ruangan Gedung Dharma Wanita berdasarkan izin dari Satgas Covid-19 dimulai pada bulan Juli 2021.

22. Sekretariat DPRD

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)
Retribusi Daerah	**26.000.000,00**	**32.000.000,00**	**6.000.000,00**	**123,08**	**32.000.000,00**
Retribusi Jasa Usaha	**26.000.000,00**	**32.000.000,00**	**6.000.000,00**	**123,08**	**32.000.000,00**
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	**26.000.000,00**	**32.000.000,00**	**6.000.000,00**	**123,08**	**32.000.000,00**
Retribusi Penyewaan Bangunan	6.000.000,00	12.000.000,00	6.000.000,00	200,00	32.000.000,00
Retribusi Pemakaian Ruangan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	0,00
Jumlah	**26.000.000,00**	**32.000.000,00**	**6.000.000,00**	**123,08**	**32.000.000,00**

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah pada Sekretariat DPRD Tahun 2021 sebesar Rp32.000.000,00 atau 123,08% dari target sebesar Rp26.000.000,00. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2021 sama dengan Tahun 2020.

23. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)
Retribusi Daerah	**4.800.000,00**	**4.800.000,00**	**0,00**	**100,00**	**4.800.000,00**
Retribusi Jasa Usaha	**4.800.000,00**	**4.800.000,00**	**0,00**	**100,00**	**4.800.000,00**
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	**4.800.000,00**	**4.800.000,00**	**0,00**	**100,00**	**4.800.000,00**
Retribusi Penyewaan Bangunan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	4.800.000,00
Jumlah	**4.800.000,00**	**4.800.000,00**	**0,00**	**100,00**	**4.800.000,00**

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Tahun 2021 sebesar Rp4.800.000,00 atau 100,00% dari target. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2021 sama dengan Tahun 2020.

24. Badan Pendapatan Daerah

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)
Retribusi Daerah	**265.000.000,00**	**256.042.000,00**	**(8.958.000,00)**	**96,62**	**259.920.000,00**
Retribusi Jasa Usaha	**265.000.000,00**	**256.042.000,00**	**(8.958.000,00)**	**96,62**	**259.920.000,00**
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	**265.000.000,00**	**256.042.000,00**	**(8.958.000,00)**	**96,62**	**259.920.000,00**
Retribusi Penyewaan Bangunan	85.000.000,00	75.900.000,00	(9.100.000,00)	89,29	259.920.000,00
Retribusi Pemakaian Ruangan	180.000.000,00	180.142.000,00	142.000,00	100,08	0,00
Jumlah	**265.000.000,00**	**256.042.000,00**	**(8.958.000,00)**	**96,62**	**259.920.000,00**

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021 sebesar Rp256.042.000,00 atau 96,62% dari target sebesar Rp265.000.000,00. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2021 menurun sebesar Rp3.878.000,00 atau 1,49% dibandingkan Tahun 2020 sebesar Rp259.920.000,00.

Kurang optimalnya pencapaian realisasi retribusi daerah pada Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021 disebabkan adanya potensi penerimaan atas sewa ATM BRI yang seharusnya terealisasi di bulan Desember tahun 2021.

25. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)
Retribusi Daerah	**30.166.000,00**	**29.453.000,00**	**(713.000,00)**	**97,64**	**258.040.000,00**
Retribusi Jasa Usaha	**30.166.000,00**	**29.453.000,00**	**(713.000,00)**	**97,64**	**258.040.000,00**
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	**30.166.000,00**	**29.453.000,00**	**(713.000,00)**	**97,64**	**258.040.000,00**
Retribusi Penyewaan Bangunan	24.366.000,00	23.653.000,00	(713.000,00)	97,07	258.040.000,00
Retribusi Pemakaian Ruangan	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	100,00	0,00
Jumlah	**30.166.000,00**	**29.453.000,00**	**(713.000,00)**	**97,64**	**258.040.000,00**

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021 sebesar Rp29.453.000,00 atau 97,64% dari target sebesar Rp30.166.000,00. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2021 menurun

sebesar Rp228.587.000,00 atau 88,59% dibandingkan Tahun 2020 sebesar Rp258.040.000,00.

Kurang optimalnya pencapaian realisasi retribusi daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021 disebabkan kurang setor 1 (satu) bulan dari penyewa kantin karena penyewa tidak melanjutkan lagi sewanya.

26. Badan Kepegawaian Daerah

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)
Retribusi Daerah	**10.250.000,00**	**85.770.000,00**	**75.520.000,00**	**836,78**	**20.240.000,00**
Retribusi Jasa Usaha	**10.250.000,00**	**85.770.000,00**	**75.520.000,00**	**836,78**	**20.240.000,00**
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	**10.250.000,00**	**85.770.000,00**	**75.520.000,00**	**836,78**	**20.240.000,00**
Retribusi Penyewaan Bangunan	7.350.000,00	14.400.000,00	7.050.000,00	195,92	20.240.000,00
Retribusi Pemakaian Ruangan	2.900.000,00	71.370.000,00	68.470.000,00	2.461,03	0,00
Jumlah	**10.250.000,00**	**85.770.000,00**	**75.520.000,00**	**836,78**	**20.240.000,00**

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah pada Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2021 sebesar Rp85.770.000,00 atau 836,78% dari target sebesar Rp10.250.000,00. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2021 meningkat sebesar Rp65.530.000,00 atau 323,76% dibandingkan Tahun 2020 sebesar Rp20.240.000,00.

27. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)
Retribusi Daerah	**3.300.000,00**	**2.450.000,00**	**(850.000,00)**	**74,24**	**12.600.000,00**
Retribusi Jasa Usaha	**3.300.000,00**	**2.450.000,00**	**(850.000,00)**	**74,24**	**12.600.000,00**
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	**3.300.000,00**	**2.450.000,00**	**(850.000,00)**	**74,24**	**12.600.000,00**
Retribusi Penyewaan Bangunan	3.300.000,00	2.450.000,00	(850.000,00)	74,24	12.600.000,00
Jumlah	**3.300.000,00**	**2.450.000,00**	**(850.000,00)**	**74,24**	**12.600.000,00**

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2021 sebesar Rp2.450.000,00 atau 74,24% dari target sebesar Rp3.300.000,00. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2021 menurun

sebesar Rp10.150.000,00 atau 80,56% dibandingkan Tahun 2020 sebesar Rp12.600.000,00.

Kurang optimalnya pencapaian realisasi retribusi daerah pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2021 disebabkan karena masih Pandemi Covid-19, Tahun 2021 asrama untuk kediklatan dijadikan sebagai tempat karantina Covid-19, sehingga tidak lagi dipungut biaya retribusi untuk penyewaan bangunan. Sedangkan untuk sewa kantin masih ada pihak penyewa yang belum menyetor secara keseluruhan pada Tahun 2021 tersebut.

28. Badan Penghubung

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)
Retribusi Daerah	**149.675.000,00**	**90.050.000,00**	**(59.625.000,00)**	**60,16**	**77.500.000,00**
Retribusi Jasa Usaha	**149.675.000,00**	**90.050.000,00**	**(59.625.000,00)**	**60,16**	**77.500.000,00**
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	**14.525.000,00**	**13.875.000,00**	**(650.000,00)**	**95,52**	**12.000.000,00**
Retribusi Pemakaian Ruangan	14.525.000,00	13.875.000,00	(650.000,00)	95,52	12.000.000,00
Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	**135.150.000,00**	**76.175.000,00**	**(58.975.000,00)**	**56,36**	**65.500.000,00**
Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	135.150.000,00	76.175.000,00	(58.975.000,00)	56,36	65.500.000,00
Jumlah	**149.675.000,00**	**90.050.000,00**	**(59.625.000,00)**	**60,16**	**77.500.000,00**

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah pada Badan Penghubung Tahun 2021 sebesar Rp90.050.000,00 atau 60,16% dari target sebesar Rp149.675.000,00. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2021 meningkat sebesar Rp12.550.000,00 atau 16,19% dibandingkan Tahun 2020 sebesar Rp77.500.000,00.

Kurang optimalnya pencapaian realisasi retribusi daerah pada Badan Penghubung Tahun 2021 disebabkan oleh Pandemi Covid-19, tingginya kasus dan peraturan PPKM di Jakarta mengakibatkan turunnya pergerakan masyarakat yang menyebabkan kurangnya pengunjung tamu yang menginap di mess Pemda Riau yang berada di Slipi.

29. Inspektorat

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)
Retribusi Daerah	**2.400.000,00**	**4.800.000,00**	**2.400.000,00**	**200,00**	**2.400.000,00**
Retribusi Jasa Usaha	**2.400.000,00**	**4.800.000,00**	**2.400.000,00**	**200,00**	**2.400.000,00**
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	**2.400.000,00**	**4.800.000,00**	**2.400.000,00**	**200,00**	**2.400.000,00**
Retribusi Penyewaan Bangunan	2.400.000,00	4.800.000,00	2.400.000,00	200,00	2.400.000,00
Jumlah	**2.400.000,00**	**4.800.000,00**	**2.400.000,00**	**200,00**	**2.400.000,00**

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah pada Inspektorat Tahun 2021 sebesar Rp4.800.000,00 atau 200,00% dari target sebesar Rp2.400.000,00. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2021 meningkat sebesar Rp2.400.000,00 atau 100,00% dibandingkan Tahun 2020 sebesar Rp2.400.000,00.

5.1.3 Pendapatan Asli Daerah - Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2021 sebesar Rp117.417.430.069,00 atau 100,01% dari target sebesar Rp117.402.606.804,00. Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2021 meningkat sebesar Rp28.974.928.318,00 atau 32,76% jika dibandingkan Tahun 2020 sebesar Rp88.442.501.751,00. Rincian realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	**117.402.606.804,00**	**117.417.430.069,00**	**100,01**	**88.442.501.751,00**
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	**117.402.606.804,00**	**117.417.430.069,00**	**100,01**	**88.442.501.751,00**
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	**111.295.483.015,00**	**106.036.309.281,00**	**95,27**	**88.442.501.751,00**
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	111.295.483.015,00	106.036.309.281,00	95,27	88.442.501.751,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	**6.107.123.789,00**	**11.381.120.788,00**	**186,36**	**0,00**

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	6.107.123.789,00	11.381.120.788,00	186,36	0,00
Jumlah	**117.402.606.804,00**	**117.417.430.069,00**	**100,01**	**88.442.501.751,00**

Kontribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2021 sebesar Rp117.417.430.069,00 atau 1,25% terhadap seluruh pendapatan Tahun 2021.

Jika dilihat dari data diatas, objek Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terealisasi melebihi target Tahun 2021, pada Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha), Sedangkan objek Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang kurang optimal pada APBD Tahun 2021 yaitu Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan).

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tersebut berasal dari Pembagian Deviden berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) dengan rincian:

Tanggal	Uraian	Nilai (Rp)
05 Juli 2021	Deviden Bank Riaukepri Tahun Buku 2020	106.036.309.281,00
	Jumlah	**106.036.309.281,00**

2. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) dengan rincian:

Tanggal	Uraian	Nilai (Rp)
26 Maret 2021	Deviden PT JAMKRIDA Tahun Buku 2020	4.004.499.523,00
01 April 2021	Pembayaran Bagi Hasil Koperasi KORPRI Riau ke Kas Daerah Pemerintah Provinsi Riau Tahun Buku 2020	14.822.940,00
21 Mei 2021	Deviden PT PIR Tahun Buku 2020	226.138.766,00
08 Juni 2021	Deviden PT PIR Tahun Buku 2018	226.138.766,00
16 Juni 2021	Deviden Laba PT SPR Tahun Buku 2020	1.067.471.955,00
30 Juni 2021	Deviden Laba ASKRIDA Tahun Buku 2020	187.202.569,00
05 Juli 2021	Deviden PT PIR Tahun Buku 2018	226.138.766,00
19 Juli 2021	Deviden SPR Langgak	1.275.620.266,00

Tanggal	Uraian	Nilai (Rp)
22 Juli 2021	Deviden Bumi Siak Pusako Tahun Buku 2020	3.926.948.461,00
14 September 2021	Deviden PT PIR Tahun Buku 2018	226.138.766,00
	Jumlah	**11.381.120.778,00**

5.1.4 Pendapatan Asli Daerah - Lain-Lain PAD yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2021 sebesar Rp591.760.278.782,59 atau 104,25% dari target sebesar Rp567.645.306.912,00. Realisasi Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah Tahun 2021 meningkat sebesar Rp142.928.503.229,02 atau 31,84% jika dibandingkan Tahun 2020 sebesar Rp448.831.775.553,57. Peningkatan terbesar bersumber dari Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan.

Rincian realisasi Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)
Lain-lain PAD yang Sah	**567.645.306.912,00**	**591.760.278.782,59**	**104,25**	**448.831.775.553,57**
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	**1.112.500.000,00**	**23.997.100,00**	**2,16**	**40.188.000,00**
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.188.000,00**
Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	40.188.000,00
Hasil Penjualan Aset Lainnya	**1.112.500.000,00**	**23.997.100,00**	**2,16**	**0,00**
Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain	1.112.500.000,00	23.997.100,00	2,16	0,00
Hasil Kerja Sama Daerah	**47.503.468.000,00**	**10.132.000,00**	**0,02**	**0,00**
Hasil Kerja Sama Daerah	**47.503.468.000,00**	**10.132.000,00**	**0,02**	**0,00**
Hasil Kerja Sama Daerah	47.503.468.000,00	10.132.000,00	0,02	0,00
Jasa Giro	**6.700.000.000,00**	**9.619.437.828,00**	**143,57**	**7.790.782.252,80**
Jasa Giro pada Kas Daerah	**6.700.000.000,00**	**8.468.442.839,00**	**126,39**	**7.188.802.608,80**
Jasa Giro pada Kas Daerah	6.700.000.000,00	8.468.442.839,00	126,39	7.188.802.608,80
Jasa Giro pada Kas di Bendahara	**0,00**	**894.478.561,00**	**0,00**	**601.979.644,00**
Jasa Giro pada Kas di Bendahara	0,00	894.478.561,00	0,00	601.979.644,00
Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	**0,00**	**256.516.428,00**	**0,00**	**0,00**
Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	0,00	256.516.428,00	0,00	0,00
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	**0,00**	**99.509.107,84**	**0,00**	**267.980.539,13**
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	**0,00**	**99.509.107,84**	**0,00**	**267.980.539,13**
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	99.509.107,84	0,00	267.980.539,13
Pendapatan Bunga	**38.500.000.000,00**	**67.663.558.590,10**	**175,75**	**53.813.194.054,44**
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	**38.500.000.000,00**	**67.663.558.590,10**	**175,75**	**53.813.194.054,44**

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	38.500.000.000,00	67.663.558.590,10	175,75	53.813.194.054,44
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	**62.413.780.000,00**	**64.590.278.982,37**	**103,49**	**5.367.561.799,23**
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	**62.413.780.000,00**	**64.590.278.982,37**	**103,49**	**5.367.561.799,23**
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	62.413.780.000,00	64.590.278.982,37	103,49	5.367.561.799,23
Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.349.100.000,00**
Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.349.100.000,00**
Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing	0,00	0,00	0,00	3.349.100.000,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	**1.627.065.255,00**	**1.316.823.457,38**	**80,93**	**2.244.947.719,40**
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	**1.627.065.255,00**	**1.316.823.457,38**	**80,93**	**2.244.947.719,40**
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.627.065.255,00	1.316.823.457,38	80,93	2.244.947.719,40
Pendapatan Denda Pajak Daerah	**95.377.652.024,00**	**45.580.033.227,00**	**47,79**	**40.514.813.811,00**
Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	**93.687.729.714,00**	**44.097.290.577,00**	**47,07**	**39.386.626.992,00**
Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Sedan	2.246.604.559,00	760.592.281,00	33,86	0,00
Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Jeep	8.065.065.169,00	4.375.830.872,00	54,26	0,00
Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Minibus	32.704.020.116,00	16.335.298.605,00	49,95	0,00
Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Microbus	395.402.402,00	178.230.948,00	45,08	0,00
Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Bus	53.918.509,00	20.113.154,00	37,30	0,00
Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	13.471.127.913,00	5.952.563.043,00	44,19	0,00
Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	3.046.882.769,00	932.826.261,00	30,62	0,00
Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Truck	10.630.932.763,00	4.866.101.971,00	45,77	0,00
Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	23.055.802.678,00	10.670.121.907,00	46,28	0,00
Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	17.972.836,00	5.571.804,00	31,00	0,00
Pendapatan Denda PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air	0,00	39.731,00	0,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	39.386.626.992,00
Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	**1.664.922.310,00**	**1.408.461.324,00**	**84,60**	**1.072.375.993,00**
Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	84.578.966,00	68.720.520,00	81,25	0,00
Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	292.598.067,00	277.052.715,00	94,69	0,00
Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	747.230.324,00	611.773.879,00	81,87	0,00
Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Bus-Microbus	8.894.303,00	3.289.300,00	36,98	0,00
Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Bus-Bus	8.071.663,00	3.757.600,00	46,55	0,00

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)
Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	142.134.034,00	108.501.990,00	76,34	0,00
Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	25.572.006,00	30.260.570,00	118,33	0,00
Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck	161.351.042,00	125.526.200,00	77,80	0,00
Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	191.945.068,00	179.515.550,00	93,52	0,00
Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	2.546.837,00	63.000,00	2,47	0,00
Pendapatan Denda Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	1.072.375.993,00
Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan	**25.000.000,00**	**74.281.326,00**	**297,13**	**55.810.826,00**
Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan	25.000.000,00	74.281.326,00	297,13	55.810.826,00
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	**3.944.987.580,00**	**4.258.868.416,00**	**107,96**	**1.559.643.705,00**
Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	**3.944.987.580,00**	**4.258.868.416,00**	**107,96**	**1.559.643.705,00**
Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	3.944.987.580,00	4.258.868.416,00	107,96	1.559.643.705,00
Pendapatan dari Pengembalian	**6.325.584.053,00**	**1.235.986,00**	**0,02**	**8.819.408.810,92**
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.470.728.107,92**
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21	0,00	0,00	0,00	8.470.728.107,92
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	**6.325.584.053,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	6.325.584.053,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	**0,00**	**1.079.000,00**	**0,00**	**0,00**
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Biasa	0,00	1.079.000,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	**0,00**	**156.986,00**	**0,00**	**348.680.703,00**
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran JKK	0,00	156.986,00	0,00	348.680.703,00
Pendapatan BLUD	**304.140.270.000,00**	**398.596.404.087,90**	**131,06**	**325.064.154.861,65**
Pendapatan BLUD	**304.140.270.000,00**	**398.596.404.087,90**	**131,06**	**325.064.154.861,65**
Pendapatan BLUD	304.140.270.000,00	398.596.404.087,90	131,06	325.064.154.861,65
Jumlah	**567.645.306.912,00**	**591.760.278.782,59**	**104,25**	**448.831.775.553,57**

Kontribusi Lain - Lain PAD yang Sah Tahun 2021 sebesar Rp591.760.278.782,59 atau 6,31% terhadap seluruh pendapatan Tahun 2021.

Jika dilihat dari data di atas, beberapa objek Lain-lain PAD yang Sah mengalami pelampauan dari target APBD Tahun 2021 antara lain Jasa Giro, Pendapatan Bunga, Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain, Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan, Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan dan Pendapatan BLUD.

Sedangkan Lain-lain PAD yang Sah yang kurang optimal mencapai target pada Tahun 2021 yaitu Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan, Hasil Kerjasama Daerah, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pendapatan dari Pengembalian.

Rekapitulasi Lain-lain PAD yang Sah menurut OPD adalah sebagai berikut:

Organisasi Perangkat Daerah	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)
Dinas Kesehatan	304.140.270.000,00	398.596.404.087,90	94.456.134.087,90	131,06	325.064.154.861,65
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	47.503.468.000,00	10.132.000,00	(47.493.336.000,00)	0,02	0,00
Badan Pendapatan Daerah	95.377.652.024,00	45.580.033.227,00	(49.797.618.797,00)	47,79	0,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	120.623.916.888,00	147.573.709.467,69	26.949.792.579,69	122,34	123.767.620.691,92
Jumlah	**567.645.306.912,00**	**591.760.278.782,59**	**24.114.971.870,59**	**104,25**	**448.831.775.553,57**

Masing-masing realisasi Lain-lain PAD yang Sah menurut OPD dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Dinas Kesehatan

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)
Lain-lain PAD yang Sah	**304.140.270.000,00**	**398.596.404.087,90**	**94.456.134.087,90**	**131,06**	**325.064.154.861,65**
Pendapatan BLUD	**304.140.270.000,00**	**398.596.404.087,90**	**94.456.134.087,90**	**131,06**	**325.064.154.861,65**
Pendapatan BLUD	**304.140.270.000,00**	**398.596.404.087,90**	**94.456.134.087,90**	**131,06**	**325.064.154.861,65**
Pendapatan BLUD	304.140.270.000,00	398.596.404.087,90	94.456.134.087,90	131,06	325.064.154.861,65
Jumlah	**304.140.270.000,00**	**398.596.404.087,90**	**94.456.134.087,90**	**131,06**	**325.064.154.861,65**

Realisasi Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah pada Dinas Kesehatan Tahun 2021 sebesar Rp398.596.404.087,90 atau 131,06% dari target sebesar Rp304.140.270.000,00. Realisasi Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2021

meningkat sebesar Rp73.532.249.226,25 atau 22,62% dibandingkan Tahun 2020 sebesar Rp325.064.154.861,65.

2. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)
Lain-lain PAD yang Sah	**47.503.468.000,00**	**10.132.000,00**	**(47.493.336.000,00)**	**0,02**	**0,00**
Hasil Kerja Sama Daerah	**47.503.468.000,00**	**10.132.000,00**	**(47.493.336.000,00)**	**0,02**	**0,00**
Hasil Kerja Sama Daerah	**47.503.468.000,00**	**10.132.000,00**	**(47.493.336.000,00)**	**0,02**	**0,00**
Hasil Kerja Sama Daerah	47.503.468.000,00	10.132.000,00	(47.493.336.000,00)	0,02	0,00
Jumlah	**47.503.468.000,00**	**10.132.000,00**	**(47.493.336.000,00)**	**0,02**	**0,00**

Realisasi Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021 sebesar Rp10.132.000,00 atau 0,02% dari target sebesar Rp47.503.468.000,00.

3. Badan Pendapatan Daerah

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)
Lain-lain PAD yang Sah	**95.377.652.024,00**	**45.580.033.227,00**	**(49.797.618.797,00)**	**47,79**	**0,00**
Pendapatan Denda Pajak Daerah	**95.377.652.024,00**	**45.580.033.227,00**	**(49.797.618.797,00)**	**47,79**	**0,00**
Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	**93.687.729.714,00**	**44.097.290.577,00**	**(49.590.439.137,00)**	**47,07**	**0,00**
Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Sedan	2.246.604.559,00	760.592.281,00	(1.486.012.278,00)	33,86	0,00
Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Jeep	8.065.065.169,00	4.375.830.872,00	(3.689.234.297,00)	54,26	0,00
Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Minibus	32.704.020.116,00	16.335.298.605,00	(16.368.721.511,00)	49,95	0,00
Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Microbus	395.402.402,00	178.230.948,00	(217.171.454,00)	45,08	0,00
Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Bus	53.918.509,00	20.113.154,00	(33.805.355,00)	37,30	0,00
Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	13.471.127.913,00	5.952.563.043,00	(7.518.564.870,00)	44,19	0,00
Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	3.046.882.769,00	932.826.261,00	(2.114.056.508,00)	30,62	0,00
Pendapatan Denda PKB-Mobil	10.630.932.763,00	4.866.101.971,00	(5.764.830.792,00)	45,77	0,00

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)
Barang/Beban-Truck					
Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	23.055.802.678,00	10.670.121.907,00	(12.385.680.771,00)	46,28	0,00
Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	17.972.836,00	5.571.804,00	(12.401.032,00)	31,00	0,00
Pendapatan Denda PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air	0,00	39.731,00	39.731,00	0,00	0,00
Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	**1.664.922.310,00**	**1.408.461.324,00**	**(256.460.986,00)**	**84,60**	**0,00**
Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	84.578.966,00	68.720.520,00	(15.858.446,00)	81,25	0,00
Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	292.598.067,00	277.052.715,00	(15.545.352,00)	94,69	0,00
Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	747.230.324,00	611.773.879,00	(135.456.445,00)	81,87	0,00
Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Bus-Microbus	8.894.303,00	3.289.300,00	(5.605.003,00)	36,98	0,00
Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Bus-Bus	8.071.663,00	3.757.600,00	(4.314.063,00)	46,55	0,00
Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	142.134.034,00	108.501.990,00	(33.632.044,00)	76,34	0,00
Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	25.572.006,00	30.260.570,00	4.688.564,00	118,33	0,00
Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck	161.351.042,00	125.526.200,00	(35.824.842,00)	77,80	0,00
Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	191.945.068,00	179.515.550,00	(12.429.518,00)	93,52	0,00
Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	2.546.837,00	63.000,00	(2.483.837,00)	2,47	0,00
Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan	**25.000.000,00**	**74.281.326,00**	**49.281.326,00**	**297,13**	**0,00**
Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan	25.000.000,00	74.281.326,00	49.281.326,00	297,13	0,00
Jumlah	**95.377.652.024,00**	**45.580.033.227,00**	**(49.797.618.797,00)**	**47,79**	**0,00**

Realisasi Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah pada Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021 sebesar Rp45.580.033.227,00 atau 47,79% dari target sebesar Rp95.377.652.024,00.

4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)
Lain-lain PAD yang Sah	**120.623.916.888,00**	**147.573.709.467,69**	**26.949.792.579,69**	**122,34**	**123.767.620.691,92**
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	**1.112.500.000,00**	**23.997.100,00**	**(1.088.502.900,00)**	**2,16**	**40.188.000,00**
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.188.000,00**
Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	0,00	40.188.000,00
Hasil Penjualan Aset Lainnya	**1.112.500.000,00**	**23.997.100,00**	**(1.088.502.900,00)**	**2,16**	0,00
Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain	1.112.500.000,00	23.997.100,00	(1.088.502.900,00)	2,16	**0,00**
Jasa Giro	**6.700.000.000,00**	**9.619.437.828,00**	**2.919.437.828,00**	**126,39**	**7.790.782.252,80**
Jasa Giro pada Kas Daerah	**6.700.000.000,00**	**8.468.442.839,00**	**1.768.442.839,00**	**126,39**	**7.188.802.608,80**
Jasa Giro pada Kas Daerah	6.700.000.000,00	8.468.442.839,00	1.768.442.839,00	126,39	7.188.802.608,80
Jasa Giro pada Kas di Bendahara	**0,00**	**894.478.561,00**	**894.478.561,00**	**0,00**	**601.979.644,00**
Jasa Giro pada Kas di Bendahara	0,00	894.478.561,00	894.478.561,00	0,00	601.979.644,00
Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	**0,00**	**256.516.428,00**	**256.516.428,00**	**0,00**	**0,00**
Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	0,00	256.516.428,00	256.516.428,00	0,00	**0,00**
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	**0,00**	**99.509.107,84**	**99.509.107,84**	**0,00**	**267.980.539,13**
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	**0,00**	**99.509.107,84**	**99.509.107,84**	**0,00**	**267.980.539,13**
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	99.509.107,84	99.509.107,84	0,00	267.980.539,13
Pendapatan Bunga	**38.500.000.000,00**	**67.663.558.590,10**	**29.163.558.590,10**	**175,75**	**53.813.194.054,44**
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	**38.500.000.000,00**	**67.663.558.590,10**	**29.163.558.590,10**	**175,75**	**53.813.194.054,44**
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	38.500.000.000,00	67.663.558.590,10	29.163.558.590,10	175,75	53.813.194.054,44
Penerimaan Komisi,	**62.413.780.000,00**	**64.590.278.982,37**	**2.176.498.982,37**	**103,49**	**5.367.561.799,23**

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)
Potongan, atau Bentuk Lain Penerimaan					
Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	**62.413.780.000,00**	**64.590.278.982,37**	**2.176.498.982,37**	**103,49**	**5.367.561.799,23**
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	62.413.780.000,00	64.590.278.982,37	2.176.498.982,37	103,49	5.367.561.799,23
Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.349.100.000,00**
Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.349.100.000,00**
Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing	0,00	0,00	0,00	0,00	3.349.100.000,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	**1.627.065.255,00**	**1.316.823.457,38**	**(310.241.797,62)**	**80,93**	**2.244.947.719,40**
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	**1.627.065.255,00**	**1.316.823.457,38**	**(310.241.797,62)**	**80,93**	**2.244.947.719,40**
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.627.065.255,00	1.316.823.457,38	(310.241.797,62)	80,93	2.244.947.719,40
Pendapatan Denda Pajak Daerah	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**40.514.813.811,00**
Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**39.386.626.992,00**
Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Sedan	0,00	0,00	0,00	0,00	39.386.626.992,00
Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**1.072.375.993,00**
Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072.375.993,00
Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**55.810.826,00**

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)
Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan	0,00	0,00	0,00	0,00	55.810.826,00
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	**3.944.987.580,00**	**4.258.868.416,00**	**313.880.836,00**	**107,96**	**1.559.643.705,00**
Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	**3.944.987.580,00**	**4.258.868.416,00**	**313.880.836,00**	**107,96**	**1.559.643.705,00**
Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	3.944.987.580,00	4.258.868.416,00	313.880.836,00	107,96	1.559.643.705,00
Pendapatan dari Pengembalian	**6.325.584.053,00**	**1.235.986,00**	**(6.324.348.067,00)**	**0,02**	**8.819.408.810,92**
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.470.728.107,92**
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21	0,00	0,00	0,00	0,00	8.470.728.107,92
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	**6.325.584.053,00**	**0,00**	**(6.325.584.053,00)**	**0,00**	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	6.325.584.053,00	0,00	(6.325.584.053,00)	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	**0,00**	**1.079.000,00**	**1.079.000,00**	**0,00**	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa	0,00	1.079.000,00	1.079.000,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan	**0,00**	**156.986,00**	**156.986,00**	**0,00**	**348.680.703,00**

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)
Kecelakaan Kerja (JKK)					
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran JKK	0,00	156.986,00	156.986,00	0,00	348.680.703,00
Jumlah	**120.623.916.888,00**	**147.573.709.467,69**	**26.949.822.579,69**	**122,34**	**123.767.620.691,92**

Realisasi Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021 sebesar Rp147.573.709.467,69 atau 122,34% dari target sebesar Rp120.623.916.888,00. Realisasi Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2021 meningkat sebesar Rp23.806.088.775,77 atau 19,23% dibandingkan Tahun 2020 sebesar Rp123.767.620.691,92.

5.1.5 Transfer Pemerintah Pusat - Dana Bagi Hasil Pajak

Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2021 sebesar Rp1.394.547.926.246,00 atau 118,98% dari target sebesar Rp1.172.066.030.292,00. Realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2021 lebih tinggi sebesar Rp637.334.938.579,00 atau 84,17% dibandingkan realisasi Tahun 2020 sebesar Rp757.212.987.667,00. Rincian Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak adalah sebagai berikut.

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	**1.172.066.030.292,00**	**1.394.547.926.246,00**	**118,98**	**757.212.987.667,00**
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	933.326.406.292,00	1.155.819.524.234,00	123,84	521.098.325.997,00
DBH PPh Pasal 21	229.147.667.300,00	229.147.667.300,00	100,00	236.113.297.970,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	9.580.656.700,00	9.580.656.700,00	100,00	0,00
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	11.300.000,00	78.012,00	0,69	1.363.700,00
Jumlah	**1.172.066.030.292,00**	**1.394.547.926.246,00**	**118,98**	**757.212.987.667,00**

Kontribusi Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2021 sebesar Rp1.394.547.926.246,00 atau 14,86% terhadap seluruh pendapatan Tahun 2021.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021, Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Riau Tahun 2021 dan Realisasi sebagai berikut:

Uraian	Alokasi (Rp)	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	**821.124.852.000,00**	**1.172.066.030.292,00**	**1.394.547.926.246,00**
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	632.685.105.000,00	933.326.406.292,00	1.155.819.524.234,00
DBH PPh Pasal 21	181.010.986.000,00	229.147.667.300,00	229.147.667.300,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	7.425.369.000,00	9.580.656.700,00	9.580.656.700,00
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	3.392.000,00	11.300.000,00	78.012,00
Jumlah	**821.124.852.000,00**	**1.172.066.030.292,00**	**1.394.547.926.246,00**

Jika dilihat dari data di atas, objek Dana Bagi Hasil Pajak yang mengalami pelampauan dari target anggaran Tahun 2021 adalah DBH Pajak Bumi dan Bangunan, beberapa objek Dana Bagi Hasil Pajak yang mencapai target anggaran Tahun 2021 antara lain DBH PPh Pasal 21 dan DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN. Sedangkan Dana Bagi Hasil Pajak yang tidak mencapai target pada Tahun 2021 yaitu DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT).

5.1.6 Transfer Pemerintah Pusat - Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Tahun 2021 sebesar Rp446.588.672.066,00 atau 104,82% dari target sebesar Rp426.037.614.186,00. Realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pajak Tahun 2021 lebih rendah sebesar Rp629.096.719.498,00 atau 58,48% dibandingkan realisasi Tahun 2020 sebesar Rp1.075.685.391.564,00. Rincian Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	**426.037.614.186,00**	**446.588.672.066,00**	**104,82**	**1.075.685.391.564,00**
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	357.703.979.000,00	357.703.979.000,00	100,00	1.024.329.791.086,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	7.765.709.400,00	11.406.366.606,00	146,88	15.469.674.385,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	939.635.175,00	939.635.175,00	100,00	720.610.395,00
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	9.738.335.175,00	11.394.865.371,00	117,01	7.799.214.533,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	41.103.211.756,00	56.235.083.743,00	136,81	22.594.014.119,00

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)	1.520.454.805,00	1.520.990.334,00	100,04	0,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	7.266.288.875,00	7.387.751.837,00	101,67	4.772.087.046,00
Jumlah	**426.037.614.186,00**	**446.588.672.066,00**	**104,82**	**1.075.685.391.564,00**

Kontribusi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Tahun 2021 sebesar Rp446.588.672.066,00 atau 4,76% terhadap seluruh pendapatan Tahun 2021.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021, Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Provinsi Riau Tahun 2021 dan Realisasi sebagai berikut:

Uraian	Alokasi (Rp)	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	**384.050.924.000,00**	**426.037.614.186,00**	**446.588.672.066,00**
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	338.394.741.000,00	357.703.979.000,00	357.703.979.000,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	7.708.434.000,00	7.765.709.400,00	11.406.366.606,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	842.317.000,00	939.635.175,00	939.635.175,00
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	9.355.714.000,00	9.738.335.175,00	11.394.865.371,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	20.744.984.000,00	41.103.211.756,00	56.235.083.743,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)	698.285.000,00	1.520.454.805,00	1.520.990.334,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	6.306.449.000,00	7.266.288.875,00	7.387.751.837,00
Jumlah	**384.050.924.000,00**	**426.037.614.186,00**	**446.588.672.066,00**

Jika dilihat dari data di atas, beberapa objek Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam mengalami pelampauan dari target antara lain Bagi Hasil dari SDA Gas Bumi, Bagi Hasil dari SDA Mineral dan Batubara-Royalti, Bagi Hasil dari Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Bagi Hasil dari Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH), dan Bagi Hasil dari Kehutanan-Dana Reboisasi (DR). Sedangkan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang mencapai target pada Tahun 2021 yaitu Bagi Hasil dari Minyak Bumi dan Bagi Hasil Mineral dan Batubara-Landrent.

5.1.7 Transfer Pemerintah Pusat - Dana Alokasi Umum (DAU)

Akun ini menampung pendapatan dana alokasi umum yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 37 s.d 49 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.17/PMK.07/2021 Tanggal 16 Februari Tahun 2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya, Provinsi Riau memperoleh Dana Alokasi Umum sebesar Rp1.455.383.959.000,00.

Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Umum Tahun 2021 sebesar Rp1.455.383.959.000,00 atau 100,00% dari target. Transfer Pemerintah Pusat – Dana Alokasi Umum Tahun 2021 lebih tinggi sebesar Rp23.034.681.000,00 atau 1,61% dibandingkan realisasi Tahun 2020 sebesar Rp1.432.349.278.000,00. Rincian Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)
Dana Alokasi Umum	**1.455.383.959.000,00**	**1.455.383.959.000,00**	**100,00**	**1.432.349.278.000,00**
Dana Alokasi Umum (DAU)	1.455.383.959.000,00	1.455.383.959.000,00	100,00	1.432.349.278.000,00
Jumlah	**1.455.383.959.000,00**	**1.455.383.959.000,00**	**100,00**	**1.432.349.278.000,00**

Kontribusi Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2021 sebesar Rp1.455.383.959.000,00 atau 15,51% terhadap seluruh pendapatan Tahun 2021.

5.1.8 Transfer Pemerintah Pusat - Dana Alokasi Khusus (DAK)

Akun ini menampung pendapatan dana alokasi khusus yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional yang menjadi urusan daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 50 s.d 64 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2021 sebesar Rp1.995.755.980.446,00 atau 95,93% dari target sebesar Rp2.080.321.584.000,00. Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2021 lebih rendah sebesar Rp5.150.560.728,00 atau

0,26% dibandingkan realisasi Tahun 2020 sebesar Rp2.000.906.541.174,00. Rincian Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)
Dana Alokasi Khusus	**2.080.321.584.000,00**	**1.995.755.980.446,00**	**95,93**	**2.000.906.541.174,00**
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	**308.779.222.000,00**	**254.119.352.389,00**	**82,30**	**254.332.990.347,00**
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	65.046.450.000,00	57.145.244.493,00	87,85	0,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB	2.054.470.000,00	1.004.606.756,00	48,90	0,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK	103.967.683.000,00	0,00	0,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	1.000.000.000,00	748.793.596,00	74,88	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	26.350.883.000,00	21.898.560.318,00	83,10	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	5.027.774.000,00	3.533.280.523,00	70,28	0,00
DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	6.299.789.000,00	4.250.115.115,00	67,46	0,00
DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	4.784.360.000,00	3.345.810.598,00	69,93	0,00
DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	21.783.305.000,00	19.229.767.972,00	88,28	0,00
DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	69.729.850.000,00	45.634.437.026,00	65,44	0,00
DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan	2.734.658.000,00	2.480.398.452,00	90,70	0,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Sekolah Menengah Kejuruan	0,00	93.424.107.041,00	0,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	0,00	1.424.230.499,00	0,00	0,00
DAK Fisik Reguler	0,00	0,00	0,00	116.425.943.887,00
DAK Fisik Afirmasi	0,00	0,00	0,00	1.595.361.000,00
DAK Fisik Penugasan	0,00	0,00	0,00	136.311.685.460,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	**1.771.542.362.000,00**	**1.741.636.628.057,00**	**98,31**	**1.746.573.550.827,00**
DAK Non Fisik-BOS Reguler	1.448.911.210.000,00	1.430.410.284.000,00	98,72	1.476.440.020.000,00
DAK Non Fisik-BOS Afirmasi	18.060.000.000,00	18.060.000.000,00	100,00	0,00
DAK Non Fisik-BOS Kinerja	13.980.000.000,00	9.050.000.000,00	64,74	0,00
DAK Non Fisik-TPG PNSD	275.564.331.000,00	275.564.331.000,00	100,00	251.012.907.000,00
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.473.000.000,00	1.473.000.000,00	100,00	655.500.000,00

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)
DAK Non Fisik-TKG PNSD	892.302.000,00	892.302.000,00	100,00	1.411.413.000,00
DAK Non Fisik-BOP PAUD	0,00	0,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	0,00	0,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	1.300.000.000,00	701.146.177,00	53,93	2.450.000.000,00
DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya	1.400.000.000,00	1.301.400.864,00	92,96	0,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	5.396.188.000,00	0,00	0,00	12.337.128.527,00
DAK Non Fisik-PK2UKM	2.352.080.000,00	2.131.649.256,00	90,63	2.113.111.300,00
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.225.554.000,00	1.064.817.760,00	86,88	153.471.000,00
DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	533.102.000,00	533.102.000,00	100,00	0,00
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	454.595.000,00	454.595.000,00	100,00	0,00
Jumlah	**2.080.321.584.000,00**	**1.995.755.980.446,00**	**95,93**	**2.000.906.541.174,00**

Kontribusi Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2021 sebesar Rp1.995.755.980.446,00 atau 21,27% terhadap seluruh pendapatan Tahun 2021.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.17/PMK.07/2021 Tanggal 16 Februari Tahun 2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya, Provinsi Riau memperoleh Dana Alokasi Khusus Reguler sebesar Rp220.202.791.000,00 dan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah dan Penugasan sebesar Rp88.576.431.000,00. Alokasi DAK Provinsi Riau Tahun 2021 dan Realisasi sebagai berikut:

Uraian	Alokasi (Rp)	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	**308.779.222.000,00**	**308.779.222.000,00**	**254.119.352.389,00**
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	65.046.450.000,00	65.046.450.000,00	57.145.244.493,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB	2.054.470.000,00	2.054.470.000,00	1.004.606.756,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK	103.967.683.000,00	103.967.683.000,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	748.793.596,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	26.350.883.000,00	26.350.883.000,00	21.898.560.318,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	5.027.774.000,00	5.027.774.000,00	3.533.280.523,00
DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi	6.299.789.000,00	6.299.789.000,00	4.250.115.115,00

Uraian	Alokasi (Rp)	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)
Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian			
DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	4.784.360.000,00	4.784.360.000,00	3.345.810.598,00
DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	21.783.305.000,00	21.783.305.000,00	19.229.767.972,00
DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	69.729.850.000,00	69.729.850.000,00	45.634.437.026,00
DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan	2.734.658.000,00	2.734.658.000,00	2.480.398.452,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Sekolah Menengah Kejuruan	0,00	0,00	93.424.107.041,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	0,00	0,00	1.424.230.499,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	**1.771.542.362.000,00**	**1.771.542.362.000,00**	**1.741.636.628.057,00**
DAK Non Fisik-BOS Reguler	1.448.911.210.000,00	1.448.911.210.000,00	1.430.410.284.000,00
DAK Non Fisik-BOS Afirmasi	18.060.000.000,00	18.060.000.000,00	18.060.000.000,00
DAK Non Fisik-BOS Kinerja	13.980.000.000,00	13.980.000.000,00	9.050.000.000,00
DAK Non Fisik-TPG PNSD	275.564.331.000,00	275.564.331.000,00	275.564.331.000,00
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.473.000.000,00	1.473.000.000,00	1.473.000.000,00
DAK Non Fisik-TKG PNSD	892.302.000,00	892.302.000,00	892.302.000,00
DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	701.146.177,00
DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	1.301.400.864,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	5.396.188.000,00	5.396.188.000,00	0,00
DAK Non Fisik-PK2UKM	2.352.080.000,00	2.352.080.000,00	2.131.649.256,00
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.225.554.000,00	1.225.554.000,00	1.064.817.760,00
DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	533.102.000,00	533.102.000,00	533.102.000,00
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	454.595.000,00	454.595.000,00	454.595.000,00
Jumlah	**2.080.321.584.000,00**	**2.080.321.584.000,00**	**1.995.755.980.446,00**

Jika dilihat dari data di atas, beberapa objek Dana Alokasi Khusus mengalami pencapaian target anggaran 2021 antara lain DAK Non Fisik-BOS Afirmasi, DAK Non Fisik-TPG PNSD, DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD, DAK Non Fisik-TKG PNSD, dan DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal. Sedangkan Dana Alokasi Khusus yang lain belum mencapai target pada tahun 2021.

Rincian Realisasi Transfer Pemerintah Pusat - Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2021 sebesar Rp1.995.755.980.446,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Transfer DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan SMA, Pendidikan SLB, Pendidikan SMK, Perpustakaan Daerah, Bidang Kesehatan dan KB (Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan), dan Bidang Jalan, diterima kas daerah masing-masing sebesar Rp152.322.751.886,00; Rp23.322.790.817,00; dan Rp19.229.767.972,00.

2. Transfer DAK Fisik Penugasan, Bidang Kesehatan dan KB, Bidang Jalan, Bidang Kelautan dan Perikanan, serta Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, diterima kas daerah masing-masing sebesar Rp3.533.280.523,00; Rp45.634.437.026,00; Rp4.250.115.115,00; Rp3.345.810.598,00; dan Rp2.480.398.452,00.
3. DAK Non Fisik – Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler terealisasi sebesar Rp1.430.410.284.000,00 diterima kas daerah.
4. DAK Non Fisik – Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi terealisasi sebesar Rp18.060.000.000,00 diterima kas daerah.
5. DAK Non Fisik – Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kinerja terealisasi sebesar Rp9.050.000.000,00 diterima kas daerah.
6. Transfer DAK Non Fisik – Tunjangan Profesi Guru PNSD terealisasi sebesar Rp275.564.331.000,00 diterima kas daerah dengan rincian:

Uraian	Realisasi Penerimaan (Rp)	Tanggal
Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD, Triwulan 1 Tahun 2021	82.669.299.000,00	19 April 2021
Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD, Triwulan 2 Tahun 2021	68.891.083.000,00	18 Juni 2021
Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD, Triwulan 3 Tahun 2021	68.891.083.000,00	30 September 2021
Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD, Triwulan 4 Tahun 2022	55.112.866.000,00	19 November 2021
Jumlah	**275.564.331.000,00**	

7. Transfer DAK Non Fisik – Tambahan Penghasilan Guru PNSD terealisasi sebesar Rp1.473.000.000,00 diterima kas daerah dengan rincian:

Uraian	Realisasi Penerimaan (Rp)	Tanggal
Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, Triwulan 1 Tahun 2021	441.900.000,00	13 April 2021
Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, Triwulan 2 Tahun 2021	368.250.000,00	14 Juni 2021
Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, Triwulan 3 Tahun 2021	368.250.000,00	28 September 2021
Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, Triwulan 4 Tahun 2022	294.600.000,00	17 November 2021
Jumlah	**1.473.000.000,00**	

8. Transfer DAK Non Fisik – Tunjangan Khusus Guru PNSD terealisasi sebesar Rp892.302.000,00 diterima kas daerah dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Realisasi Penerimaan (Rp)	Tanggal
Dana Tunjangan Khusus Guru PNSD, Triwulan 1 Tahun 2021	267.691.000,00	06 April 2021
Dana Tunjangan Khusus Guru PNSD, Triwulan 2 Tahun 2021	223.075.000,00	14 Juni 2021
Dana Tunjangan Khusus Guru PNSD, Triwulan 3 Tahun 2021	223.075.000,00	08 Oktober 2021
Dana Tunjangan Khusus Guru PNSD, Triwulan 4 Tahun 2022	178.461.000,00	23 November 2021
Jumlah	**892.302.000,00**	

9. Transfer DAK Non Fisik – Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya – Museum diterima kas daerah sebesar Rp701.146.177,00.
10. Transfer DAK Non Fisik – Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya – Taman Budaya diterima kas daerah sebesar Rp1.301.400.864,00
11. Transfer DAK Non Fisik – Dana PK2UKM diterima kas daerah sebesar Rp2.131.649.256,00.
12. Transfer DAK Non Fisik - Pelayanan Administrasi Kependudukan diterima kas daerah sebesar Rp1.064.817.760,00.
13. Transfer DAK Non Fisik – Fasilitasi Penanaman Modal diterima kas daerah sebesar Rp533.102.000,00.
14. Transfer DAK Non Fisik – Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak diterima kas daerah sebesar Rp454.595.000,00.

5.1.9 Transfer Pemerintah Pusat - Dana Insentif Daerah

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat lainnya - Dana Insentif Daerah Tahun 2021 sebesar Rp32.468.699.000,00 atau 100,00% dari target. Realisasi Transfer Pemerintah Pusat lainnya - Dana Insentif Daerah Tahun 2021 lebih tinggi sebesar Rp12.225.081.000,00 atau 60,39% dibandingkan realisasi Tahun 2020 sebesar Rp20.243.618.000,00. Rincian Pendapatan Dana Insentif Daerah adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)
Dana Insentif Daerah (DID)	**32.468.699.000,00**	**32.468.699.000,00**	**100,00**	**20.243.618.000,00**
DID	32.468.699.000,00	32.468.699.000,00	100,00	20.243.618.000,00
Jumlah	**32.468.699.000,00**	**32.468.699.000,00**	**100,00**	**20.243.618.000,00**

Kontribusi Dana Insentif Daerah Tahun 2021 sebesar Rp32.468.699.000,00 atau 0,35% terhadap seluruh pendapatan Tahun 2021.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021, Provinsi Riau memperoleh Dana Transfer Pemerintah Pusat – Dana Insentif Daerah sebesar Rp32.468.699.000,00. Dengan rincian Dana Insentif Daerah sebagai berikut:

	Jenis Kegiatan	Pagu Anggaran	Output	
			Jumlah	Satuan
Bidang Kesehatan - Sarana Prasarana		**12.440.000.000,00**		
1	Pembangunan Rumah Sakit beserta sarana dan prasarana pendukungnya UPT.Rumah Sakit Jiwa Tampan	4.800.000.000,00	1	Unit
2	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi UPT. Rumah Sakit Jiwa Tampan	4.800.000.000,00	1153	Buah/Unit
3	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi UPT. Instalasi Farmasi dan Logistik Kesehatan	2.300.000.000,00	3	Set/Unit
4	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi UPT. Rumah Sakit Jiwa Tampan	240.000.000,00	390	Set/Unit
5	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad	300.000.000,00	77	Unit
Bidang Penguatan Ekonomi		**20.028.699.000,00**		
1	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan (Bantuan kepada UMKM)	20.028.699.000,00	16700	Orang
	Jumlah	**32.468.699.000,00**		

5.1.10 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – Pendapatan Hibah

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dari Pendapatan Hibah Tahun 2021 sebesar Rp7.787.710.004,00 atau 284,74% dari target sebesar Rp2.735.000.000,00. Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – Pendapatan Hibah Tahun 2021 lebih tinggi sebesar Rp4.536.710.000,00 atau 139,55% dibandingkan realisasi Tahun 2020 sebesar Rp3.251.000.004,00. Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)
Pendapatan Hibah	**2.735.000.000,00**	**7.787.710.004,00**	**284,74**	**3.251.000.004,00**
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	**2.735.000.000,00**	**2.735.000.004,00**	**100,00**	**3.251.000.004,00**

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	**2.735.000.000,00**	**2.735.000.004,00**	**100,00**	**3.251.000.004,00**
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	2.735.000.000,00	2.735.000.004,00	100,00	3.251.000.004,00
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	**0,00**	**5.052.710.000,00**	**0,00**	**0,00**
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	**0,00**	**5.052.710.000,00**	**0,00**	**0,00**
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	0,00	5.052.710.000,00	0,00	0,00
Jumlah	**2.735.000.000,00**	**7.787.710.004,00**	**284,74**	**3.251.000.004,00**

Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – Pendapatan Hibah Tahun 2021 sebesar Rp7.787.710.004,00 merupakan kontribusi samsat dari Jasa Raharja sebesar Rp 2.735.000.000,00 sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Riau dengan Pemerintah Provinsi Riau Nomor P/5/SP/ 2021: Nomor 973/Bapenda/I/318.2 tanggal 18 Maret 2021 bahwa PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Riau memberikan Hibah Daerah kepada Pemerintah Provinsi Riau. Sedangkan untuk Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis sebesar Rp5.052.710.000,00 berasal dari berbagai UPT pada Badan Pendapatan Daerah.

5.1.11 Belanja Operasi - Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2021 sebesar Rp2.213.182.776.667,00 atau 95,45% dari anggaran sebesar Rp2.318.661.485.990,00. Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2021 meningkat sebesar Rp60.117.459.285,00 atau 2,79% dibanding realisasi Tahun 2020 sebesar Rp2.153.065.317.382,00. Rincian realisasi Belanja Pegawai adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)
Belanja Pegawai	**2.318.661.485.990,00**	**2.213.182.776.667,00**	**95,45**	**2.153.065.317.382,00**
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	**1.088.538.131.540,00**	**1.050.451.649.064,00**	**96,50**	**1.049.328.402.886,00**
Belanja Gaji Pokok ASN	**793.599.277.601,00**	**778.515.595.213,00**	**98,10**	**788.235.111.420,00**
Belanja Gaji Pokok PNS	793.599.277.601,00	778.515.595.213,00	98,10	788.235.111.420,00
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	**80.823.431.737,00**	**76.021.772.825,00**	**94,06**	**77.370.224.737,00**
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	80.823.431.737,00	76.021.772.825,00	94,06	77.370.224.737,00
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	**13.504.394.116,00**	**12.955.425.450,00**	**95,93**	**14.147.372.000,00**
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	13.504.394.116,00	12.955.425.450,00	95,93	14.147.372.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	**54.669.786.339,00**	**51.620.684.985,00**	**94,42**	**50.256.461.800,00**

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	54.669.786.339,00	51.620.684.985,00	94,42	50.256.461.800,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	**16.124.796.250,00**	**14.293.210.000,00**	**88,64**	**15.246.580.000,00**
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	16.124.796.250,00	14.293.210.000,00	88,64	15.246.580.000,00
Belanja Tunjangan Beras ASN	**46.275.862.144,00**	**44.602.745.038,00**	**96,38**	**39.196.188.647,00**
Belanja Tunjangan Beras PNS	46.275.862.144,00	44.602.745.038,00	96,38	39.196.188.647,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	**1.667.925.294,00**	**1.185.144.459,00**	**71,06**	**1.039.348.098,00**
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.667.925.294,00	1.185.144.459,00	71,06	1.039.348.098,00
Belanja Pembulatan Gaji ASN	**20.775.752,00**	**10.707.108,00**	**51,54**	**10.723.227,00**
Belanja Pembulatan Gaji PNS	20.775.752,00	10.707.108,00	51,54	10.723.227,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	**73.350.059.124,00**	**64.846.472.764,00**	**88,41**	**57.376.011.631,00**
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	73.299.839.124,00	64.801.274.764,00	88,41	57.376.011.631,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	50.220.000,00	45.198.000,00	90,00	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	**2.887.336.549,00**	**1.612.010.693,00**	**55,83**	**1.612.595.332,00**
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.182.439.314,00	1.595.883.593,00	73,12	1.612.595.332,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	704.897.235,00	16.127.100,00	2,29	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	**5.614.486.634,00**	**4.787.880.529,00**	**85,28**	**4.837.785.994,00**
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	5.614.486.634,00	4.787.880.529,00	85,28	4.837.785.994,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	**790.590.291.821,00**	**754.673.466.242,00**	**95,46**	**738.822.263.782,00**
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	**39.071.808.790,00**	**37.848.261.085,00**	**96,87**	**0,00**
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	39.071.808.790,00	37.848.261.085,00	96,87	0,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	**20.315.565.505,00**	**20.029.103.488,00**	**98,59**	**0,00**
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	20.315.565.505,00	20.029.103.488,00	98,59	0,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	**731.202.917.526,00**	**696.796.101.669,00**	**95,29**	**738.822.263.782,00**
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	731.202.917.526,00	696.796.101.669,00	95,29	738.822.263.782,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	**372.250.884.315,00**	**343.922.209.493,00**	**92,39**	**308.163.710.414,00**
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	**80.714.731.675,00**	**61.563.260.793,00**	**76,27**	**64.740.158.474,00**
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	34.526.937.175,00	30.880.840.341,00	89,44	0,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	23.301.594.014,00	15.671.023.748,00	67,25	0,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	21.466.290.908,00	13.960.473.704,00	65,03	0,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Permukaan	1.419.909.578,00	1.050.923.000,00	74,01	0,00

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)
Insentif Pemungutan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	64.740.158.474,00
Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	**288.870.047.440,00**	**280.256.430.300,00**	**97,02**	**239.933.437.940,00**
Belanja TPG PNSD	288.870.047.440,00	280.256.430.300,00	97,02	239.933.437.940,00
Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	**1.018.305.200,00**	**1.009.904.400,00**	**99,18**	**1.411.114.000,00**
Belanja TKG PNSD	1.018.305.200,00	1.009.904.400,00	99,18	1.411.114.000,00
Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	**1.599.000.000,00**	**1.078.500.000,00**	**67,45**	**2.079.000.000,00**
Belanja Tamsil Guru PNSD	1.599.000.000,00	1.078.500.000,00	67,45	2.079.000.000,00
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	**48.800.000,00**	**14.114.000,00**	**28,92**	**0,00**
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	48.800.000,00	14.114.000,00	28,92	0,00
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	**60.440.824.425,00**	**57.343.893.842,00**	**94,88**	**51.333.381.000,00**
Belanja Uang Representasi DPRD	**2.096.090.220,00**	**2.037.225.000,00**	**97,19**	**0,00**
Belanja Uang Representasi DPRD	2.096.090.220,00	2.037.225.000,00	97,19	0,00
Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	**296.227.050,00**	**198.243.000,00**	**66,92**	**0,00**
Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	296.227.050,00	198.243.000,00	66,92	0,00
Belanja Tunjangan Beras DPRD	**233.454.000,00**	**160.398.230,00**	**68,71**	**0,00**
Belanja Tunjangan Beras DPRD	233.454.000,00	160.398.230,00	68,71	0,00
Belanja Uang Paket DPRD	**176.940.000,00**	**174.232.500,00**	**98,47**	**173.130.000,00**
Belanja Uang Paket DPRD	176.940.000,00	174.232.500,00	98,47	173.130.000,00
Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	**3.068.065.875,00**	**2.953.976.250,00**	**96,28**	**0,00**
Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	3.068.065.875,00	2.953.976.250,00	96,28	0,00
Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	**267.525.000,00**	**257.215.500,00**	**96,15**	**258.477.000,00**
Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	267.525.000,00	257.215.500,00	96,15	258.477.000,00
Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	**457.011.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	457.011.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	**16.380.000.000,00**	**16.135.000.000,00**	**98,50**	**16.044.000.000,00**
Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	16.380.000.000,00	16.135.000.000,00	98,50	16.044.000.000,00
Belanja Tunjangan Reses DPRD	**4.095.000.000,00**	**4.011.000.000,00**	**97,95**	**3.990.000.000,00**
Belanja Tunjangan Reses DPRD	4.095.000.000,00	4.011.000.000,00	97,95	3.990.000.000,00
Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	**56.000.000,00**	**45.854.782,00**	**81,88**	**0,00**
Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	56.000.000,00	45.854.782,00	81,88	0,00
Belanja Pembulatan Gaji DPRD	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Belanja Pembulatan Gaji DPRD	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	**18.163.817.280,00**	**16.822.989.580,00**	**92,62**	**16.330.000.000,00**

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	204.000.000,00	169.597.260,00	83,14	0,00
Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	4.954.320,00	4.181.580,00	84,40	0,00
Belanja Jaminan Kematian DPRD	14.862.960,00	12.544.740,00	84,40	0,00
Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	17.940.000.000,00	16.636.666.000,00	92,74	16.330.000.000,00
Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	**14.707.344.000,00**	**14.543.259.000,00**	**98,88**	**14.506.424.000,00**
Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	14.707.344.000,00	14.543.259.000,00	98,88	14.506.424.000,00
Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	**442.350.000,00**	**4.500.000,00**	**1,02**	**31.350.000,00**
Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	442.350.000,00	4.500.000,00	1,02	31.350.000,00
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	**271.154.327,00**	**238.640.026,00**	**88,01**	**0,00**
Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	**79.100.000,00**	**75.600.000,00**	**95,58**	**0,00**
Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	79.100.000,00	75.600.000,00	95,58	0,00
Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	**12.084.000,00**	**9.072.000,00**	**75,07**	**0,00**
Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	12.084.000,00	9.072.000,00	75,07	0,00
Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	**141.857.920,00**	**136.080.000,00**	**95,93**	**0,00**
Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	141.857.920,00	136.080.000,00	95,93	0,00
Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	**14.104.640,00**	**6.083.280,00**	**43,13**	**0,00**
Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	14.104.640,00	6.083.280,00	43,13	0,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	**5.342.968,00**	**3.612.666,00**	**67,62**	**0,00**
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	5.342.968,00	3.612.666,00	67,62	0,00
Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	**2.935.614,00**	**1.360,00**	**0,05**	**0,00**
Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.935.614,00	1.360,00	0,05	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	**15.107.105,00**	**7.568.640,00**	**50,10**	**0,00**
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	15.107.105,00	7.568.640,00	50,10	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	**155.520,00**	**155.520,00**	**100,00**	**0,00**
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	155.520,00	155.520,00	100,00	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	**466.560,00**	**466.560,00**	**100,00**	**0,00**
Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	466.560,00	466.560,00	100,00	0,00
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	**6.570.199.562,00**	**6.552.918.000,00**	**99,74**	**5.417.559.300,00**
Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	**561.600.000,00**	**544.320.000,00**	**96,92**	**442.560.000,00**
Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	561.600.000,00	544.320.000,00	96,92	442.560.000,00
Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	**6.008.599.562,00**	**6.008.598.000,00**	**100,00**	**4.974.999.300,00**

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)
Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	6.008.599.562,00	6.008.598.000,00	100,00	4.974.999.300,00
Jumlah	**2.318.661.485.990,00**	**2.213.182.776.667,00**	**95,45**	**2.153.065.317.382,00**

Pemberian Gaji dan Tunjangan kepada seluruh Pegawai PNS berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tertanggal 21 Maret 2019 dan Peraturan Gubernur Riau Nomor 9 Tahun 2018 tertanggal 14 Februari 2018.

Berikut Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai dari masing-masing OPD:

No	Organisasi Perangkat Daerah	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	1.052.582.676.490,00	1.042.686.505.352,00	99,06	982.011.856.456,00
2	Dinas Kesehatan	244.907.867.136,00	198.938.786.909,00	81,23	188.697.539.150,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	73.668.409.182,00	71.751.288.993,00	97,40	71.051.703.966,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	25.352.840.376,00	24.863.178.028,00	98,07	25.365.161.533,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9.107.465.889,00	9.042.337.976,00	99,28	8.701.790.803,00
6	Dinas Sosial	25.147.310.060,00	23.965.685.779,00	95,30	24.698.633.584,00
7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	27.944.495.023,00	26.691.139.302,00	95,51	29.111.742.021,00
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	16.299.865.949,00	14.607.234.749,00	89,62	14.283.486.499,00
9	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	43.272.166.344,00	42.652.127.910,00	98,57	41.550.384.373,00
10	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	113.793.901.882,00	110.661.109.621,00	97,25	113.406.754.701,00
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	15.531.844.090,00	15.180.581.223,00	97,74	15.383.774.278,00
12	Dinas Perhubungan	17.598.899.262,00	17.551.311.328,00	99,73	16.369.550.559,00
13	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	14.088.648.563,00	13.904.391.334,00	98,69	11.742.063.719,00
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Atap	18.779.497.103,00	17.478.765.203,00	93,07	18.397.875.522,00
15	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	14.176.068.934,00	13.906.615.041,00	98,10	14.746.770.108,00
16	Dinas Kebudayaan	13.319.906.762,00	13.228.757.143,00	99,32	12.858.638.950,00
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	19.149.916.303,00	19.123.411.267,00	99,86	18.080.527.783,00
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	20.729.936.818,00	20.427.993.958,00	98,54	21.104.432.378,00
19	Dinas Pariwisata	17.657.168.698,00	17.120.771.176,00	96,96	16.562.820.547,00
20	Dinas Perkebunan	17.822.716.327,00	16.183.382.430,00	90,80	14.333.744.746,00

No	Organisasi Perangkat Daerah	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)
21	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	15.103.384.410,00	14.875.450.178,00	98,49	13.500.850.545,00
22	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	27.608.255.351,00	27.053.221.208,00	97,99	28.377.530.685,00
23	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	36.523.091.730,00	33.611.247.866,00	92,03	33.782.088.495,00
24	Sekretariat Daerah	83.871.929.069,00	80.693.139.348,00	96,21	79.009.464.460,00
25	Sekretariat DPRD	86.364.556.653,00	82.450.846.412,00	95,47	79.632.312.965,00
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	36.000.000.000,00	35.282.456.741,00	98,01	35.340.884.878,00
27	Badan Pendapatan Daerah	126.545.078.614,00	105.787.583.394,00	83,60	91.853.376.803,00
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	19.530.954.730,00	18.792.783.368,00	96,22	50.684.504.065,00
29	Badan Kepegawaian Daerah	18.090.120.094,00	17.926.394.810,00	99,09	17.605.049.334,00
30	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	18.477.896.282,00	18.264.341.997,00	98,84	17.793.866.674,00
31	Badan Penghubung	10.498.193.180,00	10.299.461.957,00	98,11	10.156.634.768,00
32	Inspektorat	28.199.607.124,00	27.905.751.813,00	98,96	26.386.896.711,00
33	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	10.916.817.562,00	10.274.722.853,00	94,12	10.482.605.323,00
	Jumlah	**2.318.661.485.990,00**	**2.213.182.776.667,00**	**95,45**	**2.153.065.317.382,00**

Berdasarkan data di atas, jumlah Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2021 sebesar Rp2.213.182.776.667,00 untuk pembayaran Belanja Pegawai sejumlah 14.989 Orang.

5.1.12 Belanja Operasi - Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2021 sebesar Rp2.448.186.175.191,09 atau 89,03% dari anggaran sebesar Rp2.749.750.400.302,00. Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2021 meningkat sebesar Rp371.038.880.048,92 atau 17,86% dibanding realisasi Tahun 2020 sebesar Rp2.077.147.295.142,17. Rincian realisasi Belanja Barang dan Jasa adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)
Belanja Barang dan Jasa	**2.749.750.400.302,00**	**2.448.186.175.191,09**	**89,03**	**2.077.147.295.142,17**
Belanja Barang	**516.244.703.955,00**	**450.427.394.104,89**	**87,25**	**184.013.940.134,85**
Belanja Barang Pakai Habis	**516.120.690.100,00**	**450.311.946.104,89**	**87,25**	**184.013.940.134,85**
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	114.728.434.919,00	109.022.781.289,00	95,03	261.047.433,00
Belanja Bahan-Bahan Kimia	15.757.859.388,00	10.796.504.389,00	68,52	5.322.560.875,00
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	6.813.276.258,00	5.884.851.048,00	86,37	2.481.506.049,00

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)
Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	6.228.409.747,00	3.969.392.222,00	63,73	592.554.805,00
Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	139.890.000,00	123.498.750,00	88,28	22.625.000,00
Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	218.941.000,00	167.385.000,00	76,45	87.660.000,00
Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	1.008.556.640,00	920.516.350,00	91,27	1.284.818.450,00
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	14.624.731.047,00	10.184.480.503,00	69,64	0,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	1.181.200.000,00	1.014.220.094,00	85,86	0,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	3.476.638.446,00	3.407.255.260,00	98,00	0,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	1.959.681.930,00	1.627.981.466,00	83,07	0,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	14.130.000,00	9.271.000,00	65,61	246.815.250,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	30.062.807,00	19.645.500,00	65,35	0,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	1.594.800.000,00	1.358.994.416,00	85,21	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	10.618.350.637,00	9.742.181.156,70	91,75	10.852.168.624,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	16.502.576.910,00	15.779.681.782,00	95,62	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	50.260.317.112,00	43.331.002.084,00	86,21	14.384.189.747,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.066.451.548,00	875.326.000,00	82,08	556.429.100,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	221.776.025,00	204.974.401,00	92,42	176.766.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	131.090.000,00	55.771.600,00	42,54	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	3.528.048.104,00	3.089.753.031,00	87,58	2.282.485.076,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	303.290.701,00	292.410.425,00	96,41	86.900.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	734.125.683,00	630.647.240,00	85,90	164.741.495,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	1.083.314.569,00	1.037.586.200,00	95,78	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	23.895.013.746,00	21.338.446.073,00	89,30	111.652.184,00
Belanja Obat-Obatan-Obat	10.065.773.188,00	6.362.389.082,00	63,21	5.954.515.281,00
Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	2.555.700,00	2.540.000,00	99,39	0,00
Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	45.988.519.874,00	40.436.127.283,19	87,93	0,00
Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	25.798.576,00	25.447.420,00	98,64	0,00
Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	5.399.979,00	5.376.808,00	99,57	0,00

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)
Belanja Natura dan Pakan-Natura	2.722.743.116,00	563.986.136,00	20,71	0,00
Belanja Natura dan Pakan-Pakan	1.397.972.650,00	1.340.955.150,00	95,92	0,00
Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	11.759.940,00	11.688.000,00	99,39	0,00
Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya	107.355.375,00	105.961.000,00	98,70	0,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	42.092.953.320,00	35.799.849.514,00	85,05	88.163.545.834,00
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	6.396.918.000,00	5.178.092.461,00	80,95	5.538.638.018,00
Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	54.234.020.000,00	49.968.327.452,00	92,13	0,00
Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	18.002.022.000,00	10.301.592.900,00	57,22	1.080.000,00
Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	2.582.806.450,00	2.366.536.183,00	91,63	1.038.804.360,00
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	46.809.377.000,00	44.610.116.679,00	95,30	0,00
Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	341.500.000,00	283.945.000,00	83,15	0,00
Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	415.340.310,00	391.967.500,00	94,37	0,00
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	895.206.309,00	436.265.000,00	48,73	420.640.000,00
Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	481.689.100,00	451.460.000,00	93,72	76.250.000,00
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	1.547.302.457,00	1.435.461.780,00	92,77	702.602.700,00
Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	2.457.479.336,00	2.374.342.155,00	96,62	1.362.362.199,00
Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	60.302.160,00	60.192.000,00	99,82	0,00
Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	56.362.937,00	55.906.000,00	99,19	24.367.500,00
Belanja Pakaian Penyelamatan	360.813.605,00	344.683.458,00	95,53	0,00
Belanja Pakaian Siaga	126.478.609,00	112.974.334,00	89,32	0,00
Belanja Pakaian Teknik	148.656.516,00	125.848.914,00	84,66	0,00
Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	637.682.150,00	566.742.626,00	88,88	0,00
Belanja Pakaian Kerja Laboratorium	96.023.608,00	50.592.800,00	52,69	0,00
Belanja Pakaian Kerja Bengkel	4.136.250,00	4.110.000,00	99,37	0,00
Belanja Pakaian KORPRI	1.200.000,00	1.130.000,00	94,17	405.422.100,00
Belanja Pakaian Adat Daerah	624.472.635,00	585.340.840,00	93,73	620.706.186,00
Belanja Pakaian Batik Tradisional	692.927.461,00	630.374.050,00	90,97	273.175.000,00
Belanja Pakaian Olahraga	430.174.272,00	263.706.300,00	61,30	326.017.785,00
Belanja Pakaian Paskibraka	176.000.000,00	173.360.000,00	98,50	0,00
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	0,00	0,00	0,00	2.491.454.894,00
Belanja Bahan Kelengkapan Teknisi Las dan Bor	0,00	0,00	0,00	44.547.800,00
Belanja Bahan Habis Pakai Material Kesehatan	0,00	0,00	0,00	21.133.673.736,85

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)
Belanja Bahan Habis Pakai Material Laboratorium	0,00	0,00	0,00	646.420.769,00
Belanja Bahan Kelengkapan Pertukangan	0,00	0,00	0,00	269.289.120,00
Belanja Bahan Kelengkapan Teknisi Mesin	0,00	0,00	0,00	15.908.500,00
Belanja Bahan Kelengkapan Teknisi Elektronika	0,00	0,00	0,00	14.929.200,00
Belanja Bahan Kelengkapan Teknisi Kelistrikan	0,00	0,00	0,00	99.175.500,00
Belanja Bahan Pengharum Ruangan	0,00	0,00	0,00	563.852.659,00
Belanja Bahan Habis Pakai Material Kedokteran Gigi	0,00	0,00	0,00	14.425.970,00
Belanja Kelengkapan Pasien Jiwa	0,00	0,00	0,00	33.125.000,00
Belanja Habis Pakai Alat Peraga	0,00	0,00	0,00	16.317.000,00
Belanja Bahan Habis Pakai Material Keterampilan	0,00	0,00	0,00	150.483.000,00
Belanja Bahan Logistik Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	6.903.141.322,00
Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket	0,00	0,00	0,00	1.023.267.000,00
Belanja Dekorasi	0,00	0,00	0,00	822.381.775,00
Belanja Dokumentasi	0,00	0,00	0,00	767.507.569,00
Belanja Bahan Specimen	0,00	0,00	0,00	4.740.841,00
Belanja Bahan Inseminasi Buatan	0,00	0,00	0,00	320.865.195,00
Belanja Bahan Sosialisasi	0,00	0,00	0,00	18.691.200,00
Belanja Bahan Publikasi	0,00	0,00	0,00	3.299.787.076,00
Belanja Baju Pasien	0,00	0,00	0,00	654.782.375,00
Belanja Bahan Pestisida	0,00	0,00	0,00	363.571.880,00
Belanja Bahan Praktek	0,00	0,00	0,00	308.773.652,00
Belanja Bahan Lomba	0,00	0,00	0,00	9.657.400,00
Belanja Kartu Anggota Elektronik	0,00	0,00	0,00	27.850.000,00
Belanja perlengkapan rumah tangga	0,00	0,00	0,00	172.272.650,00
Belanja Barang Tak Habis Pakai	**124.013.855,00**	**115.448.000,00**	**93,09**	**0,00**
Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	11.853.855,00	5.808.000,00	49,00	0,00
Belanja Komponen-Komponen Lainnya	105.500.000,00	104.500.000,00	99,05	0,00
Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	6.660.000,00	5.140.000,00	77,18	0,00
Belanja Jasa	**989.192.576.640,00**	**904.297.738.337,88**	**91,42**	**640.913.267.096,24**
Belanja Jasa Kantor	**723.809.175.375,00**	**655.652.769.215,68**	**90,58**	**445.538.177.325,90**
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7.877.750.000,00	4.851.178.000,00	61,58	69.350.000,00
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	3.298.173.520,00	2.963.698.112,00	89,86	0,00
Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	333.600.000,00	330.600.000,00	99,10	0,00

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)
Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	195.200.000,00	195.200.000,00	100,00	0,00
Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	644.445.200,00	625.816.900,00	97,11	0,00
Honorarium Penyelenggara Ujian	18.120.000,00	10.875.000,00	60,02	0,00
Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	1.038.000.000,00	1.005.000.000,00	96,82	0,00
Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	258.629.365.200,00	256.967.938.800,00	99,36	101.435.898.400,00
Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	100.311.231.293,00	71.675.756.277,50	71,45	51.643.445.950,00
Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	5.100.909.920,00	4.850.858.274,00	95,10	2.175.741.000,00
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	19.009.488.542,00	17.385.894.552,00	91,46	0,00
Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	11.160.000.000,00	11.130.109.144,00	99,73	25.666.766.040,00
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	3.239.700.000,00	642.000.000,00	19,82	0,00
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	609.590.528,00	606.249.390,00	99,45	0,00
Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	1.056.876.480,00	1.008.313.712,00	95,41	2.241.400.000,00
Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	2.090.040.400,00	2.032.490.340,00	97,25	4.440.900.000,00
Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	1.018.269.120,00	1.018.269.120,00	100,00	1.226.010.000,00
Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	501.900.000,00	476.550.000,00	94,95	279.750.000,00
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	19.102.297.944,00	18.774.172.035,00	98,28	0,00
Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	35.274.720.008,00	34.336.583.817,00	97,34	33.013.099.369,00
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	4.234.531.768,00	3.691.119.434,00	87,17	0,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli	23.834.391.240,00	19.707.206.182,00	82,68	14.603.116.000,00
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	45.366.498.354,00	43.447.261.618,00	95,77	41.722.114.751,00
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	41.873.381.659,00	40.596.252.431,18	96,95	24.000.558.264,00
Belanja Jasa Tenaga Supir	2.461.268.448,00	2.410.237.069,00	97,93	0,00
Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	132.285.120,00	132.208.973,00	99,94	0,00
Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	504.300.000,00	410.870.000,00	81,47	0,00
Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	735.000.000,00	554.025.000,00	75,38	0,00
Belanja Jasa Tata Rias	25.200.000,00	25.200.000,00	100,00	0,00
Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	8.610.429.349,00	7.889.832.382,00	91,63	10.113.323.667,00
Belanja Jasa Tenaga Operator Tiket	176.146.080,00	168.030.384,00	95,39	0,00
Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	461.841.323,00	282.455.440,00	61,16	0,00
Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	30.000.000,00	12.835.000,00	42,78	0,00
Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	1.745.720.000,00	432.660.000,00	24,78	0,00

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)
Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	50.000.000,00	49.500.000,00	99,00	0,00
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	29.970.767.963,00	28.253.271.637,00	94,27	0,00
Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	300.000.000,00	172.000.000,00	57,33	0,00
Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	646.132.636,00	539.368.558,00	83,48	0,00
Belanja Jasa Kalibrasi	354.599.500,00	237.567.000,00	67,00	0,00
Belanja Jasa Pengolahan Sampah	583.904.520,00	423.445.800,00	72,52	0,00
Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	1.478.012.357,00	1.459.682.200,00	98,76	0,00
Belanja Jasa Pengukuran Tanah	71.080.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	13.751.926.354,00	11.969.456.572,00	87,04	0,00
Belanja Jasa Operator Kapal	403.406.528,00	393.486.280,00	97,54	248.400.000,00
Belanja Tagihan Telepon	779.484.279,00	456.811.558,00	58,60	1.374.726.402,00
Belanja Tagihan Air	1.241.698.040,00	1.001.384.330,00	80,65	888.571.246,00
Belanja Tagihan Listrik	48.940.618.940,00	41.152.939.894,00	84,09	42.513.560.505,00
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	899.162.365,00	606.587.149,00	67,46	1.047.618.240,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	13.381.095.032,00	11.897.527.622,00	88,91	10.258.131.378,00
Belanja Paket/Pengiriman	4.437.839.265,00	3.343.272.095,00	75,34	595.810.785,00
Belanja Penambahan Daya	121.496.000,00	9.713.500,00	7,99	0,00
Belanja Registrasi/Keanggotaan	31.250.000,00	20.000.000,00	64,00	217.000.000,00
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	4.761.776.300,00	2.295.178.551,00	48,20	273.251.114,00
Belanja Pengolahan Air Limbah	441.453.800,00	334.989.083,00	75,88	0,00
Belanja Medical Check Up	462.800.000,00	388.840.000,00	84,02	0,00
Belanja Sertifikasi	0,00	0,00	0,00	278.421.750,00
Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00	5.204.574.482,00
Belanja Jasa Perawatan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	10.865.633.634,00
Belanja Jasa Dekorasi	0,00	0,00	0,00	771.401.700,00
Belanja Jasa Perawatan Bangunan	0,00	0,00	0,00	1.207.722.894,00
Belanja Jasa Instalasi	0,00	0,00	0,00	487.422.000,00
Belanja Jasa Rehabilitasi Bangunan	0,00	0,00	0,00	513.126.028,90
Belanja Jasa Perawatan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	25.100.000,00
Belanja Jasa Sistem Informasi	0,00	0,00	0,00	399.503.750,00
Belanja Jasa Publikasi Media Audio Visual	0,00	0,00	0,00	3.612.990.000,00
Belanja Jasa Pertunjukan Seni Budaya	0,00	0,00	0,00	613.190.000,00
Belanja Jasa Kebersihan Kantor	0,00	0,00	0,00	519.594.900,00
Belanja jasa pelayanan perpustakaan daerah	0,00	0,00	0,00	103.910.000,00

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)
Belanja jasa penanganan perkara hukum	0,00	0,00	0,00	122.100.000,00
Belanja Jasa Kalibrasi Peralatan Medis	0,00	0,00	0,00	1.198.995.600,00
Belanja Jasa Publikasi Media Cetak	0,00	0,00	0,00	8.274.654.200,00
Belanja Jasa Publikasi Media Online	0,00	0,00	0,00	2.763.465.880,00
Belanja Jasa Publikasi Luar/Dalam Ruang	0,00	0,00	0,00	7.665.476.199,00
Belanja Jasa Pemulangan Jenazah Pasien	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00
Operator Alat Berat	0,00	0,00	0,00	277.360.000,00
Pengawas Lapangan Pekerjaan Umum	0,00	0,00	0,00	969.120.000,00
Tenaga Teknis Pembenihan Perikanan	0,00	0,00	0,00	237.000.000,00
Belanja Jasa Operator Instalasi Pengelolaan Air Minum	0,00	0,00	0,00	97.600.000,00
Belanja Jasa Operator Intake	0,00	0,00	0,00	96.720.000,00
Belanja Jasa Operator Scada	0,00	0,00	0,00	53.520.000,00
Belanja Jasa Pengawas Perpipaan	0,00	0,00	0,00	77.680.000,00
Tukang Bangunan	0,00	0,00	0,00	3.401.940.400,00
Pembantu Tukang Bangunan	0,00	0,00	0,00	39.760.000,00
Penceramah Agama	0,00	0,00	0,00	124.050.000,00
Imam Masjid	0,00	0,00	0,00	51.000.000,00
Muadzin	0,00	0,00	0,00	13.500.000,00
Pengantar Makanan	0,00	0,00	0,00	61.600.000,00
Pengasuh Anak	0,00	0,00	0,00	174.720.000,00
Pembina Kerohanian	0,00	0,00	0,00	82.500.000,00
Psikolog Anak	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00
Pengelola Asrama	0,00	0,00	0,00	1.095.280.000,00
Pekerja Sosial	0,00	0,00	0,00	267.840.000,00
Tenaga Gharim	0,00	0,00	0,00	132.000.000,00
Pembaca Al-Quran	0,00	0,00	0,00	6.200.000,00
Pramu Bhakti	0,00	0,00	0,00	23.040.000,00
Petugas Ekstrakurikuler	0,00	0,00	0,00	71.520.000,00
Tenaga Loundry	0,00	0,00	0,00	275.596.285,00
Tukang Masak	0,00	0,00	0,00	127.200.000,00
Pembimbing Fisik/Mental	0,00	0,00	0,00	114.000.000,00
Pramu Lansia	0,00	0,00	0,00	368.480.000,00
Petugas Memandikan Mayat	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
Petugas Penggali Kubur	0,00	0,00	0,00	6.750.000,00
Pelatih	0,00	0,00	0,00	1.973.550.000,00
Asisten Pelatih	0,00	0,00	0,00	1.152.000.000,00
Instruktur Pusat Kebugaran (Fitness)	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)
Juri Pertandingan	0,00	0,00	0,00	14.400.000,00
Official	0,00	0,00	0,00	70.220.000,00
Instruktur Senam	0,00	0,00	0,00	88.100.000,00
Nelayan / Petugas Pengelola Kenelayanan	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
Tenaga Teknisi Pemberian Ikan / Petugas Pendataan Perikanan	0,00	0,00	0,00	84.000.000,00
Tenaga Teknisi Pendamping Lapangan Perikanan	0,00	0,00	0,00	153.840.000,00
Tenaga Teknisi Mekanik Perikanan	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00
Petugas Pengelola Data Perairan Umum	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00
Petugas Pengelola Perizinan Perikanan Tangkap	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00
Petugas Perhitungan Angka Konsumsi Ikan	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00
Petugas Informasi Pasar	0,00	0,00	0,00	28.800.000,00
Petugas Pengelola Data Tindak Pidana Perikanan (TPP)	0,00	0,00	0,00	48.000.000,00
Petugas Pengelola Data Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	0,00	0,00	0,00	19.900.000,00
Pramu Stand Event	0,00	0,00	0,00	16.950.000,00
MC Event	0,00	0,00	0,00	18.250.000,00
Narator Event	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Pemandu Wisata	0,00	0,00	0,00	93.600.000,00
Tenaga Elektrikal dan Mekanikal	0,00	0,00	0,00	983.680.000,00
Tenaga Teknisi Listrik	0,00	0,00	0,00	374.240.000,00
Pengawas Kelistrikan	0,00	0,00	0,00	401.280.000,00
Tenaga Teknisi Elektronik	0,00	0,00	0,00	415.360.000,00
Tenaga Administrasi BUD/SKPKD/PPKD	0,00	0,00	0,00	2.493.000.000,00
Tenaga Akuntansi	0,00	0,00	0,00	96.000.000,00
Tenaga Administrasi Keuangan	0,00	0,00	0,00	78.000.000,00
Tenaga Administrasi Aset	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00
Instruktur	0,00	0,00	0,00	73.650.000,00
Pembantu Instruktur	0,00	0,00	0,00	77.600.000,00
Pengajar	0,00	0,00	0,00	971.120.000,00
Pembaca Doa	0,00	0,00	0,00	37.600.000,00
Notulen	0,00	0,00	0,00	13.450.000,00
Pemimpin Lagu	0,00	0,00	0,00	12.800.000,00
Pengambil Sumpah PNS	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Pengukuh Sumpah	0,00	0,00	0,00	13.500.000,00
Pembantu Lapangan	0,00	0,00	0,00	1.469.360.000,00
Tenaga Ahli Dalam Rangka Kebijakan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	36.000.000,00
Tenaga Ahli Dalam Rangka Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	0,00	0,00	0,00	122.000.000,00

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)
Pramu Kantor/Pramusaji KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00	2.263.760.000,00
Pemandu Sumpah	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Uang Saku	0,00	0,00	0,00	2.652.650.000,00
Belanja Jasa Perorangan Lainnya	0,00	0,00	0,00	5.879.214.512,00
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	**206.561.520.432,00**	**203.345.036.128,00**	**98,44**	**143.440.656.223,00**
Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	44.748.000.000,00	42.063.430.500,00	94,00	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	161.379.141.000,00	160.941.484.000,00	99,73	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	414.000.000,00	329.113.626,00	79,50	143.333.821.223,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	20.379.432,00	11.008.002,00	54,02	10.290.000,00
Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	0,00	0,00	0,00	24.985.000,00
Belanja Premi Asuransi Kesehatan	0,00	0,00	0,00	71.560.000,00
Belanja Sewa Tanah	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**100,00**	**10.000.000,00**
Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	10.000.000,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	**11.317.194.745,00**	**8.723.442.050,00**	**77,08**	**2.525.067.580,00**
Belanja Sewa Grader	310.400.000,00	205.871.335,00	66,32	0,00
Belanja Sewa Excavator	255.000.000,00	122.703.500,00	48,12	0,00
Belanja Sewa Loader	125.580.000,00	31.185.000,00	24,83	0,00
Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	2.909.941.645,00	2.764.863.665,00	95,01	0,00
Belanja Sewa Alat Besar Apung Lainnya	20.020.600,00	20.020.550,00	100,00	0,00
Belanja Sewa Electric Generating Set	26.000.000,00	24.500.000,00	94,23	64.765.000,00
Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	56.000.000,00	53.482.000,00	95,50	0,00
Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	6.400.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	773.200.000,00	639.326.000,00	82,69	0,00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	281.000.000,00	269.673.500,00	95,97	0,00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	159.000.000,00	92.120.000,00	57,94	0,00
Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Sewa Perkakas Bengkel Kerja	10.200.000,00	10.200.000,00	100,00	0,00
Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	9.710.000,00	9.710.000,00	100,00	0,00
Belanja Sewa Mebel	32.992.500,00	11.636.500,00	35,27	0,00
Belanja Sewa Alat Pendingin	80.000.000,00	59.000.000,00	73,75	0,00
Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	6.235.000.000,00	4.389.200.000,00	70,40	0,00

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)
Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	15.000.000,00	14.950.000,00	99,67	0,00
Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan	750.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Sewa Tenda	0,00	0,00	0,00	593.418.000,00
Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	0,00	0,00	0,00	62.900.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Bercorak Kebudayaan/Kesenian	0,00	0,00	0,00	47.600.000,00
Belanja Sewa Mesin Peralatan Kerja	0,00	0,00	0,00	1.549.377.580,00
Belanja Sewa Meja Kursi	0,00	0,00	0,00	207.007.000,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	**9.927.858.000,00**	**5.309.394.080,00**	**53,48**	**25.173.751.080,00**
Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	2.091.200.000,00	1.899.050.000,00	90,81	5.724.846.080,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	3.382.500.000,00	199.450.000,00	5,90	0,00
Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	820.008.000,00	479.726.000,00	58,50	0,00
Belanja Sewa Asrama	320.000.000,00	192.500.000,00	60,16	0,00
Belanja Sewa Hotel	3.224.690.000,00	2.495.776.080,00	77,40	0,00
Belanja Sewa Motel	89.460.000,00	42.892.000,00	47,95	0,00
Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	0,00	0,00	0,00	19.448.905.000,00
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	**843.413.431,00**	**627.506.400,00**	**74,40**	**729.810.000,00**
Belanja Sewa Audio Visual	717.863.431,00	524.756.400,00	73,10	729.810.000,00
Belanja Sewa Alat Musik	80.000.000,00	60.000.000,00	75,00	0,00
Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	21.550.000,00	18.750.000,00	87,01	0,00
Belanja Sewa Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	**25.325.804.972,00**	**22.649.189.411,20**	**89,43**	**15.954.917.362,34**
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	41.000.000,00	40.700.000,00	99,27	0,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	87.650.000,00	74.472.750,00	84,97	0,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	119.500.000,00	19.382.000,00	16,22	0,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	2.587.983.451,00	1.956.980.401,20	75,62	0,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	347.865.553,00	174.198.750,00	50,08	0,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	155.000.000,00	134.805.000,00	86,97	0,00

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	3.205.212.500,00	3.139.885.100,00	97,96	0,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	407.324.002,00	357.591.300,00	87,79	0,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal dalam Bangunan	80.000.000,00	64.452.939,00	80,57	0,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	8.617.707.045,00	8.342.540.860,00	96,81	0,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	2.594.583.280,00	1.949.209.700,00	75,13	0,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	1.166.010.000,00	1.165.661.750,00	99,97	0,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	18.517.500,00	9.368.000,00	50,59	0,00
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	70.000.000,00	54.450.000,00	77,79	0,00
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	806.219.805,00	756.776.861,00	93,87	0,00
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	528.022.052,00	319.203.500,00	60,45	0,00
Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	55.450.000,00	38.000.000,00	68,53	0,00
Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Parameter Fisikal	28.000.000,00	17.594.000,00	62,84	0,00
Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	650.000.000,00	649.900.000,00	99,98	0,00
Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	630.530.084,00	284.690.000,00	45,15	0,00
Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Bangunan	3.129.229.700,00	3.099.326.500,00	99,04	0,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	0,00	0,00	15.574.592.862,34
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	0,00	0,00	0,00	380.324.500,00
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	**2.876.329.088,00**	**2.308.405.900,00**	**80,26**	**3.805.920.274,00**
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-	350.000.000,00	350.000.000,00	100,00	0,00

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)
Pengembangan Pertanian dan Perdesaan				
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pertambangan dan Energi	96.536.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	392.431.000,00	117.483.300,00	29,94	0,00
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	340.940.088,00	319.176.000,00	93,62	0,00
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	245.000.000,00	243.540.000,00	99,40	169.482.500,00
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	1.100.000.000,00	931.607.600,00	84,69	0,00
Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Perencanaan Kepariwisataan	264.566.500,00	262.113.500,00	99,07	0,00
Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Studi Kelayakan Kepariwisataan	86.855.500,00	84.485.500,00	97,27	0,00
Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	0,00	0,00	0,00	534.066.750,00
Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi	0,00	0,00	0,00	213.777.600,00
Belanja Jasa Konsultansi Survey	0,00	0,00	0,00	2.620.572.460,00
Belanja Jasa Konsultansi Event Organizer	0,00	0,00	0,00	152.045.964,00
Belanja Jasa Konsultansi Hukum	0,00	0,00	0,00	115.975.000,00
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	**4.356.545.000,00**	**4.355.983.300,00**	**99,99**	**2.187.423.118,00**
Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	0,00	0,00	0,00	135.154.000,00
Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	3.251.832.000,00	3.251.532.000,00	99,99	1.034.169.118,00
Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3	1.104.713.000,00	1.104.451.300,00	99,98	1.018.100.000,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	**4.124.735.597,00**	**1.276.011.853,00**	**30,94**	**1.547.544.133,00**
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	1.256.485.597,00	815.698.142,00	64,92	1.175.515.165,00
Belanja Sosialisasi	0,00	0,00	0,00	29.884.320,00
Belanja Bimbingan Teknis	2.575.000.000,00	185.813.711,00	7,22	342.144.648,00
Belanja Diklat Kepemimpinan	293.250.000,00	274.500.000,00	93,61	0,00
Belanja Pemeliharaan	**103.725.533.858,00**	**91.720.648.684,32**	**88,43**	**110.656.285.226,35**
Belanja Pemeliharaan Tanah	**434.280.000,00**	**393.585.000,00**	**90,63**	**11.040.000,00**
Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Jaringan	38.280.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman	396.000.000,00	393.585.000,00	99,39	0,00
Belanja Pemeliharaan Lahan	0,00	0,00	0,00	11.040.000,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	**40.092.721.544,00**	**32.948.855.861,00**	**82,18**	**29.736.191.913,00**

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Grader	12.000.000,00	10.000.000,00	83,33	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader	32.000.000,00	16.000.000,00	50,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	50.000.000,00	11.200.000,00	22,40	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	1.458.948.415,00	1.139.297.797,00	78,09	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	244.750.000,00	212.763.420,00	86,93	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	114.000.000,00	112.930.000,00	99,06	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	14.196.687.453,00	13.034.415.871,00	91,81	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	2.929.939.672,00	2.812.564.983,00	95,99	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	156.412.000,00	156.222.917,00	99,88	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	426.289.601,00	200.544.000,00	47,04	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	37.110.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	705.900.916,00	519.447.275,00	73,59	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	6.720.000,00	6.720.000,00	100,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik	14.000.000,00	13.771.000,00	98,36	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Khusus	11.250.000,00	8.918.000,00	79,27	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pabrik Es	9.600.000,00	9.600.000,00	100,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat	39.000.000,00	39.000.000,00	100,00	0,00

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)
Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya				
Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi	16.800.000,00	15.941.500,00	94,89	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	430.780.000,00	408.856.356,00	94,91	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	688.296.000,00	596.703.444,00	86,69	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	142.890.000,00	126.199.906,00	88,32	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu	60.000.000,00	45.000.000,00	75,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	20.800.000,00	20.800.000,00	100,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	6.966.444.406,00	6.314.788.655,00	90,65	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	13.200.000,00	6.400.000,00	48,48	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	237.050.000,00	220.595.000,00	93,06	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	116.300.000,00	110.224.600,00	94,78	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	79.346.000,00	78.246.000,00	98,61	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Gambar	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	800.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar Lainnya	16.000.000,00	15.750.000,00	98,44	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	155.000.000,00	147.294.400,00	95,03	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anak	90.000.000,00	85.425.000,00	94,92	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gawat Darurat	93.000.000,00	84.425.000,00	90,78	0,00

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)
Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICU	135.071.480,00	132.186.000,00	97,86	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya	759.510.000,00	569.589.800,00	74,99	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	3.933.627.953,00	2.064.490.000,00	52,48	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain	200.000.000,00	190.770.360,00	95,39	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Populasi	97.595.000,00	78.147.300,00	80,07	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya	188.850.000,00	167.006.900,00	88,43	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik	27.850.000,00	10.266.300,00	36,86	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain	292.000.000,00	290.653.000,00	99,54	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya	1.455.261.028,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	1.549.686.220,00	1.156.492.680,00	74,63	0,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	707.300.000,00	661.522.747,00	93,53	0,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	98.485.400,00	97.648.400,00	99,15	0,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	552.870.000,00	503.319.000,00	91,04	0,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	136.600.000,00	132.672.000,00	97,12	0,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	287.700.000,00	228.876.250,00	79,55	0,00

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)
Belanja Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Air	46.600.000,00	39.570.000,00	84,91	0,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya	13.200.000,00	11.200.000,00	84,85	0,00
Belanja Jasa Service	0,00	0,00	0,00	3.323.472.533,00
Belanja Penggantian Suku Cadang	0,00	0,00	0,00	6.466.500.514,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	0,00	0,00	0,00	6.199.572.346,00
Belanja Jasa KIR	0,00	0,00	0,00	10.246.200,00
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	0,00	0,00	0,00	1.888.265.942,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan Medis	0,00	0,00	0,00	5.047.576.324,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor	0,00	0,00	0,00	5.288.025.936,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Laboratorium	0,00	0,00	0,00	341.753.818,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00	1.170.778.300,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	**42.002.375.933,00**	**39.342.064.512,42**	**93,67**	**11.230.599.335,26**
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	12.323.753.133,00	11.546.650.422,44	93,69	10.042.798.306,69
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium	62.000.000,00	61.450.000,00	99,11	0,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	1.343.523.000,00	1.245.761.290,00	92,72	0,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	661.205.500,00	506.815.863,00	76,65	0,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka	790.610.000,00	786.623.777,68	99,50	0,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.987.374.300,00	1.886.513.332,47	94,92	0,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	19.611.200.000,00	19.498.460.181,00	99,43	0,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	606.461.600,00	598.604.655,50	98,70	0,00

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	765.774.000,00	761.234.838,51	99,41	0,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama	1.046.074.400,00	738.520.000,00	70,60	0,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Flat/Rumah Susun	200.000.000,00	199.749.197,82	99,87	0,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	2.529.400.000,00	1.511.680.954,00	59,76	0,00
Belanja Pemeliharaan Taman	0,00	0,00	0,00	1.187.801.028,57
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	**21.196.156.381,00**	**19.036.143.310,90**	**89,81**	**69.643.402.813,09**
Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Penyeberangan	958.560.000,00	953.535.000,00	99,48	0,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	9.948.888.976,00	8.597.111.156,40	86,41	0,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai	6.617.921.596,00	6.530.464.014,80	98,68	0,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	1.079.673.309,00	1.079.590.404,70	99,99	0,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku	1.140.000.000,00	707.078.893,00	62,02	0,00
Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	37.050.000,00	28.050.000,00	75,71	0,00
Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Lainnya	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya	150.000.000,00	99.542.400,00	66,36	0,00
Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi	155.000.000,00	71.295.000,00	46,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	135.000.000,00	124.750.000,00	92,41	0,00
Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	870.762.500,00	844.726.442,00	97,01	0,00

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)
Belanja Pemeliharaan Jalan	0,00	0,00	0,00	57.461.287.068,00
Belanja Pemeliharaan Jembatan	0,00	0,00	0,00	5.628.359.000,00
Belanja Pemeliharaan Jaringan	0,00	0,00	0,00	6.553.756.745,09
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.051.165,00**
Belanja Pemeliharaan Buku Perpustakaan (Preservasi Buku)	0,00	0,00	0,00	35.051.165,00
Belana Perjalanan Dinas	**386.454.137.591,00**	**328.977.436.817,00**	**85,13**	**273.910.656.890,00**
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	**386.449.523.991,00**	**328.977.436.817,00**	**85,13**	**273.735.567.115,00**
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	328.341.142.216,00	281.866.927.297,00	85,85	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Tetap	342.001.000,00	214.193.083,00	62,63	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	32.394.115.775,00	28.193.626.581,00	87,03	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	21.556.237.000,00	15.704.944.164,00	72,86	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	3.816.028.000,00	2.997.745.692,00	78,56	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	0,00	0,00	108.887.569.703,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	0,00	0,00	164.847.997.412,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	**4.613.600,00**	**0,00**	**0,00**	**175.089.775,00**
Belanja Perjalanan Dinas Biasa–Luar Negeri	4.613.600,00	0,00	0,00	175.089.775,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	**156.957.289.482,00**	**125.409.522.673,00**	**79,90**	**66.875.491.000,00**
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	**150.842.266.705,00**	**119.294.723.000,00**	**79,09**	**66.875.491.000,00**
Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1.772.606.705,00	1.527.301.000,00	86,16	0,00
Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	46.961.520.000,00	39.546.600.000,00	84,21	0,00
Belanja Beasiswa	102.108.140.000,00	78.220.822.000,00	76,61	0,00
Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	62.959.854.000,00
Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	3.915.637.000,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	**6.115.022.777,00**	**6.114.799.673,00**	**100,00**	**0,00**
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	6.115.022.777,00	6.114.799.673,00	100,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa BOS	**253.578.254.295,00**	**220.543.501.538,00**	**86,97**	**517.354.014.838,00**
Belanja Barang dan Jasa BOS	**253.578.254.295,00**	**220.543.501.538,00**	**86,97**	**517.354.014.838,00**
Belanja Barang dan Jasa BOS	253.578.254.295,00	220.543.501.538,00	86,97	517.354.014.838,00
Belanja Barang dan Jasa BLUD	**343.597.904.481,00**	**326.809.933.036,00**	**95,11**	**283.423.639.956,73**
Belanja Barang dan Jasa BLUD	**343.597.904.481,00**	**326.809.933.036,00**	**95,11**	**283.423.639.956,73**
Belanja Barang dan Jasa BLUD	343.597.904.481,00	326.809.933.036,00	95,11	283.423.639.956,73

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)
Jumlah	**2.749.750.400.302,00**	**2.448.186.175.191,09**	**89,03**	**2.077.147.295.142,17**

Berikut Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa dari masing-masing OPD:

No	Organisasi Perangkat Daerah	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	738.274.209.277,00	687.027.085.230,00	93,06	719.087.084.523,00
2	Dinas Kesehatan	843.892.702.166,00	747.816.574.905,58	88,62	609.427.049.593,58
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	222.958.824.324,00	200.591.695.186,03	89,97	113.796.074.964,22
4	Satuan Polisi Pamong Praja	19.573.475.116,00	18.081.054.305,00	92,38	14.260.575.557,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9.765.622.453,00	5.956.150.224,00	60,99	3.956.648.876,00
6	Dinas Sosial	14.561.429.852,00	11.028.069.854,00	75,73	8.740.542.124,00
7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	13.248.290.559,00	11.549.509.783,00	87,18	5.457.271.148,00
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.154.849.735,00	4.137.128.722,00	80,26	2.782.983.351,00
9	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	41.204.838.458,00	37.731.527.739,39	91,57	8.040.950.099,00
10	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	31.398.575.447,00	24.173.900.338,00	76,99	16.687.655.970,00
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.715.111.445,00	5.529.429.142,00	82,34	4.866.515.575,00
12	Dinas Perhubungan	10.667.424.119,00	9.356.280.942,55	87,71	10.724.467.268,00
13	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	18.113.797.003,00	16.326.621.909,00	90,13	11.208.327.099,00
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Atap	5.691.769.844,00	4.927.392.538,00	86,57	2.563.773.398,00
15	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	70.397.392.028,00	61.357.661.083,00	87,16	29.705.441.509,00
16	Dinas Kebudayaan	9.119.881.465,00	8.439.346.973,00	92,54	7.262.437.906,15
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.885.417.634,00	4.482.412.685,00	91,75	4.483.172.731,00
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	15.042.502.576,00	12.803.195.999,60	85,11	6.532.276.848,00
19	Dinas Pariwisata	15.279.104.499,00	14.355.972.823,00	93,96	10.873.360.483,00
20	Dinas Perkebunan	5.664.693.891,00	4.572.001.232,19	80,71	3.146.069.797,00
21	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	18.576.975.043,00	16.682.697.033,90	89,80	12.989.900.860,00
22	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	7.451.155.023,00	5.267.744.402,00	70,70	4.916.957.815,00

No	Organisasi Perangkat Daerah	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)
23	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	12.875.461.494,00	11.003.184.756,00	85,46	8.401.907.641,00
24	Sekretariat Daerah	181.511.522.880,00	149.208.979.818,25	82,20	68.051.395.183,65
25	Sekretariat DPRD	326.569.910.646,00	289.029.406.384,00	88,50	309.057.170.959,00
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	13.911.604.961,00	11.316.722.595,00	81,35	13.822.367.223,00
27	Badan Pendapatan Daerah	36.879.017.081,00	32.135.988.070,00	87,14	25.152.975.724,00
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	15.435.545.534,00	10.889.861.766,60	70,55	9.351.660.798,00
29	Badan Kepegawaian Daerah	9.283.502.180,00	9.202.113.901,00	99,12	9.092.732.766,00
30	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6.071.027.358,00	4.856.735.066,00	80,00	5.414.838.046,57
31	Badan Penghubung	7.686.866.767,00	7.466.659.980,00	97,14	7.303.760.447,00
32	Inspektorat	7.497.152.526,00	7.141.684.020,00	95,26	7.603.855.094,00
33	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.390.746.918,00	3.741.385.784,00	85,21	2.385.093.765,00
	Jumlah	**2.749.750.400.302,00**	**2.448.186.175.191,09**	**89,03**	**2.077.147.295.142,17**

5.1.13 Belanja Operasi - Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah Tahun 2021 sebesar Rp1.349.812.571.315,43 atau 96,66% dari anggaran sebesar Rp1.396.520.518.425,00.

Belanja Hibah Tahun 2021 dapat dirincikan sebagai berikut.

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)
Belanja Hibah	**1.396.520.518.425,00**	**1.349.812.571.315,43**	**96,66**	**1.270.812.795.429,70**
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	**100.356.317.149,00**	**80.452.364.894,27**	**80,17**	**4.296.760.000,00**
Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	**2.000.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.296.760.000,00**
Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	2.000.000.000,00	0,00	0,00	4.296.760.000,00
Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	**98.356.317.149,00**	**80.452.364.894,27**	**81,80**	**0,00**
Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	98.356.317.149,00	80.452.364.894,27	81,80	0,00
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	**150.836.888.876,00**	**135.439.014.361,16**	**89,79**	**73.287.529.029,70**
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	**14.357.601.785,00**	**14.033.860.538,00**	**97,75**	**4.505.645.300,00**

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	14.357.601.785,00	14.033.860.538,00	97,75	4.505.645.300,00
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	**136.200.867.091,00**	**121.137.836.523,16**	**88,94**	**68.781.883.729,70**
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	103.823.000.000,00	94.553.254.876,00	91,07	39.023.014.000,00
Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	32.377.867.091,00	26.584.581.647,16	82,11	29.758.869.729,70
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	**278.420.000,00**	**267.317.300,00**	**96,01**	**0,00**
Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	278.420.000,00	267.317.300,00	96,01	0,00
Belanja Hibah Dana BOS	**1.141.997.586.000,00**	**1.130.591.465.660,00**	**99,00**	**1.189.898.780.000,00**
Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	**859.294.000.000,00**	**845.165.477.400,00**	**98,36**	**0,00**
Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	859.294.000.000,00	845.165.477.400,00	98,36	0,00
Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	**167.864.700.000,00**	**178.746.010.260,00**	**106,48**	**0,00**
Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	167.864.700.000,00	178.746.010.260,00	106,48	0,00
Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	**107.129.371.000,00**	**98.979.718.000,00**	**92,39**	**0,00**
Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	107.129.371.000,00	98.979.718.000,00	92,39	0,00
Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta	**7.709.515.000,00**	**7.700.260.000,00**	**99,88**	**0,00**
Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta	7.709.515.000,00	7.700.260.000,00	99,88	0,00
Belanja Hibah Dana BOS Reguler	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.085.293.180.000,00**
Belanja Hibah Dana BOS untuk Kota Pekanbaru	0,00	0,00	0,00	194.046.030.000,00
Belanja Hibah Dana BOS untuk Kab Kampar	0,00	0,00	0,00	128.949.630.000,00
Belanja Hibah Dana BOS untuk Kab Bengkalis	0,00	0,00	0,00	103.302.420.000,00
Belanja Hibah Dana BOS untuk Kab Indragiri Hulu	0,00	0,00	0,00	74.221.080.000,00
Belanja Hibah Dana BOS untuk Kab Indragiri Hilir	0,00	0,00	0,00	91.742.930.000,00
Belanja Hibah Dana BOS untuk Kab Kuantan Singingi	0,00	0,00	0,00	48.268.680.000,00
Belanja Hibah Dana BOS untuk Kota Dumai	0,00	0,00	0,00	54.613.480.000,00
Belanja Hibah Dana BOS untuk Kab Rokan Hulu	0,00	0,00	0,00	98.389.910.000,00
Belanja Hibah Dana BOS untuk Kab Rokan Hilir	0,00	0,00	0,00	116.336.340.000,00

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)
Belanja Hibah Dana BOS untuk Kab Pelalawan	0,00	0,00	0,00	67.373.400.000,00
Belanja Hibah Dana BOS untuk Kab Siak	0,00	0,00	0,00	80.164.730.000,00
Belanja Hibah Dana BOS untuk Kab Kep Meranti	0,00	0,00	0,00	27.884.550.000,00
Belanja Hibah Dana BOS Afirmasi	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.540.000.000,00**
Belanja Hibah Dana BOS untuk Kab. Pekanbaru	0,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00
Belanja Hibah Dana BOS untuk Kab. Kampar	0,00	0,00	0,00	3.300.000.000,00
Belanja Hibah Dana BOS untuk Kab. Bengkalis	0,00	0,00	0,00	5.040.000.000,00
Belanja Hibah Dana BOS untuk Kab. Indragiri Hulu	0,00	0,00	0,00	2.640.000.000,00
Belanja Hibah Dana BOS untuk Kab. Indragiri Hilir	0,00	0,00	0,00	16.980.000.000,00
Belanja Hibah Dana BOS untuk Kab. Kuantan Singingi	0,00	0,00	0,00	600.000.000,00
Belanja Hibah Dana BOS untuk Kab. Dumai	0,00	0,00	0,00	480.000.000,00
Belanja Hibah Dana BOS untuk Kab. Rokan Hulu	0,00	0,00	0,00	3.480.000.000,00
Belanja Hibah Dana BOS untuk Kab. Rokan Hilir	0,00	0,00	0,00	3.420.000.000,00
Belanja Hibah Dana BOS untuk Kab. Pelalawan	0,00	0,00	0,00	2.940.000.000,00
Belanja Hibah Dana BOS untuk Kab. Siak	0,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00
Belanja Hibah Dana BOS untuk Kab. Kep Meranti	0,00	0,00	0,00	6.660.000.000,00
Belanja Hibah Dana BOS Kinerja	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.260.000.000,00**
Belanja Hibah Dana BOS untuk Kota Pekanbaru	0,00	0,00	0,00	2.220.000.000,00
Belanja Hibah Dana BOS untuk Kab. Kampar	0,00	0,00	0,00	2.400.000.000,00
Belanja Hibah Dana BOS untuk Kab. Bengkalis	0,00	0,00	0,00	3.120.000.000,00
Belanja Hibah Dana BOS untuk Kab. Indragiri Hulu	0,00	0,00	0,00	1.560.000.000,00
Belanja Hibah Dana BOS untuk Kab. Indragiri Hilir	0,00	0,00	0,00	9.360.000.000,00
Belanja Hibah Dana BOS untuk Kab. Kuantan Singingi	0,00	0,00	0,00	660.000.000,00
Belanja Hibah Dana BOS untuk Kota Dumai	0,00	0,00	0,00	960.000.000,00
Belanja Hibah Dana BOS untuk Kab. Rokan Hulu	0,00	0,00	0,00	2.700.000.000,00
Belanja Hibah Dana BOS untuk Kab. Rokan Hilir	0,00	0,00	0,00	2.580.000.000,00
Belanja Hibah Dana BOS untuk Kab. Pelalawan	0,00	0,00	0,00	1.560.000.000,00
Belanja Hibah Dana BOS untuk Kab. Siak	0,00	0,00	0,00	780.000.000,00
Belanja Hibah Dana BOS untuk Kab. Kep Meranti	0,00	0,00	0,00	3.360.000.000,00
Belanja Hibah Dana BOS Daerah	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.805.600.000,00**
Belanja Hibah Dana BOS Daerah untuk Kota Pekanbaru	0,00	0,00	0,00	10.095.200.000,00
Belanja Hibah Dana BOS Daerah untuk Kab. Kampar	0,00	0,00	0,00	1.213.600.000,00
Belanja Hibah Dana BOS Daerah untuk Kab. Bengkalis	0,00	0,00	0,00	1.567.600.000,00
Belanja Hibah Dana BOS Daerah untuk Kab. Indragiri Hulu	0,00	0,00	0,00	645.200.000,00

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)
Belanja Hibah Dana BOS Daerah untuk Kab. Indragiri Hilir	0,00	0,00	0,00	1.554.000.000,00
Belanja Hibah Dana BOS Daerah untuk Kab. Kuantan Singingi	0,00	0,00	0,00	133.200.000,00
Belanja Hibah Dana BOS Daerah untuk Kota Dumai	0,00	0,00	0,00	1.550.400.000,00
Belanja Hibah Dana BOS Daerah untuk Kab. Rokan Hulu	0,00	0,00	0,00	1.580.400.000,00
Belanja Hibah Dana BOS Daerah untuk Kab. Rokan Hilir	0,00	0,00	0,00	4.011.200.000,00
Belanja Hibah Dana BOS Daerah untuk Kab. Pelalawan	0,00	0,00	0,00	598.000.000,00
Belanja Hibah Dana BOS Daerah untuk Kab. Siak	0,00	0,00	0,00	1.279.600.000,00
Belanja Hibah Dana BOS Daerah untuk Kab. Kep. Meranti	0,00	0,00	0,00	577.200.000,00
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	**3.329.726.400,00**	**3.329.726.400,00**	**100,00**	**3.329.726.400,00**
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	**3.329.726.400,00**	**3.329.726.400,00**	**100,00**	**3.329.726.400,00**
Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	3.329.726.400,00	3.329.726.400,00	100,00	3.329.726.400,00
Jumlah	**1.396.520.518.425,00**	**1.349.812.571.315,43**	**96,66**	**1.270.812.795.429,70**

Berikut Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah dari masing-masing OPD:

No	Organisasi Perangkat Daerah	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	162.360.709.091,00	149.732.760.614,05	92,22	16.411.649.839,00
2	Dinas Kesehatan	2.950.000.000,00	2.826.202.248,00	95,80	4.882.444.560,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	108.422.361.149,00	89.189.556.727,38	82,26	0,00
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5	Dinas Sosial	1.450.000.000,00	1.450.000.000,00	100,00	0,00
6	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	78.420.000,00	71.924.500,00	91,72	131.880.000,00
7	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	0,00	0,00	0,00	4.838.566.367,50
8	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	3.296.673.785,00	3.296.600.000,00	100,00	2.873.407.500,00
9	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	66.513.000.000,00	59.237.268.050,00	89,06	0,00
10	Dinas Kebudayaan	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00	0,00
11	Dinas Kelautan dan Perikanan	0,00	0,00	0,00	64.548.500,00
12	Dinas Pariwisata	700.000.000,00	700.000.000,00	100,00	0,00
13	Dinas Perkebunan	0,00	0,00	0,00	173.480.463,20
14	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	0,00	0,00	0,00	194.380.000,00
15	Sekretariat Daerah	1.038.758.700.000,00	1.033.517.474.486,00	99,50	176.962.500,00

No	Organisasi Perangkat Daerah	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)
16	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	0,00	0,00	0,00	1.241.053.925.700,00
17	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.990.654.400,00	4.790.784.690,00	96,00	0,00
18	Badan Penghubung	0,00	0,00	0,00	11.550.000,00
	Jumlah	**1.396.520.518.425,00**	**1.349.812.571.315,43**	**96,66**	**1.270.812.795.429,70**

Rincian Penerima Belanja Hibah Uang Tahun 2021 sebesar Rp1.242.508.307.47,00 dapat dilihat pada **Lampiran 20**.

Rincian Penerima Belanja Hibah Barang yang Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2021 sebesar Rp107.304.263.841,43 dapat dilihat pada **Lampiran 21**.

5.1.14 Belanja Operasi - Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2021 sebesar Rp51.810.530.000,00 atau 84,20% dari anggaran sebesar Rp61.529.530.000,00.

Belanja Bantuan Sosial Tahun 2021 dapat dirincikan sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)
Belanja Bantuan Sosial	**61.529.530.000,00**	**51.810.530.000,00**	**84,20**	**29.005.785.174,00**
Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	**37.000.810.000,00**	**27.588.710.000,00**	**74,56**	**13.234.896.934,00**
Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	**37.000.810.000,00**	**27.588.710.000,00**	**74,56**	**13.234.896.934,00**
Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	37.000.810.000,00	27.588.710.000,00	74,56	13.234.896.934,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	**1.685.600.000,00**	**1.378.700.000,00**	**81,79**	**0,00**
Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	**1.685.600.000,00**	**1.378.700.000,00**	**81,79**	**0,00**
Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	1.685.600.000,00	1.378.700.000,00	81,79	0,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	**22.843.120.000,00**	**22.843.120.000,00**	**100,00**	**15.770.888.240,00**
Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	**22.843.120.000,00**	**22.843.120.000,00**	**100,00**	**15.770.888.240,00**
Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	22.843.120.000,00	22.843.120.000,00	100,00	15.770.888.240,00
Jumlah	**61.529.530.000,00**	**51.810.530.000,00**	**84,20**	**29.005.785.174,00**

Berikut Rincian Realisasi Belanja Bantuan Sosial dari masing-masing OPD:

No	Organisasi Perangkat Daerah	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	1.680.800.000,00	1.373.900.000,00	81,74	0,00
2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	0,00	0,00		13.234.896.934,00
3	Dinas Sosial	23.591.330.000,00	23.555.330.000,00	99,85	0,00
4	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	4.800.000,00	4.800.000,00	100,00	0,00
5	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	24.999.600.000,00	16.329.600.000,00	65,32	0,00
6	Sekretariat Daerah	11.253.000.000,00	10.546.900.000,00	93,73	0,00
7	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	0,00	0,00	15.770.888.240,00
	Jumlah	**61.529.530.000,00**	**51.810.530.000,00**	**84,20**	**29.005.785.174,00**

5.1.15 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun 2021 sebesar Rp801.221.880,00 atau 99,91% dari anggaran sebesar Rp801.982.178,00 dengan rincian pengadaan tanah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)
Belanja Modal Tanah	**801.982.178,00**	**801.221.880,00**	**99,91**	**10.060.769.600,00**
Belanja Modal Tanah	**801.982.178,00**	**801.221.880,00**	**99,91**	**10.060.769.600,00**
Belanja Modal Tanah Persil	**689.850.000,00**	**689.850.000,00**	**100,00**	**0,00**
Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	689.850.000,00	689.850.000,00	100,00	0,00
Belanja Modal Lapangan	**112.132.178,00**	**111.371.880,00**	**99,32**	**10.060.769.600,00**
Belanja Modal Tanah untuk Taman	112.132.178,00	111.371.880,00	99,32	0,00
Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Tempat Pembuangan Akhir Sampah	0,00	0,00	0,00	10.060.769.600,00
Jumlah	**801.982.178,00**	**801.221.880,00**	**99,91**	**10.060.769.600,00**

Berikut Rincian Realisasi Belanja Modal Tanah dari masing-masing OPD:

No	Organisasi Perangkat Daerah	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	689.850.000,00	689.850.000,00	100,00	10.060.769.600,00
2	Dinas Sosial	112.132.178,00	111.371.880,00	99,32	0,00
	Jumlah	**801.982.178,00**	**801.221.880,00**	**99,91**	**10.060.769.600,00**

5.1.16 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2021 sebesar Rp259.296.406.464,29 atau 76.17% dari anggaran sebesar Rp340.432.504.177,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2021 lebih rendah sebesar Rp22.478.025.247,71 atau 7,98% dibandingkan realisasi Tahun 2020 sebesar Rp281.774.431.712,00.

Rincian realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	**340.432.504.177,00**	**259.296.406.464,29**	**76,17**	**281.774.431.712,00**
Belanja Modal Alat Besar	**27.382.073.011,00**	**18.859.534.270,00**	**68,88**	**16.708.647.600,00**
Belanja Modal Alat Besar Darat	**23.749.508.000,00**	**16.105.875.500,00**	**67,82**	**16.708.647.600,00**
Belanja Modal Excavator	0,00	0,00	0,00	16.341.600.000,00
Belanja Modal Loader	4.290.000.000,00	4.289.983.500,00	100,00	0,00
Belanja Modal Mesin Proses	35.000.000,00	34.892.000,00	99,69	0,00
Belanja Modal Alat Besar Darat Lainnya	19.424.508.000,00	11.781.000.000,00	60,65	0,00
Belanja Modal Pengadaan Stoom Wals	0,00	0,00	0,00	367.047.600,00
Belanja Modal Alat Bantu	**3.632.565.011,00**	**2.753.658.770,00**	**75,80**	**0,00**
Belanja Modal Feeder	700.000.000,00	355.393.500,00	50,77	0,00
Belanja Modal Pompa	2.562.390.011,00	2.085.181.070,00	81,38	0,00
Belanja Modal Mesin Bor	14.000.000,00	12.500.000,00	89,29	0,00
Belanja Modal Perlengkapan Kebakaran Hutan	107.600.000,00	107.039.900,00	99,48	0,00
Belanja Modal Peralatan Selam	105.000.000,00	104.614.400,00	99,63	0,00
Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	143.575.000,00	88.929.900,00	61,94	0,00
Belanja Modal Alat Angkutan	**2.536.361.272,00**	**2.140.706.400,00**	**84,40**	**13.943.192.600,00**
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	**2.333.660.000,00**	**2.072.857.000,00**	**88,82**	**13.365.943.500,00**

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)
Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	0,00	0,00	1.941.000.000,00
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	425.000.000,00	349.500.000,00	82,24	10.715.907.500,00
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.729.560.000,00	1.549.007.000,00	89,56	709.036.000,00
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	90.000.000,00	85.800.000,00	95,33	0,00
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	89.100.000,00	88.550.000,00	99,38	0,00
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	**100.200.000,00**	**20.600.000,00**	**20,56**	**0,00**
Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	89.200.000,00	9.600.000,00	10,76	0,00
Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	11.000.000,00	11.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	**102.501.272,00**	**47.249.400,00**	**46,10**	**112.000.000,00**
Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	17.550.000,00	17.549.400,00	100,00	112.000.000,00
Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	84.951.272,00	29.700.000,00	34,96	0,00
Belanja Modal Alat Angkutan Bermotor Udara	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**465.249.100,00**
Belanja modal Pengadaan pesawat tanpa awak	0,00	0,00	0,00	465.249.100,00
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	**1.622.746.504,00**	**856.813.140,00**	**52,80**	**1.664.802.272,00**
Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	**621.192.480,00**	**559.891.200,00**	**90,13**	**1.118.740.512,00**
Belanja Modal Perkakas Bengkel Listrik	0,00	0,00	0,00	23.685.000,00
Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	22.804.000,00	22.264.000,00	97,63	888.859.912,00
Belanja Modal Perkakas Bengkel Khusus	0,00	0,00	0,00	153.895.600,00
Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	598.388.480,00	537.627.200,00	89,85	52.300.000,00
Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	**256.454.564,00**	**206.997.940,00**	**80,72**	**0,00**
Belanja Modal Perkakas Bengkel Listrik	33.300.000,00	32.554.340,00	97,76	0,00
Belanja Modal Perkakas Bengkel Service	6.978.200,00	6.978.200,00	100,00	0,00
Belanja Modal Perkakas Pengangkat	650.000,00	650.000,00	100,00	0,00
Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools)	143.676.364,00	140.769.400,00	97,98	0,00
Belanja Modal Perkakas Khusus (Special Tools)	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya	43.850.000,00	26.046.000,00	59,40	0,00
Belanja Modal Alat Ukur	**745.099.460,00**	**89.924.000,00**	**12,07**	**546.061.760,00**
Belanja Modal Alat Ukur Universal	16.773.900,00	16.698.000,00	99,55	0,00
Belanja Modal Alat Kalibrasi	649.600.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain	69.300.560,00	66.857.000,00	96,47	0,00
Belanja Modal Alat Timbangan/Biara	6.600.000,00	6.369.000,00	96,50	84.363.000,00
Belanja Modal Alat Pengukur Penglihatan	875.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)
Belanja modal Pengadaan teodolite	0,00	0,00	0,00	58.300.000,00
Belanja modal Pengadaan alat GPS	0,00	0,00	0,00	172.032.760,00
Belanja modal Pengadaan kompas/peralatan navigasi	0,00	0,00	0,00	17.490.000,00
Belanja modal pengadaan automatic water level recording (AWLR)	0,00	0,00	0,00	179.080.000,00
Belanja modal alat ukur panjang	0,00	0,00	0,00	850.000,00
Belanja modal alat penglihatan jarak jauh/teropong	0,00	0,00	0,00	33.946.000,00
Belanja Modal Alat Pertanian	**422.148.917,00**	**370.417.274,00**	**87,75**	**224.046.800,00**
Belanja Modal Alat Pengolahan	**422.148.917,00**	**370.417.274,00**	**87,75**	**224.046.800,00**
Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	13.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian	23.120.000,00	14.934.124,00	64,59	0,00
Belanja Modal Alat Processing	0,00	0,00	0,00	147.481.800,00
Belanja Modal Alat Produksi Perikanan	9.000.000,00	8.800.000,00	97,78	19.360.000,00
Belanja Modal Alat-Alat Peternakan	93.000.000,00	92.684.900,00	99,66	0,00
Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya	283.528.917,00	253.998.250,00	89,58	0,00
Belanja modal pengadaan mesin potong rumput dan tanaman	0,00	0,00	0,00	57.205.000,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	**55.144.981.477,00**	**45.971.762.747,30**	**83,37**	**15.771.359.504,00**
Belanja Modal Alat Kantor	**10.273.905.960,00**	**7.636.814.358,60**	**74,33**	**2.650.341.905,00**
Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	126.161.592,00	125.400.000,00	99,40	0,00
Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	895.191.261,00	602.605.000,00	67,32	439.105.430,00
Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	1.219.093.209,00	726.392.267,60	59,58	567.449.500,00
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	8.033.459.898,00	6.182.417.091,00	76,96	0,00
Belanja modal Pengadaan mesin penghancur kertas	0,00	0,00	0,00	92.902.280,00
Belanja modal pengadaan alat pompa	0,00	0,00	0,00	161.643.540,00
Belanja modal genset	0,00	0,00	0,00	839.122.055,00
Belanja modal pengadaan peralatan laundry	0,00	0,00	0,00	53.779.000,00
Belanja modal spray can dan hand sprayer (alat penyemprot)	0,00	0,00	0,00	24.600.000,00
Belanja modal peralatan packaging	0,00	0,00	0,00	70.620.000,00
Belanja modal pengadaan mesin potong rumput dan tanaman	0,00	0,00	0,00	107.483.600,00
Belanja Modal Pengadaan Solar Cell	0,00	0,00	0,00	186.780.000,00
Belanja Modal Pengadaan Alat Absensi	0,00	0,00	0,00	106.856.500,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	**43.881.676.358,00**	**37.494.101.188,70**	**85,44**	**11.521.061.853,00**
Belanja Modal Mebel	31.803.995.189,00	28.932.506.655,00	90,97	6.523.872.648,00
Belanja Modal Alat Pengukur Waktu	2.475.000,00	2.200.000,00	88,89	72.300.000,00
Belanja Modal Alat Pembersih	2.346.122.434,00	322.575.834,00	13,75	0,00
Belanja Modal Alat Pendingin	3.612.351.480,00	3.060.044.222,70	84,71	1.993.737.658,00
Belanja Modal Alat Dapur	398.649.256,00	372.489.200,00	93,44	187.516.990,00

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4.399.283.629,00	3.592.191.787,00	81,65	0,00
Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	1.318.799.370,00	1.212.093.490,00	91,91	58.125.880,00
Belanja modal penyekat ruangan	0,00	0,00	0,00	421.815.666,00
Belanja modal pengadaan tangga	0,00	0,00	0,00	9.998.600,00
Belanja modal pengadaan vitrage, gorden, dan sejenisnya	0,00	0,00	0,00	1.705.549.561,00
Belanja modal pengadaan karpet	0,00	0,00	0,00	548.144.850,00
Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	**989.399.159,00**	**840.847.200,00**	**84,99**	**1.599.955.746,00**
Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	226.892.419,00	214.065.000,00	94,35	860.296.620,00
Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	220.000.000,00	218.115.000,00	99,14	114.158.720,00
Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	262.527.269,00	194.949.500,00	74,26	539.728.366,00
Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	2.260.958,00	2.260.000,00	99,96	85.772.040,00
Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	52.358.730,00	45.216.000,00	86,36	0,00
Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	36.147.221,00	31.892.000,00	88,23	0,00
Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	189.212.562,00	134.349.700,00	71,00	0,00
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	**10.964.221.496,00**	**7.308.599.782,00**	**66,66**	**2.011.848.236,00**
Belanja Modal Alat Studio	**9.897.513.426,00**	**6.516.912.067,00**	**65,84**	**1.488.975.836,00**
Belanja Modal Peralatan Studio Audio	904.481.960,00	881.484.011,00	97,46	463.375.500,00
Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	5.360.947.786,00	4.425.260.457,00	82,55	0,00
Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	532.972.000,00	476.334.950,00	89,37	0,00
Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	608.490.250,00	552.050.400,00	90,72	0,00
Belanja Modal Alat Studio Lainnya	2.490.621.430,00	181.782.249,00	7,30	17.040.000,00
Belanja modal Pengadaan proyektor	0,00	0,00	0,00	833.810.336,00
Belanja modal Pengadaan proyektor	0,00	0,00	0,00	174.750.000,00
Belanja Modal Alat Komunikasi	**454.707.100,00**	**204.121.800,00**	**44,89**	**522.872.400,00**
Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	69.000.000,00	23.705.000,00	34,36	9.332.400,00
Belanja Modal Alat Komunikasi Radio HF/FM	0,00	0,00	0,00	130.323.600,00
Belanja Modal Alat Komunikasi Radio VHF	129.555.000,00	118.020.800,00	91,10	0,00
Belanja Modal Alat Komunikasi Radio UHF	61.500.000,00	59.136.000,00	96,16	19.845.056,00
Belanja Modal Alat-Alat Sandi	750.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	193.902.100,00	3.260.000,00	1,68	0,00
Belanja modal Pengadaan Televisi/Radio/Tape/Sound System	0,00	0,00	0,00	363.371.344,00
Belanja Modal Peralatan Pemancar	**391.100.970,00**	**377.113.355,00**	**96,42**	**0,00**
Belanja Modal Sumber Tenaga	391.100.970,00	377.113.355,00	96,42	0,00
Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi	**220.900.000,00**	**210.452.560,00**	**95,27**	**0,00**
Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya	220.900.000,00	210.452.560,00	95,27	0,00

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	**48.498.366.527,00**	**39.750.888.669,00**	**81,96**	**67.127.080.564,00**
Belanja Modal Alat Kedokteran	**48.333.022.227,00**	**39.663.500.859,00**	**82,06**	**65.526.282.541,00**
Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	15.627.323.068,00	11.401.178.222,00	72,96	20.329.459.533,00
Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	1.468.753.612,00	784.749.108,00	53,43	1.581.300.552,00
Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	3.575.539.400,00	3.185.887.619,00	89,10	3.471.257.078,00
Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	5.230.998.600,00	5.140.535.318,00	98,27	571.686.794,00
Belanja Modal Alat Kedokteran THT	800.000.000,00	769.649.600,00	96,21	1.130.173.509,00
Belanja Modal Alat Kedokteran Mata	1.176.316.850,00	1.133.779.000,00	96,38	1.918.206.969,00
Belanja Modal Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	0,00	0,00	0,00	7.772.110.202,00
Belanja Modal Alat Kedokteran Anak	418.550.000,00	418.550.000,00	100,00	1.364.280.930,00
Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	85.000.000,00	84.000.000,00	98,82	357.560.800,00
Belanja Modal Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)	2.750.000.000,00	2.707.400.310,00	98,45	2.822.888.025,00
Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung	979.047.344,00	949.096.517,00	96,94	6.832.395.224,00
Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic	3.876.346.722,00	3.575.185.983,00	92,23	5.821.333.847,00
Belanja Modal Alat Kedokteran Patalogi Anatomy	0,00	0,00	0,00	1.174.566.100,00
Belanja Modal Alat Kedokteran Transfusi Darah	0,00	0,00	0,00	460.628.200,00
Belanja Modal Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin	206.700.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat	0,00	0,00	0,00	37.102.180,00
Belanja Modal Alat Kedokteran Jiwa	0,00	0,00	0,00	1.468.240.240,00
Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah Ortopedi	715.786.747,00	697.132.067,00	97,39	4.322.554.058,00
Belanja Modal Alat Kedokteran ICU	1.470.000.000,00	1.248.761.425,00	84,95	0,00
Belanja Modal Alat Kedokteran ICCU	2.000.000.000,00	1.894.170.800,00	94,71	0,00
Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	7.952.659.884,00	5.673.424.890,00	71,34	0,00
Belanja modal Pengadaan alat-alat farmasi	0,00	0,00	0,00	174.820.000,00
Belanja modal pengadaan alat-alat kesehatan gizi	0,00	0,00	0,00	10.785.000,00
Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran patologi klinik	0,00	0,00	0,00	1.505.880.800,00
Belanja modal pengadaan alat-alat kesehatan non medis	0,00	0,00	0,00	184.052.500,00
Belanja modal pengadaan alat-alat sterilisasi	0,00	0,00	0,00	2.215.000.000,00
Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	**165.344.300,00**	**87.387.810,00**	**52,85**	**1.600.798.023,00**
Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	165.344.300,00	87.387.810,00	52,85	0,00
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Gas Medik	0,00	0,00	0,00	114.026.000,00
Belanja modal pengadaan alat-alat keperawatan	0,00	0,00	0,00	1.486.772.023,00
Belanja Modal Alat Laboratorium	**95.408.391.494,00**	**60.861.718.237,00**	**63,79**	**83.534.209.019,00**
Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	**16.232.366.836,00**	**5.142.912.571,00**	**31,68**	**83.534.209.019,00**

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)
Belanja Modal Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	3.627.314.800,00	3.127.320.851,00	86,22	0,00
Belanja Modal Alat Laboratorium Mikrobiologi	460.000.000,00	345.400.000,00	75,09	0,00
Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia	52.000.000,00	51.744.000,00	99,51	228.096.000,00
Belanja Modal Alat Laboratorium Patologi	210.100.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Laboratorium Farmasi	275.009.557,00	222.497.500,00	80,91	0,00
Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika	637.081.500,00	637.081.500,00	100,00	0,00
Belanja Modal Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik	10.500.000,00	10.450.000,00	99,52	0,00
Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian	0,00	0,00	0,00	2.090.000,00
Belanja Modal Alat Laboratorium Biologi Perairan	0,00	0,00	0,00	187.963.700,00
Belanja Modal Alat Laboratorium Kesehatan Kerja	0,00	0,00	0,00	1.585.556.067,00
Belanja Modal Alat Laboratorium Lain	222.878.491,00	210.237.500,00	94,33	0,00
Belanja Modal Alat Laboratorium Hermodinamika Motor dan Sistem Propulasi	180.000.000,00	179.696.000,00	99,83	0,00
Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya	10.542.482.488,00	343.485.220,00	3,26	0,00
Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium peraga / praktik sekolah	0,00	0,00	0,00	81.530.503.252,00
Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	**75.285.462.730,00**	**52.810.239.592,00**	**70,15**	**0,00**
Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Keterampilan	63.434.680,00	60.815.000,00	95,87	0,00
Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	75.222.028.050,00	52.749.424.592,00	70,12	0,00
Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	**1.555.381.953,00**	**1.319.915.000,00**	**84,86**	**0,00**
Belanja Modal System/Power Supply	1.555.381.953,00	1.319.915.000,00	84,86	0,00
Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	**2.131.501.175,00**	**1.387.548.074,00**	**65,10**	**0,00**
Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	1.069.243.100,00	325.499.999,00	30,44	0,00
Belanja Modal Laboratorium Lingkungan	1.062.258.075,00	1.062.048.075,00	99,98	0,00
Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	**188.678.800,00**	**188.353.000,00**	**99,83**	**0,00**
Belanja Modal Photo and Film Equipment	188.678.800,00	188.353.000,00	99,83	0,00
Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	**15.000.000,00**	**12.750.000,00**	**85,00**	**0,00**
Belanja Modal Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu	15.000.000,00	12.750.000,00	85,00	0,00
Belanja Modal Komputer	**15.345.560.214,00**	**12.541.529.681,00**	**81,73**	**9.521.090.463,00**
Belanja Modal Komputer Unit	**10.340.926.821,00**	**8.578.607.298,00**	**82,96**	**5.495.180.386,00**
Belanja Modal Komputer Jaringan	11.299.513,00	8.500.000,00	75,22	0,00
Belanja Modal Personal Computer	5.992.240.132,00	4.506.067.936,00	75,20	5.495.180.386,00
Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	4.337.387.176,00	4.064.039.362,00	93,70	0,00

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)
Belanja Modal Peralatan Komputer	**5.004.633.393,00**	**3.962.922.383,00**	**79,19**	**4.025.910.077,00**
Belanja Modal Peralatan Mainframe	985.216.365,00	895.978.560,00	90,94	91.080.000,00
Belanja Modal Peralatan Mini Computer	760.000,00	760.000,00	100,00	1.670.674.959,00
Belanja Modal Peralatan Personal Computer	1.032.864.173,00	778.424.439,00	75,37	1.952.027.918,00
Belanja Modal Peralatan Jaringan	506.580.252,00	398.047.465,00	78,58	210.029.200,00
Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	2.479.212.603,00	1.889.711.919,00	76,22	0,00
Belanja modal Pengadaan Software/Aplikasi Komputer	0,00	0,00	0,00	88.023.000,00
Belanja modal Pengadaan Rak Server	0,00	0,00	0,00	9.075.000,00
Belanja modal Pengadaan Kelengkapan Server	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Belanja Modal Alat Eksplorasi	**680.848.480,00**	**573.111.000,00**	**84,18**	**0,00**
Belanja Modal Alat Eksplorasi Topografi	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	**100,00**	**0,00**
Belanja Modal Ukur/Instrumen	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	**650.848.480,00**	**543.111.000,00**	**83,45**	0,00
Belanja Modal Elektronik/Electric	650.848.480,00	543.111.000,00	83,45	0,00
Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	**1.079.419.750,00**	**908.879.499,99**	**84,20**	**0,00**
Belanja Modal Sumur	**1.079.419.750,00**	**908.879.499,99**	**84,20**	**0,00**
Belanja Modal Sumur Pemboran	307.952.750,00	305.965.573,00	99,35	0,00
Belanja Modal Sumur Lainnya	771.467.000,00	602.913.926,99	78,15	0,00
Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	**246.601.921,00**	**229.201.800,00**	**92,94**	**436.634.900,00**
Belanja Modal Alat Deteksi	**19.489.757,00**	**18.000.000,00**	**92,36**	**0,00**
Belanja Modal Alat Deteksi Lainnya	19.489.757,00	18.000.000,00	92,36	0,00
Belanja Modal Alat Pelindung	**184.459.664,00**	**175.429.800,00**	**95,10**	**436.634.900,00**
Belanja Modal Baju Pengaman	86.140.364,00	83.442.000,00	96,87	0,00
Belanja Modal Masker	7.500.000,00	7.491.000,00	99,88	0,00
Belanja Modal Sabuk Pengaman	80.400.000,00	79.300.000,00	98,63	0,00
Belanja Modal Sepatu Lapangan	1.160.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	9.259.300,00	5.196.800,00	56,13	0,00
Belanja modal Pengadaan sentolop/senter	0,00	0,00	0,00	11.939.000,00
Belanja modal pengadaan kamera pengintai (CCTV)	0,00	0,00	0,00	424.695.900,00
Belanja Modal Alat SAR	**42.652.500,00**	**35.772.000,00**	**83,87**	**0,00**
Belanja Modal Alat Penolong	652.500,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Pendukung Pencarian	42.000.000,00	35.772.000,00	85,17	0,00
Belanja Modal Alat Peraga	**14.235.038,00**	**14.234.596,00**	**100,00**	**0,00**
Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	**14.235.038,00**	**14.234.596,00**	**100,00**	**0,00**
Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan	5.734.942,00	5.734.500,00	99,99	0,00
Belanja Modal Alat Peraga Percontohan	8.500.096,00	8.500.096,00	100,00	0,00

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)
Belanja Modal Rambu-Rambu	**2.514.821.116,00**	**1.678.594.759,00**	**66,75**	**0,00**
Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	**2.514.821.116,00**	**1.678.594.759,00**	**66,75**	**0,00**
Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	2.514.821.116,00	1.678.594.759,00	66,75	0,00
Belanja Modal Peralatan Olahraga	**85.564.708,00**	**14.185.000,00**	**16,58**	**0,00**
Belanja Modal Peralatan Olahraga	**85.564.708,00**	**14.185.000,00**	**16,58**	**0,00**
Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	85.564.708,00	14.185.000,00	16,58	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	**61.704.780.556,00**	**60.995.660.196,00**	**98,85**	**70.831.519.754,00**
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	**61.704.780.556,00**	**60.995.660.196,00**	**98,85**	**70.831.519.754,00**
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	61.704.780.556,00	60.995.660.196,00	98,85	70.831.519.754,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	**16.781.381.696,00**	**6.220.569.413,00**	**37,07**	**0,00**
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	**16.781.381.696,00**	**6.220.569.413,00**	**37,07**	**0,00**
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	16.781.381.696,00	6.220.569.413,00	37,07	0,00
Jumlah	**340.432.504.177,00**	**259.296.406.464,29**	**76,17**	**281.774.431.712,00**

Berikut Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin dari masing-masing OPD:

No	Organisasi Perangkat Daerah	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	164.206.213.800,00	137.984.130.272,00	84,03	158.738.644.222,00
2	Dinas Kesehatan	89.100.513.364,00	56.048.696.752,00	62,91	71.655.373.033,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	27.987.387.567,00	20.036.547.995,00	71,59	33.923.628.916,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	110.222.554,00	108.895.000,00	98,80	101.850.000,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	492.011.081,00	481.750.328,00	97,91	9.000.000,00
6	Dinas Sosial	771.468.351,00	638.548.872,00	82,77	68.625.000,00
7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	145.092.322,00	144.364.000,00	99,50	0,00
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	220.550.593,00	187.951.230,00	85,22	238.191.000,00
9	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	705.979.826,00	670.964.384,00	95,04	400.368.000,00
10	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	10.456.012.893,00	8.843.691.402,60	84,58	1.596.600.477,00
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	252.693.847,00	211.486.300,00	83,69	294.588.800,00
12	Dinas Perhubungan	2.803.324.309,00	1.910.381.459,00	68,15	157.200.000,00
13	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	4.351.448.310,00	3.890.188.357,00	89,40	175.440.000,00

No	Organisasi Perangkat Daerah	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Atap	773.017.093,00	265.655.965,00	34,37	10.200.000,00
15	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	274.871.416,00	262.115.397,00	95,36	181.523.100,00
16	Dinas Kebudayaan	165.236.612,00	156.025.000,00	94,43	20.000.000,00
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	922.264.839,00	678.466.096,00	73,57	90.204.400,00
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.502.552.126,00	1.303.202.081,99	86,73	994.618.900,00
19	Dinas Pariwisata	649.651.667,00	640.724.000,00	98,63	128.791.700,00
20	Dinas Perkebunan	2.263.883.022,00	1.010.978.050,00	44,66	125.246.000,00
21	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	684.329.133,00	656.265.274,00	95,90	105.883.250,00
22	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	535.178.685,00	464.041.200,00	86,71	784.342.100,00
23	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	135.837.926,00	59.334.000,00	43,68	28.725.000,00
24	Sekretariat Daerah	3.209.110.601,00	2.900.272.578,20	90,38	1.604.842.861,00
25	Sekretariat DPRD	19.570.281.145,00	12.665.946.838,00	64,72	7.083.355.103,00
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	1.079.958.355,00	671.058.000,00	62,14	719.092.000,00
27	Badan Pendapatan Daerah	5.372.440.453,00	5.034.467.762,50	93,71	278.245.000,00
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	610.610.761,00	400.345.820,00	65,56	598.654.450,00
29	Badan Kepegawaian Daerah	53.913.167,00	53.911.000,00	100,00	893.605.000,00
30	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	700.057.082,00	673.672.050,00	96,23	624.508.400,00
31	Badan Penghubung	117.329.236,00	116.750.000,00	99,51	129.085.000,00
32	Inspektorat	74.400.000,00	72.400.000,00	97,31	14.000.000,00
33	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	134.662.041,00	53.179.000,00	39,49	0,00
	Jumlah	**340.432.504.177,00**	**259.296.406.464,29**	**76,17**	**281.774.431.712,00**

5.1.17 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2021 sebesar Rp239.980.341.418,23 atau 85,55% dari anggaran sebesar Rp280.525.464.255,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2021 lebih tinggi sebesar Rp67.767.067.319,02 atau 39,35% dibandingkan realisasi Tahun 2020 sebesar Rp172.213.274.099,21.

Rincian realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	**280.525.464.255,00**	**239.980.341.418,23**	**85,55**	**172.213.274.099,21**
Belanja Modal Bangunan Gedung	**273.674.236.541,00**	**237.335.848.494,11**	**86,72**	**163.551.638.467,21**
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	**273.295.036.541,00**	**236.957.778.787,11**	**86,70**	**161.827.483.504,41**
Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	7.852.159.151,00	6.915.787.978,45	88,07	22.498.165.491,03
Belanja Modal Bangunan Gudang	368.400.000,00	270.996.005,26	73,56	1.446.974.840,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	42.460.666.928,00	36.684.842.195,71	86,40	0,00
Belanja Modal Bangunan Kesehatan	23.296.382.755,00	15.605.780.433,00	66,99	47.102.000,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	37.755.217.303,00	32.809.140.210,02	86,90	0,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.258.512.192,00	1.010.677.267,62	80,31	0,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	95.953.743.691,00	88.482.360.904,72	92,21	128.237.026.010,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan	5.434.901.890,00	4.833.950.651,99	88,94	0,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	5.977.719.745,00	5.947.270.552,98	99,49	0,00
Belanja Modal Bangunan Terbuka	255.000.000,00	237.476.647,00	93,13	0,00
Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	1.941.375.000,00	1.830.802.956,33	94,30	32.446.315,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	41.205.114.192,00	33.621.557.701,71	81,60	0,00
Belanja Modal Bangunan Peralatan Geofisika	9.200.000,00	8.690.000,00	94,46	0,00
Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	8.192.520.494,00	7.628.994.024,32	93,12	9.090.214.326,38
Belanja Modal Bangunan Parkir	934.580.000,00	679.336.054,00	72,69	0,00
Belanja Modal Taman	399.543.200,00	390.115.204,00	97,64	0,00
Belanja modal pengadaan jerjak	0,00	0,00	0,00	14.852.200,00
Belanja modal pembuatan landscape	0,00	0,00	0,00	123.005.734,00
Belanja modal pengadaan plang nama gedung kantor	0,00	0,00	0,00	11.900.000,00
Belanja Modal Pembuatan Pagar	0,00	0,00	0,00	325.796.588,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	**379.200.000,00**	**378.069.707,00**	**99,70**	**1.724.154.962,80**
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	379.200.000,00	378.069.707,00	99,70	0,00
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian rumah jabatan	0,00	0,00	0,00	1.245.101.912,80
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian rumah dinas	0,00	0,00	0,00	479.053.050,00
Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	**3.693.452.314,00**	**1.298.558.224,12**	**35,16**	**0,00**
Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	**3.693.452.314,00**	**1.298.558.224,12**	**35,16**	**0,00**
Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	266.220.000,00	161.720.000,00	60,75	0,00
Belanja Modal Pagar	3.427.232.314,00	1.136.838.224,12	33,17	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	**3.157.775.400,00**	**1.345.934.700,00**	**42,62**	**8.661.635.632,00**

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	**3.157.775.400,00**	**1.345.934.700,00**	**42,62**	**8.661.635.632,00**
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	3.157.775.400,00	1.345.934.700,00	42,62	8.661.635.632,00
Jumlah	**280.525.464.255,00**	**239.980.341.418,23**	**85,55**	**172.213.274.099,21**

Berikut Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan dari masing-masing OPD:

No	Organisasi Perangkat Daerah	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	142.639.175.781,00	128.901.699.014,81	90,37	128.668.069.046,00
2	Dinas Kesehatan	26.621.758.155,00	17.085.250.133,00	64,18	13.300.564.175,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	77.521.046.690,00	67.087.527.949,31	86,54	17.369.776.145,07
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	59.411.550,00
5	Dinas Sosial	1.588.792.526,00	1.584.327.253,00	99,72	0,00
6	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	2.527.635.000,00	2.316.767.031,00	91,66	107.657.000,00
7	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2.742.953.505,00	2.277.290.265,00	83,02	124.733.000,00
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	198.409.000,00
9	Dinas Perhubungan	5.977.719.745,00	5.947.270.552,98	99,49	4.859.786.452,29
10	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	84.187.400,00
11	Dinas Kelautan dan Perikanan	2.896.864.707,00	2.706.117.713,95	93,42	1.653.678.840,00
12	Dinas Pariwisata	357.698.642,00	351.508.825,00	98,27	162.517.078,00
13	Dinas Perkebunan	1.439.147.500,00	1.180.210.240,21	82,01	13.585.000,00
14	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	490.000.000,00	389.754.654,66	79,54	102.248.515,00
15	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	551.390.500,00	0,00	0,00	0,00
16	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	40.000.000,00	38.960.000,00	97,40	0,00
17	Sekretariat Daerah	16.500.000,00	16.500.000,00	100,00	4.363.671.402,85
18	Sekretariat DPRD	5.629.520.000,00	3.979.565.064,00	70,69	1.032.811.245,00
19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	0,00	0,00	0,00	34.800.000,00
20	Badan Pendapatan Daerah	5.033.799.484,00	4.443.011.801,31	88,26	0,00
21	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2.282.094.000,00	0,00	0,00	60.024.000,00
22	Badan Kepegawaian Daerah	0,00	0,00	0,00	17.344.250,00
23	Badan Penghubung	2.169.368.020,00	1.674.580.920,00	77,19	0,00

No	Organisasi Perangkat Daerah	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)
	Jumlah	**280.525.464.255,00**	**239.980.341.418,23**	**85,55**	**172.213.274.099,21**

5.1.18 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2021 sebesar Rp470.432.878.695,85 atau 81,43% dari anggaran sebesar Rp577.701.191.645,00. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2021 lebih tinggi sebesar Rp66.778.055.070,54 atau 16,54% dibandingkan realisasi Tahun 2020 sebesar Rp403.654.823.625,31

Rincian realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	**577.701.191.645,00**	**470.432.878.695,85**	**81,43**	**403.654.823.625,31**
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	**523.609.397.256,00**	**423.083.113.828,18**	**80,80**	**371.839.916.297,92**
Belanja Modal Jalan	**505.153.815.367,00**	**409.089.262.625,18**	**80,98**	**304.416.088.266,38**
Belanja Modal Jalan Provinsi	410.765.869.362,00	321.327.816.346,28	78,23	303.378.075.238,38
Belanja Modal Jalan Lainnya	94.387.946.005,00	87.761.446.278,90	92,98	0,00
Belanja Modal Pengadaan rambu/plang petunjuk lalu lintas	0,00	0,00	0,00	791.489.728,00
Belanja Modal Pengadaan Plang Nama	0,00	0,00	0,00	246.523.300,00
Belanja Modal Jembatan	**18.455.581.889,00**	**13.993.851.203,00**	**75,82**	**67.423.828.031,54**
Belanja Modal Jembatan pada Jalan Provinsi	18.455.581.889,00	13.993.851.203,00	75,82	0,00
Belanja Modal Jembatan Penyeberangan	0,00	0,00	0,00	67.423.828.031,54
Belanja Modal Bangunan Air	**30.316.486.267,00**	**25.549.916.304,10**	**84,28**	**25.276.712.164,39**
Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	**4.742.334.000,00**	**4.697.924.465,70**	**99,06**	**3.564.772.186,00**
Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	4.608.534.000,00	4.605.146.890,70	99,93	3.264.359.936,00
Belanja Modal Bangunan Pelengkap Irigasi	133.800.000,00	92.777.575,00	69,34	300.412.250,00
Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	**1.747.558.652,00**	**1.747.498.651,63**	**100,00**	**0,00**
Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	1.747.558.652,00	1.747.498.651,63	100,00	0,00
Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	**4.142.027.500,00**	**4.091.802.651,69**	**98,79**	**21.711.939.978,39**
Belanja Modal Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku	0,00	0,00	0,00	21.711.939.978,39
Belanja Modal Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	235.427.500,00	235.143.268,24	99,88	0,00
Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	3.906.600.000,00	3.856.659.383,45	98,72	0,00

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)
Belanja Modal Bangunan Air Kotor	**19.684.566.115,00**	**15.012.690.535,08**	**76,27**	**0,00**
Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya	19.684.566.115,00	15.012.690.535,08	76,27	0,00
Belanja Modal Instalasi	**13.200.081.198,00**	**11.920.469.408,00**	**90,31**	**6.442.785.233,00**
Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	**421.021.000,00**	**418.484.462,00**	**99,40**	**0,00**
Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	421.021.000,00	418.484.462,00	99,40	0,00
Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	**1.118.860.000,00**	**746.409.500,00**	**66,71**	**0,00**
Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah	1.118.860.000,00	746.409.500,00	66,71	0,00
Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	**10.075.600.198,00**	**9.576.167.713,00**	**95,04**	**6.442.785.233,00**
Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	192.558.909,00	190.735.000,00	99,05	0,00
Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	9.883.041.289,00	9.385.432.713,00	94,97	0,00
Belanja modal Pengadaan instalasi listrik	0,00	0,00	0,00	6.409.730.233,00
Belanja Modal Peralatan Pembangkit Listrik	0,00	0,00	0,00	33.055.000,00
Belanja Modal Instalasi Pengaman	**1.584.600.000,00**	**1.179.407.733,00**	**74,43**	**0,00**
Belanja Modal Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif	712.500.000,00	643.868.533,00	90,37	0,00
Belanja Modal Instalasi Pengaman Lainnya	872.100.000,00	535.539.200,00	61,41	0,00
Belanja Modal Jaringan	**10.575.226.924,00**	**9.879.379.155,57**	**93,42**	**95.409.930,00**
Belanja Modal Jaringan Listrik	**7.243.288.500,00**	**6.940.320.123,00**	**95,82**	**95.409.930,00**
Belanja Modal Jaringan Distribusi	6.687.488.500,00	6.408.903.123,00	95,83	0,00
Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	555.800.000,00	531.417.000,00	95,61	0,00
Belanja modal Pengadaan lampu hias jalan	0,00	0,00	0,00	35.968.680,00
Belanja modal Pengadaan lampu hias taman	0,00	0,00	0,00	59.441.250,00
Belanja Modal Jaringan Gas	**3.331.938.424,00**	**2.939.059.032,57**	**88,21**	**0,00**
Belanja Modal Jaringan Pipa Distribusi	1.404.733.464,00	1.301.191.032,57	92,63	0,00
Belanja Modal Jaringan Gas Lainnya	1.927.204.960,00	1.637.868.000,00	84,99	0,00
Jumlah	**577.701.191.645,00**	**470.432.878.695,85**	**81,43**	**403.654.823.625,31**

Berikut Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dari masing-masing OPD:

No	Organisasi Perangkat Daerah	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	470.294.500,00	467.321.800,00	99,37	7.249.000,00
2	Dinas Kesehatan	3.825.804.960,00	3.107.678.533,00	81,23	336.937.640,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan,	554.998.303.487,00	449.357.191.090,45	80,97	384.445.714.586,77

No	Organisasi Perangkat Daerah	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)
	Kawasan Permukiman dan Pertanahan				
4	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00	3.550.000,00
5	Dinas Sosial	10.000.000,00	6.000.000,00	60,00	0,00
6	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	166.666.148,00	165.497.200,00	99,30	0,00
7	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	35.892.761,00	35.585.000,00	99,14	149.402.000,00
8	Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00	11.851.117.725,54
9	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	5.700.000,00
10	Dinas Kebudayaan	175.000.000,00	174.867.000,00	99,92	26.937.235,00
11	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.310.600.000,00	1.227.324.661,40	93,65	248.686.680,00
12	Dinas Perkebunan	133.800.000,00	92.777.575,00	69,34	0,00
13	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	0,00	0,00	0,00	179.954.038,00
14	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	16.570.529.789,00	15.794.335.836,00	95,32	5.928.229.220,00
15	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	0,00	0,00	53.200.000,00
16	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	10.150.000,00
17	Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	299.199.500,00
18	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	0,00	0,00	0,00	58.596.000,00
19	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	4.300.000,00	4.300.000,00	100,00	50.200.000,00
	Jumlah	**577.701.191.645,00**	**470.432.878.695,85**	**81,43**	**403.654.823.625,31**

5.1.19 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2021 sebesar Rp47.944.229.795,00 atau 95,70% dari anggaran sebesar Rp50.098.377.517,00. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap lainnya Tahun 2021 lebih rendah sebesar Rp3.451.224.739,00 atau 6,72% dibandingkan realisasi Tahun 2020 sebesar Rp51.395.454.534,00.

Rincian realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	**50.098.377.517,00**	**47.944.229.795,00**	**95,70**	**51.395.454.534,00**
Belanja Modal Bahan Perpustakaan	**205.488.000,00**	**203.600.000,00**	**99,08**	**125.108.753,00**
Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	**199.988.000,00**	**198.100.000,00**	**99,06**	**125.108.753,00**
Belanja Modal Buku Umum	199.988.000,00	198.100.000,00	99,06	31.895.150,00

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)
Belanja Modal Buku Agama	0,00	0,00	0,00	14.033.703,00
Belanja modal pengadaan buku pertanian	0,00	0,00	0,00	9.999.500,00
Belanja Modal Pengadaan Buku Fiksi	0,00	0,00	0,00	13.499.400,00
Belanja Modal Pengadaan Buku Hukum, Organisasi dan Tata Laksana	0,00	0,00	0,00	19.497.420,00
Belanja modal pengadaan majalah	0,00	0,00	0,00	36.183.580,00
Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	**5.500.000,00**	**5.500.000,00**	**100,00**	**0,00**
Belanja Modal Audio Visual	5.500.000,00	5.500.000,00	100,00	0,00
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	**823.400.000,00**	**125.775.000,00**	**15,28**	**1.479.336.200,00**
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	**166.400.000,00**	**125.775.000,00**	**75,59**	**949.368.200,00**
Belanja Modal Alat Musik	166.400.000,00	125.775.000,00	75,59	0,00
Belanja Modal Barang Seni dan Barang Bersejarah Khusus	0,00	0,00	0,00	949.368.200,00
Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan	**657.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Belanja Modal Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah	657.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Olahraga	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**529.968.000,00**
Belanja modal pengadaan peralatan olahraga	0,00	0,00	0,00	99.652.700,00
Belanja modal pengadaan perlengkapan olahraga	0,00	0,00	0,00	12.400.000,00
Belanja modal pengadaan Sarana Prasarana Olahraga	0,00	0,00	0,00	417.915.300,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	**175.460.000,00**	**168.529.585,00**	**96,05**	**0,00**
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	**175.460.000,00**	**168.529.585,00**	**96,05**	**0,00**
Belanja Modal Lisensi dan Franchise	42.000.000,00	41.800.000,00	99,52	0,00
Belanja Modal Software	133.460.000,00	126.729.585,00	94,96	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	**47.437.630.182,00**	**47.054.679.850,00**	**99,19**	**49.791.009.581,00**
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	**47.437.630.182,00**	**47.054.679.850,00**	**99,19**	**49.791.009.581,00**
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	47.437.630.182,00	47.054.679.850,00	99,19	49.791.009.581,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	**1.456.399.335,00**	**391.645.360,00**	**26,89**	**0,00**
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	**1.456.399.335,00**	**391.645.360,00**	**26,89**	**0,00**
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	1.456.399.335,00	391.645.360,00	26,89	0,00
Jumlah	**50.098.377.517,00**	**47.944.229.795,00**	**95,70**	**51.395.454.534,00**

Berikut Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dari masing-masing OPD:

No	Organisasi Perangkat Daerah	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	47.437.630.182,00	47.052.937.850,00	99,19	51.247.984.781,00
2	Dinas Kesehatan	1.496.599.335,00	391.645.360,00	26,17	22.361.000,00

No	Organisasi Perangkat Daerah	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)
3	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	5.500.000,00	5.500.000,00	100,00	0,00
4	Dinas Perhubungan	106.000.000,00	99.550.000,00	93,92	0,00
5	Dinas Kebudayaan	657.000.000,00	0,00	0,00	0,00
6	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	199.988.000,00	198.100.000,00	99,06	125.108.753,00
7	Sekretariat Daerah	126.200.000,00	125.775.000,00	99,66	0,00
8	Badan Pendapatan Daerah	25.000.000,00	24.750.000,00	99,00	0,00
9	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	44.460.000,00	44.229.585,00	99,48	0,00
	Jumlah	**50.098.377.517,00**	**47.942.487.795,00**	**95,70**	**51.395.454.534,00**

5.1.20 Belanja Modal Aset Lainnya

Belanja Modal Aset Lainnya Tahun 2021 tidak dianggarkan pada APBD Tahun 2021. Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya Tahun 2020 sebesar Rp146.840.000,00. Rincian realisasi Belanja Modal Aset Lainnya adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)
Belanja Modal Aset Lainnya	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**146.840.000,00**
Belanja Modal Aset Lainnya	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**146.840.000,00**
Belanja Modal Aset Lainnya	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**146.840.000,00**
Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	146.840.000,00
Jumlah	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**146.840.000,00**

5.1.21 Belanja Tidak Terduga

Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2021 sebesar Rp245.808.686,00 atau 0,53% dari anggaran sebesar Rp46.373.907.506,00. Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2021 lebih rendah sebesar Rp98.845.828.068,00 atau 99,75% dibandingkan Realisasi Tahun 2020 sebesar Rp99.091.636.754,00. Rincian realisasi Belanja Tidak Terduga adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)
Belanja Tidak Terduga	**46.373.907.506,00**	**245.808.686,00**	**0,53**	**99.091.636.754,00**
Belanja Tidak Terduga	46.373.907.506,00	245.808.686,00	0,53	99.091.636.754,00
Jumlah	**46.373.907.506,00**	**245.808.686,00**	**0,53**	**99.091.636.754,00**

1. Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk pengembalian atas Kelebihan Penerimaan Setoran Uang Pengganti Tahun Anggaran 2020 an. Terpidana Yusrizal, ST dan Kusno. Berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor:1370/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021 tentang Penetapan Alokasi Belanja Tidak Terduga untuk Pengembalian atas Kelebihan Penerimaan Setoran Uang Pengganti tahun Anggaran 2020 sebesar Rp146.757.401,00.
2. Pembayaran Belanja Tidak Terduga untuk Pengembalian Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Penyewaan Aula Gedung Wanita tanggal 12 April 2020 atas nama ELMA berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor:1383/XII/2021 tanggal 20 Desember 2021 tentang Penetapan Alokasi Belanja Tidak Terduga untuk Pengembalian Atas Kelebihan Penerimaan Daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp4.400.000,00.
3. Pembayaran Belanja Tidak Terduga untuk Pengembalian Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Penyewaan Aula Gedung Wanita tanggal 11 April 2020 atas nama REGIA berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor:1383/XII/2021 tanggal 20 Desember 2021 tentang Penetapan Alokasi Belanja Tidak Terduga untuk Pengembalian Atas Kelebihan Penerimaan Daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp6.400.000,00.
4. Pembayaran Belanja Tidak Terduga untuk Pengembalian Kelebihan Penyetoran Jasa Giro UPP.Kampar Membangun Cabang Kampar berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor:1383/XII/2021 tanggal 20 Desember 2021 tentang Penetapan Alokasi Belanja Tidak Terduga untuk Pengembalian Atas Kelebihan Penerimaan Daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp77.451.285,00.
5. Pembayaran Belanja Tidak Terduga untuk Pengembalian Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Penyewaan Aula Gedung Wanita tanggal 28 Maret 2020 atas nama Hj. Rahmah Masniari berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor:1383/XII/2021 tanggal 20 Desember 2021 tentang Penetapan Alokasi Belanja Tidak Terduga untuk Pengembalian Atas Kelebihan Penerimaan Daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp4.400.000,00.
6. Pembayaran Belanja Tidak Terduga untuk Pengembalian Pengembalian Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Penyewaan Aula Gedung Wanita tanggal 04 April 2020 atas nama Desfita Arara berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor:1383/XII/2021 tanggal 20 Desember 2021 tentang Penetapan Alokasi

Belanja Tidak Terduga untuk Pengembalian Atas Kelebihan Penerimaan Daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp6.400.000,00.

5.1.22 Transfer - Bagi Hasil Pajak Daerah ke Kabupaten/ Kota

Realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah ke Kabupaten/ Kota Tahun 2021 sebesar Rp1.498.191.320.346,70 atau 99,05% dari anggaran sebesar Rp1.512.628.905.875,00. Realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah ke Kabupaten/ Kota Tahun 2021 lebih tinggi sebesar Rp304.116.719.676,78 atau 25,47% dibandingkan realisasi Tahun 2020 sebesar Rp1.194.074.600.669,92 dengan rincian sebagai berikut:

Bagi Hasil Pajak Daerah ke Kabupaten/ Kota terealisasi berdasarkan Keputusan Gubernur sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Gubernur Riau No.Kpts.524/V/2021 Tgl. 17 Mei 2021 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan IV (Desember) untuk Kabupaten/ Kota se Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021.
2. Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.523/V/2021 Tgl. 17 Mei 2021 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan I untuk Kabupaten/ Kota se-Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021.
3. Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.572/V/2021 Tgl. 21 Mei 2021 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Triwulan I untuk Kabupaten/ Kota se-Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021.
4. Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.2049/XII/2020 Tgl. 21 Desember 2020 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Triwulan IV (Oktober-November) untuk Kabupaten/ Kota se-Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020.
5. Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.833/VIII//2021 Tgl. 3 Agustus 2021 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Triwulan II untuk Kabupaten/ Kota se-Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021.
6. Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.834/VIII/2021 Tgl. 3 Agustus 2021 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan II untuk Kabupaten/ Kota se-Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021.
7. Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.1141/X/2021 Tgl. 29 Oktober 2021 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea

Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Triwulan II untuk Kabupaten/ Kota se-Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021.

8. Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.1167/XI/2021 Tgl. 9 November 2021 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan III untuk Kabupaten/ Kota se-Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021.
9. Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.753/VII/2021 Tgl. 14 Juli 2021 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Triwulan IV (Desember) Tahun 2020 untuk Kabupaten/ Kota se-Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021.
10. Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.1382/XII/2021 Tgl. 20 Desember 2021 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Triwulan IV (Oktober-November) untuk Kabupaten/ Kota se-Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021.
11. Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.1417/XII/2021 Tgl. 24 Desember 2021 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan IV (Oktober-November) untuk Kabupaten/ Kota se-Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021.

Rincian Bagi Hasil Pajak Daerah ke Kabupaten/ Kota Tahun 2021 sebagai berikut.

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)
Belanja Bagi Hasil	**1.512.628.905.875,00**	**1.498.191.320.346,70**	**99,05**	**1.194.074.600.669,92**
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/ Kota dan Desa	**1.512.628.905.875,00**	**1.498.191.320.346,70**	**99,05**	**1.194.074.600.669,92**
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	**1.150.414.749.530,00**	**1.143.531.508.226,27**	**99,40**	**900.657.239.306,35**
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	1.150.414.749.530,00	1.143.531.508.226,27	99,40	900.657.239.306,35
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota	**362.214.156.345,00**	**354.659.812.120,43**	**97,91**	**293.417.361.363,57**
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota	362.214.156.345,00	354.659.812.120,43	97,91	293.417.361.363,57
Jumlah	**1.512.628.905.875,00**	**1.498.191.320.346,70**	**99,05**	**1.194.074.600.669,92**

Rincian penerima Bagi Hasil Pajak Daerah ke Kabupaten/ Kota Tahun 2021 sebesar Rp1.498.191.320.346,70 sebagai berikut:

No	Kab/Kota Penerima	Anggaran (Rp)	Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (Rp)	Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Rp)	Realisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Rp)	Realisasi Pajak Air Permukaan (Rp)	Realisasi Pajak Rokok (Rp)	Total (Rp)
1	Pekanbaru	253.554.998.884,00	98.313.278.907,04	49.786.372.141,00	66.026.129.515,00	941.969.965,00	30.993.236.848,00	246.060.987.376,04
2	Kampar	143.919.669.625,00	37.460.892.552,42	24.309.391.778,00	51.815.130.822,00	2.170.303.747,00	25.453.449.287,00	141.209.168.186,42
3	Bengkalis	129.050.630.338,00	38.126.230.282,51	22.117.233.130,49	41.675.574.344,00	1.070.056.597,00	26.061.535.984,00	129.050.630.338,00
4	Indragiri Hulu	110.762.176.537,00	25.771.239.004,00	15.246.977.259,00	45.203.207.551,00	1.569.397.029,00	22.971.355.694,00	110.762.176.537,00
5	Indragiri Hilir	107.290.259.864,00	22.257.514.284,19	12.064.831.220,81	43.974.566.978,00	1.170.814.617,00	27.822.532.764,00	107.290.259.864,00
6	Kuantan Singingi	95.197.514.227,00	22.337.698.205,00	12.748.321.251,00	37.988.458.648,00	1.583.934.616,00	20.539.101.507,00	95.197.514.227,00
7	Dumai	108.659.157.461,00	29.992.973.539,39	17.354.434.978,00	40.254.549.943,00	1.063.038.420,00	19.933.827.864,00	108.598.824.744,39
8	Rokan Hulu	114.347.358.038,00	31.425.045.610,08	20.172.091.829,92	39.502.675.922,00	1.304.617.575,00	21.942.927.101,00	114.347.358.038,00
9	Rokan Hilir	115.437.935.191,00	26.468.260.604,71	18.306.963.878,00	42.247.610.747,00	1.179.836.020,00	27.226.051.234,00	115.428.722.483,71
10	Pelalawan	125.932.140.313,00	28.054.647.692,01	19.945.859.677,00	52.826.002.167,00	4.850.193.960,00	17.301.516.959,00	122.978.220.455,01
11	Siak	135.008.795.508,00	25.668.374.512,00	16.426.205.368,00	65.917.295.275,00	4.381.700.848,00	22.615.219.502,00	135.008.795.505,00
12	Kepulauan Meranti	73.468.269.889,00	18.024.927.691,13	11.148.240.084,00	27.065.748.065,00	1.018.764.048,00	15.000.982.704,00	72.258.662.592,13
	Jumlah	**1.512.628.905.875,00**	**403.901.082.884,48**	**239.626.922.595,22**	**554.496.949.977,00**	**22.304.627.442,00**	**277.861.737.448,00**	**1.498.191.320.346,70**

5.1.23 Transfer Bantuan Keuangan – Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya

Realisasi Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya Tahun 2021 sebesar Rp193.927.652.104,96 atau 87,65% dari anggaran sebesar Rp221.250.637.000,00. Realisasi Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya Tahun 2021 menurun sebesar Rp101.533.268.368,04 atau 34,36% dari realisasi Tahun 2020 sebesar Rp295.460.920.473,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/ Kota	**221.250.637.000,00**	**193.927.652.104,96**	**87,65**	**295.460.920.473,00**
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/ Kota	**221.250.637.000,00**	**193.927.652.104,96**	**87,65**	**295.460.920.473,00**
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/ Kota	221.250.637.000,00	193.927.652.104,96	87,65	279.577.557.573,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Kecamatan	0,00	0,00	0,00	15.883.362.900,00
Jumlah	**221.250.637.000,00**	**193.927.652.104,96**	**87,65**	**295.460.920.473,00**

Realisasi Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah/ Pemerintah Desa Lainnya tahun 2020 pada Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kecamatan sebagai berikut:

No	Kab/Kota	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)
1	Bantuan Keuangan kepada Kota Pekanbaru				1.184.560.000,00
2	**Bantuan Keuangan kepada Kab Kampar**				**2.100.000.000,00**
3	Bantuan Keuangan kepada Kab Bengkalis				1.088.802.900,00
4	Bantuan Keuangan kepada Kab Indragiri Hulu				967.454.700,00
5	Bantuan Keuangan kepada Kab Indragiri Hilir				1.666.851.000,00
6	Bantuan Keuangan kepada Kab Kuantan Singingi				1.303.820.000,00
7	Bantuan Keuangan kepada Kota Dumai				700.000.000,00
8	Bantuan Keuangan kepada Kab Rokan Hulu				1.600.000.000,00
9	Bantuan Keuangan kepada Kab Rokan Hilir				1.800.000.000,00
10	Bantuan Keuangan kepada Kab Pelalawan				1.171.874.300,00
11	Bantuan Keuangan kepada Kab Siak				1.400.000.000,00

No	Kab/Kota	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)
12	Bantuan Keuangan kepada Kab Kep Meranti				900.000.000,00
	Jumlah				**15.883.362.900,00**

Sedangkan Realisasi transfer bantuan keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya dapat dirincikan sebagai berikut.

No	Kabupaten/ Kota	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)
1	Bantuan Keuangan kepada Kota Pekanbaru	18.466.000.000,00	16.616.277.174,00	89,98	33.261.200.000,00
2	Bantuan Keuangan kepada Kab Kampar	33.346.000.000,00	30.773.999.747,00	92,29	23.164.000.000,00
3	Bantuan Keuangan kepada Kab Bengkalis	18.176.000.000,00	17.763.147.160,00	97,73	25.534.423.500,00
4	Bantuan Keuangan kepada Kab Indragiri Hulu	9.800.000.000,00	9.014.620.600,00	91,99	25.599.226.000,00
5	Bantuan Keuangan kepada Kab Indragiri Hilir	22.262.000.000,00	20.862.541.800,00	93,71	20.670.878.673,00
6	Bantuan Keuangan kepada Kab Kuantan Singingi	35.692.000.000,00	27.826.773.994,00	77,96	19.490.620.000,00
7	Bantuan Keuangan kepada Kota Dumai	13.651.000.000,00	7.988.000.000,00	58,52	38.567.300.000,00
8	Bantuan Keuangan kepada Kab Rokan Hulu	27.266.000.000,00	26.779.809.600,00	98,22	16.111.200.000,00
9	Bantuan Keuangan kepada Kab Rokan Hilir	12.904.000.000,00	12.356.923.930,00	95,76	34.667.800.000,00
10	Bantuan Keuangan kepada Kab Pelalawan	10.931.000.000,00	6.878.216.122,00	62,92	11.374.109.400,00
11	Bantuan Keuangan kepada Kab Siak	12.176.637.000,00	11.077.409.977,96	90,97	18.861.800.000,00
12	Bantuan Keuangan kepada Kab Kep Meranti	6.580.000.000,00	5.989.932.000,00	91,03	12.275.000.000,00
	Jumlah	**221.250.637.000,00**	**193.927.652.104,96**	**87,65**	**279.577.557.573,00**

1. Belanja Bantuan Keuangan kepada Kota Pekanbaru terealisasi sebesar Rp16.616.277.174,00 diperuntukkan pada kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Bidang	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)
1	Gaji Guru Bantu (Rp.2.000.000,- x 12 Bulan x 309 Orang)	Pendidikan	7.416.000.000,00	6.420.000.000,00
2	Bantuan Keuangan Kecamatan	Sosial	1.200.000.000,00	1.198.277.174,00
3	Bantuan Keuangan Rumah Layak Huni	PUPRPKPP	9.850.000.000,00	8.998.000.000,00
		Jumlah	**18.466.000.000,00**	**16.616.277.174,00**

2. Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Kampar terealisasi sebesar Rp30.773.999.747,00 diperuntukkan pada kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Bidang	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)
1	Gaji Guru Bantu (Rp.2.000.000,- x 12 Bulan x 689 Orang)	Pendidikan	16.536.000.000,00	15.234.000.000,00
2	Bantuan Keuangan Kecamatan	Sosial	2.100.000.000,00	2.099.999.747,00
3	Bantuan Keuangan Rumah Layak Huni	PUPRPKPP	14.710.000.000,00	13.440.000.000,00
		Jumlah	**33.346.000.000,00**	**30.773.999.747,00**

3. Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Bengkalis terealisasi sebesar Rp17.763.147.160,00 diperuntukkan pada kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Bidang	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)
1	Gaji Guru Bantu (Rp.2.000.000,- x 12 Bulan x 289 Orang)	Pendidikan	6.936.000.000,00	6.936.000.000,00
2	Bantuan Keuangan Kecamatan	Sosial	1.100.000.000,00	967.201.300,00
3	Bantuan Keuangan Rumah Layak Huni	PUPRPKPP	10.140.000.000,00	9.859.945.860,00
		Jumlah	**18.176.000.000,00**	**17.763.147.160,00**

4. Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Indragiri Hulu terealisasi sebesar Rp9.014.620.600,00 diperuntukkan pada kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Bidang	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)
1	Gaji Guru Bantu (Rp.2.000.000,- x 12 Bulan x 350 Orang)	Pendidikan	8.400.000.000,00	7.620.000.000,00
2	Bantuan Keuangan Kecamatan	Sosial	1.400.000.000,00	1.394.620.600,00
3	Bantuan Keuangan Rumah Layak Huni	PUPRPKPP	0,00	0,00
		Jumlah	**9.800.000.000,00**	**9.014.620.600,00**

5. Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Indragiri Hilir terealisasi sebesar Rp20.862.541.800,00 diperuntukkan pada kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Bidang	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)
1	Gaji Guru Bantu (Rp.2.000.000,- x 12 Bulan x 443 Orang)	Pendidikan	10.632.000.000,00	9.548.000.000,00
2	Bantuan Keuangan Kecamatan	Sosial	2.000.000.000,00	1.923.476.000,00
3	Bantuan Keuangan Kegiatan Penyelesaian Pekerjaan	PUPRPKPP	50.000.000,00	0,00
4	Bantuan Keuangan Rumah Layak Huni	PUPRPKPP	9.580.000.000,00	9.391.065.800,00
		Jumlah	**22.262.000.000,00**	**20.862.541.800,00**

6. Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Kuantan Singingi terealisasi sebesar Rp27.826.773.994,00 diperuntukkan pada kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Bidang	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)
1	Gaji Guru Bantu (Rp.2.000.000,- x 12 Bulan x 508 Orang)	Pendidikan	12.192.000.000,00	12.192.000.000,00
2	Bantuan Keuangan Kecamatan	Sosial	1.500.000.000,00	1.207.493.500,00
3	Bantuan Keuangan untuk PORPROV (Pekan Olahraga Provinsi)	PUPRPKPP	22.000.000.000,00	14.427.280.494,00
		Jumlah	**35.692.000.000,00**	**27.826.773.994,00**

7. Belanja Bantuan Keuangan kepada Kota Dumai terealisasi sebesar Rp7.988.000.000,00 diperuntukkan pada kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Bidang	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)
1	Gaji Guru Bantu (Rp.2.000.000,- x 12 Bulan x 304 Orang)	Pendidikan	7.296.000.000,00	7.288.000.000,00
2	Bantuan Keuangan Kecamatan	Sosial	700.000.000,00	700.000.000,00
3	Bantuan Keuangan Rumah Layak Huni	PUPRPKPP	5.655.000.000,00	0,00
		Jumlah	**13.651.000.000,00**	**7.988.000.000,00**

8. Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Rokan Hulu terealisasi sebesar Rp26.779.809.600,00 diperuntukkan pada kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Bidang	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)
1	Gaji Guru Bantu (Rp.2.000.000,- x 12 Bulan x 399 Orang)	Pendidikan	9.576.000.000,00	9.120.000.000,00
2	Bantuan Keuangan Kecamatan	Sosial	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00
3	Bantuan Keuangan Rumah Layak Huni	PUPRPKPP	16.090.000.000,00	16.059.809.600,00
		Jumlah	**27.266.000.000,00**	**26.779.809.600,00**

9. Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Rokan Hilir terealisasi sebesar Rp12.356.923.930,00 diperuntukkan pada kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Bidang	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)
1	Gaji Guru Bantu (Rp.2.000.000,- x 12 Bulan x 116 Orang)	Pendidikan	2.784.000.000,00	2.520.000.000,00
2	Bantuan Keuangan Kecamatan	Sosial	1.800.000.000,00	1.796.969.930,00
3	Bantuan Keuangan Rumah Layak Huni	PUPRPKPP	8.320.000.000,00	8.039.954.000,00
		Jumlah	**12.904.000.000,00**	**12.356.923.930,00**

10. Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Pelalawan terealisasi sebesar Rp6.878.216.122,00 diperuntukkan pada kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Bidang	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)
1	Gaji Guru Bantu (Rp.2.000.000,- x 12 Bulan x 249 Orang)	Pendidikan	5.976.000.000,00	5.730.000.000,00
2	Bantuan Keuangan Kecamatan	Sosial	1.200.000.000,00	1.148.216.122,00
3	Bantuan Keuangan Rumah Layak Huni	PUPRPKPP	3.755.000.000,00	0,00
4	Bantuan Keuangan untuk MTQ (Musabaqah Tilawatil Qur'an)	PUPRPKPP	0,00	0,00
		Jumlah	**10.931.000.000,00**	**6.878.216.122,00**

11. Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Siak terealisasi sebesar Rp11.077.409.977,96 diperuntukkan pada kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Bidang	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)
1	Gaji Guru Bantu (Rp.2.000.000,- x 12 Bulan x 212 Orang)	Pendidikan	5.088.000.000,00	4.470.000.000,00
2	Bantuan Keuangan Kecamatan	Sosial	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00
3	Bantuan Keuangan Kegiatan Penyelesaian Pekerjaan	PUPRPKPP	5.688.637.000,00	5.207.409.977,96
4	Bantuan Keuangan Rumah Layak Huni	PUPRPKPP	0,00	0,00
		Jumlah	**12.176.637.000,00**	**11.077.409.977,96**

12. Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Kepulauan Meranti terealisasi sebesar Rp5.989.932.000,00 diperuntukkan pada kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Bidang	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)
1	Gaji Guru Bantu (Rp.2.000.000,- x 12 Bulan x 65 Orang)	Pendidikan	1.560.000.000,00	1.560.000.000,00

No	Uraian	Bidang	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)
2	Bantuan Keuangan Kecamatan	Sosial	900.000.000,00	900.000.000,00
3	Bantuan Keuangan Rumah Layak Huni	PUPRPKPP	4.120.000.000,00	3.529.932.000,00
		Jumlah	**6.580.000.000,00**	**5.989.932.000,00**

Belanja Bantuan Keuangan se-Provinsi Riau terealisasi berdasarkan Keputusan Gubernur Riau No. Kpts.74/I/2021 tanggal 26 Januari 2021 tentang Penetapan Alokasi Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021 tanggal 30 Juni 2021.

5.1.24 Transfer Bantuan Keuangan - Bantuan Keuangan ke Desa

Berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor: KPTS.3/I/2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Daftar Desa Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021.

Realisasi Bantuan Keuangan ke Desa Tahun 2021 sebesar Rp157.892.253.886,00 atau 99,24% dari anggaran sebesar Rp159.100.000.000,00. Realisasi Bantuan Keuangan ke Desa Tahun 2021 meningkat sebesar Rp23.089.723.886,00 atau 17,13% dari realisasi Bantuan Keuangan ke Desa Tahun 2020 sebesar Rp134.802.530.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/ Kota kepada Desa	**159.100.000.000,00**	**157.892.253.886,00**	**99,24**	**134.802.530.000,00**
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/ Kota kepada Desa	**159.100.000.000,00**	**157.892.253.886,00**	**99,24**	**134.802.530.000,00**
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/ Kota kepada Desa	159.100.000.000,00	157.892.253.886,00	99,24	134.802.530.000,00
Jumlah	**159.100.000.000,00**	**157.892.253.886,00**	**99,24**	**134.802.530.000,00**

Rekapitulasi Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus Desa Tahun Anggaran 2021 dapat dirinci sebagai berikut:

No	Kabupaten / Kota Penerima BKK	Jumlah Desa Berdasarkan Lampiran Keputusan Gubernur Riau Nomor KPTS.3/I/2021	Jumlah Bantuan Keuangan Per Desa (Rp)	Anggaran (Rp)	Jumlah Desa dalam Proses Verifikasi BPKAD	Jumlah Desa yang Belum Diterima Berkasnya	Jumlah Yang Sudah Disalurkan ke Desa		Sisa Anggaran (Rp)	Keterangan
							Jumlah Desa	Realisasi (Rp)		
1	Kabupaten Kampar	242	100.000.000,00	24.200.000.000,00	0	2	240	24.000.000.000,00	200.000.000,00	Tahap I (125 Desa) Telah Disalurkan, Tahap II (62 Desa) telah disalurkan, Tahap III (27 Desa) telah disalurkan, Tahap IV (15 Desa) telah disalurkan, Tahap V (5 Desa) telah disalurkan, Tahap VI (6 desa)
2	Kabupaten Bengkalis	136	100.000.000,00	13.600.000.000,00	0	0	136	13.600.000.000,00	0,00	Tahap I (59 Desa) sudah disalurkan, Tahap II (70 Desa) telah disalurkan, Tahap III (7 Desa) telah disalurkan
3	Kabupaten Indragiri Hulu	178	100.000.000,00	17.800.000.000,00	0	0	178	17.800.000.000,00	0,00	Tahap I (91 Desa) dan Tahap II (42 Desa) telah disalurkan, Tahap III (45 Desa) telah disalurkan
4	Kabupaten Indragiri Hilir	197	100.000.000,00	19.700.000.000,00	0	1	196	19.600.000.000,00	100.000.000,00	Tahap I (35 Desa) telah disalurkan, Tahap II (56 Desa) telah disalurkan, Tahap III (61 Desa) Telah disalurkan, Tahap IV (5 Desa) telah disalurkan, Tahap V (36 Desa) telah disalurkan, Tahap VI (3 desa) telah disalurkan
5	Kabupaten Rokan Hulu	139	100.000.000,00	13.900.000.000,00	0	0	139	13.900.000.000,00	0,00	Tahap I (94 Desa) telah disalurkan, Tahap II (37 Desa) telah disalurkan, Tahap III (5desa) telah disalurkan, Tahap IV (2 desa) telah disalurkan, Tahap V (1 Desa) telah disalurkan
6	Kabupaten Rokan Hilir	159	100.000.000,00	15.900.000.000,00	0	0	159	15.900.000.000,00	0,00	Tahap I (112 Desa) telah disalurkan tanggal 23 Nop 2011, Tahap II (20 Desa) telah disalurkan, Tahap III (26 Desa)

										telah disalurkan, Tahap IV (1 desa)
7	Kabupaten Pelalawan	104	100.000.000,00	10.400.000.000,00	0	0	104	9.845.656.000,00	554.344.000,00	Tahap I (38 Desa) sudah disalurkan, Tahap II (62 Desa) Sudah Disalurkan, Tahap III (4 Desa) telah disalurkan
8	Kabupaten Kuantan Singingi	218	100.000.000,00	21.800.000.000,00	0	1	217	21.700.000.000,00	100.000.000,00	Tahap I (91 Desa) Telah disalurkan. Tahap II (83 Desa) Telah tersalurkan, Tahap III (38 Desa) Telah disalurkan, Kuansing IV (4 Desa) Telah disalurkan, Tahap V (1 Desa) telah disalurkan
9	Kabupaten Siak	122	100.000.000,00	12.200.000.000,00	0	0	122	12.046.597.886,00	153.402.114,00	Tahap I (38 Desa) telah disalurkan, Tahap II (60 desa) telah disalurkan, Tahap III (20 Desa) telah disalurkan, Tahap IV (4 desa) telah disalurkan
10	Kabupaten Kepulauan Meranti	96	100.000.000,00	9.600.000.000,00	0	1	95	9.500.000.000,00	100.000.000,00	Tahap I (46 Desa) Telah disalurkan, Tahap II (49 Desa) telah disalurkan
	Total	**1.591**	**1.000.000.000,00**	**159.100.000.000,00**	**0**	**5**	**1.586**	**157.892.253.886,00**	**1.207.746.114,00**	

5.1.25 Penerimaan Pembiayaan – Penggunaan Silpa Tahun Anggaran Sebelumnya

Realisasi Penerimaan Pembiayaan – Penggunaan SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya di LRA Tahun 2021 sebesar Rp531.683.989.445,73 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp531.683.989.446,00. Realisasi Tahun 2021 lebih tinggi sebesar Rp450.467.874.311,26 atau 554,65% dari realisasi Tahun 2020 sebesar Rp81.216.115.134,47.

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	**531.683.989.446,00**	**531.683.989.445,73**	**100,00**	**81.216.115.134,47**
Penghematan Belanja	**0,00**	**531.683.989.445,73**	**0,00**	**0,00**
Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	**0,00**	**531.683.989.445,73**	**0,00**	**0,00**
Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	0,00	531.683.989.445,73	0,00	0,00
Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	**531.683.989.446,00**	**0,00**	**0,00**	**81.216.115.134,47**
Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	**531.683.989.446,00**	**0,00**	**0,00**	**81.216.115.134,47**
Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	531.683.989.446,00	0,00	0,00	81.216.115.134,47
Jumlah	**531.683.989.446,00**	**531.683.989.445,73**	**100,00**	**81.216.115.134,47**

Penerimaan Pembiayaan – Penggunaan SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya sebesar Rp531.683.989.445,73 berdasarkan LHP BPK Nomor: 137.A/ LHP/ XVIII.PEK/04/2021 tanggal 27 April 2021.

5.1.26 Penerimaan Pembiayaan – Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

Realisasi Penerimaan Pembiayaan – Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah Tahun 2021 sebesar Rp985.766.821,00 dari anggaran sebesar Rp0,00. Realisasi Penerimaan Pembiayaan – Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah Tahun 2021 lebih tinggi sebesar Rp636.266.821,00 atau sebesar 182,05% dibandingkan Tahun 2020 sebesar Rp349.500.000,00

Rincian Realisasi Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah Tahun 2021 sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	**0,00**	**985.766.821,00**	**0,00**	**349.500.000,00**
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi	**0,00**	**18.900.000,00**	**0,00**	**349.500.000,00**
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi	**0,00**	**3.900.000,00**	**0,00**	**0,00**
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi	0,00	3.900.000,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Koperasi	**0,00**	**15.000.000,00**	**0,00**	**349.500.000,00**
Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Koperasi	0,00	15.000.000,00	0,00	349.500.000,00
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	**0,00**	**966.866.821,00**	**0,00**	**0,00**
Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat	**0,00**	**966.866.821,00**	**0,00**	**0,00**
Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat	0,00	966.866.821,00	0,00	0,00
Jumlah	**0,00**	**985.766.821,00**	**0,00**	**349.500.000,00**

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah Tahun 2021:

Uraian	SKPD	Nilai
Pengembalian Dana Bergulir dari DP3A	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	15.000.000,00
24 Koperasi Simpan Pinjam	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3.900.000,00
EKRA	-	966.866.821,00
	Jumlah	**985.766.821,00**

Berikut Rincian dari Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah Tahun 2021 yang berasal dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana:

No	Uraian	Tanggal STS	Nominal (Rp)	Koperasi	Bukti
1	Pengembalian Dana Pinjaman Kelompok UP2K Simpang Baru	25 Agustus 2021	10.000.000,00	UP2K Simpang Baru	Rekening Koran
2	Pengembalian Dana Bergulir UP2K	06 September 2021	5.000.000,00	UP2K	Rekening Koran
	Jumlah		**15.000.000,00**		

Rincian dari Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah Tahun 2021 yang berasal dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah:

No	Uraian	Tanggal STS	Nominal (Rp)	Koperasi	Bukti
1	Angsuran Pinjaman Koperasi Tunas Karya Selatpsnjsnh / Imam Basori	27 Januari 2021	600.000,00	Koperasi Tunas Karya	Rekening Koran
2	Angsuran Pinjaman Koperasi Tunas Karya	29 Maret 2021	600.000,00	Koperasi Tunas Karya	Rekening Koran
3	Angsuran Pinjaman Modal Koperasi Tunas Karya an.Imam Basori Bulan April s.d Juni 2021	08 Juni 2021	900.000,00	Koperasi Tunas Karya	Rekening Koran
4	Angsuran Pinjaman Koperasi Tunas Karya Meranti	07 September 2021	600.000,00	Koperasi Tunas Karya	Rekening Koran
5	Angsuran Pinjaman Koperasi Tunas Karya an. Imam Basori Bulan September s.d Desember 2021 (4 Bulan)	29 November 2021	1.200.000,00	Koperasi Tunas Karya	Rekening Koran
	Jumlah		**3.900.000,00**		

Tambahan rincian dari Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah Tahun 2021 yang berasal dari EKRA:

No	Uraian	Tanggal STS	Nominal (Rp)	Bukti
1	Pelimpahan Saldo Pengembalian Pinjaman Modal Ekonomi Kerakyatan (EKRA) sampai dengan Periode 31 November 2021	23 Desember 2021	937.739.411,00	Rekening Koran
2	Pelimpahan Saldo Pengembalian Pinjaman Modal Ekonomi Kerakyatan (EKRA) sampai dengan Periode 31 November 2021	23 Desember 2021	29.127.410,00	Rekening Koran
	Jumlah		**966.866.821,00**	

SiLPA Tahun Anggaran Berkenaan Tahun 2021 sebesar Rp983.969.999.373,62 terdiri dari:

No	Rincian	Jumlah (Rp)
1	Kas di KASDA	845.931.634.123,86
2	Kas di Bendahara Penerimaan	21.908.350,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	4.380.017.105,72
4	Kas Penerimaan BLUD	9.195.645.545,46
5	Kas Pengeluaran BLUD	117.717.716.945,58
6	Kas di Bendahara BOS	6.779.532.116,00
7	Kas Lainnya	182.859.171,00
	Saldo Kas	**984.209.313.357,62**
8	Utang PFK	242.215.636,00
	Total	**983.967.097.721,62**

5.2 PENJELASAN POS – POS LAPORAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Anggaran Lebih (SAL) merupakan jumlah akumulasi SiLPA sampai dengan tanggal pelaporan dan dihasilkan dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Penyajian Laporan Saldo Anggaran Lebih mencakup Saldo Anggaran Lebih tahun sebelumnya, penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) tahun berjalan, dan penyesuaian lain yang diperkenankan. Laporan Perubahan SAL sampai dengan 31 Desember 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut.

5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran Lebih Awal merupakan akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya, yaitu sebesar Rp531.683.989.445,73 (**Catatan 5.1.25**) dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Jumlah
Kas di BUD	453.718.643.193,59
Sisa UP di Bendahara Pengeluaran	6.714.553.639,00
Kas di Bendahara Penerimaan	45.853.700,00
Kas di BLUD	63.085.040.912,14
Kas di BOS	8.119.898.001,00
Jumlah	**531.683.989.445,73**

5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL merupakan SiLPA Tahun 2020 yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun 2021 sebesar Rp531.683.989.445,73 (**Catatan 5.1.26**).

5.2.3 Sisa Lebih Pembiayaan (SiLPA) Akhir Tahun Berjalan

Sisa Lebih Pembiayaan (SiLPA) sebesar Rp983.967.097.721,62 dapat diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Jumlah
Pendapatan Asli Daerah	4.050.468.561.143,44
Pendapatan Transfer	5.324.745.236.758,00
Lain-lain Pendapatan Yang Sah	7.787.710.004,00

Uraian	Jumlah
Jumlah Pendapatan	**9.383.001.507.905,44**
Belanja Operasi	6.062.992.053.173,52
Belanja Modal	1.018.455.078.253,37
Belanja Transfer	1.850.011.226.337,66
Belanja Tidak terduga	245.808.686,00
Jumlah Belanja	**8.931.704.166.450,55**
Penerimaan Pembiayaan Daerah	532.669.756.266,73
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0,00
Jumlah Pembiayaan	**532.669.756.266,73**
SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	**983.967.097.721,62**

Uraian	Jumlah
Kas di BUD (tidak termasuk utang PFK)	845.931.634.123,86
Sisa UP di Bendahara Pengeluaran	4.380.017.105,72
Kas di Bendahara Penerimaan	21.908.350,00
Kas Pengeluaran BLUD	117.717.716.945,58
Kas Penerimaan BLUD	9.195.645.545,46
Kas Di BOS	6.779.532.116,00
Kas Lainnya	182.859.171,00
(Utang PFK)	(242.215.636,00)
SiLPA	**983.967.097.721,62**

5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya sebesar nihil.

5.3 PENJELASAN POS - POS LAPORAN OPERASIONAL

5.3.1 Pendapatan Asli Daerah-Pajak Daerah-LO

Pajak Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Riau. Pemungutan penerimaan dan pengelolaan Pajak Daerah dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.

Realisasi Pajak Daerah per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp3.340.417.607.319,85 dan Rp2.770.504.093.318,00. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar Rp569.913.514.001,85 atau 20,57% dibandingkan realisasi Tahun 2020. Peningkatan terbesar bersumber dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO sebesar Rp328.165.602.304,00 atau 58,72%.**(Catatan 5.1.1).**

Rincian Realisasi Pendapatan Pajak Daerah periode 1 Januari s.d 31 Desember 2021 dan 2020 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	31-Des-21 (Rp)	31-Des-20 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	Tren (%)
Pendapatan Pajak Daerah - LO	**3.340.417.607.319,85**	**2.770.504.093.318,00**	**569.913.514.001,85**	**20,57**
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - LO	1.237.003.819.662,00	1.096.948.649.199,00	140.055.170.463,00	12,77
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) - LO	887.073.872.195,00	558.908.269.891,00	328.165.602.304,00	58,72
Pajak Bahan Bakar Kendaraa n Bermotor - LO	764.782.831.375,85	645.163.654.363,00	119.619.177.012,85	18,54
Pajak Air Permukaan - LO	44.805.652.197,00	34.695.707.476,00	10.109.944.721,00	29,14
Pajak Rokok - LO	406.751.431.890,00	434.787.812.389,00	(28.036.380.499,00)	(6,45)
Jumlah	**3.340.417.607.319,85**	**2.770.504.093.318,00**	**569.913.514.001,85**	**20,57**

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah periode 1 Januari s.d 31 Desember 2021 dan 2020 diuraikan lebih rinci sebagai berikut:

Uraian	31-Des-21 (Rp)	31-Des-20 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	Tren (%)
Pajak Daerah-LO	**3.340.417.607.319,85**	**2.770.504.093.318,00**	**569.913.514.001,85**	**20,57**
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO	**1.237.003.819.662,00**	**1.096.948.649.199,00**	**140.055.170.463,00**	**12,77**
PKB-Mobil Penumpang-Sedan-LO	**27.870.713.797,00**	0,00	**27.870.713.797,00**	0,00
PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi-LO	27.431.404.797,00	0,00	27.431.404.797,00	0,00
PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Umum-LO	235.432.000,00	0,00	235.432.000,00	0,00

Uraian	31-Des-21 (Rp)	31-Des-20 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	Tren (%)
PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Daerah-LO	203.877.000,00	0,00	203.877.000,00	0,00
PKB-Mobil Penumpang-Jeep-LO	**145.589.483.623,00**	0,00	**145.589.483.623,00**	0,00
PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pribadi-LO	144.221.132.123,00	0,00	144.221.132.123,00	0,00
PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Umum-LO	5.544.500,00	0,00	5.544.500,00	0,00
PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Daerah-LO	1.362.807.000,00	0,00	1.362.807.000,00	0,00
PKB-Mobil Penumpang-Minibus-LO	**539.146.339.061,00**	0,00	**539.146.339.061,00**	0,00
PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi-LO	533.232.735.936,00	0,00	533.232.735.936,00	0,00
PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Umum-LO	309.769.500,00	0,00	309.769.500,00	0,00
PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Daerah-LO	5.603.833.625,00	0,00	5.603.833.625,00	0,00
PKB-Mobil Bus-Microbus-LO	**4.182.575.500,00**	0,00	**4.182.575.500,00**	0,00
PKB-Mobil Bus-Microbus-Pribadi-LO	3.016.858.500,00	0,00	3.016.858.500,00	0,00
PKB-Mobil Bus-Microbus-Umum-LO	769.236.500,00	0,00	769.236.500,00	0,00
PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Daerah– LO	396.480.500,00	0,00	396.480.500,00	0,00
PKB-Mobil Bus-Bus-LO	**727.186.500,00**	0,00	**727.186.500,00**	0,00
PKB-Mobil Bus-Bus-Pribadi-LO	287.650.500,00	0,00	287.650.500,00	0,00
PKB–Mobil Bus-Bus-Umum-LO	419.825.000,00	0,00	419.825.000,00	0,00
PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Daerah-LO	19.711.000,00	0,00	19.711.000,00	0,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-LO	**138.244.390.491,00**	0,00	**138.244.390.491,00**	0,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pribadi-LO	135.871.581.491,00	0,00	135.871.581.491,00	0,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Umum-LO	24.976.000,00	0,00	24.976.000,00	0,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pemerintah Daerah-LO	2.347.833.000,00	0,00	2.347.833.000,00	0,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-LO	**19.996.314.556,00**	0,00	**19.996.314.556,00**	0,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pribadi– LO	15.295.250.500,00	0,00	15.295.250.500,00	0,00

Uraian	31-Des-21 (Rp)	31-Des-20 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	Tren (%)
PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Umum– LO	4.612.256.556,00	0,00	4.612.256.556,00	0,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pemerintah Daerah-LO	88.807.500,00	0,00	88.807.500,00	0,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-LO	**149.565.888.257,00**	0,00	**149.565.888.257,00**	0,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pribadi-LO	82.983.833.482,00	0,00	82.983.833.482,00	0,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Umum-LO	65.808.843.775,00	0,00	65.808.843.775,00	0,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pemerintah Daerah-LO	773.211.000,00	0,00	773.211.000,00	0,00
PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua–LO	**211.475.708.077,00**	**195.639.524.099,00**	**15.836.183.978,00**	**8,09**
PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua- Pribadi-LO	210.488.267.577,00	0,00	210.488.267.577,00	0,00
PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Daerah-LO	987.440.500,00	0,00	987.440.500,00	0,00
Kendaraan Bermotor Roda 2 - LO	0,00	195.639.524.099,00	(195.639.524.099,00)	**(100,00)**
PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga–LO	**195.342.000,00**	**165.978.000,00**	**29.364.000,00**	**17,69**
PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga- Pribadi–LO	178.189.000,00	0,00	178.189.000,00	0,00
PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Daerah-LO	17.153.000,00	0,00	17.153.000,00	0,00
Kendaraan Bermotor Roda 3 - LO	0,00	165.978.000,00	(165.978.000,00)	(100,00)
PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air–LO	**9.877.800,00**	**9.877.800,00**	0,00	0,00
PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Pribadi-LO	5.831.250,00	0,00	5.831.250,00	0,00
PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Umum-LO	4.046.550,00	0,00	4.046.550,00	0,00
Pajak Kendaraan Di Air…… - LO	0,00	9.877.800,00	(9.877.800,00)	(100,00)
PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar– LO	0,00	**3.336.060.593,00**	**(3.336.060.593,00)**	**(100,00)**
Alat-alat Berat/Besar - LO	0,00	3.336.060.593,00	(3.336.060.593,00)	(100,00)

Uraian	31-Des-21 (Rp)	31-Des-20 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	Tren (%)
PKB-Sedan, Jeep,Minibus, Bus, Micro Bus, Truck, Light Truck, Pick up - LO	0,00	**897.797.208.707,00**	**(897.797.208.707,00)**	**(100,00)**
A-1 Sedan, Jeep, Minibus (Pribadi) - LO	0,00	619.212.585.525,00	(619.212.585.525,00)	(100,00)
A-2 Sedan, Jeep, Minibus (Umum) - LO	0,00	211.310.000,00	(211.310.000,00)	(100,00)
B-1 Bus, Micro Bus (Pribadi) - LO	0,00	3.513.882.555,00	(3.513.882.555,00)	(100,00)
B-2 Bus, Micro Bus (Umum) - LO	0,00	857.034.000,00	(857.034.000,00)	(100,00)
C-1 Truck, Light Truck, Pick Up (Pribadi) - LO	0,00	215.567.856.682,00	(215.567.856.682,00)	(100,00)
C-2 Truck, Light Truck, Pick up (Umum) - LO	0,00	58.434.539.945,00	(58.434.539.945,00)	(100,00)
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)–LO	**887.073.872.195,00**	**558.908.269.891,00**	**328.165.602.304,00**	**58,72**
BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan - LO	**2.586.212.500,00**	0,00	**2.586.212.500,00**	0,00
BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan-LO	2.586.212.500,00	0,00	2.586.212.500,00	0,00
BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep-LO	**98.277.582.280,00**	0,00	**98.277.582.280,00**	0,00
BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep-LO	98.277.582.280,00	0,00	98.277.582.280,00	0,00
BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus-LO	**330.460.567.525,00**	0,00	**330.460.567.525,00**	0,00
BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus-LO	330.460.567.525,00	0,00	330.460.567.525,00	0,00
BBNKB-Mobil Bus-Microbus-LO	**1.582.014.000,00**	0,00	**1.582.014.000,00**	0,00
BBNKB-Mobil Bus-Microbus-LO	1.582.014.000,00	0,00	1.582.014.000,00	0,00
BBNKB-Mobil Bus-Bus–LO	**115.338.600,00**	0,00	**115.338.600,00**	0,00
BBNKB-Mobil Bus-Bus-LO	115.338.600,00	0,00	115.338.600,00	0,00
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-LO	**92.822.868.300,00**	0,00	**92.822.868.300,00**	0,00
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-LO	92.822.868.300,00	0,00	92.822.868.300,00	0,00
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-LO	**2.509.370.000,00**	0,00	**2.509.370.000,00**	0,00
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-LO	2.509.370.000,00	0,00	2.509.370.000,00	0,00
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck-LO	**91.229.639.512,00**	0,00	**91.229.639.512,00**	0,00
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck-LO	91.229.639.512,00	0,00	91.229.639.512,00	0,00

Uraian	31-Des-21 (Rp)	31-Des-20 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	Tren (%)
BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-LO	**267.017.794.078,00**	**175.341.594.192,00**	**91.676.199.886,00**	**52,28**
BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-LO	267.017.794.078,00	175.341.594.192,00	91.676.199.886,00	52,28
BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-LO	**472.485.400,00**	**402.824.500,00**	**69.660.900,00**	**17,29**
BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-LO	472.485.400,00	402.824.500,00	69.660.900,00	17,29
BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat-LO	**0,00**	**176.353.357,00**	**(176.353.357,00)**	**(100,00)**
BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat-LO	0,00	176.353.357,00	(176.353.357,00)	(100,00)
BBNKB-Sedan, Jeep,Minibus, Bus, Micro Bus, Truck, Light Truck, Pick up	**0,00**	**382.987.497.842,00**	**(382.987.497.842,00)**	**(100,00)**
A-1 Sedan, Jeep, Minibus (Pribadi) - LO	0,00	267.204.030.312,00	(267.204.030.312,00)	(100,00)
A-2 Sedan, Jeep, Minibus (Umum) - LO	0,00	56.474.500,00	(56.474.500,00)	(100,00)
B-1 Bus, Micro Bus (Pribadi) - LO	0,00	1.513.899.450,00	(1.513.899.450,00)	(100,00)
B-2 Bus, Micro Bus (Umum) - LO	0,00	666.780.500,00	(666.780.500,00)	(100,00)
C-1 Truck, Light Truck, Pick Up (Pribadi) - LO	0,00	73.372.968.100,00	(73.372.968.100,00)	(100,00)
C-2 Truck, Light Truck, Pick up (Umum) - LO	0,00	40.173.344.980,00	(40.173.344.980,00)	(100,00)
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)-LO	**764.782.831.375,85**	**645.163.654.363,00**	**119.619.177.012,85**	**18,54**
PBBKB Bahan Bakar Bensin-LO	**68.260.981.519,00**	**193.154.154.326,00**	**(124.893.172.807,00)**	**(64,66)**
PBBKB Bahan Bakar Bensin-LO	68.260.981.519,00	193.154.154.326,00	(124.893.172.807,00)	(64,66)
PBBKB Bahan Bakar Solar–LO	**101.326.352.234,85**	**53.292.716.537,00**	**48.033.635.697,85**	**90,13**
PBBKB Bahan Bakar Solar-LO	101.326.352.234,85	53.292.716.537,00	48.033.635.697,85	90,13
PBBKB Bahan Bakar Lainnya-LO	**595.195.497.622,00**	**398.716.783.500,00**	**196.478.714.122,00**	**49,28**
PBBKB Bahan Bakar Lainnya-LO	595.195.497.622,00	398.716.783.500,00	196.478.714.122,00	49,28
Pajak Air Permukaan-LO	**44.805.652.197,00**	**34.695.707.476,00**	**10.109.944.721,00**	**29,14**
Pajak Air Permukaan-LO	44.805.652.197,00	34.695.707.476,00	10.109.944.721,00	29,14
Pajak Rokok-LO	**406.751.431.890,00**	**434.787.812.389,00**	**(28.036.380.499,00)**	**(6,45)**
Pajak Rokok-LO	406.751.431.890,00	434.787.812.389,00	(28.036.380.499,00)	(6,45)
Jumlah	**3.340.417.607.319,85**	**2.770.504.093.318,00**	**569.913.514.001,85**	**20,57**

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa objek pendapatan pada 31 Desember 2020 merupakan rekening yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang diperbandingkan dengan objek pendapatan sesuai dengan rekening APBD tahun 2021 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021.

Objek Pajak Daerah yang realisasinya kurang optimal dari target pada Tahun 2021 yaitu Pajak Rokok. Menurut Pengelola Pajak Daerah hal ini masih terkait Kondisi Ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya kondusif akibat Covid 19 sehingga sebagian masyarakat masih mengalokasikan pembiayaan untuk kebutuhan hidup (primer).

Kontribusi Pajak Daerah - LO Tahun 2021 sebesar Rp3.340.417.607.319,85 atau 34,37% terhadap seluruh pendapatan Tahun 2021.

5.3.2 Pendapatan Asli Daerah-Retribusi Daerah-LO

Retribusi Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah dan terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Riau. Pemungutan dan pengelolaan pendapatan retribusi daerah dilakukan oleh masing-masing OPD sebagai unit penghasil.

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LO per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp13.872.272.245,84 dan Rp12.454.793.829,22. Terjadi peningkatan sebesar Rp1.417.478.416,62 atau 11,38% sebagai berikut:

Uraian	31-Des-21 (Rp)	31-Des-20 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	Tren (%)
Pendapatan Retribusi Daerah	13.872.272.245,84	12.454.793.829,22	1.417.478.416,62	11,38
Jumlah	**13.872.272.245,84**	**12.454.793.829,22**	**1.417.478.416,62**	**11,38**

Rincian Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah 1 Januari s.d 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut:

Uraian	31-Des-21 (Rp)	31-Des-20 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	Tren (%)
Retribusi Daerah-LO	**13.872.272.245,84**	**12.454.793.829,22**	**1.417.478.416,62**	**11,38**
Retribusi Jasa Umum-LO	**2.312.141.000,00**	**1.870.294.150,00**	**441.846.850,00**	**23,62**
Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	**2.294.591.000,00**	**1.841.654.150,00**	**452.936.850,00**	**24,59**
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat	2.294.591.000,00	1.841.654.150,00	452.936.850,00	24,59

Uraian	31-Des-21 (Rp)	31-Des-20 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	Tren (%)
Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis-LO				
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta-LO	**1.000.000,00**	0,00	**1.000.000,00**	0,00
Retribusi Penyediaan Peta Tematik-LO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
Retribusi Pelayanan Pendidikan-LO	**16.550.000,00**	**28.640.000,00**	**(12.090.000,00)**	**(42,21)**
Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis-LO	16.550.000,00	28.640.000,00	(12.090.000,00)	(42,21)
Retribusi Jasa Usaha-LO	**11.109.646.945,84**	**10.077.189.679,22**	**1.032.457.266,62**	**10,25**
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	**5.428.584.468,84**	**5.793.750.629,22**	**(365.166.160,38)**	**(6,30)**
Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-LO	286.380.318,56	25.036.940,94	261.343.377,62	1.043,83
Retribusi Penyewaan Tanah-LO	7.395.893,79	0,00	7.395.893,79	0,00
Retribusi Penyewaan Bangunan-LO	275.953.000,00	0,00	275.953.000,00	0,00
Retribusi Pemakaian Laboratorium-LO	3.152.956.420,00	0,00	3.152.956.420,00	0,00
Retribusi Pemakaian Ruangan-LO	1.213.233.836,49	0,00	1.213.233.836,49	0,00
Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor-LO	492.665.000,00	0,00	492.665.000,00	0,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	0,00	5.768.713.688,28	(5.768.713.688,28)	(100,00)
Retribusi Tempat Khusus Parkir-LO	**3.110.000,00**	**0,00**	**3.110.000,00**	**0,00**
Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir-LO	3.110.000,00	0,00	3.110.000,00	0,00
Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila-LO	**76.175.000,00**	**65.500.000,00**	**10.675.000,00**	**16,30**
Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila-LO	76.175.000,00	65.500.000,00	10.675.000,00	16,30
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO	**1.340.000,00**	0,00	**1.340.000,00**	0,00
Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO	1.340.000,00	0,00	1.340.000,00	0,00
Retribusi Penyeberangan di Air-LO	**2.681.418.000,00**	**2.261.851.000,00**	**419.567.000,00**	**18,55**
Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang-LO	2.681.418.000,00	2.261.851.000,00	419.567.000,00	18,55
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO	**2.919.019.477,00**	**1.956.088.050,00**	**962.931.427,00**	**49,23**
Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman-LO	285.042.600,00	1.845.063.500,00	(1.560.020.900,00)	(84,55)
Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah berupa Bibit Ternak-LO	575.292.000,00	0,00	575.292.000,00	0,00
Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan-LO	860.358.200,00	111.024.550,00	749.333.650,00	674,93

Uraian	31-Des-21 (Rp)	31-Des-20 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	Tren (%)
Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak dan Ikan-LO	1.198.326.677,00	0,00	1.198.326.677,00	0,00
Retribusi Perizinan Tertentu-LO	**450.484.300,00**	**507.310.000,00**	**(56.825.700,00)**	**(11,20)**
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-LO	**112.400.000,00**	**153.830.000,00**	**(41.430.000,00)**	**(26,93)**
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan	112.400.000,00	153.830.000,00	(41.430.000,00)	(26,93)
Retribusi Izin Usaha Perikanan-LO	**106.343.300,00**	**0,00**	**106.343.300,00**	**0,00**
Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Penangkapan Ikan-LO	106.343.300,00	0,00	106.343.300,00	0,00
Retribusi Izin Kerja - LO	0,00	**353.480.000,00**	**(353.480.000,00)**	**(100,00)**
Retribusi Izin Kerja - LO	0,00	353.480.000,00	(353.480.000,00)	(100,00)
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)-LO	**231.741.000,00**	**0,00**	**231.741.000,00**	**0,00**
Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing-LO	231.741.000,00	0,00	231.741.000,00	0,00
Jumlah	**13.872.272.245,84**	**12.454.793.829,22**	**1.417.478.416,62**	**11,38**

Rincian OPD yang mengelola Pendapatan Retribusi per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Nama OPD	Pendapatan Retribusi Daerah			
	31-Des-21 (Rp)	31-Des-20 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	Tren (%)
Dinas Pendidikan	21.200.000,00	40.500.000,00	(19.300.000,00)	(47,65)
Dinas Kesehatan	1.810.764.000,00	1.922.294.150,00	(111.530.150,00)	(5,80)
Dinas Pekerjaan Umum , Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	2.897.705.903,94	2.820.795.859,78	76.910.044,16	2,73
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00
Dinas Sosial	3.600.000,00	9.600.000,00	(6.000.000,00)	(62,50)
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	252.741.000,00	418.280.000,00	(165.539.000,00)	(39,58)
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	124.400.000,00	(124.400.000,00)	(100,00)
Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura	363.443.020,00	544.441.580,00	(180.998.560,00)	(33,24)
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	43.521.000,00	37.526.000,00	5.995.000,00	15,98
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00
Dinas Perhubungan	2.797.818.000,00	2.417.181.000,00	380.637.000,00	15,75

Nama OPD	Pendapatan Retribusi Daerah			
	31-Des-21 (Rp)	31-Des-20 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	Tren (%)
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	150.900.000,00	152.169.000,00	(1.269.000,00)	(0,83)
Dinas Kebudayaan	3.440.000,00	11.167.500,00	(7.727.500,00)	(69,20)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.500.000,00	9.160.000,00	(3.660.000,00)	(39,96)
Dinas Kelautan dan Perikanan	1.852.694.500,00	1.309.011.050,00	543.683.450,00	41,53
Dinas Pariwisata	16.600.000,00	38.700.800,00	(22.100.800,00)	(57,11)
Dinas Perkebunan	973.026.677,00	457.712.770,00	515.313.907,00	112,58
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1.118.903.000,00	741.556.500,00	377.346.500,00	50,89
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	22.530.000,00	194.380.000,00	(171.850.000,00)	(88,41)
Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	662.465.400,00	475.832.400,00	186.633.000,00	39,22
Sekretariat Daerah	308.234.318,56	130.098.522,16	178.135.796,40	136,92
Sekretariat DPRD	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Penelitian	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00
Badan Pendapatan Daerah	275.329.671,24	249.260.254,81	26.069.416,43	10,46
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	34.448.893,79	165.049.581,16	(130.600.687,37)	(79,13)
Badan Kepegawaian Daerah	85.770.000,00	20.240.000,00	65.530.000,00	323,76
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.850.000,00	12.600.000,00	(8.750.000,00)	(69,44)
Badan Penghubung	120.186.861,31	107.636.861,31	12.550.000,00	11,66
Inspektorat	4.800.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00
Jumlah	**13.872.272.245,84**	**12.454.793.829,22**	**1.417.478.416,62**	**11,38**

Rincian OPD yang mengelola Pendapatan Retribusi Tahun 2021 yang atau terjadi penurunan pendapatan retribusi Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Nama OPD	Pendapatan Retribusi Daerah				
	31-Des-21 (Rp)	31-Des-20 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	Tren (%)	KETERANGAN
Dinas Pendidikan	21.200.000,00	40.500.000,00	(19.300.000,00)	(47,65)	Kurang optimalnya pencapaian realisasi retribusi daerah pada Dinas Pendidikan Tahun 2021 disebabkan oleh terjadinya Pandemi Virus COVID-19 yang menyebabkan kantin telat setor untuk waktu sewa 3 bulan terakhir ditahun 2021

Nama OPD	Pendapatan Retribusi Daerah				
	31-Des-21 (Rp)	31-Des-20 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	Tren (%)	KETERANGAN
Dinas Kesehatan	1.810.764.000,00	1.922.294.150,00	(111.530.150,00)	(5,80)	Dengan adanya Pandemi Covid-19 menyebabkan terhentinya kegiatan magang dan penelitian dari pelajar dan mahasiswa ke UPT Labkesling, sehingga menyebabkan penurunan pendapatan di Retribusi Pelayanan Pendidikan
Dinas Sosial	3.600.000,00	9.600.000,00	(6.000.000,00)	(62,50)	Selama Pandemi Covid-19 sewa aula menurun.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	252.741.000,00	418.280.000,00	(165.539.000,00)	(39,58)	Kurang optimalnya pencapaian realisasi retribusi daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2021 disebabkan oleh PERDA PPTKA masih divalidasi Mendagri, maka sejak bulan Oktober 2021 Pendapatan PPTKA menjadi milik pusat. Sedangkan untuk Retribusi Penyewaan Bangunan disebabkan kurang setor 3 bulan dari penyewa kantin karena penyewa tidak melanjutkan lagi sewanya
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	124.400.000,00	(124.400.000,00)	(100,00)	Gedung dharmawanita telah diserahkan kepada sekretariat daerah sehingga retribusi tidak ada
Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura	363.443.020,00	544.441.580,00	(180.998.560,00)	(33,24)	Kurang optimalnya pencapaian realisasi retribusi daerah disebabkan

Nama OPD	Pendapatan Retribusi Daerah				
	31-Des-21 (Rp)	31-Des-20 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	Tren (%)	KETERANGAN
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	150.900.000,00	152.169.000,00	(1.269.000,00)	(0,83)	selama pandemi Covid-19 Agro wisata yang ada pada UPT Perbenihan ditutup Kurang optimalnya pencapaian realisasi retribusi daerah pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2021 disebabkan selama pandemi Covid-19 Venue-venue Olahraga tidak boleh disewakan, dan kondisi bangunan banyak mengalami kerusakan sehingga calon penyewa keberatan/tidak berminat untuk menyewa
Dinas Kebudayaan	3.440.000,00	11.167.500,00	(7.727.500,00)	(69,20)	Selama Pandemi Covid-19 Museum Sang Nila Utama ditutup, sedangkan karcis museum menjadi salah satu sumber potensi retribusi
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.500.000,00	9.160.000,00	(3.660.000,00)	(39,96)	Pandemi Virus COVID-19 mengakibatkan tidak terpenuhinya target retribusi pemakaian kekayaan daerah berupa sewa aula bedah buku dan sewa auditorium H.Ismail Suko dan auditorium H. Wan Ghalib karena tidak ada permintaan dari pihak luar untuk menggunakan aula dan auditorium

Nama OPD	Pendapatan Retribusi Daerah				
	31-Des-21 (Rp)	31-Des-20 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	Tren (%)	KETERANGAN
Dinas Pariwisata	16.600.000,00	38.700.800,00	(22.100.800,00)	(57,11)	Kurang optimalnya pencapaian realisasi retribusi daerah pada Dinas Pariwisata Tahun 2021 disebabkan oleh terjadinya Pandemi Virus COVID-19, dimana masyarakat dilarang untuk berkumpul dan sulit untuk mendapatkan izin membuat acara dari aparat yang berwenang, sehingga tidak banyak masyarakat yang menyewa gedung maupun lapangan MTQ
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	22.530.000,00	194.380.000,00	(171.850.000,00)	(88,41)	Kurang optimalnya pencapaian realisasi retribusi daerah pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2021 disebabkan oleh terjadinya Pandemi Virus COVID-19, dan belum adanya pelimpahan kewenangan dari pusat ke provinsi terkait pengelolaan minerba
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	34.448.893,79	165.049.581,16	(130.600.687,37)	(79,13)	Kurang optimalnya pencapaian realisasi retribusi daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021 disebabkan kurang setor 1 bulan dari penyewa kantin karena penyewa tidak melanjutkan lagi sewanya

Nama OPD	Pendapatan Retribusi Daerah				
	31-Des-21 (Rp)	31-Des-20 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	Tren (%)	KETERANGAN
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.850.000,00	12.600.000,00	(8.750.000,00)	(69,44)	Kurang optimalnya pencapaian realisasi retribusi daerah pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2021 disebabkan karena masih Pandemi Covid-19, dimana Pemerintah Provinsi Riau telah memerintahkan kepada Kepala BPSDM agar asrama untuk kediklatan dijadikan sebagai tempat karantina Covid-19, sehingga tidak lagi dipungut biaya retribusi untuk penyewaan bangunan. Sedangkan untuk sewa kantin masih ada pihak penyewa yang belum menyetor secara keseluruhan pada Tahun 2021 tersebut
Jumlah	**2.689.016.913,79**	**3.642.742.611,16**	**(953.725.697,37)**	**(26,18)**	

Terdapat perbedaan Pendapatan Retribusi-LO dengan Pendapatan Retribusi-LRA sebesar Rp81.756.648,84 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	SELISIH	KETERANGAN
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	**1.782.963.048,84**	**1.701.206.400,00**	**81.756.648,84**	
Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-LO	286.380.318,56	226.446.000,00	59.934.318,56	Merupakan pendapatan diterima dimuka atas sewa tanah untuk bangunan/ antena BTS taman kayu putih jalan Sambu
Retribusi Penyewaan Tanah-LO	7.395.893,79	2.400.000,00	4.995.893,79	Merupakan pendapatan diterima dimuka atas sewa lahan PT. Corona Tel

Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	SELISIH	KETERANGAN
Retribusi Penyewaan Bangunan-LO	275.953.000,00	273.353.000,00	2.600.000,00	Merupakan piutang retribusi sewa kantin
Retribusi Pemakaian Ruangan-LO	1.213.233.836,49	1.199.007.400,00	14.226.436,49	Merupakan pendapatan diterima dimuka atas sewa mesin ATM Bank Riau
Jumlah	**1.782.963.048,84**	**1.701.206.400,00**	**81.756.648,84**	

Rincian OPD yang terdapat perbedaan Pendapatan Retribusi-LO dengan Pendapatan Retribusi-LRA sebesar Rp81.756.648,84 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	SELISIH
Dinas Pendidikan	21.200.000,00	20.000.000,00	1.200.000,00
Dinas Kesehatan	1.810.764.000,00	1.810.764.000,00	0,00
Dinas Pekerjaan Umum , Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	2.897.705.903,94	2.932.904.000,00	(35.198.096,06)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
Dinas Sosial	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	252.741.000,00	252.741.000,00	0,00
Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura	363.443.020,00	363.443.020,00	0,00
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	43.521.000,00	43.521.000,00	0,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
Dinas Perhubungan	2.797.818.000,00	2.797.818.000,00	0,00
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	150.900.000,00	150.900.000,00	0,00
Dinas Kebudayaan	3.440.000,00	3.440.000,00	0,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	1.852.694.500,00	1.852.694.500,00	0,00
Dinas Pariwisata	16.600.000,00	16.600.000,00	0,00
Dinas Perkebunan	973.026.677,00	973.026.677,00	0,00
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1.118.903.000,00	1.118.903.000,00	0,00
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	22.530.000,00	22.530.000,00	0,00
Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	662.465.400,00	662.465.400,00	0,00
Sekretariat Daerah	308.234.318,56	248.300.000,00	59.934.318,56
Sekretariat DPRD	32.000.000,00	32.000.000,00	0,0
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Penelitian	4.800.000,00	4.800.000,00	0,0
Badan Pendapatan Daerah	275.329.671,24	256.042.000,00	19.287.671,24
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	34.448.893,79	29.453.000,00	4.995.893,79
Badan Kepegawaian Daerah	85.770.000,00	85.770.000,00	0,00
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.850.000,00	2.450.000,00	1.400.000,00

Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	SELISIH
Badan Penghubung	120.186.861,31	90.050.000,00	30.136.861,31
Inspektorat	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00
Jumlah	**13.872.272.245,84**	**13.790.515.597,00**	**81.756.648,84**

Kontribusi Retribusi Daerah-LO per 31 Desember 2021 sebesar Rp13.872.272.245,84 atau 0,14% terhadap seluruh pendapatan Tahun 2021.

5.3.3 Pendapatan Asli Daerah-Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

Pendapatan dari pengelolaan aset daerah yang dipisahkan merupakan PAD dari pembagian laba atas penyertaan modal Pemerintah Provinsi Riau pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah-Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp166.284.668.033,92 dan Rp208.764.953.636,40 terjadi penurunan sebesar Rp42.480.285.602,48 atau 20,35%.

Pendapatan ini diterima dan dikelola melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan realisasi 1 Januari s.d 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut:

Uraian	31-Des-21 (Rp)	31-Des-20 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	Tren (%)
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	166.284.668.033,92	208.764.953.636,40	(42.480.285.602,48)	(20,35)
Jumlah	**166.284.668.033,92**	**208.764.953.636,40**	**(42.480.285.602,48)**	**(20,35)**

Rincian OPD yang mengelola Pendapatan Asli Daerah-Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

OPD	31-Des-21 (Rp)	31-Des-20 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	Tren (%)
PPKD	0,00	193.608.660.453,00	(193.608.660.453,00)	(100,00)
BPKAD	166.284.668.033,92	15.156.293.183,00	151.128.374.850,92	997,13
Jumlah	**166.284.668.033,92**	**208.764.953.636,00**	**(42.480.285.602,08)**	**(20,35)**

Terdapat perbedaan Pendapatan Asli Daerah-Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah -LO dengan Pendapatan Asli Daerah-Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah-LRA sebesar Rp48.867.237.964,92 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	SELISIH	KETERANGAN
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	**166.284.668.033,92**	**117.417.430.069,00**	**48.867.237.964,92**	
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)-LO	148.013.161.457,97	106.036.309.281,00	41.976.852.176,97	Merupakan dividen penyertaan modal PPKD kepemilikan 20% atau lebih menggunakan metode ekuitas (Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah) Bank Riau, PT. PER dan PT. Jamkrida
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	18.271.506.575,95	11.381.120.788,00	6.890.385.787,95	Merupakan dividen penyertaan modal PPKD kepemilikan 20% atau lebih menggunakan metode ekuitas (Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah) nilai investasi PT. SPR dan PT. PIR
Jumlah	**166.284.668.033,92**	**117.417.430.069,00**	**48.867.237.964,92**	

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah-Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO sebesar Rp166.284.668.033,92 atau 1,71% terhadap seluruh pendapatan Tahun 2021.

5.3.4 Pendapatan Asli Daerah-Lain-lain PAD Yang Sah-LO

Realisasi Pendapatan Asli Daerah-Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp572.420.901.194,09 dan Rp357.836.249.094,98 terjadi peningkatan sebesar Rp214.584.652.099,11 atau 59,97%.

Pendapatan Asli Daerah Lainnya merupakan realisasi penerimaan Lain-lain PAD untuk periode 1 Januari s.d 31 Desember 2021 dan 2020 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	31-Des-21 (Rp)	31-Des-20 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	Tren (%)
Lain-lain PAD Yang Sah	572.420.901.194,09	357.836.249.094,98	214.584.652.099,11	59,97
Jumlah	**572.420.901.194,09**	**357.836.249.094,98**	**214.584.652.099,11**	**59,97**

Rincian Realisasi Pendapatan Asli Daerah-Lain-Lain PAD Daerah 1 Januari s.d 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut:

Uraian	31-Des-21 (Rp)	31-Des-20 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	Tren (%)
Lain-lain PAD yang Sah-LO	**572.420.901.194,09**	**357.836.249.094,98**	**214.584.652.099,11**	**59,97**
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	0,00	**40.188.000,00**	**(40.188.000,00)**	**(100,00)**
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-LO	0,00	**40.188.000,00**	**(40.188.000,00)**	**(100,00)**
Hasil Penjualan Perala tan dan Mesin - LO	0,00	40.188.000,00	(40.188.000,00)	(100,00)
Hasil Kerja Sama Daerah-LO	**10.132.000,00**	0,00	**10.132.000,00**	**0,00**
Hasil Kerja Sama Daerah-LO	**10.132.000,00**	0,00	**10.132.000,00**	**0,00**
Hasil Kerja Sama Daerah-LO	10.132.000,00	0,00	10.132.000,00	0,00
Jasa Giro-LO	**9.619.467.828,00**	**7.790.782.252,80**	**1.828.685.575,20**	**23,47**
Jasa Giro pada Kas Daerah-LO	**8.468.442.839,00**	**7.188.802.608,80**	**1.279.640.230,20**	**17,80**
Jasa Giro pada Kas Daerah-LO	8.468.442.839,00	7.188.802.608,80	1.279.640.230,20	17,80
Jasa Giro pada Kas di Bendahara-LO	**894.478.561,00**	**601.979.644,00**	**292.498.917,00**	**48,59**
Jasa Giro pada Kas di Bendahara-LO	894.478.561,00	601.979.644,00	292.498.917,00	48,59
Jasa Giro pada Rekening Dana BOS-LO	**256.516.428,00**	0,00	**256.516.428,00**	**0,00**
Jasa Giro pada Rekening Dana BOS-LO	256.516.428,00	0,00	256.516.428,00	0,00
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO	**99.509.107,84**	**267.980.539,13**	**(168.471.431,29)**	**(62,87)**
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO	**99.509.107,84**	**267.980.539,13**	**(168.471.431,29)**	**(62,87)**
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO	99.509.107,84	267.980.539,13	(168.471.431,29)	(62,87)
Pendapatan Bunga-LO	**67.663.558.590,10**	**53.813.194.054,44**	**13.850.364.535,66**	**25,74**
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang	**67.663.558.590,10**	**53.813.194.054,44**	**13.850.364.535,66**	**25,74**

Uraian	31-Des-21 (Rp)	31-Des-20 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	Tren (%)
Pemerintah Daerah-LO				
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO	67.663.558.590,10	53.813.194.054,44	13.850.364.535,66	25,74
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	**64.566.040.982,37**	**5.367.561.799,23**	**59.198.479.183,14**	**1.102,89**
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk	**64.566.040.982,37**	**5.367.561.799,23**	**59.198.479.183,14**	**1.102,89**
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	64.566.040.982,37	5.367.561.799,23	59.198.479.183,14	1.102,89
Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing-LO	0,00	**3.349.100.000,00**	**(3.349.100.000,00)**	**(100,00)**
Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing-LO	0,00	**3.349.100.000,00**	**(3.349.100.000,00)**	**(100,00)**
Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing-LO	0,00	3.349.100.000,00	(3.349.100.000,00)	(100,00)
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	**1.316.823.457,38**	**2.244.947.719,40**	**(928.124.262,02)**	**(41,34)**
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	**1.316.823.457,38**	**2.244.947.719,40**	**(928.124.262,02)**	**(41,34)**
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	1.316.823.457,38	2.244.947.719,40	(928.124.262,02)	(41,34)
Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	**45.580.033.227,00**	**40.514.813.811,00**	**5.065.219.416,00**	**12,50**
Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO	**44.097.290.577,00**	**39.386.626.992,00**	**4.710.663.585,00**	**11,96**
Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang- Sedan-LO	760.592.281,00	0,00	760.592.281,00	0,00
Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Jeep-LO	4.375.830.872,00	0,00	4.375.830.872,00	0,00
Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Minibus-LO	16.335.298.605,00	0,00	16.335.298.605,00	0,00
Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Microbus- LO	178.230.948,00	0,00	178.230.948,00	0,00

Uraian	31-Des-21 (Rp)	31-Des-20 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	Tren (%)
Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Bus-LO	20.113.154,00	0,00	20.113.154,00	0,00
Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-LO	5.952.563.043,00	0,00	5.952.563.043,00	0,00
Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-LO	932.826.261,00	0,00	932.826.261,00	0,00
Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-LO	4.866.101.971,00	0,00	4.866.101.971,00	0,00
Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Pendapatan Denda	0,00	0,00	0,00	0,00
PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-LO	10.670.121.907,00	0,00	10.670.121.907,00	0,00
Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-LO	5.571.804,00	0,00	5.571.804,00	0,00
Pendapatan Denda PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-LO	39.731,00	0,00	39.731,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor - LO	0,00	39.386.626.992,00	(39.386.626.992,00)	(100,00)
Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO	**1.408.461.324,00**	**1.072.375.993,00**	**336.085.331,00**	**31,34**
Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan-LO	68.720.520,00	0,00	68.720.520,00	0,00
Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep-LO	277.052.715,00	0,00	277.052.715,00	0,00
Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang- Minibus-LO	**611.773.879,00**	0,00	**611.773.879,00**	**0,00**
Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Bus-Microbus-LO	3.289.300,00	0,00	3.289.300,00	0,00
Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Bus-Bus-LO	3.757.600,00	0,00	3.757.600,00	0,00
Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-LO	108.501.990,00	0,00	108.501.990,00	0,00
Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-LO	30.260.570,00	0,00	30.260.570,00	0,00
Pendapatan Denda BBNKB-Mobil	125.526.200,00	0,00	125.526.200,00	0,00

Uraian	31-Des-21 (Rp)	31-Des-20 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	Tren (%)
Barang/Beban-Truck-LO				
Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor- Sepeda Motor Roda Dua-LO	179.515.550,00	0,00	179.515.550,00	0,00
Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor- Sepeda Motor Roda Tiga-LO	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00
Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LO	0,00	1.072.375.993,00	(1.072.375.993,00)	(100,00)
Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan-LO	**74.281.326,00**	**55.810.826,00**	**18.470.500,00**	**33,09**
Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan-LO	74.281.326,00	55.810.826,00	18.470.500,00	33,09
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan-LO	**4.258.868.416,00**	**1.559.643.705,00**	**2.699.224.711,00**	**173,07**
Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa-LO	**4.258.868.416,00**	**1.559.643.705,00**	**2.699.224.711,00**	**173,07**
Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa-LO	4.258.868.416,00	1.559.643.705,00	2.699.224.711,00	173,07
Pendapatan dari Pengembalian-LO	**1.235.986,00**	**8.569.408.810,92**	**(8.568.172.824,92)**	**(99,99)**
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas-LO	**1.079.000,00**	**0,00**	**1.079.000,00**	**0,00**
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Biasa-LO	1.079.000,00	0,00	1.079.000,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)-LO	**156.986,00**	**0,00**	**156.986,00**	**0,00**
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran JKK-LO	156.986,00	0,00	156.986,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Uang Asuransi - LO , Pengembalian Hasil Temuan BPK/Inspektorat - LO	**0,00**	**8.569.408.810,92**	**(8.569.408.810,92)**	**(100,00)**
Pendapatan dari Pengembalian Uang Asuransi - LO	0,00	348.680.703,00	(348.680.703,00)	(100,00)
Pendapatan dari Pengembalian Hasil	0,00	8.220.728.107,92	(8.220.728.107,92)	(100,00)

Uraian	31-Des-21 (Rp)	31-Des-20 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	Tren (%)
Temuan BPK/Inspektorat - LO				
Pendapatan dari BLUD-LO	**379.305.261.599,40**	**234.318.628.403,06**	**144.986.633.196,34**	**61,88**
Pendapatan dari BLUD-LO	**379.305.261.599,40**	**0,00**	**379.305.261.599,40**	**0,00**
Pendapatan dari BLUD-LO	379.305.261.599,40	0,00	379.305.261.599,40	0,00
Pendapatan dari Jasa Layanan Umum BLUD - LO, Hibah BLUD - LO, Hasil Kerjasama BLUD - LO, pendapatan BLUD yang sah - LO	**0,00**	**234.318.628.403,06**	**(234.318.628.403,06)**	**(100,00)**
Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD - LO	0,00	226.689.827.922,00	(226.689.827.922,00)	(100,00)
Pendapatan Hibah BLUD - LO	0,00	2.402.942.464,00	(2.402.942.464,00)	(100,00)
Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD - LO	0,00	1.398.282.014,41	(1.398.282.014,41)	(100,00)
Lain-lain pendapatan BLUD yang sah - LO	0,00	3.716.818.111,65	(3.716.818.111,65)	(100,00)
Pendapatan Laien-Laien BLUD - LO	0,00	110.757.891,00	(110.757.891,00)	(100,00)
Jumlah	**572.420.901.194,09**	**357.836.249.094,98**	**214.584.652.099,11**	**59,97**

Rincian OPD yang mengelola Pendapatan Asli Daerah- Pendapatan Asli Daerah-Lain-lain PAD Yang Sah-LO Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

OPD	31-Des-21 (Rp)	31-Des-20 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)
Dinas Kesehatan	379.305.261.599,40	0,00	379.305.261.599,40
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	10.132.000,00	0,00	10.132.000,00
Badan Pendapatan Daerah	45.580.033.227,00	0,00	45.580.033.227,00
Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad	0,00	195.159.238.692,89	(195.159.238.692,89)
Rumah Sakit Jiwa Tampan	0,00	18.391.330.618,17	(18.391.330.618,17)
Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi	0,00	20.768.059.092,00	(20.768.059.092,00)
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	147.525.474.367,69	123.517.620.691,92	24.007.853.675,77
Jumlah	**572.420.901.194,09**	**357.836.249.094,98**	**214.584.652.099,11**

Terdapat perbedaan Lain-lain PAD yang Sah-LO dengan Lain - lain PAD yang Sah- LRA sebesar Rp19.339.377.588,50 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	SELISIH (Rp)	KETERANGAN
Hasil Penjualan Aset Lainnya	**0,00**	**23.997.100,00**	**(23.997.100,00)**	

Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	SELISIH (Rp)	KETERANGAN
Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain	0,00	23.997.100,00	(23.997.100,00)	Hasil penjualan aset lainnya, sehingga direklas ke surplus penjualan aset lainnya sebesar Rp23.997.100,00
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk	**64.566.040.982,37**	**64.590.278.982,37**	**(24.238.000,00)**	
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	64.566.040.982,37	64.590.278.982,37	(24.238.000,00)	Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain yang di reklas ke Dinas PUPRPKPP (STS tanah) sebesar Rp24.238.000,00.
Pendapatan dari BLUD-LO	**379.305.261.599,40**	**398.596.404.087,90**	**(19.291.142.488,50)**	
Pendapatan dari BLUD-LO	379.305.261.599,40	398.596.404.087,90	(19.291.142.488,50)	Adanya pelunasan piutang tahun 2020 dan penambahan piutang tahun 2021
Jumlah	**443.871.302.581,77**	**463.210.680.170,27**	**(19.339.377.588,50)**	-

Rincian OPD perbedaan menurut OPD Lain-lain PAD yang Sah-LO dengan Lain - lain PAD yang Sah- LRA sebesar Rp19.339.377.588,50 dapat dijelaskan sebagai berikut:

OPD	LO (Rp)	LRA (Rp)	SELISIH (Rp)
Dinas Kesehatan	379.305.261.599,40	398.596.404.087,90	(19.291.142.488,50)
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	10.132.000,00	10.132.000,00	-
Badan Pendapatan Daerah	45.580.033.227,00	45.580.033.227,00	-
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	147.525.474.367,69	147.573.709.467,69	(48.235.100,00)
Jumlah	**572.420.901.194,09**	**591.760.278.782,59**	**(19.339.377.588,50)**

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah-Lain PAD yang Sah sebesar Rp572.420.901.194,09 atau 5,89% terhadap seluruh pendapatan Tahun 2021.

5.3.5 Transfer Pemerintah Pusat-Dana Bagi Hasil Pajak-LO

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Bagi Hasil Pajak-LO per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp1.169.865.181.636,00 dan Rp642.401.857.815,00 terjadi peningkatan sebesar Rp527.463.323.821,00 atau

82,11% sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021 **(Catatan 5.1.5)**. Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO Pemerintah Provinsi Riau untuk periode 1 Januari s.d 31 Desember 2021 dan 2020 dengan rincian sebagai berikut:

OPD	31-Des-21 (Rp)	31-Des-20 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	Tren (%)
DBH PBB-LO	931.136.779.624,00	449.737.406.761,00	481.399.372.863,00	107,04
DBH PPh Pasal 21-LO	229.147.667.300,00	0,00	229.147.667.300,00	0,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN-LO	9.580.656.700,00	192.663.087.354,00	(183.082.430.654,00)	(95,03)
DBH CHT-LO	78.012,00	1.363.700,00	(1.285.688,00)	(94,28)
Jumlah	**1.169.865.181.636,00**	**642.401.857.815,00**	**527.463.323.821,00**	**82,11**

Terdapat perbedaan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Bagi Hasil Pajak-LO dengan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Bagi Hasil Pajak-LRA sebesar Rp224.682.744.610,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	SELISIH (Rp)	KETARANGAN
DBH PBB-LO	931.136.779.624,00	1.155.819.524.234,00	(224.682.744.610,00)	KB 2019 (Alokasi DBH Kurang Bayar Provinsi Riau Berdasarkan PMK No.36/2020) dilunasi menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 113/PMK.07/2020 tentang Penetapan Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2020 pada Anggaran 2021
DBH PPh Pasal 21-LO	229.147.667.300,00	229.147.667.300,00	0,00	
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN-LO	9.580.656.700,00	9.580.656.700,00	0,00	
DBH CHT-LO	78.012,00	78.012,00	0,00	
Jumlah	**1.169.865.181.636,00**	**1.394.547.926.246,00**	**(224.682.744.610,00)**	

Kontribusi Transfer Pemerintah Pusat-Bagi Hasil Pajak-LO sebesar Rp1.169.865.181.636,00 atau 12,04% terhadap seluruh pendapatan Tahun 2021.

5.3.6 Transfer Pemerintah Pusat-Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LO

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Bagi Sumber Daya Alam-LO Tahun 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp429.948.426.230,00 dan Rp707.260.188.121,00 terjadi penurunan sebesar Rp277.311.761.891,00 atau 39,21% berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021.

Pendapatan Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LO Pemerintah Provinsi Riau untuk periode 1 Januari s.d 31 Desember 2021 dan 2020 dengan rincian sebagai berikut:

OPD	31-Des-21 (Rp)	31-Des-20 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	Tren (%)
DBH SDA Minyak Bumi-LO	357.703.979.000,00	671.657.342.840,00	(313.953.363.840,00)	(46,74)
DBH SDA Gas Bumi-LO	11.406.366.606,00	13.406.526.181,00	(2.000.159.575,00)	(14,92)
DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent-LO	939.635.175,00	0,00	939.635.175,00	0,00
DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty-LO	11.394.865.371,00	0,00	11.394.865.371,00	0,00
DBH SDA Kehutanan-PSDH-LO	40.254.843.662,00	13.328.191.550,00	26.926.652.112,00	202,03
DBH SDA Kehutanan-IIUPH-LO	860.984.579,00	0,00	860.984.579,00	0,00
DBH SDA Kehutanan–DR-LO	7.387.751.837,00	8.868.127.550,00	(1.480.375.713,00)	(16,69)
Jumlah	**429.948.426.230,00**	**707.260.188.121,00**	**(277.311.761.891,00)**	**(39,21)**

Terdapat perbedaan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LO dengan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Bagi Hasil umber Daya Alam-LRA sebesar Rp16.640.245.836,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	SELISIH (Rp)	KETARANGAN
DBH SDA Minyak Bumi-LO	357.703.979.000,00	357.703.979.000,00	0,00	KB 2019 (Alokasi DBH Kurang Bayar Provinsi Riau Berdasarkan PMK No.36/2020) dilunasi menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 113/PMK.07/2020 tentang Penetapan Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran
DBH SDA Gas Bumi-LO	11.406.366.606,00	11.406.366.606,00	0,00	
DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent-LO	939.635.175,00	939.635.175,00	0,00	
DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty-LO	11.394.865.371,00	11.394.865.371,00	0,00	
DBH SDA Kehutanan-PSDH-LO	40.254.843.662,00	56.235.083.743,00	(15.980.240.081,00)	
DBH SDA Kehutanan-IIUPH-LO	860.984.579,00	1.520.990.334,00	(660.005.755,00)	

				2020 pada Anggaran 2021
DBH SDA Kehutanan–DR-LO	7.387.751.837,00	7.387.751.837,00	0,00	
Jumlah	**429.948.426.230,00**	**446.588.672.066,00**	**(16.640.245.836,00)**	

Kontribusi Transfer Pemerintah Pusat - Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LO sebesar Rp429.948.426.230,00 atau 4,42% terhadap seluruh pendapatan Tahun 2021.

5.3.7 Transfer Pemerintah Pusat-Dana Bagi Hasil Dana Alokasi Umum-LO

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat - Bagi Hasil Dana Alokasi Umum-LO per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp1.455.383.959.000,00 dan Rp1.432.349.278.000,00 terjadi peningkatan sebesar Rp23.034.681.000,00 atau 1,61% **(Catatan 5.1.7).**

Pendapatan Bagi Dana Alokasi Umum-LO Pemerintah Provinsi Riau untuk periode 1 Januari s.d 31 Desember 2021 dan 2020 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	31-Des-21 (Rp)	31-Des-20 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	Tren (%)
Dana Alokasi Umum (DAU)	1.455.383.959.000,00	1.432.349.278.000,00	23.034.681.000,00	1,61
Jumlah	**1.455.383.959.000,00**	**1.432.349.278.000,00**	**23.034.681.000,00**	**1,61**

Kontribusi Transfer Pemerintah Pusat - Bagi Hasil Dana Alokasi Umum-LO sebesar Rp1.455.383.959.000,00 atau 14,98 % terhadap seluruh pendapatan Tahun 2021.

5.3.8 Transfer Pemerintah Pusat-Dana Bagi Hasil Dana Alokasi Khusus-LO

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat - Bagi Hasil Dana Alokasi Khusus-LO per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp1.995.755.980.446,00 dan Rp2.000.906.541.174,00 terjadi penurunan sebesar Rp5.150.560.728,00 atau 0,26% **(Catatan 5.1.8).**

Pendapatan Bagi Dana Alokasi Khusus-LO Pemerintah Provinsi Riau untuk periode per 31 Desember 2021 dan 2020 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	31-Des-21 (Rp)	31-Des-20 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	Tren (%)
Dana Alokasi Khusus (DAK)	1.995.755.980.446,00	2.000.906.541.174,00	(5.150.560.728,00)	(0,26)
Jumlah	**1.995.755.980.446,00**	**2.000.906.541.174,00**	**(5.150.560.728,00)**	**(0,26)**

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Bagi Hasil Dana Alokasi Khusus-LO untuk periode 1 Januari s.d 31 Desember 2021 dan 2020 lebih rinci sebagai berikut:

Uraian	31-Des-21 (Rp)	31-Des-20 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	Tren (%)
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	**254.119.352.389,00**	**254.332.990.347,00**	**(213.637.958,00)**	**(0,08)**
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA-LO	57.145.244.493,0	0,00	57.145.244.493,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB-LO	1.004.606.756,0	0,00	1.004.606.756,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SD-LO	0,00	1.595.361.000,0	(1.595.361.000,00)	(100,00)
DAK Fisik–Bidang Pendidikan-Penugasan- SMK-LO	0,00	136.311.685.460,0	(136.311.685.460,00)	(100,00)
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah-LO	748.793.596,0	0,00	748.793.596,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan-LO	21.898.560.318,0	0,00	21.898.560.318,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting-LO	3.533.280.523,0	0,00	3.533.280.523,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian-LO	4.250.115.115,0	0,00	4.250.115.115,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan-LO	3.345.810.598,0	0,00	3.345.810.598,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan-LO	19.229.767.972,0	0,00	19.229.767.972,00	0,00

Uraian	31-Des-21 (Rp)	31-Des-20 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	Tren (%)
DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan-LO	45.634.437.026,0	0,00	45.634.437.026,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan-LO	2.480.398.452,0	0,00	2.480.398.452,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Sekolah Menengah Kejuruan-LO	93.424.107.041,0	0,00	93.424.107.041,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan-LO	1.424.230.499,0	0,00	1.424.230.499,00	0,00
DAK Fisik Reguler - LO	0,00	116.425.943.887,0	(116.425.943.887,00)	(100,00)
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	1.741.636.628.057,0	1.746.573.550.827,0	(4.936.922.770,00)	(0,28)
DAK Non Fisik-BOS Reguler-LO	1.430.410.284.000,0	1.729.519.840.000,0	(299.109.556.000,00)	(17,29)
DAK Non Fisik-BOS Afirmasi-LO	18.060.000.000,0	0,00	18.060.000.000,00	0,00
DAK Non Fisik-BOS Kinerja-LO	9.050.000.000,0	0,00	9.050.000.000,00	0,00
DAK Non Fisik-TPG PNSD-LO	275.564.331.000,0	0,00	275.564.331.000,00	0,00
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD-LO	1.473.000.000,0	0,00	1.473.000.000,00	0,00
DAK Non Fisik-TKG PNSD-LO	892.302.000,0	0,00	892.302.000,00	0,00
DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum-LO	701.146.177,0	2.450.000.000,0	(1.748.853.823,00)	(71,38)
DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya-LO	1.301.400.864,0	0,00	1.301.400.864,00	0,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB-LO	0,00	12.337.128.527,0	(12.337.128.527,00)	(100,00)
DAK Non Fisik-PK2UKM-LO	2.131.649.256,0	2.113.111.300,0	18.537.956,00	0,88
DAK Non Fisik–Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan-LO	1.064.817.760,0	153.471.000,0	911.346.760,00	593,82
DAK Non Fisik-Dana Bantuan BLPS-LO	987.697.000,0	0,00	987.697.000,00	0,00
Jumlah	**1.995.755.980.446,00**	**2.000.906.541.174,00**	**(5.150.560.728,00)**	**(0,26)**

Kontribusi Transfer Pemerintah Pusat-Bagi Hasil Dana Alokasi Khusus-LO sebesar Rp1.995.755.980.446,00 atau 20,54% terhadap seluruh pendapatan Tahun 2021.

5.3.9 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya- Dana Insentif Daerah -LO

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Dana Insentif Daerah-LO per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp32.468.699.000,00 dan Rp20.243.618.000,00 terjadi peningkatan sebesar Rp12.225.081.000,00 atau 60,39% **(Catatan 5.1.9)**.

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO untuk periode 1 Januari s.d 31 Desember 2021 dan 2020 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	31-Des-21 (Rp)	31-Des-20 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	Tren (%)
Dana Penyesuaian	32.468.699.000,00	20.243.618.000,00	12.225.081.000,00	60,39
Jumlah	**32.468.699.000,00**	**20.243.618.000,00**	**12.225.081.000,00**	**60,39**

Kontribusi Transfer Pemerintah Pusat - Dana Insentif Daerah-LO sebesar Rp32.468.699.000,00 atau 0,33% terhadap seluruh pendapatan Tahun 2021.

5.3.10 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-Pendapatan Hibah-LO

Realisasi Lain - lain Pendapatan Daerah Yang Sah - Pendapatan Hibah-LO Tahun 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp541.779.329.371,43 dan Rp237.071.774.248,43 terjadi peningkatan sebesar Rp304.707.555.123,00 atau 128,53% **(Catatan 5.1.10).**

Realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah-Pendapatan Hibah-LO untuk periode periode 1 Januari s.d 31 Desember 2021 dan 2020 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	31-Des-21 (Rp)	31-Des-20 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	Tren (%)
Pendapatan Hibah	541.779.329.371,43	237.071.774.248,43	304.707.555.123,00	128,53
Jumlah	**541.779.329.371,43**	**237.071.774.248,43**	**304.707.555.123,00**	**128,53**

Terdapat perbedaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-Pendapatan Hibah-LO dengan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-Pendapatan Hibah-LRA sebesar Rp533.991.619.367,43 dapat dijelaskan dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	SELISIH (Rp)	KETARANGAN
Pendapatan Hibah	**536.726.619.371,43**	**2.735.000.004,00**	**533.991.619.367,43**	
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	**526.090.452.215,05**	**2.735.000.004,00**	**523.355.452.211,05**	
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	526.090.452.215,05	2.735.000.004,00	523.355.452.211,05	Pendapatan Hibah berupa uang dari PT Jasa Raharja
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	**9.424.516.756,38**	**0,00**	**9.424.516.756,38**	
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah-LO	9.424.516.756,38		9.424.516.756,38	
Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri-LO	**1.211.650.400,00**	**0,00**	**1.211.650.400,00**	
Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri-LO	1.211.650.400,00	0,00	1.211.650.400,00	
Jumlah	**536.726.619.371,43**	**2.735.000.004,00**	**533.991.619.367,43**	-

Pendapatan Hibah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

SKPD	Uraian	31-Des-21
Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO		**526.090.452.215,05**
PPKD	Pendapatan Hibah berupa uang dari PT Jasa Raharja	2.735.000.004,00
Pengelola	Hibah Gedung dan Bangunan dari Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal & Transmigrasi	1.179.702.000,00
Badan Penanggulangan Provinsi Riau	Hibah Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana	4.476.555.500,00
Dinas Kesehatan	Hibah Persediaan Obat - Obatan dan Persediaan untuk Dijual/Diserahkam Kepada Masyarakat dari Kementerian Kesehatan	329.923.487.407,80
Dinas Perkebunan	Hibah Gedung dan Bangunan dari Kementrian Pertanian	1.397.995.000,00
Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura	Hibah Peralatan dan Mesin dari Kementrian Pertanian	247.840.000,00
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	Hibah Peralatan dan Mesin dari Kementrian Perdaganggan Republik Indonesia	321.100.000,00
Dinas Kelautan Dan Perikanan	Hibah Peralatan dan Mesin dari Kementrian Kelautan dan Perikanan Dirjen Pengolahan dan Pengolahan Hasil Perikanan	1.208.466.594,00
Dinas Kelautan Dan Perikanan	Hibah Peralatan dan Mesin dari Kementrian Kelautan dan Perikanan Dirjen Perikanan Tangkap	2.494.875.000,00
Dinas Kelautan Dan Perikanan	Hibah dari Kementrian Kelautan dan Perikanan Dirjen Perikanan Budidaya	4.493.710.921,00
Dinas Kelautan Dan Perikanan	Kementrian kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Penguat Daya saing Produk kelautan dan Perikanan	1.737.240.000,00
Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad	Hibah Obat - Obatan dari Kementrian Kesehatan	20.956.000,00

SKPD	Uraian	31-Des-21
Dinas Pendidikan	Hibah dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan	116.725.634.070,25
Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad	Hibah Alat Kedokteran Umum dari Kementrian Kesehatan	23.265.560.631,00
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	Kementrian PUPR	35.423.987.087,00
Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi	Hibah dari Kementrian Kesehatan	327.250.000,00
Dinas Perhubungan	Hibah dari Kementrian Perhubungan RI	111.092.000,00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LO		**9.424.516.756,38**
RSUD Arifin Ahmad	Hibah Persediaan Obat-Obatan dari Kota Pekanbaru	5.125.082.151,00
Rumah Sakit Jiwa Tampan	Hibah Obat-Obatan Dari Kota Pekanbaru	2.181.215,00
Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi	Hibah Obat-Obatan Dari Kota Pekanbaru	7.588.000,00
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	Hibah Gedung dan Bangunan dari Kota Pekanbaru	434.320.000,00
Badan Pendapatan Daerah	HibahTanah untuk Bangunan Tempat Kerja Dari Kabupaten Siak	312.262.390,38
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Hibah Gedung Olahraga Skate Board dari Kota Pekanbaru (Dispora)	2.778.083.000,00
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Kota Pekanbaru	765.000.000,00
Pendapatan Hibah dari Badan/ Lembaga/ Organisasi Swasta Dalam Negeri - LO		**0,00**
RSUD Arifin Ahmad	Hibah dari Badan/ Lembaga/ Organisasi Swasta Dalam Negeri	0,00
Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi	Hibah dari Badan/ Lembaga/ Organisasi Swasta Dalam Negeri	0,00
Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri-LO		**1.211.650.400,00**
Dinas Kebudayaan	Hibah Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar dari PT CHEVRON PACIVIC INDONESIA	1.174.022.900,00
Dinas Kesehatan	Hibah Persediaan Obat - Obatan dan Persediaan untuk Dijual/Diserahkam Kepada Lembaga Perusahaan	37.627.500,00
Jumlah		**536.726.619.371,43**

Kontribusi Pendapatan Hibah-LO Tahun 2021 sebesar Rp541.779.329.371,43 atau 5,57% terhadap seluruh pendapatan Tahun 2021.

5.3.11 Beban Pegawai-LO

Realisasi Beban Pegawai-LO per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp2.190.977.094.167,00 dan Rp2.175.047.902.982,00 terjadi peningkatan sebesar Rp15.929.191.185,00 atau 0,73%. Beban pegawai merupakan jumlah saldo beban pegawai periode 1 Januari s.d 31 Desember 2021 dan 2020 dengan rincian:

Uraian	31-Des-21 (Rp)	31-Des-20 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren (%)
Beban Pegawai	**2.190.977.094.167,00**	**2.175.047.902.982,00**	**15.929.191.185,00**	**0,73**
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	**1.050.210.501.564,00**	**1.042.878.021.560,00**	**7.332.480.004,00**	**0,70**
Beban Gaji Pokok ASN	**778.274.447.713,00**	**788.235.111.420,00**	**(9.960.663.707,00)**	**(1,26)**
Beban Gaji Pokok PNS	778.274.447.713,00	788.235.111.420,00	(9.960.663.707,00)	(1,26)
Beban Tunjangan Keluarga ASN	**76.021.772.825,00**	**77.370.224.737,00**	**(1.348.451.912,00)**	**(1,74)**
Beban Tunjangan Keluarga PNS	76.021.772.825,00	77.370.224.737,00	(1.348.451.912,00)	(1,74)
Beban Tunjangan Jabatan ASN	**12.955.425.450,00**	**14.147.372.000,00**	**(1.191.946.550,00)**	**(8,43)**
Beban Tunjangan Jabatan PNS	12.955.425.450,00	14.147.372.000,00	(1.191.946.550,00)	(8,43)
Beban Tunjangan Fungsional ASN	**51.620.684.985,00**	**50.256.461.800,00**	**1.364.223.185,00**	**2,71**
Beban Tunjangan Fungsional PNS	51.620.684.985,00	50.256.461.800,00	1.364.223.185,00	2,71
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	**14.293.210.000,00**	**15.246.580.000,00**	**(953.370.000,00)**	**(6,25)**
Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	14.293.210.000,00	15.246.580.000,00	(953.370.000,00)	(6,25)
Beban Tunjangan Beras ASN	**44.602.745.038,00**	**39.196.188.647,00**	**5.406.556.391,00**	**13,79**
Beban Tunjangan Beras PNS	44.602.745.038,00	39.196.188.647,00	5.406.556.391,00	13,79
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	**1.185.144.459,00**	**1.039.348.098,00**	**145.796.361,00**	**14,03**
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.185.144.459,00	1.039.348.098,00	145.796.361,00	14,03
Beban Pembulatan Gaji ASN	**10.707.108,00**	**10.723.227,00**	**(16.119,00)**	**(0,15)**
Beban Pembulatan Gaji PNS	10.707.108,00	10.723.227,00	(16.119,00)	(0,15)
Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	**64.846.472.764,00**	**57.376.011.631,00**	**7.470.461.133,00**	**13,02**
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	64.801.274.764,00	57.376.011.631,00	7.425.263.133,00	12,94
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	45.198.000,00	0,00	45.198.000,00	0,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	**1.612.010.693,00**	**0,00**	**1.612.010.693,00**	0,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.595.883.593,00	0,00	1.595.883.593,00	0,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	16.127.100,00	0,00	16.127.100,00	0,00
Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	**4.787.880.529,00**	**0,00**	**4.787.880.529,00**	0,00
Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	4.787.880.529,00	0,00	4.787.880.529,00	0,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	**754.673.466.242,00**	**738.822.263.782,00**	**15.851.202.460,00**	**2,15**

Uraian	31-Des-21 (Rp)	31-Des-20 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren (%)
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	**37.848.261.085,00**	0,00	**37.848.261.085,00**	0,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	37.848.261.085,00	0,00	37.848.261.085,00	0,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	**20.029.103.488,00**	0,00	**20.029.103.488,00**	0,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	20.029.103.488,00	0,00	20.029.103.488,00	0,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	**696.796.101.669,00**	**738.822.263.782,00**	**(42.026.162.113,00)**	**(5,69)**
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	696.796.101.669,00	738.822.263.782,00	(42.026.162.113,00)	(5,69)
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	**321.957.674.493,00**	**330.146.296.014,00**	**(8.188.621.521,00)**	**(2,48)**
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	**61.563.260.793,00**	**64.740.158.474,00**	**(3.176.897.681,00)**	**(4,91)**
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	30.880.840.341,00	0,00	30.880.840.341,00	0,00
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	15.671.023.748,00	0,00	15.671.023.748,00	0,00
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	13.960.473.704,00	0,00	13.960.473.704,00	0,00
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Permukaan	1.050.923.000,00	0,00	1.050.923.000,00	0,00
Insentif Pemungutan Paja k Daerah ... - LO	0,00	64.740.158.474,00	(64.740.158.474,00)	(100,00)
Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	**258.291.895.300,00**	**261.916.023.540,00**	**(3.624.128.240,00)**	**(1,38)**
Beban TPG PNSD	258.291.895.300,00	261.916.023.540,00	(3.624.128.240,00)	(1,38)
Beban Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	**1.009.904.400,00**	**1.411.114.000,00**	**(401.209.600,00)**	**(28,43)**
Beban TKG PNSD	1.009.904.400,00	1.411.114.000,00	(401.209.600,00)	(28,43)
Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	**1.078.500.000,00**	**2.079.000.000,00**	**(1.000.500.000,00)**	**(48,12)**
Beban Tamsil Guru PNSD	**1.078.500.000,00**	**2.079.000.000,00**	**(1.000.500.000,00)**	**(48,12)**
Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	**14.114.000,00**	0,00	**14.114.000,00**	0,00
Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	**14.114.000,00**	0,00	**14.114.000,00**	0,00

Uraian	31-Des-21 (Rp)	31-Des-20 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren (%)
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	**57.343.893.842,00**	**57.551.907.326,00**	**(208.013.484,00)**	**(0,36)**
Beban Uang Representasi DPRD	**2.037.225.000,00**	0,00	**2.037.225.000,00**	0,00
Beban Uang Representasi DPRD	2.037.225.000,00	0,00	2.037.225.000,00	0,00
Beban Tunjangan Keluarga DPRD	**198.243.000,00**	0,00	**198.243.000,00**	0,00
Beban Tunjangan Keluarga DPRD	198.243.000,00	0,00	198.243.000,00	0,00
Beban Tunjangan Beras DPRD	**160.398.230,00**	0,00	**160.398.230,00**	0,00
Beban Tunjangan Beras DPRD	160.398.230,00	0,00	160.398.230,00	0,00
Beban Uang Paket DPRD	**174.232.500,00**	**173.130.000,00**	**1.102.500,00**	**0,64**
Beban Uang Paket DPRD	174.232.500,00	173.130.000,00	1.102.500,00	0,64
Beban Tunjangan Jabatan DPRD	**2.953.976.250,00**	0,00	**2.953.976.250,00**	0,00
Beban Tunjangan Jabatan DPRD	2.953.976.250,00	0,00	2.953.976.250,00	0,00
Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	**257.215.500,00**	0,00	**257.215.500,00**	0,00
Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	257.215.500,00	0,00	257.215.500,00	0,00
Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	0,00	**26.622.000,00**	**(26.622.000,00)**	**(100,00)**
Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	0,00	26.622.000,00	(26.622.000,00)	(100,00)
Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	**16.135.000.000,00**	**16.044.000.000,00**	**91.000.000,00**	**0,57**
Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	16.135.000.000,00	16.044.000.000,00	91.000.000,00	0,57
Beban Tunjangan Reses DPRD	**4.011.000.000,00**	**3.990.000.000,00**	**21.000.000,00**	**0,53**
Beban Tunjangan Reses DPRD	**4.011.000.000,00**	**3.990.000.000,00**	**21.000.000,00**	**0,53**
Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan	**45.854.782,00**	0,00	**45.854.782,00**	0,00
Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	45.854.782,00	0,00	45.854.782,00	0,00
Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	**16.822.989.580,00**	**22.780.381.326,00**	**(5.957.391.746,00)**	**(26,15)**
Beban Jaminan Kesehatan DPRD	169.597.260,00	0,00	169.597.260,00	0,00
Beban Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	4.181.580,00	1.612.595.332,00	(1.608.413.752,00)	(99,74)
Beban Jaminan Kematian DPRD	12.544.740,00	4.837.785.994,00	(4.825.241.254,00)	(99,74)

Uraian	31-Des-21 (Rp)	31-Des-20 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren (%)
Beban Tunjangan Perumahan DPRD	16.636.666.000,00	16.330.000.000,00	306.666.000,00	1,88
Beban Tunjangan Transportasi DPRD	**14.543.259.000,00**	**14.506.424.000,00**	**36.835.000,00**	**0,25**
Beban Tunjangan Transportasi DPRD	14.543.259.000,00	14.506.424.000,00	36.835.000,00	0,25
Beban Uang Jasa Pengabdian DPRD	**4.500.000,00**	**31.350.000,00**	**(26.850.000,00)**	**(85,65)**
Beban Uang Jasa Pengabdian DPRD	4.500.000,00	31.350.000,00	(26.850.000,00)	(85,65)
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	**238.640.026,00**	0,00	**238.640.026,00**	0,00
Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	**75.600.000,00**	0,00	**75.600.000,00**	0,00
Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	**75.600.000,00**	0,00	**75.600.000,00**	0,00
Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	**9.072.000,00**	0,00	**9.072.000,00**	0,00
Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	9.072.000,00	0,00	9.072.000,00	0,00
Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	**136.080.000,00**	0,00	**136.080.000,00**	0,00
Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	136.080.000,00	0,00	136.080.000,00	0,00
Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	**6.083.280,00**	0,00	**6.083.280,00**	0,00
Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	**6.083.280,00**	0,00	**6.083.280,00**	0,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	**3.612.666,00**	0,00	**3.612.666,00**	0,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	**3.612.666,00**	0,00	**3.612.666,00**	0,00
Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH	**1.360,00**	0,00	**1.360,00**	0,00
Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH	**1.360,00**	0,00	**1.360,00**	0,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH	**7.568.640,00**	0,00	**7.568.640,00**	0,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH	7.568.640,00	0,00	7.568.640,00	0,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	**155.520,00**	0,00	**155.520,00**	0,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	**155.520,00**	0,00	**155.520,00**	0,00
Beban Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	**466.560,00**	0,00	**466.560,00**	0,00
Beban Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	466.560,00	0,00	466.560,00	0,00
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	**6.552.918.000,00**	**5.649.414.300,00**	**903.503.700,00**	**15,99**

Uraian	31-Des-21 (Rp)	31-Des-20 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren (%)
Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	**544.320.000,00**	**442.560.000,00**	**101.760.000,00**	**22,99**
Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	544.320.000,00	442.560.000,00	101.760.000,00	22,99
Beban Dana Operasional KDH/WKDH	**6.008.598.000,00**	**4.974.999.300,00**	**1.033.598.700,00**	**20,78**
Beban Dana Operasional KDH/WKDH	6.008.598.000,00	4.974.999.300,00	1.033.598.700,00	20,78
Beban Dana Operasional KDH/WKDH	0,00	**231.855.000,00**	**(231.855.000,00)**	**(100,00)**
Beban Dana Operasional KDH/WKDH	0,00	53.287.500,00	(53.287.500,00)	(100,00)
Beban Dana Operasional KDH/WKDH	0,00	113.796.000,00	(113.796.000,00)	(100,00)
Beban Dana Operasional KDH/WKDH	0,00	53.548.500,00	(53.548.500,00)	(100,00)
Beban Dana Operasional KDH/WKDH	0,00	11.223.000,00	(11.223.000,00)	(100,00)
Jumlah	**2.190.977.094.167,00**	**2.175.047.902.982,00**	**15.929.191.185,00**	**0,73**

Berikut ini disajikan Beban Pegawai per OPD periode 1 Januari s.d 31 Desember 2021 dan 2020 dengan rincian:

Uraian	31-Des-21 (Rp)	31-Des-20 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	Tren (%)
Dinas Pendidikan	1.020.721.970.352,00	1.003.994.442.056,00	16.727.528.296,00	1,67
Dinas Kesehatan	198.938.786.909,00	41.401.201.332,00	157.537.585.577,00	380,51
Dinas Pekerjaan Umum, Penatan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	71.510.141.493,00	71.051.703.966,00	458.437.527,00	0,65
Satuan Polisi Pamong Praja	24.863.178.028,00	25.365.161.533,00	(501.983.505,00)	(1,98)
Badan Penaggulangan Bencana Daerah	9.042.337.976,00	8.701.790.803,00	340.547.173,00	3,91
Dinas Sosial	23.965.685.779,00	24.698.633.584,00	(732.947.805,00)	(2,97)
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	26.691.139.302,00	29.111.742.021,00	(2.420.602.719,00)	(8,31)
Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	14.607.234.749,00	14.283.486.499,00	323.748.250,00	2,27
Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura	42.652.127.910,00	41.550.384.373,00	1.101.743.537,00	2,65

Uraian	31-Des-21 (Rp)	31-Des-20 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	Tren (%)
Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	110.661.109.621,00	113.406.754.701,00	(2.745.645.080,00)	(2,42)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	15.180.581.223,00	15.383.774.278,00	(203.193.055,00)	(1,32)
Dinas Perhubungan	17.551.311.328,00	16.369.550.559,00	1.181.760.769,00	7,22
Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	13.904.391.334,00	11.742.063.719,00	2.162.327.615,00	18,42
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	17.478.765.203,00	18.397.875.522,00	(919.110.319,00)	(5,00)
Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	13.906.615.041,00	14.746.770.108,00	(840.155.067,00)	(5,70)
Dinas Kebudayaan	13.228.757.143,00	12.858.638.950,00	370.118.193,00	2,88
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	19.123.411.267,00	18.080.527.783,00	1.042.883.484,00	5,77
Dinas Kelautan Dan Perikanan	20.427.993.958,00	21.104.432.378,00	(676.438.420,00)	(3,21)
Dinas Pariwisata	17.120.771.176,00	16.562.820.547,00	557.950.629,00	3,37
Dinas Perkebunan	16.183.382.430,00	14.333.744.746,00	1.849.637.684,00	12,90
Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	14.875.450.178,00	13.500.850.545,00	1.374.599.633,00	10,18
Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	27.053.221.208,00	28.377.530.685,00	(1.324.309.477,00)	(4,67)
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	33.611.247.866,00	33.782.088.495,00	(170.840.629,00)	(0,51)
Sekretariat Daerah	80.693.139.348,00	73.829.342.536,00	6.863.796.812,00	9,30
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	82.450.846.412,00	79.632.312.965,00	2.818.533.447,00	3,54
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	35.282.456.741,00	35.340.884.878,00	(58.428.137,00)	(0,17)
Badan Pendapatan Daerah	105.787.583.394,00	91.853.376.803,00	13.934.206.591,00	15,17
Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	18.792.783.368,00	50.684.504.065,00	(31.891.720.697,00)	(62,92)
Badan Kepegawaian Daerah	17.926.394.810,00	17.605.049.334,00	321.345.476,00	1,83
Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia	18.264.341.997,00	17.793.866.674,00	470.475.323,00	2,64

Uraian	31-Des-21 (Rp)	31-Des-20 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	Tren (%)
Badan Penghubung	10.299.461.957,00	10.156.634.768,00	142.827.189,00	1,41
Inspektorat	27.905.751.813,00	26.386.896.711,00	1.518.855.102,00	5,76
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	10.274.722.853,00	10.482.605.323,00	(207.882.470,00)	(1,98)
Rsud Arifin Ahmad	0,00	93.015.711.528,00	(93.015.711.528,00)	(100,00)
RSJ Tampan	0,00	31.873.706.957,00	(31.873.706.957,00)	(100,00)
RSUD Petala Bumi	0,00	22.406.919.333,00	(22.406.919.333,00)	(100,00)
Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah	0,00	5.180.121.924,00	(5.180.121.924,00)	(100,00)
Jumlah	**2.190.977.094.167,00**	**2.175.047.902.982,00**	**15.929.191.185,00**	**0,73**

Beban Pegawai-LO sebesar Rp2.190.977.094.167,00 atau 22,31% terhadap seluruh beban Tahun 2021.

5.3.12 Beban Persediaan-LO

Realisasi Beban Persediaan-LO per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp494.833.547.286,00 dan Rp231.069.954.699,99. Terjadi peningkatan sebesar Rp263.763.592.586,00 atau 114,15%. Rincian beban persediaan sebagai berikut:

Uraian	31-Des-21 (Rp)	31-Des-20 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren (%)
Beban Persediaan	**494.833.547.286,29**	**231.069.954.699,99**	**263.763.592.586,30**	**114,15**
Beban Barang Pakai Habis	**494.717.143.598,29**	**231.069.954.699,99**	**263.647.188.898,30**	**114,10**
Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	109.046.303.289,00	0,00	109.046.303.289,00	0,00
Beban Bahan-Bahan Kimia	10.838.492.355,04	0,00	10.838.492.355,04	0,00
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.750.988.751,75	0,00	5.750.988.751,75	0,00
Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	3.920.480.742,00	0,00	3.920.480.742,00	0,00
Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	123.498.750,00	0,00	123.498.750,00	0,00
Beban Bahan-Isi Tabung Gas	167.385.000,00	0,00	167.385.000,00	0,00
Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	1.021.224.350,00	0,00	1.021.224.350,00	0,00
Beban Bahan-Bahan Lainnya	18.420.588.363,25	0,00	18.420.588.363,25	0,00
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	863.179.478,00	0,00	863.179.478,00	0,00
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	10.406.381.364,41	0,00	10.406.381.364,41	0,00
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	43.073.930.565,75	0,00	43.073.930.565,75	0,00
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00

Uraian	31-Des-21 (Rp)	31-Des-20 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren (%)
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	9.271.000,00	0,00	9.271.000,00	0,00
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	122.920.400,00	0,00	122.920.400,00	0,00
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	3.228.888.462,34	0,00	3.228.888.462,34	0,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	10.323.283.508,10	0,00	10.323.283.508,10	0,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	15.536.057.639,00	0,00	15.536.057.639,00	0,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	45.392.168.364,74	14.529.608.846,44	30.862.559.518,30	212,41
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	848.034.000,00	0,00	848.034.000,00	0,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-	204.974.401,00	0,00	204.974.401,00	0,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	55.771.600,00	0,00	55.771.600,00	0,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	3.132.459.613,89	0,00	3.132.459.613,89	0,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	292.410.425,00	0,00	292.410.425,00	0,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olah Raga	654.497.240,00	0,00	654.497.240,00	0,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	1.037.586.200,00	0,00	1.037.586.200,00	0,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	20.801.661.583,40	0,00	20.801.661.583,40	0,00
Beban Obat-Obatan-Obat	131.538.086.500,35	0,00	131.538.086.500,35	0,00
Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	2.540.000,00	0,00	2.540.000,00	0,00
Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	55.889.789.637,27	0,00	55.889.789.637,27	0,00
Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	25.447.420,00	0,00	25.447.420,00	0,00
Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	5.376.808,00	0,00	5.376.808,00	0,00
Beban Natura dan Pakan-Natura	563.986.136,00	0,00	563.986.136,00	0,00

Uraian	31-Des-21 (Rp)	31-Des-20 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren (%)
Beban Natura dan Pakan-Pakan	1.405.192.650,00	0,00	1.405.192.650,00	0,00
Beban Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	11.688.000,00	0,00	11.688.000,00	0,00
Beban Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
Beban Persediaan Alat Tulis Kantor	0,00	11.813.122.098,26	(11.813.122.098,26)	(100,00)
Beban Persediaan Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	0,00	2.665.709.426,36	(2.665.709.426,36)	(100,00)
Beban Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	0,00	554.929.100,00	(554.929.100,00)	(100,00)
Beban Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	0,00	3.057.392.677,08	(3.057.392.677,08)	(100,00)
Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	0,00	2.362.011.414,25	(2.362.011.414,25)	(100,00)
Beban Persediaan Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	0,00	22.625.000,00	(22.625.000,00)	(100,00)
Beban Persediaan Pengisian Tabung Gas	0,00	87.660.000,00	(87.660.000,00)	(100,00)
Beban Persediaan Bahan Habis Pakai Material Kesehatan	0,00	17.141.728.825,98	(17.141.728.825,98)	(100,00)
Beban Persediaan Bahan Habis Pakai Material Laboratorium	0,00	25.206.969.298,55	(25.206.969.298,55)	(100,00)
Beban Persediaan Bahan Habis Pakai Radiologi	0,00	2.614.092.402,33	(2.614.092.402,33)	(100,00)
Beban Persediaan Bahan Kelengkapan Teknisi Las dan Bor	0,00	44.752.800,00	(44.752.800,00)	(100,00)
Beban Persediaan Bahan Kelengkapan Pertukangan	0,00	249.842.917,48	(249.842.917,48)	(100,00)
Beban Persediaan Bahan Kelengkapan Teknisi Mesin	0,00	15.908.500,00	(15.908.500,00)	(100,00)
Beban Persediaan Bahan Kelengkapan Teknisi Elektronika	0,00	14.929.200,00	(14.929.200,00)	(100,00)
Beban Persediaan Bahan Kelengkapan Teknisi Kelistrikan	0,00	99.175.500,00	(99.175.500,00)	(100,00)
Beban Persediaan Bahan Pengharum Ruangan	0,00	563.852.659,00	(563.852.659,00)	(100,00)
Beban Persediaan Bahan Pelumas	0,00	426.335.077,00	(426.335.077,00)	(100,00)
Beban Persediaan Bahan Habis Pakai Material Kedokteran Gigi	0,00	113.982.457,20	(113.982.457,20)	(100,00)
Beban Persediaan Kelengkapan Pasien Jiwa	0,00	164.229.410,00	(164.229.410,00)	(100,00)
Beban Persediaan Habis Pakai Alat Peraga	0,00	9.717.000,00	(9.717.000,00)	(100,00)

Uraian	31-Des-21 (Rp)	31-Des-20 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren (%)
Beban Persediaan Bahan Habis Pakai Material Keterampilan	0,00	150.483.000,00	(150.483.000,00)	(100,00)
Beban Persediaan Bahan Baku Bangunan	0,00	315.970.833,00	(315.970.833,00)	(100,00)
Beban Persediaan Bahan/Bibit Tanaman	0,00	401.053.000,00	(401.053.000,00)	(100,00)
Beban Persediaan Bibit Ternak	0,00	312.606.750,00	(312.606.750,00)	(100,00)
Beban Persediaan Bahan Obat-obatan	0,00	113.001.997.328,53	(113.001.997.328,53)	(100,00)
Beban Persediaan Bahan Kimia	0,00	4.377.476.894,54	(4.377.476.894,54)	(100,00)
Beban Persediaan Bahan Logistik Rumah Tangga	0,00	19.974.462.112,49	(19.974.462.112,49)	(100,00)
Beban Persediaan Plakat/Pigura/Frame/Songket	0,00	1.026.697.000,00	(1.026.697.000,00)	(100,00)
Beban Persediaan Dekorasi	0,00	822.381.775,00	(822.381.775,00)	(100,00)
Beban Persediaan Dokumentasi	0,00	767.507.569,00	(767.507.569,00)	(100,00)
Beban Persediaan Kelengkapan Olahraga	0,00	133.991.495,00	(133.991.495,00)	(100,00)
Beban Persediaan Bahan Specimen	0,00	4.740.841,00	(4.740.841,00)	(100,00)
Beban Persediaan Bahan Inseminasi Buatan	0,00	320.865.195,00	(320.865.195,00)	(100,00)
Beban Persediaan Bahan Pakan Ternak	0,00	1.227.392.835,00	(1.227.392.835,00)	(100,00)
Beban Persediaan Bahan Sosialisasi	0,00	18.691.200,00	(18.691.200,00)	(100,00)
Beban Persediaan Bahan Publikasi	0,00	3.299.787.076,00	(3.299.787.076,00)	(100,00)
Beban Persediaan Bahan Kostum dan Kelengkapan Upacara	0,00	86.900.000,00	(86.900.000,00)	(100,00)
Beban Persediaan Bahan Pupuk	0,00	103.655.425,00	(103.655.425,00)	(100,00)
Beban Persediaan Baju Pasien	0,00	654.782.375,00	(654.782.375,00)	(100,00)
Beban Persediaan Bahan Pestisida	0,00	363.571.880,00	(363.571.880,00)	(100,00)
Beban Persediaan Bahan Peralatan Pertanian	0,00	262.390.763,50	(262.390.763,50)	(100,00)
Beban Persediaan Bahan Jaringan Komputer	0,00	176.766.000,00	(176.766.000,00)	(100,00)
Beban Persediaan Bahan Peralatan Perikanan	0,00	142.621.800,00	(142.621.800,00)	(100,00)
Beban Persediaan Bahan Praktek	0,00	304.886.652,00	(304.886.652,00)	(100,00)
Beban Persediaan Bahan Lomba	0,00	9.657.400,00	(9.657.400,00)	(100,00)
Beban Persediaan Bahan Produksi Pertanian	0,00	35.766.880,00	(35.766.880,00)	(100,00)
Beban Persediaan Kartu Anggota Elektronik	0,00	27.850.000,00	(27.850.000,00)	(100,00)
Beban Persediaan Lainnya	0,00	814.153.360,00	(814.153.360,00)	(100,00)
Belanja perlengkapan rumah tangga	0,00	172.272.650,00	(172.272.650,00)	(100,00)

Uraian	31-Des-21 (Rp)	31-Des-20 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren (%)
Beban Barang Tak Habis Pakai	**116.403.688,00**	**0,00**	**116.403.688,00**	**0,00**
Beban Komponen-Komponen Rambu-Rambu	5.808.000,00	0,00	5.808.000,00	0,00
Beban Komponen-Komponen Lainnya	104.500.000,00	0,00	104.500.000,00	0,00
Beban Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	6.095.688,00	0,00	6.095.688,00	0,00
Jumlah	**494.833.547.286,29**	**231.069.954.699,99**	**263.763.592.586,30**	**114,15**

Berikut ini disajikan Beban Persediaan per OPD periode 1 Januari s.d 31 Desember 2021 dan 2020 dengan rincian:

Uraian	31-Des-21 (Rp)	31-Des-20 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren (%)
Dinas Pendidikan	46.787.929.335,96	1.929.833.391,33	44.858.095.944,63	2.324,45
Dinas Kesehatan	224.727.819.144,90	9.351.669.003,39	215.376.150.141,51	2.303,08
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	133.568.707.603,78	3.960.858.816,00	129.607.848.787,78	3.272,22
Satuan Polisi Pamong Praja	371.201.189,00	263.846.160,00	107.355.029,00	40,69
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	867.757.294,00	573.009.612,69	294.747.681,31	51,44
Dinas Sosial	908.728.928,00	908.642.220,00	86.708,00	0,01
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	2.287.961.794,39	464.453.066,00	1.823.508.728,39	392,61
Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	490.460.350,00	260.028.875,00	230.431.475,00	88,62
Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura	26.518.944.586,39	570.301.164,00	25.948.643.422,39	4.549,99
Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	6.258.824.168,00	1.153.711.616,00	5.105.112.552,00	442,49
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	483.238.502,74	547.368.480,20	(64.129.977,46)	(11,72)
Dinas Perhubungan	746.219.756,00	554.502.069,00	191.717.687,00	34,57
Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	1.617.762.831,00	1.087.130.335,00	530.632.496,00	48,81
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	554.361.980,00	492.243.600,00	62.118.380,00	12,62
Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	1.554.150.659,10	1.017.918.521,00	536.232.138,10	52,68
Dinas Kebudayaan	1.278.006.287,00	823.277.634,00	454.728.653,00	55,23
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	584.486.201,00	403.887.162,00	180.599.039,00	44,72
Dinas Kelautan Dan Perikanan	6.799.849.098,60	1.563.446.794,00	5.236.402.304,60	334,93
Dinas Pariwisata	1.459.785.340,00	1.167.847.985,00	291.937.355,00	25,00
Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura	820.291.770,50	240.379.918,50	579.911.852,00	241,25
Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	5.633.050.215,00	4.507.065.630,50	1.125.984.584,50	24,98
Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	969.598.629,00	591.856.124,00	377.742.505,00	63,82

Uraian	31-Des-21 (Rp)	31-Des-20 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren (%)
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	1.558.219.516,00	882.858.664,00	675.360.852,00	76,50
Sekretariat Daerah	7.875.970.631,65	7.164.010.623,58	711.960.008,07	9,94
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	8.866.740.573,00	7.586.571.538,20	1.280.169.034,80	16,87
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	1.689.971.118,00	1.755.926.028,00	(65.954.910,00)	(3,76)
Badan Pendapatan Daerah	5.252.143.486,28	4.712.421.015,58	539.722.470,70	11,45
Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	1.633.553.465,00	1.712.794.700,00	(79.241.235,00)	(4,63)
Badan Kepegawaian Daerah	1.064.606.603,00	893.911.983,00	170.694.620,00	19,10
Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia	477.084.781,00	479.573.706,00	(2.488.925,00)	(0,52)
Badan Penghubung	352.379.432,00	575.126.101,00	(222.746.669,00)	(38,73)
Inspektorat	529.548.583,00	475.625.500,00	53.923.083,00	11,34
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	244.193.433,00	128.709.568,00	115.483.865,00	89,72
Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad	0,00	157.467.784.945,25	(157.467.784.945,25)	(100,00)
Rumah Sakit Jiwa Tampan	0,00	5.693.973.712,10	(5.693.973.712,10)	(100,00)
Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi	0,00	9.107.388.437,67	(9.107.388.437,67)	(100,00)
Jumlah	**494.833.547.286,29**	**231.069.954.699,99**	**263.763.592.586,30**	**114,15**

Kontribusi Beban Persediaan-LO sebesar Rp494.833.547.286,00 atau 5,04% terhadap seluruh beban Tahun 2021.

5.3.13 Beban Barang

Realisasi Beban Barang-LO per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp377.037.375.584,00 dan Rp719.414.962.954,97 atau terjadi penurunan sebesar Rp342.377.587.370,97 atau 47,59%. Beban Barang merupakan jumlah saldo beban Barang periode 1 Januari s.d per 31 Desember 2021 dan 2020 dengan rincian:

Uraian	31-Des-21 (Rp)	31-Des-20 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren (%)
Beban Barang Pakai Habis	**156.493.874.046,00**	**3.559.267.571,00**	**152.934.606.475**	**4.297**
Beban Makanan dan Minuman Rapat	35.720.805.614,00	0,00	35.720.805.614,00	0,00
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	5.178.092.461,00	0,00	5.178.092.461,00	0,00
Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	49.968.327.452,00	0,00	49.968.327.452,00	0,00
Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	10.301.592.900,00	0,00	10.301.592.900,00	0,00
Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas	2.366.536.183,00	0,00	2.366.536.183,00	0,00

Uraian	31-Des-21 (Rp)	31-Des-20 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren (%)
Pelayanan Urusan Sosial				
Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	44.610.116.679,00	0,00	44.610.116.679,00	0,00
Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH	283.945.000,00	0,00	283.945.000,00	0,00
Beban Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	391.967.500,00	0,00	391.967.500,00	0,00
Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	436.265.000,00	420.640.000,00	15.625.000,00	3,71
Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	451.460.000,00	76.250.000,00	375.210.000,00	492,08
Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	1.435.461.780,00	666.272.700,00	769.189.080,00	115,45
Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	2.374.342.155,00	1.137.978.400,00	1.236.363.755,00	108,65
Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)	60.192.000,00	0,00	60.192.000,00	0,00
Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)	55.906.000,00	24.367.500,00	31.538.500,00	129,43
Beban Pakaian Penyelamatan	344.683.458,00	0,00	344.683.458,00	0,00
Beban Pakaian Siaga	112.974.334,00	0,00	112.974.334,00	0,00
Beban Pakaian Teknik	125.848.914,00	0,00	125.848.914,00	0,00
Beban Pakaian Pelatihan Kerja	566.742.626,00	0,00	566.742.626,00	0,00
Beban Pakaian Kerja Laboratorium	50.592.800,00	0,00	50.592.800,00	0,00
Beban Pakaian Kerja Bengkel	4.110.000,00	0,00	4.110.000,00	0,00
Beban Pakaian KORPRI	1.130.000,00	13.860.000,00	(12.730.000,00)	(91,85)
Beban Pakaian Adat Daerah	585.340.840,00	620.706.186,00	(35.365.346,00)	(5,70)
Beban Pakaian Batik Tradisional	630.374.050,00	273.175.000,00	357.199.050,00	130,76
Beban Pakaian Olahraga	263.706.300,00	326.017.785,00	(62.311.485,00)	(19,11)
Beban Pakaian Paskibraka	173.360.000,00	0,00	173.360.000,00	0,00
Beban Cetak dan Penggandaan	**0,00**	**2.552.515.136,00**	**(2.552.515.136,00)**	**(100,00)**
Beban Penggandaan	0,00	2.283.406.531,00	(2.283.406.531,00)	(100,00)
Beban Penjilidan	0,00	269.108.605,00	(269.108.605,00)	(100,00)
Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	**0,00**	**652.275.899,00**	**(652.275.899,00)**	**(100,00)**
Beban Atribut Kelengkapan Pakaian Dinas	0,00	36.330.000,00	(36.330.000,00)	(100,00)
Beban Atribut Kelengkapan Pakaian Kerja Lapangan	0,00	224.383.799,00	(224.383.799,00)	(100,00)

Uraian	31-Des-21 (Rp)	31-Des-20 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren (%)
Beban Pakaian Khusus Lainnya	0,00	321.942.100,00	(321.942.100,00)	(100,00)
Beban Pakaian Khusus	0,00	64.220.000,00	(64.220.000,00)	(100,00)
Beban Pakaian Hansip/Linmas	0,00	5.400.000,00	(5.400.000,00)	(100,00)
Beban Peralatan Rumah Tangga. - LO	**0,00**	**113.894.411,27**	**(113.894.411,27)**	**(100,00)**
Beban Peralatan Rumah Tangga. - LO	0,00	113.894.411,27	(113.894.411,27)	(100,00)
Beban Hibah Barang atau Jasa kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	**0,00**	**92.518.556.669,70**	**(92.518.556.669,70)**	**(100,00)**
Beban Hibah Barang atau Jasa kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	0,00	25.415.065.669,70	(25.415.065.669,70)	(100,00)
Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga	0,00	62.959.854.000,00	(62.959.854.000,00)	(100,00)
Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	0,00	4.143.637.000,00	(4.143.637.000,00)	(100,00)
Beban Makanan dan Minuman	**0,00**	**94.737.988.212,00**	**(94.737.988.212,00)**	**(100,00)**
Beban makanan dan minuman harian pegawai	0,00	57.650.000,00	(57.650.000,00)	(100,00)
Beban makanan dan minuman rapat	0,00	21.483.916.100,00	(21.483.916.100,00)	(100,00)
Beban makanan dan minuman tamu	0,00	5.538.638.018,00	(5.538.638.018,00)	(100,00)
Beban Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	66.617.899.734,00	(66.617.899.734,00)	(100,00)
Beban makanan dan minuman tamu	0,00	1.080.000,00	(1.080.000,00)	(100,00)
Beban Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	1.038.804.360,00	(1.038.804.360,00)	(100,00)
Uang Saku	**0,00**	**2.652.650.000,00**	**(2.652.650.000,00)**	**(100,00)**
Uang Saku	0,00	2.652.650.000,00	(2.652.650.000,00)	(100,00)
Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis bagi PNS	**0,00**	**1.338.309.263,00**	**(1.338.309.263,00)**	**(100,00)**
Beban Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	0,00	1.075.964.615,00	(1.075.964.615,00)	(100,00)
Beban sosialisasi	0,00	5.200.000,00	(5.200.000,00)	(100,00)
Beban bimbingan teknis	0,00	237.444.648,00	(237.444.648,00)	(100,00)
Beban Mengikuti Seminar	0,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)	(100,00)
Beban Mengikuti Workshop	0,00	16.700.000,00	(16.700.000,00)	(100,00)
Beban Beasiswa Pendidikan PNS	**0,00**	**2.187.423.118,00**	**(2.187.423.118,00)**	**(100,00)**
Beban Beasiswa Tugas Belajar S1	0,00	135.154.000,00	(135.154.000,00)	(100,00)

Uraian	31-Des-21 (Rp)	31-Des-20 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren (%)
Beban Beasiswa Tugas Belajar S2	0,00	1.034.169.118,00	(1.034.169.118,00)	(100,00)
Beban Beasiswa Tugas Belajar S3	0,00	1.018.100.000,00	(1.018.100.000,00)	(100,00)
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	**0,00**	**209.234.870,00**	**(209.234.870,00)**	**(100,00)**
Beban Kursus Singkat/Pelatihan	0,00	99.550.550,00	(99.550.550,00)	(100,00)
Beban Sosialisasi	0,00	4.984.320,00	(4.984.320,00)	(100,00)
Beban Bimbingan Teknis	0,00	104.700.000,00	(104.700.000,00)	(100,00)
Beban Barang dan Jasa BOS	**220.543.501.538,00**	**220.758.340.938,00**	**(214.839.400,00)**	**(0,10)**
Beban Barang dan Jasa BOS	220.543.501.538,00	220.758.340.938,00	(214.839.400,00)	(0,10)
Beban Barang dan Jasa BOSDA	**0,00**	**298.134.506.867,00**	**(298.134.506.867,00)**	**(100,00)**
Beban Barang dan Jasa Dana BOSDA SMA Negeri	0,00	201.723.622.403,00	(201.723.622.403,00)	(100,00)
Beban Barang dan Jasa Dana BOSDA SMK Negeri	0,00	92.255.554.464,00	(92.255.554.464,00)	(100,00)
Beban Barang dan Jasa Dana BOSDA SLB Negeri	0,00	4.155.330.000,00	(4.155.330.000,00)	(100,00)
Jumlah	**377.037.375.584,00**	**719.414.962.954,97**	**(342.377.587.370,97)**	**(47,59)**

Berikut ini disajikan Beban Barang per OPD periode 1 Januari s.d 31 Desember 2021 dan 2020 dengan rincian:

Uraian	31-Des-21 (Rp)	31-Des-20 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	Tren (%)
Dinas Pendidikan	270.625.951.840,00	610.589.180.403,00	(339.963.228.563,00)	(55,68)
Dinas Kesehatan	13.297.052.561,00	3.688.413.150,00	9.608.639.411,00	260,51
Dinas Pekerjaan Umum, Penatan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	756.404.350,00	577.226.800,00	179.177.550,00	31,04
Satuan Polisi Pamong Praja	1.643.162.128,00	925.168.600,00	717.993.528,00	77,61
Badan Penaggulangan Bencana Daerah	911.982.946,00	462.662.600,00	449.320.346,00	97,12
Dinas Sosial	2.641.777.883,00	2.360.904.860,00	280.873.023,00	11,90

Uraian	31-Des-21 (Rp)	31-Des-20 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	Tren (%)
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	613.503.500,00	1.203.717.100,00	(590.213.600,00)	(49,03)
Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	168.471.100,00	382.995.430,00	(214.524.330,00)	(56,01)
Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura	292.000.865,00	5.064.882.567,50	(4.772.881.702,50)	(94,23)
Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	868.195.525,00	889.869.078,00	(21.673.553,00)	(2,44)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	142.138.000,00	530.678.152,00	(388.540.152,00)	(73,22)
Dinas Perhubungan	285.092.000,00	755.071.800,00	(469.979.800,00)	(62,24)
Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	465.954.500,00	3.310.752.660,00	(2.844.798.160,00)	(85,93)
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	150.611.000,00	84.966.200,00	65.644.800,00	77,26
Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	3.623.423.979,00	5.470.235.360,00	(1.846.811.381,00)	(33,76)
Dinas Kebudayaan	510.068.900,00	838.418.000,00	(328.349.100,00)	(39,16)
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	84.444.000,00	148.339.919,00	(63.895.919,00)	(43,07)
Dinas Kelautan Dan Perikanan	258.069.532,00	274.136.500,00	(16.066.968,00)	(5,86)
Dinas Pariwisata	744.177.000,00	864.271.296,00	(120.094.296,00)	(13,90)
Dinas Perkebunan	176.854.000,00	237.077.463,20	(60.223.463,20)	(25,40)
Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	232.086.500,00	182.207.000,00	49.879.500,00	27,38
Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	460.895.300,00	526.939.649,00	(66.044.349,00)	(12,53)
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	827.850.000,00	1.270.007.750,00	(442.157.750,00)	(34,82)
Sekretariat Daerah	12.048.184.640,00	10.688.489.267,00	1.359.695.373,00	12,72
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	61.214.556.125,00	57.266.491.440,00	3.948.064.685,00	6,89
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	707.854.000,00	1.406.711.100,00	(698.857.100,00)	(49,68)

Uraian	31-Des-21 (Rp)	31-Des-20 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	Tren (%)
Badan Pendapatan Daerah	499.914.000,00	341.987.500,00	157.926.500,00	46,18
Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	637.878.000,00	464.040.520,00	173.837.480,00	37,46
Badan Kepegawaian Daerah	671.527.476,00	2.964.458.518,00	(2.292.931.042,00)	(77,35)
Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia	487.320.234,00	1.091.170.937,27	(603.850.703,27)	(55,34)
Badan Penghubung	393.834.700,00	403.635.840,00	(9.801.140,00)	(2,43)
Inspektorat	272.156.000,00	370.295.015,00	(98.139.015,00)	(26,50)
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	323.983.000,00	93.866.050,00	230.116.950,00	245,15
Rsud Arifin Ahmad	0,00	1.272.671.982,00	(1.272.671.982,00)	(100,00)
Rsj Tampan	0,00	244.293.148,00	(244.293.148,00)	(100,00)
Rsud Petala Bumi	0,00	2.168.729.300,00	(2.168.729.300,00)	(100,00)
Ppkd	0,00	0,00	0,00	0,00
Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	**377.037.375.584,00**	**719.414.962.954,97**	**(342.377.587.370,97)**	**(47,59)**

Kontribusi Beban Barang-LO sebesar Rp377.037.375.584,00 atau 3,84% terhadap seluruh beban Tahun 2021.

5.3.14 Beban Jasa-LO

Realisasi Beban Jasa-LO per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp889.787.587.540,97 dan Rp637.191.871.341,10 atau terjadi peningkatan sebesar Rp252.595.716.199,87 atau 39,64%. Beban Jasa - LO untuk periode 1 Januari s.d 31 Desember 2021 dan 2020 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	31-Des-21 (Rp)	31-Des-20 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren (%)
Beban Jasa	**889.787.587.540,97**	**637.191.871.341,10**	**252.595.716.199,87**	**39,64**
Beban Jasa Kantor	**655.303.042.401,14**	**14.603.116.000,00**	**640.699.926.401,14**	**4.387,42**
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.812.928.000,00	0,00	4.812.928.000,00	0,00
Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	2.963.698.112,00	0,00	2.963.698.112,00	0,00
Beban Honorarium Pemberi Keterangan	330.600.000,00	0,00	330.600.000,00	0,00

Uraian	31-Des-21 (Rp)	31-Des-20 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren (%)
Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara				
Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	195.200.000,00	0,00	195.200.000,00	0,00
Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	625.816.900,00	0,00	625.816.900,00	0,00
Beban Honorarium Penyelenggara Ujian	10.875.000,00	0,00	10.875.000,00	0,00
Beban Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	1.005.000.000,00	0,00	1.005.000.000,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Pendidikan	256.967.938.800,00	0,00	256.967.938.800,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Kesehatan	71.716.499.111,50	0,00	71.716.499.111,50	0,00
Beban Jasa Tenaga Laboratorium	4.850.858.274,00	0,00	4.850.858.274,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	16.950.512.168,00	0,00	16.950.512.168,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	11.130.109.144,00	0,00	11.130.109.144,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Penanganan Bencana	642.000.000,00	0,00	642.000.000,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Penanganan Sosial	606.249.390,00	0,00	606.249.390,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Perhubungan	1.008.313.712,00	0,00	1.008.313.712,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	2.032.490.340,00	0,00	2.032.490.340,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	1.018.269.120,00	0,00	1.018.269.120,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	476.550.000,00	0,00	476.550.000,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Administrasi	18.774.172.035,00	0,00	18.774.172.035,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	34.336.583.817,00	0,00	34.336.583.817,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	3.691.119.434,00	0,00	3.691.119.434,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Ahli	19.707.206.182,00	0,00	19.707.206.182,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	43.451.411.076,46	0,00	43.451.411.076,46	0,00
Beban Jasa Tenaga Keamanan	40.596.252.431,18	0,00	40.596.252.431,18	0,00
Beban Jasa Tenaga Supir	2.410.237.069,00	0,00	2.410.237.069,00	0,00

Uraian	31-Des-21 (Rp)	31-Des-20 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren (%)
Beban Jasa Tenaga Juru Masak	132.208.973,00	0,00	132.208.973,00	0,00
Beban Jasa Audit/Surveillance ISO	410.870.000,00	0,00	410.870.000,00	0,00
Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	554.025.000,00	0,00	554.025.000,00	0,00
Beban Jasa Tata Rias	25.200.000,00	0,00	25.200.000,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	7.789.952.382,00	0,00	7.789.952.382,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Operator Tiket	168.030.384,00	0,00	168.030.384,00	0,00
Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	282.455.440,00	0,00	282.455.440,00	0,00
Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	12.835.000,00	0,00	12.835.000,00	0,00
Beban Jasa Penulisan dan Penerjemahan	432.660.000,00	0,00	432.660.000,00	0,00
Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	49.500.000,00	0,00	49.500.000,00	0,00
Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	28.253.271.637,00	0,00	28.253.271.637,00	0,00
Beban Jasa Kontribusi Asosiasi	172.000.000,00	0,00	172.000.000,00	0,00
Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	539.368.558,00	0,00	539.368.558,00	0,00
Beban Jasa Kalibrasi	237.567.000,00	0,00	237.567.000,00	0,00
Beban Jasa Pengolahan Sampah	423.445.800,00	0,00	423.445.800,00	0,00
Beban Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	1.459.682.200,00	0,00	1.459.682.200,00	0,00
Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	11.969.456.572,00	0,00	11.969.456.572,00	0,00
Beban Jasa Operator Kapal	393.486.280,00	0,00	393.486.280,00	0,00
Beban Tagihan Telepon	461.824.114,00	0,00	461.824.114,00	0,00
Beban Tagihan Air	1.003.156.209,00	0,00	1.003.156.209,00	0,00
Beban Tagihan Listrik	41.300.853.583,00	0,00	41.300.853.583,00	0,00
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	606.587.149,00	0,00	606.587.149,00	0,00
Beban Kawat/Faksimili/Inte	11.921.722.775,00	0,00	11.921.722.775,00	0,00

Uraian	31-Des-21 (Rp)	31-Des-20 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren (%)
rnet/TV Berlangganan				
Beban Paket/Pengiriman	3.343.272.095,00	0,00	3.343.272.095,00	0,00
Beban Penambahan Daya	9.713.500,00	0,00	9.713.500,00	0,00
Beban Registrasi/Keanggotaan	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2.295.178.551,00	0,00	2.295.178.551,00	0,00
Beban Pengolahan Air Limbah	334.989.083,00	0,00	334.989.083,00	0,00
Beban Medical Check Up	388.840.000,00	0,00	388.840.000,00	0,00
Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	0,00	14.603.116.000,00	(14.603.116.000,00)	(100,00)
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	**203.348.911.416,96**	**24.985.000,00**	**203.323.926.416,96**	**813.783,98**
Beban Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	42.063.430.500,00	0,00	42.063.430.500,00	0,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	160.941.484.000,00	0,00	160.941.484.000,00	0,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	332.934.504,00	0,00	332.934.504,00	0,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	11.062.412,96	0,00	11.062.412,96	0,00
Beban Asuransi Barang Milik Daerah	0,00	24.985.000,00	(24.985.000,00)	(100,00)
Beban Premi Asuransi	**0,00**	**143.412.271.725,58**	**(143.412.271.725,58)**	**(100,00)**
Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan	0,00	77.576.557,38	(77.576.557,38)	(100,00)
Beban Premi Asuransi Kecelakaan	0,00	873.945,20	(873.945,20)	(100,00)
Beban Iuran BPJS Kesehatan	0,00	143.333.821.223,00	(143.333.821.223,00)	(100,00)
Beban Sewa Tanah	**50.000.000,00**	**0,00**	**50.000.000,00**	**0,00**
Beban Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	**8.723.442.050,00**	**0,00**	**8.723.442.050,00**	**0,00**
Beban Sewa Grader	205.871.335,00	0,00	205.871.335,00	0,00
Beban Sewa Excavator	122.703.500,00	0,00	122.703.500,00	0,00
Beban Sewa Loader	31.185.000,00	0,00	31.185.000,00	0,00
Beban Sewa Alat Besar Darat Lainnya	2.764.863.665,00	0,00	2.764.863.665,00	0,00

Uraian	31-Des-21 (Rp)	31-Des-20 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren (%)
Beban Sewa Alat Besar Apung Lainnya	20.020.550,00	0,00	20.020.550,00	0,00
Beban Sewa Electric Generating Set	24.500.000,00	0,00	24.500.000,00	0,00
Beban Sewa Alat Bantu Lainnya	53.482.000,00	0,00	53.482.000,00	0,00
Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	639.326.000,00	0,00	639.326.000,00	0,00
Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	269.673.500,00	0,00	269.673.500,00	0,00
Beban Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	92.120.000,00	0,00	92.120.000,00	0,00
Beban Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
Beban Sewa Perkakas Bengkel Kerja	10.200.000,00	0,00	10.200.000,00	0,00
Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	9.710.000,00	0,00	9.710.000,00	0,00
Beban Sewa Mebel	11.636.500,00	0,00	11.636.500,00	0,00
Beban Sewa Alat Pendingin	59.000.000,00	0,00	59.000.000,00	0,00
Beban Sewa Peralatan Studio Audio	4.389.200.000,00	0,00	4.389.200.000,00	0,00
Beban Sewa Peralatan Studio Video dan Film	14.950.000,00	0,00	14.950.000,00	0,00
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	**5.154.945.769,87**	**0,00**	**5.154.945.769,87**	**0,00**
Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor	1.744.601.689,87	0,00	1.744.601.689,87	0,00
Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	199.450.000,00	0,00	199.450.000,00	0,00
Beban Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	479.726.000,00	0,00	479.726.000,00	0,00
Beban Sewa Asrama	192.500.000,00	0,00	192.500.000,00	0,00
Beban Sewa Hotel	2.495.776.080,00	0,00	2.495.776.080,00	0,00
Beban Sewa Motel	42.892.000,00	0,00	42.892.000,00	0,00
Beban Sewa Rumah /Gedung/Gudang/Parkir	**0,00**	**25.177.702.834,62**	**(25.177.702.834,62)**	**(100,00)**
Beban sewa gedung/ kantor/tempat	0,00	5.718.797.834,62	(5.718.797.834,62)	(100,00)
Beban sewa ruang rapat/pertemuan	0,00	19.448.905.000,00	(19.448.905.000,00)	(100,00)
Beban sewa Tanah	0,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)	(100,00)

Uraian	31-Des-21 (Rp)	31-Des-20 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren (%)
Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	**627.506.400,00**	**0,00**	**627.506.400,00**	**0,00**
Beban Sewa Audio Visual	524.756.400,00	0,00	524.756.400,00	0,00
Beban Sewa Alat Musik	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00
Beban Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	18.750.000,00	0,00	18.750.000,00	0,00
Beban Sewa Alat Bercorak Kebudayaan	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	0,00
Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	**0,00**	**3.254.877.580,00**	**(3.254.877.580,00)**	**(100,00)**
Beban Sewa Meja Kursi	0,00	207.007.000,00	(207.007.000,00)	(100,00)
Beban Sewa Generator	0,00	64.765.000,00	(64.765.000,00)	(100,00)
Beban Sewa Tenda	0,00	593.418.000,00	(593.418.000,00)	(100,00)
Beban Sewa Pakaian Adat/Tradisional	0,00	62.900.000,00	(62.900.000,00)	(100,00)
Beban Sewa Sound System dan Alat Elektronik	0,00	729.810.000,00	(729.810.000,00)	(100,00)
Beban Sewa Mesin Peralatan Kerja	0,00	1.549.377.580,00	(1.549.377.580,00)	(100,00)
Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Bercorak Kebudayaan/Kesenian	0,00	47.600.000,00	(47.600.000,00)	(100,00)
Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	**8.819.298.450,00**	**0,00**	**8.819.298.450,00**	**0,00**
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	40.700.000,00	0,00	40.700.000,00	0,00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	74.472.750,00	0,00	74.472.750,00	0,00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	118.992.500,00	0,00	118.992.500,00	0,00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	85.057.500,00	0,00	85.057.500,00	0,00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk	881.611.500,00	0,00	881.611.500,00	0,00

Uraian	31-Des-21 (Rp)	31-Des-20 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren (%)
Pekerjaan Teknik Sipil Air				
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal dalam Bangunan	64.452.939,00	0,00	64.452.939,00	0,00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	4.162.450.000,00	0,00	4.162.450.000,00	0,00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	622.802.400,00	0,00	622.802.400,00	0,00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	965.800.000,00	0,00	965.800.000,00	0,00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	9.368.000,00	0,00	9.368.000,00	0,00
Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	54.450.000,00	0,00	54.450.000,00	0,00
Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	248.510.861,00	0,00	248.510.861,00	0,00
Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	319.203.500,00	0,00	319.203.500,00	0,00
Beban Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	38.000.000,00	0,00	38.000.000,00	0,00
Beban Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa	17.594.000,00	0,00	17.594.000,00	0,00

Uraian	31-Des-21 (Rp)	31-Des-20 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren (%)
Pengujian dan Analisa Parameter Fisikal				
Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	649.900.000,00	0,00	649.900.000,00	0,00
Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	179.190.000,00	0,00	179.190.000,00	0,00
Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Bangunan	286.742.500,00	0,00	286.742.500,00	0,00
Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	**2.128.445.900,00**	**0,00**	**2.128.445.900,00**	**0,00**
Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan	350.000.000,00	0,00	350.000.000,00	0,00
Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	117.483.300,00	0,00	117.483.300,00	0,00
Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	139.216.000,00	0,00	139.216.000,00	0,00
Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	243.540.000,00	0,00	243.540.000,00	0,00
Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	931.607.600,00	0,00	931.607.600,00	0,00
Beban Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Perencanaan Kepariwisataan	262.113.500,00	0,00	262.113.500,00	0,00
Beban Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Studi Kelayakan Kepariwisataan	84.485.500,00	0,00	84.485.500,00	0,00
Beban Jasa Konsultasi	**0,00**	**6.854.148.874,00**	**(6.854.148.874,00)**	**(100,00)**
Beban Jasa Konsultansi Penelitian	0,00	534.066.750,00	(534.066.750,00)	(100,00)

Uraian	31-Des-21 (Rp)	31-Des-20 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren (%)
Beban Jasa Konsultansi Teknologi Informasi	0,00	213.777.600,00	(213.777.600,00)	(100,00)
Beban Jasa Konsultansi Survey	0,00	2.525.950.460,00	(2.525.950.460,00)	(100,00)
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	2.772.256.100,00	(2.772.256.100,00)	(100,00)
Beban Jasa Konsultansi Pengawasan	0,00	370.594.500,00	(370.594.500,00)	(100,00)
Beban Jasa Konsultansi Manajemen	0,00	169.482.500,00	(169.482.500,00)	(100,00)
Beban Jasa Konsultansi Event Organizer	0,00	152.045.964,00	(152.045.964,00)	(100,00)
Beban Jasa Konsultansi Hukum	0,00	115.975.000,00	(115.975.000,00)	(100,00)
Beban Beasiswa Pendidikan PNS	**4.355.983.300,00**	**0,00**	**4.355.983.300,00**	**0,00**
Beban Beasiswa Tugas Belajar S2	3.251.532.000,00	0,00	3.251.532.000,00	0,00
Beban Beasiswa Tugas Belajar S3	1.104.451.300,00	0,00	1.104.451.300,00	0,00
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	**1.276.011.853,00**	**0,00**	**1.276.011.853,00**	**0,00**
Beban Kursus Singkat/Pelatihan	815.698.142,00	0,00	815.698.142,00	0,00
Beban Bimbingan Teknis	185.813.711,00	0,00	185.813.711,00	0,00
Beban Diklat Kepemimpinan	274.500.000,00	0,00	274.500.000,00	0,00
Beban Jasa Lainnya	**0,00**	**148.043.584.579,90**	**(148.043.584.579,90)**	**(100,00)**
Beban Jasa Pemulangan Jenazah Pasien	0,00	1.274.105.844,00	(1.274.105.844,00)	(100,00)
Beban Jasa Keamanan	0,00	863.627.546,00	(863.627.546,00)	(100,00)
Beban Jasa Perawatan Peralatan Kantor	0,00	42.556.618.406,00	(42.556.618.406,00)	(100,00)
Beban Surat Kabar/Majalah	0,00	1.047.618.240,00	(1.047.618.240,00)	(100,00)
Beban Kawat/Faksimili/Internet	0,00	10.280.782.871,00	(10.280.782.871,00)	(100,00)
Beban Paket/Pengiriman	0,00	595.810.785,00	(595.810.785,00)	(100,00)
Beban Sertifikasi	0,00	278.421.750,00	(278.421.750,00)	(100,00)
Beban Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	5.178.042.482,00	(5.178.042.482,00)	(100,00)

Uraian	31-Des-21 (Rp)	31-Des-20 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren (%)
Beban Jasa Perawatan Kesehatan	0,00	10.023.872.055,00	(10.023.872.055,00)	(100,00)
Beban Jasa Analisis di Laboratorium	0,00	292.551.000,00	(292.551.000,00)	(100,00)
Beban Jasa Dekorasi	0,00	771.401.700,00	(771.401.700,00)	(100,00)
Beban Jasa Perawatan Bangunan	0,00	1.207.722.894,00	(1.207.722.894,00)	(100,00)
Beban Jasa Instalasi	0,00	487.422.000,00	(487.422.000,00)	(100,00)
Beban Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	0,00	273.251.114,00	(273.251.114,00)	(100,00)
Beban Jasa Rehabilitasi Bangunan	0,00	513.126.028,90	(513.126.028,90)	(100,00)
Beban Jasa Pemulangan Jenazah Pasien	0,00	150.000.000,00	(150.000.000,00)	(100,00)
Beban Jasa Keamanan	0,00	24.000.558.264,00	(24.000.558.264,00)	(100,00)
Beban Jasa Perawatan Peralatan Kantor	0,00	25.100.000,00	(25.100.000,00)	(100,00)
Beban Administrasi Perjalanan Ke Luar Negeri	0,00	399.503.750,00	(399.503.750,00)	(100,00)
Beban Jasa Publikasi Media Cetak	0,00	8.274.654.200,00	(8.274.654.200,00)	(100,00)
Beban Jasa Publikasi Media Audio Visual	0,00	3.612.990.000,00	(3.612.990.000,00)	(100,00)
Beban Jasa Publikasi Media Online	0,00	3.376.655.880,00	(3.376.655.880,00)	(100,00)
Beban Jasa Kebersihan Perlengkapan Rumah Tangga	0,00	123.830.700,00	(123.830.700,00)	(100,00)
Beban Jasa Kebersihan Kantor	0,00	23.128.435.271,00	(23.128.435.271,00)	(100,00)
Beban jasa pelayanan perpustakaan daerah	0,00	103.910.000,00	(103.910.000,00)	(100,00)
Beban jasa penanganan perkara hukum	0,00	122.100.000,00	(122.100.000,00)	(100,00)
Beban iuran keanggotaan - LO	0,00	217.000.000,00	(217.000.000,00)	(100,00)
Beban Jasa Kalibrasi Peralatan Medis	0,00	1.198.995.600,00	(1.198.995.600,00)	(100,00)
Beban Jasa Publikasi Luar/Dalam Ruang	0,00	7.665.476.199,00	(7.665.476.199,00)	(100,00)
Beban Jasa Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum Penataan Ruang	**0,00**	**2.317.280.000,00**	**(2.317.280.000,00)**	**(100,00)**
Operator Alat Berat	0,00	277.360.000,00	(277.360.000,00)	(100,00)
Pengawas Lapangan Pekerjaan Umum	0,00	969.120.000,00	(969.120.000,00)	(100,00)
Analis Laboratorium Pengujian	0,00	667.200.000,00	(667.200.000,00)	(100,00)

Uraian	31-Des-21 (Rp)	31-Des-20 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren (%)
Teknisi Perpipaan	0,00	97.600.000,00	(97.600.000,00)	(100,00)
Beban Jasa Operator Instalasi Pengelolaan Air Minum	0,00	96.720.000,00	(96.720.000,00)	(100,00)
Beban Jasa Operator Intake	0,00	53.520.000,00	(53.520.000,00)	(100,00)
Beban Jasa Operator Scada	0,00	77.680.000,00	(77.680.000,00)	(100,00)
Beban Jasa Pengawas Perpipaan	0,00	78.080.000,00	(78.080.000,00)	(100,00)
Beban Jasa Kegiatan Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	**0,00**	**3.441.700.400,00**	**(3.441.700.400,00)**	**(100,00)**
Tukang Bangunan	0,00	3.401.940.400,00	(3.401.940.400,00)	(100,00)
Pembantu Tukang Bangunan	0,00	39.760.000,00	(39.760.000,00)	(100,00)
Beban Jasa Kegiatan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat	**0,00**	**25.666.766.040,00**	**(25.666.766.040,00)**	**(100,00)**
Petugas Jaga Harian	0,00	11.702.418.000,00	(11.702.418.000,00)	(100,00)
Satuan Pengamanan (Satpam)	0,00	4.315.046.320,00	(4.315.046.320,00)	(100,00)
Tenaga Bantuan Satuan Polisi Pamong Praja (Banpol)	0,00	9.258.181.720,00	(9.258.181.720,00)	(100,00)
Tenaga Pengamanan Pertandingan	0,00	1.200.000,00	(1.200.000,00)	(100,00)
Petugas Patroli Pengawal Gubernur Dan Muspida	0,00	389.920.000,00	(389.920.000,00)	(100,00)
Beban Jasa Kegiatan Urusan Sosial	**0,00**	**3.008.776.285,00**	**(3.008.776.285,00)**	**(100,00)**
Penceramah Agama	0,00	124.050.000,00	(124.050.000,00)	(100,00)
Imam Masjid	0,00	51.000.000,00	(51.000.000,00)	(100,00)
Muadzin	0,00	13.500.000,00	(13.500.000,00)	(100,00)
Pengantar Makanan	0,00	61.600.000,00	(61.600.000,00)	(100,00)
Pengasuh Anak	0,00	174.720.000,00	(174.720.000,00)	(100,00)
Pembina Kerohanian	0,00	82.500.000,00	(82.500.000,00)	(100,00)
Psikolog Anak	0,00	7.500.000,00	(7.500.000,00)	(100,00)
Pengelola Asrama	0,00	1.095.280.000,00	(1.095.280.000,00)	(100,00)
Pekerja Sosial	0,00	267.840.000,00	(267.840.000,00)	(100,00)

Uraian	31-Des-21 (Rp)	31-Des-20 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren (%)
Tenaga Gharim	0,00	132.000.000,00	(132.000.000,00)	(100,00)
Pembaca Al-Quran	0,00	6.200.000,00	(6.200.000,00)	(100,00)
Pramu Bhakti	0,00	23.040.000,00	(23.040.000,00)	(100,00)
Petugas Ekstrakurikuler	0,00	71.520.000,00	(71.520.000,00)	(100,00)
Tenaga Loundry	0,00	275.596.285,00	(275.596.285,00)	(100,00)
Tukang Masak	0,00	127.200.000,00	(127.200.000,00)	(100,00)
Pembimbing Fisik/Mental	0,00	114.000.000,00	(114.000.000,00)	(100,00)
Pramu Lansia	0,00	368.480.000,00	(368.480.000,00)	(100,00)
Petugas Memandikan Mayat	0,00	6.000.000,00	(6.000.000,00)	(100,00)
Petugas Penggali Kubur	0,00	6.750.000,00	(6.750.000,00)	(100,00)
Beban Jasa Kegiatan Urusan Lainnya	**0,00**	**90.708.101.228,00**	**(90.708.101.228,00)**	**(100,00)**
Petugas Kebersihan Harian	0,00	17.171.363.680,00	(17.171.363.680,00)	(100,00)
Tukang Kebun Harian	0,00	1.818.080.000,00	(1.818.080.000,00)	(100,00)
Tenaga Supir Kendaraan	0,00	2.241.400.000,00	(2.241.400.000,00)	(100,00)
Analyst Server	0,00	136.300.000,00	(136.300.000,00)	(100,00)
Analyst Technical Support	0,00	126.480.000,00	(126.480.000,00)	(100,00)
Database Administrator	0,00	581.000.000,00	(581.000.000,00)	(100,00)
EDP (Electronic Data Processing) Operators	0,00	1.576.439.667,00	(1.576.439.667,00)	(100,00)
Network Administrator	0,00	209.490.000,00	(209.490.000,00)	(100,00)
Networking Engineer	0,00	994.100.000,00	(994.100.000,00)	(100,00)
Operator Komputer	0,00	33.013.099.369,00	(33.013.099.369,00)	(100,00)
Operator Sistem Informasi	0,00	308.470.000,00	(308.470.000,00)	(100,00)
System Administrator	0,00	252.470.000,00	(252.470.000,00)	(100,00)
System Analyst	0,00	382.370.000,00	(382.370.000,00)	(100,00)
Technical Support Administration	0,00	529.593.000,00	(529.593.000,00)	(100,00)
Web Administrator	0,00	43.600.000,00	(43.600.000,00)	(100,00)
Web Designer	0,00	297.800.000,00	(297.800.000,00)	(100,00)

Uraian	31-Des-21 (Rp)	31-Des-20 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren (%)
Editor Berita	0,00	750.000,00	(750.000,00)	(100,00)
Kameramen	0,00	758.680.000,00	(758.680.000,00)	(100,00)
Koordinator Liputan	0,00	29.000.000,00	(29.000.000,00)	(100,00)
Pembuat Artikel	0,00	64.400.000,00	(64.400.000,00)	(100,00)
Penyusun Buletin	0,00	1.200.000,00	(1.200.000,00)	(100,00)
Photografer	0,00	655.230.000,00	(655.230.000,00)	(100,00)
Programmer	0,00	1.201.777.000,00	(1.201.777.000,00)	(100,00)
Redaktur	0,00	900.000,00	(900.000,00)	(100,00)
Redaktur Pelaksana	0,00	600.000,00	(600.000,00)	(100,00)
Reporter/Kontributor	0,00	415.800.000,00	(415.800.000,00)	(100,00)
Sekretaris Redaksi	0,00	450.000,00	(450.000,00)	(100,00)
Tenaga Audio Visual	0,00	126.034.000,00	(126.034.000,00)	(100,00)
Editor Video/Photo	0,00	252.270.000,00	(252.270.000,00)	(100,00)
Penjaga Ruang Layanan Internet Gratis	0,00	21.040.000,00	(21.040.000,00)	(100,00)
Tenaga Komisi Informasi Provinsi Riau	0,00	996.500.000,00	(996.500.000,00)	(100,00)
Tenaga Radio	0,00	150.580.000,00	(150.580.000,00)	(100,00)
Pelatih	0,00	1.973.550.000,00	(1.973.550.000,00)	(100,00)
Asisten Pelatih	0,00	1.152.000.000,00	(1.152.000.000,00)	(100,00)
Instruktur Pusat Kebugaran (Fitness)	0,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(100,00)
Juri Pertandingan	0,00	14.400.000,00	(14.400.000,00)	(100,00)
Official	0,00	70.220.000,00	(70.220.000,00)	(100,00)
Instruktur Senam	0,00	88.100.000,00	(88.100.000,00)	(100,00)
Show Director	0,00	2.500.000,00	(2.500.000,00)	(100,00)
Stage Manager	0,00	4.650.000,00	(4.650.000,00)	(100,00)
Pelaku Senirupa	0,00	14.400.000,00	(14.400.000,00)	(100,00)
Penari	0,00	61.350.000,00	(61.350.000,00)	(100,00)
Pemusik	0,00	159.450.000,00	(159.450.000,00)	(100,00)

Uraian	31-Des-21 (Rp)	31-Des-20 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren (%)
Teater	0,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(100,00)
Juri Seni	0,00	10.500.000,00	(10.500.000,00)	(100,00)
Narasumber Seni Budaya	0,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)	(100,00)
Kurator Seni Budaya	0,00	15.000.000,00	(15.000.000,00)	(100,00)
Penyanyi	0,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)	(100,00)
Penata Rias/Busana	0,00	3.400.000,00	(3.400.000,00)	(100,00)
Tenaga Layanan Perpustakaan	0,00	1.226.010.000,00	(1.226.010.000,00)	(100,00)
Tenaga Teknis Pembenihan Perikanan	0,00	237.000.000,00	(237.000.000,00)	(100,00)
Nelayan / Petugas Pengelola Kenelayanan	0,00	30.000.000,00	(30.000.000,00)	(100,00)
Tenaga Analis Laboratorium Kelautan dan Perikanan	0,00	231.600.000,00	(231.600.000,00)	(100,00)
Tenaga Teknisi Pemberian Ikan / Petugas Pendataan Perikanan	0,00	84.000.000,00	(84.000.000,00)	(100,00)
Tenaga Penjaga Kapal, Nahkoda, KKM	0,00	248.400.000,00	(248.400.000,00)	(100,00)
Tenaga Teknisi Pendamping Lapangan Perikanan	0,00	153.840.000,00	(153.840.000,00)	(100,00)
Tenaga Teknisi Mekanik Perikanan	0,00	90.000.000,00	(90.000.000,00)	(100,00)
Petugas Pengelola Data Perairan Umum	0,00	24.000.000,00	(24.000.000,00)	(100,00)
Petugas Pengelola Perizinan Perikanan Tangkap	0,00	24.000.000,00	(24.000.000,00)	(100,00)
Petugas Perhitungan Angka Konsumsi Ikan	0,00	24.000.000,00	(24.000.000,00)	(100,00)
Petugas Informasi Pasar	0,00	28.800.000,00	(28.800.000,00)	(100,00)
Petugas Pengelola Data Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	0,00	19.900.000,00	(19.900.000,00)	(100,00)
Pramu Stand Event	0,00	16.950.000,00	(16.950.000,00)	(100,00)
MC Event	0,00	18.250.000,00	(18.250.000,00)	(100,00)
Narator Event	0,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)	(100,00)
Pemandu Wisata	0,00	93.600.000,00	(93.600.000,00)	(100,00)

Uraian	31-Des-21 (Rp)	31-Des-20 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren (%)
Petugas Data Recorder Inseminasi Buatan	0,00	24.000.000,00	(24.000.000,00)	(100,00)
Petugas Kandang Ternak	0,00	75.600.000,00	(75.600.000,00)	(100,00)
Petugas Pemelihara Ternak	0,00	148.960.000,00	(148.960.000,00)	(100,00)
Petugas Pendataan Peternakan	0,00	43.200.000,00	(43.200.000,00)	(100,00)
Petugas Penyedia Pakan Ternak	0,00	460.880.000,00	(460.880.000,00)	(100,00)
Petugas Teknis Supervisor Inseminasi Buatan (IB)	0,00	36.000.000,00	(36.000.000,00)	(100,00)
Petugas Tenaga Medis Peternakan	0,00	326.600.000,00	(326.600.000,00)	(100,00)
Petugas Tenaga Paramedis Kesehatan Hewan	0,00	192.000.000,00	(192.000.000,00)	(100,00)
Tenaga Analisis Laboratorium Pestisida	0,00	48.000.000,00	(48.000.000,00)	(100,00)
Tenaga Pengawas Teknis Lapangan	0,00	552.800.000,00	(552.800.000,00)	(100,00)
Tenaga Perbanyakan Benih Tanaman	0,00	856.360.000,00	(856.360.000,00)	(100,00)
Tenaga Teknis Laboran Peternakan dan Kesehatan Hewan	0,00	195.600.000,00	(195.600.000,00)	(100,00)
Petugas Lapangan Teknis Peternakan	0,00	1.097.100.000,00	(1.097.100.000,00)	(100,00)
Layanan Jasa Produksi Ternak	0,00	201.400.000,00	(201.400.000,00)	(100,00)
Tenaga Elektrikal dan Mekanikal	0,00	983.680.000,00	(983.680.000,00)	(100,00)
Tenaga Teknisi Listrik	0,00	374.240.000,00	(374.240.000,00)	(100,00)
Pengawas Kelistrikan	0,00	401.280.000,00	(401.280.000,00)	(100,00)
Tenaga Teknisi Elektronik	0,00	415.360.000,00	(415.360.000,00)	(100,00)
Tenaga Administrasi BUD/SKPKD/PPKD	0,00	2.493.000.000,00	(2.493.000.000,00)	(100,00)
Tenaga Akuntansi	0,00	96.000.000,00	(96.000.000,00)	(100,00)
Tenaga Administrasi Keuangan	0,00	78.000.000,00	(78.000.000,00)	(100,00)
Tenaga Administrasi Aset	0,00	24.000.000,00	(24.000.000,00)	(100,00)
Instruktur	0,00	73.650.000,00	(73.650.000,00)	(100,00)
Pembantu Instruktur	0,00	77.600.000,00	(77.600.000,00)	(100,00)
Pengajar	0,00	971.120.000,00	(971.120.000,00)	(100,00)
Pembawa Acara	0,00	26.000.000,00	(26.000.000,00)	(100,00)

Uraian	31-Des-21 (Rp)	31-Des-20 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren (%)
Pembaca Doa	0,00	37.600.000,00	(37.600.000,00)	(100,00)
Moderator	0,00	43.350.000,00	(43.350.000,00)	(100,00)
Notulen	0,00	13.450.000,00	(13.450.000,00)	(100,00)
Pemimpin Lagu	0,00	12.800.000,00	(12.800.000,00)	(100,00)
Pengambil Sumpah PNS	0,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)	(100,00)
Pengukuh Sumpah	0,00	13.500.000,00	(13.500.000,00)	(100,00)
Pembantu Lapangan	0,00	1.469.360.000,00	(1.469.360.000,00)	(100,00)
Tenaga Ahli Dalam Rangka Kebijakan Pemerintah Daerah	0,00	36.000.000,00	(36.000.000,00)	(100,00)
Tenaga Ahli Dalam Rangka Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	0,00	122.000.000,00	(122.000.000,00)	(100,00)
Pramu Kantor/Pramusaji KDH/WKDH	0,00	2.263.760.000,00	(2.263.760.000,00)	(100,00)
Pemandu Sumpah	0,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)	(100,00)
Beban Jasa Perorangan Lainnya	0,00	5.879.214.512,00	(5.879.214.512,00)	(100,00)
Petugas Pengelola Data Tindak Pidana Perikanan (TPP)	0,00	48.000.000,00	(48.000.000,00)	(100,00)
Beban Jasa Kegiatan Urusan Pendidikan	**0,00**	**101.435.898.400,00**	**(101.435.898.400,00)**	**(100,00)**
Guru Bantu	0,00	96.361.320.000,00	(96.361.320.000,00)	(100,00)
Guru Huni Pendidikan Marginal	0,00	4.610.978.400,00	(4.610.978.400,00)	(100,00)
Tutor	0,00	463.600.000,00	(463.600.000,00)	(100,00)
Beban Jasa Kegiatan Urusan Kesehatan	**0,00**	**52.501.755.950,00**	**(52.501.755.950,00)**	**(100,00)**
Apoteker	0,00	177.000.000,00	(177.000.000,00)	(100,00)
Bidan	0,00	3.841.464.000,00	(3.841.464.000,00)	(100,00)
Dokter	0,00	1.756.656.364,00	(1.756.656.364,00)	(100,00)
Dokter Spesialis	0,00	173.250.000,00	(173.250.000,00)	(100,00)
Dokter Spesialis Fulltime	0,00	290.000.000,00	(290.000.000,00)	(100,00)
Dokter Spesialis Part Time	0,00	352.500.000,00	(352.500.000,00)	(100,00)
Fisioterapis	0,00	19.200.000,00	(19.200.000,00)	(100,00)
Pekarya Ruangan	0,00	150.000.000,00	(150.000.000,00)	(100,00)

Uraian	31-Des-21 (Rp)	31-Des-20 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren (%)
Pengantar Makanan Pasien	0,00	109.920.000,00	(109.920.000,00)	(100,00)
Perawat	0,00	31.021.899.779,00	(31.021.899.779,00)	(100,00)
Petugas Bahaya Radiasi Tingkat I	0,00	37.950.000,00	(37.950.000,00)	(100,00)
Petugas Bahaya Radiasi Tingkat II	0,00	22.800.000,00	(22.800.000,00)	(100,00)
Petugas Farmasi	0,00	233.040.000,00	(233.040.000,00)	(100,00)
Petugas Laboratorium Kesehatan	0,00	440.440.000,00	(440.440.000,00)	(100,00)
Petugas MR	0,00	144.240.000,00	(144.240.000,00)	(100,00)
Psikolog Klinis	0,00	206.760.000,00	(206.760.000,00)	(100,00)
Tenaga Administrasi Kesehatan	0,00	7.632.660.000,00	(7.632.660.000,00)	(100,00)
Tenaga Analis Laboratorium Kesehatan	0,00	305.550.000,00	(305.550.000,00)	(100,00)
Tenaga Elektromedik	0,00	28.080.000,00	(28.080.000,00)	(100,00)
Tenaga Farmasi Analis Laboratorium	0,00	112.320.000,00	(112.320.000,00)	(100,00)
Tenaga Gizi	0,00	78.480.000,00	(78.480.000,00)	(100,00)
Tenaga Kesehatan Kerja	0,00	200.000,00	(200.000,00)	(100,00)
Tenaga Loundry	0,00	188.981.036,00	(188.981.036,00)	(100,00)
Tenaga Petugas IPAL	0,00	51.367.500,00	(51.367.500,00)	(100,00)
Tenaga Radiologi (Rontgen)	0,00	56.160.000,00	(56.160.000,00)	(100,00)
Tenaga Rehabilitasi Medik	0,00	61.200.000,00	(61.200.000,00)	(100,00)
Tenaga Rekam Medis	0,00	214.360.000,00	(214.360.000,00)	(100,00)
Terapis	0,00	460.200.000,00	(460.200.000,00)	(100,00)
Verifikator Jamkesda	0,00	169.040.000,00	(169.040.000,00)	(100,00)
Insentif Tenaga Kesehatan	0,00	3.771.477.271,00	(3.771.477.271,00)	(100,00)
Pekarya Ruangan	0,00	394.560.000,00	(394.560.000,00)	(100,00)
Beban Perawatan K endaraan Bermotor	**0,00**	**16.740.906.444,00**	**(16.740.906.444,00)**	**(100,00)**
Beban Jasa Service	0,00	3.300.622.533,00	(3.300.622.533,00)	(100,00)
Beban Penggantian Suku Cadang	0,00	5.673.966.500,00	(5.673.966.500,00)	(100,00)
Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	0,00	5.867.805.269,00	(5.867.805.269,00)	(100,00)

Uraian	31-Des-21 (Rp)	31-Des-20 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren (%)
Beban Jasa KIR	0,00	10.246.200,00	(10.246.200,00)	(100,00)
Beban Surat Tanda Nomor Kendaraan	0,00	1.888.265.942,00	(1.888.265.942,00)	(100,00)
Jumlah	**889.787.587.540,97**	**637.191.871.341,10**	**252.595.716.199,87**	**39,64**

Berikut ini disajikan Beban Jasa per OPD periode 1 Januari s.d 31 Desember 2021 dan 2020 dengan rincian:

Uraian	31-Des-21 (Rp)	31-Des-20 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren (%)
Dinas Pendidikan	276.300.717.425,00	119.170.051.531,00	157.130.665.894,00	131,85
Dinas Kesehatan	337.461.240.787,14	189.390.949.960,00	148.070.290.827,14	78,18
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	39.491.605.955,00	22.156.982.507,00	17.334.623.448,00	78,24
Satuan Polisi Pamong Praja	11.750.750.389,00	10.395.892.506,00	1.354.857.883,00	13,03
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.225.653.757,00	1.705.200.152,00	520.453.605,00	30,52
Dinas Sosial	4.990.445.888,00	5.145.645.739,00	(155.199.851,00)	(3,02)
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	3.738.655.478,00	3.787.924.443,00	(49.268.965,00)	(1,30)
Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	1.076.294.483,00	1.177.347.147,00	(101.052.664,00)	(8,58)
Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura	6.077.780.001,00	6.218.793.142,00	(141.013.141,00)	(2,27)
Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	7.228.005.207,00	6.235.002.959,00	993.002.248,00	15,93
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1.859.542.558,00	2.287.965.033,00	(428.422.475,00)	(18,73)
Dinas Perhubungan	4.295.724.996,00	5.126.655.186,00	(830.930.190,00)	(16,21)
Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	11.707.410.070,00	8.631.845.828,00	3.075.564.242,00	35,63
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.639.993.422,00	1.051.732.469,00	588.260.953,00	55,93
Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	14.198.178.009,96	21.253.082.826,58	(7.054.904.816,62)	(33,19)
Dinas Kebudayaan	4.472.740.520,00	4.188.440.980,00	284.299.540,00	6,79
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	3.261.671.927,00	3.413.410.907,00	(151.738.980,00)	(4,45)
Dinas Kelautan Dan Perikanan	3.751.072.895,00	4.147.771.304,00	(396.698.409,00)	(9,56)
Dinas Pariwisata	9.902.119.112,00	7.158.822.002,00	2.743.297.110,00	38,32

Uraian	31-Des-21 (Rp)	31-Des-20 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren (%)
Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura	2.335.675.281,00	2.177.508.154,00	158.167.127,00	7,26
Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	8.311.861.044,00	7.659.154.497,00	652.706.547,00	8,52
Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	1.725.980.410,00	2.045.647.844,00	(319.667.434,00)	(15,63)
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	4.723.259.210,00	4.684.113.937,00	39.145.273,00	0,84
Sekretariat Daerah	29.884.849.957,00	37.787.785.384,90	(7.902.935.427,90)	(20,91)
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	53.191.679.397,00	49.485.828.315,00	3.705.851.082,00	7,49
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	4.991.620.721,00	5.681.598.485,00	(689.977.764,00)	(12,14)
Badan Pendapatan Daerah	20.244.392.062,87	17.660.349.478,62	2.584.042.584,25	14,63
Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	6.109.601.126,00	5.481.874.697,00	627.726.429,00	11,45
Badan Kepegawaian Daerah	5.236.152.595,00	3.428.450.850,00	1.807.701.745,00	52,73
Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia	1.879.869.263,00	1.801.189.685,00	78.679.578,00	4,37
Badan Penghubung	3.168.713.346,00	4.593.609.955,00	(1.424.896.609,00)	(31,02)
Inspektorat	1.278.874.886,00	1.411.757.265,00	(132.882.379,00)	(9,41)
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	1.275.455.362,00	1.071.491.101,00	203.964.261,00	19,04
Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad	0,00	46.857.050.043,00	(46.857.050.043,00)	(100,00)
Rumah Sakit Jiwa Tampan	0,00	9.537.603.068,00	(9.537.603.068,00)	(100,00)
Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi	0,00	13.183.341.960,00	(13.183.341.960,00)	(100,00)
Jumlah	**889.787.587.540,97**	**637.191.871.341,10**	**252.595.716.199,87**	**39,64**

Kontribusi Beban Jasa-LO sebesar Rp889.787.587.540,97 atau 9,06% terhadap seluruh beban Tahun 2021.

5.3.15 Beban Pemeliharan-LO

Realisasi Pemeliharaan-LO per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp89.300.127.078,94 dan Rp90.274.325.475,40 atau terjadi penurunan sebesar Rp974.198.396,46 atau 1,08%. Beban Pemeliharaan merupakan jumlah saldo beban pemeliharaan periode 1 Januari s.d 31 Desember 2021 dan 2020 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	31-Des-21 (Rp)	31-Des-20 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren (%)
Beban Pemeliharaan	**89.300.127.078,94**	**90.274.325.475,40**	**(974.198.396,46)**	**(1,08)**
Beban Pemeliharaan Tanah	**393.585.000,00**	**11.040.000,00**	**382.545.000,00**	**3.465,00**
Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman	393.585.000,00	0,00	393.585.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Tanah	0,00	11.040.000,00	(11.040.000,00)	(100,00)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	**32.926.330.488,50**	**11.744.691.878,00**	**21.181.638.610,50**	**180,35**
Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Grader	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	11.200.000,00	0,00	11.200.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	1.139.297.797,00	0,00	1.139.297.797,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	212.763.420,00	0,00	212.763.420,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Alat Bantu Lainnya	112.930.000,00	0,00	112.930.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	13.034.415.871,00	0,00	13.034.415.871,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-AlatAngkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	2.812.564.983,00	0,00	2.812.564.983,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	156.222.917,00	0,00	156.222.917,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	200.544.000,00	0,00	200.544.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat	519.447.275,00	0,00	519.447.275,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	6.720.000,00	0,00	6.720.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik	13.771.000,00	0,00	13.771.000,00	0,00

Uraian	31-Des-21 (Rp)	31-Des-20 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren (%)
Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan AlatUkur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Khusus	8.918.000,00	0,00	8.918.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pabrik Es	9.600.000,00	0,00	9.600.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya	39.000.000,00	0,00	39.000.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi	15.941.500,00	0,00	15.941.500,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	408.856.356,00	0,00	408.856.356,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	596.703.444,00	0,00	596.703.444,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	126.199.906,00	0,00	126.199.906,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	20.800.000,00	0,00	20.800.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	6.325.113.282,50	0,00	6.325.113.282,50	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	6.400.000,00	0,00	6.400.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	220.595.000,00	0,00	220.595.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	110.224.600,00	0,00	110.224.600,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	78.246.000,00	0,00	78.246.000,00	0,00

Uraian	31-Des-21 (Rp)	31-Des-20 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren (%)
Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar Lainnya	15.750.000,00	0,00	15.750.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	147.294.400,00	0,00	147.294.400,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anak	85.425.000,00	0,00	85.425.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gawat Darurat	84.425.000,00	0,00	84.425.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICU	132.186.000,00	0,00	132.186.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya	569.589.800,00	0,00	569.589.800,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	2.064.490.000,00	0,00	2.064.490.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain	190.770.360,00	0,00	190.770.360,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Populasi	78.147.300,00	0,00	78.147.300,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya	167.006.900,00	0,00	167.006.900,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik	10.266.300,00	0,00	10.266.300,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain	290.653.000,00	0,00	290.653.000,00	0,00

Uraian	31-Des-21 (Rp)	31-Des-20 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren (%)
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	1.156.492.680,00	0,00	1.156.492.680,00	0,00
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	661.522.747,00	0,00	661.522.747,00	0,00
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	97.648.400,00	0,00	97.648.400,00	0,00
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	503.319.000,00	0,00	503.319.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	99.822.000,00	0,00	99.822.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	228.876.250,00	0,00	228.876.250,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Air	39.570.000,00	0,00	39.570.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan	11.200.000,00	0,00	11.200.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Peralatan Mesin	0,00	11.744.691.878,00	(11.744.691.878,00)	(100,00)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	**36.944.068.279,54**	**9.439.548.188,54**	**27.504.520.091,00**	**291,38**
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	9.688.114.716,93	0,00	9.688.114.716,93	0,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium	61.450.000,00	0,00	61.450.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	1.245.761.290,00	0,00	1.245.761.290,00	0,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	506.815.863,00	0,00	506.815.863,00	0,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium	786.623.777,68	0,00	786.623.777,68	0,00

Uraian	31-Des-21 (Rp)	31-Des-20 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren (%)
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.605.016.635,48	0,00	1.605.016.635,48	0,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	19.498.460.181,00	0,00	19.498.460.181,00	0,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	598.604.655,50	0,00	598.604.655,50	0,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	701.228.790,13	0,00	701.228.790,13	0,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama	738.520.000,00	0,00	738.520.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal- Flat/Rumah Susun	199.749.197,82	0,00	199.749.197,82	0,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	1.313.723.172,00	0,00	1.313.723.172,00	0,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	9.439.548.188,54	(9.439.548.188,54)	(100,00)
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	**19.036.143.310,90**	**69.043.994.243,86**	**(50.007.850.932,96)**	**(72,43)**
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jembatan-Jembatan Penyeberangan	953.535.000,00	0,00	953.535.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	8.597.111.156,40	0,00	8.597.111.156,40	0,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai	6.530.464.014,80	0,00	6.530.464.014,80	0,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	1.079.590.404,70	0,00	1.079.590.404,70	0,00

Uraian	31-Des-21 (Rp)	31-Des-20 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren (%)
Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku	707.078.893,00	0,00	707.078.893,00	0,00
Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	28.050.000,00	0,00	28.050.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya	99.542.400,00	0,00	99.542.400,00	0,00
Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi	71.295.000,00	0,00	71.295.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	124.750.000,00	0,00	124.750.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	844.726.442,00	0,00	844.726.442,00	0,00
Beban Pemeliharaan Jalan, Iri gasi, dan Jaringan	0,00	69.043.994.243,86	(69.043.994.243,86)	(100,00)
Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	**0,00**	**35.051.165,00**	**(35.051.165,00)**	**(100,00)**
Beban Pemeliharaan Aset Teta p Lainnya	0,00	35.051.165,00	(35.051.165,00)	(100,00)
Jumlah	**89.300.127.078,94**	**90.274.325.475,40**	**(974.198.396,46)**	**(1,08)**

Berikut ini disajikan Beban Pemeliharaan per OPD periode 1 Januari s.d 31 Desember 2021 dan 2020 dengan rincian:

Uraian	31-Des-21 (Rp)	31-Des-20 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren (%)
Dinas Pendidikan	20.043.827.181,00	100.000.000,00	19.943.827.181,00	19.943,83
Dinas Kesehatan	13.843.641.919,00	918.582.900,00	12.925.059.019,00	1.407,07
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	21.494.317.066,83	68.784.904.438,08	(47.290.587.371,25)	(68,75)
Satuan Polisi Pamong Praja	929.362.400,00	0,00	929.362.400,00	0,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	242.560.500,00	27.334.200,00	215.226.300,00	787,39
Dinas Sosial	420.700.000,00	4.500.000,00	416.200.000,00	9.248,89
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	164.252.000,00	6.625.000,00	157.627.000,00	2.379,28
Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak,	93.784.100,00	0,00	93.784.100,00	0,00

Uraian	31-Des-21 (Rp)	31-Des-20 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren (%)
Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana				
Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura	422.460.873,00	23.842.000,00	398.618.873,00	1.671,92
Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	1.350.239.912,00	60.615.000,00	1.289.624.912,00	2.127,57
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	235.054.022,00	116.600.000,00	118.454.022,00	101,59
Dinas Perhubungan	1.483.060.379,55	0,00	1.483.060.379,55	0,00
Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	573.817.892,00	0,00	573.817.892,00	0,00
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	348.174.350,00	101.191.308,00	246.983.042,00	244,08
Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	491.213.718,00	807.485.960,00	(316.272.242,00)	(39,17)
Dinas Kebudayaan	307.001.700,00	243.963.145,57	63.038.554,43	25,84
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	215.875.913,00	96.256.165,00	119.619.748,00	124,27
Dinas Kelautan Dan Perikanan	677.823.887,00	122.007.500,00	555.816.387,00	455,56
Dinas Pariwisata	222.126.403,00	170.823.455,00	51.302.948,00	30,03
Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura	419.529.799,20	66.193.100,00	353.336.699,20	533,80
Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	825.466.005,90	208.450.289,00	617.015.716,90	296,00
Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	790.744.702,00	131.488.188,00	659.256.514,00	501,38
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	765.603.327,00	108.497.500,00	657.105.827,00	605,64
Sekretariat Daerah	11.029.079.138,36	1.648.551.958,75	9.380.527.179,61	569,02
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	5.227.579.659,00	1.170.769.500,00	4.056.810.159,00	346,51
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	1.008.683.100,00	195.438.000,00	813.245.100,00	416,11
Badan Pendapatan Daerah	1.786.160.234,50	206.830.000,00	1.579.330.234,50	763,59
Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	602.981.610,60	0,00	602.981.610,60	0,00

Uraian	31-Des-21 (Rp)	31-Des-20 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren (%)
Badan Kepegawaian Daerah	428.038.927,00	231.923.000,00	196.115.927,00	84,56
Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia	139.928.432,00	129.267.000,00	10.661.432,00	8,25
Badan Penghubung	2.207.233.400,00	291.562.700,00	1.915.670.700,00	657,04
Inspektorat	373.178.835,00	42.300.000,00	330.878.835,00	782,22
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	136.625.692,00	19.988.650,00	116.637.042,00	583,52
Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad	0,00	13.737.644.607,00	(13.737.644.607,00)	(100,00)
Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi	0,00	500.689.911,00	(500.689.911,00)	(100,00)
Jumlah	**89.300.127.078,94**	**90.274.325.475,40**	**(974.198.396,46)**	**(1,08)**

Kontribusi Beban Pemeliharaan-LO sebesar Rp89.300.127.078,94 atau 0,91% terhadap seluruh beban Tahun 2021.

5.3.16 Beban Perjalanan Dinas-LO

Realisasi Perjalanan Dinas-LO per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp327.807.350.657,00 dan Rp273.336.055.251,00 atau terjadi peningkatan sebesar Rp54.471.295.406,00 atau 19,93%. Beban Perjalanan Dinas merupakan jumlah saldo Beban Perjalanan Dinas periode 1 Januari s.d 31 Desember 2021 dan 2020 dengan rincian:

Uraian	31-Des-21 (Rp)	31-Des-20 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren (%)
Beban Perjalanan Dinas	**327.807.350.657,00**	**273.336.055.251,00**	**54.471.295.406,00**	**19,93**
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	**327.807.350.657,00**	**273.160.965.476,00**	**54.646.385.181,00**	**20,01**
Beban Perjalanan Dinas Biasa	280.696.841.137,00	0,00	280.696.841.137,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas Tetap	214.193.083,00	0,00	214.193.083,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	28.193.626.581,00	0,00	28.193.626.581,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	15.704.944.164,00	0,00	15.704.944.164,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	2.997.745.692,00	0,00	2.997.745.692,00	0,00
Beban perjalanan dinas dalam daerah	0,00	108.332.892.253,00	(108.332.892.253,00)	(100,00)
Beban perjalanan dinas luar daerah	0,00	164.828.073.223,00	(164.828.073.223,00)	(100,00)

Uraian	31-Des-21 (Rp)	31-Des-20 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren (%)
Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	**175.089.775,00**	**(175.089.775,00)**	**(100,00)**
Beban Perjalanan Dinas Biasa–Luar Negeri	0,00	175.089.775,00	(175.089.775,00)	(100,00)
Jumlah	**327.807.350.657,00**	**273.336.055.251,00**	**54.471.295.406,00**	**19,93**

Berikut ini disajikan Beban Perjalanan Dinas per OPD periode 1 Januari s.d 31 Desember 2021 dan 2020 dengan rincian:

Uraian	31-Des-21 (Rp)	31-Des-20 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	Tren (%)
Dinas Pendidikan	72.294.870.720,00	5.346.121.056,00	66.948.749.664,00	1.252,29
Dinas Kesehatan	13.424.322.125,00	6.992.421.367,00	6.431.900.758,00	91,98
Dinas Pekerjaan Umum, Penatan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	4.123.108.567,00	2.858.438.712,00	1.264.669.855,00	44,24
Satuan Polisi Pamong Praja	3.315.784.560,00	2.603.706.750,00	712.077.810,00	27,35
Badan Penaggulangan Bencana Daerah	1.827.653.589,00	1.474.069.334,00	353.584.255,00	23,99
Dinas Sosial	1.597.473.012,00	319.752.400,00	1.277.720.612,00	399,60
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	4.710.150.184,00	884.957.692,00	3.825.192.492,00	432,25
Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	2.254.353.039,00	963.355.265,00	1.290.997.774,00	134,01
Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura	2.370.826.725,00	975.920.681,00	1.394.906.044,00	142,93
Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	8.432.552.928,00	8.358.952.725,00	73.600.203,00	0,88
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	2.682.893.307,00	1.366.152.515,00	1.316.740.792,00	96,38
Dinas Perhubungan	1.869.464.894,00	3.815.349.130,00	(1.945.884.236,00)	(51,00)
Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	1.862.546.856,00	997.508.135,00	865.038.721,00	86,72

Uraian	31-Des-21 (Rp)	31-Des-20 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	Tren (%)
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.234.235.295,00	833.760.592,00	1.400.474.703,00	167,97
Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	2.520.690.026,00	1.153.527.250,00	1.367.162.776,00	118,52
Dinas Kebudayaan	1.299.083.098,00	791.971.654,00	507.111.444,00	64,03
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	336.876.511,00	396.547.343,00	(59.670.832,00)	(15,05)
Dinas Kelautan Dan Perikanan	1.142.411.719,00	809.568.433,00	332.843.286,00	41,11
Dinas Pariwisata	1.296.679.051,00	1.496.626.060,00	(199.947.009,00)	(13,36)
Dinas Perkebunan	675.961.595,00	497.834.328,00	178.127.267,00	35,78
Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	1.757.952.426,00	1.315.239.492,00	442.712.934,00	33,66
Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	1.305.854.181,00	1.819.075.610,00	(513.221.429,00)	(28,21)
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	3.031.560.513,00	1.453.314.172,00	1.578.246.341,00	108,60
Sekretariat Daerah	10.820.591.353,00	10.877.039.962,00	(56.448.609,00)	(0,52)
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	160.537.827.400,00	193.705.960.119,00	(33.168.132.719,00)	(17,12)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	2.919.852.795,00	4.795.421.925,00	(1.875.569.130,00)	(39,11)
Badan Pendapatan Daerah	4.034.551.464,00	2.891.616.177,00	1.142.935.287,00	39,53
Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	1.961.221.310,00	1.630.135.497,00	331.085.813,00	20,31
Badan Kepegawaian Daerah	1.803.178.271,00	1.572.453.797,00	230.724.474,00	14,67
Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia	1.583.527.717,00	1.589.048.035,00	(5.520.318,00)	(0,35)
Badan Penghubung	1.370.008.992,00	1.446.283.924,00	(76.274.932,00)	(5,27)
Inspektorat	4.684.053.568,00	5.307.247.823,00	(623.194.255,00)	(11,74)
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	1.725.232.866,00	1.072.227.660,00	653.005.206,00	60,90
RSUD Arifin Ahmad	0,00	343.255.655,00	(343.255.655,00)	(100,00)
RSJ Tampan	0,00	393.160.947,00	(393.160.947,00)	(100,00)
RSUD Petala Bumi	0,00	188.033.034,00	(188.033.034,00)	(100,00)
Jumlah	**327.807.350.657,00**	**273.336.055.251,00**	**54.471.295.406,00**	**19,93**

Kontribusi Beban Perjalanan Dinas-LO sebesar Rp327.807.350.657,00 atau 3,34% terhadap seluruh beban Tahun 2021.

5.3.17 Beban Barang BLUD-LO

Realisasi Beban Barang BLUD-LO per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp225.012.712.954,95 dan Rp160.197.545.702,77 atau terjadi peningkatan sebesar Rp64.815.167.252,18 atau 40,46%. Beban Barang BLUD-LO merupakan jumlah saldo beban barang BLUD-LO periode 1 Januari s.d 31 Desember 2021 dan adalah:

Uraian	31-Dec-21 (Rp)	31-Dec-20 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren (%)
Beban Barang BLUD	225.012.712.954,95	160.197.545.702,77	64.815.167.252,18	40,46
Jumlah	**225.012.712.954,95**	**160.197.545.702,77**	**64.815.167.252,18**	**40,46**

Berikut ini disajikan Beban Barang BLUD per OPD periode 1 Januari s.d 31 Desember 2021 dan 2020 dengan rincian:

Nama OPD	31-Dec-21 (Rp)	31-Des-20 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	Tren (%)
Dinas Kesehatan	225.012.712.954,95	0,00	225.012.712.954,95	0,00
Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad	0,00	129.649.523.154,77	(129.649.523.154,77)	8.100,00
Rumah Sakit Jiwa Tampan	0,00	18.921.249.254,00	(18.921.249.254,00)	(100,00)
Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi	0,00	11.626.773.294,00	(11.626.773.294,00)	(100,00)
Jumlah	**225.012.712.954,95**	**160.197.545.702,77**	**64.815.167.252,18**	**40,46**

Kontribusi Beban Barang BLUD-LO sebesar Rp225.012.712.954,95 atau 2,29% terhadap seluruh beban Tahun 2021.

5.3.18 Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga-LO

Realisasi Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga-LO per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp127.044.136.247,00 dan Rp7.202.100.170,00 atau terjadi peningkatan sebesar Rp119.842.036.077,00 atau 1.663,99%. Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga-LO merupakan jumlah saldo Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga-LO periode 1 Januari s.d 31 Desember 2021 dan 2020 adalah:

Uraian	31-Dec-21 (Rp)	31-Dec-20 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren (%)
Beban Barang yang Diserahkan Kepada nasyarakat/Pihak Ketiga	127.044.136.247,00	7.202.100.170,00	119.842.036.077,00	1.663,99
Jumlah	**127.044.136.247,00**	**7.202.100.170,00**	**119.842.036.077,00**	**1.663,99**

Berikut ini disajikan Beban Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga-LO per OPD periode 1 Januari s.d 31 Desember 2021 dan 2020 dengan rincian:

Uraian	31-Des-21 (Rp)	31-Des-20 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	Tren (%)
Dinas Pendidikan	1.013.689.000,00	0,00	1.013.689.000,00	0,00
Dinas Kesehatan	7.804.413.247,00	4.882.444.560,00	2.921.968.687,00	59,85
Badan Penaggulangan Bencana Daerah	0,00	1.637.638.110,00	(1.637.638.110,00)	(100,00)
Dinas Sosial	114.000.000,00	0,00	114.000.000,00	0,00
Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura	29.595.000,00	7.155.000,00	22.440.000,00	313,63
Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	28.467.000,00	0,00	28.467.000,00	0,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	127.500.000,00	0,00	127.500.000,00	0,00
Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	0,00	58.800.000,00	(58.800.000,00)	(100,00)
Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	38.930.380.000,00	0,00	38.930.380.000,00	0,00
Dinas Kebudayaan	196.950.000,00	0,00	196.950.000,00	0,00
Dinas Pariwisata	257.710.000,00	0,00	257.710.000,00	0,00
Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	94.160.000,00	0,00	94.160.000,00	0,00
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00
Sekretariat Daerah	78.438.272.000,00	616.062.500,00	77.822.209.500,00	12.632,19
Jumlah	**127.044.136.247,00**	**7.202.100.170,00**	**119.842.036.077,00**	**1.663,99**

Kontribusi Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga-LO sebesar Rp127.044.136.247,00 atau 1,29% terhadap seluruh beban Tahun 2021.

5.3.19 Beban Hibah-LO

Realisasi Beban Hibah-LO per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp1.911.552.019.499,68 dan Rp1.414.133.066.418,42 atau terjadi peningkatan sebesar Rp497.418.953.081,26 atau 35,17% (**Catatan 5.1.13**).

Beban Hibah - LO untuk periode 1 Januari s.d 31 Desember 2021 dan 2020 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	31-Des-21 (Rp)	31-Des-20 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren (%)
Beban Hibah	**1.911.552.019.499,68**	**1.414.133.066.418,42**	**497.418.953.081,26**	**35,17**
Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	**84.316.700.775,06**	**25.982.661.067,00**	**58.334.039.708,06**	**224,51**
Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	**84.316.700.775,06**	**25.982.661.067,00**	**58.334.039.708,06**	**224,51**
Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	84.316.700.775,06	25.982.661.067,00	58.334.039.708,06	224,51
Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	**543.213.162.344,70**	**151.393.239.651,42**	**391.819.922.693,28**	**258,81**
Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	**543.213.162.344,70**	**151.393.239.651,42**	**391.819.922.693,28**	**258,81**
Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	543.213.162.344,70	151.393.239.651,42	391.819.922.693,28	258,81
Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	**150.100.964.319,92**	**43.528.659.300,00**	**106.572.305.019,92**	**244,83**
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	**24.456.446.618,00**	**0,00**	**24.456.446.618,00**	**0,00**
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	14.033.860.538,00	0,00	14.033.860.538,00	0,00
Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	10.422.586.080,00	0,00	10.422.586.080,00	0,00
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	**112.746.769.199,35**	**0,00**	**112.746.769.199,35**	**0,00**
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	94.553.254.876,00	0,00	94.553.254.876,00	0,00

Uraian	31-Des-21 (Rp)	31-Des-20 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren (%)
Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	18.193.514.323,35	0,00	18.193.514.323,35	0,00
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	**12.897.748.502,57**	**4.505.645.300,00**	**8.392.103.202,57**	**186,26**
Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	12.897.748.502,57	0,00	12.897.748.502,57	0,00
Beban Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	0,00	4.505.645.300,00	(4.505.645.300,00)	(100,00)
Beban Hibah kepada K elompok Masyarakat	**0,00**	**39.023.014.000,00**	**(39.023.014.000,00)**	**(100,00)**
Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat Bidang Kesehatan	0,00	1.900.000.000,00	(1.900.000.000,00)	(100,00)
Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat Bidang Keagamaan	0,00	7.652.894.000,00	(7.652.894.000,00)	(100,00)
Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat Bidang Kesenian dan Adat Istiadat	0,00	5.000.000.000,00	(5.000.000.000,00)	(100,00)
Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat Bidang Kepemudaan dan Olahraga Non Profesional	0,00	24.470.120.000,00	(24.470.120.000,00)	(100,00)
Beban Hibah Dana BOS	**1.130.591.465.660,00**	**1.189.898.780.000,00**	**(59.307.314.340,00)**	**(4,98)**
Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	**845.165.477.400,00**	**0,00**	**845.165.477.400,00**	**0,00**
Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	845.165.477.400,00	0,00	845.165.477.400,00	0,00
Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	**178.746.010.260,00**	**0,00**	**178.746.010.260,00**	**0,00**
Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	178.746.010.260,00	0,00	178.746.010.260,00	0,00
Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	**98.979.718.000,00**	**0,00**	**98.979.718.000,00**	**0,00**
Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	98.979.718.000,00	0,00	98.979.718.000,00	0,00

Uraian	31-Des-21 (Rp)	31-Des-20 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren (%)
Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta	**7.700.260.000,00**	**0,00**	**7.700.260.000,00**	**0,00**
Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta	7.700.260.000,00	0,00	7.700.260.000,00	0,00
Belanja Hibah Dana BOS	**0,00**	**31.260.000.000,00**	**(31.260.000.000,00)**	**(100,00)**
Belanja Hibah Dana BOS untuk Kota Pekanbaru - LO.	0,00	2.220.000.000,00	(2.220.000.000,00)	(100,00)
Belanja Hibah Dana BOS untuk Kab. Kampar - LO.	0,00	2.400.000.000,00	(2.400.000.000,00)	(100,00)
Belanja Hibah Dana BOS untuk Kab. Bengkalis - LO.	0,00	3.120.000.000,00	(3.120.000.000,00)	(100,00)
Belanja Hibah Dana BOS untuk Kab. Indragiri Hulu - LO.	0,00	1.560.000.000,00	(1.560.000.000,00)	(100,00)
Belanja Hibah Dana BOS untuk Kab. Indragiri Hilir - LO.	0,00	9.360.000.000,00	(9.360.000.000,00)	(100,00)
Belanja Hibah Dana BOS untuk Kab. Kuantan Singingi - LO.	0,00	660.000.000,00	(660.000.000,00)	(100,00)
Belanja Hibah Dana BOS untuk Kota Dumai - LO.	0,00	960.000.000,00	(960.000.000,00)	(100,00)
Belanja Hibah Dana BOS untuk Kab. Rokan Hulu - LO.	0,00	2.700.000.000,00	(2.700.000.000,00)	(100,00)
Belanja Hibah Dana BOS untuk Kab. Rokan Hilir - LO.	0,00	2.580.000.000,00	(2.580.000.000,00)	(100,00)
Belanja Hibah Dana BOS untuk Kab. Pelalawan - LO.	0,00	1.560.000.000,00	(1.560.000.000,00)	(100,00)
Belanja Hibah Dana BOS untuk Kab. Siak - LO.	0,00	780.000.000,00	(780.000.000,00)	(100,00)
Belanja Hibah Dana BOS untuk Kab. Kep. Meranti - LO.	0,00	3.360.000.000,00	(3.360.000.000,00)	(100,00)
Beban Hibah Dana BOS	**0,00**	**24.805.600.000,00**	**(24.805.600.000,00)**	**(100,00)**
Beban Hibah Dana BOS Daerah untuk Kota Pekanbaru	0,00	10.095.200.000,00	(10.095.200.000,00)	(100,00)
Beban Hibah Dana BOS Daerah untuk Kab. Kampar	0,00	1.213.600.000,00	(1.213.600.000,00)	(100,00)
Beban Hibah Dana BOS Daerah untuk Kab. Bengkalis	0,00	1.567.600.000,00	(1.567.600.000,00)	(100,00)
Beban Hibah Dana BOS Daerah untuk Kab. Indragiri Hulu	0,00	645.200.000,00	(645.200.000,00)	(100,00)
Beban Hibah Dana BOS Daerah untuk Kab. Indragiri Hilir	0,00	1.554.000.000,00	(1.554.000.000,00)	(100,00)

Uraian	31-Des-21 (Rp)	31-Des-20 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren (%)
Beban Hibah Dana BOS Daerah untuk Kab. Kuantan Singingi	0,00	133.200.000,00	(133.200.000,00)	(100,00)
Beban Hibah Dana BOS Daerah untuk Kota Dumai	0,00	1.550.400.000,00	(1.550.400.000,00)	(100,00)
Beban Hibah Dana BOS Daerah untuk Kab. Rokan Hulu	0,00	1.580.400.000,00	(1.580.400.000,00)	(100,00)
Beban Hibah Dana BOS Daerah untuk Kab. Rokan Hilir	0,00	4.011.200.000,00	(4.011.200.000,00)	(100,00)
Beban Hibah Dana BOS Daerah untuk Kab. Pelalawan	0,00	598.000.000,00	(598.000.000,00)	(100,00)
Beban Hibah Dana BOS Daerah untuk Kab. Siak	0,00	1.279.600.000,00	(1.279.600.000,00)	(100,00)
Beban Hibah Dana BOS Daerah untuk Kab. Kep. Meranti	0,00	577.200.000,00	(577.200.000,00)	(100,00)
Beban Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Dasar* **	**0,00**	**1.085.293.180.000,00**	**(1.085.293.180.000,00)**	**(100,00)**
Beban Hibah Dana BOS untuk Kota Pekanbaru	0,00	194.046.030.000,00	(194.046.030.000,00)	(100,00)
Beban Hibah Dana BOS untuk Kab Kampar	0,00	128.949.630.000,00	(128.949.630.000,00)	(100,00)
Beban Hibah Dana BOS untuk Kab Bengkalis	0,00	103.302.420.000,00	(103.302.420.000,00)	(100,00)
Beban Hibah Dana BOS untuk Kab Indragiri Hulu	0,00	74.221.080.000,00	(74.221.080.000,00)	(100,00)
Beban Hibah Dana BOS untuk Kab Indragiri Hilir	0,00	91.742.930.000,00	(91.742.930.000,00)	(100,00)
Beban Hibah Dana BOS untuk Kab Kuantan Singingi	0,00	48.268.680.000,00	(48.268.680.000,00)	(100,00)
Beban Hibah Dana BOS untuk Kota Dumai	0,00	54.613.480.000,00	(54.613.480.000,00)	(100,00)
Beban Hibah Dana BOS untuk Kab Rokan Hulu	0,00	98.389.910.000,00	(98.389.910.000,00)	(100,00)
Beban Hibah Dana BOS untuk Kab Rokan Hilir	0,00	116.336.340.000,00	(116.336.340.000,00)	(100,00)
Beban Hibah Dana BOS untuk Kab Pelalawan	0,00	67.373.400.000,00	(67.373.400.000,00)	(100,00)
Beban Hibah Dana BOS untuk Kab Siak	0,00	80.164.730.000,00	(80.164.730.000,00)	(100,00)
Beban Hibah Dana BOS untuk Kab Kep Meranti	0,00	27.884.550.000,00	(27.884.550.000,00)	(100,00)
Belanja Hibah Dana BOS Afirmasi	**0,00**	**48.540.000.000,00**	**(48.540.000.000,00)**	**(100,00)**
Belanja Hibah Dana BOS untuk Kota Pekanbaru - LO.	0,00	1.500.000.000,00	(1.500.000.000,00)	(100,00)

Uraian	31-Des-21 (Rp)	31-Des-20 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren (%)
Belanja Hibah Dana BOS untuk Kab. Kampar - LO.	0,00	3.300.000.000,00	(3.300.000.000,00)	(100,00)
Belanja Hibah Dana BOS untuk Kab. Bengkalis - LO.	0,00	5.040.000.000,00	(5.040.000.000,00)	(100,00)
Belanja Hibah Dana BOS untuk Kab. Indragiri Hulu - LO.	0,00	2.640.000.000,00	(2.640.000.000,00)	(100,00)
Belanja Hibah Dana BOS untuk Kab. Indragiri Hilir - LO.	0,00	16.980.000.000,00	(16.980.000.000,00)	(100,00)
Belanja Hibah Dana BOS untuk Kab. Kuantan Singingi - LO.	0,00	600.000.000,00	(600.000.000,00)	(100,00)
Belanja Hibah Dana BOS untuk Kota Dumai - LO.	0,00	480.000.000,00	(480.000.000,00)	(100,00)
Belanja Hibah Dana BOS untuk Kab. Rokan Hulu - LO.	0,00	3.480.000.000,00	(3.480.000.000,00)	(100,00)
Belanja Hibah Dana BOS untuk Kab. Rokan Hilir - LO.	0,00	3.420.000.000,00	(3.420.000.000,00)	(100,00)
Belanja Hibah Dana BOS untuk Kab. Pelalawan - LO.	0,00	2.940.000.000,00	(2.940.000.000,00)	(100,00)
Belanja Hibah Dana BOS untuk Kab. Siak - LO.	0,00	1.500.000.000,00	(1.500.000.000,00)	(100,00)
Belanja Hibah Dana BOS untuk Kab. Kep. Meranti - LO.	0,00	6.660.000.000,00	(6.660.000.000,00)	(100,00)
Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	**3.329.726.400,00**	**0,00**	**3.329.726.400,00**	**0,00**
Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	3.329.726.400,00	0,00	3.329.726.400,00	0,00
Beban Hibah kepada Partai Politik	**0,00**	**3.329.726.400,00**	**(3.329.726.400,00)**	**(100,00)**
Beban Hibah kepada Partai Golongan Karya	0,00	546.134.400,00	(546.134.400,00)	(100,00)
Beban Hibah kepada Partai Demokrat	0,00	360.086.400,00	(360.086.400,00)	(100,00)
Beban Hibah kepada Partai Keadilan Sejahtera	0,00	408.253.200,00	(408.253.200,00)	(100,00)
Beban Hibah kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	0,00	445.162.800,00	(445.162.800,00)	(100,00)
Beban Hibah kepada Partai Amanat Nasional	0,00	385.940.400,00	(385.940.400,00)	(100,00)
Beban Hibah kepada Partai Persatuan Pembangunan	0,00	189.790.800,00	(189.790.800,00)	(100,00)
Beban Hibah kepada Partai Kebangkitan Bangsa	0,00	257.702.400,00	(257.702.400,00)	(100,00)

Uraian	31-Des-21 (Rp)	31-Des-20 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren (%)
Beban Hibah kepada Partai Gerakan Indonesia Raya	0,00	425.818.800,00	(425.818.800,00)	(100,00)
Beban Hibah kepada Partai Nasional Demokrat	0,00	178.062.000,00	(178.062.000,00)	(100,00)
Beban Hibah kepada Partai Hati Nurani Rakyat	0,00	132.775.200,00	(132.775.200,00)	(100,00)
Jumlah	**1.911.552.019.499,68**	**1.414.133.066.418,42**	**497.418.953.081,26**	**35,17**

Kontribusi Beban Hibah-LO sebesar Rp Rp1.911.552.019.499,68 atau 19,46% terhadap seluruh beban Tahun 2021.

Terdapat perbedaan Beban Hibah-LO sebesar Rp561.739.448.184,25 dapat dijelaskan dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	SELISIH
Beban Hibah	**1.911.552.019.499,68**	**1.349.812.571.315,43**	**561.739.448.184,25**
Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	**84.316.700.775,06**	**80.452.364.894,27**	**3.864.335.880,79**
Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	**84.316.700.775,06**	**80.452.364.894,27**	**3.864.335.880,79**
Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	84.316.700.775,06	80.452.364.894,27	3.864.335.880,79
Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	**543.213.162.344,70**	**0,00**	**543.213.162.344,70**
Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	**543.213.162.344,70**	**0,00**	**543.213.162.344,70**
Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	543.213.162.344,70	0,00	543.213.162.344,70
Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	**150.100.964.319,92**	**135.439.014.361,16**	**14.661.949.958,76**
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	**24.456.446.618,00**	**14.033.860.538,00**	**10.422.586.080,00**
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	14.033.860.538,00	14.033.860.538,00	0,00

Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	SELISIH
Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	10.422.586.080,00	0,00	10.422.586.080,00
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	**112.746.769.199,35**	**121.137.836.523,16**	**(8.391.067.323,81)**
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	94.553.254.876,00	94.553.254.876,00	0,00
Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	18.193.514.323,35	26.584.581.647,16	(8.391.067.323,81)
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	**12.897.748.502,57**	**267.317.300,00**	**12.630.431.202,57**
Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	12.897.748.502,57	267.317.300,00	12.630.431.202,57
Beban Hibah Dana BOS	**1.130.591.465.660,00**	**1.130.591.465.660,00**	**0,00**
Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	**845.165.477.400,00**	**845.165.477.400,00**	**0,00**
Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	845.165.477.400,00	845.165.477.400,00	0,00
Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	**178.746.010.260,00**	**178.746.010.260,00**	**0,00**
Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	178.746.010.260,00	178.746.010.260,00	0,00
Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	**98.979.718.000,00**	**98.979.718.000,00**	**0,00**
Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	98.979.718.000,00	98.979.718.000,00	0,00
Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta	**7.700.260.000,00**	**7.700.260.000,00**	**0,00**
Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta	7.700.260.000,00	7.700.260.000,00	0,00

Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	SELISIH
Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	**3.329.726.400,00**	**3.329.726.400,00**	**0,00**
Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	**3.329.726.400,00**	**3.329.726.400,00**	**0,00**
Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	3.329.726.400,00	3.329.726.400,00	0,00
Jumlah	**1.911.552.019.499,68**	**1.349.812.571.315,43**	**561.739.448.184,25**

Berikut ini disajikan Beban Hibah-LO per OPD periode 1 Januari s.d 31 Desember 2021 dan 2020 dengan rincian:

Uraian	31-Des-21 (Rp)	31-Des-20 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren (%)
Dinas Pendidikan	156.596.724.775,01	0,00	156.596.724.775,01	0,00
Dinas Kesehatan	382.399.340.032,81	0,00	382.399.340.032,81	0,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9.765.340.947,56	0,00	9.765.340.947,56	0,00
Dinas Sosial	1.450.000.000,00	0,00	1.450.000.000,00	0,00
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	44.088.375.646,87	0,00	44.088.375.646,87	0,00
Dinas Perhubungan	19.215.666.940,00	0,00	19.215.666.940,00	0,00
Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	3.296.600.000,00	0,00	3.296.600.000,00	0,00
Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	69.629.098.735,52	0,00	69.629.098.735,52	0,00
Dinas Kebudayaan	5.000.000.000,00	0,00	5.000.000.000,00	0,00
Dinas Pariwisata	3.168.550.800,00	0,00	3.168.550.800,00	0,00
Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	369.448.160,23	0,00	369.448.160,23	0,00
Sekretariat Daerah	1.034.117.695.059,80	0,00	1.034.117.695.059,80	0,00
Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	177.664.393.711,88	0,00	177.664.393.711,88	0,00
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	4.790.784.690,00	0,00	4.790.784.690,00	0,00
PPKD	0,00	1.414.133.066.418,42	(1.414.133.066.418,42)	(100,00)
Jumlah	**1.911.552.019.499,68**	**1.414.133.066.418,42**	**497.418.953.081,26**	**35,17**

5.3.20 Beban Bantuan Sosial-LO

Realisasi Beban Bantuan Sosial-LO per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp51.810.530.000,00 dan Rp202.217.255.157,63 atau terjadi penurunan sebesar Rp150.406.725.157,63 atau 74,38%. **(Catatan 5.1.14)**.

Beban Bantuan Sosial merupakan jumlah saldo beban bantuan sosial periode 1 Januari s.d 31 Desember 2021 dan 2020 denga rincian sebagai berikut:

Uraian	31-Des-21 (Rp)	31-Des-20 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren (%)
Beban Bantuan Sosial	**51.810.530.000,00**	**202.217.255.157,63**	**(150.406.725.157,63)**	**(74,38)**
Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu	**27.588.710.000,00**	**0.00**	**27.588.710.000,00**	**0.00**
Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	27.588.710.000,00	0.00	27.588.710.000,00	0.00
Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga	**0.00**	**5.118.638.240,00**	**(5.118.638.240,00)**	**(100,00)**
Beban Bantuan Sosial kepada Individu Bidang Pendidikan	0.00	5.118.638.240,00	(5.118.638.240,00)	(100,00)
Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat	**1.378.700.000,00**	**186.446.366.917,63**	**(185.067.666.917,63)**	**(99,26)**
Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	1.378.700.000,00	0.00	1.378.700.000,00	0.00
Beban Bantuan Sosial Barang kepada Kelompok Masyarakat	0.00	186.446.366.917,63	(186.446.366.917,63)	(100,00)
Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	**22.843.120.000,00**	**10.652.250.000,00**	**12.190.870.000,00**	**114,44**
Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	22.843.120.000,00	0.00	22.843.120.000,00	0.00
Beban Bantuan Sosial kepada individu bidang Bidang Sosial Kemasyarakatan	0.00	10.652.250.000,00	(10.652.250.000,00)	(100,00)
Jumlah	**51.810.530.000,00**	**202.217.255.157,63**	**(150.406.725.157,63)**	**(74,38)**

Berikut ini disajikan Beban Sosial per OPD periode 1 Januari s.d 31 Desember 2021 dan 2020 dengan rincian:

Uraian	31-Des-21	31-Des-20
Dinas Pendidikan	1.373.900.000,00	0,00
Dinas Sosial	23.555.330.000,00	0,00
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	4.800.000,00	0,00
Dinas Perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah	16.329.600.000,00	0,00
Sekretariat Daerah	10.546.900.000,00	0,00
PPKD	0,00	15.770.888.240,00
Dinas Pekerjaan Umum , Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	0,00	186.446.366.917,63
Jumlah	**51.810.530.000,00**	**202.217.255.157,63**

Kontribusi Beban Bantuan Sosial-LO sebesar Rp51.810.530.000,00 atau 0,53% terhadap seluruh beban Tahun 2021.

5.3.21 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih-LO

Realisasi Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih-LO per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp9.153.535.787,98 dan Rp2.588.430.702,43 atau terjadi peningkatan sebesar Rp6.565.105.085,55 atau 253,65%.

Beban Penyisihan piutang merupakan jumlah saldo Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih periode 1 Januari s.d 31 Desember 2021 dan 2020 rincian sebagai berikut:

Uraian	31-Des-21 (Rp)	31-Des-20 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren (%)
Beban Penyisihan Piutang	**9.153.535.787,98**	**2.588.430.702,43**	**6.565.105.085,55**	**253,63**
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	**13.000,00**	**38.000,00**	**(25.000,00)**	**(65,79)**
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Perizinan Tertentu	0,00	38.000,00	(38.000,00)	**(100,00)**
Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	**9.153.522.787,98**	**2.588.392.702,43**	**6.565.130.085,55**	**253,64**
Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD	9.153.522.787,98	0,00	9.153.522.787,98	0,00
Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf	0,00	2.588.392.702,43	(2.588.392.702,43)	(100,00)
Jumlah	**9.153.535.787,98**	**2.588.430.702,43**	**6.565.105.085,55**	**253,63**

Berikut ini disajikan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih-LO per OPD periode 1 Januari s.d 31 Desember 2021 dan 2020 dengan rincian:

Uraian	31-Des-21 (Rp)	31-Des-20 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	Tren (%)
Dinas Pendidikan	6.000,00	38.000,00	(32.000,00)	(84,21)
Dinas Kesehatan	9.153.522.787,98	0,00	9.153.522.787,98	0,00
Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
RSUD Arifin Ahmad	0,00	1.313.453.914,47	(1.313.453.914,47)	(100,00)
RSJ Tampan	0,00	1.205.765.026,92	(1.205.765.026,92)	(100,00)
RSUD Petala Bumi	0,00	69.173.761,04	(69.173.761,04)	(100,00)
Jumlah	**9.153.535.787,98**	**2.588.430.702,43**	**6.565.105.085,55**	**253,63**

Kontribusi Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih-LO sebesar Rp9.153.535.787,98 atau 0,09% terhadap seluruh beban Tahun 2021.

5.3.22 Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO

Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp1.216.068.830.523,25 dan Rp1.202.265.900.443,88 atau terjadi peningkatan sebesar Rp13.802.930.079,37 atau 1,15%. Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO adalah sebagai berikut:

Uraian	31-Des-21 (Rp)	31-Des-20 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren (%)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	**1.216.068.830.523,25**	**1.202.265.900.443,88**	**13.802.930.079,37**	**1,15**
Beban Penyusutan	1.210.641.133.424,81	1.196.656.397.178,37	13.984.736.246,44	1,17
Beban Amortisasi	5.427.697.098,44	5.609.503.265,51	(181.806.167,07)	(3,24)
Jumlah	**1.216.068.830.523,25**	**1.202.265.900.443,88**	**13.802.930.079,37**	**1,15**

Kontribusi Beban Penyusutan Aset Tetap dan Amortisasi-LO sebesar Rp1.216.068.830.523,25 atau 12,38% terhadap seluruh beban Tahun 2021.

Beban Penyusutan Aset Tetap-LO

Realisasi Beban Penyusutan Aset Tetap-LO Tahun 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp1.210.641.133.424,81 dan Rp1.196.656.397.178,37 atau terjadi peningkatan sebesar Rp13.984.736.246,44 atau 1,17%. Beban penyusutan aset tetap-LO 1 Januari s.d 31 Desember 2021 dan 2020 adalah:

Uraian	31-Dec-21 (Rp)	31-Dec-20 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren (%)
Beban Penyusutan	1.210.641.133.424,81	1.196.656.397.178,37	13.984.736.246,44	1,17
Jumlah	**1.210.641.133.424,81**	**1.196.656.397.178,37**	**13.984.736.246,44**	**1,17**

Beban Penyusutan - LO untuk periode 1 Januari s.d 31 Desember 2021 dan 2020 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	31-Des-21 (Rp)	31-Des-20 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren (%)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	**298.051.865.703,20**	**310.955.914.064,77**	**(12.904.048.361,57)**	**(4,15)**
Beban Penyusutan Alat Besar	**12.486.434.494,07**	**10.355.217.382,02**	**2.131.217.112,05**	**20,58**
Beban Penyusutan Alat Besar Darat	7.344.393.189,64	4.940.921.402,62	2.403.471.787,02	48,64
Beban Penyusutan Alat Bantu	5.142.041.304,43	5.414.295.979,40	(272.254.674,97)	(5,03)
Beban Penyusutan Alat Angkutan	**21.271.207.361,47**	**31.804.035.158,19**	**(10.532.827.796,72)**	**(33,12)**
Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	18.884.598.446,70	28.881.887.248,35	(9.997.288.801,65)	(34,61)
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	263.056.352,57	126.867.494,69	136.188.857,88	107,35
Beban Penyusutan Alat Angkutan Apung Bermotor	2.008.362.652,20	2.705.966.958,13	(697.604.305,93)	(25,78)
Beban Penyusutan Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	4.950.000,00	13.413.344,52	(8.463.344,52)	(63,10)
Beban Penyusutan Alat Angkutan Bermotor Udara	110.239.910,00	75.900.112,50	34.339.797,50	45,24
Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	**10.634.042.018,39**	**6.556.622.297,27**	**4.077.419.721,12**	**62,19**
Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin	6.738.522.864,35	3.637.836.248,60	3.100.686.615,75	85,23
Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin	790.855.455,87	667.075.209,30	123.780.246,57	18,56
Beban Penyusutan Alat Ukur	3.104.663.698,17	2.251.710.839,37	852.952.858,80	37,88
Beban Penyusutan Alat Pertanian	**2.770.421.351,60**	**3.446.883.935,97**	**(676.462.584,37)**	**(19,63)**
Beban Penyusutan Alat Pengolahan	2.770.421.351,60	3.446.883.935,97	(676.462.584,37)	(19,63)
Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	**75.388.115.503,82**	**94.660.844.065,06**	**(19.272.728.561,24)**	**(20,36)**
Beban Penyusutan Alat Kantor	20.911.889.477,37	46.239.710.874,84	(25.327.821.397,47)	(54,78)
Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga	51.748.794.057,24	44.551.918.058,81	7.196.875.998,43	16,15
Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	2.727.431.969,21	3.869.215.131,41	(1.141.783.162,20)	(29,51)
Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	**5.728.047.439,86**	**13.231.307.903,72**	**(7.503.260.463,86)**	**(56,71)**
Beban Penyusutan Alat Studio	4.122.855.267,85	8.728.270.411,69	(4.605.415.143,84)	(52,76)
Beban Penyusutan Alat Komunikasi	1.125.180.728,49	4.269.517.936,98	(3.144.337.208,49)	(73,65)
Beban Penyusutan Peralatan Pemancar	472.343.943,52	233.519.555,05	238.824.388,47	102,27

Uraian	31-Des-21 (Rp)	31-Des-20 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren (%)
Beban Penyusutan Peralatan Komunikasi Navigasi	7.667.500,00	0,00	7.667.500,00	0,00
Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	**82.394.127.743,61**	**73.879.442.226,13**	**8.514.685.517,48**	**11,53**
Beban Penyusutan Alat Kedokteran	77.884.326.374,74	68.507.028.445,11	9.377.297.929,63	13,69
Beban Penyusutan Alat Kesehatan Umum	4.509.801.368,87	5.372.413.781,02	(862.612.412,15)	(16,06)
Beban Penyusutan Alat Laboratorium	**20.334.687.020,95**	**30.303.902.049,96**	**(9.969.215.029,01)**	**(32,90)**
Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium	19.493.383.971,13	24.934.137.900,18	(5.440.753.929,05)	(21,82)
Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium Nuklir	57.459.140,20	29.139.791,36	28.319.348,84	97,18
Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah	128.575.789,44	4.917.853.437,95	(4.789.277.648,51)	(97,39)
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	99.213.723,53	23.447.161,05	75.766.562,48	323,14
Beban Penyusutan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	25.607.824,72	22.283.824,72	3.324.000,00	14,92
Beban Penyusutan Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	7.179.750,00	7.009.750,00	170.000,00	2,43
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	160.159.938,10	194.145.471,38	(33.985.533,28)	(17,51)
Beban Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	297.815.882,66	175.884.713,32	121.931.169,34	69,32
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	65.291.001,17	0,00	65.291.001,17	0,00
Beban Penyusutan Alat Persenjataan	**692.184.375,15**	**639.208.931,29**	**52.975.443,86**	**8,29**
Beban Penyusutan Senjata Api	11.315.333,32	5.657.666,66	5.657.666,66	100,00
Beban Penyusutan Persenjataan Non Senjata Api	680.869.041,83	633.551.264,63	47.317.777,20	7,47
Beban Penyusutan Komputer	**61.237.938.401,73**	**46.078.450.115,16**	**15.159.488.286,57**	**32,90**
Beban Penyusutan Komputer Unit	50.628.106.150,20	0,00	50.628.106.150,20	0,00
Beban Penyusutan Peralatan Komputer	10.609.832.251,53	46.078.450.115,16	(35.468.617.863,63)	(76,97)
Beban Penyusutan Alat Eksplorasi	**44.876.555,00**	0,00	**44.876.555,00**	0,00
Beban Penyusutan Alat Eksplorasi Topografi	9.644.000,00	0,00	9.644.000,00	0,00
Beban Penyusutan Alat Eksplorasi Geofisika	35.232.555,00	0,00	35.232.555,00	0,00

Uraian	31-Des-21 (Rp)	31-Des-20 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren (%)
Beban Penyusutan Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	**22.554.691,05**	0,00	**22.554.691,05**	0,00
Beban Penyusutan Sumur	21.585.490,99	0,00	21.585.490,99	0,00
Beban Penyusutan Pengolahan dan Pemurnian	969.200,06	0,00	969.200,06	0,00
Beban Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	**303.177.218,56**	0,00	**303.177.218,56**	0,00
Beban Penyusutan Alat Deteksi	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
Beban Penyusutan Alat Pelindung	118.904.023,56	0,00	118.904.023,56	0,00
Beban Penyusutan Alat SAR	172.527.195,00	0,00	172.527.195,00	0,00
Beban Penyusutan Alat Kerja Penerbangan	8.746.000,00	0,00	8.746.000,00	0,00
Beban Penyusutan Alat Peraga	**134.768.420,00**	0,00	**134.768.420,00**	0,00
Beban Penyusutan Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	134.768.420,00	0,00	134.768.420,00	0,00
Beban Penyusutan Peralatan Proses/Produksi	**894.250,00**	0,00	**894.250,00**	0,00
Beban Penyusutan Unit Peralatan	894.250,00	0,00	894.250,00	0,00
Beban Penyusutan Rambu-Rambu	**4.327.889.463,72**	0,00	**4.327.889.463,72**	0,00
Beban Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	4.327.889.463,72	0,00	4.327.889.463,72	0,00
Beban Penyusutan Peralatan Olahraga	**280.499.394,22**	0,00	**280.499.394,22**	0,00
Beban Penyusutan Peralatan Olahraga	280.499.394,22	0,00	280.499.394,22	0,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	**131.823.240.478,65**	**132.165.507.992,81**	**(342.267.514,16)**	**(0,26)**
Beban Penyusutan Bangunan Gedung	**129.550.029.111,85**	**130.849.476.483,58**	**(1.299.447.371,73)**	**(0,99)**
Bangunan Gedung Tempat Kerja	120.069.882.700,94	122.303.536.590,56	(2.233.653.889,62)	(1,83)
Beban Penyusutan Bangunan Gudang Tempat Tinggal	9.480.146.410,91	8.545.939.893,02	934.206.517,89	10,93
Beban Penyusutan Monumen	**584.881.124,60**	**628.822.765,30**	**(43.941.640,70)**	**(6,99)**
Beban Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/ Prasasti	584.881.124,60	628.822.765,30	(43.941.640,70)	(6,99)
Beban Penyusutan Bangunan Menara	**243.381.613,56**	**430.508.962,83**	**(187.127.349,27)**	**(43,47)**
Beban Penyusutan Bangunan Menara Perambuan	243.381.613,56	430.508.962,83	(187.127.349,27)	(43,47)
Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti	**1.444.948.628,64**	**256.699.781,10**	**1.188.248.847,54**	**462,89**
Beban Penyusutan Tugu/Tanda Batas	1.444.948.628,64	256.699.781,10	1.188.248.847,54	462,89

Uraian	31-Des-21 (Rp)	31-Des-20 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren (%)
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	**708.191.387.049,89**	**681.802.268.574,57**	**26.389.118.475,32**	**3,87**
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	**668.601.355.138,52**	**644.310.440.513,11**	**24.290.914.625,41**	**3,77**
Beban Penyusutan Jalan	615.200.758.506,50	592.215.223.214,65	22.985.535.291,85	3,88
Beban Penyusutan Jembatan	53.400.596.632,02	52.095.217.298,46	1.305.379.333,56	2,51
Beban Penyusutan Bangunan Air	**22.739.912.995,15**	**20.999.191.038,82**	**1.740.721.956,33**	**8,29**
Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi	7.218.222.332,86	6.504.205.521,11	714.016.811,75	10,98
Beban Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut	175.999.928,32	111.076.418,64	64.923.509,68	58,45
Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	1.243.516.541,06	1.188.794.632,79	54.721.908,27	4,60
Beban Penyusutan Bangunan Pengaman	9.079.865.426,30	9.270.033.412,61	(190.167.986,31)	(2,05)
Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	127.799.978,00	71.526.211,76	56.273.766,24	78,68
Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku	2.437.304.026,61	2.455.818.147,28	(18.514.120,67)	(0,75)
Beban Penyusutan Bangunan Air Kotor	2.457.204.762,00	1.097.989.694,61	1.359.215.067,39	123,79
Beban Penyusutan Bangunan Air	0,00	299.747.000,02	(299.747.000,02)	(100,00)
Beban Penyusutan Instalasi	**6.199.157.331,95**	**5.781.373.477,65**	**417.783.854,30**	**7,23**
Beban Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku	769.010.596,27	764.067.856,44	4.942.739,83	0,65
Beban Penyusutan Instalasi Air Kotor	149.836.055,45	155.390.469,96	(5.554.414,51)	(3,57)
Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah	0,00	12.463.024,00	(12.463.024,00)	(100,00)
Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik	1.702.919.754,58	1.580.700.666,11	122.219.088,47	7,73
Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik	3.240.537.424,21	3.196.632.026,90	43.905.397,31	1,37
Beban Penyusutan Instalasi Pertahanan	26.704.170,34	26.631.782,90	72.387,44	0,27
Beban Penyusutan Instalasi Gas	21.573.623,00	19.553.831,34	2.019.791,66	10,33
Beban Penyusutan Instalasi Pengaman	41.265.835,00	25.933.820,00	15.332.015,00	59,12
Beban Penyusutan Instalasi Lain	247.309.873,10	0,00	247.309.873,10	
Beban Penyusutan Jaringan	**10.650.961.584,27**	**10.711.263.544,99**	**(60.301.960,72)**	**(0,56)**
Beban Penyusutan Jaringan Air Minum	510.856.496,90	506.015.349,22	4.841.147,68	0,96
Beban Penyusutan Jaringan Listrik	9.924.562.441,46	9.840.006.477,01	84.555.964,45	0,86

Uraian	31-Des-21 (Rp)	31-Des-20 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren (%)
Beban Penyusutan Jaringan Telepon	141.889.403,15	132.505.310,32	9.384.092,83	7,08
Beban Penyusutan Jaringan Gas	73.653.242,76	3.827.458,81	69.825.783,95	1.824,34
Beban Penyusutan Jaringan/Instalasi Komputer	0,00	156.523.456,37	(156.523.456,37)	(100,00)
Beban Penyusutan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	0,00	72.385.493,26	(72.385.493,26)	(100,00)
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	**72.517.319.266,22**	**71.732.706.546,22**	**784.612.720,00**	**1,09**
Beban Penyusutan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	**85.535.948,55**	0,00	**85.535.948,55**	0,00
Beban Penyusutan Barang Bercorak Kesenian	85.535.948,55	0,00	85.535.948,55	0,00
Beban Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi	**72.431.783.317,67**	0,00	**72.431.783.317,67**	0,00
Beban Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi	72.431.783.317,67	0,00	72.431.783.317,67	0,00
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	**71.732.706.546,22**	**(71.732.706.546,22)**	**(100,00)**
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	71.732.706.546,22	(71.732.706.546,22)	(100,00)
Beban Penyusutan Aset Lainnya	**57.320.926,85**	0,00	**57.320.926,85**	0,00
Beban Penyusutan Aset Lainnya	**57.320.926,85**	0,00	**57.320.926,85**	0,00
Beban Penyusutan Kemitraan denga Pihak Ketiga	57.320.926,85	0,00	57.320.926,85	0,00
Jumlah	**1.210.641.133.424,81**	**1.196.656.397.178,37**	**13.984.736.246,44**	**1,17**

Berikut ini disajikan Beban Penyusutan per OPD periode 1 Januari s.d 31 Desember 2021 dan 2020 dengan rincian:

Uraian	31-Des-21 (Rp)	31-Des-20 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren (%)
Dinas Pendidikan	183.658.307.112,93	172.548.722.431,52	11.109.584.681,41	6,44
Dinas Kesehatan	120.899.926.358,61	10.437.140.628,61	110.462.785.730,00	1.058,36
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	767.985.058.712,57	738.592.679.400,46	29.392.379.312,11	3,98
Satuan Polisi Pamong Praja	765.226.090,54	1.179.281.120,87	(414.055.030,33)	(35,11)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.326.305.499,74	9.939.796.128,17	(3.613.490.628,43)	(36,35)
Dinas Sosial	1.887.117.406,85	2.072.516.374,50	(185.398.967,65)	(8,95)
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	1.259.884.544,39	1.910.697.326,15	(650.812.781,76)	(34,06)
Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan	300.258.861,05	548.055.874,93	(247.797.013,88)	(45,21)

Uraian	31-Des-21 (Rp)	31-Des-20 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren (%)
Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana				
Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura	3.931.661.836,94	5.086.810.406,00	(1.155.148.569,06)	(22,71)
Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	4.409.658.842,22	4.872.561.870,58	(462.903.028,36)	(9,50)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	640.949.256,07	950.441.238,35	(309.491.982,28)	(32,56)
Dinas Perhubungan	10.091.341.861,97	11.901.510.401,74	(1.810.168.539,77)	(15,21)
Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	1.422.052.952,23	3.206.071.186,95	(1.784.018.234,72)	(55,64)
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	197.928.523,37	507.526.273,98	(309.597.750,61)	(61,00)
Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	36.020.748.435,90	36.482.948.244,03	(462.199.808,13)	(1,27)
Dinas Kebudayaan	2.569.741.099,74	3.906.869.094,42	(1.337.127.994,68)	(34,23)
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	3.180.346.497,22	3.364.129.714,39	(183.783.217,17)	(5,46)
Dinas Kelautan Dan Perikanan	4.329.339.383,04	4.914.598.746,75	(585.259.363,71)	(11,91)
Dinas Pariwisata	3.396.058.620,43	4.543.238.838,31	(1.147.180.217,88)	(25,25)
Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura	613.064.168,00	835.798.478,42	(222.734.310,42)	(26,65)
Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	2.879.267.045,37	3.525.100.689,76	(645.833.644,39)	(18,32)
Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	5.544.267.760,74	5.427.394.852,11	116.872.908,63	2,15
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	1.980.159.936,08	2.336.186.804,93	(356.026.868,85)	(15,24)
Sekretariat Daerah	18.640.193.343,71	27.297.635.349,16	(8.657.442.005,45)	(31,71)
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.759.262.333,53	6.324.213.739,44	(1.564.951.405,91)	(24,75)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	1.638.310.118,13	2.665.841.172,82	(1.027.531.054,69)	(38,54)
Badan Pendapatan Daerah	4.446.519.934,16	4.880.468.339,29	(433.948.405,13)	(8,89)
Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	13.034.450.113,58	2.790.994.231,49	10.243.455.882,09	367,02
Badan Kepegawaian Daerah	795.995.352,79	1.471.522.696,71	(675.527.343,92)	(45,91)
Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia	1.070.910.098,84	1.010.043.430,81	60.866.668,03	6,03
Badan Penghubung	1.431.272.706,72	2.122.015.027,14	(690.742.320,42)	(32,55)
Inspektorat	244.538.792,29	749.469.108,84	(504.930.316,55)	(67,37)
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	291.009.825,06	408.368.806,09	(117.358.981,03)	(28,74)
Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad	0,00	85.576.797.656,25	(85.576.797.656,25)	(100,00)
Rumah Sakit Jiwa Tampan	0,00	9.321.312.786,43	(9.321.312.786,43)	(100,00)
Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi	0,00	9.110.575.264,25	(9.110.575.264,25)	(100,00)
PPKD	0,00	13.837.063.443,72	(13.837.063.443,72)	(100,00)
Jumlah	**1.210.641.133.424,81**	**1.196.656.397.178,37**	**13.984.736.246,44**	**1,17**

Kontribusi Beban Penyusutan Aset Tetap-LO sebesar Rp1.210.641.133.424,81 atau 12,33% terhadap seluruh beban Tahun 2021. Beban Penyusutan Aset Tetap dapat dilihat pada **Lampiran 13**.

Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-LO

Pemerintah Provinsi Riau telah menerapkan Amortisasi Aset Tidak Berwujud pada Tahun 2020 sesuai dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 104 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Riau Berbasis Akrual.

Realisasi Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-LO Tahun 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp5.427.697.098,44 dan Rp5.609.503.265,51 atau terjadi penurunan sebesar Rp181.806.167,07 atau 3,24%.

Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-LO per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Uraian	31-Des-21 (Rp)	31-Des-20 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren (%)
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	**5.427.697.098,44**	**5.609.503.265,51**	**(181.806.167,07)**	**(3,24)**
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Frenchise	1.196.010.303,54	1.186.077.803,54	9.932.500,00	0,84
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software	4.231.686.794,90	0,00	4.231.686.794,90	0,00
Beban Amortisasi Aset Tidat Berwujud Lainnya	0,00	4.423.425.461,97	(4.423.425.461,97)	(100,00)
Jumlah	**5.427.697.098,44**	**5.609.503.265,51**	**(181.806.167,07)**	**(3,24)**

Berikut ini disajikan Beban Amortisasi per OPD periode 1 Januari s.d 31 Desember 2021 dan 2020 dengan rincian:

Uraian	31-Des-21 (Rp)	31-Des-20 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	Tren (%)
Dinas Pendidikan	3.297.770.762,50	3.274.388.262,50	23.382.500,00	0,71
Dinas Kesehatan	1.213.787.589,66	87.693.862,96	1.126.093.726,70	1.284,12
Dinas Pekerjaan Umum, Penatan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	374.710.410,50	374.710.410,50	0,00	0,00
Badan Penaggulangan Bencana Daerah	24.500.000,00	99.425.000,00	(74.925.000,00)	(75,36)
Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura	67.181.250,00	74.327.651,00	(7.146.401,00)	(9,61)

Uraian	31-Des-21 (Rp)	31-Des-20 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	Tren (%)
Dinas Perhubungan	24.806.250,00	18.550.000,00	6.256.250,00	33,73
Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	222.628.141,40	306.093.175,77	(83.465.034,37)	(27,27)
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	12.166.750,00	25.903.169,24	(13.736.419,24)	(53,03)
Dinas Kebudayaan	35.516.250,00	18.425.000,00	17.091.250,00	92,76
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	39.035.962,14	48.168.441,09	(9.132.478,95)	(18,96)
Dinas Kelautan Dan Perikanan	0,00	18.812.500,00	(18.812.500,00)	(100,00)
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	0,00	4.812.500,00	(4.812.500,00)	(100,00)
Sekretariat Daerah	44.715.534,12	98.567.374,84	(53.851.840,72)	(54,63)
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	10.553.125,00	14.093.750,00	(3.540.625,00)	(25,12)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	21.831.250,00	69.027.500,00	(47.196.250,00)	(68,37)
Badan Pendapatan Daerah	3.093.750,00	0,00	3.093.750,00	0,00
Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	35.400.073,12	47.438.037,13	(12.037.964,01)	(25,38)
RSUD Arifin Ahmad	0,00	968.855.574,98	(968.855.574,98)	(100,00)
RSUD Petala Bumi	0,00	60.211.055,50	(60.211.055,50)	(100,00)
Jumlah	**5.427.697.098,44**	**5.609.503.265,51**	**(181.806.167,07)**	**(3,24)**

Kontribusi Beban Amortisasi Aset Tetap Tidak Berwujud-LO sebesar Rp5.427.697.098,44 atau 0,06 % terhadap seluruh beban Tahun 2021.

5.3.23 Beban Lain-lain-LO

Realisasi Beban Lain-Lain-LO per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp615.418.176,65 dan Rp64.559.394.727,00 atau terjadi penurunan sebesar Rp63.943.976.550,35 atau 99,05%. Beban Lain-lain merupakan jumlah saldo Beban lain-lain periode 1 Januari s.d 31 Desember 2021 dan 2020 adalah:

Uraian	31-Des-21 (Rp))	31-Des-20 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	Tren (%)
Beban Lain-lain	615.418.176,65	64.559.394.727,00	(63.943.976.550,35)	(99,05)

Jumlah	**615.418.176,65**	**64.559.394.727,00**	**(63.943.976.550,35)**	**99,05**

Berikut ini disajikan Beban Lain-Lain per OPD periode 1 Januari s.d 31 Desember 2021 dan 2020 dengan rincian:

Uraian	31-Des-21 (Rp)	31-Des-20 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren (%)
Dinas Pendidikan	1.845.610,00	0,00	1.845.610,00	0,00
Dinas Kesehatan	43.581.270,00	42.177.736,00	1.403.534,00	3,33
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	40.937.995,00	271.826.720,00	(230.888.725,00)	(84,94)
Satuan Polisi Pamong Praja	480.000,00	0,00	480.000,00	
Dinas Sosial	38.114.512,00	3.150.000,00	34.964.512,00	1.109,98
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	141.937.861,71	0,00	141.937.861,71	
Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura	1.530.678,94	17.550.000,00	(16.019.321,06)	(91,28)
Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	0,00	11.119.900,00	(11.119.900,00)	(100,00)
Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	6.472.000,00	1.000.000,00	5.472.000,00	547,20
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.607.970,00	0,00	1.607.970,00	
Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	0,00	291.500,00	(291.500,00)	(100,00)
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	67.320.000,00	0,00	67.320.000,00	
Dinas Kelautan Dan Perikanan	7.350.093,00	6.116.000,00	1.234.093,00	20,18
Dinas Pariwisata	760.000,00	0,00	760.000,00	
Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura	0,00	13.585.000,00	(13.585.000,00)	(100,00)
Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	3.120.000,00	410.000,00	2.710.000,00	660,98
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	0,00	980.000,00	(980.000,00)	(100,00)
Sekretariat Daerah	0,00	312.081.321,00	(312.081.321,00)	(100,00)
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	13.492.500,00	1.171.481.150,00	(1.157.988.650,00)	(98,85)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	0,00	19.046.000,00	(19.046.000,00)	(100,00)
Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	245.808.686,00	0,00	245.808.686,00	
Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia	1.059.000,00	7.409.000,00	(6.350.000,00)	(85,71)
Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad	0,00	652.122.806,00	(652.122.806,00)	(100,00)
Rumah Sakit Jiwa Tampan	0,00	6.000.000,00	(6.000.000,00)	(100,00)
Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi	0,00	181.490.200,00	(181.490.200,00)	(100,00)
PPKD	0,00	61.841.557.394,00	(61.841.557.394,00)	(100,00)
Jumlah	**615.418.176,65**	**64.559.394.727,00**	**(63.943.976.550,35)**	**(99,05)**

Kontribusi Beban Lain-Lain-LO sebesar Rp615.418.176,65 atau 0,01% terhadap seluruh beban Tahun 2021.

5.3.24 Beban Transfer-Bagi Hasil Pajak Daerah-LO

Realisasi Beban Transfer-Bagi Hasil Pajak Daerah-LO per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp1.559.388.368.321,00 dan Rp1.107.130.676.336,00 atau terjadi peningkatan sebesar Rp452.257.691.985,00 atau 40,85%. Beban transfer bagi hasil merupakan jumlah saldo Beban Transfer bagi hasil periode 1 Januari s.d 31 Desember 2021 dan 2020 adalah:

Uraian	31-Des-21 (Rp)	31-Des-20 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	Tren (%)
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	**1.559.388.368.321,00**	**1.107.130.676.336,00**	**452.257.691.985,00**	**40,85**
Beban Transfer Bagi Hasil P ajak Daerah	1.559.388.368.321,00	1.107.130.676.336,00	452.257.691.985,00	40,85
Jumlah	**1.559.388.368.321,00**	**1.107.130.676.336,00**	**452.257.691.985,00**	**40,85**

Realisasi beban bagi hasil pajak – LO sebesar Rp1.559.388.368.321,00 dibandingkan dengan realisasi belanja bagi hasil pajak – LRA sebesar Rp1.498.191.320.346,70 Terdapat perbedaan sebesar Rp61.197.047.974,30.

Realisasi beban bagi hasil pajak – LO dengan realisasi belanja bagi hasil pajak – LRA terdapat perbedaaan yaitu Pelunasan Utang Transfer Bagi Hasil Pajak. Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor: Kpts. 2049/XII/2020 Tanggal 21 Desember 2020 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaran Bermotor dan Pajak Air Permukaan Triwulan IV (Oktober-November) untuk Kabupaten/Kota se Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp89.425.557.664,08.

Penambahan Utang Berdasarkan Keputusan Gubernur No : Kpts 1382/XII/2021 tgl. 20 Desember 2021 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaran Bermotor dan Pajak Air Permukaan Triwulan IV (Oktober-November) untuk Kabupaten /Kota se Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp24.740.087.694,38 dan penambahan Utang Berdasarkan Keputusan Gubernur No : Kpts 756/IV/2022 tgl. 8 April 2022 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaran Bermotor dan Pajak Air Permukaan Triwulan IV (Desember 2021) untuk Kabupaten /Kota se Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp125.882.517.944,00.

Realisasi beban bagi hasil pajak – LO sebesar Rp1.559.388.368.321,00 dibandingkan dengan realisasi belanja bagi hasil pajak-LRA sebesar Rp1.498.191.320.346,70 terdapat perbedaaan sebesar Rp61.197.047.974,30 yaitu Pelunasan Utang Transfer Bagi Hasil Pajak.

Uraian	LO	LRA	SELISIH
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota	**1.559.388.368.321,00**	**1.498.191.320.346,70**	**61.197.047.974,30**
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota	1.559.388.368.321,00	1.498.191.320.346,70	61.197.047.974,30
Jumlah	**1.559.388.368.321,00**	**1.498.191.320.346,70**	**61.197.047.974,30**

Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Darah Kepada Kabupaten/ Kota

No	Kab/Kota Penerima	Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)	Realisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	Realisasi Air Permukaan (AP)	Realisai Pajak Rokok	Total
1	Kampar	36.485.322.910,00	27.327.031.571,00	51.912.501.844,00	2.238.872.260,00	25.453.449.287,00	143.417.177.872,00
2	Bengkalis	37.406.411.477,00	25.560.047.718,00	44.271.046.957,00	1.138.841.673,00	26.061.535.984,00	134.437.883.809,00
3	Indragiri Hulu	26.691.778.967,00	19.444.850.831,00	43.378.274.625,00	1.600.168.710,00	22.971.355.694,00	114.086.428.827,00
4	Indragiri Hilir	21.909.389.888,00	16.630.054.775,00	44.220.651.426,00	1.273.720.086,00	27.822.532.764,00	111.856.348.939,00
5	Kuantan Singingi	24.154.100.427,00	17.999.662.480,00	36.799.962.374,00	1.721.884.162,00	20.539.101.507,00	101.214.710.950,00
6	Rokan Hulu	30.472.794.976,00	24.360.539.096,00	39.516.016.041,00	1.416.119.302,00	21.942.927.101,00	117.708.396.516,00
7	Rokan Hilir	25.785.475.745,00	20.635.582.646,00	44.461.720.724,00	1.259.119.322,00	27.226.051.234,00	119.367.949.671,00
8	Pelalawan	28.799.446.676,00	22.239.196.997,00	58.295.633.711,00	4.866.243.946,00	17.301.516.959,00	131.502.038.289,00
9	Siak	29.038.108.489,00	21.283.827.595,00	65.348.237.616,00	4.696.267.443,00	22.615.219.502,00	142.981.660.645,00
10	Kepulauan Meranti	17.540.592.350,00	12.442.828.755,00	27.150.217.058,00	1.059.349.504,00	15.000.982.704,00	73.193.970.371,00
11	Kota Pekanbaru	96.227.203.199,00	55.278.526.134,00	72.835.157.844,00	1.007.940.115,00	30.993.236.848,00	256.342.064.140,00
12	Dumai	28.970.925.735,00	19.359.137.791,00	43.858.451.179,00	1.157.395.723,00	19.933.827.864,00	113.279.738.292,00
	Total	**403.481.550.839,00**	**282.561.286.389,00**	**572.047.871.399,00**	**23.435.922.246,00**	**277.861.737.448,00**	**1.559.388.368.321,00**

5.3.25 Beban Transfer-Bantuan Keuangan ke Pemda Lainnya-LO

Realisasi Beban Transfer-Bantuan Keuangan ke Pemda-LO per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp193.927.652.104,96 dan Rp295.460.920.473,00 atau terjadi penurunan sebesar Rp101.533.268.368,04 atau 34,36% **(Catatan 5.1.23)**. Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemda Lainnya merupakan periode 1 Januari s.d 31 Desember 2021 dan 2020 adalah:

Uraian	31-Des-21 (Rp)	31-Des-20 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	Tren (%)
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerinta Daerah Lainnya	**193.927.652.104,96**	**295.460.920.473,00**	**(101.533.268.368,04)**	**(34,36)**
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerinta Daerah Lainnya…	193.927.652.104,96	295.460.920.473,00	(101.533.268.368,04)	(34,36)
Jumlah	**193.927.652.104,96**	**295.460.920.473,00**	**(101.533.268.368,04)**	**(34,36)**

Beban Transfer-Bantuan Keuangan ke Pemda-LO untuk periode 1 Januari s.d 31 Desember 2021 dan 2020 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	31-Des-21 (Rp)	31-Des-20 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	Tren (%)
Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	**193.927.652.104,96**	**0,00**	**193.927.652.104,96**	**0,00**
Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	193.927.652.104,96	0,00	193.927.652.104,96	0,00
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota	**0,00**	**295.460.920.473,00**	**(295.460.920.473,00)**	**(100,00)**
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Kota Pekanbaru	0,00	33.261.200.000,00	(33.261.200.000,00)	(100,00)
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Kab. Kampar	0,00	23.164.000.000,00	(23.164.000.000,00)	(100,00)
Beban Transfer Bantuan Keuangan Kab. Bengkalis	0,00	25.534.423.500,00	(25.534.423.500,00)	(100,00)
Beban Transfer Bantuan Keuangan Kab. Indragiri Hulu	0,00	25.599.226.000,00	(25.599.226.000,00)	(100,00)

Uraian	31-Des-21 (Rp)	31-Des-20 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	Tren (%)
Beban Transfer Bantuan Keuangan Kab. Indragiri Hilir	0,00	20.670.878.673,00	(20.670.878.673,00)	(100,00)
Beban Transfer Bantuan Keuangan Kab. Kuantan Singingi	0,00	19.490.620.000,00	(19.490.620.000,00)	(100,00)
Beban Transfer Bantuan Keuangan Kota Dumai	0,00	38.567.300.000,00	(38.567.300.000,00)	(100,00)
Beban Transfer Bantuan Keuangan Kab. Rokan Hulu	0,00	16.111.200.000,00	(16.111.200.000,00)	(100,00)
Beban Transfer Bantuan Keuangan Kab. Rokan Hilir	0,00	34.667.800.000,00	(34.667.800.000,00)	(100,00)
Beban Transfer Bantuan Keuangan Kab. Pelalawan	0,00	11.374.109.400,00	(11.374.109.400,00)	(100,00)
Beban Transfer Bantuan Keuangan Kab. Siak	0,00	18.861.800.000,00	(18.861.800.000,00)	(100,00)
Beban Transfer Bantuan Keuangan Kab. Kep. Meranti	0,00	12.275.000.000,00	(12.275.000.000,00)	(100,00)
Beban Transfer Bantuan Keuangan Kab. Kep. Meranti		15.883.362.900,00	(15.883.362.900,00)	(100,00)
Jumlah	**193.927.652.104,96**	**295.460.920.473,00**	**(101.533.268.368,04)**	**(34,36)**

Kontribusi Beban Transfer-Bantuan Keuangan ke Pemda Lainnya-LO sebesar Rp193.927.652.104,96 atau 1,97% terhadap seluruh beban Tahun 2021.

5.3.26 Beban Transfer-Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa-LO

Realisasi Beban Transfer -Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa-LO per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp157.892.253.886,00 dan Rp134.802.530.000,00 atau terjadi peningkatan sebesar Rp 23.089.723.886,00 atau naik 17,13% **(Catatan 5.1.24)**. Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa-LO merupakan periode 1 Januari s.d per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah:

Uraian	31-Des-21 (Rp)	31-Des-20 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	Tren (%)
Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	157.892.253.886,00	0,00	157.892.253.886,00	0,00
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa…	0,00	134.802.530.000,00	(134.802.530.000,00)	(100,00)
Jumlah	**157.892.253.886,00**	**134.802.530.000,00**	**23.089.723.886,00**	**17,13**

Kontribusi Beban Transfer-Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa-LO sebesar Rp157.892.253.886,00 atau 1,61% terhadap seluruh beban Tahun 2021.

5.3.27 Surplus/ Defisit dari Kegiatan Operasional

Surplus/ Defisit dari Kegiatan Operasional per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar minus Rp104.011.515.338,54 dan minus sebesar Rp327.099.545.598,56, atau terjadi penurunan sebesar Rp223.088.030.260,02 atau 68,20%. Surplus/ Defisit dari Kegiatan Operasional merupakan adalah selisih antara Pendapatan-LO dan Beban selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi. Surplus/ Defisit dari operasi selama 1 Januari s.d 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Uraian	31-Des-21 (Rp)	31-Des-20 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	Tren (%)
Pendapatan	9.718.197.024.477,13	8.389.793.347.237,03	1.328.403.677.240,10	15,83
Beban	9.822.208.539.815,67	8.716.892.892.835,59	1.105.315.646.980,08	12,68
Jumlah	**(104.011.515.338,54)**	**(327.099.545.598,56)**	**223.088.030.260,02**	**(68,20)**

Kontribusi Surplus/ Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar minus Rp104.011.515.338,54 atau 1,06% terhadap seluruh beban Tahun 2021.

5.3.28. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Surplus dari penjualan aset non lancar Tahun 2021 sebesar Rp23.997.100,00 dan 2020 sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp23.997.100,00 atau naik 100,00%. Surplus penjualan aset non lancar merupakan penjulalan aset lain-lain. Surplus dari Penjualan Aset Non Lancar merupakan periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020 adalah:

Uraian	31-Des-21 (Rp)	31-Des-20 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	Tren (%)
Surplus Penjualan Aset Non Lancar	23.997.100,00	0,00	23.997.100,00	0,00

Jumlah	**23.997.100,00**	**0,00**	**23.997.100,00**	**0,00**

5.3.29 Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Defisit dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp1.423.800.082,84 dan Rp12.756.702.570,56 atau terjadi penurunan sebesar Rp11.332.902.487,72 atau 88,84%. Defisit dari Kegiatan Non Operasional periode 1 Januari s.d 31 Desember 2021 dan 2020 adalah:

Uraian	31-Des-21 (Rp)	31-Des-20 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	Tren (%)
Defisit Penjualan Aset Non Lan car	1.423.800.082,84	20.343.750,00	1.403.456.332,84	6.898,71
Defisit dari Kegiatan Non Oper asional Lainnya	0,00	12.736.358.820,56	(12.736.358.820,56)	(100,00)
Jumlah	**1.423.800.082,84**	**12.756.702.570,56**	**(11.332.902.487,72)**	**(88,84)**

5.3.30 Surplus/ Defisit dari kegiatan Non Operasional

Surplus/ Defisit dari kegiatan non Operasional per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar minus Rp1.399.802.982,84 dan minus Rp12.756.702.570,56 atau terjadi kenaikan sebesar Rp11.356.899.587,72 atau 89,03%. Surplus/Defisit dari kegiatan Non Operasional merupakan periode 1 Januari s.d per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah:

Uraian	31-Des-21 (Rp)	31-Des-20 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	Tren (%)
Surplus/Defisit dari kegiatan Non Operasional	(1.399.802.982,84)	(12.756.702.570,56)	11.356.899.587,72	(89,03)
Jumlah	**(1.399.802.982,84)**	**(12.756.702.570,56)**	**11.356.899.587,72**	**(89,03)**

5.3.31 Surplus/ Defisit -LO

Surplus/ Defisit-LO merupakan selisih antara Pendapatan-LO dan Beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus/ defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus/ Defisit-LO pada Laporan Operasional per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar defisit Rp105.411.318.321,38 dan defisit Rp339.856.248.169,12 **(Catatan 5.4)**.

5.4 PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Terdapat dampak perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar karena perubahan basis akuntansi dengan rincian sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal per 31 Desember 2021 sebesar Rp32.811.787.287.703,70.

b. Surplus/Defisit LO

Surplus/Defisit LO per 31 Desember 2021 sebesar (Rp105.411.318.321,38).

c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak perubahan kebijakan/kesalahan mendasar dengan rincian sebagai berikut:

5.4.1 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp2.688.060,00 dan sebesar Rp461.051.913,73 atau mengalami penurunan sebesar (Rp458.363.853,73) dari nilai Tahun 2020. Koreksi Nilai Persediaan dapat dirincikan sebagai berikut:

Nama OPD	Nilai (Rp)	Keterangan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.688.060,00	Koreksi Pencatatan Nilai Persediaan sebesar Rp2.688.060,00 merupakan Koreksi Persediaan Awal.
TOTAL	**2.688.060,00**	

5.4.2 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain – Lain per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar (Rp359.311.310.166,62) dan Rp416.446.148.690,42 atau mengalami penurunan sebesar (Rp775.757.458.857,04) dari nilai Tahun 2020. Koreksi Lain-lain terdiri dari:

5.4.2.1 Koreksi Pencatatan Aset Lancar

Koreksi Pencatatan Aset Lancar per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp52.417.563.783,67 dan Rp47.716.305.019,56 atau mengalami kenaikan sebesar Rp4.701.258.764,11 dari nilai Tahun 2020. Koreksi Pencatatan Aset Lancar dapat dirincikan sebagai berikut:

- Koreksi Nilai Piutang Retribusi

  Koreksi Nilai Piutang Retribusi per 31 Desember 2021 sebesar (Rp7.600.000,00). Koreksi Nilai Piutang Retribusi dapat dirincikan sebagai berikut:

Nama OPD	Nilai (Rp)	Keterangan
Dinas Pendidikan	(7.600.000,00)	Koreksi Nilai Piutang Retribusi senilai (Rp7.600.000,00) yang merupakan Penghapusan Piutang Tahun 2020.
TOTAL	**(7.600.000,00)**	

- Koreksi Nilai Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

  Koreksi Nilai Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per 31 Desember 2021 sebesar (Rp904.555.063,00). Koreksi Nilai Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dapat dirincikan sebagai berikut:

Nama OPD	Nilai (Rp)	Keterangan
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	(904.555.063,00)	Koreksi Nilai Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2021 senilai (Rp904.555.063,00) merupakan Koreksi Nilai Piutang Lain-lain PAD yang Sah PPKD tahun sebelumnya yang seharusnya tidak dicatat sebagai sebagai piutang.
TOTAL	**(904.555.063,00)**	

- Koreksi Nilai Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

  Koreksi Nilai Piutang Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2021 sebesar Rp71.652.307.066,00. Koreksi Nilai Piutang Lain-Lain PAD yang Sah dapat dirincikan sebagai berikut:

Nama OPD	Nilai (Rp)	Keterangan
Dinas Kesehatan	71.652.307.066,00	Koreksi Pencatatan Aset Lancar periode 31 Desember 2021 sebesar Rp71.652.307.066,00 merupakan Koreksi Piutang Jamkesda Kota telah lunas tanggal 4 September 2019 Rp379.492.000; Koreksi Piutang Jamkesda Kota telah lunas tanggal 4 September 2019 Rp199.918.700,00; Koreksi Double KAP, Jamkesda Kota Catat Tagihan Desember 2018 Rp399.857.510,00; Koreksi Piutang Jampersal Kota Lunas Tanggal 11 September 2019 Rp3.177.600,00; Koreksi Piutang Jampersal Kota Lunas Tanggal Juni 2019 Rp30.000,00; Koreksi Kesalahan Double Catat Jamkesda Kampar Tahun 2020 Rp42.509.700,00; Koreksi Piutang Jampersal Kampar Lunas 4 Juli 2019 Rp28.308.000,00; Koreksi Piutang Lapas Dinsos, Lunas Tanggal 8 Agustus 2019 Rp14.555.800,00; Biaya Kompensasi Tahun Sebelumnya Rp136.969.600,00; Biaya Adm Tahun Sebelumnya dan tahun berjalan Rp246.200,00 (UPT. RSUD Petala Bumi); Koreksi (kredit) untuk mencatat kembali piutang pasien umum atas nama Siti Ombun Rp6.721.738,00; dan Koreksi lebih catat utang belanja barang dan jasa BLUD tahun sebelumnya yang sudah dilakukan pembayaran sebesar Rp72.854.672.791,00 (UPT. RSUD Arifin Achmad).
TOTAL	**71.652.307.066,00**	

- Koreksi Nilai Piutang Transfer Pemerintah Pusat

  Koreksi Nilai Piutang Transfer Pemerintah Pusat per 31 Desember 2021 sebesar (Rp18.590.124.462,00). Koreksi Nilai Piutang Transfer Pemerintah Pusat dapat dirincikan sebagai berikut:

Nama OPD	Nilai (Rp)	Keterangan
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	(18.590.124.462,00)	Koreksi Nilai Piutang Transfer Pemerintah Pusat PPKD Tahun Sebelumnya merupakan Koreksi penambahan piutang DBH Rp131.445.023.962,00 dan Koreksi pengurangan/ pelunasan piutang DBH Rp150.035.148.424,00.
TOTAL	**(18.590.124.462,00)**	

- Koreksi Nilai Dana Bergulir

  Koreksi Nilai Dana Bergulir per 31 Desember 2021 sebesar Rp267.536.242,67. Koreksi Nilai Dana Bergulir dapat dirincikan sebagai berikut:

Nama OPD	Nilai (Rp)	Keterangan
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	(80.000.000,00)	Koreksi Nilai Dana Bergulir per 31 Desember 2021 sebesar (Rp80.000.000,00) merupakan koreksi pengembalian investasi non permanen lainnya (dana UP2K) Tahun 2020.
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3.900.000,00	Koreksi Nilai Dana Bergulir per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.900.000,00 merupakan merupakan Koreksi atas Penyisihan Investasi non permanen lainnya yang diragukan tertagih periode 31 Desember 2021 dari pinjaman koperasi KSP/ USP sebesar Rp. 3.900.000,00. Pada jurnal LPE koreksi penyisihan investasi non permanen lainnya yang diragukan tertagih dialokasikan ke koreksi dana bergulir dikarenakan akun investasi sebenarnya tidak ada dalam sistemnya.
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	343.636.242,67	Koreksi Pencatatan Investasi per 31 Desember 2021 sebesar Rp343.636.242,67 merupakan koreksi dana bergulir diragukan tertagih.
TOTAL	**267.536.242,67**	

5.4.2.2 Koreksi Pencatatan Penyisihan Aset Lancar

Koreksi Pencatatan Penyisihan Aset Lancar per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp155.355.553,47 dan (Rp19.050.164.027,64) atau mengalami penurunan sebesar Rp19.205.519.581,11 dari nilai Tahun 2020. Koreksi Pencatatan Penyisihan Aset Lancar dapat dirincikan sebagai berikut:

- Koreksi Penyisihan Piutang Pendapatan

  Koreksi Penyisihan Piutang Pendapatan per 31 Desember 2021 sebesar Rp38.000,00. Koreksi Penyisihan Piutang Pendapatan dapat dirincikan sebagai berikut:

Nama OPD	Nilai (Rp)	Keterangan
Dinas Pendidikan	38.000,00	Koreksi Penyisihan Piutang per 31 Desember 2021 sebesar Rp38.000,00 merupakan Penghapusan Penyisihan Piutang Retribusi Tahun 2020.
TOTAL	**38.000,00**	

- Koreksi Penyisihan Piutang Lainnya

Koreksi Penyisihan Piutang Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp60.317.553,47. Koreksi Penyisihan Piutang Lainnya dapat dirincikan sebagai berikut:

Nama OPD	Nilai (Rp)	Keterangan
Dinas Kesehatan	60.317.553,47	Koreksi Penyisihan Piutang per 31 Desember 2021 Rp60.317.553,47 merupakan Koreksi kurang catat penyisihan piutang tahun sebelumnya (UPT. RSUD Arifin Ahmad).
TOTAL	60.317.553,47	

- Koreksi Nilai Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Koreksi Nilai Investasi Jangka Panjang Non Permanen per 31 Desember 2021 sebesar Rp95.000.000,00. Koreksi Nilai Investasi Jangka Panjang Non Permanen dapat dirincikan sebagai berikut:

Nama OPD	Nilai (Rp)	Keterangan
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	95.000.000,00	Koreksi Nilai Investasi Jangka Panjang Non Permanen per 31 Desember 2021 sebesar Rp95.000.000,00 merupakan pengembalian investasi non permanen lainnya sebesar Rp15.000.000,00 dan koreksi pengembalian investasi non permanen lainnya (dana UP2K) Tahun 2020 sebesar Rp80.000.000,00.
TOTAL	**95.000.000,00**	

5.4.2.3 Koreksi Pencatatan Aset Tetap

Koreksi Pencatatan Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar (Rp19.052.060.365,35) dan Rp536.625.280.284,95 atau mengalami penurunan

(Rp555.677.340.650,30) dari nilai Tahun 2020. Koreksi Pencatatan Aset Tetap dapat dirincikan sebagai berikut:

- Koreksi Nilai Aset Tetap Tanah

  Koreksi Nilai Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2021 sebesar Rp36.337.560.119,99. Koreksi Nilai Aset Tetap dapat dirincikan sebagai berikut:

Nama OPD	Nilai (Rp)	Keterangan
Dinas Pendidikan	32.156.421.120,00	Koreksi Pencatatan Aset tanah per 31 Desember 2021 sebesar Rp32.156.421.120,00 penambahan/ catat baru tanah dari P3D.
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	5.244.734.000	Koreksi Nilai Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2021 sebesar Rp5.244.734.000,00 merupakan Aset Tetap Tanah Catat Baru sesuai dengan NJOP.
Dinas Kelautan dan Perikanan	525.000.000,00	Koreksi nilai pencatatan nilai aset tetap tanah per 31 Desember 2021 sebesar Rp525.000.000,00 merupakan Aset Tanah Catat Baru.
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	(1.588.595.000,01)	Koreksi Pencatatan nilai Aset Tetap tanah per 31 Desember 2021 sebesar (Rp1.588.595.000,01) merupakan Koreksi Nilai Aset Tetap Tanah (*Double* Catat dengan Bapenda) (Rp1.588.594.999,69); Lebih catat penyajian nilai tanah (Rp0,33), dan kurang catat tanah untuk bangunan tempat kerja Rp0,32.
TOTAL	**36.337.560.119,99**	

- Koreksi Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin

  Koreksi Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 sebesar (Rp53.193.342.474,01). Koreksi Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin dapat dirincikan sebagai berikut:

Nama OPD	Nilai (Rp)	Keterangan
Dinas Pendidikan	(52.991.322.174,67)	Koreksi Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 sebesar (Rp52.991.322.174,67) merupakan Extracomtable Peralatan dan Mesin dari Tahun 2018 yang terdiri dari koreksi Nilai Alat Besar (Rp49.972.929,00); Koreksi Nilai Alat Angkutan (Rp75.208.915,00); Koreksi Nilai Alat Bengkel dan Alat Ukur (Rp898.434.157,23); Koreksi Nilai Alat Pertanian (Rp95.913.509,94); Koreksi Nilai

Nama OPD	Nilai (Rp)	Keterangan
		Alat Kantor dan Rumah Tangga (Rp43.631.826.041,59); Koreksi Nilai Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar (Rp971.471.083,42); Koreksi Nilai Alat Kedokteran dan Kesehatan (Rp83.778.635,83); Koreksi Nilai Alat Laboratorium (Rp4.468.762.017,46); Koreksi Nilai Komputer (Rp2.318.548.231,99); Koreksi Nilai Alat Eksplorasi (Rp1.638.870,00); Koreksi Nilai Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian (Rp670.000,00); Koreksi Nilai Alat Keselamatan Kerja (Rp83.757.457,78); Koreksi Nilai Alat Peraga (Rp8.970.000,00); Koreksi Nilai Peralatan Proses/Produksi (Rp7.154.000,00); Koreksi Nilai Rambu-rambu (Rp150.000,00); dan Koreksi Nilai Peralatan Olahraga (Rp316.970.825,43). Koreksi Tambah Nilai Peralatan dan Mesin yang merupakan Koreksi Nilai Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp21.904.500,00.
Dinas Kesehatan	(237.199.999,99)	Koreksi pencatatan aset tetap per 31 Desember 2021 sebesar (Rp237.199.999,99), merupakan Koreksi Kurang catat Nilai Aset Berdasarkan KIB BMD-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Pendingin sebesar Rp0,02 (UPT. RSJ Tampan), Koreksi Lebih Catat Nilai Aset (Alat Kedokteran Umum) Berdasarkan KIB BMD 2021 sebesar (Rp0,01) (UPT. RSJ Tampan) dan Koreksi Nilai Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang sebesar (Rp237.200.000,00) (DINKES).
Satuan Polisi Pamong Praja	(0,01)	Koreksi Pencatatan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin 2021 sebesar Rp0,01 yang merupakan koreksi nilai Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar (Alat Komunikasi) Telephone, berupa asset *Handy Talky* (HT), dikarenakan pada tahun sebelumnya dicatat secara gelondongan senilai Rp6,482,474.23 sementara di BMD dicatat sebagai 2 buah HT senilai @ Rp3,241,237.11.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,02	Koreksi Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,02 merupakan Koreksi Nilai Alat Kantor dan Rumah Tangga.
Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	(990.000,00)	Koreksi Pencatatan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2021 sebesar (Rp990.000,00) merupakan Koreksi Nilai Alat Laboratorium Umum (Koreksi Aset *Ekstracomtable* tahun lalu).
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	(8.903.598,00)	Koreksi Pencatatan Nilai Aset Tetap Peralatan dan mesin berupa per 31 Desember 2021 sebesar (Rp8.903.598,00) merupakan Reklas antar Aset Tetap Pengadaan tahun sebelumnya ke Peralatan dan mesin yang merupakan Koreksi Nilai Alat Bengkel dan Alat Ukur sebesar Rp8.777.098,00 dan Koreksi Nilai Alat Peraga sebesar Rp126.500,00 .

Nama OPD	Nilai (Rp)	Keterangan
Dinas Penanaman Modal Satu Pintu	1.805.400,00	Koreksi Pencatatan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.805.400,00 merupakan Koreksi Kurang Catat Kursi Rapat Ruangan Rapat Staff.
Sekretariat DPRD	274.905.000,00	Koreksi Pencatatan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2021 sebesar Rp274.905.000,00 merupakan koreksi Kurang catat aset tetap - kendaraan dinas beserta akumulasi penyusutannya
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	(7.487.089,06)	Koreksi Pencatatan Aset tetap per 31 Desember 2021 sebesar (Rp7.487.089,06) merupakan kesalahan pencatatan Koreksi Nilai Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp7.487.089,16, Koreksi Nilai Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebesar Rp0,09 dan Koreksi Nilai Komputer sebesar Rp0,10.
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	(141.424.045,00)	Koreksi Pencatatan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2021 sebesar (Rp141.424.045,00) merupakan Koreksi Nilai Peralatan dan Mesin (Double catat dengan Setda) sebesar (Rp314.621.500,00) dan Catat Baru Aset alat angkutan darat bermotor kendaraan bermotor penumpang Rp173.197.455,00.
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	(82.725.967,30)	Koreksi Pencatatan Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 sebesar (Rp82.725.967,30) merupakan Koreksi Nilai Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp77.889.232,00 dan Koreksi Nilai Alat Kedokteran dan Kesehatan sebesar Rp4.836.735,30 yang merupakan Koreksi Aset *Ekstracomtable* .
TOTAL	**(Rp53.193.342.474,01)**	

- Koreksi Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan

  Koreksi Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 sebesar (Rp2.701.845.712,57). Koreksi Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan dapat dirincikan sebagai berikut:

Nama OPD	Nilai (Rp)	Keterangan
Dinas Pendidikan	(1.128.745.276,57)	Koreksi Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 sebesar (Rp1.128.745.276,57) merupakan Koreksi Saldo Awal Gedung Tempat Pendidikan Rp177.543.365,00; Ektracomptable Gedung dan Bangunan dari Tahun 2018 (Rp1.306.288.641,57)
Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.012.499,00	Koreksi Pencatatan Aset Tetap Gedung dan bangunan per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.012.499,00 merupakan Koreksi Pencatatan Aset Tetap ini disebabkan adanya perubahan atau reklas kode rekening atas Aset Tetap karena adanya perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 menjadi

Nama OPD	Nilai (Rp)	Keterangan
		Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 sebesar Rp1.012.500,00; Lebih Saji pencatatan Gedung dan Bangunan (Rp1,00).
Sekretariat DPRD	(1.574.112.935,00)	Koreksi Pencatatan Aset Tetap Gedung dan bangunan per 31 Desember 2021 sebesar (Rp1.574.112.935,00) merupakan koreksi Kurang saji pencatatan Aset Tetap Bangunan Gedung Tempat Olahraga Rp399.210.001,00; koreksi Lebih saji pencatatan Aset Tetap Bangunan Gedung Garasi/Pool (Rp0,20); koreksi Lebih saji pencatatan Aset Tetap Bangunan Gedung Kantor (Rp835.118.449,10); Koreksi Lebih saji pencatatan Aset Tetap Rumah Negara Golongan I (Rp1.138.204.486,70).
TOTAL	**(2.701.845.712,57)**	

- Koreksi Nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

Koreksi Nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2021 sebesar (10.861.341.957,74). Koreksi Nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat dirincikan sebagai berikut:

Nama OPD	Nilai (Rp)	Keterangan
Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	(11.105.205.958,06)	Koreksi Nilai Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2021 sebesar (Rp11.105.205.958,06), Koreksi Pencatatan Aset Tetap ini disebabkan adanya perubahan atau reklas kode rekening atas Aset Tetap karena adanya perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 menjadi Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,32	Koreksi Nilai Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,32 merupakan Koreksi Aset dan Akumulasi Penyusutan yang merupakan Koreksi Nilai Instalasi sebesar Rp0,23 dan Koreksi Nilai Bangunan Air sebesar 0,09.
Dinas Kebudayaan	192.815.000,00	Koreksi Nilai Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2021 sebesar Rp192.815.000,00 merupakan Aset Catat Baru Bangunan Air.
Sekretariat DPRD	19.600.000,00	Koreksi Nilai Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2021 sebesar Rp19.600.000,00 merupakan Kurang saji Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	31.449.000,00	Koreksi Nilai Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2021 sebesar Rp31.449.000,00 merupakan kesalahan pencatatan yang merupakan Koreksi Nilai Jaringan Sebesar Rp31.449.000,00.
TOTAL	**(10.861.341.957,74)**	

- Koreksi Nilai Aset Tetap lainnya

Koreksi Nilai Aset Tetap lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp11.147.007.808,98. Koreksi Nilai Aset Tetap Aset Tetap lainnya dapat dirincikan sebagai berikut:

Nama OPD	Nilai (Rp)	Keterangan
Dinas Pendidikan	23.426.851,00	Koreksi Nilai Aset Tetap lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp23.426.851,00 merupakan Koreksi Pencatatan Aset Tetap Lainnya, Koreksi Nilai Bahan Perpustakaan.
Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	11.105.205.958,00	Koreksi Nilai Aset Tetap lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp11.105.205.958,00 merupakan Kurang saji pencatatan Aset Tetap Dalam Renovasi.
Dinas Kebudayaan	18.000.000,00	Koreksi Nilai Aset Tetap lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp18.000.000,00 merupakan Aset Catat Baru Aset Tetap Lainnya, Koreksi Nilai Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	374.999,98	Koreksi Nilai Aset Tetap Lainnya merupakan koreksi Nilai Bahan Perpustakaan sebesar Rp375.000,00 dan Koreksi Nilai Aset Tetap Dalam Renovasi sebesar Rp0,02.
TOTAL	**11.147.007.808,98**	

- Koreksi Nilai Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan

  Koreksi Nilai Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp 219.901.850,00. Koreksi Nilai Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dirincikan sebagai berikut:

Nama OPD	Nilai (Rp)	Keterangan
Dinas Pendidikan	219.901.850,00	Koreksi Nilai Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp219.901.850,00 merupakan Koreksi Tambah Konstruksi Dalam Pengerjaan.
TOTAL	**219.901.850,00**	

5.4.2.4 Koreksi Pencatatan Aset Lainnya

Koreksi Pencatatan Aset Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp187.207.850,84 dan per 31 Desember 2020 sebesar (Rp892.648.346,97) atau mengalami kenaikan sebesar

Rp1.079.856.197,81. Koreksi Pencatatan Aset Lainnya dapat dirincikan sebagai berikut:

- Koreksi Nilai Aset Lainnya Aset Lain-lain

  Koreksi Nilai Aset Lainnya Aset Lain-lain per 31 Desember 2021 sebesar Rp187.207.850,84. Koreksi Nilai Aset Lainnya Aset Lain-lain dapat dirincikan sebagai berikut:

Nama OPD	Nilai (Rp)	Keterangan
Dinas Pendidikan	0,03	Koreksi Pencatatan Aset Lainnya per 31 Desember 2021 merupakan Koreksi Tambah Nilai Aset Lainnya Aset Lain-lain sebesar Rp0,03.
Dinas Penanaman Modal Satu Pintu	(1.805.400,00)	Koreksi Pencatatan Aset Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar (Rp1.805.400,00) yaitu aset lainnya berupa Mesin Hitung elektronik/*calculator* yang harga satuannya kecil dari Rp500.000,00, atau sebesar Rp300.900,00 sebanyak 5 buah.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	13.250,81	Koreksi Pencatatan Aset Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp13.250,81 merupakan Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya (Aset Rusak Berat).
Sekretariat DPRD	189.000.000,00	Koreksi Pencatatan Aset Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp189.000.000,00 merupakan Kurang saji pencatatan aset lain-lain.
TOTAL	**187.207.850,84**	

5.4.2.5 Koreksi Pencatatan Penyusutan Aset Tetap

Koreksi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar (Rp394.858.281.256,68) dan (Rp158.032.846.984,41) atau mengalami kenaikan sebesar (Rp236.825.434.272,27) dari nilai Tahun 2021. Koreksi Penyusutan Aset tetap dapat dirincikan sebagai berikut:

- Koreksi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin

  Koreksi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 sebesar Rp44.463.433.834,88. Koreksi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dapat dirincikan sebagai berikut:

Nama OPD	Nilai (Rp)	Keterangan
Dinas Pendidikan	40.233.431.998,16	Koreksi akumulasi penyusutan aset tetap peralatan mesin per 31 Desember 2021 sebesar Rp40.233.431.998,16 merupakan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin (Rp5.106.958.839,09); dan Koreksi Akumulasi Peralatan Mesin akibat koreksi Ektracomptable Peralatan dan mesin Rp45.340.390.837,25.
Dinas Kesehatan	162.831.243,19	Koreksi akumulasi penyusutan aset tetap peralatan mesin per 31 Desember 2021 sebesar Rp162.831.243,19, merupakan koreksi dari DINKES sebesar Rp313.949.610,54 yang terdiri dari: Koreksi Pencatatan Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 sebesar Rp76.749.610,54 merupakan Koreksi (Cr) Akm Aset Lainnya karena perubahan UE akibat reklas Rp103.582.836,20; Koreksi (Cr) Akm AT karena perubahan UE akibat reklas Rp92.025; Koreksi (Cr) Akm Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena perubahan UE akibat reklas Rp661.500,00; Koreksi (Dr) Akm Penyusutan AT Peralatan dan Mesin- Rumah Tangga karena kesalahan pencatatan Rp4.861.450,00; Koreksi (Dr) Akm Penyusutan AT Peralatan dan Mesin-Alat Kantor karena kesalahan pencatatan Rp22.725.300,00;Koreksi (Dr)Akm Penyusutan AT karena pembulatan decimal Rp0,66.Koreksi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan Darat Bermotor Penumpang (Rp237.200.000,00), Merupakan Koreksi Lebih susut Peralatan dan Mesin Tahun Sebelumnya (Perubahan Umur ekonomis) Rp34.560.900,24; Lebih Susut Akum Peny Alat Bantu-Electric Generating Set Tahun Sebelumnya (Rp0,02); Lebih Susut Akum Peny Alat Bantu-Pompa Tahun Sebelumnya Rp0,05 ; Kurang Susut Akum Peny Alat Bantu-Alat Bantu Tahun Sebelumnya Rp0,02 ; Lebih Susut Akum Peny Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang Rp0,03; Lebih Susut Akum Peny Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus Rp0,01; Lebih Susut Akum Peny Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya Rp0,01 ; Lebih Susut Akum Peny Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Khusus Rp0,01 ; Lebih susut Akum Peny Alt Rumah Tangga-Alt Rumah Lainnya (*Home Use*) Rp0,58 ; Lebih susut Akum Peny Alt Rumah Tangga-Alt Pendingin Rp0,02 ; Lebih susut Akum Peny Meja dan Kursi Kerja/ Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat 0,01 ; Kurang Susut Akum Peny Meja dan Kursi Kerja/ Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat (Rp2,33); Kurang Susut Akum Peny Meja dan Kursi Kerja/ Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat (Rp0,02); Lebih susut Akum Peny Alat Studio-Peralatan Studio Audio Rp0,02; Lebih susut Akum Peny Alt Komunikasi-Alt Komunikasi Radio HF/ FM Rp0,10; Kurang susut Akum Peny Alat Studio-Alat Studio (Rp0,98); Lebih susut Akum Peny Peralatan

Nama OPD	Nilai (Rp)	Keterangan
		Pemancar-Peralatan Antena UHF 0,01; Lebih susut Akum Peny Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum Rp0,25; Lebih susut Akum Peny Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi Rp0,01; Lebih susut Akum Peny Alat Kedokteran-Alat Kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan Rp0,01; Lebih susut Akum Peny Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radiodiagnostic Rp0,06; Kurang susut Akum Peny Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jiwa (Rp0,56); Kurang susut Akum Peny Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya (Rp0,03); Lebih susut Akum Peny Unit Alat Laboraturium-Alt Laboraturium Umum Rp0,13;Lebih susut Akum Peny Unit Alat Laboraturium-Alt Laboraturium Patologi Rp0,01 ;Lebih susut Akum Peny Unit Alat Laboraturium-Alt Laboraturium Kesehatan Kerja Rp0,05 ; Kurang susut Akum Peny Komputer Unit-Personal Computer (Rp0,28) (UPT. RSJ Tampan), Koreksi Pencatatan Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 sebesar (Rp185.679.264,74) merupakan koreksi kurang catat Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp309.569.737,92 dan koreksi lebih catat Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp123.890.473,18 (berdasarkan Audit KAP tahun 2020) (UPT. RSUD Petala Bumi).
Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	259.277.182,62	Koreksi penyusutan aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2021 sebesar Rp259.277.182,62, Koreksi Pencatatan Aset Tetap ini disebabkan adanya perubahan atau reklas kode rekening atas Aset Tetap karena adanya perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 menjadi Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.
Satuan Polisi Pamong Praja	0,20	Koreksi Pencatatan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,20 yang terdiri dari: Koreksi Pencatatan Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan. Koreksi Pencatatan Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan pada 31 Desember 2021 sebesar (Rp0.01) merupakan Koreksi Akumulasi Penyusutan s/ d 2020 dikarenakan perhitungan system penyusutan yang menggunakan *TRUNC*. Koreksi Pencatatan Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang. Koreksi Pencatatan Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang pada 31 Desember 2021 sebesar Rp0,01 merupakan Koreksi Akumulasi Penyusutan s/ d 2020 dikarenakan perhitungan system penyusutan yang menggunakan *TRUNC*.

Nama OPD	Nilai (Rp)	Keterangan
		Koreksi Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua.
		Koreksi Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua pada 31 Desember 2021 sebesar Rp0,01 merupakan Koreksi Akumulasi Penyusutan s/d 2020 dikarenakan perhitungan system penyusutan yang menggunakan *TRUNC*.
		Koreksi Akumulasi Penyusutan Alat Alat Rumah Tangga – Pendingin.
		Koreksi Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga dan Pendingin sebesar (Rp0,17) merupakan Koreksi Akumulasi Penyusutan s/ d 2020 dikarenakan adanya mutasi antar aset, pemecahan aset dan perhitungan system penyusutan yang menggunakan *TRUNC*.
		Koreksi Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga – Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*).
		Koreksi Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya pada 31 Desember 2021 sebesar (Rp0,06) yang merupakan koreksi akibat adanya mutasi antar aset pemecahan aset dan perhitungan system penyusutan yang menggunakan *TRUNC*.
		Koreksi Akumulasi Penyusutan Non Senjata Api pada 31 Desember 2021 sebesar Rp0,01 merupakan Koreksi Akumulasi Penyusutan s/d 2020 dikarenakan perhitungan system penyusutan yang menggunakan *TRUNC*.
		Koreksi Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer – Peralatan Komputer Lainnya sebesar (Rp0,01) dikarenakan perhitungan system penyusutan yang menggunakan *TRUNC*.
Dinas Sosial	454.414.746,00	Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 sebesar Rp454.414.746,00. Merupakan jumlah koreksi Koreksi Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin s/ d 2020 karena reklas ke Persediaan berdasarkan BA Rekon BMD No. 930/ BPKAD-PBMD/ 2021/ 138 sebesar Rp100.000.000,00 tanggal 2 Desember 2021. Dan merupakan tambah/ kurang catat dari akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin tahun sebelumnya sebasar (Rp354.414.746.00).
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	127.554.844,02	Koreksi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 sebesar Rp127.554.844,02 merupakan Koreksi Penyusutan Karena *Extracomtable* sebesar Rp127.554.842,59, Koreksi Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel sebesar (Rp0,01), koreksi karena lebih catat akumulasi penyusutan sebesar Rp1,44.
Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura	(267.243.597,89)	Koreksi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 sebesar (Rp267.243.597,89) merupakan Koreksi lebih catat Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone sebesar Rp3.111.345,26, Koreksi lebih catat Akumulasi Penyusutan Unit Alat

Nama OPD	Nilai (Rp)	Keterangan
		Laboratorium- Alat Laboratorium Umum sebesar Rp866.250,00, Koreksi kurang catat Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang sebesar (Rp-14.072.393,15, Koreksi kurang catat Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Timbangan/ Biara sebesar Rp-6.993.800,00, Koreksi kurang catat Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya sebesar (Rp-751.000,00), Koreksi kurang catat Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*) sebesar (Rp-1.564.000,00), Koreksi kurang catat Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus (aset Hibah) sebesar (Rp-247.840.000,00) .
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	(7.128.000,94)	Koreksi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 Sebesar (Rp7.128.000,94) merupakan Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset tetap Peralatan dan Mesin tahun sebelumnya.
Dinas Perhubungan	4.559.417.433,92	Koreksi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 sebesar (Rp4.559.417.433,92) merupakan koreksi karena menyesuaikan umur manfaat.
Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu	41.867.348,76	Koreksi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 sebesar Rp41.867.348,76 merupakan Koreksi kelebihan pencatatan Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer sebesar Rp38.662.397,55, Koreksi kelebihan pencatatan Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer sebesar Rp1.338.529,75, Koreksi kelebihan Pencatatan Akumulasai Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya sebesar Rp3.671.821,47, Koreksi kekurangan Pencatatan Akumulasi Penyusutan alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan sebesar (Rp, 0,01), Koreksi Kelebihan Pencatatan Penyusutan aset tetap lainnya sebesar (Rp1.805.400,00) yaitu aset lainnya berupa Mesin Hitung elektronik/ calculator yang harga satuannya kecil dari 500 rb, atau sebesar Rp300.900,00 sebanyak 5 buah.
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	(3.157.137,90)	Koreksi Pencatatan Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.157.137,90. Koreksi ini terjadi karena kurang catat di Peralatan dan Mesin sebesar Rp3.157.137,90. Terdiri dari Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor – Kendaraan Bermotor Penumpang sebesar Rp0.04 , Akumulasi Penyusutan Alat Kantor – Alat kantor Lainnya Sebesar Rp1.987.700,00 . Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja Pejabat- Meja Kerja Pejabat sebesar Rp0.06 , Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan Umum – Alat Kesehatan Lainnya sebesar Rp103.349.245.584,84 , Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer - Mainframe sebesar Rp3.630.000,00, Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer – Personal

Nama OPD	Nilai (Rp)	Keterangan
		Komputer sebesar Rp10.860.398,83 , Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer – Peralatan Jaringan sebesar Rp46.615.250,00.
Dinas Kebudayaan	(0,30)	Koreksi Pencatatan Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,30 dapat dirincikan sebagai berikut: Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin sebesar (Rp0,02), Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio sebesar (Rp0,028).
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	706.295,66	Koreksi Pencatatan Penyusutan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 sebesar Rp706.295,66 Merupakan koreksi akumulasi penyusutan karena adanya perpindahan kelompok aset menyesuaikan dengan kode barang yang baru, sehingga menyebabkan perubahan masa manfaat aset sebesar Rp706.295,66.
Dinas Kelautan dan Perikanan	(4.475.428.957,00)	Koreksi Pencatatan Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 sebesar (Rp4.475.428.957,00) yaitu merupakan Koreksi Penyusutan hibah Kementrian kelautan dan Perikanan Dirjen Pengolahan dan Pengolahan Hasil perikanan sebesar (Rp1.208.466.594,00), Koreksi Penyusutan Hibah Kementrian kelautan dan Perikanan Dirjen Perikanan Tangkap tahun 2018 sebesar (Rp144.910.000,00), Koreksi Penyusutan Hibah Kementrian kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Penguat Daya saing Produk kelautan dan Perikanan sebesar (Rp1.735.890.000,00), Koreksi Penyusutan Hibah Kementrian kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal perikanan budidaya sebesar (Rp1.386.162.363,00).
Dinas Pariwisata	(0,01)	Koreksi penyusutan aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2021 sebesar (Rp0,01). Koreksi ini terjadi akibat adanya perhitungan ulang terhadap penyusutan tahun 2020.
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	985.050,25	Koreksi penyusutan aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2021 sebesar Rp985.050,25 merupakan Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2020 yang terdiri dari Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga Rp0,25 dan Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel sebesar Rp985.050,00.
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	(0,03)	Koreksi Penyusutan Aset Tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2021 adalah sebesar (Rp0,03). Ini merupakan Koreksi Akumulasi penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Peralatan Umum sebesar (Rp2.640.000,00), Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar Lainnya sebesar (Rp0,01), Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Komputer lainnya sebesar (Rp2.639.999,97), Akumulasi Penyusutan Unit Alat

Nama OPD	Nilai (Rp)	Keterangan
		Laboratorium – Unit Alat Laboratorium Lainnya sebesar (Rp0,01), Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*) sebesar (Rp0,01), Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya sebesar (Rp0,03), Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya sebesar (Rp0,01) dan Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Lainnya sebesar Rp0,07.
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	(321.100.000,00)	Koreksi Penyusutan Aset Tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2021 sebesar (Rp321.100.000.000,00) merupakan Koreksi atas penyusutan aset tetap Peralatan dan Mesin Alat Angkutan Darat Bermotor (Mobil Setrada 2007) Hibah dari Kementrian tahun 2020 sebesar (Rp321.000.000,00).
Sekretariat DPRD	(315.926.389,13)	Koreksi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 sebesar (Rp315.926.389,13) merupakan Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2021 (Rp41.021.389,13); dan Kurang catat aset tetap - kendaraan dinas beserta akumulasi penyusutannya (Rp274.905.000,00)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Pengembangan	10.479.838,28	Koreksi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2021 sebesar Rp10.479.838,28 terdiri dari Koreksi Kesalahan Pencatatan tahun 2020 sebesar (Rp0,28), Koreksi Akumulasi Penyusutan Peralatan dan mesin (Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/ Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat) sebesar (Rp13.250,60) dan Kesalahan Pencatatan Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*) sebesar Rp10.493.089,16.
Badan Pendapatan Daerah	786.522.139,30	Koreksi Pencatatan Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2021 sebesar Rp786.522.139,30 merupakan Koreksi Penyusutan Peralatan dan Mesin tahun 2020 yang terdiri dari Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-sebesar (Rp864.530.340,15), Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang sebesar (Rp0,06), Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang sebesar (Rp0,05), Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua sebesar (Rp0,22), Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik sebesar 9Rp0,02) Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe sebesar (Rp0,04), Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Electric Generating Set sebesar Rp0,01, Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/ Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat sebesar Rp7.203.710,23 dan Akumulasi

Nama OPD	Nilai (Rp)	Keterangan
		Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer sebesar Rp70.804.491,00.
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	3.451.871.391,29	Koreksi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.451.871.391,29 merupakan Koreksi Pencatatan Penyusutan Aset Tetap sebesar (Rp578.470.154,14) merupakan Koreksi lebih catat Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin- Perkakas Bengkel Khusus sebesar (Rp23.073.160,00), Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya sebesar (Rp3.542.164,60), Kurang catat Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang sebesar Rp416.083.773,74, Kurang catat penyusutan peralatan komputer- peralatan personal komputer Rp12.443.625,00 dan Kurang catat penyusutan peralatan komputer- peralatan komputer lainnya Rp3.360.625,00. Kurang catat penyusutan alat angkutan darat bermotor kendaraan bermotor penumpang (Rp173.197.455,00) dan Koreksi Pencatatan Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp4.030.341.545,43 terdiri dari lebih catat akumulasi penyusutan alat bantu- mesin bor (Rp0,01), Hibah (Akumulasi Penyusutan) Peralatan dan Mesin Ke Kota Dumai (Rp672.940.513,00), Hibah (Akumulasi Penyusutan) Peralatan dan Mesin Ke Kota Pekanbaru (Rp1.923.705.758,21), Koreksi Nilai (Akumulasi Penyusutan) Peralatan dan Mesin (Double catat dengan Setda) (314.621.500,00), Hibah (Keluar) Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Ke Panti Asuhan (Rp163.407.122,00), Hibah (Keluar) Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Ke Dewan Kesenian Riau (Rp346.124.509,30), Hibah (Keluar) Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin ke Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru (Rp390.557.142,86), Hibah (Keluar) Peralatan dan Mesin ke Gerakan Pramuka Kwartir Daerah (Rp218.985.000, 0,05).
Badan Kepegawaian Daerah	(12.531.806,85)	Koreksi Penyusutan Aset Tetap Peralatan Mesin per 31 Desember 2021 sebesar (Rp12.531.806,85), merupakan Koreksi Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya sebesar Rp0,16, Koreksi Akumulasi Penyusutan –Alat Kantor Lainnya sebesar Rp709.584.438,87, Koreksi Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Linnya (*Home Use*) sebesar (Rp653.781.999,03), Koreksi Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/ Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat sebesar (Rp62.904.249,53), Koreksi Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Alat studio lainnya sebesar (Rp32.591.122,60), Koreksi Akumulasi Penyusutan Perlatan Komputer-Peralatan computer lainnya sebesar (Rp3.499.997,26), Koreksi Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya sebesar Rp0,02.

Nama OPD	Nilai (Rp)	Keterangan
Badan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia	(27.232.938,31)	Koreksi Penyusutan Aset Tetap Peralatan Mesin per 31 Desember 2021 sebesar (Rp27.232.938,31), merupakan: Koreksi peralatan dan mesin karena salah pencatatan akumulasi penyusutan, yang terdiri dari: Alat kantor lainnya sebesar Rp5.751.400,00, Alat rumah tangga lainnya sebesar Rp30.165.769,64, Meja kerja pejabat sebesar Rp16.409.999,99, Meja rapat pejabat sebesar Rp3.899.999,97, Kursi rapat pejabat sebesar Rp3.285.000,00, Alat komunikasi radio HF/ FM sebesar Rp127.500,00, Personal computer sebesar Rp9.156.499,98, Alat kesahatan umum lainnya sebesar Rp4.836.735,30, Kendaraan dinas bermotor perorangan sebesar (Rp16.569.258,96), Kendaraan dinas bermotor penumpang sebesar (Rp80.874.592,88), Kursi kerja pejabat sebesar (Rp379.891,32), Alat studio lainnya sebesar sebesar (Rp3042.100,03).
Inspektorat	(196.176.848,41)	Koreksi Penyusutan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 sebesar (Rp196.176.848,41) merupakan Koreksi Akumulasi Penyusutan Peralatan dan mesin yang terdiri dari Koreksi kurang Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Alat Studio Lainnya sebesar (Rp8.048.079,29), Koreksi Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor LAinnya sebesar Rp83.265.280,34, Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya sebesar Rp9.202.515,00, Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*) sebesar Rp64.362.230,39, Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/ Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat sebesar Rp21.063.651,99 dan Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya sebesar Rp26.331.249,98.
TOTAL	**44.463.433.834,88**	

- Koreksi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan

  Koreksi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 sebesar Rp14.847.912.257,11 Koreksi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dapat dirincikan sebagai berikut:

Nama OPD	Nilai (Rp)	Keterangan
Dinas Pendidikan	(22.392.897.631,37)	Koreksi akumulasi penyusutan aset tetap gedung dan bangunan per 31 Desember 2021 sebesar (Rp22.392.897.631,37) merupakan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan (Rp22.536.359.988,96); danoreksi Akumulasi Gedung akibat koreksi Ektracomptabel Gedung Rp143.462.357,59.
Dinas Kesehatan	35.128.723,34	Koreksi akumulasi penyusutan aset tetap gedung dan bangunan per 31 Desember 2021 sebesar Rp35.128.723,34 merupakan Kurang susut Akum Peny Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor (Rp 0,01);Kurang susut Akum Peny Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan (Rp 0,01); Kurang susut Akum Peny Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga (Rp 0,01); Koreksi (lebih Susut) Akum Peny Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya (Rp 0,01) ; Koreksi (lebih Susut) Akum Peny Bangunan Gedung Tempat Kerja Bangunan Gudang 35.128.723,38 (UPT. RSJ Tampan).
Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.216.283.409,47	Koreksi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.216.283.409,47, Koreksi Pencatatan Aset Tetap ini disebabkan adanya perubahan atau reklas kode rekening atas Aset Tetap karena adanya perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 menjadi Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.
Satuan Polisi Pamong Praja	(836.837,75)	Koreksi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 sebesar (Rp836.837,75) merupakan Koreksi Akumulasi Penyusutan Rumah Dinas sd.Thn 2020.
Badan Penanggulangan Bencana dan Daerah	5.645.918.224,97	Koreksi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 sebesar Rp5.645.918.224,97 merupakan Kesalahan Pencatatan Tahun lalu Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp5.645.918.224,97.
Dinas Sosial	154.922.714,00	Koreksi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 senilai Rp154.922.714,00 Merupakan koreksi Koreksi Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan s/ d 2020 karena reklas ke Persediaan berdasarkan BA Rekon BMD No. 930/ BPKAD-PBMD/ 2021/ 138 tanggal 2 Desember 2021.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	357.829.060,00	Koreksi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 sebesar Rp357.829.060,00 merupakan Koreksi karena aset menjadi persediaan diserahkan pada masyarakat dan koreksi karena lebih catat.
Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura	66.069.798,45	Koreksi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 sebesar Rp66.069.798,45 merupakan Koreksi lebih catat Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama sebesar Rp0,01,

Nama OPD	Nilai (Rp)	Keterangan
		Koreksi lebih catat Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp66.069.798,61, Koreksi kurang catat Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Untuk Bengkel/ Hanggar sebesar (Rp0,01), Koreksi kurang catat Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Laboratorium sebesar (Rp0,02), Koreksi kurang catat Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Ibadah sebesar (Rp0,01), Koreksi kurang catat Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Pertemuan sebesar (Rp0,01), Koreksi kurang catat Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum sebesar (Rp0,01), Koreksi kurang catat Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II sebesar (Rp0,04), Koreksi kurang catat Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/ Wisma/ Bungalow/ Tempat Peristirahatan sebesar(Rp0,03), Koreksi kurang catat Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Pagar sebesar (Rp0,03), Koreksi kurang catat Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Tugu/ Tanda Batas Lainnya sebesar (Rp0,01).
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	(949.410.345,79)	Koreksi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 sebesar (Rp949.410.345,79) merupakan Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset tetap Gedung dan Bangunan tahun sebelumnya sebesar Rp193.938.778,49 dan Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset tetap Gedung dan Bangunan tahun sebelumnya sebesar (Rp1.143.349.124,28).
Dinas Perhubungan	718.948.924,31	Koreksi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 sebesar Rp718.948.924,31, merupakan koreksi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp718.948.924,31, dikarenakan koreksi menyesuaikan umur manfaat.
Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	(2.927.466.085,24)	Koreksi Pencatatan Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 sebesar (Rp2.927.466.085,25). Yang terdiri dari Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja – Bangunan Gedung Kantor sebesar (Rp394.650.674,24) , Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja – Bangunan Gudang sebesar (Rp1.516.189,30), Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja – Bangunan gedung tempat olahraga sebesar (Rp2.531.299.221,71).
Dinas Kebudayaan	4.320.058,53	Koreksi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 sebesar Rp4.320.058,53 dapat dirincikan sebagai berikut: Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gudang Rp0,01, Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat

Nama OPD	Nilai (Rp)	Keterangan
		Kerja- Bangunan Gedung Tempat Ibadah sebesar Rp0,02, Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Pertemuan sebesar Rp0,02, Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung untuk Pos Jaga Rp0,01Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Museum sebesar Rp0,01, Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Pagar sebesar Rp27.800.516,47 karena adanya reklas Bangunan Menara (Pagar) ke Tugu Tanda Batas-Pagar sehingga menamnah masa manfaat, Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya sebesar (Rp0,01), Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/ Wisma/ Bungalow/ Tempat Peristirahatan sebesar Rp0,01, Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Pertokoan/ Koperasi/ Pasar sebesar (Rp23.480.458,00) karena adanya hibah dari PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA ke Dinas Kebudayaan.
Dinas Kelautan dan Perikanan	(1.148.892.711,21)	Koreksi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 sebesar (Rp1.148.892.711,21) merupakan Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan.
Dinas Perkebunan	(836.837,75)	Koreksi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 sebesar (Rp836.837,75) merupakan koreksi akumulasi penyusutan Bangunan Gedung tempat Tinggal (yg merupakan mutasi aset rumah negara gol 2 dari PPKD).
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,01	Koreksi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,01. Merupakan Koreksi atas penyusutan aset tetap Gedung dan Bangunan berupa Tugu Tanda batas-Pagar yang lebih catat di tahun 2020 sebesar Rp0,01.
Sekretariat Daerah	27.579.187.406,93	Koreksi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 sebesar Rp27.579.187.406,93 merupakan Koreksi saldo awal akumulasi penyusutan bangunan gedung tempat ibadah.
Sekretariat DPRD	1.019.152.067,03	Koreksi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.019.152.067,03 merupakan Koreksi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Tahun 2021 Rp0,01; Kurang saji pencatatan Aset Tetap Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Olahraga Rp 657.036.458,51; Lebih saji pencatatan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Garasi/Pool Rp41.178.740,77; Lebih saji pencatatan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Perpustakaan Rp28.595.291,66; Lebih saji pencatatan Aset Tetap Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor Rp295.045.712,42; Lebih saji pencatatan Aset Tetap Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I (Rp2.704.136,34).

Nama OPD	Nilai (Rp)	Keterangan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	(904.550.873,57)	Koreksi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 sebesar (Rp904.550.873,57) merupakan Kesalahan Pencatatan Akumulasi Penyusutan yang terdiri dari Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp904.972.647,51 dan Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Linnya sebesar (Rp421.773,94).
Badan Pendapatan Daerah	(1.593.475.661,93)	Koreksi penyusutan aset tetap gedung dan bangunan per 31 Desember 2021 sebesar (Rp1.593.475.661,93) merupakan Koreksi Penyusutan Bangunan Gedung Kantor yang terdiri dari Koreksi tambah Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp1.374.344.897,72, Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan sebesar Rp8.175.728,66, Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan sebesar Rp155.211.253,49, Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja sebesar Rp8.474.117,83, Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Tinggal sebesar Rp40.075.950,39 dan Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Pagar sebesar Rp7.193.713,84.
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	8.117.374.405,19	Koreksi Pencatatan Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2021 sebesar Rp1.265.864.878,79 merupakan Koreksi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan senilai Rp442.103.060,00 karena adanya Hibah Aset ke Masyarakat dan Koreksi Penyusutan Aset tetap Jalan, Irigasi dan jaringan senilai Rp823.761.818,79 karena adanya karena adanya Hibah Aset ke Masyarakat.
Badan Kepegawaian Daerah	0,01	Koreksi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bngunan per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,01 yang merupakan Koreksi Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp0,01.
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	(148.855.550,52)	Koreksi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 sebesar (Rp148.855.550,52) merupakan Koreksi gedung dan bangunan karena salah pencatatan akumulasi penyusutan yang terdiri dari: Gedung tempat kerja - bangunan gedung tempat pertemuan sebesar Rp504.554.220,00, Bangunan gedung tempat pendidikan sebesar Rp387.923.492,21, Bangunan gedung perpustakaan sebesar Rp3.459.491.825,76, Bangunan gedung tempat tinggal- mess/ wisma/ bunglow/ tempat peristirahatan sebesar Rp975.972.051,49, Asrama sebesar Rp50.171.000,00, Bangunan Gedung Kantor sebesar (Rp5.229.257.038,94).
TOTAL	**14.847.912.257,11**	

- Koreksi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

Koreksi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2021 sebesar (Rp444.250.782.362,53). Koreksi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaring an dapat dirincikan sebagai berikut:

Nama OPD	Nilai (Rp)	Keterangan
Dinas Pendidikan	(391.187.795,06)	Koreksi Penyusutan Aset Tetap Jalan irigasi dan jaringan per 31 Desember 2021 sebesar (Rp391.187.795,06 merupakan Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan.
Dinas Kesehatan	(1.119.846.872,04)	Koreksi penyusutan aset tetap Jalan irigasi dan jaringan per 31 Desember 2021 sebesar (Rp1.119.846.872,04), yaitu Koreksi pencatatan penyusutan aset tetap Jalan irigasi dan jaringan per 31 Desember 2021 (UPT. RSUD Arifin Ahmad) sebesar (Rp1.119.846.872,16) terdiri dari: koreksi penyusutan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan-akumulasi penyusutan instalasi gas-instalasi gardu gas sebesar (Rp48.475.000,00) serta akumulasi penyusutan instalasi lain-instalasi lain sebesar (Rp1.071.371.872,16). Koreksi penyusutan aset tetap jalan dan irigasi dikarenakan kesalahan dalam menentukan masa manfaat nya, Koreksi pencatatan penyusutan aset tetap Jalan irigasi dan jaringan per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,12 merupakan Lebih Susut Akum Peny Instalasi Lain-Instalasi Lain 0,06 ; Lebih Susut Akum Peny Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya 0,01; Lebih Susut Akum Peny Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi 0,02 ; Kurang Susut Akum Peny Candi/ Tugu Peringatan/ Prestasi-Candi/ Tugu Peringatan/ Prestasi Lainnya (0,01).
Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	(491.244.321.710,77)	Koreksi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2021 sebesar (Rp491.244.321.710,77), Koreksi Pencatatan Aset Tetap ini disebabkan adanya perubahan atau reklas kode rekening atas Aset Tetap karena adanya perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 menjadi Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.
Satuan Polisi Pamong Praja	601.420,00	Koreksi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2021 sebesar Rp601,420.00 yang merupakan Koreksi Akumulasi Penyusutan s/ d 2020 akibat adanya kelebihan catat.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	515.987.210,82	Koreksi Penyusutan Aset tetap Jalan, Irigasi dan jaringan per 31 Desember 2021 senilai Rp515.987.210,82 merupakan Koreksi karena aset menjadi persediaan diserahkan pada masyarakat dan koreksi karena lebih catat sebesar Rp823.761.818,79, dan Koreksi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar (Rp307.774.607,97) dikarenakan menyamakan tahun perolehan

Nama OPD	Nilai (Rp)	Keterangan
		dari data Pengurus barang dan mencocokan dengan WS overhoul JIJ.
Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura	(3.692.617,53)	Koreksi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2021 sebesar (Rp3.692.617,53) merupakan Koreksi lebih catat Akumulasi Penyusutan Jaringan Telepon- Jaringan Telepon di bawah Tanah sebesar Rp0,01, Koreksi lebih catat Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi sebesar Rp0,02, Koreksi lebih catat Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi sebesar Rp0,03, Koreksi lebih catat Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum-Jaringan Cabang Distribusi sebesar Rp0,01, Koreksi lebih catat Akumulasi Penyusutan Instalasi Pertahanan- Instalasi Pertahanan di Darat sebesar Rp0,01, Koreksi lebih catat Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel sebesar Rp0,01, Koreksi lebih catat Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/ Air Baku-Instalasi Air Bersih/ Air Baku Lainnya sebesar Rp0,01, Koreksi lebih catat Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor- Bangunan Pembuang Air Kotor sebesar Rp0,01, Koreksi lebih catat Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/ Air Baku-Bangunan Pelengkap Air Bersih/ Air Baku sebesar Rp0,02, Koreksi lebih catat Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut sebesar Rp0,05, Koreksi lebih catat Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi- Bangunan Pelengkap Irigasi sebesar Rp0,01, Koreksi lebih catat Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi- Bangunan Pengaman Irigasi sebesar Rp0,01, Koreksi lebih catat Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi- Bangunan Pembawa Irigasi sebesar Rp0,02, Koreksi lebih catat Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi- Bangunan Pengambilan Irigasi sebesar Rp0,02, Koreksi kurang catat Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Provinsi sebesar (Rp0,11), Koreksi kurang catat Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Khusus sebesar (Rp0,02), Koreksi kurang catat Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi sebesar (Rp0,01), Koreksi kurang catat Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan

Nama OPD	Nilai (Rp)	Keterangan
		Waduk Pengembangan Rawa sebesar (Rp2,14), Koreksi kurang catat Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum-Jaringan Pembawa sebesar (Rp3.692.615,49).
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2.644.358.748,48	Koreksi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2021, merupakan Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset tetap Jalan, Irigasi dan tahun sebelumnya sebesar Rp2.644.358.748,48.
Dinas Perhubungan	45.618.464.915,68	Koreksi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan jaringan per 31 Desember 2021 sebesar Rp45.618.464.915,68 merupakan merupakan koreksi karena menyesuaikan umur manfaat.
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	667.516.082,12	Koreksi Pencatatan Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2021 sebesar Rp667.516.082,12. Yang terdiri dari Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih – Instalasi Air Tanah Dalam sebesar Rp166.666.,66 , Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih - Instalasi Air Bersih / Air Baku Lainnya sebesar Rp620.387,13 , Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik - Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) sebesar Rp2.470.628,68 , Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik- Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel sebesar Rp817.730,05 , Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik – Instalasi Pengatur Listrik sebesar Rp12.228.160,00 , Akumulasi Penyusutan Instalasi Pertanahan - Instalasi Pertanahan di Darat sebesar Rp60.501,60 , Akumulasi Penyusutan Instalasi Lain - Instalasi Lain sebesar Rp1.565.552,73 , Akumulasi Penyusutan Instalasi Jaringan Air Minum - Jaringan Air Minum Lainnya Sebesar Rp7.548,46 , Akumulasi Penyusutan Instalasi Jaringan Listrik – Jaringan Transmisi sebesar Rp1.356.747,72 , Akumulasi Penyusutan Instalasi Jaringan Telephone - Jaringan Telephone diatas Tanah Rp900.000,00.
Dinas Kebudayaan	(50.131.900,00)	Koreksi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2021 sebesar (Rp50.131.900,00) merupakan Koreksi Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi.
Dinas Kelautan dan Perikanan	(684.562.080,86)	Koreksi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2021 sebesar (Rp684.562.080,86) merupakan koreksi Penyusutan Hibah Kementrian kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal perikanan budidaya.
Sekretariat Daerah	(370.333,35)	Koreksi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2021 sebesar (Rp370.333,35) merupakan koreksi akumulasi penyusutan sampai dengan Tahun 2020 karena adanya koreksi umur ekonomis.

Nama OPD	Nilai (Rp)	Keterangan
Sekretariat DPRD	(173.936.294,00)	Koreksi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2021 sebesar (Rp173.936.294,00) merupakan Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan untuk JARINGAN TELEPON - JARINGAN TELEPON DIATAS TANAH Per 1 Januari 2021.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Pengembangan	(2.096.600,00)	Koreksi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2021 sebesar (Rp2.096.600,00) merupakan Kesalahan Pencatatan Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum – Jaringan Air Minum Lainnya.
Badan Kepegawaian Daerah	(0,02)	Koreksi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2021 sebesar (Rp0,02) merupakan Koreksi Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/ Air Baku-Bangunan Pembuang Air Bersih/ Air Baku.
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	(27.564.536,00)	Koreksi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2021 sebesar (Rp27.564.536,00) merupakan Koreksi jalan, irigasi dan jaringan karena kesalahan dalam pencatatan Akum. Peny. Bangunan air bersih/ air/ baku - bangunan waduk air bersih/ air baku.
TOTAL	**(444.250.782.362,53)**	

- Koreksi Penyusutan Aset Tetap Aset Tetap lainnya

  Koreksi Penyusutan Aset Tetap Aset Tetap lainnya per 31 Desember 2021 sebesar (Rp9.918.844.986,14). Koreksi Penyusutan Aset Tetap Aset Tetap lainnya dapat dirincikan sebagai berikut:

Nama OPD	Nilai (Rp)	Keterangan
Dinas Pendidikan	(12.650.234.605,30)	Koreksi Penyusutan Aset Tetap lainnya per 31 Desember 2021 sebesar (Rp12.650.234.605,30) merupakan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya.
Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	0,01	Koreksi Penyusutan Aset Tetap lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,01, merupakan koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi-Aset Tetap dalam Renovasi sebesar Rp0,01. Koreksi Pencatatan Aset Tetap ini disebabkan adanya perubahan atau reklas kode rekening atas Aset Tetap karena adanya perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 menjadi Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.

Nama OPD	Nilai (Rp)	Keterangan
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2.731.389.619,00	Koreksi Pencatatan Penyusutan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.731.389.619,00. Terdiri dari Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi – Aset Tetap Dalam Renovasi sebesar Rp2.731.389.619,00.
Dinas Kebudayaan	0,13	Koreksi Penyusutan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,13 merupakan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi-Aset Tetap Dalam Renovasi sebesar Rp0,13.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Pengembangan	0,02	Koreksi Penyusutan Aset Tetap lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,02 merupakan Koreksi Akumulasi Penyusutan Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik.
TOTAL	**(9.918.844.986,14)**	

5.4.2.6 Koreksi Pencatatan Amortisasi Aset Lainnya

Koreksi Amortisasi/ Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar (Rp191.807.975,42) dan (Rp1.451.023.309,97) atau mengalami penurunan sebesar Rp1.259.215.334,55 dari nilai Tahun 2020. Koreksi Amortisasi/ Penyusutan Aset Lainnya dapat dirincikan sebagai berikut:

- Koreksi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

  Koreksi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2021 sebesar (Rp4.613.375,00). Koreksi Amortisasi Aset Tidak Berwujud dapat dirincikan sebagai berikut:

Nama OPD	Nilai (Rp)	Keterangan
Dinas Pendidikan	(4.613.375,00)	Koreksi Pencatatan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar (Rp4.613.375,00) merupakan koreksi Amortisasi dari Aset Tidak Berwujud.
TOTAL	**(4.613.375,00)**	

- Koreksi Amortisasi Aset Lainnya

  Koreksi Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar (Rp187.194.600,42). Koreksi Amortisasi Aset Lainnya dapat dirincikan sebagai berikut:

Nama OPD	Nilai (Rp)	Keterangan
Dinas Energi Sumber Daya dan Mineral	(0,42)	Koreksi Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar (Rp0,42) merupakan koreksi kurang catat tahun 2020 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya sebesar (Rp0,42).
Dinas Penanaman Modal Satu Pintu	1.805.400,00	Koreksi Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.805.400,00 merupakan koreksi tambah akumulasi tahun sebelumnya.
Sekretariat DPRD	(189.000.000,00)	Koreksi Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar (Rp189.000.000,00) Kurang saji pencatatan aset lain-lain.
TOTAL	**(187.194.600,42)**	

5.4.2.7 Koreksi Pencatatan Kewajiban

Koreksi Pencatatan Kewajiban Per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp2.030.712.242,84 dan Rp11.531.246.054,90 atau mengalami kenaikan sebesar (Rp9.500.533.812,06) dari nilai Tahun 2020. Koreksi Pencatatan Kewajiban dapat dirincikan sebagai berikut.

- Koreksi Nilai Kewajiban

  Koreksi Nilai Kewajiban per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.030.712.242,84. Koreksi Nilai Kewajiban dapat dirincikan sebagai berikut:

Nama OPD	Nilai (Rp)	Keterangan
Dinas Pendidikan	18.050.600,00	Koreksi Pencatatan Kewajiban per 31 Desember 2021 sebesar Rp18.050.600,00 merupakan Koreksi Utang Belanja Pegawai tahun 2020 karena sebagian gurunya ada yang meninggal dan ada juga guru Kemenag.

Nama OPD	Nilai (Rp)	Keterangan
Dinas Kesehatan	1.603.067.543,58	Koreksi Pencatatan Kewajiban per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.603.067.543,58 merupakan Koreksi Pencatatan Kewajiban per 31 Desember 2021 sebesar Rp86.123.353,58 merupakan koreksi yang timbul karena kekeliruan sumber data saat melaporkan utang, sehingga adanya selisih antara jumlah utang yang dicatat dan dibayarkan oleh bendahara sebesar Rp86.123.353,58; Koreksi lebih catat utang belanja barang dan jasa BLUD tahun sebelumnya yang sudah dilakukan pembayaran Rp8.030.000,00 (UPT. RSUD Arifin Achmad), Koreksi Pencatatan Kewajiban per 31 Desember 2021 sebesar Rp38.867.803,00 merupakan Koreksi Pencatatan Utang Jasa Pelayanan TA 2020 sebesar Rp38.867.803,00 (UPT. RSJ Tampan), dan Koreksi Pencatatan Kewajiban per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.470.046.387,00 merupakan Koreksi Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-bahan karena Perhitungan Estimasi Jasa Layanan Desember 2020 sebesar Rp1.470.046.387,00 (UPT. RSUD Petala Bumi).
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	385.397.209,26	Koreksi pencatatan Kewajiban per 31 Desember 2021 sebesar Rp385.397.209,26 merupakan Koreksi Pencatatan Pencatatan Kewajiban ini disebabkan adanya pembayaran atas kewajiban yang dibayarkan di Tahun-tahun sebelumnya tetapi belum dicatat pada saat kewajiban tersebut dibayarkan. Rincian koreksi pencatatan kewajiban tersebut adalah sebagai berikut: Pekerjaan Pengawasan Mesjid Baiturrahim Desa Pebaun Hilir Kec.Kuantan Mudik Kab.Kuansing BAP No.178/ BAP-TRTB/ 2015, sebesar Rp12.892.000,00 Pembayaran retensi 5% dari Pekerjaan Rehabilitasi dan Peningkatan Daerah Irigasi Sei. Silam Kabupaten Kampar pada Kegiatan Rehabilitasi dan Peningkatan Daerah Irigasi Sei. Silam Kabupaten Kampar Bidang Sumber Daya Air Dinas CIPTADA Provinsi Riau, Tahun Anggaran 2016, berdasarkan Surat Perjanjian/ Kontrak: Nomor: 611/ CIPTADA/ SDA/ SP/ 09/ 2016 tanggal: 01 Juni 2016 Add I Nomor: 611/ CIPTADA/ SDA/ SP/ ADD/ 09.01/ 2016 tanggal: 09 Juli 2016 Sesuai dengan berita acara dan bukti-bukti Pembayaran terlampir.SPM No.01342/ 1.03.02/ SPM/ LS/ IV/ 2016, sebesar Rp37.138.755,06 Pembayaran Sertifikat Bulanan (MC) No. 05 (Sisa Pekerjaan yang dijamin dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak) Kegiatan Preservasi Jembatan Provinsi Wilayah I Pemeliharaan Jembatan Fly Over Simpang Jalan Tuanku Tambusai Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020. Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Harga Satuan: Nomor: 630/ SPHS-PUPRPKPP/ BM-FOST/ 230/ 2020 Tanggal:

Nama OPD	Nilai (Rp)	Keterangan
		8 September 2020 Addendum - I (kesatu) Nomor: 630/ ADD-PUPRPKPP/ BM-FOST/ 230.a/ 2020 Tanggal: 1 Desember 2020 Addendum - I (kesatu) Nomor: 630/ ADD-PUPRPKPP/ BM-FOST/ 230.a/ 2020 Tanggal: 1 Desember 2020 Addendum - II (Final) Nomor: 630/ ADD-PUPRPKPP/ BM-FOST/ 230.b/ 2020 Tanggal: 14 Desember 2020 Jaminan Pelaksanaan Nomor: BG61120023106 Tanggal: 7 September 2020 Perubahan Jaminan Pelaksanaan Nomor: BG61120023106 Tanggal: 07 September 2020 No Perubahan: 01 Tanggal Perubahan: 04 Desember 2020 Jaminan Uang Muka Nomor: SBD 2020 04.00 1 00028788 Tanggal: 8 September 2020 BAP Nomor: 673/ BAP-BM/ PUPRPKPP/ 2020 Tanggal: 14 Desember 2020 Sesuai Bukti-bukti pembayaran Terlampir, sebesar Rp89.265.808
		Pembayaran Retensi 5% Kegiatan Preservasi Jembatan Provinsi Wilayah I Pemeliharaan Jembatan Fly Over Simpang Jalan Tuanku Tambusai Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020. Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Harga Satuan: Nomor: 630/ SPHS-PUPRPKPP/ BM-FOST/ 230/ 2020 Tanggal: 8 September 2020 Addendum - I (kesatu) Nomor: 630/ ADD-PUPRPKPP/ BM-FOST/ 230.a/ 2020 Tanggal: 1 Desember 2020 Addendum - I (kesatu) Nomor: 630/ ADD-PUPRPKPP/ BM-FOST/ 230.a/ 2020 Tanggal: 1 Desember 2020 Addendum - II (Final) Nomor: 630/ ADD-PUPRPKPP/ BM-FOST/ 230.b/ 2020 Tanggal: 14 Desember 2020 Jaminan Pelaksanaan Nomor: BG61120023106 Tanggal: 7 September 2020 Perubahan Jaminan Pelaksanaan Nomor: BG61120023106 Tanggal: 07 September 2020 No Perubahan: 01 Tanggal Perubahan: 04 Desember 2020 Jaminan Uang Muka Nomor: SBD 2020 04.00 1 00028788 Tanggal: 8 September 2020
		Jaminan Pemeliharaan Nomor: SBD 2020 04.00 1 00066360 Tanggal:14 Desember 2020
		BAP Nomor: 674/ BAP-BM/ PUPRPKPP/ 2020 Tanggal: 14 Desember 2020 Sesuai Bukti-bukti pembayaran Terlampir, sebesar Rp50.735.445,00
		Pembayaran Pertama/ Terakhir 100% Pekerjaan Pembangunan/ Peningkatan Kualitas PSU Kawasan Permukiman Kelurahan Kota Batu Reteh, sebesar Rp166.820.000,00
		Pembayaran Retensi 5% Pekerjaan Pembangunan/ Peningkatan Kualitas PSU Kawasan Permukiman Kelurahan Sungai Salak, sebesar Rp8.780.000,00
		Pembayaran Retensi 5% Pekerjaan Pembangunan/ Peningkatan Kualitas PSU Kawasan Permukiman

Nama OPD	Nilai (Rp)	Keterangan
		Kelurahan Lubuk Gaung 3, sebesar Rp9.490.000,00
		Pembayaran Pertama/ Terakhir 100%Pembangunan/ Peningkatan Kualitas PSU Kawasan Permukiman Kelurahan Labuh Baru Barat 3, sebesar Rp285.000,00
		Pembayaran Pertama/ Terakhir 100% Pekerjaan Pembangunan/ Peningkatan Kualitas PSU Kawasan Permukiman Kelurahan Serembah Jaya, sebesar Rp8.967.050,00
		Pembayaran Pertama dan Terakhir Sebesar 100% Pekerjaan Pembangunan/ Peningkatan Kualitas PSU Kawasan Permukiman Kelurahan Melayu Besar 4, sebesar Rp0,70
		Pembayaran Pertama dan Terakhir Sebesar 100% Pekerjaan Pembangunan/ Peningkatan Kualitas PSU Kawasan Permukiman Kelurahan Melayu Besar 5, sebesar Rp0,50
		Pembayaran Pertama/ Terakhir sebesar 100% Pekerjaan Pembangunan/ Peningkatan Kualitas PSU Kawasan Permukiman Kelurahan Rimba Melintang 6, sebesar Rp950.000,00.
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	21.600.000,00	Koreksi Nilai Kewajiban per 31 Desember 2021 sebesar Rp21.600.000,00 merupakan Pembayaran kelebihan retribusi (sewa gedung) tahun 2020.
Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura	1.419.500,00	Koreksi Pencatatan Kewajiban per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.419.500,00. Hal ini terjadi karena Koreksi Lebih catat utang internet .
Dinas Pariwisata	992.050,00	Koreksi Pencatatan Kewajiban per 31 Desember 2021 sebesar Rp992.050,00, Koreksi tersebut terjadi akibat adanya kesalahan pencatatan nilai pemakaian listrik Tahun 2020.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Pengembangan	185.340,00	Koreksi Pencatatan Kewajiban per 31 Desember 2021 sebesar Rp185.340,00, Koreksi tersebut merupakan Koreksi Kesalahan Pencatatan tahun sebelumnya.
TOTAL	**2.030.712.242,84**	

d. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir per 31 Desember 2021 sebesar Rp 32.347.067.347.275,80

5.5 PENJELASAN POS – POS NERACA

Neraca memuat posisi Aset, Kewajiban dan Ekuitas Pemerintah Provinsi Riau per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp32.661.359.359.579,40 dan Rp33.046.060.172.047,20 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	31-Des-21	31-Des-20	Kenaikan/ Penurunan
Aset	**32.661.359.359.579,40**	**33.046.060.172.047,20**	**(384.700.812.467,77)**
Aset Lancar	1.404.325.058.228,42	1.149.164.363.920,04	255.160.694.308,38
Investasi Jangka Panjang	1.662.765.044.306,26	1.614.521.036.919,67	48.244.007.386,59
Aset Tetap	29.337.967.893.095,60	30.035.685.584.228,50	(697.717.691.132,88)
Aset Lainnya	256.301.363.949,16	246.689.186.979,02	9.612.176.970,14
Kewajiban	**314.292.012.303,66**	**234.272.884.343,43**	**80.019.127.960,23**
Kewajiban Jangka Pendek	314.292.012.303,66	234.272.884.343,43	80.019.127.960,23
Ekuitas	**32.347.067.347.275,80**	**32.811.787.287.703,80**	**(464.719.940.427,97)**

5.5.1 Aset Lancar - Kas di Kas Daerah

Saldo Kas di Kas Daerah Pemerintah Provinsi Riau per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp845.931.634.123,86 dan Rp453.718.643.193,59. Jumlah kas di Kas Daerah Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp392.212.990.930,27 dibandingkan dengan Tahun 2020.

Saldo Kas di Kas Daerah merupakan saldo yang ditempatkan pada 5 (lima) bank ditambah deposito dikurangi saldo hasil rekonsiliasi adalah sebesar Rp846.201.116.063,41 + Rp0,00 – Rp269.481.939,55= Rp845.931.634.123,86, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Bank	**846.201.116.063,41**	**453.735.326.523,14**
PT Bank Riau Kepri	**846.200.968.953,45**	**453.735.179.413,18**
Rekening 101.01.00043	28.047.829.586,91	38.970.222.918,71
Rekening 101.01.00044	555.340.492.232,29	71.972.825.501,56
Rekening 101.01.00045	213.975.405.792,00	3.297.844.371,00

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Rekening 101.01.00046	48.837.241.342,25	339.494.286.621,91
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	**81.517,27**	**81.517,27**
Rekening 108-00-1156304-07	81.517,27	81.517,27
PT Bank Mandiri Syariah	**0,00**	**0,00**
Rekening 5000000002	0,00	0,00
Rekening 7034448331	0,00	0,00
PT Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk.	**0,00**	**0,00**
Rekening 022407911-4	0,00	0,00
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	**0,00**	**0,00**
Rekening 00000170-01-001720-30-7	0,00	0,00
PT Bank Bukopin	**65.592,69**	**65.592,69**
Rekening 1.002.877.224	65.592,69	65.592,69
Setara Kas	0,00	0,00
Hasil Rekonsiliasi (diringkas/ rincian dihapus)	**269.481.939,55**	**16.683.329,55**
Koreksi Penerimaan	16.694.000,05	16.694.000,05
Kurang Posting Bank	254.601.250,50	0,50
Lebih Posting Bank	(148.637.528,00)	(3,00)
Pengeluaran yang telah dicatat oleh Bank tetapi tidakdicatat dalam pembukuan (kesalahan Bank)	(10.050,00)	(10.668,00)
SP2D Outstanding	146.834.267,00	0,00
JUMLAH KAS DI KASDA	**845.931.634.123,86**	**453.718.643.193,59**

Per 31 Desember 2021 Pemerintah Provinsi Riau tidak memiliki deposito dan Utang Pemotongan Pajak Pusat yang belum disetor ke Kas Negara.

SP2D beredar *(outstanding)* per 31 Desember 2021 sebesar Rp 146.834.267,00 Merupakan No SP2D: 12072/ SP2D/ LS/ IV/ 2021 tanggal 30 Desember 2021, 12089/ SP2D/ LS/ IV/ 2021 tanggal 31 Desember 2021, 12088/ SP2D/ LS/ IV/ 2021 tanggal 31 Desember 2021, 09976/ SP2D/ LS/ IV/ 2021 tanggal 23 Desember 2021, 09500/ SP2D/ LS/ IV/ 2021 tanggal 21 Desember 2021, 10693/ SP2D/ LS/ IV/ 2021 tanggal 24 Desember 2021, 10648/ SP2D/ LS/ IV/ 2021 tanggal 24 Desember 2021 dan 10896/ SP2D/ LS/ IV/ 2021 tanggal 27 Desember 2021 dan dapat dilihat pada **Lampiran 24**.

Saldo Kas di Kas Daerah Pemerintah Provinsi Riau per 31 Desember 2021 sebesar Rp845.931.634.123,86 yang terdiri dari sisa dana *earmark* / dana peruntukan khusus dan dana bersih kas daerah yang siap untuk digunakan. Sisa dana *earmark* dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2021
DAK Fisik S/D 2020	**50.157.479.573,00**
DAK Fisik TA 2021	**27.055.516.192,00**
DBH DR TA 2021	**3.666.487.888,00**
DAK Non Fisik TA 2021	**14.569.145.527,00**
BOS Reguler TA 2019	3.138.080.000,00
Tunjangan Profesi Guru Thn 2021	8.613.617.140,00
Tambahan Penghasilan Guru Thn 2021	520.500.000,00
Tunjangan Khusus Guru Thn 2021	8.400.800,00
Bantuan Operasional Kesehatan Thn 2021	1.325.374.514,00
Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya Thn 2021	312.649.827,00
Dana Peningkatan Pengelolaan Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan Thn 2021	230.232.288,00
Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan Thn 2021	175.556.458,00
Dana Perlindungan Perempuan dan anak Thn 2021	103.095.750,00
Dana Fasilitas Penanaman Modal Thn 2021	141.638.750,00
DID TA 202	**2.925.055.152,00**
Sisa Dana Earmark	**98.373.684.332,00**

Saldo dana *earmark* pada Kas di Kas Daerah berjumlah Rp98.373.684.332,00 dan dana bersih kas daerah yang siap untuk digunakan sebesar Rp747.557.949.791,86.

5.5.2 Aset Lancar - Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2021 dan 2020 masing- masing sebesar Rp21.908.350,00 dan Rp45.853.700,00. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan ini mengalami penurunan sebesar Rp23.945.350,00 dari tahun 2020.

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang belum disetor ke Kas Daerah per 31 Desember 2021 dan 2020 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	31-Des-21	31-Des-20
Dinas Kesehatan	1.042.000,00	6.000.000,00
RSUD Petala Bumi	0	1.042.000,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	0	600.000,00
Dinas Perhubungan	20.866.350,00	38.211.700,00
Jumlah	**21.908.350,00**	**45.853.700,00**

Kas di Bendahara Penerimaan Tahun 2021 masing-masing perangkat daerah dijelaskan sebagai berikut:

a. Kas di Bendahara Penerimaan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp1.042.000,00, hal ini merupakan saldo bank Unit Pelaksana Teknis Bersifat Khusus RSUD Petala Bumi pada rekening Bank Rakyat Indonesia Nomor 17001001664307 yang merupakan rekening jamkesmas RSUD Petala Bumi Pekanbaru, yang sebenarnya sudah nihil.

b. Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan per 31 Desember 2021 sebesar Rp20.866.350,00 yang belum disetor ke Kas Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

5.5.3 Aset Lancar - Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp4.380.017.105,72 dan Rp6.714.553.639,00. Saldo kas di Bendahara Pengeluaran Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp2.334.536.533,28 dari Tahun 2020.

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan Sisa Uang yang belum disetor ke kas daerah oleh bendahara pengeluaran per 31 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	31-Des-21	31-Des-20
Kas Tunai di Bendahara Pengeluaran (Dana BOS)	3.935.044.145,00	5.772.835.223,00
Sisa Uang Persediaan	444.972.960,72	941.718.416,00
Potongan Pajak Pusat	0,00	0,00
Uang Titipan	0,00	0,00
Jumlah	**4.380.017.105,72**	**6.714.553.639,00**

a. Kas di Bendahara Pengeluaran pada 7 perangkat daerah per 31 Desember 2021 sebesar Rp4.380.017.105,72. Kas di bendahara pengeluaran merupakan Uang Persediaan dan Tambah Uang yang belum disetor per 31 Desember 2021 dan telah disetor ke Kas Daerah pada tanggal 02 Januari s/d 31 Januari 2022.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran menurut perangkat daerah sebagai berikut:

Perangkat Daerah	31 Des 2021	31 Des 2020
Dinas Pendidikan	3.935.044.145,00	5.772.835.223,00
Dinas Kesehatan	123.957.249,00	435.739.753,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	31.639.026,72	0,00
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	14.400,00	0,00
Sekretariat Daerah	257.611.908,00	505.918.663,00
Badan Pendapatan Daerah	20.600.127,00	0,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	11.150.250,00	0,00
PPKD	0,00	60.000,00
Jumlah	**4.380.017.105,72**	**6.714.553.639,00**

Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun 2021 masing-masing perangkat daerah dijelaskan sebagai berikut:

Kas Dibendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan sebesar Rp123.957.249,00 yang merupakan rincian dari sisa uang yg harus disetor Rp159.497,00 dan koreksi belanja hibah sebesar Rp123.797.752,00.

Kas Dibendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp31.639.026,72 merupakan sisa belanja LS yang belum disetor ke Kas Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan per 31 Desember 2021 adalah Rp14.400,00 karena terdapat Sisa Uang Persediaan yang disetor di Tahun 2022 pada tanggal 5 Januari 2022.

Kas Dibendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah merupakan sisa Uang Persediaan sebesar Rp257.611.908,00 yang belum disetorkan ke kas Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

Kas Dibendahara Pengeluaran pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp20.600.127,00 merupakan sisa uang Persediaan yang belum disetor ke Kas Daerah oleh bendahara pengeluaran sampai dengan 31 Desember 2021.

Kas Dibendahara Pengeluaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp11.150.250,00 merupakan pengembalian belanja LS yang belum disetor ke Kas Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

Kas di Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan adalah kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 sebesar Rp3,935,044,145.00 yang merupakan pengembalian dari dana BOSDA dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Jumlah
Jenjang SMA	1.368.731.447,00
Jenjang SMK	2.544.968.698,00
SLB	21.344.000,00
Jumlah	**3.935.044.145,00**

Adapun rincian dari sekolah-sekolah sebagai berikut:

Jenjang SMA	Jumlah	Jenjang SMK	Jumlah	SLB	Jumlah
SMAN 5 TANAH PUTIH	1.782.500,00	SMKN 4 DUMAI	29.701.000,00	SLBN PEMBINA PKU	21.344.000,00
SMAN1 DUMAI	68.628.500,00	SMKN 5 DUMAI	11.184.000,00		
SMAN 2 SINGINGI	1.040.000,00	SMKN 1 SIMPANG KANAN	13.405.000,00		
SMAN 5 BAGAN SINEMBAH	8.000.000,00	SMK PERIKANAN	1.100.000,00		
SMAN 1 SINABOI	141.457.000,00	SMKN1 DUMAI	88.112.072,00		
SMAN 1 LIRIK	14.599.000,00	SMKN 2 DUMAI	627.704.200,00		
SMAN 2 BAGAN SINEMBAH	20.000.000,00	SMKN 1 BANDAR SEI KIJANG	2.080.750,00		
SMAN I UKUI KAB PELALAWAN	4.157.500,00	SMKN 1 PANGKALAN KURAS	7.766.484,00		
SMAN I RETEH	31.472.000,00	SMKN I UKUI	100.000,00		
SMAN 1 PASIR PENYU	157.651.800,00	SMKN 1 TANDUN	19.594.000,00		
SMAN 1 RAKIT KULIM	22.030.000,00	SMKN 1 UJUNG BATU	70.137.200,00		
SMAN DHARMA PENDIDIKAN	10.050.000,00	SMKN 1 BANGUN PURBA	1.620.000,00		
SMAN 1 BATU HAMPAR	2.818,00	SMKN 1 MINAS	1.915.000,00		
SMAN 1 KEPENUHAN	213.534.600,00	SMKN 1 MEMPURA	93.041.000,00		
SMAN 1 TAMBANG	105.400,00	SMKN 1 DAYUN	17.104.000,00		
SMAN 1 KUANTAN MUDIK	11.040.000,00	SMKN 1 RAMBAH SAMO	256.000,00		
SMAN PINTAR TALUK KUANTAN	4.900.000,00	SMKN 1 RAMBAH SAMO	19.285.000,00		
SMAN 1 TELUK KUANTAN	9.880.000,00	SMKN 1 KEPENUHAN	22.263.000,00		
SMAN 1 PANGEAN	11.000.000,00	SMKN 6 DUMAI	100.000,00		

Jenjang SMA	Jumlah	Jenjang SMK	Jumlah	SLB	Jumlah
SMAN 2 SINGINGI	1.040.000,00	SMKN 1 SINGINGI HILIR	2.100.000,00		
SMAN 1 LOGAS TANAH DARAT	26.000,00	SMKN 1 KUANTAN MUDIK	3.760.000,00		
SMAN 1 RAMBAH SAMO	45.825.000,00	SMKN 2 TAMBUSAI UTARA	10.000,00		
SMAN 1 RAMBAH SAMO	41.640.000,00	SMKN 4 PEKANBARU	121.845.000,00		
SMAN 2 DUMAI	250.000,00	SMKN 5 PKU	268.103.858,00		
SMAN 3 PEKANBARU	40.356.250,00	SMKN 7 PEKANBARU	338.700.000,00		
SMAN 1 BENGKALIS	4.535.000,00	SMKN PERTANIAN	435.835.475,00		
SMAN 2 BANTAN	9.105.000,00	SMKN 3 BENGKALIS	16.823.400,00		
SMAN 7 DUMA	968.500,00	SMKN 3 PKU	331.322.259,00		
SMAN 1 MANDAU	10.000,00				
SMA NEGERI 5 PEKANBARU	100.500.000,00				
SMAN 9 PKU	233.603.649,00				
SMAN 2 PKU	145.570.930,00				
SMAN OLAHRAGA	13.200.000,00				
SMAN 6 MANDAU.	250.000,00				
SMAN 1 MINAS	120.000,00				
SMAN 1 MINAS	400.000,00				
Jumlah	**1.368.731.447,00**	**Jumlah**	**2.544.968.698,00**	**Jumlah**	**21.344.000,00**

5.5.4 Aset Lancar - Kas di BLUD

Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp126,913,362,491.04 dan Rp63.085.040.912,14 merupakan saldo uang tunai pada Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan BLUD, saldo yang tersimpan pada bank, dan Utang PFK dengan rincian sebagai berikut:

Kas di BLUD	Jumlah
UPT. RSUD Arifin Ahmad	98.436.592.088,22
UPT. RSUD Petala Bumi	12.582.875.708,19
UPT. RS Jiwa Tampan	15.893.894.694,63
Jumlah	**126.913.362.491,04**

Rincian kas di BLUD UPT bersifat khusus RSUD Arifin Achmad sebagai berikut:

Uraian	Per 31-Des-2021
BANK	**98.426.145.988,22**
Saldo Bank - Bendahara Penerimaan BLUD-Rek. BRI 1720-01-000001-30-2	3.536.759.411,00
Saldo Bank - Bendahara Penerimaan BLUD-Rek. BSM 200-100000-15	361.734.605,46
Saldo Bank – Bendahara Pengeluaran BLUD - Rek. BRI 1720-01-000002-30-8	64.988.631.647,49

Uraian	Per 31-Des-2021
Saldo Bank – Bendahara Pengeluaran BLUD -Rek. BSM 200-100000-15	29.539.020.324,27
KAS TUNAI	**10.446.100,00**
Kas Tunai – Bendahara Penerimaan BLUD	5.446.100,00
Kas Tunai – Bendahara Pengeluaran BLUD	5.000.000,00
KAS	**98.436.592.088,22**

Rincian kas di BLUD UPT bersifat khusus RSUD Petala Bumi sebagai berikut:

Uraian	Per 31-Des-2021
BANK	**12.574.102.220,19**
Bank Riau (Bendahara Penerimaan) 10-10-10017-5	119.264.152,00
Bank Riau (Bendahara Pengeluaran) 10-10-10017-6	12.454.838.068,19
KAS TUNAI	**8.773.488,00**
Tunai di Bendahara Penerimaan (RSUD Petala Bumi)	8.773.488,00
KAS	**12.582.875.708,19**

Rincian kas di BLUD UPT bersifat khusus RSJ Tampan sebagai berikut:

Uraian	Per 31-Des-2021
BANK	**15.893.873.200,63**
Bank Rakyat Indonesia	5,163,667,789.00
Bank Riau	10,730,205,411.63
KAS TUNAI	**21,494.00**
Tunai di Bendahara Pengeluaran	21,494.00
KAS	**15,893,894,694.63**

5.5.5 Aset Lancar – Kas Dana BOS

Saldo Kas di Kas Dana BOS per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp6.537.356.480,00 dan Rp0,00. Saldo kas di Kas Dana BOS Tahun 2021 mengalami peningkatan Rp6.537.356.480,00 dari Tahun 2020.

Saldo Kas di Kas Dana BOS per 31 Desember 2021 sebesar Rp6.537.356.480,00 merupakan Kas di Bendahara Pengeluaran Dana BOS Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA SEKOLAH	KAS BOS TAHUN LALU	JUMLAH UANG YANG DITERIMA TAHUN INI	REALISASI SESUAI SP3B	SISA KAS
1	2	3	4	5	6=3+4-5
	KAB/ KOTA : Kab. Bengkalis				
1	SMAN 10 MANDAU	-	366.000.000,00	366.000.000,00	-
2	SMAN 1 BANTAN	-	752.550.000,00	740.534.070,00	12.015.930,00
3	SMAN 1 BENGKALIS	13.242.200,00	979.650.000,00	986.079.200,00	6.813.000,00
4	SMAN 1 BUKIT BATU	300.000,00	1.075.350.000,00	1.075.650.000,00	-
5	SMAN 1 MANDAU	33.887.900,00	1.896.450.000,00	1.927.577.650,00	2.760.250,00
6	SMAN 1 PINGGIR	-	1.304.700.000,00	1.304.700.000,00	-
7	SMAN 1 RUPAT	-	383.550.000,00	383.550.000,00	-
8	SMAN 1 RUPAT UTARA	288.033.813,00	565.050.000,00	181.041.990,00	672.041.823,00
9	SMAN 1 SIAK KECIL	237.691.680,00	557.400.000,00	791.891.430,00	3.200.250,00
10	SMAN 2 BANTAN	20.378.000,00	556.050.000,00	576.428.000,00	-
11	SMAN 2 BENGKALIS	-	978.600.000,00	978.600.000,00	-
12	SMAN 2 BUKIT BATU	-	584.700.000,00	584.700.000,00	-
13	SMAN 2 MANDAU	-	1.843.650.000,00	1.843.650.000,00	-
14	SMAN 2 PINGGIR	-	481.800.000,00	481.800.000,00	-
15	SMAN 2 RUPAT	-	227.700.000,00	227.700.000,00	-
16	SMAN 2 SIAK KECIL	-	399.150.000,00	399.150.000,00	-
17	SMAN 3 BANTAN	-	221.100.000,00	221.100.000,00	-
18	SMAN 3 BENGKALIS	-	596.400.000,00	596.400.000,00	-
19	SMAN 3 BUKIT BATU	-	433.650.000,00	433.626.000,00	24.000,00
20	SMAN 3 MANDAU	-	2.051.250.000,00	2.051.250.000,00	-
21	SMAN 3 PINGGIR	-	458.550.000,00	458.550.000,00	-
22	SMAN 3 RUPAT	-	387.600.000,00	387.600.000,00	-
23	SMAN 4 BENGKALIS	2.162.012,00	576.150.000,00	578.312.012,00	-
24	SMAN 4 MANDAU	-	1.615.800.000,00	1.615.800.000,00	-
25	SMAN 4 PINGGIR	-	655.050.000,00	655.050.000,00	-
26	SMAN 4 RUPAT	-	227.850.000,00	227.850.000,00	-
27	SMAN 5 BENGKALIS	-	293.100.000,00	293.100.000,00	-
28	SMAN 5 MANDAU	-	769.650.000,00	769.650.000,00	-
29	SMAN 5 PINGGIR	-	942.750.000,00	942.750.000,00	-
30	SMAN 6 MANDAU	8.450.000,00	1.058.400.000,00	1.063.280.000,00	3.570.000,00
31	SMAN 6 PINGGIR	150.000,00	308.250.000,00	308.250.000,00	150.000,00
32	SMAN 7 MANDAU	-	1.068.600.000,00	1.068.600.000,00	-
33	SMAN 8 MANDAU	-	1.796.550.000,00	1.796.550.000,00	-
34	SMAN 9 MANDAU	-	1.135.800.000,00	1.135.800.000,00	-
	KAB/ KOTA : Kab. Indragiri Hilir		-		
35	SMAN 1 CONCONG	-	330.243.000,00	330.243.000,00	-

NO	NAMA SEKOLAH	KAS BOS TAHUN LALU	JUMLAH UANG YANG DITERIMA TAHUN INI	REALISASI SESUAI SP3B	SISA KAS
36	SMAN 1 ENOK	-	561.588.000,00	561.588.000,00	-
37	SMAN 1 GAUNG	93.444.400,00	839.520.000,00	932.964.400,00	-
38	SMAN 1 GAUNG ANAK SERKA	-	836.782.000,00	836.782.000,00	-
39	SMAN 1 KATEMAN	83.429.682,00	1.529.863.000,00	1.573.852.250,00	39.440.432,00
40	SMAN 1 KERITANG	-	1.346.412.000,00	1.345.187.000,00	1.225.000,00
41	SMAN 1 MANDAH	-	593.388.000,00	593.388.000,00	-
42	SMAN 1 PELANGIRAN	-	232.458.000,00	232.458.000,00	-
43	SMAN 1 RETEH	-	1.124.289.000,00	1.124.289.000,00	-
44	SMAN 1 TANAH MERAH	30.863.882,00	974.352.000,00	1.005.215.882,00	-
45	SMAN 1 TEMBILAHAN	-	1.324.788.000,00	1.324.438.000,00	350.000,00
46	SMAN 1 TEMBILAHAN HULU	100.650.150,00	1.392.840.000,00	1.493.490.150,00	-
47	SMAN 1 TEMPULING	-	1.008.952.000,00	985.168.500,00	23.783.500,00
48	SMAN 2 ENOK	-	785.964.000,00	785.964.000,00	-
49	SMAN 2 Gaung	-	382.554.000,00	382.554.000,00	-
50	SMAN 2 TEMBILAHAN	2.822.692,00	617.653.000,00	618.705.692,00	1.770.000,00
51	SMAN BINA BHAKTI SAPAT	-	448.062.000,00	448.062.000,00	-
52	SMAN DHARMA PENDIDIKAN	26.531.800,00	968.946.000,00	972.227.050,00	23.250.750,00
53	SMA NEGERI 1 TELUK BELENGKONG	-	259.403.000,00	259.403.000,00	-
54	SMAN IT SYECH WALID THAIB SHALEH INDRAGIRI	-	216.240.000,00	211.365.000,00	4.875.000,00
55	SMAN TUAH GEMILANG	-	505.779.000,00	505.779.000,00	-
56	SMAN TUAH KEMUNING	-	924.294.000,00	924.294.000,00	-
57	SMAN TUNAS BANGSA	-	715.624.000,00	715.624.000,00	-
	KAB/ KOTA : Kab. Indragiri Hulu		-		
58	SMAN 1 BATANG CENAKU	-	771.300.000,00	771.300.000,00	-
59	SMAN 1 BATANG GANSAL	-	749.850.000,00	749.850.000,00	-
60	SMAN 1 KELAYANG	-	611.100.000,00	611.100.000,00	-
61	SMAN 1 LIRIK	-	594.000.000,00	586.987.000,00	7.013.000,00
62	SMAN 1 LUBUK BATU JAYA	-	177.150.000,00	177.150.000,00	-
63	SMAN 1 PASIR PENYU	29.000,00	1.193.700.000,00	905.430.950,00	288.298.050,00
64	SMAN 1 PERANAP	2.000,00	1.096.350.000,00	1.096.352.000,00	-
65	SMAN 1 RAKIT KULIM	-	171.600.000,00	171.600.000,00	-
66	SMAN 1 RENGAT	-	1.558.350.000,00	1.557.771.310,00	578.690,00

NO	NAMA SEKOLAH	KAS BOS TAHUN LALU	JUMLAH UANG YANG DITERIMA TAHUN INI	REALISASI SESUAI SP3B	SISA KAS
67	SMAN 1 RENGAT BARAT	-	939.450.000,00	939.450.000,00	-
68	SMAN 1 SEBERIDA	-	1.196.335.731,00	1.177.294.318,00	19.041.413,00
69	SMAN 1 SUNGAI LALA	-	810.300.000,00	771.259.000,00	39.041.000,00
70	SMAN 2 KELAYANG	-	330.150.000,00	330.150.000,00	-
71	SMAN 2 LUBUK BATU JAYA	-	122.700.000,00	122.700.000,00	-
72	SMAN 2 PERANAP	-	179.100.000,00	179.100.000,00	-
73	SMAN 2 RAKIT KULIM	-	207.000.000,00	207.000.000,00	-
74	SMAN 2 RENGAT	-	708.150.000,00	703.421.500,00	4.728.500,00
75	SMAN 2 RENGAT BARAT	-	467.100.000,00	462.521.080,00	4.578.920,00
76	SMAN 2 SUNGAI LALA	22.200,00	283.050.000,00	283.072.200,00	-
77	SMA NEGERI 1 KUALA CENAKU	-	141.900.000,00	136.900.000,00	5.000.000,00
78	SMA NEGERI 2 SEBERIDA	350.000,00	312.000.000,00	312.350.000,00	-
79	SMA NEGERI 3 PERANAP	-	246.300.000,00	246.200.000,00	100.000,00
	KAB/ KOTA : Kab. Kampar		-		
80	SMAN 1 BANGKINANG	-	526.200.000,00	524.894.623,00	1.305.377,00
81	SMAN 1 KAMPAR TIMUR	-	1.613.550.000,00	1.611.532.000,00	2.018.000,00
82	SMAN 1 PERHENTIAN RAJA	-	728.250.000,00	728.250.000,00	-
83	SMAN 2 KAMPAR TIMUR	-	221.550.000,00	221.550.000,00	-
84	SMAN 2 TAPUNG HULU	-	340.350.000,00	340.350.000,00	-
85	SMAN 3 TAPUNG HULU	-	835.350.000,00	835.350.000,00	-
86	SMA NEGERI 1 BANGKINANG KOTA	-	1.657.050.000,00	1.657.050.000,00	-
87	SMA NEGERI 1 GUNUNG SAHILAN	-	174.150.000,00	174.150.000,00	-
88	SMA NEGERI 1 KAMPAR	-	1.406.850.000,00	1.406.849.000,00	1.000,00
89	SMA NEGERI 1 KAMPAR KIRI	-	952.050.000,00	948.423.450,00	3.626.550,00
90	SMA NEGERI 1 KAMPAR KIRI HILIR	-	577.950.000,00	577.950.000,00	-
91	SMA NEGERI 1 KAMPAR KIRI HULU	15.000,00	425.850.000,00	422.729.004,00	3.135.996,00
92	SMA NEGERI 1 KAMPAR KIRI TENGAH	18.614.100,00	814.500.000,00	810.478.150,00	22.635.950,00
93	SMA NEGERI 1 KAMPAR UTARA	-	547.950.000,00	547.950.000,00	-
94	SMA NEGERI 1 KOTO KAMPAR HULU	-	420.150.000,00	420.150.000,00	-

NO	NAMA SEKOLAH	KAS BOS TAHUN LALU	JUMLAH UANG YANG DITERIMA TAHUN INI	REALISASI SESUAI SP3B	SISA KAS
95	SMA NEGERI 1 KUOK	49.109.000,00	237.150.000,00	280.544.700,00	5.714.300,00
96	SMA NEGERI 1 RUMBIO JAYA	-	459.750.000,00	459.750.000,00	-
97	SMA NEGERI 1 SALO	-	370.500.000,00	361.003.000,00	9.497.000,00
98	SMA NEGERI 1 SIAK HULU	-	575.550.000,00	573.241.650,00	2.308.350,00
99	SMA NEGERI 1 TAMBANG	10.271.145,00	918.450.000,00	927.912.160,00	808.985,00
100	SMA NEGERI 1 TAPUNG	-	922.200.000,00	922.200.000,00	-
101	SMA NEGERI 1 TAPUNG HILIR	-	918.450.000,00	918.450.000,00	-
102	SMA NEGERI 1 TAPUNG HULU	-	1.287.900.000,00	1.287.900.000,00	-
103	SMA NEGERI 1 XIII KOTO KAMPAR	-	488.550.000,00	488.550.000,00	-
104	SMA NEGERI 2 BANGKINANG KOTA	-	1.265.250.000,00	1.265.115.500,00	134.500,00
105	SMA NEGERI 2 GUNUNG SAHILAN	-	416.250.000,00	416.250.000,00	-
106	SMA NEGERI 2 KAMPAR	-	338.400.000,00	338.400.000,00	-
107	SMA NEGERI 2 KAMPAR KIRI	30.000,00	193.650.000,00	193.650.000,00	30.000,00
108	SMA NEGERI 2 KAMPAR KIRI TENGAH	68.000,00	376.050.000,00	376.050.000,00	68.000,00
109	SMA NEGERI 2 KOTO KAMPAR HULU	-	410.850.000,00	410.850.000,00	-
110	SMA NEGERI 2 KUOK	4.238.000,00	202.650.000,00	206.888.000,00	-
111	SMA NEGERI 2 RUMBIO JAYA	-	385.050.000,00	385.050.000,00	-
112	SMA NEGERI 2 SIAK HULU	-	1.766.700.000,00	1.766.700.000,00	-
113	SMA NEGERI 2 TAMBANG	-	1.639.950.000,00	1.608.451.676,00	31.498.324,00
114	SMA NEGERI 2 TAPUNG	-	553.200.000,00	553.200.000,00	-
115	SMA NEGERI 2 TAPUNG HILIR	454.949.151,00	892.350.000,00	1.139.690.151,00	207.609.000,00
116	SMA NEGERI 2 XIII KOTO KAMPAR	-	443.700.000,00	443.700.000,00	-
117	SMA NEGERI 3 GUNUNG SAHILAN	14.000,00	104.550.000,00	104.564.000,00	-
118	SMA NEGERI 3 SIAK HULU	26.917.900,00	934.200.000,00	959.990.500,00	1.127.400,00
119	SMA NEGERI 3 TAPUNG	-	968.100.000,00	968.100.000,00	-
120	SMA NEGERI 4 TAPUNG	-	197.700.000,00	197.273.040,00	426.960,00
121	SMA NEGERI 5 TAPUNG	-	549.900.000,00	549.900.000,00	-
	KAB/ KOTA : Kab. Kepulauan Meranti		-		

NO	NAMA SEKOLAH	KAS BOS TAHUN LALU	JUMLAH UANG YANG DITERIMA TAHUN INI	REALISASI SESUAI SP3B	SISA KAS
122	SMAN 2 RANGSANG	-	181.970.000,00	181.970.000,00	-
123	SMA NEGERI 1 MERBAU	-	502.316.000,00	489.716.000,00	12.600.000,00
124	SMA NEGERI 1 PULAU MERBAU	-	523.398.000,00	523.398.000,00	-
125	SMA NEGERI 1 RANGSANG	-	541.824.000,00	541.824.000,00	-
126	SMA NEGERI 1 RANGSANG BARAT	-	448.580.000,00	448.580.000,00	-
127	SMA NEGERI 1 RANGSANG PESISIR	-	256.172.000,00	256.172.000,00	-
128	SMA NEGERI 1 TASIK PUTRI PUYU	-	539.334.000,00	539.334.000,00	-
129	SMA NEGERI 1 TEBING TINGGI	59.986.200,00	1.269.236.000,00	1.266.005.300,00	63.216.900,00
130	SMA NEGERI 1 TEBING TINGGI BARAT	-	298.468.000,00	298.468.000,00	-
131	SMA NEGERI 1 TEBING TINGGI TIMUR	-	353.946.000,00	353.946.000,00	-
132	SMA NEGERI 2 RANGSANG PESISIR	-	319.882.000,00	319.882.000,00	-
133	SMA NEGERI 2 TEBING TINGGI	95.754.000,00	1.076.510.000,00	1.079.076.000,00	93.188.000,00
134	SMA NEGERI 2 TEBING TINGGI BARAT	-	251.324.000,00	250.820.000,00	504.000,00
135	SMA NEGERI 2 TEBING TINGGI TIMUR	-	250.362.000,00	250.362.000,00	-
136	SMA NEGERI 3 RANGSANG PESISIR	-	167.362.000,00	167.362.000,00	-
137	SMA NEGERI 3 TEBING TINGGI	1.005.900,00	166.214.000,00	167.219.900,00	-
138	SMA NEGERI 3 TEBING TINGGI BARAT	-	102.256.000,00	102.256.000,00	-
	KAB/ KOTA : Kab. Kuantan Singingi		-		
139	SMAN 1 BENAI	-	845.400.000,00	845.400.000,00	-
140	SMAN 1 CERENTI	-	1.053.750.000,00	1.053.750.000,00	-
141	SMAN 1 GUNUNG TOAR	8.058.990,00	580.200.000,00	579.065.140,00	9.193.850,00
142	SMAN 1 HULU KUANTAN	212.000.000,00	404.550.000,00	609.018.250,00	7.531.750,00
143	SMAN 1 INUMAN	-	683.100.000,00	683.100.000,00	-
144	SMAN 1 KUANTAN HILIR	-	854.850.000,00	854.850.000,00	-
145	SMAN 1 KUANTAN HILIR SEBERANG	812.000,00	509.250.000,00	510.062.000,00	-
146	SMAN 1 KUANTAN MUDIK	59.765.500,00	904.350.000,00	964.115.500,00	-
147	SMAN 1 LOGAS TANAH DARAT	-	330.750.000,00	330.750.000,00	-

NO	NAMA SEKOLAH	KAS BOS TAHUN LALU	JUMLAH UANG YANG DITERIMA TAHUN INI	REALISASI SESUAI SP3B	SISA KAS
148	SMAN 1 PANGEAN	560.500,00	543.750.000,00	531.756.500,00	12.554.000,00
149	SMAN 1 SENTAJO RAYA	-	396.900.000,00	396.900.000,00	-
150	SMAN 1 SINGINGI	-	443.100.000,00	443.100.000,00	-
151	SMAN 1 SINGINGI HILIR	-	261.750.000,00	261.750.000,00	-
152	SMAN 1 TELUK KUANTAN	9.500.000,00	1.345.950.000,00	1.355.450.000,00	-
153	SMAN 2 SENTAJO RAYA	-	498.900.000,00	498.900.000,00	-
154	SMAN 2 SINGINGI	-	691.350.000,00	691.350.000,00	-
155	SMAN 2 SINGINGI HILIR	-	668.100.000,00	663.472.000,00	4.628.000,00
156	SMAN 2 TELUK KUANTAN	3.440.000,00	277.800.000,00	281.240.000,00	-
157	SMAN 3 SINGINGI HILIR	-	494.550.000,00	494.550.000,00	-
158	SMA NEGERI 2 KUANTAN MUDIK	-	290.400.000,00	290.400.000,00	-
159	SMAN PINTAR	-	334.950.000,00	334.950.000,00	-
	KAB/ KOTA : Kab. Pelalawan		-		
160	SMAN 1 BANDAR PETALANGAN	208.000,00	374.250.000,00	372.582.000,00	1.876.000,00
161	SMAN 1 BANDAR SEKIJANG	-	430.200.000,00	425.821.238,00	4.378.762,00
162	SMAN 1 BUNUT	-	606.000.000,00	602.432.800,00	3.567.200,00
163	SMAN 1 KERUMUTAN	-	470.000.000,00	465.300.000,00	4.700.000,00
164	SMAN 1 KUALA KAMPAR	-	632.450.000,00	632.450.000,00	-
165	SMAN 1 LANGGAM	-	423.750.000,00	423.524.700,00	225.300,00
166	SMAN 1 PANGKALAN KERINCI	-	1.707.600.000,00	1.702.611.446,00	4.988.554,00
167	SMAN 1 PANGKALAN KURAS	8.000,00	1.902.150.000,00	1.900.757.033,00	1.400.967,00
168	SMAN 1 PANGKALAN LESUNG	-	452.400.000,00	448.677.000,00	3.723.000,00
169	SMAN 1 PELALAWAN	-	162.900.000,00	160.085.700,00	2.814.300,00
170	SMAN 1 TELUK MERANTI	-	427.350.000,00	426.276.000,00	1.074.000,00
171	SMAN 1 UKUI	-	849.600.000,00	840.118.700,00	9.481.300,00
172	SMAN 2 BUNUT	-	108.000.000,00	108.000.000,00	-
173	SMAN 2 LANGGAM	-	369.750.000,00	369.750.000,00	-
174	SMAN 2 PANGKALAN KERINCI	-	1.097.250.000,00	1.095.468.575,00	1.781.425,00
175	SMAN 2 PANGKALAN KURAS	-	634.350.000,00	634.350.000,00	-
176	SMAN 3 LANGGAM	-	405.750.000,00	405.750.000,00	-
177	SMAN BERNAS BINSUS	-	945.900.000,00	943.789.843,00	2.110.157,00

NO	NAMA SEKOLAH	KAS BOS TAHUN LALU	JUMLAH UANG YANG DITERIMA TAHUN INI	REALISASI SESUAI SP3B	SISA KAS
178	SMA NEGERI 2 TELUK MERANTI	-	169.200.000,00	169.200.000,00	-
179	SMA NEGERI 3 TELUK MERANTI	-	245.250.000,00	245.225.000,00	25.000,00
	KAB/ KOTA : Kab. Rokan Hilir		-		
180	SMAN 1 BAGANSINEMBAH	-	1.712.410.974,00	1.707.318.000,00	5.092.974,00
181	SMAN 1 BANGKO	-	1.493.676.000,00	1.493.676.000,00	-
182	SMAN 1 BANGKO PUSAKO	-	298.728.000,00	298.728.000,00	-
183	SMAN 1 BATU HAMPAR	-	647.190.000,00	647.190.000,00	-
184	SMAN 1 KUBU	-	1.032.588.000,00	1.032.588.000,00	-
185	SMAN 1 KUBU BABUSSALAM	-	988.566.000,00	987.066.000,00	1.500.000,00
186	SMAN 1 PASIR LIMAU KAPAS	-	887.112.000,00	887.112.000,00	-
187	SMAN 1 PEKAITAN	200.000,00	460.566.000,00	460.766.000,00	-
188	SMAN 1 PUJUD	-	945.756.000,00	945.756.000,00	-
189	SMAN 1 RANTAU KOPAR	-	370.980.000,00	370.980.000,00	-
190	SMAN 1 RIMBA MELINTANG	-	721.422.000,00	721.422.000,00	-
191	SMAN 1 SIMPANG KANAN	-	791.370.000,00	791.370.000,00	-
192	SMAN 1 SINABOI	-	789.426.000,00	769.153.700,00	20.272.300,00
193	SMAN 1 TANAH PUTIH	-	778.896.000,00	777.999.564,00	896.436,00
194	SMAN 1 TANAH PUTIH TANJUNG MELAWAN	-	712.800.000,00	712.800.000,00	-
195	SMAN 2 BAGAN SINEMBAH	-	974.009.984,00	970.542.000,00	3.467.984,00
196	SMAN 2 BANGKO	-	1.091.718.000,00	1.091.490.000,00	228.000,00
197	SMAN 2 BANGKO PUSAKO	-	966.006.000,00	966.006.000,00	-
198	SMAN 2 KUBU	-	357.858.000,00	357.858.000,00	-
199	SMAN 2 KUBU BABUSSALAM	-	322.056.000,00	322.056.000,00	-
200	SMAN 2 PASIR LIMAU KAPAS	-	323.042.000,00	323.042.000,00	-
201	SMAN 2 PUJUD	-	895.860.000,00	895.860.000,00	-
202	SMAN 2 RIMBA MELINTANG	-	630.342.000,00	630.342.000,00	-
203	SMAN 2 TANAH PUTIH	-	863.784.000,00	863.772.400,00	11.600,00
204	SMAN 3 BAGAN SINEMBAH	-	783.918.000,00	783.918.000,00	-
205	SMAN 3 BANGKO	-	307.800.000,00	307.800.000,00	-
206	SMAN 3 BANGKO PUSAKO	-	806.112.000,00	806.112.000,00	-
207	SMAN 3 PUJUD	-	468.054.000,00	468.032.500,00	21.500,00
208	SMAN 3 TANAH PUTIH	-	330.156.000,00	330.156.000,00	-
209	SMAN 4 BAGAN SINEMBAH	-	382.158.000,00	382.158.000,00	-

NO	NAMA SEKOLAH	KAS BOS TAHUN LALU	JUMLAH UANG YANG DITERIMA TAHUN INI	REALISASI SESUAI SP3B	SISA KAS
210	SMAN 4 BANGKO PUSAKO	-	979.776.000,00	979.776.000,00	-
211	SMAN 4 PUJUD	-	186.012.000,00	186.012.000,00	-
212	SMAN 4 TANAH PUTIH	-	578.700.000,00	576.348.000,00	2.352.000,00
213	SMAN 5 BAGAN SINEMBAH	-	740.502.000,00	740.502.000,00	-
214	SMAN 5 BANGKO PUSAKO	-	284.148.000,00	284.148.000,00	-
215	SMAN 5 PUJUD	-	376.164.000,00	376.164.000,00	-
216	SMAN 5 TANAH PUTIH	88.538.400,00	478.548.000,00	564.286.400,00	2.800.000,00
217	SMAN 6 PUJUD	22.050.000,00	81.324.000,00	103.374.000,00	-
	KAB/ KOTA : Kab. Rokan Hulu		-		
218	SMAN 5 TAMBUSAI UTARA	-	458.238.000,00	458.238.000,00	-
219	SMA NEGERI 1 BANGUN PURBA	21.000,00	591.825.000,00	580.326.000,00	11.520.000,00
220	SMA NEGERI 1 BONAI DARUSSALAM	-	274.911.000,00	274.911.000,00	-
221	SMA NEGERI 1 KABUN	-	757.848.000,00	757.848.000,00	-
222	SMA NEGERI 1 KEPENUHAN	-	712.983.000,00	709.843.200,00	3.139.800,00
223	SMA NEGERI 1 KEPENUHAN HULU	-	271.323.000,00	269.505.000,00	1.818.000,00
224	SMA NEGERI 1 KUNTO DARUSSALAM	-	926.175.000,00	926.175.000,00	-
225	SMA NEGERI 1 PAGARAN TAPAH DARUSSALAM	-	412.923.000,00	412.923.000,00	-
226	SMA NEGERI 1 PENDALIAN IV KOTO	-	169.176.000,00	169.176.000,00	-
227	SMA NEGERI 1 RAMBAH	13.775.649,00	1.377.921.000,00	1.391.696.649,00	-
228	SMA NEGERI 1 RAMBAH HILIR	158.000,00	526.449.000,00	524.833.000,00	1.774.000,00
229	SMA NEGERI 1 RAMBAH SAMO	85.900,00	983.256.000,00	907.463.000,00	75.878.900,00
230	SMA NEGERI 1 ROKAN IV KOTO	-	533.604.000,00	533.604.000,00	-
231	SMA NEGERI 1 TAMBUSAI	-	799.293.000,00	775.395.000,00	23.898.000,00
232	SMA NEGERI 1 TAMBUSAI UTARA	-	1.123.839.000,00	1.123.839.000,00	-
233	SMA NEGERI 1 TANDUN	-	899.940.000,00	891.167.000,00	8.773.000,00
234	SMA NEGERI 1 UJUNG BATU	-	1.638.336.000,00	1.634.238.060,00	4.097.940,00
235	SMA NEGERI 2 RAMBAH	-	172.674.000,00	172.674.000,00	-
236	SMA NEGERI 2 RAMBAH HILIR	45.800.000,00	813.126.000,00	858.926.000,00	-
237	SMA NEGERI 2 ROKAN IV KOTO	-	309.468.000,00	309.468.000,00	-

NO	NAMA SEKOLAH	KAS BOS TAHUN LALU	JUMLAH UANG YANG DITERIMA TAHUN INI	REALISASI SESUAI SP3B	SISA KAS
238	SMA NEGERI 2 TAMBUSAI	-	402.429.000,00	402.429.000,00	-
239	SMA NEGERI 2 TAMBUSAI UTARA	-	208.953.000,00	208.953.000,00	-
240	SMA NEGERI 2 TANDUN	-	292.719.000,00	292.719.000,00	-
241	SMA NEGERI 2 UJUNG BATU	-	673.206.000,00	673.206.000,00	-
242	SMA NEGERI 3 RAMBAH	-	125.292.000,00	125.292.000,00	-
243	SMA NEGERI 3 RAMBAH HILIR	10.000,00	388.278.000,00	380.935.000,00	7.353.000,00
244	SMA NEGERI 3 TAMBUSAI	-	187.620.000,00	183.065.715,00	4.554.285,00
245	SMA NEGERI 3 TAMBUSAI UTARA	-	749.526.000,00	749.526.000,00	-
246	SMA NEGERI 4 TAMBUSAI UTARA	-	817.737.000,00	817.737.000,00	-
	KAB/ KOTA : Kab. Siak		-		
247	SMAN 1 BUNGA RAYA	-	597.900.000,00	597.900.000,00	-
248	SMAN 1 DAYUN	12.025.200,00	432.450.000,00	444.475.200,00	-
249	SMAN 1 KANDIS	4.700.000,00	887.250.000,00	876.089.722,00	15.860.278,00
250	SMAN 1 KERINCI KANAN	-	448.200.000,00	448.200.000,00	-
251	SMAN 1 KOTO GASIB	-	698.700.000,00	698.700.000,00	-
252	SMAN 1 LUBUK DALAM	-	642.750.000,00	642.750.000,00	-
253	SMAN 1 MEMPURA	25.481.140,00	467.950.000,00	488.360.945,00	5.070.195,00
254	SMAN 1 MINAS	75.150.500,00	1.002.300.000,00	1.057.983.232,00	19.467.268,00
255	SMAN 1 PUSAKO	-	336.600.000,00	336.600.000,00	-
256	SMAN 1 SABAK AUH	-	343.650.000,00	342.267.380,00	1.382.620,00
257	SMAN 1 SIAK	-	907.200.000,00	907.200.000,00	-
258	SMAN 1 SUNGAI APIT	-	1.032.850.000,00	1.032.850.000,00	-
259	SMAN 1 SUNGAI MANDAU	-	620.100.000,00	620.100.000,00	-
260	SMAN 1 TUALANG	-	1.688.250.000,00	1.687.100.000,00	1.150.000,00
261	SMAN 2 DAYUN	-	521.850.000,00	521.210.000,00	640.000,00
262	SMAN 2 KANDIS	-	796.750.000,00	795.907.000,00	843.000,00
263	SMAN 2 KERINCI KANAN	-	274.650.000,00	274.650.000,00	-
264	SMAN 2 SIAK	1.320.000,00	400.800.000,00	402.120.000,00	-
265	SMAN 2 SUNGAI APIT	14.028.200,00	379.450.000,00	393.478.200,00	-
266	SMAN 2 TUALANG	-	1.745.550.000,00	1.745.550.000,00	-
267	SMAN 3 SIAK	-	162.300.000,00	162.300.000,00	-
268	SMAN 3 SUNGAI APIT	224.600,00	276.600.000,00	276.824.000,00	600,00
269	SMAN 3 TUALANG	-	1.366.500.000,00	1.363.978.000,00	2.522.000,00
270	SMA NEGERI 2 BUNGARAYA	-	273.770.000,00	273.750.000,00	20.000,00

NO	NAMA SEKOLAH	KAS BOS TAHUN LALU	JUMLAH UANG YANG DITERIMA TAHUN INI	REALISASI SESUAI SP3B	SISA KAS
271	SMA NEGERI 2 LUBUK DALAM	-	267.250.000,00	267.250.000,00	-
272	SMA NEGERI 2 MEMPURA	-	101.700.000,00	101.700.000,00	-
273	SMA NEGERI 2 MINAS	-	225.300.000,00	225.300.000,00	-
274	SMA NEGERI 3 KANDIS	31.552.000,00	985.800.000,00	1.017.352.000,00	-
275	SMA NEGERI 4 KANDIS	-	266.100.000,00	266.100.000,00	-
276	SMA NEGERI 4 TUALANG	-	505.950.000,00	505.950.000,00	-
277	SMA NEGERI 5 TUALANG	-	1.254.450.000,00	1.254.450.000,00	-
278	SMA NEGERI 6 TUALANG	332,00	439.344.668,00	437.800.000,00	1.545.000,00
	KAB/ KOTA : Kota Dumai		-		
279	SMAN 1 DUMAI	-	1.218.736.000,00	1.218.736.000,00	-
280	SMAN 2 DUMAI	68.153.885,00	1.731.590.000,00	1.796.095.635,00	3.648.250,00
281	SMAN 3 DUMAI	-	1.254.608.000,00	1.254.608.000,00	-
282	SMAN 4 DUMAI	-	1.242.752.000,00	1.239.162.000,00	3.590.000,00
283	SMAN 5 DUMAI	-	532.152.000,00	532.152.000,00	-
284	SMAN BINSUS KOTA DUMAI	-	1.244.880.000,00	1.244.880.000,00	-
285	SMA NEGERI 7 DUMAI	-	248.368.000,00	248.368.000,00	-
	KAB/ KOTA : Kota Pekanbaru		-		
286	SMA NEGERI 10 PEKANBARU	254.067.852,00	1.556.250.000,00	1.810.317.852,00	-
287	SMA NEGERI 11 PEKANBARU	12.768.275,00	1.519.650.000,00	1.532.418.275,00	-
288	SMA NEGERI 12 PEKANBARU	-	1.826.250.000,00	1.826.250.000,00	-
289	SMA NEGERI 13 PEKANBARU	-	768.150.000,00	768.150.000,00	-
290	SMA NEGERI 14 PEKANBARU	91.259.704,00	1.344.150.000,00	1.427.389.705,00	8.019.999,00
291	SMA NEGERI 15 PEKANBARU	27.892.649,00	877.050.000,00	904.942.649,00	-
292	SMA Negeri 16 Pekanbaru	9.970.600,00	636.150.000,00	646.120.350,00	250,00
293	SMA NEGERI 1 PEKANBARU	392.510.840,00	1.481.850.000,00	1.823.688.770,00	50.672.070,00
294	SMA NEGERI 2 PEKANBARU	58.459.250,00	1.350.150.000,00	1.386.649.529,00	21.959.721,00
295	SMA NEGERI 3 PEKANBARU	223.664.100,00	1.643.550.000,00	1.746.847.287,00	120.366.813,00
296	SMA NEGERI 4 PEKANBARU	268.400.000,00	1.786.350.000,00	2.054.750.000,00	-
297	SMA NEGERI 5 PEKAN BARU	-	1.791.300.000,00	1.791.300.000,00	-
298	SMA NEGERI 6 PEKANBARU	275.299.900,00	1.527.600.000,00	1.075.638.057,00	727.261.843,00
299	SMA NEGERI 7 PEKANBARU	4.119.050,00	1.282.050.000,00	1.244.825.100,00	41.343.950,00
300	SMA NEGERI 8 PEKANBARU	-	1.928.850.000,00	1.928.850.000,00	-

NO	NAMA SEKOLAH	KAS BOS TAHUN LALU	JUMLAH UANG YANG DITERIMA TAHUN INI	REALISASI SESUAI SP3B	SISA KAS
301	SMA NEGERI 9 PEKANBARU	113.238.996,00	1.492.650.000,00	1.226.504.124,00	379.384.872,00
302	SMA NEGERI OLAHRAGA	18.498.199,00	685.200.000,00	700.657.699,00	3.040.500,00
303	SMAN PLUS PROP RIAU	7.061.731,00	666.675.000,00	662.193.333,00	11.543.398,00
	KAB/ KOTA : Kab. Bengkalis				
304	SMKN 1 BANTAN	910,00	124.640.000,00	124.640.000,00	910,00
305	SMKN 1 BENGKALIS	18.313.676,00	784.480.000,00	800.713.932,00	2.079.744,00
306	SMKN 1 BUKIT BATU	290.000.000,00	390.240.000,00	680.240.000,00	-
307	SMKN 1 MANDAU	-	1.875.840.000,00	1.875.840.000,00	-
308	SMKN 1 PINGGIR	3.384.000,00	147.200.000,00	149.516.000,00	1.068.000,00
309	SMKN 1 RUPAT	610.658,00	569.600.000,00	570.210.658,00	-
310	SMKN 1 RUPAT UTARA	-	203.200.000,00	203.200.000,00	-
311	SMKN 1 SIAK KECIL	-	471.200.000,00	471.200.000,00	-
312	SMKN 2 BENGKALIS	9.333.595,00	364.320.000,00	371.980.963,00	1.672.632,00
313	SMKN 2 MANDAU	787.057,00	611.520.000,00	596.400.365,00	15.906.692,00
314	SMKN 2 PENERBANGAN BUKIT BATU	-	107.040.000,00	107.040.000,00	-
315	SMKN 2 PINGGIR	-	1.458.560.000,00	1.457.708.700,00	851.300,00
316	SMKN 2 RUPAT UTARA	-	102.720.000,00	102.720.000,00	-
317	SMKN 3 BENGKALIS	-	616.640.000,00	540.976.350,00	75.663.650,00
318	SMKN 3 MANDAU	-	1.568.960.000,00	1.568.960.000,00	-
	KAB/ KOTA : Kab. Indragiri Hilir			-	
319	SMKN 1 KEMPAS	-	652.367.000,00	652.367.000,00	-
320	SMKN 1 MANDAH	-	105.456.000,00	105.456.000,00	-
321	SMKN 1 RETEH	-	169.676.000,00	161.196.000,00	8.480.000,00
322	SMKN 1 TEMBILAHAN	-	2.235.363.000,00	2.233.255.790,00	2.107.210,00
323	SMKN 1 TEMBILAHAN HULU	7.919.250,00	566.826.000,00	557.972.718,00	16.772.532,00
324	SMKN 2 TEMBILAHAN	53.399.124,00	1.684.423.000,00	1.711.301.124,00	26.521.000,00
325	SMK NEGERI 2 KEMPAS	-	252.006.000,00	252.003.500,00	2.500,00
326	SMK NEGERI TUAH KEMUNING	99.271.000,00	835.367.000,00	934.638.000,00	-
	KAB/ KOTA : Kab. Indragiri Hulu			-	
327	SMKN 1 BATANG GANGSAL	22.072.400,00	670.720.000,00	692.792.400,00	-
328	SMKN 1 BATANG PERANAP	-	612.480.000,00	612.480.000,00	-
329	SMKN 1 KELAYANG	50.000.000,00	584.960.000,00	624.959.500,00	10.000.500,00

NO	NAMA SEKOLAH	KAS BOS TAHUN LALU	JUMLAH UANG YANG DITERIMA TAHUN INI	REALISASI SESUAI SP3B	SISA KAS
330	SMKN 1 KUALA CENAKU	-	593.920.000,00	593.920.000,00	-
331	SMKN 1 LUBUK BATU JAYA	236.734.835,00	632.000.000,00	691.154.971,00	177.579.864,00
332	SMKN 1 PASIR PENYU	342.647.129,00	2.204.480.000,00	2.434.217.461,00	112.909.668,00
333	SMKN 1 PERANAP	18.100.000,00	896.640.000,00	914.740.000,00	-
334	Smkn 1 rakit kulim	-	195.440.000,00	195.360.000,00	80.000,00
335	SMKN 1 RENGAT	-	1.917.120.000,00	1.891.900.000,00	25.220.000,00
336	SMKN 1 RENGAT BARAT	-	1.013.760.000,00	1.013.760.000,00	-
337	SMKN 1 SEBERIDA	62.979.769,00	1.262.400.000,00	1.316.529.522,00	8.850.247,00
338	SMK NEGERI 1 BATANG CENAKU	-	334.240.000,00	334.240.000,00	-
	KAB/ KOTA : Kab. Kampar			-	
339	SMKN 1 TAPUNG HILIR	650.000,00	202.080.000,00	202.730.000,00	-
340	SMKN 1 TAPUNG HULU	-	1.260.640.000,00	1.260.640.000,00	-
341	SMKN 2 TAPUNG HILIR	-	87.360.000,00	87.360.000,00	-
342	SMK NEGERI 1 BANGKINANG	2.773.000,00	2.426.515.000,00	2.399.413.000,00	29.875.000,00
343	SMK NEGERI 1 GUNUNG SAHILAN	-	605.280.000,00	605.280.000,00	-
344	SMK NEGERI 1 KAMPAR	2.000,00	396.160.000,00	396.141.000,00	21.000,00
345	SMK NEGERI 1 KUOK	875.000,00	607.360.000,00	605.107.200,00	3.127.800,00
346	SMK NEGERI 1 PERHENTIAN RAJA	929.900,00	433.760.000,00	433.760.000,00	929.900,00
347	SMK NEGERI 1 SIAK HULU	-	39.360.000,00	39.360.000,00	-
348	SMK NEGERI 1 TAMBANG	-	291.520.000,00	289.411.000,00	2.109.000,00
349	SMK NEGERI 1 TAPUNG	-	1.209.280.000,00	1.209.280.000,00	-
350	SMK NEGERI 1 XIII KOTO KAMPAR	103.870,00	238.400.000,00	238.073.575,00	430.295,00
351	SMKN KESEHATAN DAN PARIWISATA BANGKINANG	-	437.440.000,00	436.452.330,00	987.670,00
	KAB/ KOTA : Kab. Kepulauan Meranti			-	
352	SMK NEGERI 1 MERBAU	104.198,00	567.285.000,00	565.395.271,00	1.993.927,00
353	SMK NEGERI 1 TEBING TINGGI	47.294.913,00	1.278.471.000,00	1.266.999.727,00	58.766.186,00
	KAB/ KOTA : Kab. Kuantan Singingi			-	
354	SMKN 1 BENAI	-	1.099.040.000,00	1.099.040.000,00	-
355	SMKN 1 Kuantan Hilir	-	244.960.000,00	244.960.000,00	-
356	SMKN 1 KUANTAN MUDIK	10.939.762,00	624.000.000,00	633.629.762,00	1.310.000,00
357	SMKN 1 LOGAS TANAH DARAT	-	260.800.000,00	260.800.000,00	-

NO	NAMA SEKOLAH	KAS BOS TAHUN LALU	JUMLAH UANG YANG DITERIMA TAHUN INI	REALISASI SESUAI SP3B	SISA KAS
358	SMKN 1 PANGEAN	2.760.000,00	107.200.000,00	109.960.000,00	-
359	SMKN 1 PUCUK RANTAU	-	291.200.000,00	291.200.000,00	-
360	SMKN 1 SENTAJO RAYA	3.105.000,00	121.280.000,00	124.385.000,00	-
361	SMKN 1 SINGINGI HILIR	-	622.240.000,00	622.240.000,00	-
362	SMKN 1 TELUKKUANTAN	131.485.000,00	1.596.640.000,00	1.728.125.000,00	-
363	SMKN 2 LOGAS TANAH DARAT	1.178.000,00	371.040.000,00	372.130.000,00	88.000,00
364	SMKN 2 TELUKKUANTAN	22.151.015,00	2.065.586.071,00	2.084.357.624,00	3.379.462,00
365	SMKN 3 TELUK KUANTAN	58.606.580,00	253.440.270,00	312.046.580,00	270,00
	KAB/ KOTA : Kab. Pelalawan			-	
366	SMKN 1 BANDAR SEI KIJANG	343.006,00	1.063.520.000,00	1.061.844.464,00	2.018.542,00
367	SMKN 1 BUNUT	358.000,00	503.040.000,00	500.605.830,00	2.792.170,00
368	SMKN 1 KERUMUTAN	63.801.250,00	619.200.000,00	626.468.384,00	56.532.866,00
369	SMKN 1 KUALA KAMPAR	-	165.360.000,00	165.360.000,00	-
370	SMKN 1 PANGKALAN KERINCI	6.550.100,00	2.966.720.000,00	2.970.894.930,00	2.375.170,00
371	SMKN 1 PANGKALAN KURAS	649.590,00	624.480.000,00	621.956.594,00	3.172.996,00
372	SMKN 1 PANGKALAN LESUNG	6.500.000,00	1.539.040.000,00	1.517.980.300,00	27.559.700,00
373	SMKN 1 UKUI	120.000,00	642.400.000,00	642.335.716,00	184.284,00
	KAB/ KOTA : Kab. Rokan Hilir			-	
374	SMKN 1 BANGKO	-	1.120.924.000,00	981.473.500,00	139.450.500,00
375	SMKN 1 RIMBA MELINTANG	166.000,00	695.912.000,00	696.078.000,00	-
376	SMKN 1 SIMPANG KANAN	26.713.025,00	384.592.000,00	380.431.065,00	30.873.960,00
377	SMKN 1 TANAH PUTIH	-	265.740.000,00	265.738.000,00	2.000,00
378	SMKN 2 TANAH PUTIH	32.244.850,00	369.628.000,00	401.663.850,00	209.000,00
379	SMKN 3 TANAH PUTIH	-	162.712.000,00	162.712.000,00	-
	KAB/ KOTA : Kab. Rokan Hulu				
380	SMKN 1 BONAI DARUSSALAM	-	197.223.000,00	194.144.000,00	3.079.000,00
381	SMKN 1 KABUN	-	101.400.000,00	29.938.000,00	71.462.000,00
382	SMKN 1 PAGARAN TAPAH	-	239.473.000,00	239.467.000,00	6.000,00
383	SMK NEGERI 1 BANGUN PURBA	-	290.511.000,00	289.611.000,00	900.000,00
384	SMK NEGERI 1 KEPENUHAN	-	551.109.000,00	528.117.459,00	22.991.541,00

NO	NAMA SEKOLAH	KAS BOS TAHUN LALU	JUMLAH UANG YANG DITERIMA TAHUN INI	REALISASI SESUAI SP3B	SISA KAS
385	SMK NEGERI 1 KEPENUHAN HULU	-	278.005.000,00	278.005.000,00	-
386	SMK NEGERI 1 KUNTO DARUSSALAM	3.117.674,00	658.424.000,00	655.703.837,00	5.837.837,00
387	SMK NEGERI 1 PENDALIAN IV KOTO	-	486.551.000,00	486.318.000,00	233.000,00
388	SMK NEGERI 1 RAMBAH	1.943.629,00	1.835.847.000,00	1.837.790.629,00	-
389	SMK NEGERI 1 RAMBAH HILIR	-	101.400.000,00	100.448.000,00	952.000,00
390	SMK NEGERI 1 RAMBAH SAMO	3.484.000,00	317.026.448,00	308.739.001,00	11.771.447,00
391	SMK NEGERI 1 ROKAN IV KOTO	-	229.671.000,00	229.671.000,00	-
392	SMK NEGERI 1 TAMBUSAI	-	1.114.244.000,00	1.114.244.000,00	-
393	SMK NEGERI 1 TAMBUSAI UTARA	-	1.064.869.000,00	1.051.189.000,00	13.680.000,00
394	SMK NEGERI 1 TANDUN	9.136.002,00	1.318.393.244,00	903.722.072,00	423.807.174,00
395	SMK NEGERI 1 UJUNGBATU	-	1.637.103.000,00	1.362.774.508,00	274.328.492,00
396	SMK NEGERI 2 KEPENUHAN	-	250.289.000,00	250.289.000,00	-
397	SMK NEGERI 2 KUNTO DARUSSALAM	1.556.541,00	152.607.000,00	154.163.541,00	-
398	SMK NEGERI 2 RAMBAH	381.467,00	532.181.000,00	528.293.407,00	4.269.060,00
399	SMK NEGERI 2 ROKAN IV KOTO	-	101.400.000,00	101.400.000,00	-
400	SMK NEGERI 2 TAMBUSAI UTARA	-	390.390.000,00	390.059.000,00	331.000,00
401	SMK NEGERI 3 RAMBAH	-	137.059.000,00	137.059.000,00	-
402	SMK NEGERI 4 RAMBAH	1.388.000,00	351.853.500,00	348.100.500,00	5.141.000,00
	KAB/ KOTA : Kab. Siak				
403	SMK NEGERI 1 BUNGA RAYA	26.300.000,00	489.280.000,00	515.580.000,00	-
404	SMK NEGERI 1 DAYUN	4.534.160,00	735.840.000,00	739.707.642,00	666.518,00
405	SMK NEGERI 1 KANDIS	-	1.337.120.000,00	1.336.318.200,00	801.800,00
406	SMK NEGERI 1 KERINCI KANAN	-	503.040.000,00	503.040.000,00	-
407	SMK NEGERI 1 KOTO GASIB	-	493.760.000,00	493.612.630,00	147.370,00
408	SMK NEGERI 1 LUBUK DALAM	-	386.880.000,00	386.683.605,00	196.395,00
409	SMK NEGERI 1 MEMPURA	-	1.181.760.000,00	1.155.121.948,00	26.638.052,00
410	SMK NEGERI 1 MINAS	-	782.560.000,00	782.460.000,00	100.000,00
411	SMK NEGERI 1 SABAK AUH	-	127.680.000,00	124.480.000,00	3.200.000,00
412	SMK NEGERI 1 SIAK	-	594.400.000,00	589.527.320,00	4.872.680,00

NO	NAMA SEKOLAH	KAS BOS TAHUN LALU	JUMLAH UANG YANG DITERIMA TAHUN INI	REALISASI SESUAI SP3B	SISA KAS
413	SMK NEGERI 1 SUNGAI APIT	-	538.560.000,00	538.560.000,00	-
414	SMK NEGERI 1 TUALANG	-	801.120.000,00	800.568.000,00	552.000,00
	KAB/ KOTA : Kota Dumai			-	
415	SMKN 1 DUMAI	51.728.760,00	1.992.276.000,00	2.012.103.602,00	31.901.158,00
416	SMKN 2 DUMAI	363,00	2.825.130.000,00	2.816.616.153,00	8.514.210,00
417	SMKN 3 DUMAI	-	1.055.430.000,00	1.055.430.000,00	-
418	SMKN 4 DUMAI	-	969.732.000,00	968.215.189,00	1.516.811,00
419	SMKN 5 DUMAI	-	1.367.442.000,00	1.362.776.395,00	4.665.605,00
420	SMKN 6 DUMAI	-	666.306.000,00	651.322.815,00	14.983.185,00
421	SMK Perikanan Provinsi Riau	1.638.212,00	422.010.000,00	423.198.212,00	450.000,00
	KAB/ KOTA : Kota Pekanbaru			-	
422	SMK KEHUTANAN NEGERI PEKANBARU	-	400.480.000,00	-	400.480.000,00
423	SMKN 8 PEKANBARU	4.980.000,00	608.960.000,00	604.377.734,00	9.562.266,00
424	SMK NEGERI 1 PEKANBARU	-	1.903.360.000,00	1.903.336.800,00	23.200,00
425	SMK NEGERI 2 PEKANBARU	775.668.050,00	3.826.080.000,00	4.315.102.159,00	286.645.891,00
426	SMK NEGERI 3 PEKANBARU	157.518.100,00	2.194.400.000,00	2.131.580.770,00	220.337.330,00
427	SMK NEGERI 4 PEKANBARU	-	2.429.912.568,00	2.419.680.000,00	10.232.568,00
428	SMK NEGERI 5 PEKANBARU	781.064.582,00	2.867.876.605,00	3.279.826.475,00	369.114.712,00
429	SMK NEGERI 6 PEKANBARU	33.115.000,00	2.225.440.000,00	2.254.516.700,00	4.038.300,00
430	SMK NEGERI 7 PEKANBARU	481.698.400,00	2.015.200.000,00	2.440.689.050,00	56.209.350,00
431	SMKN PERTANIAN TERPADU PEKANBARU	-	2.114.880.000,00	2.114.880.000,00	-
	KAB/ KOTA : Kab. Bengkalis				
432	SLBN BENGKALIS	19.948.350,00	376.250.000,00	396.148.220,00	50.130,00
433	SLBN DURI	-	210.000.000,00	210.000.000,00	-
	KAB/ KOTA : Kab. Indragiri Hilir				
434	SLB N 033 TEMBILAHAN	-	446.490.000,00	446.490.000,00	-
	KAB/ KOTA : Kab. Indragiri Hulu				
435	SLBN INHU	-	461.300.000,00	461.300.000,00	-
	KAB/ KOTA : Kab. Kampar				
436	SLB NEGERI BANGKINANG	-	247.800.000,00	247.800.000,00	-
437	SLB NEGERI BANGKINANG KOTA	-	443.200.000,00	443.200.000,00	-

NO	NAMA SEKOLAH	KAS BOS TAHUN LALU	JUMLAH UANG YANG DITERIMA TAHUN INI	REALISASI SESUAI SP3B	SISA KAS
438	SLB Negeri Kab. Kampar	-	210.000.000,00	205.980.000,00	4.020.000,00
439	SLBN GUNUNG SAHILAN	-	218.400.000,00	218.400.000,00	-
	KAB/ KOTA : Kab. Kepulauan Meranti				
440	SLB NEGERI SELATPANJANG	-	273.074.000,00	271.128.800,00	1.945.200,00
	KAB/ KOTA : Kab. Kuantan Singingi				
441	SLBN KUANTAN SINGINGI	-	210.000.000,00	206.396.640,00	3.603.360,00
	KAB/ KOTA : Kab. Pelalawan				
442	SLB N PELALAWAN	-	372.750.000,00	372.749.770,00	230,00
443	SLBN SIDO MUKTI	-	210.000.000,00	209.682.100,00	317.900,00
	KAB/ KOTA : Kab. Rokan Hilir				
445	SLB NEGERI 1 BAGANSIAPIAPI	13.750,00	225.000.000,00	225.013.750,00	-
	KAB/ KOTA : Kab. Rokan Hulu				
446	SLB NEGERI ROKAN HULU	-	434.820.000,00	434.820.000,00	-
	KAB/ KOTA : Kab. Siak				
447	SLB NEGERI SIAK	-	224.700.000,00	224.192.000,00	508.000,00
	KAB/ KOTA : Kota Dumai				
448	SLB NEGERI KOTA DUMAI	-	631.200.000,00	631.200.000,00	-
	KAB/ KOTA : Kota Pekanbaru				
449	SLB NEGERI PEMBINA	6.472.750,00	1.047.650.000,00	975.746.200,00	78.376.550,00
	KOREKSI TAMBAH KAS BOSNAS				
	HIBAH KE SEKOLAH SWASTA		106.679.978.000,00	106.679.978.000,00	
	Total	8.119.898.001,00	433.691.278.063,00	435.273.819.584,00	6.537.356.480,00

5.5.6 Aset Lancar – Kas Lainnya

Saldo Kas di Kas Lainnya Provinsi Riau per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp425.034.807,00 dan Rp8.119.938.001,00, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	31-Des-2021	31-Des-2020
BANK	**182.819.171,00**	**0,00**
Bunga Bank dari Dana BOS Dinas Pendidikan	180.849.639,00	0,00
Bunga Jasa Giro Dinas Perikanan dan Kelautan	304.272,00	0,00

Uraian	31-Des-2021	31-Des-2020
Jasa Giro UPT Perawang dan PKB Samsat Sungai Guntung Badan Pendapatan Daerah	715.260,00	0,00
Retribusi UPT Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	950.000,00	0,00
KAS TUNAI	**242.215.636,00**	**0,00**
Kas Bos di Dinas Pendidikan	0,00	8.119.898.001,00
Kas Pajak Dana BOSNAS di Dinas Pendidikan	242.175.636,00	0,00
Kas pajak di Dinas Kesehatan	40.000,00	40.000,00
KAS	**425.034.807,00**	**8.119.938.001,00**

5.5.7 Aset Lancar - Piutang Pendapatan - Piutang Retribusi Daerah

Saldo Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp533.592.074,00 dan Rp537.578.376,00. Piutang Retribusi Daerah terdiri dari:

Uraian	31 Des 2020 (Rp)	Mutasi (Rp)		31 Des 2021 (Rp)
		Penambahan	Pengurangan	
PIUTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH	**459.803.376,00**	**3.613.698,63**	**7.600.000,00**	**455.817.074,63**
DINAS PENDIDIKAN	**7.600.000,00**	**1.200.000,00**	**7.600.000,00**	**1.200.000,00**
Sewa Kantin	7.600.000,00	1.200.000,00	7.600.000,00	1.200.000,00
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	**0,00**	**1.013.698,63**	**0,00**	**1.013.698,63**
Retribusi Pemakaian Ruangan PUPR	0,00	1.013.698,63	0,00	1.013.698,63
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	**1.750.000,00**	**1.400.000,00**	**0,00**	**3.150.000,00**
Sewa kantin pada BPSDM Provinsi Riau yang belum diterima.	1.750.000,00	1.400.000,00	0,00	3.150.000,00
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	**299.680.000,00**	**0,00**	**0,00**	**299.680.000,00**
Sewa rumah dinas (2015 s.d 2017)	299.680.000,00	0,00	0,00	299.680.000,00
DINAS PERHUBUNGAN	**42.273.376,00**	**0,00**	**0,00**	**42.273.376,00**
Retribusi Penyeberangan Air (Nopember 2016 s.d 2017)	42.273.376,00	0,00	0,00	42.273.376,00
SEKRETARIAT DAERAH	**108.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**108.500.000,00**
Pengelolaan Gedung Balai Dang Merdu	108.500.000,00	0,00	0,00	108.500.000,00
PIUTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR	**6.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.400.000,00**

Uraian	31 Des 2020 (Rp)	Mutasi (Rp)		31 Des 2021 (Rp)
		Penambahan	Pengurangan	
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	**6.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.400.000,00**
Hotel Grand Zuri Lahan Parkir Jl T. Umar No.7 Pekanbaru	6.400.000,00	0,00	0,00	6.400.000,00
PIUTANG RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/ PESANGGRAHAN/ VILLA	**71.375.000,00**	**0,00**	**0,00**	**71.375.000,00**
BADAN PENGHUBUNG	**71.375.000,00**	**0,00**	**0,00**	**71.375.000,00**
Sewa Kamar di Mess Riau, Jakarta	71.375.000,00	0,00	0,00	71.375.000,00
JUMLAH PIUTANG RETRIBUSI	**537.578.376,00**	**3.613.698,63**	**7.600.000,00**	**533.592.074,63**

5.5.8 Aset Lancar - Piutang Pendapatan – Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Saldo Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp904.555.063,00. Jumlah piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp904.555.063,00 dibandingkan dengan Tahun 2020 karena adanya penerimaan pembayaran piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Pada Tahun 2021 terdapat Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan modal PT Pengembangan Investasi Riau untuk Tahun 2018 telah disetorkan ke kasda dengan nomor:

1. STS 01606/ 5.02.0.00.0.00.02/ STS/ Penerimaan Rek. BUD/ II/ 2021 tanggal 21 Mei 2021,
2. STS 01800/ 5.02.0.00.0.00.02/ STS/ Penerimaan Rek. BUD/ II/ 2021 tanggal 8 Juni 2021,
3. STS 01965/ 5.02.0.00.0.00.02/ STS/ Penerimaan Rek. BUD/ III/ 2021 tanggal 5 Juli 2021,
4. STS 2060/ 5.02.0.00.0.00.02/ STS/ Penerimaan Rek. BUD/ III/ 2021 tanggal 14 September 2021.

5.5.9 Aset Lancar - Piutang Pendapatan - Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

Piutang Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp78.578.849.339,54 dan Rp27.766.018.021,54. dengan rincian sebagai berikut:

a. Piutang BLUD

Piutang BLUD per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp78.408.325.210,54 dan Rp27.595.493.892,54. Piutang Lain-Lain PAD yang Sah berasal dari 3 Rumah Sakit BLUD dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	31 Des 2020 (Rp)	31 Des 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad	**22.970.203.097,54**	**50.468.792.955,54**	**27.498.589.858,00**
Pasien Meninggal	1.370.863.678,10	1.370.863.678,10	0,00
Pasien Lari	337.575.535,00	337.575.535,00	0,00
Pasien Perjanjian	6.329.283.966,00	7.825.997.680,00	1.496.713.714,00
Pasien BPJS	8.812.222.504,00	25.839.697.699,00	17.027.475.195,00
Pasien Inhealth	2.839.877,00	0,00	(2.839.877,00)
Pasien Jamkesda Bengkalis	478.919.477,44	906.633.878,44	427.714.401,00
Pasien Jamkesda Siak	2.008.157.582,00	486.406.808,00	(1.521.750.774,00)
Pasien Jampersal Kuantan Singingi	0,00	2.946.598,00	2.946.598,00
Pasien Jampersal Pelalawan	437.759.688,00	437.759.688,00	0,00
Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru	609.273.200,00	130.828.500,00	(478.444.700,00)
Dinas Kesehatan Anambas	50.006,00	50.006,00	0,00
Dinas Kesehatan Kab. Karimun	35.512.295,00	35.512.295,00	0,00
Dinas Kesehatan Meranti	435.887.631,00	719.527.474,00	283.639.843,00
Dinas Kesehatan Kepulauan Riau	2.401.600,00	2.401.600,00	0,00
Dinas Kesehatan Kab. Kampar	30.516.429,00	30.516.429,00	0,00
Dinas Kesehatan Rokan Hilir	18.541.997,00	252.887.051,00	234.345.054,00
Dinas Kesehatan Rokan Hulu	8.135.400,00	13.433.674,00	5.298.274,00
Dinas Kesehatan Pelalawan	0,00	0,00	0,00
RSUD Selasih Pelalawan	31.914.500,00	13.389.500,00	(18.525.000,00)

Uraian	31 Des 2020 (Rp)	31 Des 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
Dinas Kesehatan Indra Giri Hulu	67.741.968,00	67.741.968,00	0,00
PT. Ekamas International Hospital	30.000,00	1.330.000,00	1.300.000,00
RS Syafira	240.000,00	52.559.292,00	52.319.292,00
RS Awal Bros	0,00	0,00	0,00
RS Hermina	0,00	6.075.000,00	6.075.000,00
RSUD Lancang Kuning	21.324.570,00	21.324.570,00	0,00
RS.Pertamina Dumai	283.258.640,00	258.822.546,00	(24.436.094,00)
RS. Prima Pekanbaru	0,00	0,00	0,00
PT. Jasa Raharja	20.278.947,00	21.385.043,00	1.106.096,00
BPJS Ketenagakerjaan	165.235.739,00	915.430.538,00	750.194.799,00
Kementerian Kesehatan RI	154.583.900,00	9.456.473.800,00	9.301.889.900,00
International Organization for Migration	81.418.808,00	252.920.386,00	171.501.578,00
Perusahaan	440.728.910,00	227.870.469,00	(212.858.441,00)
Kantin Asyifa	8.200.000,00	1.900.000,00	(6.300.000,00)
Kantin Alex Trio	7.900.000,00	7.900.000,00	0,00
Kantin Syahrial/ Kevin	90.800.000,00	90.800.000,00	0,00
Kantin Ayuthia/ Mak Seha	106.900.000,00	106.900.000,00	0,00
Kantin Alizar	93.150.000,00	93.150.000,00	0,00
Kantin Waty Siburian/ Kantin Bhoby	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00
PT. Datama	437.500.000,00	437.500.000,00	0,00
CV. Mitra Mandiri/ Sewa Troli gizi	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00
Kantin Bubur	0,00	1.575.000,00	1.575.000,00
Kantin Berkah	700.000,00	350.000,00	(350.000,00)
Kantin Alifiya	700.000,00	700.000,00	0,00
Kantin Hoya	7.656.250,00	7.656.250,00	0,00
Rumah Sakit Jiwa Tampan	**2.327.648.906,00**	**8.727.231.658,00**	**6.399.582.752,00**
Piutang BPJS	0,00	0,00	0,00
Piutang Jamkesda Bengkalis	40.745.139,00	40.745.139,00	0,00
Piutang Jamkesda Siak	396.017.900,00	38.060.900,00	(357.957.000,00)

Uraian	31 Des 2020 (Rp)	31 Des 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
Piutang Jamkesda Batam	158.400,00	183.477.100,00	183.318.700,00
Piutang Jamkesda Karimun	6.227.050,00	6.227.050,00	0,00
Piutang Askes PNS	1.801.056,00	1.434.810.955,00	1.433.009.899,00
Piutang IPWL	1.122.400.505,00	52.569.789,00	(1.069.830.716,00)
Piutang Pasien Umum	401.033.758,00	508.185.027,00	107.151.269,00
Piutang Pendaftaran Karcis 2018	118.600.000,00	0,00	(118.600.000,00)
Piutang Jamkesda Tj.Pinang	5.509.800,00	0,00	(5.509.800,00)
Piutang Pasien RS Prima	0,00	0,00	0,00
Piutang Pendaftaran/ Karcis 2018	0,00	118.600.000,00	118.600.000,00
Piutang Covid 19-Kemenkes RI	0,00	6.109.400.400,00	6.109.400.400,00
Piutang Jamkesmas	235.155.298,00	235.155.298,00	0,00
Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi	**2.297.641.889,00**	**19.212.300.597,00**	**16.914.658.708,00**
Piutang dari Jamkesda Kota Pekanbaru	1.074.397.110,00	0,00	(1.074.397.110,00)
Piutang dari Pasien Umum	104.335.672,00	109.926.493,00	5.590.821,00
Piutang dari BPJS	857.398.107,00	1.361.208.604,00	503.810.497,00
Piutang dari Jamkesda Kampar	42.509.700,00	0,00	(42.509.700,00)
Piutang dari Jampersal Kampar	64.022.100,00	35.714.100,00	(28.308.000,00)
Piutang dari Lapas & Dinsos	14.555.800,00	0,00	(14.555.800,00)
Piutang dari Jampersal Kota	3.207.600,00	0,00	(3.207.600,00)
Selisih Koreksi Audited	0,00	0,00	0,00
Kompensasi Piutang BPJS	136.969.600,00	0,00	(136.969.600,00)
Biaya adm Bank	246.200,00	0,00	(246.200,00)
Kemenkes –Covid 19	0,00	17.705.451.400,00	17.705.451.400,00
Total	**27.595.493.892,54**	**78.408.325.210,54**	**50.812.831.318,00**

b. Piutang Hasil Dari Pengelolaan Dana Bergulir

Piutang Hasil Dari Pengelolaan Dana Bergulir per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp170.524.129,00 dan Rp170.524.129,00 terdapat pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Provinsi Riau yaitu Pinjaman

Modal Kerja 11 Koperasi Unggulan yang telah disetor Koperasi di Bank Riau dan belum disetor Bank Riau ke Kas BUD, sebagai berikut:

Uraian	31 Des 2020 (Rp)	31 Des 2021 (Rp)
Pinjaman Modal Kerja Kepada 11 Koperasi Unggulan (Dinas Koperasi dan UKM) tercatat pada PPKD	496.078,00	496.078,00
Ekonomi Kerakyatan (EKRA)	23.823.071,00	23.823.071,00
Ekonomi Kerakyatan (EKRA)	146.204.980,00	146.204.980,00
JUMLAH	**170.524.129,00**	**170.524.129,00**

Berdasarkan Laporan Keuangan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Provinsi Riau Per 31 Desember 2021 Posisi setoran Koperasi Unggulan yang belum di setor ke Kas Daerah dari Bank Riau Kepri sebesar **Rp496.078,00**.

Berdasarkan surat dari PT. Bank Riau Kepri dengan nomor: 048/ MKM/ 2018 tanggal 10 April 2018 menyampaikan bahwa terdapat setoran pokok debitur EKRA sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp170.028.051,00 namun yang belum disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp170.028.051,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Cabang	EKRA TA 2001	EKRA TA 2002	Jumlah	Penerimaan di Kas Daerah	Yang belum di terima Kas Daerah (Piutang)
1	Cabang Utama	9.038.410,00	132.648.427,00	141.686.837,00	0,00	141.686.837,00
2	Cabang Tembilahan	0,00	19.559.200,00	19.559.200,00	0,00	19.559.200,00
3	Cabang Tanjung Pinang	0,00	7.933.338,00	7.933.338,00	0,00	7.933.338,00
4	Cabang Air Molek	0,00	848.676,00	848.676,00	0,00	848.676,00
	Total	**9.038.410,00**	**160.989.641,00**	**170.028.051,00**	**0,00**	**170.028.051,00**

5.5.10 Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

Piutang Dana Bagi Hasil Pusat per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp259.913.114.908,00. Jumlah Piutang Dana Bagi Hasil Pusat Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp259.913.114.908,00 dibandingkan

dengan Tahun 2020 karena terdapat alokasi kurang bayar dicatat berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 129/ PMK.07/ 2021 Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2021 telah masuk ke Kasda sebesar Rp259.913.114.908,00.

5.5.11 Aset Lancar –Piutang Lain-Lain - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Piutang Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran lancar tagihan rumah dinas daerah Golongan III dan bagian lancar tagihan penjualan angsuran rumah dinas dan penjualan tanah kavling Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing Rp156.015.075,00 dan Rp156.015.075,00 karena direklas ke Aset Tagihan Penjualan Angsuran. Hal ini disebabkan bagian lancar TPA masih belum dibayar dan jangka waktu pembayaran sesuai SK telah habis, dengan rincian sebagai berikut:

Surat Keputusan	Nilai Jual	Angsuran s/d 31 Desember 2021	Aset Lancar – TPA Per 31 Desember 2021	Aset Lancar – TPA Per 31 Desember 2020
RUMAH DINAS SK Gubri no. Kpts. 253/ PP/ 2013 - Tanggal 4 Februari 2013	1.800.863.100,00	1.677.237.190,00	15.656.730,00	15.656.730,00
RUMAH DINAS SK Gubri no. Kpts. 632/ SK/ PP/ XII/ 2013 - Tanggal 23 Desember 2013	2.053.988.000,00	675.349.050,00	140.358.345,00	140.358.345,00
		JUMLAH	**156.015.075,00**	**156.015.075,00**

Dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. RUMAH DINAS SK Gubri no. Kpts. 253/ PP/ 2013 - Tanggal 4 Februari 2013 jangka waktu 120 bulan dengan nilai jual Rp1.800.863.100,00 telah diangsur sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp1.677.237.190,00, sisa angsuran sebesar Rp123.625.910,00 akan menjadi Aset Lainnya - Tagihan Penjualan Angsuran sebesar Rp107.969.180,00 dan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran sebesar Rp15.656.730,00 yang direklas ke Aset Lainnya – Tagihan Jangka Panjang – Tagihan Penjualan Angsuran. Hal ini disebabkan karena tidak ada pembayaran dari Tahun 2017 dan bagian lancar TPA masih belum dibayar dan

jangka waktu pembayaran sesuai SK sudah habis pada tahun 2019 karena terjadi penunggakan pembayaran dari tahun 2017.

2. RUMAH DINAS SK Gubri no. Kpts. 632/ SK/ PP/ XII/ 2013 - Tanggal 23 Desember 2013 jangka waktu 120 bulan dengan nilai jual Rp2.053.988.000,00 telah diangsur sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp675.349.050,00 sisa angsuran sebesar Rp1.378.638.950,00 akan menjadi Aset Lainnya - Tagihan Penjualan Angsuran sebesar Rp1.238.280.605,00 dan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2018 sebesar Rp140.358.345,00 yang direklas ke Aset Lainnya – Tagihan Jangka Panjang – Tagihan Penjualan Angsuran. Hal ini disebabkan karena tidak ada pembayaran dari Tahun 2017 dan bagian lancar TPA masih belum dibayar dan jangka waktu pembayaran sesuai SK sudah habis pada tahun 2019 karena terjadi penunggakan pembayaran dari tahun 2017.

Bagian Tagihan Penjualan Angsuran dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Rumah Dinas SK Gubri no. Kpts. 253/ PP/ 2013 - Tanggal 4 Februari 2013

No	Nama	Nilai Jual	Pelunasan s/d 31 Desember 2021 (Rp)	Sisa Angsuran per 31 Desember 2021	Aset Lancar Angsuran 31 Desember 2021
1	Umar, Sp	101.880.000,00	101.880.000,00	0,00	0,00
2	Alexander, SH	99.107.000,00	99.107.000,00	0,00	0,00
3	Yasril, SH	183.289.500,00	183.289.500,00	0,00	0,00
4	M. Ridwan	143.263.500,00	143.263.500,00	0,00	0,00
5	R. Indra Bangsawan	143.263.500,00	143.263.500,00	0,00	0,00
6	Ardis Handayani	152.274.000,00	152.274.000,00	0,00	0,00
7	Iskandar	278.000.000,00	278.000.000,00	0,00	0,00
8	Agung Parian M.	99.107.100,00	99.107.100,00	0,00	0,00
9	Ir. Surya Maulana	180.246.000,00	180.246.000,00	0,00	0,00
10	Sri Petri Haryanti	103.797.000,00	14.272.090,00	89.524.910,00	9.341.730,00
11	Badrizal	63.150.000,00	29.049.000,00	34.101.000,00	6.315.000,00
12	H. Joni Irwan	253.485.500,00	253.485.500,00	0,00	0,00
	JUMLAH	**1.800.863.100,00**	**1.677.237.190,00**	**123.625.910,00**	**15.656.730,00**

2. Rumah Dinas SK Gubri no. Kpts. 632/ SK/ PP/ XII/ 2013 - Tgl 23 Desember 2013

No	Nama	Nilai Jual	Pelunasan s/d 31 Desember 2021 (Rp)	Sisa Angsuran per 31 Desember 2021	Aset Lancar Angsuran 31 Desember 2021
1	Jonli, S.Sos, M.Si	124.440.000,00	12.444.000,00	111.996.000,00	11.199.600,00
2	Helda, SH	95.457.000,00	0,00	95.457.000,00	9.545.700,00
3	Alimuddin	124.440.000,00	23.377.300,00	101.062.700,00	11.199.600,00
4	Mulkan Syarif	93.027.000,00	93.027.000,00	0,00	0,00
5	Indriadi, SH	49.906.000,00	49.906.000,00	0,00	0,00
6	T. Khalil Jaafar	243.877.500,00	0,00	243.877.500,00	24.387.750,00
7	Syamsurizal	155.673.500,00	29.578.550,00	126.094.950,00	14.010.615,00
8	Kamaruddin A	183.277.000,00	0,00	183.277.000,00	18.327.700,00
9	Zulkifli Yusuf	422.597.000,00	42.259.700,00	380.337.300,00	38.033.730,00
10	Yon Azhari, Spi	160.507.500,00	160.507.500,00	0,00	0,00
11	Zulher	168.160.000,00	168.160.000,00	0,00	0,00
12	Tengku Syoib	96.089.000,00	96.089.000,00	0,00	0,00
13	Zulkifli	60.255.500,00	0,00	60.255.500,00	6.025.550,00
14	Yakob	76.281.000,00	0,00	76.281.000,00	7.628.100,00
	JUMLAH	**2.053.988.000,00**	**675.349.050,00**	**1.378.638.950,00**	**140.358.345,00**

5.5.12 Aset Lancar - Piutang Lain-lain - Piutang Ganti Rugi Atas Kekayaan Daerah

Piutang atas Kekayaan Daerah Per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp895.757.858,00 dan Rp895.757.858,00 merupakan Pengembalian BPOP dan TKI Anggota DPRD sebagai berikut:

SKPD	Periode	Uraian	Per 31 Des 2020 (Rp)	Mutasi (Rp)		Per 31 Des 2021 (Rp)
				Penambahan	Pengurangan	
Sekretariat DPRD	2008	Pengembalian BPOP dan TKI DPRD	895.757.858,00	0,00	0,00	895.757.858,00
	Jumlah		**895.757.858,00**	**0,00**	**0,00**	**895.757.858,00**

5.5.13 Aset Lancar - Piutang Lainnya - Piutang Lainnya

Piutang Lain-lain per 31 Desember 2021 dan 2020 masing masing sebesar Rp271.740.997,00 dan Rp290.876.997,00. Rincian Piutang lain-lain sebagai berikut:

URAIAN	31-Des-2020 (Rp)	Mutasi (Rp)		31-Des-2021 (Rp)
		Penambahan	Pengurangan	
Kurang Setor Pajak Daerah Dispenda-UPT Perawang	17.865.575,00	0,00	0,00	17.865.575,00
Kurang Setor Pajak Daerah Dispenda-UPT Siak	57.196.980,00	0,00	0,00	57.196.980,00
Kurang Setor Pajak Daerah Dispenda-UPT Duri	196.678.442,00	0,00	0,00	196.678.442,00
Penerimaan Pembayaran Piutang Lainnya – Biaya Konsinyasi pembebasan lahan tanah untuk TPA Dinas PUPRPKPP	19.136.000,00	0,00	19.136.000,00	0,00
Jumlah Piutang lainnya	**290.876.997,00**	**0,00**	**19.136.000,00**	**271.740.997,00**

5.5.14 Aset Lancar - Penyisihan Piutang

Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 67 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 104 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Riau Berbasis Akrual yaitu Penyisihan Piutang tak tertagih dihitung berdasarkan estimasi persentase ketidaktertagihan terhadap saldo piutang yang masih ada pada akhir tahun. Besarnya estimasi persentase ketidaktertagihan piutang ditentukan berdasarkan umur piutang dan jenis penyisihan piutang dineraca disajikan sebagai unsur pengurangan dari piutang bersangkutan.Penyisihan Piutang tak tertagih tidak dilakukan untuk piutang dana transfer dari Pemerintah pusat, dan piutang tuntutan ganti kerugian daerah.

Piutang tak tertagih yang dilakukan analisa berdasarkan umur piutang per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar (Rp24.509.578.316,39) dan (Rp15.416.398.081,88) dan dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Nilai Tahun 2020 (Rp)	Mutasi (Rp)		Nilai Tahun 2021 (Rp)
		Penambahan	Pengurangan	
Penyisihan Piutang Retribusi	**(421.516.376,00)**	**(108.475.000,00)**	**0,00**	**(529.991.376,00)**
Badan Penghubung	(71.375.000,00)	0,00	0,00	(71.375.000,00)
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	(1.750.000,00)	(7.000,00)	0,00	(1.757.000,00)

Uraian	Nilai Tahun 2020 (Rp)	Mutasi (Rp)		Nilai Tahun 2021 (Rp)
		Penambahan	Pengurangan	
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(299.680.000,00)	0,00	0,00	(299.680.000,00)
Dinas Perhubungan	(42.273.376,00)	0,00	0,00	(42.273.376,00)
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	(6.400.000,00)	0,00	0,00	(6.400.000,00)
Dinas Pendidikan	(38.000,00)	32.000,00	0,00	(6.000,00)
Sekretariat Daerah	0,00	(108.500.000,00)	0,00	(108.500.000,00)
Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah	**(14.096.985.067,51)**	**(9.324.046.916,98)**	**(339.341.682,47)**	**(23.081.690.302,02)**
Sekretariat Daerah	(108.500.000,00)	0,00	(108.500.000,00)	0,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	0,00	(170.524.129,00)	0,00	(170.524.129,00)
RSUD Arifin Achmad	(10.553.702.856,01)	(5.783.976.584,74)	(60.317.553,47)	(16.277.361.887,28)
RSJ Tampan	(2.061.374.445,46)	(411.360.219,17)	0,00	(2.472.734.664,63)
RSUD Petala Bumi	(1.202.883.637,04)	(2.958.185.984,07)	0,00	(4.161.069.621,11)
PPKD	(170.524.129,00)	0,00	(170.524.129,00)	0,00
Penyisihan Piutang Lain-lain	**(780.075,38)**	**0,00**	**0,00**	**(780.075,38)**
Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	(780.075,38)	0,00	0,00	(780.075,38)
Penyisihan Piutang Lain-Lainnya	**(897.116.562,99)**	**0,00**	**0,00**	**(897.116.562,99)**
Badan Pendapatan Daerah	(1.358.704,99)	0,00	0,00	(1.358.704,99)
Sekretariat DPRD	(895.757.858,00)	0,00	0,00	(895.757.858,00)
Jumlah	**(15.416.398.081,88)**	**(9.432.521.916,98)**	**(339.341.682,47)**	**(24.509.578.316,39)**

Pada RSUD Arifin Achmad dan RSJ Tampan terdapat penyisihan Piutang Pasien Jamkesda Provinsi Riau ke Dinas Kesehatan Provinsi Riau per 31 Desember 2021 sebesar Rp9.934.380,00 dan Rp485.012.908,00 dimana nilai piutangnya telah dieliminasi pada LKPD Provinsi Riau. Daftar penyisihan piutang dapat dilihat pada **lampiran 4**.a

5.5.15 Aset Lancar – Beban Dibayar Dimuka

Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp546.080.068,50 dan Rp396.788.169,33. Rincian Beban Dibayar Dimuka sebagai berikut:

SKPD	Uraian	31-Des-20	Mutasi (Rp)		31-Des-21
			Penambahan	Pengurangan	
Dinas PUPRPKPP	biaya konsinyasi pengadaan Tanah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah	5.102.000,00	0,00	5.102.000,00	0,00
Dinas Pemuda dan Olahraga	Beban Premi Asuransi Kecelakaan	9.416.054,80	9.361.643,84	9.416.054,80	9.361.643,84
Badan Pendapatan	Sewa gedung kantor UP/ UPT	382.270.114,53	154.448.310,13	0,00	536.718.424,66
	Jumlah	**396.788.169,33**	**163.809.953,97**	**14.518.054,80**	**546.080.068,50**

5.5.16 Aset Lancar - Persediaan

Persediaan per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp363.643.287.774,52 dan Rp342.036.028.088,32 dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN	31-Des-20(Rp)	Mutasi (Rp)		31-Des-21
		Penambahan	Pengurangan	
BARANG PAKAI HABIS	**342.036.028.088,32**	**764.255.857.010,73**	**742.788.030.524,53**	**363.503.854.574,52**
Bahan	**6.002.141.543,24**	**32.914.316.922,35**	**32.467.374.171,39**	**6.449.084.294,20**
Bahan Bangunan dan Konstruksi	23.522.000,00	102.105.055,00	125.627.055,00	0,00
Bahan Kimia	4.431.997.997,84	10.104.366.324,00	10.057.939.500,04	4.478.424.821,80
Bahan Bakar dan Pelumas	156.566.634,75	5.195.464.085,00	5.183.521.689,75	168.509.030,00
Bahan Baku	0,00	0,00	0,00	0,00
Bahan Kimia Nuklir	0,00	0,00	0,00	0,00
Barang Dalam Proses	0,00	0,00	0,00	0,00
Bahan/ Bibit Tanaman	151.439.000,00	489.671.247,00	440.759.767,00	200.350.480,00
Isi Tabung Pemadam Kebakaran	818.400,00	60.423.750,00	60.423.750,00	818.400,00
Isi Tabung Gas	0,00	16.650.000,00	16.650.000,00	0,00
Bahan/ Bibit Ternak/ Bibit Ikan	368.808.000,00	771.016.350,00	871.724.350,00	268.100.000,00
Bahan Lainnya	868.989.510,65	16.174.620.111,35	15.710.728.059,60	1.332.881.562,40
Suku Cadang	**10.683.343.009,89**	**61.711.350.441,07**	**56.804.543.996,60**	**15.590.149.454,36**
Suku Cadang Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00	0,00
Suku Cadang Alat Besar	0,00	1.021.964.394,00	870.923.778,00	151.040.616,00

URAIAN	31-Des-20(Rp)	Mutasi (Rp)		31-Des-21
		Penambahan	Pengurangan	
Suku Cadang Alat Kedokteran	4.779.289.748,36	8.431.336.727,70	9.113.267.558,28	4.097.358.917,78
Suku Cadang Alat Laboratorium	5.569.750.516,48	49.409.420.931,37	43.846.109.497,98	11.133.061.949,87
Suku Cadang Alat Pemancar	0,00	0,00	0,00	0,00
Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00
Suku Cadang Alat Pertanian	0,00	6.288.000,00	6.288.000,00	0,00
Suku Cadang Alat Bengkel	98.331.700,00	23.754.500,00	120.051.200,00	2.035.000,00
Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
Suku Cadang Lainnya	235.971.045,05	2.818.486.888,00	2.847.804.962,34	206.652.970,71
Alat/ Bahan Untuk Kegiatan Kantor	**10.567.350.981,78**	**82.373.340.249,54**	**80.828.020.250,97**	**12.112.670.980,35**
Alat Tulis Kantor	2.910.438.874,62	7.874.358.961,12	7.752.630.452,52	3.032.167.383,22
Kertas dan Cover	0,00	13.905.584.320,00	13.661.960.177,00	243.624.143,00
Bahan Cetak	4.466.213.304,19	37.839.483.448,42	37.369.086.858,16	4.936.609.894,45
Benda Pos	2.658.000,00	493.246.000,00	492.604.000,00	3.300.000,00
Persediaan Dokumen/ Administrasi Tender	0,00	0,00	0,00	0,00
Bahan Komputer	0,00	113.928.979,00	113.928.979,00	0,00
Perabot Kantor	0,00	55.771.600,00	55.771.600,00	0,00
Alat Listrik	1.926.386.957,54	2.186.127.838,00	2.196.237.120,89	1.916.277.674,65
Perlengkapan Dinas	0,00	205.325.236,00	205.325.236,00	0,00
Kaporlap dan Perlengkapan Satwa	0,00	0,00	0,00	0,00
Perlengkapan Pendukung Olahraga	147.912.000,00	96.713.700,00	120.563.700,00	124.062.000,00
Suvenir/ Cendera Mata	0,00	1.017.486.200,00	1.017.486.200,00	0,00
Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.113.741.845,43	18.585.313.967,00	17.842.425.927,40	1.856.629.885,03
Obat-obatan	**87.084.163.479,96**	**440.020.069.597,20**	**471.453.430.187,46**	**55.650.802.889,70**
Obat	87.084.163.479,96	440.020.069.597,20	471.453.430.187,46	55.650.802.889,70
Obat-obatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Persediaan untuk Dijual/ Diserahkan	**227.382.742.823,45**	**144.159.145.316,57**	**99.786.336.164,11**	**271.755.551.975,91**
Persediaan untuk Dijual/ Diserahkan Kepada Masyarakat	227.382.742.823,45	143.793.258.396,57	99.420.449.244,11	271.755.551.975,91
Persediaan Untuk Dijual/ Diserahkan Lainnya	0,00	365.886.920,00	365.886.920,00	0,00
Persediaan untuk Tujuan Strategis/ Berjaga-Jaga	**0,00**	**1.595.462.038,00**	**5.376.808,00**	**1.590.085.230,00**
Persediaan Untuk Tujuan Strategis/ Berjaga-Jaga	0,00	1.595.462.038,00	5.376.808,00	1.590.085.230,00
Persediaan Untuk Tujuan Strategis/ Berjaga-Jaga Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Natura dan Pakan	**316.286.250,00**	**1.378.711.446,00**	**1.442.948.946,00**	**252.048.750,00**
Natura	0,00	173.664.296,00	173.664.296,00	0,00
Pakan	316.286.250,00	1.193.359.150,00	1.257.596.650,00	252.048.750,00

URAIAN	31-Des-20(Rp)	Mutasi (Rp)		31-Des-21
		Penambahan	Pengurangan	
Natura dan Pakan Lainnya	0,00	11.688.000,00	11.688.000,00	0,00
Persediaan Penelitian	**0,00**	**103.461.000,00**	**0,00**	**103.461.000,00**
Persediaan Penelitian Biologi	0,00	0,00	0,00	0,00
Persediaan Penelitian Biologi Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Persediaan Penelitian Teknologi	0,00	0,00	0,00	0,00
Persediaan Penelitian Lainnya	0,00	103.461.000,00	0,00	103.461.000,00
Persediaan dalam Proses	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Persediaan Dalam Proses	0,00	0,00	0,00	0,00
Persediaan Dalam Proses Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
BARANG TAK HABIS PAKAI	**0,00**	**145.632.200,00**	**6.199.000,00**	**139.433.200,00**
Komponen	**0,00**	**1.059.000,00**	**1.059.000,00**	**0,00**
Komponen Jembatan Baja	0,00	0,00	0,00	0,00
Komponen Jembatan Pratekan	0,00	0,00	0,00	0,00
Komponen Peralatan	0,00	1.059.000,00	1.059.000,00	0,00
Komponen Rambu-Rambu	0,00	0,00	0,00	0,00
Attachment	0,00	0,00	0,00	0,00
Komponen Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Pipa	**0,00**	**144.573.200,00**	**5.140.000,00**	**139.433.200,00**
Pipa Air Besi Tuang (DCI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Pipa Asbes Semen (ACP)	0,00	0,00	0,00	0,00
Pipa Baja	0,00	0,00	0,00	0,00
Pipa Beton Pratekan	0,00	0,00	0,00	0,00
Pipa Fiber Glass	0,00	0,00	0,00	0,00
Pipa Plastik PVC (UPVC)	0,00	144.573.200,00	5.140.000,00	139.433.200,00
Pipa Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
BARANG BEKAS DIPAKAI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Komponen Bekas dan Pipa Bekas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Komponen Bekas	0,00	0,00	0,00	0,00
Pipa Bekas	0,00	0,00	0,00	0,00
Komponen Bekas dan Pipa Bekas Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	**342.036.028.088,32**	**764.401.489.210,73**	**742.794.229.524,53**	**363.643.287.774,52**

Berikut merupakan saldo persediaan per 31 Desember 2021 berdasarkan hasil *stock opname* yang dilakukan per 31 Desember 2021 yang terdapat pada OPD:

PERANGKAT DAERAH	31 Desember 2020 (Rp)	Mutasi (Rp)		31 Desember 2021 (Rp)
		Penambahan	Pengurangan	
Dinas Pendidikan	92.917.021.646,24	46.803.209.382,00	46.787.929.335,96	92.932.301.692,28
Dinas Kesehatan	152.127.883.434,31	539.016.606.604,54	592.576.701.945,48	98.567.788.093,37
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	48.910.731.830,82	104.059.950.443,38	24.973.689.317,78	127.996.992.956,42
Satuan Polisi Pamong Praja	4.024.425,00	369.717.855,00	371.681.189,00	2.061.091,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	384.821.880,00	4.722.391.765,00	4.929.290.270,97	177.923.374,03
Dinas Sosial	0,00	604.735.574,20	0,00	604.735.574,20
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	1.643.975.181,07	181.249.124,00	1.761.925.268,46	63.299.036,61
Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	28.312.175,00	497.540.675,00	490.460.350,00	35.392.500,00
Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura	1.466.838.815,00	30.010.947.967,39	29.556.634.862,39	1.921.151.920,00
Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	12.523.113,00	236.290.611,00	222.769.653,00	26.044.071,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1.603.291,80	484.200.323,00	483.238.502,74	2.565.112,06
Dinas Perhubungan	25.444.680,00	26.546.200,00	25.444.680,00	26.546.200,00
Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	1.343.700,00	1.632.762.131,00	1.624.234.831,00	9.871.000,00
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8.288.600,00	555.988.340,00	554.361.980,00	9.914.960,00
Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	146.102.680,00	54.557.204,90	22.040.680,00	178.619.204,90
Dinas Kebudayaan	2.426.285,00	1.288.139.938,00	1.278.006.287,00	12.559.936,00
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	1.136.100,00	481.312.214,00	481.329.801,00	1.118.513,00
Dinas Kelautan Dan Perikanan	330.794.588,00	6.988.728.100,60	6.798.349.098,60	521.173.590,00
Dinas Pariwisata	3.409.384.680,00	1.119.112.313,00	3.589.873.626,00	938.623.367,00
Dinas Perkebunan	173.513.167,50	906.787.968,00	841.519.680,50	238.781.455,00
Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	1.128.922.753,00	5.471.683.099,00	5.469.270.565,00	1.131.335.287,00
Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	1.074.700,00	974.943.009,00	958.177.629,00	17.840.080,00
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	1.480.250,00	859.032.670,00	853.459.520,00	7.053.400,00
Sekretariat Daerah	36.723.691.860,66	6.631.142.061,00	7.771.470.631,66	35.583.363.290,00
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	28.756.530,00	8.860.004.503,00	8.868.981.273,00	19.779.760,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	10.506.256,00	9.847.000,00	10.506.256,00	9.847.000,00
Badan Pendapatan Daerah	2.313.398.889,92	148.573.652,72	43.604.790,00	2.418.367.752,64
Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	208.742.900,00	138.678.155,00	190.509.900,00	156.911.155,00
Badan Kepegawaian Daerah	8.186.503,00	813.000,00	1.741.803,00	7.257.700,00
Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia	5.104.673,00	478.060.766,00	477.084.781,00	6.080.658,00
Badan Penghubung	0,00	0,00	0,00	0,00
Inspektorat	9.992.500,00	535.931.942,00	529.548.583,00	16.375.859,00
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	0,00	245.805.619,00	244.193.433,00	1.612.186,00

PERANGKAT DAERAH	31 Desember 2020 (Rp)	Mutasi (Rp)		31 Desember 2021 (Rp)
		Penambahan	Pengurangan	
Jumlah	**342.036.028.088,32**	**764.395.290.210,73**	**742.788.030.524,54**	**363.643.287.774,52**

Terdapat persediaan yang sudah kadaluarsa yang merupakan bahan medis habis pakai sebesar Rp598.176.302,21 yang berasal APBD dan sebesar Rp152.739.622 yang bersumber dari Hibah APBN dengan rincian sebagai berikut:

BAHAN MEDIS HABIS PAKAI YANG SUDAH KADALUARSA (APBD)

NAMA BARANG	TAHUN	UNIT	SATUAN	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA
BUFFER					
Alat Suntik Sekali Pakai 1 ml	2016	162	Kotak/100 pcs	82.550,00	13.373.100,00
Alat Suntik Sekali Pakai 2,5 ml	2016	141	Kotak/100 pcs	82.550,00	11.639.550,00
Euromed IV Catheter 1 Way No.22	2016	300	Box/50 pcs	5.874,00	1.762.200,00
Antiseptik dan Disinfektan-Povidone Iodine 10 %	2016	2.544	Botol / 30 ml	3.683,00	9.369.552,00
Antiseptik dan Disinfektan-Povidone Iodine 10 %	2016	823	Botol / 60 ml	4.699,00	3.867.277,00
Antiseptik dan Disinfektan-Rivanol 0,1 %	2016	31	Botol/300 ml	3.239,00	100.409,00
Povidon Iodida 10 %	2016	201	Botol 300 Ml	18.000,00	3.618.000,00
Sarung Tangan Steril No. 7.5	2016	23	Kotak/100 pcs	990.000,00	22.770.000,00
Sarung Tangan Steril no.7	2016	15	Kotak/50 pcs	480.000,00	7.200.000,00
Sarung Tangan Steril no.7,5	2016	8	Kotak/50 pcs	480.000,00	3.840.000,00
Masker N95 Alpha Protech)	2016	62	Kotak/50 pcs	198.450,00	12.303.900,00
Jayamas Onemed Povidone Iodine 30 Ml	2017	2.080	Botol	3.182,00	6.618.560,00
Jayamas Onemed Rivanol 300 cc	2017	339	Botol	3.289,00	1.114.971,00
Jarum jahit (Bedah no .12	2016	9	Lusin	167.200,00	1.504.800,00
Jarum jahit (Bedah no .13	2016	9	Lusin	167.200,00	1.504.800,00
Jarum jahit (Bedah no .14	2016	9	Lusin	167.200,00	1.504.800,00
Kapas Pembalut 250 gr onemed	2016	2	Gulung	15.875,00	31.750,00
Kasa Steril 10 x 10 cm 8 ply onemed	2016	466	pcs	4.943,00	2.303.438,00
Leukoplast 2,5 cm x 4,5 m	2016	882	Rol	12.076,00	10.651.032,00
Disposible sringe 5 ml	2017	4.500	pcs	767,97	3.455.860,00
Disposible sringe 3 ml	2017	4.500	pcs	847,99	3.815.942,00
France Peter Silk 2/0 TP 18mm,75cm-2PTR5261E	2017	428	PCS	40.489,41	17.329.467,48
Oxycan	2019	2.042	Kaleng	50.386,00	102.888.212,00
Ethyl Cloride	2019	90	Botol	200.375,00	18.033.750,00

BAHAN MEDIS HABIS PAKAI YANG SUDAH KADALUARSA (APBD)					
NAMA BARANG	**TAHUN**	**UNIT**	**SATUAN**	**HARGA SATUAN**	**TOTAL HARGA**
Flashback Needlel	2017	105	Box/50 buah	191.100,00	20.065.500,00
Test Narkoba (THC-MOP-AMP-MET-COC-BZO) Berfungsi : Mendetaksi Marijuana, Morphine, Amphetamine, Methampetamin, Cocaine, dan Benzodiazepin dalam Urine	2017	1.145	test	148.500,00	170.032.500,00
Alkohol 70 %	2017	816	Botol/300 ml	9.800,00	7.996.800,00
Alkohol 70 %	2017	1.259	botol/100 ml	3.729,00	4.694.811,00
Alkohol 70 %	2017	46	botol 1000 ml	25.300,00	1.163.800,00
IMS Infusion Set Adult Type-200	2016	50	PCS	7.370,00	368.500,00
PROG TB 1					
Indoreagen pewarna ziehl neelsen 3 x 100 ml	2017	813	kit	162.141,23	131.820.820,73
(Gloves)Sarung Tangan Latex POWDERED Size M isi 100	2017	11	BOX	65.100,00	716.100,00
(Gloves)Sarung Tangan Latex POWDERED Size L isi 100	2017	11	BOX	65.100,00	716.100,00
TOTAL KESELURUHAN		**23.087**			**598.176.302,21**

BAHAN MEDIS HABIS PAKAI YANG SUDAH KADALUARSA (APBN)					
NAMA BARANG	**TAHUN**	**UNIT**	**SATUAN**	**HARGA SATUAN**	**TOTAL HARGA**
PROGRAM MALARIA					
Bactivet SL	2017	3.600,00	Botol	18.945,00	68.202.000,00
PROGRAM TB 1					
Reagen	2017	78,00	Box	529.737,00	41.319.486,00
BUFFER STOCK 1 TAHUN 2017					
Alat Suntik Sekali Pakai 2,5 ml	2017	23,00	Kotak/100 pcs	82.550,00	1.898.650,00
Reagen	2017	78,00	Box	529.737,00	41.319.486,00
TOTAL KESELURUHAN		**3.678,00**			**152.739.622,00**

5.5.17 Investasi Jangka Panjang Non Permanen - Dana Bergulir

Investasi Jangka Panjang Non Permanen - Dana Bergulir per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp156.228.752.414,89 dan Rp157.195.619.235,89. Dengan penjabaran sebagai berikut:

1) Dana Bergulir – Pinjaman Modal Ekonomi Ekonomi Kerakyatan (PMEK)

Berdasarkan Naskah Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Riau dengan Bank Pembangunan Daerah Riau dalam rangka Penyaluran Dana Pinjaman Modal Ekonomi Kerakyatan Provinsi Riau Tahun 2002 Nomor 69/MoU/2002 jo. Nomor 18/DIR/BPDR/X/2002 dengan penjelasan sebagai berikut:

Investasi Jangka Panjang Non Permanen - Dana Bergulir dijelaskan bahwa (FKPPM) yang dibentuk oleh Gubernur Riau. FKPPM menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat, ditagih kembali dari masyarakat dengan bunga 3% per tahun, selanjutnya dana disalurkan kembali kepada masyarakat (bergulir).
Dana Pinjaman Modal Ekonomi Kerakyatan (PMEK) yang diberikan Pemerintah Provinsi Riau tahun 2001 dan 2002 masing-masing sebesar Rp52.806.133.400,00 dan Rp100.000.000.000,00. Dana PMEK yang telah disalurkan sebesar Rp152.806.133.400,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Pengelola	Nilai (Rp)
I	**Dikelola PT. Bank Riau Kepri Tahun 2001**	
1	Dinas Pertanian	9.952.660.000,00
2	Dinas Peternakan	9.335.000.000,00
3	Dinas Perikanan dan Kelautan	14.105.699.900,00
4	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.129.440.500,00
5	Dinas Perkebunan	16.833.333.000,00
6	Dinas Koperasi dan UKM	750.000.000,00
7	BPM Bangdes	700.000.000,00
	Sub Jumlah	**52.806.133.400,00**
II	**Dikelola PT. Bank Riau Kepri Tahun 2002**	
1	Dinas Pertanian	26.460.000.000,00
2	Dinas Peternakan	11.270.000.000,00
3	Dinas Perikanan dan Kelautan	17.640.000.000,00
4	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	7.840.000.000,00
5	Dinas Perkebunan	29.400.000.000,00
6	Dinas Koperasi dan UKM	4.900.000.000,00
7	BPM Bangdes	490.000.000,00
8	15 Baitul Maal Wattamwil (BMT) yang tersebar di kabupaten / kota	1.000.000.000,00
	Sub Jumlah	**99.000.000.000,00**
IIII	**Dikelola BPR**	
1	BPR Sari Madu, Bangkinang	250.000.000,00
2	BPR Indra Arta, Rengat	250.000.000,00
3	BPR Cempaka Wahana Sejahtera, Bagan Batu, Rokan Hilir	250.000.000,00
4	BPR Gemilang, Tembilahan	250.000.000,00
	Sub Jumlah	**1.000.000.000,00**
	Jumlah	**152.806.133.400,00**

Dari jumlah yang disalurkan sebesar Rp152.806.133.400,00 tersebut, diantaranya telah disetor/dikembalikan ke rekening Kas Daerah tahun 2011 sebesar Rp15.510.123.368,00, tahun 2014 sebesar Rp1.513.042.777,00 dan pada tahun 2017 sebesar Rp822.062.246,00. Pada Tahun 2018 dan 2019 tidak ada penyetoran, sedangkan tahun 2020 terdapat setoran Rp300.000,00 dan di tahun 2021 setoran sebesar Rp966.866.821,00 ke rekening BUD. Total setoran ke Rekening BUD hingga per 31 Desember 2021 adalah **Rp18.812.395.212,00** sehingga saldo Dana Bergulir (PMEK) per 31 Desember 2021 adalah sebesar **Rp133.993.738.188,00** dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	**Saldo Tahun 2001 dan 2002**	**152.806.133.400,00**
2	Setoran Tahun 2011	15.510.123.368,00
3	Setoran Tahun 2014	1.513.042.777,00
4	Setoran Tahun 2017	822.062.246,00
5	Setoran Tahun 2018	0,00
6	Setoran Tahun 2019	0,00
7	Setoran Tahun 2020	300.000,00
8	Setoran Tahun 2021	966.866.821,00
	Jumlah pengurangan investasi	**18.812.395.212,00**
	Saldo Investasi Nonpermanen - Dana Bergulir (PMEK) Per 31 Des 2021	**133.993.738.188,00**

2) Koperasi Pola Swamitra Bukopin

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah lainnya merupakan penempatan dana Koperasi Pola Swamitra via Bank Bukopin sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Riau pada Pihak Ketiga. Dan berdasarkan petunjuk teknis penyertaan modal untuk Koperasi melalui Swamitra Nomor 74/PRY-APBD/DINASKOP/VIII/2001. Maka jumlah Penyertaan dana bergulir Koperasi Pola Swamitra Bukopin per 31 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	31 Des 2021 (Rp)
Koperasi Pola Swamitra via Bank Bukopin	22.235.014.226,89
Jumlah	**22.235.014.226,89**

Koperasi pola Swamitra Bukopin yang merupakan investasi penyertaan modal Pemerintah Provinsi Riau kepada Koperasi Unit Usaha Swamitra yang pengelolaannya dilakukan di bawah pengawasan PT Bank Bukopin senilai Rp22.235.014.226,89 berdasarkan Perpanjangan Perjanjian Kerja sama antara Dinas Koperasi dan UMKM dengan PT Bank Bukopin, Tbk tentang Penyertaan Modal pada KSP/USP Koperasi dengan Pola Swamitra Nomor 473.A/Dinaskop/XI/2016 dan 50.A/PKS/Buki-PKU/XI/2016.

Penyertaan modal tersebut secara bertahap diberikan kepada:

1. Pada Tahun 2002, diberikan penyertaan modal kepada 36 Koperasi masing-masing sebesar Rp500.000.000,00 atau seluruhnya berjumlah Rp18.000.000.000,00 terdiri dari 26 Koperasi di Provinsi Riau dan 10 Koperasi di Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pada Tahun 2004 Koreksi modal atas penutupan Swamitra Koperasi Intan Permata Bunda Moro sebesar (Rp464.985.773,11).
3. Pada Tahun 2005 Modal Penyertaan pada Koperasi Serba Jaya Karimun sebesar Rp450.000.000,00.
4. Pada Tahun 2006 di berikan penyertaan modal kepada 11 Koperasi di Provinsi Riau masing-masing sebesar Rp250.000.000,00 atau seluruhnya berjumlah Rp2.750.000.000,00 dari penyertaan modal ini diperoleh SHU swamitra bagian Pemda Riau melalui dana PEK berdasarkan kerjasama antara Dinas Koperasi dan UMKM provinsi Riau dengan PT Bank Bukopin, TBK Nomor 84/Dinaskop/XI/2006 tgl 3 November 2006 senilai **Rp84.240.000,00** yang akan disetorkan ke PT. Bank Bukopin dan di transfer ke kas daerah sebagai PAD Provinsi Riau tahun 2021.
5. Pada Tahun 2007, diberikan penyertaan modal kepada 6 Koperasi di Provinsi Riau masing-masing sebesar Rp250.000.000,00 atau seluruhnya berjumlah Rp1.500.000.000,00 dengan rincian nama koperasi sebagai berikut:

No	NAMA KOPERASI/ ALAMAT	MODAL PENYERTAAN (Rp)			JUMLAH MODAL PENYERTAAN (Rp)
		2002	2006	2007	
1	Koppas Kasuma Jl. H. Arsyad Ahmad Tembilahan. INHIL	500.000.000		250.000.000	750.000.000

No	NAMA KOPERASI/ ALAMAT	MODAL PENYERTAAN (Rp)			JUMLAH MODAL PENYERTAAN (Rp)
		2002	2006	2007	
2	KSP Usaha Bersama Jl. Tri Mas Tembilahan. INHIL	500.000.000	250.000.000		750.000.000
3	KSU Guntung Gemilang Sei. Guntung. INHIL	500.000.000			500.000.000
4	KSU Al Munawarah Air Molek Kab. INHU	500.000.000	250.000.000		750.000.000
5	KOPPAS Rengat di Pasar Rengat Kab. INHU	500.000.000			500.000.000
6	KPP Bangkinang Pasar Bangkinang Kab. Kampar	500.000.000	250.000.000		750.000.000
7	KGKK Air Tiris, DS Air Tiris Kab. Kampar	500.000.000		250.000.000	750.000.000
8	Kopontren Hidayatul Ma'arifiyah Kerinci. Pelalawan	500.000.000	250.000.000		750.000.000
9	Kop. Wahana Putra Jl. A. Yani Bengkalis Kab. Bengkalis	500.000.000	250.000.000		750.000.000
10	Koppas Beringin Duri. Duri barat Kab. Bengkalis	500.000.000		250.000.000	750.000.000
11	KSU Jasa Sarana Jl. Jend. Sudirman Bagan Batu kab. Rohil	500.000.000	250.000.000		750.000.000
12	KPP Semangat, Bagan Siapi-api Kab. Rohil	500.000.000			500.000.000
13	Koppas Ujung Batu Psr Ujung Batu kab. Rohul	500.000.000	250.000.000		750.000.000
14	KPRI Guru Kec. Rambah Pasir Pangarayan Kab. Rohul	500.000.000		250.000.000	750.000.000
15	KPRI Guru Kec. Tandun Ujung Batu kab. Rohul	500.000.000			500.000.000
16	Kop. Syari'ah Arrdha Psr Baserah Kab. Kuansing	500.000.000	250.000.000		750.000.000
17	KUD. Sehati Kukok Desa Seberang Taluk. Kab. Kuansing	500.000.000		250.000.000	750.000.000
18	KSU SAKATO/ Rukun Makmur Psr. Perawang Kab. Siak	500.000.000	250.000.000		750.000.000
19	Koperasi Pertiwi Minas Kab. Siak	500.000.000			500.000.000
20	Koppas Permata Sabang Sei. Apit Kab. Siak	500.000.000			500.000.000
21	Kop. Putri Tujuh Tuah Negeri Jl. Ombak Kota Dumai	500.000.000	250.000.000		750.000.000
22	Koptrapas Pulau Payung. Psr Pl. Payung Kota Dumai	500.000.000			500.000.000
23	Kop. Usaha Karya Bersama Dumai. Kota Dumai	500.000.000			500.000.000
24	KPJ. Sail psr Sail Jl. Hangtuah Pekanbaru	500.000.000	250.000.000		750.000.000
25	Kop. Patma Pesona Adi Karya, SS Mangaraja Pekanbaru	500.000.000		250.000.000	750.000.000
26	Koppas Tangkerang, Psr Tangkerang. Pekanbaru	500.000.000			500.000.000

No	NAMA KOPERASI/ ALAMAT	MODAL PENYERTAAN (Rp)			JUMLAH MODAL PENYERTAAN (Rp)
		2002	2006	2007	
	TOTAL	**13.000.000.000**	**2.750.000.000**	**1.500.000.000**	**17.250.000.000**

No	NAMA KOPERASI / ALAMAT	MODAL PENYERTAAN (Rp)			JUMLAH MODAL PENYERTAAN (Rp)
		2002	2006	2007	
1	KOPPAS Rakyat Tl. Tg. Uma Batam	500.000.000,00	-	-	500.000.000,00
2	KOPPAS Sei Harapan Sekupang Batam	500.000.000,00	-	-	500.000.000,00
3	KSU Budi Mulia Tanjung Batu Kundur Kepri	500.000.000,00	-	-	500.000.000,00
4	KSU Usaha Abadi Tanjung Balai Karimun Kepri	500.000.000,00	-	-	500.000.000,00
5	KSU. Serba Jaya Tg. Balai Karimun Kepri	485.014.226,89	-	-	485.014.226,89
6	KUD. Tanjung Pinang Timur Kepri	500.000.000,00	-	-	500.000.000,00
7	KUD. Karya Jaya Kijang BintaN Kepri	500.000.000,00	-	-	500.000.000,00
8	KUD Tarempa, Tarempa Kepri	500.000.000,00	-	-	500.000.000,00
9	Kop. Karya Nelayan Sedanau Bunguran barat Kepri	500.000.000,00	-	-	500.000.000,00
10	PPRI. Ranai Bunguran Timur Natuna Kepri	500.000.000,00	-	-	500.000.000,00
	TOTAL	**4.985.014.226,89**	**0,00**	**0,00**	**4.985.014.226,89**

Berdasarkan isi dokumen Perjanjian kerja sama antara Dinas Koperasi dan UMKM dengan PT. Bukopin, Tbk no. 747/Dinaskop/VII/2012 dan 14/PKS/Buki-PKU/VII/2012 tentang Penyertaan Modal pada KSP/USP Koperasi dengan Pola Swamitra tanggal 4 Juli 2012 terdapat istilah rekening Tim yang didefinisikan sebagai rekening giro yang dibuka atas nama Tim Pengembangan Swamitra bagi Koperasi di Provinsi Riau pada PT. Bank Bukopin Tbk cabang Pekanbaru, yaitu :

1. Rekening Tim Monitoring dan Supervisi

   Rekening tersebut digunakan untuk menampung 2/9 (dua per sembilan) dari realisasi pendapatan bunga pinjaman yang dibiayai dari dana penyertaan modal Pemerintah Provinsi Riau yang disetor ke rekening tim di PT. Bank Bukopin Tbk, yang digunakan untuk biaya monitoring dan Pemeriksaan swamitra serta rapat-rapat Tim Pengembangan Swamitra. Dari ketentuan dalam perjanjian tersebut, dana dalam rekening ini merupakan hak Pihak Pertama in casu Dinas Koperasi

dan UMKM Provinsi Riau yang sekarang terhitung tanggal 1 Januari menjadi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau.

2. Rekening Tim Pemupukan Modal

   Rekening tersebut digunakan untuk menampung 1/9 (satu per sembilan) dari realisasi pendapatan bunga pinjaman yang dibiayai dari dana penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Riau yang disetor ke rekening Tim di PT bank Bukopin Tbk, yang digunakan untuk cadangan risiko terhadap kerugian dan pengalihan Swamitra dengan persetujuan Tim. Dari ketentuan dalam perjanjian tersebut, dana dalam rekening ini merupakan hak pihak pertama in casu Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Riau yang sekarang terhitung tanggal 1 Januari menjadi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau.

3. Rekening Tim Penampung SHU

   Rekening tersebut digunakan untuk menampung dana pembagian sisa hasil usaha Swamitra bagian Pemerintah Provinsi Riau sebesar 25% dan disetor ke Rekening tim di PT. Bank Bukopin Tbk sebagai pendapatan daerah Provinsi Riau yang sekarang terhitung tanggal 1 Januari menjadi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau.

Saldo masing-masing rekening giro tersebut per 31 Desember 2021 adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini :

No	Nomor Rekening	Nama Rekening	Saldo per 31 Des 2021 (Rp)
1.	1001403229	Rek Penampung cadangan Pupuk modal	2.670.085.592,34
2.	1001340227	Monitoring dan supervisi tim swakelola	1.283.594.386,81
3.	1001608220	Rek. Penampung SHU Modal SWA	85.012.749,67
		JUMLAH	**4.038.692.728,82**

Untuk tahun 2020 dana SHU Modal SWA disetorkan ke Rekening BUD pada tanggal 5 Februari 2021 sebesar **Rp99.509.108,00.** Dana SHU Modal SWA untuk tahun 2021 belum disetor ke Rekening BUD Kas Daerah sebesar **Rp84.240.000,00** dikarenakan ada pergantian SK dan Spesiment dari Kepala

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau yang baru dengan Kepala Bank Bukopin yang baru. Ada selisih saldo di Rekening penampung SHU modal SWA yang sebesar Rp85.015.275,58 merupakan saldo awal yang terdapat di rekening tersebut yang merupakan penambahan dari jasa giro rekening sebesar Rp775.275,58.

Perhitungan dana bergulir keseluruhan yang dimiliki Pemerintah Provinsi Riau per 31 Desember 2021 adalah :

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Saldo Investasi Nonpermanen - Dana Bergulir (PMEK) Per 30 Desember 2021	133.993.738.188,00
2	Koperasi Pola Swamitra via Bank Bukopin	22.235.014.226,89
	Jumlah Dana Bergulir per 31 Desember 2021	**156.228.752.414,89**

Sehingga total nilai Investasi Jangka Panjang Non Permanen – Dana Bergulir yang dimiliki Pemerintah Provinsi Riau per 31 Desember 2021 adalah sebesar **Rp156.228.752.414,89.**

5.5.18 Investasi Jangka Panjang Non Permanen - Dana Bergulir Diragukan Tertagih

Investasi Non permanen - Dana Bergulir Diragukan Tertagih 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar (Rp155.011.828.237,80) dan (Rp155.355.464.480,47) diperoleh dari perhitungan provinsi kemungkinan tidak tertagih yang dikategorikan Lancar, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet berdasarkan kondisi berikut:

(1) Kategori Lancar, apabila tidak terdapat tunggakan pembayaran pokok dengan provisi sebesar 1% dari baki debet;

(2) Kategori Kurang Lancar, apabila terdapat tunggakan pokok yang telah melampaui 90 hari s.d. 180 hari dari jatuh tempo dengan provisi sebesar 15% dari baki debet;

(3) Kategori Diragukan, apabila terdapat tunggakan pokok yang melampaui 180 hari s.d. 270 hari dari jatuh tempo dengan provisi sebesar 50% dari baki debet; dan

(4) Kategori Macet, apabila terdapat tunggakan pokok yang telah melampaui 270 hari dari jatuh tempo dengan provisi sebesar 100,00% dari baki debet.

Perhitungan Investasi Nonpermanen - Dana Bergulir diragukan tertagih per 31 Desember 2021 sebesar (Rp155.011.828.237,80) dengan perhitungan berikut:

Uraian		Tahun					
		PEK 2001	PEK 2001	PEK 2002	BPR	Koperasi SWAMITRA PT BUKOPIN	Jumlah
Status	L (1%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KL (15%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diragukan (50%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Macet (100%)	45.905.629.943,53	1.996.419.654,00	84.619.862.403,79	254.902.009,59	22.235.014.226,89	155.011.828.237,80
Jumlah		**45.905.629.943,53**	**1.996.419.654,00**	**84.619.862.403,79**	**254.902.009,59**	**22.235.014.226,89**	**155.011.828.237,80**

Investasi Dana Bergulir yang diragukan Tertagih dapat dirincikan sebagai berikut:

SKPD	PLAFON DANA BERGULIR (Rp)	Plafon Total Penyaluran (Rp)	DIRAGUKAN TERTAGIH 31 Desember 2021 (Rp)	DIRAGUKAN TERTAGIH 2020 (Rp)
Tahun 2001	**52.806.133.400,00**	**51.675.981.896,00**	**45.905.629.943,53**	**46.053.203.914,53**
Dinas Peternakan	9.335.000.000,00	9.128.000.000,00	8.184.102.321,00	8.184.102.331,00
Dinas Pertanian	9.952.660.000,00	9.599.168.496,00	8.521.130.108,53	8.521.130.108,53
Dinas Perikanan dan Kelautan	14.105.699.900,00	14.088.920.400,00	11.873.701.556,00	12.021.908.844,00
Dinas Perkebunan	16.833.333.000,00	16.670.293.000,00	16.547.250.260,00	16.546.616.933,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.129.440.500,00	910.800.000,00	248.778.665,00	248.778.665,00
Dinas Koperasi	750.000.000,00	750.000.000,00	328.131.374,00	328.131.374,00
BPPM	700.000.000,00	528.800.000,00	202.535.659,00	202.535.659,00
Tahun 2002	**99.000.000.000,00**	**97.822.392.625,00**	**84.619.862.403,79**	**84.815.924.674,79**
Dinas Peternakan	11.270.000.000,00	11.261.500.000,00	10.494.583.250,80	10.588.358.250,80
Dinas Pertanian	26.460.000.000,00	26.203.956.625,00	24.841.877.174,00	24.880.127.174,00
Dinas Perikanan dan Kelautan	17.640.000.000,00	17.638.894.000,00	15.253.167.168,99	15.253.167.168,99
Dinas Perkebunan	29.400.000.000,00	29.399.042.000,00	29.396.979.330,00	29.396.979.330,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	7.840.000.000,00	6.929.000.000,00	2.381.641.368,00	2.411.919.139,00
Dinas Koperasi	4.900.000.000,00	4.900.000.000,00	1.534.009.093,00	1.567.768.593,00
BPPM	490.000.000,00	490.000.000,00	312.524.287,00	312.524.287,00
BMT	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	405.080.732,00	405.080.732,00
Perguliran Tahun 2001		**2.444.558.875,00**	**1.996.419.654,00**	**1.996.419.654,00**
Dinas Peternakan		81.000.000,00	81.000.000,00	81.000.000,00
Dinas Pertanian		514.108.875,00	514.108.875,00	514.108.875,00
Dinas Perikanan dan Kelautan		1.008.850.000,00	921.000.000,00	921.000.000,00
Dinas Perkebunan		181.200.000,00	181.200.000,00	181.200.000,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan		283.000.000,00	142.223.616,00	142.223.616,00
Dinas Koperasi		146.400.000,00	51.896.285,00	51.896.285,00
BPPM		230.000.000,00	104.990.878,00	104.990.878,00
Jumlah	**151.806.133.400,00**	**151.942.933.396,00**	**132.521.912.001,32**	**132.865.548.243,32**
BPR				
BPR Sari Madu, Bangkinang	250.000.000,00	250.000.000,00	33.996.805,59	33.996.807,26
BPR Indra Arta, Rengat	250.000.000,00	250.000.000,00	49.734.954,00	49.734.953,00
BPR Cempaka Wahana Sejahtera, Bagan Batu, Rokan Hilir	250.000.000,00	250.000.000,00		

SKPD	PLAFON DANA BERGULIR (Rp)	Plafon Total Penyaluran (Rp)	DIRAGUKAN TERTAGIH 31 Desember 2021 (Rp)	DIRAGUKAN TERTAGIH 2020 (Rp)
BPR Gemilang, Tembilahan	250.000.000,00	250.000.000,00	171.170.250,00	171.170.250,00
Jumlah	**1.000.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**254.902.009,59**	**254.902.010,26**
PT. Bank Bukopin (Pola Swamitra)	**22.235.014.226,89**	**22.235.014.226,89**	**22.235.014.226,89**	**22.235.014.226,89**
JUMLAH	**175.041.147.626,89**	**175.177.947.622,89**	**155.011.828.237,80**	**155.355.464.480,47**

Sehingga total nilai Investasi Jangka Panjang Non Permanen – Dana Bergulir Diragukan Tertagih yang dimiliki Pemerintah Provinsi Riau per 31 Desember 2021 adalah sebesar **(Rp155.011.828.237,80).**

5.5.19 Investasi Jangka Panjang – Investasi Non Permanen Lainnya

Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp74.412.583.845,00 dan Rp74.511.483.845,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	31 Des 2020 (Rp)	Mutasi (Rp)		30 Des 2021 (Rp)
		Penambahan	Pengurangan	
Pinjaman Modal Kerja Kepada 11 Koperasi Unggulan	958.432.027,00	0,00	0,00	958.432.027,00
Pinjaman Kepada 24 Koperasi Simpan Pinjam	403.200.000,00	0,00	3.900.000,00	399.300.000,00
Pinjaman Penguatan Modal (DPM-LUEP)	141.631.818,00	0,00	0,00	141.631.818,00
Dana Usaha Desa (DUD)	63.500.000.000,00	0,00	0,00	63.500.000.000,00
Dana Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)	9.508.220.000,00	0,00	95.000.000,00	9.413.220.000,00
Jumlah	**74.511.483.845,00**	**0,00**	**98.900.000,00**	**74.412.583.845,00**

Secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

1) **Pinjaman Modal Kerja Kepada 11 Koperasi Unggulan**

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau memberi Pinjaman Modal Kerja Kepada 11 Koperasi Unggulan sesuai dengan Nomor 62/Kpts/Dinaskop/IX/2006 tanggal 15 September 2006 masing-masing sebesar Rp450.000.000,00 dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp4.950.000.000,00. Jangka waktu pengembalian 10 tahun, tanpa dikenakan bunga dengan angsuran per tahun sebesar Rp45.000.000,00 melalui Bank Riau Kepri. Terhitung 1 Januari 2020 nama OPD berubah menjadi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau.

Pinjaman Modal Kerja Kepada 11 Koperasi Unggulan tidak menyetor angsuran pokok ke Bank Riau Kepri dari 1 Januari 2021 s.d 31 Desember 2021. Dan berdasarkan data rekap laporan PT. Bank Riau Kepri, dana yang

sudah di transfer ke Kas Daerah Provinsi Riau per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.991.071.895,00. Dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Koperasi	Pokok Pinjaman	Angsuran 2021	Angsuran s.d 31 Des 2021	Selisih yang belum disetor dari Bank Riau Kepri ke Kasda per 31 Desember 2021	Saldo 31 Desember 2021
1	Koptan Karya Sumber Rezeki Kampar	450.000.000,00	0	450.000.000,00		0
2	KUD Budi Sawit Siak	450.000.000,00	0	292.262.567,00	-	157.737.433,00
3	KUD Makarti Jaya Rokan Hulu	450.000.000,00	0	69.025.406,00	275.406,00	380.974.594,00
4	KUD Usaha Tani Mandiri Indrairi Hulu	450.000.000,00	0	450.000.000,00	-	0
5	KUD Anugerah Rokan Hilir	450.000.000,00	0	450.000.000,00	-	0
6	Koptan Balam Jaya Pelalawan	450.000.000,00	0	450.000.000,00	-	0
7	KUD Makarti Kuansing	450.000.000,00	0	450.000.000,00	-	0
8	KSU Serantau Indragiri Hilir	450.000.000,00	0	450.000.000,00	-	0
9	Koperasi Rangsang Jaya Bengkalis	450.000.000,00	0	393.400.000,00	-	56.600.000,00
10	Koperasi Mina Mandiri Dumai	450.000.000,00	0	86.880.000,00	220.672,00	363.120.000,00
11	Koppasta Tangkerang Pekanbaru	450.000.000,00	0	450.000.000,00	-	0
	Jumlah	**4.950.000.000,00**	**0**	**3.991.567.973,00**	**496.078,00**	**958.432.027,00**

Keterangan Tambahan:

a. Jumlah setoran Koperasi ke Bank Riau Kepri sejumlah Rp3.991.567.973,00 yang belum disetor Ke Kas Daerah sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar **Rp496.078,00** dan masih berada di rekening penampung masing-masing Koperasi di Bank Riau Kepri, sehingga jumlah pengembalian pinjaman dari koperasi Unggulan ke Kas Daerah Provinsi Riau per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.991.071.895,00.

2) **Pinjaman Kepada 24 KSP/USP**

Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah memberikan pinjaman kepada 24 Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan/atau Unit Simpan Pinjam (USP) masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 atau jumlah seluruhnya sebesar Rp1.200.000.000,00, tanpa bunga, untuk selanjutnya dipinjamkan KSP/USP tersebut kepada usaha mikro kecil maksimal sebesar Rp2.500.000,00 untuk setiap usaha mikro. Penerima 24 KSP/USP sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Riau Nomor 73/SKDinaskop/ VIII/2007 tanggal 31 Agustus 2007. KSP/USP tersebut wajib mengembalikan pinjaman tersebut selama 5 tahun dengan angsuran pinjaman per tahun sebesar Rp10.000.000,00. Terhitung 1 Januari 2020 nama OPD berubah menjadi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau.

Pinjaman kepada 24 KSP/USP pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau sebesar Rp1.200.000.000,00 telah jatuh tempo pelunasan dan baru dikembalikan/ disetor ke Kas Daerah sebesar Rp800.700.000 Atau 66,73 %.

Koperasi menyetor angsuran pokok ke Kas Daerah dari 1 Januari s/d 31 Desember 2021 sebesar Rp3.900.000,00. Sehingga posisi penyetoran Angsuran Pokok Koperasi KSP/USP per 31 Desember 2021 sebesar Rp800.700.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Koperasi	Pokok Pinjaman	Angsuran	Saldo 31 Des 2021
1	KUD. Manunggal Abadi	50.000.000,00	15.000.000,00	35.000.000,00
2	KUD. Kampar	50.000.000,00	50.000.000,00	-
3	Kop. Tunas karya	50.000.000,00	21.800.000,00	28.200.000,00
4	KPN. MTs. Negeri Bengkalis	50.000.000,00	50.000.000,00	-
5	KUD. Hidup Baru	50.000.000,00	50.000.000,00	-
6	KUD. Manunggal	50.000.000,00	50.000.000,00	-
7	KSU. Usaha Kita	50.000.000,00	50.000.000,00	-
8	KUD. Tani Jari Maju	50.000.000,00	10.000.000,00	40.000.000,00
9	Kopwan Dwi Sri	50.000.000,00	50.000.000,00	-
10	KUD. Harapan Kita	50.000.000,00	30.000.000,00	20.000.000,00
11	KUD. Sumber Makmur	50.000.000,00	50.000.000,00	-
12	Koppas Annago	50.000.000,00	12.000.000,00	38.000.000,00
13	KUD Marga Bhakti	50.000.000,00	50.000.000,00	-
14	Kop. Bina Sejahtera	50.000.000,00	5.000.000,00	45.000.000,00
15	Kopwan Mekar sari	50.000.000,00	47.500.000,00	2.500.000,00
16	KUD. Citra Gemilang	50.000.000,00	32.500.000,00	17.500.000,00

No	Koperasi	Pokok Pinjaman	Angsuran	Saldo 31 Des 2021
17	KUD. Harapan Rakyat	50.000.000,00	11.900.000,00	38.100.000,00
18	KUD. Sari Jaya	50.000.000,00	12.500.000,00	37.500.000,00
19	KUD. Rukun Makmur	50.000.000,00	50.000.000,00	-
20	Kopwan Aisyah Minas	50.000.000,00	40.000.000,00	10.000.000,00
21	Kop. Bumi Putra Karya Dock	50.000.000,00	0	50.000.000,00
22	Kop. Maju Sejahtera	50.000.000,00	12.500.000,00	37.500.000,00
23	KPJ. Prima Umega	50.000.000,00	50.000.000,00	-
24	Kop. As-Shofa	50.000.000,00	50.000.000,00	-
	Jumlah	**1.200.000.000,00**	**800.700.000,00**	**399.300.000,00**

3) **Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP)**

Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau memberikan pinjaman kepada kelompok masyarakat melalui Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) yang ditetapkan sebagai pelaksana pembelian gabah petani/kelompok tani. LUEP penerima pinjaman sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau Nomor 496/SK/BKP-KPG/2008 tanggal 27 Juni 2008 dan Nomor 682.a/SK/BKP-KPG/2008 tanggal 19 September 2008 sebesar Rp2.000.000.000,00.

Pada tahun per 31 Desember 2021 Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Horikultura tidak terdapat pengembalian pinjaman maupun penambahan nilai investasi.

Saldo Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) per 31 Desember 2021 dan Desember 2020 masing-masing sebesar Rp141.631.818,00 dan Rp141.631.818,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama LUEP	Pokok Pinjaman (Rp)	Angsuran (Rp)	Saldo 31 Des 2021 (Rp)	Saldo 31 Des 2020 (Rp)
A	**Kabupaten Indragiri Hilir**				
1	Suka Damai	35.000.000,00	15.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
2	Harapan Baru	200.000.000,00	155.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00
3	Pulih Damai	60.000.000,00	44.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00
B	**Kabupaten Rokan Hilir**				
1	Karya Tani	350.000.000,00	289.368.182,00	60.631.818,00	60.631.818,00
2	Bina Sejahtera	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00
	Jumlah	**755.000.000,00**	**613.368.182,00**	**141.631.818,00**	**141.631.818,00**

4) **Dana Usaha Desa (DUD)**

DUD merupakan dana yang disediakan Pemerintah Provinsi Riau bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau kepada desa/kelurahan dengan tujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan pengembangan ekonomi kemasyarakatan.

DUD yang telah diberikan Pemerintah Provinsi melalui PT Bank BRI adalah sebesar Rp63.500.000.000,00 dengan rincian penyaluran tahun 2005 sebesar Rp11.000.000.000,00, Tahun 2006 sebesar Rp16.000.000.000,00 dan Tahun 2007 sebesar Rp36.500.000.000,00.

Dalam penyaluran DUD tersebut, Badan Pemberdayaan Masyarakat & Pembangunan Desa (BPMPD) tidak pernah membuat perjanjian kerjasama dengan kelompok penerima DUD sehingga mekanisme/tata cara pengembalian pokok dan bunga atas investasi tersebut tidak jelas dan berdampak tidak jelasnya pengembalian pokok dan bunga atas investasi DUD tersebut. Dasar pelaksanaan penyaluran dana DUD hanya berdasarkan Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis yang dibuat secara umum dan tidak mengatur mengenai mekanisme penerimaan dan pengembalian investasi dana DUD ke kas daerah.

Pemberian DUD Tahun 2005 s.d. 2007 dikeluarkan dari Pengeluaran pembiayaan sehingga dicatat sebagai Investasi Nonpermanen Lainnya. Untuk pemberian DUD yang dikucurkan sejak tahun 2008 s.d. 2012, DUD tersebut dibebankan sebagai Belanja Hibah.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 43 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Akuntansi bahwa setiap Dana Bergulir yang tidak tertagih diatas 12 Bulan maka termasuk Investasi Nonpermanen Lainnya Diragukan Tertagih yang dianggap 100% macet.

Saldo Dana Usaha Desa per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp63.500.000.000,00 dan Rp63.500.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	Kabupaten/Kota	Desa/Kelurahan	Dana (Rp)	Total (Rp)
	Kampar	2	1.000.000.000,00	
	Indragiri Hulu	2	1.000.000.000,00	
	Indragiri Hilir	2	1.000.000.000,00	
	Pelalawan	2	1.000.000.000,00	
	Rokan Hulu	2	1.000.000.000,00	
2005	Rokan Hilir	2	1.000.000.000,00	11.000.000.000,00

Tahun	Kabupaten/Kota	Desa/Kelurahan	Dana (Rp)	Total (Rp)
	Siak	2	1.000.000.000,00	
	Kuantan Singingi	2	1.000.000.000,00	
	Kepulauan Meranti	2	1.000.000.000,00	
	Pekanbaru	2	1.000.000.000,00	
	Dumai	2	1.000.000.000,00	
	Kampar	4	2.000.000.000,00	
	Indragiri Hulu	4	2.000.000.000,00	
	Bengkalis	2	1.000.000.000,00	
	Indragiri Hilir	4	2.000.000.000,00	
	Pelalawan	2	1.000.000.000,00	
2006	Rokan Hulu	4	2.000.000.000,00	16.000.000.000,00
	Rokan Hilir	2	1.000.000.000,00	
	Siak	2	1.000.000.000,00	
	Kuantan Singingi	4	2.000.000.000,00	
	Pekanbaru	2	1.000.000.000,00	
	Dumai	2	1.000.000.000,00	
	Kampar	7	3.500.000.000,00	
	Indragiri Hulu	8	4.000.000.000,00	
	Bengkalis	4	2.000.000.000,00	
	Indragiri Hilir	8	4.000.000.000,00	
	Pelalawan	7	3.500.000.000,00	
2007	Rokan Hulu	8	4.000.000.000,00	36.500.000.000,00
	Rokan Hilir	7	3.500.000.000,00	
	Siak	5	2.500.000.000,00	
	Kuantan Singingi	8	4.000.000.000,00	
	Pekanbaru	5	2.500.000.000,00	
	Dumai	5	2.500.000.000,00	
	Kepulauan Meranti	1	500.000.000,00	

5) **Dana Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)**

Dana UP2K merupakan dana yang diberikan Pemerintah Provinsi Riau kepada kelompok perempuan pedesaan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan pengembangan ekonomi kemasyarakatan.

Pemberian UP2K direalisasikan pada Pengeluaran Pembiayaan sehingga dicatat sebagai Investasi Nonpermanen Lainnya. Untuk pemberian UP2K merupakan dana bergulir kekelompok-kelompok baru di desa/kelurahan yang dikoordinir langsung oleh Ketua PKK Desa/Kelurahan sesuai dengan

Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2007 tentang Juknis Penguatan Modal Usaha bagi Pemberdayaan Perempuan di Pedesaan Provinsi Riau. UP2K diberikan kepada 1.014 kelompok perempuan masing-masing kelompok memperoleh sebesar Rp10.000.000,00 dengan jumlah Rp10.140.000.000,00.

Pada per 31 Desember 2021 terdapat pengembalian Dana UP2K di Rekening BUD 101.01.00046 sebesar Rp95.000.000,00 yaitu pengembalian di tahun 2021 sebesar Rp15.000.000,00 dan pengem balian tahun 2020 (koreksi pencatatan pengembalian) sebensar Rp80.000.000,00. Sehingga saldo Dana UP2K per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp9.413.220.000,00 dan Rp9.508.220.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Kabupaten/Kota	Alokasi Kelompok	31-Dec-20	Mutasi (Rp)		31-Dec-21
		(Rp)	Penambahan	Pengurangan	(Rp)
Pekanbaru	100	1.000.000.000,00	0	15.000.000,00	985.000.000,00
Dumai	92	839.000.000,00	0	0	839.000.000,00
Pelalawan	91	727.120.000,00	0	0	727.120.000,00
Siak	92	920.000.000,00	0	0	920.000.000,00
Indragiri Hulu	91	910.000.000,00	0	0	910.000.000,00
Indragiri Hilir	92	920.000.000,00	0	0	920.000.000,00
Rokan Hulu	92	583.400.000,00	0	80.000.000,00	503.400.000,00
Rokan Hilir	91	920.000.000,00	0	0	920.000.000,00
Kampar	91	910.000.000,00	0	0	910.000.000,00
Bengkalis	91	868.700.000,00	0	0	868.700.000,00
Kuantan Singingi	91	910.000.000,00	0	0	910.000.000,00
Jumlah	**1.014**	**9.508.220.000,00**	**0**	**95.000.000,00**	**9.413.220.000,00**

5.5.20 Investasi Jangka Panjang – Investasi Non Permanen Lainnya Diragukan Tertagih

Investasi Nonpermanen Lainnya Diragukan Tertagih per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar (Rp74.412.583.845,00) dan (Rp74.511.483.845,00) dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

A	Dana Bergulir yang Disalurkan Melaui Bank Riau Kepri							
No	**Uraian**	**Jumlah Investasi Non Permanen Lainnya Per 31 Desember 2021**	**Kategori**					**Jumlah (Rp)**
			Belum Jatuh Tempo	**Lancar**	**Kurang Lancar**	**Diragukan**	**Macet**	
				1 -3 bulan	**3 – 6 bulan**	**6-12 bulan**	**> 12 bulan**	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1	Koperasi 11 Unit (disebelas Kab/Kota) / Koperasi Unggulan	958.432.027,00	0	0	0	0	958.432.027,00	958.432.027,00
Jumlah Investasi Non Permanen Lainnya		**958.432.027,00**	0	0	0	0	**958.432.027,00**	**958.432.027,00**
Rate				1%	15%	50%	100%	
Sub Jumlah Penyisihan				0	0	0	**958.432.027,00**	**958.432.027,00**
B	**Dana Bergulir yang Disalurkan Melaui Dinas Koperasi dan SKPD Teknis Lainnya**							
1	Koperasi Wanita/Gender	0					-	-
2	Simpan Pinjam 24 (KSP/USP)	399.300.000,00					399.300.000,00	399.300.000,00
3	DPM-LUEP	141.631.818,00					141.631.818,00	141.631.818,00
4	Dana Usaha Desa	63.500.000.000,00					63.500.000.000,00	63.500.000.000,00
5	Dana Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)	9.413.220.000,00					9.413.220.000,00	9.413.220.000,00
Jumlah Investasi Non Permanen Lainnya		**73.454.151.818,00**	0	0	0	0	**73.454.151.818,00**	**73.454.151.818,00**
Rate		0	0	0,50%	10%	50%	-	-
Sub Jumlah Penyisihan		**73.454.151.818,00**	0	0	0	0	**73.454.151.818,00**	**73.454.151.818,00**
Jumlah		**74.412.583.845,00**	0	0	0	0	**74.412.583.845,00**	**74.412.583.845,00**

5.5.21 Investasi Jangka Panjang Permanen - Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp1.659.548.120.129,17 dan Rp 1.610.680.882.164,25. Perhitungan penyertaan modal tahun per 31 Desemner 2021 dan Tahun 2020 menggunakan metode penilaian didasarkan kriteria kepemilikan berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 67 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur No. 104 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Riau Berbasis Akrual. Penyertaan modal pemerintah Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

Nama BUMD dan Metode Pencatatan	% Kepemilikan Pemda 2020	Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Riau	31-Des-20 (Rp)	Mutasi (Rp)		31-Des-21 (Rp)
				Penambahan	Pengurangan	
Metode Ekuitas						
PT Bank Riau Kepri	38,09	419.168.200.000,00	1.305.019.455.406,57	146.240.324.653,74	106.036.309.281,00	1.345.223.470.779,31
PT Sarana Pembangunan Riau	99,998	49.010.951.646,00	6.676.204.561,67	1.597.607.920,20	1.275.620.266,00	6.998.192.215,87
PT Riau Airlines	69,14	149.700.000.000,00	-	-	-	-
PT Pengembangan Investasi Riau	63,24	124.990.600.000,00	132.186.939.498,05	7.472.953.207,75	904.555.074,00	138.755.337.631,80
PT Riau Petroleum	96,66	7.250.000.000,00	-	-	-	-
PT Permodalan Ekonomi Rakyat	99,95	80.014.185.000,00	88.444.856.888,07	1.255.610.245,82	1.067.471.955,00	88.632.995.178,89
PT Sarana Penjamin Riau /PT Jamkrida	98,64	25.463.000.000,00	32.103.425.809,89	5.589.198.036,41	4.004.499.523,00	33.688.124.323,30
Metode Biaya						
PT. Askrida	0,64	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	-	-	1.250.000.000,00
PT. Bumi Siak Pusako	18,07	45.000.000.000,00	45.000.000.000,00	-	-	45.000.000.000,00
Jumlah		**901.846.936.646,00**	**1.610.680.882.164,25**	**162.155.694.063,92**	**113.288.456.099,00**	**1.659.548.120.129,17**

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Penyertaan modal Pemerintah Provinsi Riau pada PT Bank Riau Kepri Per 31 Desember 2021 senilai Rp419.168.200.000,00 dengan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi 38,09% dengan pencatatan investasi dengan menggunakan metode ekuitas, per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing senilai Rp1.345.223.470.779,31 dan Rp1.305.019.455.406,57. Terdapat penembaham sebesar Rp146.240.324.653,74 yang merupakan bagian laba untuk Tahun 2021 serta adanya penerimaan dividen sebesar Rp106.036.309.281,00 yang dicatat sebagai pendapatan hasil investasi di LRA dan mengurangi nilai investasi Pemerintah Daerah. (Laporan Keuangan *Audited* 2021).

b. Penyertaan modal Pemerintah Provinsi Riau pada PT Sarana Pembagunan Riau Per 31 Desember 2021 senilai Rp49.010.951.646,00 dengan persentase

kepemilikan Pemerintah Provinsi Riau 99,998% dengan perhitungan metode ekuitas per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing senilai Rp6.998.192.215,87dan Rp6.676.204.561,67. Terdapat penambahan sebesar Rp1.597.607.920,20 yang merupakan bagian laba kepada Pemda untuk tahun 2021 dan adanya penerimaan dividen sebesar Rp1.275.620.266,00 yang dicatat sebagai pendapatan hasil investasi di LRA dan mengurangi nilai investasi Pemerintah Daerah. (Laporan Keuangan *Unaudited* 2021).

c. Penyertaan modal Pemerintah Provinsi Riau pada PT Riau Airlines sebesar Rp149.700.000.000,00 dengan persentase kepemilikan sebesar 69,14% dengan metode ekuitas, tahun 2021 dan 2020 masing-masing sebesar nihil. Tidak ada penambahan maupun pengurangan hasil investasi pada PT Riau Airlines dikarenakan ekuitas dan kondisi keuangan PT Riau Airlines tidak sehat dan dalam kondisi diajukan pailit oleh krediturnya.

d. Penyertaan modal Pemerintah Provinsi Riau pada PT Pengembangan Investasi Riau Per 31 Desember 2021 Rp124.990.600.000,00 dengan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi Riau 63,24 % dengan perhitungan metode ekuitas per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing senilai Rp138.755.337.631,80 dan Rp132.186.939.498,05 Terdapat penambahan sebesar Rp7.472.953.207,75 yang merupakan bagian laba untuk tahun 2021 dan adanya penerimaan dividen sebesar Rp904.555.074,00 yang dicatat sebagai pendapatan hasil investasi di LRA dan mengurangi nilai investasi Pemerintah Daerah (Laporan Keuangan *Audited* 2021).

e. Penyertaan modal Pemerintah Provinsi Riau pada PT Riau Petroleum senilai Rp7.250.000.000,00 dengan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi Riau 96,66% dengan perhitungan metode ekuitas Per 31 Desember 2021 nihil Berdasarkan surat No:03/I/RP/2021, menyampaikan terkait laporan keuangan PT Riau Petroleum mengalami kondisi tidak ada *cash flow* dan modal perusahaan telah minus.

f. Penyertaan modal Pemerintah Provinsi Riau pada PT Permodalan Ekonomi Rakyat Per 31 Desember 2021 senilai Rp80.014.185.000,00 dengan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi Riau 99,95% dan perhitungan metode ekuitas Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing senilai dan Rp88.632.995.178,89 dan Rp88.444.856.888,07. Terdapat penambahan sebesar Rp1.255.610.245,82 yang merupakan bagian laba untuk tahun 2021. Dan penerimaan dividen dari PT PER sebesar Rp1.067.471.955,00 sebagai pendapatan hasil investasi pada LRA dan mengurangi nilai investasi Pemerintah Daerah. (Laporan Keuangan *Audited* 2021).

g. Penyertaan modal Pemerintah Provinsi Riau pada PT Sarana Penjamin Riau/PT Jamkrida Per 31 Desember 2021 senilai Rp25.463.000.000,00 dengan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi Riau 98,64% dan

perhitungan metode ekuitas Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing senilai Rp33.688.124.323,30 dan Rp32.103.425.809,89 Terdapat penambahan sebesar Rp5.589.198.036,41 yang merupakan bagian laba untuk tahun 2021 dan penerimaan dividen sebesar Rp 4.004.499.523,00 sebagai pendapatan hasil investasi pada LRA dan mengurangi nilai investasi Pemerintah Daerah. (Laporan Keuangan *Audited* 2021).

h. Penyertaan modal Pemerintah Provinsi Riau pada PT Askrida Per 31 Desember 2021 dengan nilai Rp1.250.000.000,00 dengan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi Riau 0,64%, kepemilikan kurang dari 20% sehingga metode perhitungan menggunakan metode biaya, yaitu investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Pendapatan dari investasi tersebut (bagi hasil dari kekayaan daerah yang dipisahkan) dicatat sebesar bagian hasil yang diterima pemerintah daerah dan tidak mempengaruhi besarnya akun investasi jangka panjang terkait. (Laporan Keuangan *Unaudited* 2020).

i. Penyertaan modal Pemerintah Provinsi Riau pada PT Bumi Siak Pusako Tahun 2009 dengan nilai Rp45.000.000.000,00 dengan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi Riau 18,07%, kepemilikan kurang dari 20% sehingga metode perhitungan menggunakan metode biaya (Laporan Keuangan *Audited* 2019).

5.5.22 Investasi Permanen – Investasi Permanen Lainnya

Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Riau yaitu:

Koperasi KORPRI Sekretariat Daerah

Pemerintah Provinsi Riau melakukan penyertaan modal kepada Koperasi Korpri Sekretariat Daerah Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp2.000.000.000,00 dan Rp2.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	31 Des 2021(Rp)	31 Des 2020 (Rp)
Koperasi KORPRI Sekretariat Daerah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
Jumlah	**2.000.000.000,00**	**2.000.000.000,00**

Keuntungan yang diperoleh dari modal penyertaan ditetapkan masing-masing 30% untuk Pemerintah Provinsi Riau dan 70% untuk Koperasi Korpri Sekretariat Daerah setelah dipotong pajak yang diatur dalam Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Propinsi Riau dengan Koperasi Korpri Nomor 50/PK/X/2010 dan Nomor 01/KKR-SET/VI/2010 tanggal 26 Oktober 2010 tentang Penempatan Dana Modal Penyertaan.

Dari hasil pergerakan Koperasi Korpri Sekretariat Daerah Tahun 2020 telah memberikan kontribusi bagi hasil koperasi kepada Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp14.822.940,00 di transfer ke Kas Daerah pada tanggal 1 April 2021.

Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Nilai aset tetap yang dimiliki/kuasai oleh Pemerintah Provinsi Riau per 31 Desember 2021 dan 2020 masing–masing sebesar Rp29.337.967.893.095,60 dan Rp30.035.685.584.228,50. Aset Tetap per 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar Rp697.717.691.132,90 atau -2,32% dari Tahun 2020. Perolehan Aset Tetap Pemerintah Provinsi Riau berasal dari Hibah dan kapitalisasi belanja modal dan/atau belanja lainnya yang diatribusikan dalam nilai Aset Tetap sesuai dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 67 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 104 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 41 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Riau Berbasis Akrual.

Tahun 2021 Pemerintah Provinsi Riau melakukan penyusutan kecuali terhadap tanah, konstruksi dalam pengerjaan, Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen yang sah dan Aset Tetap yang rusak berat, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	31-Des-20 (Rp)	Mutasi (Rp)		31-Des-21 (Rp)
		Penambahan	Pengurangan	
Tanah	14.042.346.132.867,90	3.887.400.685.760,76	4.021.777.427.400,15	13.907.969.391.228,50
Peralatan dan Mesin	3.488.528.275.241,71	1.246.166.992.550,94	1.068.184.024.044,77	3.666.511.243.747,88
Gedung dan Bangunan	7.114.390.228.169,41	1.075.095.027.775,47	842.856.947.595,89	7.346.628.308.348,99
Jalan. Jaringan dan instalasi	15.073.280.773.279,80	1.410.388.770.879,28	954.296.503.087,10	15.529.373.041.072,00
Aset Tetap Lainnya	1.989.351.293.169,82	302.782.329.606,76	140.502.814.700,71	2.151.630.808.075,87
Konstruksi Dalam Pengerjaan	706.485.015.479,62	168.040.434.491,16	219.921.247.665,85	654.604.202.304,93
Nilai Perolehan	**42.414.381.718.208,30**	**8.089.874.241.064,37**	**7.247.538.964.494,47**	**43.256.716.994.778,20**
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(12.378.696.133.979,80)	(13.136.898.656.764,50)	(11.596.845.689.061,70)	(13.918.749.101.682,60)
Jumlah Aset Tetap	**30.035.685.584.228,50**	**(5.047.024.415.700,13)**	**(4.349.306.724.567,26)**	**29.337.967.893.095,60**

Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap tersaji pada **Lampiran 9**. Mutasi tambah Tahun 2021 sebesar Rp8.089.874.241.064,37 dan mutasi kurang Tahun 2021 sebesar Rp7.247.538.964.494,47 dengan rincian sebagai berikut:

5.5.23 Aset Tetap - Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Nilai Aset Tetap Tanah Pemerintah Provinsi Riau per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp13.907.969.391.228,50 dan Rp14.042.346.132.867,90. Nilai aset Tetap

Tanah per 31 Desember 2021 menurun sebesar (Rp134.376.741.639,39) atau -0,96% dari Tahun 2020.

Rincian penambahan dan pengurangan aset tetap tanah dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian		Saldo
Saldo Tanah per 31 Desember 2020		14.042.346.132.867,90
Penambahan selama Tahun 2021:		
- Belanja Modal (Sp2D)	801.221.880,00	
- Hibah Masuk	1.456.975.540,38	
- Reklas Antar Aset Tetap/Reklas Antar Aset Lainnya	532.432.331.093,40	
- Mutasi Antar Opd	3.314.784.002.126,66	
- Aset Dan Akumulasi Penyusutan Baru Dicatat	37.926.155.120,32	
Jumlah Penambahan		3.887.400.685.760,76
Pengurangan selama Tahun 2021 :		
- Hibah Dan Bantuan Sosial	173.775.268.679,76	
- Reklas Antar Aset Tetap/Reklas Antar Aset Lainnya	531.629.561.593,40	
- Mutasi Antar Opd	3.314.784.002.126,66	
- Koreksi Double Catat Tahun Sebelumnya	1.588.595.000,33	
Jumlah Pengurangan		4.021.777.427.400,15
Saldo Tanah per 31 Desember 2021		**13.907.969.391.228,50**

Dengan penjelasan sebagai berikut:

- Mutasi tambah yang bersumber dari belanja modal tahun 2021 sebesar Rp801.221.880,00 merupakan Tanah Persil Lainnya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp689.850.000,00. dan Tanah untuk Taman pada Dinas Sosial sebesar Rp. 111.371.880,00.
- Mutasi tambah yang bersumber dari hibah masuk sebesar Rp1.456.975.540,38 merupakan pengadaan Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah.
- Mutasi keluar hibah sebesar Rp173.775.268.679,76 merupakan hibah keluar merupakan Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi senilai Rp37.500.000.000,00 , hibah keluar merupakan Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja pada Badan

Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah senilai Rp99.465.148.679,76 , Hibah Tanah untuk Jalan pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah senilai Rp36.173.120.000,00. Hibah Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah senilai Rp637.000.000,00.

Rincian tanah per 31 Desember 2021 dan 2020 dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	31-Des-20 (Rp)	Mutasi (Rp)		31-Des-21 (Rp)
		Penambahan	Pengurangan	
Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	198.418.213.751,00	68.118.595.530,00	63.321.418.650,00	203.215.390.631,00
Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	86.050.000,00	5.727.700.000,00	0,00	5.813.750.000,00
Tanah untuk Bangunan Industri	0,00	7.386.987.000,00	0,00	7.386.987.000,00
Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	12.810.754.720.109,60	2.883.129.843.805,82	3.333.716.785.058,31	12.360.167.778.857,10
Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga	118.045.200.000,00	0,00	99.241.200.000,00	18.804.000.000,00
Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah	125.371.360.267,30	0,00	0,00	125.371.360.267,30
Tanah Persil Lainnya	0,00	689.850.000,00	0,00	689.850.000,00
Tanah Basah	0,00	1.490.456.503,00	0,00	1.490.456.503,00
Tanah Perkebunan	347.799.680.907,70	18.704.900.004,00	16.636.536.123,50	349.868.044.788,20
Tanah Hutan	0,00	144.000.000.000,00	0,00	144.000.000.000,00
Tanah Pertanian	11.616.865.500,00	269.265.500,00	9.961.265.500,00	1.924.865.500,00
Tanah Non Persil Lainnya	249.622.604.338,54	233.132.508.831,54	249.267.604.338,54	233.487.508.831,54
Tanah Lapangan Olahraga	0,00	100.425.200.000,00	2.368.000.000,00	98.057.200.000,00
Tanah Lapangan Parkir	419.798.000,00	0,00	419.798.000,00	0,00
Tanah Lapangan Penimbunan Barang	0,00	802.769.500,00	0,00	802.769.500,00
Tanah Lapangan Terbang	23.695.223.849,80	0,00	23.215.223.849,80	480.000.000,00
Tanah untuk Jalan	47.687.215.070,00	36.173.120.000,00	72.367.840.000,00	11.492.495.070,00
Tanah untuk Bangunan Air	79.251.560.335,00	0,00	241.984.000,00	79.009.576.335,00
Tanah untuk Bangunan Bersejarah	0,00	21.600.000,00	0,00	21.600.000,00
Tanah untuk Taman	4.782.150.000,00	361.565.621.880,00	151.019.771.880,00	215.328.000.000,00
Lapangan Lainnya	24.795.490.739,00	25.762.267.206,40	0,00	50.557.757.945,40
Jumlah	**14.042.346.132.867,90**	**3.887.400.685.760,76**	**4.021.777.427.400,15**	**13.907.969.391.228,50**

Rincian Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2021 dan 2020 terdapat pada SKPD sebagai berikut:

SKPD	31-Des-20(Rp)	Mutasi (Rp)		31-Des-21(Rp)
		Penambahan	Pengurangan	
Dinas Pendidikan	571.502.881.701,02	46.621.080.270,00	16.834.246.000,00	601.289.715.971,02
Dinas Kesehatan	217.859.979.660,00	0,00	0,00	217.859.979.660,00
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	7.007.186.557.291,00	169.471.319.500,00	1.184.000.000,00	7.175.473.876.791,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.582.522.000,00	0,00	0,00	2.582.522.000,00
Dinas Sosial	46.826.350.000,00	222.743.760,00	111.371.880,00	46.937.721.880,00
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	43.210.111.700,00	765.000.000,00	37.500.000.000,00	6.475.111.700,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	3.144.000.000,00	0,00	0,00	3.144.000.000,00
Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura	780.842.456.507,00	3.927.706.507,00	3.927.706.507,00	780.842.456.507,00
Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	37.857.643.000,00	293.244.734.000,00	145.588.595.000,00	185.513.782.000,00
Dinas Perhubungan	25.986.218.000,00	3.461.500.000,00	3.457.500.000,00	25.990.218.000,00
Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	23.182.707.009,60	0,00	0,00	23.182.707.009,60
Dinas Kebudayaan	53.439.500.000,00	0,00	0,00	53.439.500.000,00
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	25.980.000.000,00	0,00	0,00	25.980.000.000,00
Dinas Kelautan Dan Perikanan	21.979.698.000,00	10.794.878.000,00	10.111.798.000,00	22.662.778.000,00
Dinas Pariwisata	213.750.000.000,00	213.750.000.000,00	359.876.250.000,00	67.623.750.000,00
Dinas Perkebunan	5.912.100.000,00	0,00	0,00	5.912.100.000,00
Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	9.580.975.000,00	0,00	0,00	9.580.975.000,00
Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	24.435.000.000,00	0,00	0,00	24.435.000.000,00
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	32.361.527.000,00	7.221.277.000,00	7.221.277.000,00	32.361.527.000,00
Sekretariat Daerah	1.661.488.791.326,40	127.622.767.206,40	287.890.417.206,40	1.501.221.141.326,40
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	107.715.078.000,00	4.966.700.000,00	4.966.700.000,00	107.715.078.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	11.977.324.000,00	0,00	0,00	11.977.324.000,00
Badan Pendapatan Daerah	27.723.505.856,60	1.900.857.390,38	1.655.500.000,00	27.968.863.246,98
Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	7.804.000.000,00	3.002.175.722.126,98	141.067.514.220,47	2.868.912.207.906,51
Badan Kepegawaian Daerah	7.519.602.797,00	0,00	0,00	7.519.602.797,00
Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia	46.577.852.433,00	0,00	0,00	46.577.852.433,00

SKPD	31-Des-20(Rp)	Mutasi (Rp)		31-Des-21(Rp)
		Penambahan	Pengurangan	
Badan Penghubung	16.531.200.000,00	0,00	0,00	16.531.200.000,00
Inspektorat	4.779.400.000,00	1.254.400.000,00	1.254.400.000,00	4.779.400.000,00
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	3.479.000.000,00	0,00	0,00	3.479.000.000,00
PPKD	2.999.130.151.586,28	0,00	2.999.130.151.586,28	0,00
Jumlah	**14.042.346.132.867,90**	**3.887.400.685.760,76**	**4.021.777.427.400,15**	**13.907.969.391.228,50**

5.5.24 Aset Tetap - Peralatan dan Mesin

Aset Tetap Peralatan dan Mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektonik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai. Nilai Peralatan dan Mesin Pemerintah Provinsi Riau per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp3.666.511.243.747,88 dan Rp3.488.528.275.241,71. Nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 meningkat sebesar Rp177.982.968.506,17 atau 5,10% dari Tahun 2020.

Rincian penambahan dan pengurangan aset tetap peralatan dan mesin dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian		Saldo
Saldo Peralatan Mesin per 31 Desember 2020		3.488.528.275.241,71
Penambahan selama Tahun 2021:		
- Belanja Modal (Sp2D)	259.296.406.464,29	
- Hibah Masuk	26.213.336.798,19	
- Kapitalisasi Barang & Jasa	1.584.365.446,00	
- Kapitalisasi Dari Belanja Pemeliharaan	297.650.038,38	
- Reklas Antar Aset Tetap/Reklas Antar Aset Lainnya	878.027.147.569,68	
- Reklas Dari Aset Lainnya Ke Aset Tetap	704.506.629,00	
- Mutasi Antar Opd	78.706.989.802,92	
- Aset Dan Akumulasi Penyusutan Baru Dicatat	475.016.955,48	
- Penambahan Aset Dari Utang Belanja	861.572.847,00	
Jumlah Penambahan		1.246.166.992.550,94
Pengurangan selama Tahun 2021 :		
- Hibah Dan Bantuan Sosial	6.642.620.997,91	
- Dimusnahkan/Musnah	3.242.729.451,90	
- Reklas Ke Aset Ekstrakomptable	53.478.043.410,12	
- Reklas Dari Aset Tetap Ke Aset Lainnya	43.739.971.934,68	

Uraian		Saldo
- Reklas Antar Aset Tetap/Reklas Antar Aset Lainnya	879.962.645.978,72	
- Mutasi Antar Opd	78.706.989.802,92	
- Reklas Ke Aset Lancar	1.189.600.201,00	
- Koreksi Double Catat Tahun Sebelumnya	573.222.187,52	
- Pelunasan Utang Belanja Modal	648.200.080,00	
Jumlah Pengurangan		1.068.184.024.044,77
Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021		**3.666.511.243.747,88**

Jenis-jenis peralatan dan mesin per 31 Desember 2021 dan 2020 dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	31-Des-20 (Rp)	Mutasi (Rp)		31-Des-21 (Rp)
		Penambahan	Pengurangan	
Alat Besar Darat	84.508.873.988,60	16.391.391.070,00	38.031.199,00	100.862.233.859,60
Alat Bantu	42.044.534.715,33	5.273.354.089,47	4.942.708.522,96	42.375.180.281,84
Alat Angkutan Darat Bermotor	461.646.792.017,83	67.410.304.642,08	70.619.645.566,09	458.437.451.093,82
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2.101.369.372,88	376.145.590,00	750.484.842,79	1.727.030.120,09
Alat Angkutan Apung Bermotor	29.819.073.224,72	156.049.300,00	196.503.298,32	29.778.619.226,40
Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	2.711.959.197,33	523.031.351,39	493.331.351,39	2.741.659.197,33
Alat Angkutan Bermotor Udara	1.448.908.500,00	546.077.400,00	22.925.000,00	1.972.060.900,00
Alat Bengkel Bermesin	37.237.038.033,46	53.005.257.484,85	9.968.333.536,63	80.273.961.981,68
Alat Bengkel Tak Bermesin	10.254.938.848,22	5.541.808.259,68	6.290.990.876,09	9.505.756.231,81
Alat Ukur	31.416.797.497,14	14.846.265.145,73	12.838.098.312,46	33.424.964.330,41
Alat Pengolahan	91.882.952.475,99	47.404.813.442,87	57.402.206.243,82	81.885.559.675,04
Alat Kantor	423.410.098.178,90	94.851.931.825,56	280.450.763.479,06	237.811.266.525,40
Alat Rumah Tangga	480.442.035.122,62	261.624.763.025,00	111.329.365.065,06	630.737.433.082,56
Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	45.887.286.594,77	9.052.581.020,62	5.643.616.173,23	49.296.251.442,16
Alat Studio	89.651.124.880,51	19.324.057.479,78	26.185.165.939,09	82.790.016.421,20
Alat Komunikasi	34.444.991.935,44	1.976.428.105,21	1.889.379.116,57	34.532.040.924,08
Peralatan Pemancar	2.480.967.852,33	2.055.886.780,13	798.166.884,73	3.738.687.747,73
Peralatan Komunikasi Navigasi	0,00	221.322.560,00	111.682.560,00	109.640.000,00
Alat Kedokteran	628.695.128.368,56	56.832.016.251,07	17.452.630.142,11	668.074.514.477,52
Alat Kesehatan Umum	142.343.765.574,08	3.855.310.001,08	105.609.219.322,92	40.589.856.252,24
Unit Alat Laboratorium	315.174.114.752,86	130.660.205.808,11	214.619.994.622,90	231.214.325.938,07
Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	438.778.250,54	424.882.105,46	6.333.626,05	857.326.729,95
Alat Peraga Praktik Sekolah	75.853.014.376,96	127.640.996.486,03	69.341.318.460,55	134.152.692.402,44
Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	354.107.415,77	1.948.308.829,59	122.878.239,59	2.179.538.005,77
Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	258.664.083,30	78.735.000,00	41.555.060,00	295.844.023,30

Uraian	31-Des-20 (Rp)	Mutasi (Rp)		31-Des-21 (Rp)
		Penambahan	Pengurangan	
Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	995.601.894,42	1.700.000,00	875.000,00	996.426.894,42
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	8.662.654.466,20	1.679.924.074,00	365.490.000,00	9.977.088.540,20
Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	2.647.261.680,00	1.840.739.589,29	6.236.264,70	4.481.765.004,59
Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	0,00	8.464.445.246,17	1.203.432.980,24	7.261.012.265,93
Senjata Api	1.299.620.799,00	0,00	169.050.000,00	1.130.570.799,00
Persenjataan Non Senjata Api	18.465.688.975,18	1.673.972.861,15	4.148.458.126,70	15.991.203.709,63
Komputer Unit	273.268.278.277,67	124.619.820.733,53	17.939.221.296,96	379.948.877.714,24
Peralatan Komputer	148.681.853.891,10	33.061.798.150,90	44.039.284.404,56	137.704.367.637,44
Alat Eksplorasi Topografi	0,00	78.220.000,00	30.450.000,00	47.770.000,00
Alat Eksplorasi Geofisika	0,00	557.719.000,00	176.096.565,00	381.622.435,00
Sumur	0,00	1.008.353.524,99	750.817.726,99	257.535.798,00
Pengolahan dan Pemurnian	0,00	14.538.000,00	670.000,00	13.868.000,00
Alat Deteksi	0,00	24.000.000,00	2.137.500,00	21.862.500,00
Alat Pelindung	0,00	2.752.560.505,92	100.932.557,78	2.651.627.948,14
Alat SAR	0,00	1.332.045.617,88	59.470.000,00	1.272.575.617,88
Alat Kerja Penerbangan	0,00	87.460.000,00	0,00	87.460.000,00
Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	0,00	1.361.918.796,00	23.204.596,00	1.338.714.200,00
Unit Peralatan Proses/Produksi	0,00	7.154.000,00	7.154.000,00	0,00
Rambu-rambu Lalu Lintas Darat	0,00	39.277.930.284,04	1.678.744.759,00	37.599.185.525,04
Peralatan Olahraga	0,00	106.300.769.113,36	316.970.825,43	105.983.798.287,93
Jumlah	**3.488.528.275.241,71**	**1.246.166.992.550,94**	**1.068.184.024.044,77**	**3.666.511.243.747,88**

Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 dan 2020 terdapat pada SKPD sebagai berikut:

SKPD	31-Des-20(Rp)	Mutasi (Rp)		31-Des-21(Rp)
		Penambahan	Pengurangan	
Dinas Pendidikan	1.037.253.748.727,56	737.170.529.043,83	632.297.718.519,31	1.142.126.559.252,08
Dinas Kesehatan	904.448.460.139,07	92.094.708.050,88	35.183.171.870,65	961.359.996.319,30
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	163.625.194.875,48	24.919.770.436,34	6.059.500.535,49	182.485.464.776,33
Satuan Polisi Pamong Praja	15.008.416.170,97	1.308.794.556,74	1.200.379.556,75	15.116.831.170,96
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	72.445.848.810,48	5.111.791.455,63	4.630.845.687,63	72.926.794.578,48
Dinas Sosial	17.714.406.991,32	835.518.666,00	329.084.306,00	18.220.841.351,32

SKPD	31-Des-20(Rp)	Mutasi (Rp)		31-Des-21(Rp)
		Penambahan	Pengurangan	
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	29.813.886.306,72	452.927.686,72	10.202.691.196,98	20.064.122.796,46
Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	5.794.375.001,03	663.679.889,44	475.728.659,44	5.982.326.231,03
Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura	55.355.333.463,18	3.926.281.686,44	17.974.938.761,76	41.306.676.387,86
Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	68.074.592.500,72	11.975.208.344,20	3.235.653.339,60	76.814.147.505,32
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	10.451.295.213,48	1.069.269.258,50	857.782.958,50	10.662.781.513,48
Dinas Perhubungan	58.816.511.377,94	44.795.071.127,64	43.836.295.768,64	59.775.286.736,94
Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	37.153.890.393,61	7.279.695.744,00	6.583.480.416,06	37.850.105.721,55
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8.144.437.690,95	267.461.365,00	1.974.443.217,25	6.437.455.838,70
Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	144.065.239.309,18	103.758.121.479,84	103.553.472.069,02	144.269.888.720,00
Dinas Kebudayaan	10.811.649.465,11	693.584.901,46	519.857.370,96	10.985.376.995,61
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	21.024.935.870,93	6.669.466.532,85	6.046.914.436,85	21.647.487.966,93
Dinas Kelautan Dan Perikanan	79.022.250.517,03	44.374.043.442,97	46.119.164.351,99	77.277.129.608,01
Dinas Pariwisata	12.986.014.923,61	1.345.230.629,00	760.000,00	14.330.485.552,61
Dinas Perkebunan	7.303.863.522,72	1.309.385.440,00	298.407.390,00	8.314.841.572,72
Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	35.735.976.405,10	15.489.711.750,12	17.268.299.118,31	33.957.389.036,91
Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	17.783.927.444,96	464.041.200,00	2.094.200,00	18.245.874.444,96
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	32.409.266.127,02	2.507.547.736,11	1.621.153.736,11	33.295.660.127,02
Sekretariat Daerah	333.540.604.194,91	8.911.640.719,00	6.134.808.616,82	336.317.436.297,09
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	83.881.091.765,26	34.570.275.310,30	23.259.762.686,10	95.191.604.389,46
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	40.145.776.549,22	676.068.000,43	3.552.635.809,37	37.269.208.740,28
Badan Pendapatan Daerah	64.848.726.819,77	5.059.437.762,50	17.474.627,50	69.890.689.954,77
Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	16.975.238.103,32	77.255.374.551,55	36.993.230.903,07	57.237.381.751,80
Badan Kepegawaian Daerah	15.889.534.375,66	8.252.162.614,95	8.198.251.614,95	15.943.445.375,66
Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia	7.391.427.482,22	1.236.121.150,00	375.771.567,30	8.251.777.064,92
Badan Penghubung	19.840.891.698,14	585.316.146,50	0,00	20.426.207.844,64
Inspektorat	8.150.459.201,03	1.006.592.247,00	934.192.247,00	8.222.859.201,03
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	5.285.733.913,65	132.163.625,00	1.110.788.615,00	4.307.108.923,65
PPKD	47.335.269.890,36	0,00	47.335.269.890,36	0,00
Jumlah	**3.488.528.275.241,71**	**1.246.166.992.550,94**	**1.068.184.024.044,77**	**3.666.511.243.747,88**

5.5.25 Aset Tetap - Gedung dan Bangunan

Aset Tetap Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan Pemerintah Provinsi Riau per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp7.346.628.308.348,99 dan Rp7.114.390.228.169,41. Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 meningkat sebesar Rp232.238.080.179,58 atau 3,26% dari tahun 2020.

Rincian penambahan dan pengurangan aset tetap gedung dan bangunan dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian		Saldo
Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020		7.114.390.228.169,41
Penambahan selama Tahun 2021:		
- Belanja Modal (Sp2D)	239.980.341.418,23	
- Hibah Masuk	134.399.093.017,79	
- Kapitalisasi Barang & Jasa	50.044.960,00	
- Kapitalisasi Dari Belanja Pemeliharaan	1.946.129.194,50	
- Reklas Antar Aset Tetap/Reklas Antar Aset Lainnya	447.697.647.820,34	
- Mutasi Antar Opd	250.444.005.498,62	
- Aset Dan Akumulasi Penyusutan Baru Dicatat	577.765.866,00	
Jumlah Penambahan		1.075.095.027.775,47
Pengurangan selama Tahun 2021 :		
- Hibah Dan Bantuan Sosial	79.057.182.504,92	
- Reklas Ke Aset Ekstrakomptable	1.306.288.641,57	
- Reklas Dari Aset Tetap Ke Aset Lainnya	8.359.031.083,26	
- Reklas Antar Aset Tetap/Reklas Antar Aset Lainnya	501.212.381.356,33	
- Mutasi Antar Opd	250.444.005.498,62	
- Reklas Ke Aset Lancar	504.735.574,20	
- Koreksi Double Catat Tahun Sebelumnya	1.973.322.937,00	
Jumlah Pengurangan		842.856.947.595,89
Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021		**7.346.628.308.348,99**

Jenis-jenis Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut:

Uraian	31-Des-20 (Rp)	Mutasi (Rp)		31-Des-21 (Rp)
		Penambahan	Pengurangan	
Bangunan Gedung Tempat Kerja	6.635.041.105.468,86	789.927.973.132,32	638.900.241.720,88	6.786.068.836.880,30
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	370.802.333.051,16	265.579.439.885,17	180.629.260.352,39	455.752.512.583,94
Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	16.390.730.558,32	728.077.000,00	2.924.159.772,00	14.194.647.786,32
Bangunan Menara Perambuan	19.842.432.083,19	2.448.756.000,00	11.284.399.589,19	11.006.788.494,00
Tugu/Tanda Batas	72.313.627.007,88	16.410.781.757,98	9.118.886.161,43	79.605.522.604,43
Jumlah	**7.114.390.228.169,41**	**1.075.095.027.775,47**	**842.856.947.595,89**	**7.346.628.308.348,99**

Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 dan 2020 terdapat pada SKPD sebagai berikut:

SKPD	31-Des-20(Rp)	Mutasi (Rp)		31-Des-21(Rp)
		Penambahan	Pengurangan	
Dinas Pendidikan	2.080.801.223.989,54	606.719.119.102,02	396.239.820.341,96	2.291.280.522.749,60
Dinas Kesehatan	1.081.993.372.803,01	21.682.470.853,89	15.080.091.798,89	1.088.595.751.858,01
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	455.595.707.111,51	109.846.507.594,18	59.514.270.799,37	505.927.943.906,32
Satuan Polisi Pamong Praja	9.869.193.706,61	2.081.010.600,00	1.004.205.300,00	10.945.999.006,61
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	19.095.576.834,90	277.062.000,00	5.522.052.824,55	13.850.586.010,35
Dinas Sosial	28.484.064.556,00	2.520.056.403,00	1.493.464.724,20	29.510.656.234,80
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	44.866.595.722,77	84.274.000,00	15.859.407.819,90	29.091.461.902,87
Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	1.526.265.195,88	49.271.780,00	0,00	1.575.536.975,88
Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura	69.273.396.978,81	10.760.853.903,50	8.509.364.772,50	71.524.886.109,81
Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	43.346.953.245,93	2.529.909.266,00	1.002.232.596,00	44.874.629.915,93
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	4.422.436.084,48	0,00	0,00	4.422.436.084,48
Dinas Perhubungan	76.634.974.913,08	10.533.788.882,98	10.806.417.382,98	76.362.346.413,08
Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	2.558.500.319,56	50.284.160,00	0,00	2.608.784.479,56
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	497.734.006,23	0,00	0,00	497.734.006,23
Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	1.973.107.149.834,24	30.536.562.867,94	12.989.788.356,90	1.990.653.924.345,28
Dinas Kebudayaan	14.968.720.663,99	2.129.490.307,80	784.967.407,80	16.313.243.563,99

SKPD	31-Des-20(Rp)	Mutasi (Rp)		31-Des-21(Rp)
		Penambahan	Pengurangan	
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	150.037.228.415,12	0,00	0,00	150.037.228.415,12
Dinas Kelautan Dan Perikanan	33.069.043.363,26	18.723.037.916,75	675.676.515,00	51.116.404.765,01
Dinas Pariwisata	141.407.117.478,96	1.062.636.013,00	28.341.657.703,14	114.128.095.788,82
Dinas Perkebunan	5.764.980.659,00	5.846.348.617,41	2.184.415.540,21	9.426.913.736,20
Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	42.594.744.391,06	709.754.654,66	320.000.000,00	42.984.499.045,72
Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	4.895.144.762,00	0,00	0,00	4.895.144.762,00
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	21.658.662.653,54	469.295.914,63	381.093.914,63	21.746.864.653,54
Sekretariat Daerah	523.969.502.597,41	139.756.450,51	940.943.874,01	523.168.315.173,91
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	38.501.013.905,60	8.129.568.490,00	5.952.888.000,00	40.677.694.395,60
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	27.177.016.833,17	0,00	0,00	27.177.016.833,17
Badan Pendapatan Daerah	64.781.665.703,19	5.758.010.789,99	1.665.247.597,53	68.874.428.895,65
Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	5.440.096.785,69	220.395.291.788,29	175.718.310.473,30	50.117.078.100,68
Badan Kepegawaian Daerah	15.285.555.786,08	426.388.648,42	426.388.648,42	15.285.555.786,08
Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia	16.915.040.728,88	10.285.114.930,51	10.005.995.430,51	17.194.160.228,88
Badan Penghubung	19.634.606.558,81	3.349.161.840,00	1.674.580.920,00	21.309.187.478,81
Inspektorat	4.966.713.427,00	0,00	0,00	4.966.713.427,00
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	5.486.563.300,00	0,00	0,00	5.486.563.300,00
PPKD	85.763.664.854,10	0,00	85.763.664.854,10	0,00
Jumlah	**7.114.390.228.169,41**	**1.075.095.027.775,47**	**842.856.947.595,89**	**7.346.628.308.348,99**

5.5.26 Aset Tetap - Jalan, Irigasi dan Jaringan

Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi Riau serta dimiliki dan/ atau dikuasai oleh Pemerintah Provinsi Riau dan dalam kondisi siap dipakai. Nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Provinsi Riau per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp15.529.373.041.072,00 dan Rp15.073.280.773.279,80. Nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2021 meningkat sebesar Rp456.092.267.792,18 dari 3,03% dari tahun 2020.

Rincian penambahan dan pengurangan aset tetap Jalan, irigasi dan jaringan dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian		Saldo
Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2020		15.073.280.773.279,80
Penambahan selama Tahun 2021:		
- Belanja Modal (Sp2D)	470.432.878.695,85	
- Hibah Masuk	1.411.235.960,00	
- Kapitalisasi Barang & Jasa	1.519.449.684,00	
- Reklas Antar Aset Tetap/Reklas Antar Aset Lainnya	422.097.082.934,44	
- Mutasi Antar Opd	514.635.051.137,67	
- Aset Dan Akumulasi Penyusutan Baru Dicatat	243.864.000,32	
- Penambahan Aset Dari Utang Belanja	49.208.467,00	
Jumlah Penambahan		1.410.388.770.879,28
Pengurangan selama Tahun 2021 :		
- Hibah Dan Bantuan Sosial	21.086.498.161,85	
- Reklas Ke Aset Ekstrakomptable	2.200.000,00	
- Reklas Dari Aset Tetap Ke Aset Lainnya	885.839.305,20	
- Reklas Antar Aset Tetap/Reklas Antar Aset Lainnya	406.442.275.324,32	
- Mutasi Antar Opd	514.635.051.137,67	
- Reklas Ke Aset Lancar	139.433.200,00	
- Koreksi Double Catat Tahun Sebelumnya	11.105.205.958,06	
Jumlah Pengurangan		954.296.503.087,10
Saldo Jalan,Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2021		**15.529.373.041.072,00**

Jenis-jenis Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut:

Uraian	31-Des-20 (Rp)	Mutasi (Rp)		31-Des-21 (Rp)
		Penambahan	Pengurangan	
Jalan	10.373.510.556.185,20	425.069.787.060,52	232.139.843.789,70	10.566.440.499.456,10
Jembatan	2.845.845.169.371,47	213.931.300.051,69	148.248.558.684,72	2.911.527.910.738,44
Bangunan Air Irigasi	350.423.573.479,55	8.787.025.368,62	2.653.446.686,60	356.557.152.161,57
Bangunan Pengairan Pasang Surut	9.014.311.416,35	125.992.000,00	125.992.000,00	9.014.311.416,35
Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	58.002.087.266,37	1.659.617.000,00	0,00	59.661.704.266,37
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	474.146.589.477,08	1.756.603.451,63	1.659.617.000,00	474.243.575.928,71
Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	2.317.102.559,72	2.516.309.381,39	883.185.482,50	3.950.226.458,61

Uraian	31-Des-20 (Rp)	Mutasi (Rp)		31-Des-21 (Rp)
		Penambahan	Pengurangan	
Bangunan Air Bersih/Air Baku	142.017.068.486,33	6.563.131.458,61	19.734.790.222,39	128.845.409.722,55
Bangunan Air Kotor	53.953.794.603,59	15.042.665.535,08	15.105.538.711,88	53.890.921.426,79
Instalasi Air Bersih/Air Baku	24.710.256.721,94	183.259.239.258,98	994.235.586,84	206.975.260.394,08
Instalasi Air Kotor	4.706.986.170,14	19.998,74	237.652.434,14	4.469.353.734,74
Instalasi Pengolahan Sampah	284.630.240,00	802.769.500,00	927.399.740,00	160.000.000,00
Instalasi Pembangkit Listrik	71.427.233.706,43	26.792.604.903,83	17.276.892.186,88	80.942.946.423,38
Instalasi Gardu Listrik	126.906.091.212,53	6.093.735.814,81	8.672.407.543,53	124.327.419.483,81
Instalasi Pertahanan	861.150.309,30	44.700.000,00	32.260.901,03	873.589.408,27
Instalasi Gas	707.802.440,00	0,00	0,00	707.802.440,00
Instalasi Pengaman	518.676.400,00	1.228.616.200,00	543.647.400,00	1.203.645.200,00
Instalasi Lain	3.567.986.900,32	8.534.326.527,25	847.379.455,84	11.254.933.971,73
Jaringan Air Minum	14.450.548.283,40	2.904.362.851,86	3.401.034.301,56	13.953.876.833,70
Jaringan Listrik	511.886.470.715,52	501.474.865.883,86	499.645.101.448,48	513.716.235.150,90
Jaringan Telepon	3.907.863.570,60	792.775.849,84	1.072.904.247,05	3.627.735.173,39
Jaringan Gas	114.823.763,96	3.008.322.782,57	94.615.263,96	3.028.531.282,57
Jumlah	**15.073.280.773.279,80**	**1.410.388.770.879,28**	**954.296.503.087,10**	**15.529.373.041.072,00**

Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2021 dan 2020 terdapat pada SKPD sebagai berikut:

SKPD	31-Des-20(Rp)	Mutasi (Rp)		31-Des-21(Rp)
		Penambahan	Pengurangan	
Dinas Pendidikan	13.388.722.646,94	13.415.414.070,67	13.047.197.506,67	13.756.939.210,94
Dinas Kesehatan	20.308.155.008,45	3.634.369.278,25	1.318.487.705,20	22.624.036.581,50
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	14.059.643.089.290,00	664.444.862.986,91	205.795.538.231,33	14.518.292.414.045,60
Satuan Polisi Pamong Praja	21.814.200,00	15.800.000,00	15.800.000,00	21.814.200,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Sosial	2.185.593.254,00	6.000.000,00	6.000.000,00	2.185.593.254,00
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	3.955.443.227,63	0,32	995.051.359,50	2.960.391.868,45
Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	170.465.000,00	0,00	0,00	170.465.000,00
Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura	11.965.781.558,12	2.327.367.840,24	2.141.024.940,24	12.152.124.458,12

SKPD	31-Des-20(Rp)	Mutasi (Rp)		31-Des-21(Rp)
		Penambahan	Pengurangan	
Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	9.850.054.148,74	194.290.800,00	35.585.000,00	10.008.759.948,74
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	603.258.220,68	2.823.878,34	2.823.878,34	603.258.220,68
Dinas Perhubungan	181.084.016.489,72	184.874.058.340,70	196.112.207.227,72	169.845.867.602,70
Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	312.861.408,03	0,00	0,00	312.861.408,03
Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	6.967.264.413,51	39.963.689,78	0,00	7.007.228.103,29
Dinas Kebudayaan	1.672.851.367,64	582.315.890,97	214.633.890,97	2.040.533.367,64
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	14.422.749,00	0,00	0,00	14.422.749,00
Dinas Kelautan Dan Perikanan	48.350.240.772,18	3.572.120.828,39	12.505.358.062,80	39.417.003.537,77
Dinas Pariwisata	3.843.144.885,34	316.540.000,00	356.503.689,78	3.803.181.195,56
Dinas Perkebunan	4.297.710.321,00	92.777.575,00	0,00	4.390.487.896,00
Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	8.213.648.188,18	1.429.501.408,27	1.942.328.180,12	7.700.821.416,33
Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	146.728.871.082,00	15.794.335.836,00	0,00	162.523.206.918,00
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	1.392.168.955,80	350.908.555,00	350.908.555,00	1.392.168.955,80
Sekretariat Daerah	20.836.036.725,39	2.054.723.991,46	2.037.955.608,95	20.852.805.107,90
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	5.920.759.559,00	334.539.999,00	59.441.250,00	6.195.858.308,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	643.086.094,34	31.449.000,00	0,00	674.535.094,34
Badan Pendapatan Daerah	2.944.919.599,33	0,00	126.398.000,00	2.818.521.599,33
Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	452.866.297,72	514.414.808.011,89	1.774.189.050,50	513.093.485.259,11
Badan Kepegawaian Daerah	901.762.668,18	610.498.898,09	610.498.898,09	901.762.668,18
Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia	1.624.259.897,01	0,00	0,00	1.624.259.897,01
Badan Penghubung	0,00	0,00	0,00	0,00
Inspektorat	138.933.200,00	0,00	0,00	138.933.200,00
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	1.849.300.000,00	1.849.300.000,00	1.849.300.000,00	1.849.300.000,00
PPKD	512.999.272.051,89	0,00	512.999.272.051,89	0,00
Jumlah	**15.073.280.773.279,80**	**1.410.388.770.879,28**	**954.296.503.087,10**	**15.529.373.041.072,00**

5.5.27 Aset Tetap - Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan Aset Tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam Aset Tetap Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan. Nilai Aset Tetap Lainnya Pemerintah Provinsi Riau per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp2.151.630.808.075,87dan

Rp1.989.351.293.169,82. Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 meningkat sebesar Rp162.279.514.906,05 atau 8,15% dari Tahun 2020.

Rincian penambahan dan pengurangan Aset Tetap Lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian		Saldo
Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020		1.989.351.293.169,82
Penambahan selama Tahun 2021:		
- Belanja Modal (SP2D)	47.775.700.210,00	
- Hibah Masuk	8.388.300.277,27	
- Reklas Antar Aset Tetap/Reklas Antar Aset Lainnya	222.469.795.683,22	
- Mutasi Antar SKPD	13.001.525.627,27	
- Aset Dan Akumulasi Penyusutan Baru Dicatat	11.147.007.809,00	
Jumlah Penambahan		302.782.329.606,76
Pengurangan selama Tahun 2021 :		
- Hibah Dan Bantuan Sosial	2.333.593.200,00	
- Reklas Ke Aset Ekstrakomptable	6.283.350,00	
- Reklas Dari Aset Tetap Ke Aset Lainnya	3.620.647.083,00	
- Reklas Antar Aset Tetap/Reklas Antar Aset Lainnya	121.540.765.440,42	
- Mutasi Antar SKPD	13.001.525.627,27	
- Koreksi Double Catat Tahun Sebelumnya	0,02	
Jumlah Pengurangan		140.502.814.700,71
Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021		**2.151.630.808.075,87**

Jenis-jenis Aset Tetap Lainnya Pemerintah Provinsi Riau per 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut :

Uraian	31-Des-20 (Rp)	Mutasi (Rp)		31-Des-21 (Rp)
		Penambahan	Pengurangan	
Bahan Perpustakaan Tercetak	375.100.798.940,78	117.847.320.790,33	103.594.210.223,80	389.353.909.507,31
Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	1.345.965.725,78	163.881.929,43	90.945.000,00	1.418.902.655,21
Kartografi, Naskah dan Lukisan	428.928.154,37	392.927.200,00	178.078.109,90	643.777.244,47
Musik	1.345.689.453,10	0,00	1.339.689.453,10	6.000.000,00
Karya Grafika (Graphic Material)	116.326.658,80	0,00	45.341.100,00	70.985.558,80

Uraian	31-Des-20 (Rp)	Mutasi (Rp)		31-Des-21 (Rp)
		Penambahan	Pengurangan	
Three Dimensional Artifacts and Realita	0,00	165.806.580,00	0,00	165.806.580,00
Barang Bercorak Kesenian	14.906.987.407,45	9.516.466.083,90	9.753.571.451,39	14.669.882.039,96
Alat Bercorak Kebudayaan	8.705.361.535,85	1.121.044.814,61	2.071.377.643,65	7.755.028.706,81
Tanda Penghargaan	66.146.525,21	66.146.525,21	66.146.525,21	66.146.525,21
Ternak	3.185.431.097,77	2.775.905.000,00	4.377.841.097,77	1.583.495.000,00
Hewan Lainnya	1.310.557.649,60	0,00	1.310.557.649,60	0,00
Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip)	0,00	1.831.113.747,37	132.350.000,00	1.698.763.747,37
Crustacea (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)	0,00	99.400.000,00	49.700.000,00	49.700.000,00
Biota Perairan Lainnya	0,00	87.200.000,00	43.600.000,00	43.600.000,00
Tanaman	19.168.493.872,85	226.294.832,00	0,00	19.394.788.704,85
Barang Koleksi Non Budaya	0,00	5.624.000,00	0,00	5.624.000,00
Aset Tetap Dalam Renovasi	1.563.670.606.148,26	168.483.198.103,91	17.449.406.446,29	1.714.704.397.805,88
Jumlah	**1.989.351.293.169,82**	**302.782.329.606,76**	**140.502.814.700,71**	**2.151.630.808.075,87**

Rincian Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 terdapat pada SKPD sebagai berikut:

SKPD	31-Des-20(Rp)	Mutasi (Rp)		31-Des-21(Rp)
		Penambahan	Pengurangan	
Dinas Pendidikan	390.671.172.073,44	161.214.594.828,92	106.223.379.850,65	445.662.387.051,71
Dinas Kesehatan	1.148.742.988,56	617.415.360,00	391.645.360,00	1.374.512.988,56
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	1.455.139.514.062,99	114.892.089.426,00	0,00	1.570.031.603.488,99
Satuan Polisi Pamong Praja	4.958.024.039,00	4.897.858.039,00	4.897.858.039,00	4.958.024.039,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.782.133.994,25	1.931.894,25	2.335.525.094,25	1.448.540.794,25
Dinas Sosial	1.344.603.587,00	143.418.109,00	90.418.109,00	1.397.603.587,00
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	126.689.400,00	3.500.000,00	3.500.000,00	126.689.400,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak,	45.106.409,00	0,00	0,00	45.106.409,00

SKPD	31-Des-20(Rp)	Mutasi (Rp)		31-Des-21(Rp)
		Penambahan	Pengurangan	
Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana				
Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura	1.275.987.150,00	145.050.000,00	1.187.753.150,00	233.284.000,00
Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	2.854.169.175,80	5.500.000,00	5.500.000,00	2.854.169.175,80
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	281.068.500,92	0,00	0,00	281.068.500,92
Dinas Perhubungan	302.950.500,00	60.000.000,00	60.000.000,00	302.950.500,00
Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	3.035.708,00	0,00	3.035.708,00	0,00
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	752.838.625,00	0,00	691.038.625,00	61.800.000,00
Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	13.666.782.193,00	0,00	2.731.389.619,00	10.935.392.574,00
Dinas Kebudayaan	20.180.318.728,18	1.379.419.979,83	1.361.419.979,83	20.198.318.728,18
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	42.176.798.590,00	424.362.629,43	226.262.629,43	42.374.898.590,00
Dinas Kelautan Dan Perikanan	2.617.300.947,37	2.039.863.747,37	1.566.413.747,37	3.090.750.947,37
Dinas Pariwisata	8.000.033.549,04	0,00	0,00	8.000.033.549,04
Dinas Perkebunan	7.149.633.748,00	0,00	0,00	7.149.633.748,00
Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	2.757.013.500,00	2.727.096.000,00	4.001.176.000,00	1.482.933.500,00
Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	141.290.000,00	0,00	0,00	141.290.000,00
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	425.929.700,00	0,00	0,00	425.929.700,00
Sekretariat Daerah	14.801.461.272,24	166.284.072,40	166.284.072,40	14.801.461.272,24
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	2.214.567.509,46	727.461.639,80	614.316.236,00	2.327.712.913,26
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	1.374.543.890,31	375.000,00	609.789.600,02	765.129.290,29
Badan Pendapatan Daerah	2.998.040.239,52	263.606.637,52	263.606.637,52	2.998.040.239,52
Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	0,00	13.001.525.627,27	8.388.300.277,27	4.613.225.350,00
Badan Kepegawaian Daerah	189.000.700,43	70.976.615,97	70.976.615,97	189.000.700,43
Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia	8.158.960,50	0,00	0,00	8.158.960,50
Badan Penghubung	3.169.055.349,81	0,00	0,00	3.169.055.349,81
Inspektorat	100.630.000,00	0,00	0,00	100.630.000,00
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	81.472.728,00	0,00	0,00	81.472.728,00
PPKD	4.613.225.350,00	0,00	4.613.225.350,00	0,00
Jumlah	**1.989.351.293.169,82**	**302.782.329.606,76**	**140.502.814.700,71**	**2.151.630.808.075,87**

5.5.28 Aset Tetap - Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya atau belum fungsional. Adapun nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan Pemerintah Provinsi Riau per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp654.604.202.304,93 dan Rp706.485.015.479,62. Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp51.880.813.174,69 atau 7,54% dari Tahun 2020.

Rincian penambahan dan pengurangan konstruksi dalam pengerjaan dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian		Saldo
Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2020		706.485.015.479,62
Penambahan selama Tahun 2021:		
- Kapitalisasi Barang & Jasa	10.324.764.011,20	
- Belanja Barang Dan Jasa Menjadi Kdp	192.162.000,00	
- Reklas Antar Aset Tetap/Reklas Antar Aset Lainnya	156.243.030.771,34	
- Mutasi Antar Opd	257.806.358,62	
- Aset Dan Akumulasi Penyusutan Baru Dicatat	1.022.671.350,00	
Jumlah Penambahan		168.040.434.491,16
Pengurangan selama Tahun 2021 :		
- Reklas Dari Aset Tetap Ke Aset Lainnya	683.071.028,00	
- Reklas Antar Aset Tetap/Reklas Antar Aset Lainnya	218.177.600.779,23	
- Mutasi Antar Opd	257.806.358,62	
- Koreksi Double Catat Tahun Sebelumnya	802.769.500,00	
Jumlah Pengurangan		219.921.247.665,85
Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2021		**654.604.202.304,93**

Jenis-jenis Konstruksi Dalam Pengerjaan Pemerintah Provinsi Riau per 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut :

Uraian	31-Des-20 (Rp)	Mutasi (Rp)		31-Des-21 (Rp)
		Penambahan	Pengurangan	
Konstruksi Dalam Pengerjaan	706.485.015.479,62	168.040.434.491,16	219.921.247.665,85	654.604.202.304,93
Jumlah	**706.485.015.479,62**	**168.040.434.491,16**	**219.921.247.665,85**	**654.604.202.304,93**

Rincian nilai konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2021 dan 2020 terdapat pada SKPD sebagai berikut:

SKPD	31-Des-20(Rp)	Mutasi (Rp)		31-Des-21(Rp)
		Penambahan	Pengurangan	
Dinas Pendidikan	19.407.827.757,70	427.862.208,62	88.599.650,00	19.747.090.316,32
Dinas Kesehatan	9.581.732.445,00	11.083.277.798,00	139.985.600,00	20.525.024.643,00
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	591.027.355.565,20	154.498.879.544,54	217.673.940.390,69	527.852.294.719,05
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	491.367.175,27	0,00	0,00	491.367.175,27
Dinas Sosial	372.450.000,00	424.071.520,00	69.798.520,00	726.723.000,00
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	0,00	19.382.000,00	0,00	19.382.000,00
Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura	484.917.000,00	0,00	484.917.000,00	0,00
Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	909.691.765,00	519.127.595,00	0,00	1.428.819.360,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	89.023.000,00	0,00	0,00	89.023.000,00
Dinas Perhubungan	3.862.736.000,00	0,00	555.566.500,00	3.307.169.500,00
Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	198.154.028,00	0,00	198.154.028,00	0,00
Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	2.099.566.600,00	0,00	287.890.000,00	1.811.676.600,00
Dinas Kebudayaan	2.117.335.300,00	100.000.000,00	0,00	2.217.335.300,00
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	659.601.100,00	0,00	0,00	659.601.100,00
Dinas Kelautan Dan Perikanan	2.362.426.100,00	0,00	0,00	2.362.426.100,00
Dinas Pariwisata	264.889.696,32	0,00	0,00	264.889.696,32
Dinas Perkebunan	62.632.630.266,00	0,00	0,00	62.632.630.266,00
Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	245.150.350,00	0,00	0,00	245.150.350,00
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	241.375.000,00	0,00	0,00	241.375.000,00
Sekretariat Daerah	1.062.637.309,99	0,00	0,00	1.062.637.309,99
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	87.840.969,00	728.911.700,00	0,00	816.752.669,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	1.243.559.800,00	0,00	0,00	1.243.559.800,00
Badan Pendapatan Daerah	5.465.485.262,54	153.036.125,00	372.549.977,16	5.245.971.410,38
Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	0,00	49.846.000,00	0,00	49.846.000,00
Badan Kepegawaian Daerah	17.344.250,00	0,00	0,00	17.344.250,00
Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia	1.432.072.739,60	0,00	0,00	1.432.072.739,60
Badan Penghubung	78.000.000,00	0,00	0,00	78.000.000,00
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	0,00	36.040.000,00	0,00	36.040.000,00
PPKD	49.846.000,00	0,00	49.846.000,00	0,00
Jumlah	**706.485.015.479,62**	**168.040.434.491,16**	**219.921.247.665,85**	**654.604.202.304,93**

Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dilihat pada **Lampiran13**.

5.5.29 Aset Tetap - Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas manfaat suatu Aset Tetap selain Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan. Pemerintah Provinsi Riau mulai melakukan Penyusutan Aset Tetap pada Tahun 2015. Peraturan Gubernur Riau Nomor 104 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Riau Berbasis Akrual. Perhitungan penyusutan Aset Tetap Pemerintah Provinsi Riau menggunakan metode garis lurus untuk semua jenis Aset Tetap yang disusutkan dengan cara membagi nilai Aset Tetap yang dapat disusut dengan masa manfaat Aset Tetap yang bersangkutan.

Nilai akumulasi penyusutan Tahun 2021 dihitung terhadap harga perolehan secara semesteran yaitu jika Aset Tetap diperoleh antara bulan Januari sampai dengan Juni maka aset tersebut disusutkan satu tahun penuh. Sedangkan, jika Aset Tetap diperoleh antara bulan Juli sampai dengan Desember maka aset tersebut disusutkan untuk setengah tahun, sehingga akumulasi penyusutan Aset Tetap Pemerintah Provinsi Riau per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar (Rp13.918.749.101.682,60) dan (Rp12.378.696.133.979,80). Nilai akumulasi penyusutan mengalami peningkatan sebesar minus (Rp1.540.052.967.702,78) atau 12,44% dari tahun 2020.

Rincian penambahan dan pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian		Saldo
Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2020		(12.378.696.133.979,80)
Penambahan selama Tahun 2021:		
- Reklas Antar Aset Tetap/Reklas Antar Aset Lainnya	(10.521.862.950.540,40)	
- Reklas Dari Aset Lainnya Ke Aset Tetap	(704.506.629,00)	
- Mutasi Antar Opd	(156.570.425.379,81)	
- Beban Penyusutan Tahun Berjalan	(1.210.583.812.497,96)	
- Aset Dan Akumulasi Penyusutan Baru Dicatat	(7.717.531.807,92)	
- Koreksi Akumulasi Penyusutan	(1.239.459.429.909,47)	
Jumlah Penambahan		(13.136.898.656.764,50)
Pengurangan selama Tahun 2021 :		
- Hibah Dan Bantuan Sosial	(19.902.544.910,66)	
- Dimusnahkan/Musnah	(3.242.729.451,90)	
- Reklas Ke Aset Ekstrakomptable	(45.612.274.287,43)	

Uraian		Saldo
- Reklas Dari Aset Tetap Ke Aset Lainnya	(42.948.358.318,29)	
- Reklas Antar Aset Tetap/Reklas Antar Aset Lainnya	(10.521.861.145.140,40)	
- Mutasi Antar Opd	(156.570.425.379,81)	
- Koreksi Double Catat Tahun Sebelumnya	(28.601.043.610,29)	
- Koreksi Akumulasi Akibat Reklas Aset Tetap	(778.107.167.962,99)	
Jumlah Pengurangan		(11.596.845.689.061,70)
Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2021		**(13.918.749.101.682,60)**

Jenis-jenis akumulasi penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 2020:

Uraian	31-Des-20 (Rp)	Mutasi (Rp)		31-Des-21 (Rp)
		Penambahan	Pengurangan	
Akumulasi Penyusutan Alat Besar	(80.048.041.494,80)	(88.773.047.876,60)	(76.678.633.230,61)	(92.142.456.140,79)
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	(446.540.544.508,45)	(518.013.811.537,64)	(505.614.519.565,09)	(458.939.836.481,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	(61.790.737.154,60)	(58.625.363.389,97)	(52.528.479.755,76)	(67.887.620.788,81)
Akumulasi Penyusutan Alat Pertanian	(85.301.040.169,97)	(88.367.184.617,86)	(94.764.895.756,94)	(78.903.329.030,89)
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	(728.668.948.976,11)	(417.889.273.376,94)	(408.660.982.362,05)	(737.897.239.991,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	(107.326.618.921,35)	(99.306.763.275,66)	(96.515.522.162,82)	(110.117.860.034,19)
Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	(542.097.199.909,57)	(454.276.386.770,31)	(476.006.008.585,88)	(520.367.578.094,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium	(195.199.743.896,65)	(170.756.959.592,66)	(196.740.796.514,27)	(169.215.906.975,04)
Akumulasi Penyusutan Alat Persenjataan	(18.687.736.937,54)	(5.497.557.997,03)	(7.981.366.249,71)	(16.203.928.684,86)
Akumulasi Penyusutan Komputer	(348.512.674.056,20)	(430.139.274.694,58)	(340.381.665.317,15)	(438.270.283.433,63)
Akumulasi Penyusutan Alat Eksplorasi	-	(55.981.354,98)	(415.122,57)	(55.566.232,41)
Akumulasi Penyusutan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	-	(42.297.343,53)	(89.333,33)	(42.208.010,20)
Akumulasi Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	(201.144.054,02)	(3.748.271.466,26)	(250.908.620,26)	(3.698.506.900,02)
Akumulasi Penyusutan Alat Peraga	-	(270.916.840,00)	(1.794.000,00)	(269.122.840,00)
Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi	-	(1.788.500,00)	(1.788.500,00)	-
Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu	-	(20.221.201.071,63)	(107.142,86)	(20.221.093.928,77)
Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga	-	(106.127.561.666,40)	(308.990.583,82)	(105.818.571.082,58)

Uraian	31-Des-20 (Rp)	Mutasi (Rp)		31-Des-21 (Rp)
		Penambahan	Pengurangan	
Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(1.678.275.882.342,96)	(1.178.985.987.001,53)	(1.088.028.611.966,73)	(1.769.233.257.377,76)
Akumulasi Penyusutan Monumen	-	(4.221.406.109,71)	(144.421.988,15)	(4.076.984.121,56)
Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara	(2.682.677.906,74)	(1.310.832.020,31)	(1.776.132.001,72)	(2.217.377.925,33)
Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas	(4.454.072.672,36)	(9.998.407.066,67)	(2.857.034.124,95)	(11.595.445.614,08)
Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(6.384.365.632.098,84)	(7.594.399.178.065,63)	(6.501.726.928.918,35)	(7.477.037.881.246,12)
Akumulasi Penyusutan Bangunan Air	(118.407.886.929,34)	(160.038.508.161,29)	(118.623.751.737,34)	(159.822.643.353,29)
Akumulasi Penyusutan Instalasi	(38.640.580.756,59)	(37.161.756.406,43)	(26.979.791.056,41)	(48.822.546.106,61)
Akumulasi Penyusutan Jaringan	(87.615.598.289,05)	(159.677.554.574,57)	(151.952.603.574,80)	(95.340.549.288,82)
Akumulasi Penyusutan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	(1.449.879.372.904,68)	(5.227.241.755,95)	(1.443.457.580.073,50)	(11.649.034.587,13)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi	-	(1.523.764.144.230,37)	(4.861.870.816,66)	(1.518.902.273.413,71)
Jumlah	**(12.378.696.133.979,80)**	**(13.136.898.656.764,50)**	**(11.596.845.689.061,70)**	**(13.918.749.101.682,60)**

Rincian nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 2020 terdapat pada SKPD sebagai berikut:

SKPD	31-Des-20(Rp)	Mutasi (Rp)		31-Des-21(Rp)
		Penambahan	Pengurangan	
Dinas Pendidikan	(882.881.864.113,99)	(1.009.512.164.738,88)	(830.383.758.000,70)	(1.062.010.270.852,17)
Dinas Kesehatan	(1.149.828.957.011,31)	(711.614.160.830,78)	(589.391.685.979,05)	(1.272.051.431.863,04)
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	(7.947.406.382.812,46)	(9.102.781.069.172,28)	(7.843.831.849.938,64)	(9.206.355.602.046,10)
Satuan Polisi Pamong Praja	(20.673.156.605,03)	(13.675.271.380,54)	(12.575.911.610,20)	(21.772.516.375,37)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(74.412.431.767,02)	(64.518.579.482,45)	(66.228.714.006,64)	(72.702.297.242,83)
Dinas Sosial	(26.754.946.396,62)	(22.705.646.796,49)	(21.427.866.849,64)	(28.032.726.343,47)
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	(67.577.096.293,35)	(41.807.220.099,83)	(63.106.907.534,46)	(46.277.408.858,72)
Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	(6.187.762.649,95)	(4.968.015.064,51)	(4.667.756.203,46)	(6.488.021.511,00)
Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura	(77.623.913.996,20)	(65.758.184.924,69)	(77.230.179.406,62)	(66.151.919.514,27)

SKPD	31-Des-20(Rp)	Mutasi (Rp)		31-Des-21(Rp)
		Penambahan	Pengurangan	
Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	(79.891.600.282,47)	(65.153.259.195,47)	(62.512.629.730,63)	(82.532.229.747,31)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	(11.153.795.525,47)	(9.529.296.075,00)	(8.888.346.818,93)	(11.794.744.781,54)
Dinas Perhubungan	(141.302.096.417,27)	(203.957.590.273,94)	(244.763.079.685,88)	(100.496.607.005,33)
Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	(38.379.105.918,58)	(34.449.309.267,57)	(36.242.023.589,91)	(36.586.391.596,24)
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(8.174.388.168,43)	(5.968.524.747,95)	(7.782.505.400,59)	(6.360.407.515,79)
Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	(516.141.272.311,25)	(542.274.359.612,83)	(504.921.861.701,99)	(553.493.770.222,09)
Dinas Kebudayaan	(23.732.022.602,56)	(23.968.043.318,19)	(21.334.787.846,31)	(26.365.278.074,44)
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	(60.414.435.921,06)	(60.176.446.650,85)	(56.996.806.449,29)	(63.594.076.122,62)
Dinas Kelautan Dan Perikanan	(100.064.572.649,13)	(94.849.283.221,79)	(91.150.647.330,60)	(103.763.208.540,32)
Dinas Pariwisata	(55.127.433.667,17)	(43.334.735.072,61)	(44.657.301.092,95)	(53.804.867.646,83)
Dinas Perkebunan	(10.248.682.832,99)	(9.624.105.195,13)	(8.676.305.927,13)	(11.196.482.100,99)
Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	(41.464.321.365,07)	(41.657.731.199,80)	(41.188.530.534,22)	(41.933.522.030,65)
Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	(29.264.632.303,75)	(23.456.365.454,09)	(17.912.097.693,32)	(34.808.900.064,52)
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	(35.546.813.315,98)	(31.531.032.706,21)	(29.196.415.627,28)	(37.881.430.394,91)
Sekretariat Daerah	(517.278.830.974,67)	(377.641.033.390,06)	(387.337.581.444,03)	(507.582.282.920,70)
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	(90.279.166.277,93)	(66.857.982.720,02)	(63.376.072.270,39)	(93.761.076.727,56)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	(42.337.462.648,52)	(25.830.037.182,51)	(26.804.599.484,83)	(41.362.900.346,20)
Badan Pendapatan Daerah	(81.424.908.649,89)	(54.742.750.370,32)	(49.904.341.288,09)	(86.263.317.732,12)
Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	(15.445.500.710,19)	(311.215.043.234,62)	(170.242.627.151,37)	(156.417.916.793,44)
Badan Kepegawaian Daerah	(21.684.152.225,36)	(16.778.277.139,90)	(15.969.749.980,25)	(22.492.679.385,01)
Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia	(17.391.568.315,65)	(16.921.105.418,80)	(15.376.079.795,13)	(18.936.593.939,32)
Badan Penghubung	(23.119.469.378,42)	(25.019.308.231,64)	(23.119.469.378,42)	(25.019.308.231,64)
Inspektorat	(10.610.288.366,59)	(7.941.696.902,79)	(7.500.981.262,09)	(11.051.004.007,29)
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	(10.148.705.313,72)	(6.681.027.691,98)	(7.421.821.856,92)	(9.407.911.148,78)
PPKD	(144.724.396.191,77)	-	(144.724.396.191,77)	-
Jumlah	**(12.378.696.133.979,80)**	**(13.136.898.656.764,50)**	**(11.596.845.689.061,70)**	**(13.918.749.101.682,60)**

5.5.30 Aset Lainnya - Tagihan Jangka Panjang

Jumlah Aset Lainnya Tagihan Jangka Panjang per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp9.368.264.906,49. Dapat dirincikan sebagai berikut:

PERANGKAT DAERAH BARU	31-Des-20 (Rp)	Mutasi (Rp)		31-Des-21 (Rp)
		Penambahan	Pengurangan	
Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	2.991.473.775,49	0,00	0,00	2.991.473.775,49
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	5.996.721.096,00	0,00	0,00	5.996.721.096,00
Dinas Perkebunan	230.725.035,00	0,00	0,00	230.725.035,00
Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	149.345.000,00	0,00	0,00	149.345.000,00
JUMLAH TAGIHAN JANGKA PANJANG	**9.368.264.906,49**	**0,00**	**0,00**	**9.368.264.906,49**

5.5.31 Aset Lainnya - Tagihan Jangka Panjang- Tagihan Penjualan Angsuran

Jumlah Aset lainnya Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp2.991.473.775,49. Nilai Tagihan Penjualan Angsuran atas Kendaraan Bermotor kepada pegawai, rumah dinas dan tanah kavling merupakan nilai jual aset tersebut (sesuai dengan SK Gubernur) setelah dikurangi Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (**Catatan 5.5.23**).

Perbandingan Jumlah Aset lainnya Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebagai berikut :

ASET LAINNYA -Tagihan Penjualan Angsuran	31-Des-20	31-Des-21
Tagihan Angsuran Penjualan Rumah Dinas Daerah Golongan III	1.346.249.785,00	1.346.249.785,00
Tagihan Angsuran Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas	1.013.783.990,49	1.013.783.990,49
Tagihan Angsuran Penjualan Tanah	631.440.000,00	631.440.000,00
JUMLAH	**2.991.473.775,49**	**2.991.473.775,49**

5.5.32 Aset Lainnya - Tagihan Jangka Panjang - Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Jumlah Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp6.376.791.131,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	31-Des-20	Mutasi (Rp)		31-Des-21
	(Rp)	Penambahan	Pengurangan	(Rp)
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara	474.256.100,00	0,00	0,00	474.256.100,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara	5.902.535.031,00	0,00	0,00	5.902.535.031,00
Jumlah	**6.376.791.131,00**	**0,00**	**0,00**	**6.376.791.131,00**

Dapat dirinci sebagai berikut :

Nama Pegawai	Nilai Pembebanan (Rp)	Pembayaran s.d. 2020 (Rp)	Pembayaran 2021(Rp)	31-Des-21 (Rp)	31-Des-20 (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.Tuntutan ganti kerugian daerah terhadap bendahara					
Mustafa Ismail/ (Mutasi dari Dinas Perkebunan ke Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan SP2D beredar *(outstanding)* per 31 Desember 2020 sebesar Rp 35.054.982.800,40 terdiri dari Rp35.054.982.793,90 (SP2D netto) serta kurang posting PPN SP2D No.2115/SP2D/LS/II/31 Desember 2020 sebesar Rp0,50 dan kurang posting PPh 4(2) No.12115/SP2D/LS/II/31 Desember 2020 sebesar Rp6,00 diakui sebagai belanja pada Tahun Anggaran 31 Desember 2020)/ Sisa UP TA 2008	230.725.035,00	0,00	0,00	230.725.035,00	230.725.035,00
Sekretariat DPRD/M.Nasir/Potongan Pajak TA 2010	111.494.428,00	50.013.973,00	0,00	61.480.455,00	61.480.455,00
Sekretariat DPRD/M.Nasir/Sisa UP 2010	529.123.610,00	347.073.000,00	0,00	182.050.610,00	182.050.610,00
Total (1)	**871.343.073,00**	**397.086.973,00**	**0,00**	**474.256.100,00**	**474.256.100,00**

Nama Pegawai	Nilai Pembebanan (Rp)	Pembayaran s.d. 2020 (Rp)	Pembayaran 2021(Rp)	31-Des-21 (Rp)	31-Des-20 (Rp)
1	2	3	4	5	6
2. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara					
Drs. H. Ruskin Har (Mantan Sekretaris DPRD Provinsi Riau)	1.936.650.000,00	700.000.000,00	0,00	1.236.650.000,00	1.236.650.000,00
H.M. Nazief Soesila Dharma (Mantan Sekretaris DPRD Provinsi Riau)	4.634.650.467,00	0,00	0,00	4.441.540.031,00	4.441.540.031,00
Ir. Marjuki Husein (Kepala Dinas Peternakan Provinsi Riau	149.345.000,00	0,00	0,00	149.345.000,00	149.345.000,00
Sekretariat DPRD/T.Rusli Ahmad/Sisa UP 2010	200.000.000,00	0,00	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00
Total (2)	**6.920.645.467,00**	**700.000.000,00**	**0,00**	**5.902.535.031,00**	**5.902.535.031,00**
Jumlah (1+2)	**7.791.988.540,00**	**1.097.086.973,00**	**0,00**	**6.376.791.131,00**	**6.376.791.131,00**

Rincian TGR per 30 Desember 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Mustafa Ismail (Dinas Perkebunan) Sisa UP Tahun 2008 telah diterbitkan SKTJM tanggal 07 Juni 2013 dengan jaminan Surat Keterangan pemilikan Akta Jual Beli Tanah No. 781/SH/1987 seluas 500 m^2 a.n. Mustafa Ismail, BPKB Mobil Honda Civic Tahun 1986 dan Sepeda Motor Yamaha Jupiter Tahun 2010 dan Surat Kuasa Menjual jaminan tersebut. Nilai pembebanan sebesar Rp230.725.035,00 dengan jangka waktu 24 bulan, jatuh tempo tanggal 6 Juni 2015 dan angsuran perbulan sebesar Rp9.613.543,13.

2) M. Nasir (Sekretariat DPRD) Potongan Pajak Tahun 2010 telah diterbitkan SKTJM tanggal 07 Juni 2013 Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Tanah No 41/SKRPPT/ST/2002 seluas 2.000 m^2 a.n. M. Nasir; BPKB Sepeda Motor Suzuki Tahun 2008; dan Surat Kuasa Menjual jaminan tersebut. Nilai pembebanan sebesar Rp111.494.428,00 dengan jangka waktu 24 bulan, dan jatuh tempo tanggal 6 Juni 2015 dengan angsuran perbulan sebesar Rp4.645.601,17.

3) M. Nasir (Sekretariat DPRD) Sisa UP 2010 telah diterbitkan SKTJM tanggal 07 Juni 2013 Sertifikat No. 05.01.07.04.1.01445 tanah seluas 1.672 m^2 a.n. H. M. Yahya Lubis, Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah No.

697/595.3/SKGR/KR/XI/2005 seluas 800 m^2 an. Endang Tri Aidayanti, Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah No 963/BR/2002 seluas 7500 m^2 a.n. Eliwirda, dan Surat Kuasa Menjual Jaminan tersebut. Dari SKTJM tersebut, telah disetor sebesar Rp15.000.000,00 a.n. Hotman E. Manurung tanggal 14 Juni 2013. Nilai pembebanan sebesar Rp529.123.610,00, dengan jangka waktu 24 bulan, dan jatuh tempo tanggal 6 Juni 2015, angsuran perbulan sebesar Rp16.088.483,75.

4) Drs. H. Ruskin Har (Mantan Sekretaris DPRD Provinsi Riau) dengan Surat Keterangan Tanggungjawab Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal 17 November 2009, dan Berita acara penyerahan jaminan dan surat kuasa menjual tanggal 17 November 2009 Jaminan SKGR 0746 luas 11.704 m^2 a.n Nolya Rollyda dan SKGR 0698 luas 2.376m^2 a.n. Rosyadi Lokasi Jalan Melati I kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan dengan nilai pembebanan sebesar Rp1.936.650.000,00 jangka waktu 24 bulan. Jatuh Tempo tanggal 17 November 2011sebesar Rp1.936.650.000,00, jaminan belum dilelang.

5) H.M. Nazief Soesila Dharma (Mantan Sekretaris DPRD Provinsi Riau) dengan Surat Penetapan Pembebanan Penggantian sementara SK Gubernur Riau Nomor: Kpts/711/VI/2011 tanggal 6 Juni 2011 dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Ganti Rugi Mei 2011, dan SKTJM tanggal 30 Desember 2011 serta Jaminan sertifikat tanah Nomor 05.06.06.08.1.0083 a.n. Korolus, sporadik tanah Nomor 03/593/2011 a.n. M. Nazief Soesila Darma dengan luas 1.037 m^2, telah dilakukan penilaian sebesar Rp288.545.250,00 dan sertifikat tanah Nomor 05.06.08.01.0081 a.n. Suhardi Ciknang, serta surat kuasa untuk menjual. Nilai pembebanan sebesar Rp4.634.650.467,00 jangka waktu 24 bulan, sudah setor sebesar Rp193.110.436,00 (Tahun 2011 sebesar Rp35.000.000,00 dan Tahun 2012 sebesar Rp178.110.436,00). Jatuh tempo tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp4.441.540.031,00, jaminan belum dilelang.

6) Ir. Marjuki Husein (Kepala Dinas Peternakan Provinsi Riau) dengan Surat Pernyataan tanggal 23 April 2007, SKTJM tanggal 7 Juni 2013 dan Jaminan Surat Keterangan Pemilik Tanah Nomor 593 SK/114/1986 tanggal 21 September 1986 berlokasi RT VI Sukamenanti, Desa Simpangbaru, Kecamatan Kampar dengan

luas 10.000 m^2. Nilai pembebanan sebesar Rp149.345.000,00 jangka waktu 24 bulan, dan jatuh tempo tanggal 06 Juni 2015, dengan angsuran perbulan sebesar Rp6.222.708,33.

7) T. Rusli Ahmad (Sekretariat DPRD) Sisa UP 2010 telah diterbitkan SKTJM tanggal 07 Juni 2013, Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah No. 110586, Register No 75.2/Pem.KR/432 seluas 2014,5 m^2 a.n. T. Rusli Ahmad , Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah No. 121945, Register No. 595.3/KR.PEM/52. Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah No. 121303, Register No. 595.3/KR-PEM/868 seluas 607,5 m^2 an. T. Rusli Ahmad dan Surat Kuasa Menjual Jaminan tersebut. Nilai pembebanan sebesar Rp200.000.000,00 dengan jangka waktu 24 bulan, dan jatuh tempo tanggal 6 Juni 2015, angsuran perbulan sebesar Rp8.333.333,33.

5.5.33 Aset Lainnya - Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Jumlah kemitraan Dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp170.538.813.105,06 dengan rincian sebagai berikut:

Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Pemanfaatan	31-Des-20	Mutasi (Rp)		31-Des-21
	(Rp)	Penambahan	Pengurangan	(Rp)
Gedung Eks LPJK	0,00	4.993.313.102,06	0,00	4.993.313.102,06
Gedung Pusat Promosi se-Sumatera	41.795.500.003,00	0,00	0,00	41.795.500.003,00
Bangun Guna Serah (BGS) Bandar Serai Riau *Town Square And Convention Centre* (RITOS)	123.750.000.000,00	0,00	0,00	123.750.000.000,00
JUMLAH	**165.545.500.003,00**	**4.993.313.102,06**	**0,00**	**170.538.813.105,06**

Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Kemitraan dengan PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Riau sebesar Rp4.993.313.102,06

Kemitraan dengan PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Riau dalam bentuk Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa Gedung Eks LPJK di jalan Sumatera No. 25 Pekanbaru.

Kemitraan Dengan Pihak Ketiga (Perjanjian Sewa) dengan PT. JAMKRIDA RIAU Nomor : 977/PUPRPKPP-SEKRE/574 tanggal 02 Maret 2022.

2) Kemitraan dengan Badan Pengusahaan dan Pengembangan Gedung Pusat se-Sumatera Batam Sebesar Rp41.795.500.003,00

Kemitraan dengan Badan Pengusahaan dan Pengembangan Gedung Pusat se-Sumatera Batam dalam bentuk Pemanfaatan Gedung Pusat Promosi se-Sumatera di Batam oleh PT Sembilan Satu-satu.

Badan Pengusahaan dan Pengembangan Gedung Pusat se-Sumatera di Batam dibentuk berdasarkan Kesepakan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Riau, Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Barang dan Pemerintah Kota Batam Tentang Pengaturan Pengelola Gedung Pusat Promosi se-Sumatera di Batam Nomor 18/SKB/VII/2005, 10/PERJ/KA/VI/2005 dan 13/MOU/HK/VI/2005 tanggal 20 Juni 2005 dan Surat Keputusan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Riau, Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Barang dan Pemerintah Kota Batam Tentang Pembentukan Badan Pengusahaan dan Pengembangan Gedung Pusat Promosi se-Sumatera Nomor 19/SKB/VII /2005, 11/PERJ/KA/2005 dan Kpts/118/SKB/HK/VI/2005 tanggal 20 Juni 2005. Gedung Pusat Promosi se-Sumatera di Batam yang berdiri diatas lahan seluas 20.000 m^2. Persentase kepemilikan Provinsi Riau 52,81% atau sebesar Rp41.795.500.003,00, Otorita Batam 40,87% dan Pemerintah Kota Batam 6,32%.

Badan Pengusahaan dan Pengembangan Gedung Pusat se-Sumatera di Batam melakukan perikatan dengan PT Sembilan Satu-satu dengan Akta Notaris PPAT Gerard Ikhsan Iskandar, SH. Nomor 21 tanggal 9 Maret 2007 untuk Pemanfaatan Gedung Pusat Promosi se Sumatera di Batam sampai dengan tanggal 8 Maret 2022. PT Sembilan Satu-satu akan melakukan investasi aset Sebesar Rp23.978.392.000,00 yang akan diserahkan pada akhir kerjasama. PT Sembilan

Satu-satu berkewajiban membayar biaya konsesi sebesar Rp2.000.000.000,00 satu kali selama perjanjian berlangsung dan jaminan pemeliharaan dan operasional sebesar Rp1.800.000.000,00. Setiap akhir tahun memberikan royalti sebesar 20% dari *gross revenue*, jika tidak tercapai 20% dikenakan denda 3 % dari selisih antara royalti dengan *business plan.*

3) Kemitraan dengan PT Bangun Megah Mandiri Propertindo (PT BMMP) sebesar Rp123.750.000.000,00

Kemitraan dengan PT BMMP dalam bentuk kerjasama Bangun Guna Serah (BGS) Bandar Serai Riau *Town Square And Convention Centre* (RITOS) Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru berdasarkan Perjanjian Nomor 146/PK/XII/2011 dan Nomor 009/PK/BMMP-DIR/XII/2011 tanggal 19 Desember 2011 di atas tanah milik Pemerintah Provinsi Riau Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru seluas 35.000 m^2.

Pada Tahun 2012, perjanjian tersebut di *addendum* dengan Nomor 146/PK/XII/2011 dan 009/PK/BMMP-DIR/XII/2011 tanggal 20 Juli 2012, dengan perubahan luas lahan yang di BGS menjadi seluas 55.000 m^2 (sertifikat Nomor 6 Tahun 1990 seluas 38.876 m^2 dari 100.000 m^2, sertifikat Nomor 9 Tahun 1992 seluas 2.376 m^2 dari 30.055 m^2 dan sertifikat No 10 Tahun 1992 seluas 13.375 m^2 dari 19.945 m^2) senilai Rp123.750.000.000,00. Dalam *addendum* tersebut juga disepakati perubahan jangka waktu dari 50 tahun menjadi 30 tahun yang berakhir pada tanggal 19 Desember 2041, kontribusi kepada Pemerintah Provinsi Riau dan nilai investasi PT BMMP.

Kontribusi tetap setiap tahun sejak pekerjaan konstruksi (tiga tahun pertama) sebesar 153.615.000,00 (10% dari nilai kontribusi). Kontribusi setap dimulai tahun keempat yang dibayar paling lambat tanggal 15 Januari sebesar Rp1.536.150.000,00 (1,5% x Rp1.862.000,00 x 55.000 m^2). Untuk tahun kelima dan tahun berikutnya sampai dengan berakhirnya perjanjian, jumlah kontribusi diberikan kenaikan sebesar 2% dari jumlah kontribusi tahun sebelumnya. Selain itu PT BMMP berkewajiban memberikan kontribusi lainnya yakni pembagian

pendapatan sewa ruang Bangun Guna Serah setiap tahunnya dengan perhitungan 0,25 x (luas ruang produktif x sewa bruto/m^2) yang dibayarkan terhitung satu tahun sejak selesai pembangunan.

Pembangunan RITOS tersebut terdiri dari *Sport Centre*, *Mall*, Hotel, *Serviced Apartment, and Convention Centre* serta penataan taman dan pembangunan kembali seluruh anjungan senilai Rp1.531.000.000.000,00 yang akan diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Riau pada akhir kerjasama dalam keadaan baik dan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan.

5.5.34 Aset Lainnya – Aset Tidak Berwujud

Nilai Perolehan Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2021 dan Per 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp77.413.890.609,61 dan Rp76.008.995.462,61 . Nilai Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2021 mengalami peningkatan. Jenis-jenis Aset Tidak Berwujud per 30 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 terdapat pada perangkat daerah sebagai berikut :

ASET TIDAK BERWUJUD	31-Des-20	Mutasi (Rp)		31-Des-21
	(Rp)	Penambahan	Pengurangan	(Rp)
Lisensi dan frenchise	11.877.234.592,74	9.396.462.000,00	9.227.762.000,00	12.045.934.592,74
Hak Cipta	2.988.261.324,68	0,00	0,00	2.988.261.324,68
Software	46.771.882.073,85	2.144.967.331,99	1.446.323.484,99	47.470.525.920,85
Kajian	9.737.897.900,00	572.551.300,00	35.000.000,00	10.275.449.200,00
Aset Tidak Berwujud Lainnya	4.633.719.571,34	0,00	0,00	4.633.719.571,34
JUMLAH	**76.008.995.462,61**	**12.113.980.631,99**	**10.709.085.484,99**	**77.413.890.609,61**

Rincian penambahan dan pengurangan aset tidak berwujud dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian		Saldo (Rp)
-Saldo Aset Tidak Berwujud 31 Desember 2020		76.008.995.462,61
-Penambahan selama Tahun 2021:		
-Belanja Modal Tahun 2021	168.529.585,00	
-Kapitalisasi Barang & Jasa	637.431.300,00	

Uraian		Saldo (Rp)
-Reklas dari Aset Tetap Lainnya	644.814.181,00	
-Mutasi antar OPD	208.638.989,00	
-Hibah Masuk	20.300.000,00	
-Jumlah Penambahan		1.679.714.055,00
-Pengurangan selama Tahun 2021 :		
- Reklas ke Aset Tetap	66.179.919,00	
- Mutasi Antar OPD	208.638.989,00	
-Jumlah Pengurangan		274.818.908,00
Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2021		**77.413.890.609,61**

Rincian Aset Tidak Berwujud – Lisensi per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 terdapat pada OPD sebagai berikut:

SKPD	31-Des-20 (Rp)	Mutasi (Rp)		31-Des-21 (Rp)
		Penambahan	Pengurangan	
Dinas Kesehatan	0,00	9.354.662.000,00	0,00	9.354.662.000,00
Rumah Sakit Umum Arifin Ahmad	9.227.762.000,00	0,00	9.227.762.000,00	0,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	0,00	41.800.000,00	0,00	41.800.000,00
Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	2.159.706.414,00	0,00	0,00	2.159.706.414,00
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	390.359.621,36	0,00	0,00	390.359.621,36
Sekretariat Daerah	99.406.557,38	0,00	0,00	99.406.557,38
Jumlah	**11.877.234.592,74**	**9.396.462.000,00**	**9.227.762.000,00**	**12.045.934.592,74**

Rincian Aset Tidak Berwujud – Hak Cipta per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 terdapat pada OPD sebagai berikut:

SKPD	31-Des-20 (Rp)	Mutasi (Rp)		31-Des-21 (Rp)
		Penambahan	Pengurangan	
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	2.938.461.324,68	0,00	0,00	2.938.461.324,68
Dinas Kelautan Dan Perikanan	49.800.000,00	0,00	0,00	49.800.000,00
Jumlah	**2.988.261.324,68**	**0,00**	**0,00**	**2.988.261.324,68**

Rincian Aset Tidak Berwujud - Software per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 terdapat pada OPD sebagai berikut :

SKPD	31-Des-20 (Rp)	Mutasi (Rp)		31-Des-21 (Rp)
		Penambahan	Pengurangan	
Dinas Pendidikan	23.832.999.148,53	20.300.000,00	0,00	23.853.299.148,53
Dinas Kesehatan	531.027.166,81	1.689.418.757,99	0,00	2.220.445.924,80
Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad	575.926.042,38	0,00	575.926.042,38	0,00
Rumah Sakit Jiwa Tampan	354.734.312,61	0,00	354.734.312,61	0,00
Rumah Sakit Petala Bumi	240.844.222,00	0,00	240.844.222,00	0,00
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	1.928.941.644,12	0,00	0,00	1.928.941.644,12
Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	1.779.318.768,00	0,00	0,00	1.779.318.768,00
Dinas Perhubungan	98.950.000,00	99.550.000,00	0,00	198.500.000,00
Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	2.083.527.858,00	0,00	66.179.919,00	2.017.347.939,00
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	712.973.866,00	0,00	0,00	712.973.866,00
Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	497.578.215,45	0,00	0,00	497.578.215,45
Dinas Kebudayaan	73.700.000,00	99.880.000,00	0,00	173.580.000,00
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	2.387.471.004,64	0,00	0,00	2.387.471.004,64
Dinas Kelautan Dan Perikanan	171.000.000,00	0,00	0,00	171.000.000,00
Dinas Pariwisata	799.894.079,85	0,00	0,00	799.894.079,85
Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura	591.029.211,00	0,00	0,00	591.029.211,00
Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	50.334.900,00	0,00	0,00	50.334.900,00
Dinas Perkebunan	1.125.492.743,00	0,00	0,00	1.125.492.743,00
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	167.752.000,00	0,00	0,00	167.752.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	1.756.924.369,77	0,00	0,00	1.756.924.369,77
PPKD	188.338.989,00	0,00	188.338.989,00	0,00
Badan Pendapatan Daerah	4.026.235.138,33	24.750.000,00	0,00	4.050.985.138,33
Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	380.443.840,00	211.068.574,00	20.300.000,00	571.212.414,00
Badan Kepegawaian Daerah	235.694.302,64	0,00	0,00	235.694.302,64
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	795.400.000,00	0,00	0,00	795.400.000,00

SKPD	31-Des-20 (Rp)	Mutasi (Rp)		31-Des-21 (Rp)
		Penambahan	Pengurangan	
Sekretariat Daerah	1.290.825.251,72	0,00	0,00	1.290.825.251,72
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	94.525.000,00	0,00	0,00	94.525.000,00
Jumlah	**46.771.882.073,85**	**2.144.967.331,99**	**1.446.323.484,99**	**47.470.525.920,85**

Rincian Aset Tidak Berwujud – Kajian per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 terdapat pada OPD sebagai berikut :

SKPD	31-Des-20 (Rp)	Mutasi (Rp)		31-Des-21 (Rp)
		Penambahan	Pengurangan	
Dinas Kesehatan	0,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00
Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00
Dinas Energi dan sumber Daya Mineral	6.029.806.000,00	0,00	0,00	6.029.806.000,00
Dinas Perhubungan	2.659.841.900,00	537.551.300,00	0,00	3.197.393.200,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.013.250.000,00	0,00	0,00	1.013.250.000,00
Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	**9.737.897.900,00**	**572.551.300,00**	**35.000.000,00**	**10.275.449.200,00**

Rincian Aset Tidak Berwujud – Aset Tidak Berwujud Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 terdapat pada OPD sebagai berikut :

SKPD	31-Des-20 (Rp)	Mutasi (Rp)		31-Des-21 (Rp)
		Penambahan	Pengurangan	
Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura	1.538.872.944,34	0,00	0,00	1.538.872.944,34
Dinas Energi dan sumber Daya Mineral	2.816.486.627,00	0,00	0,00	2.816.486.627,00
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	278.360.000,00	0,00	0,00	278.360.000,00
Jumlah	**4.633.719.571,34**	**0,00**	**0,00**	**4.633.719.571,34**

5.5.35 Aset Lainnya - Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Amortisasi merupakan penyesuaian nilai aset tak berwujud sehubungan dengan penurunan masa manfaat suatu aset sesuai dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 67 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Riau Berbasis Akrual. Amortisasi Aset Tak Berwujud diberlakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2016. Penerapan Amortisasi Aset Tak Berwujud di Pemerintah Provinsi Riau pertama kalinya dilakukan pada tahun 2016.

Jumlah Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 masing-masing sebesar (Rp52.865.465.330,73) dan (Rp47.085.003.431,49). Rincian pada perangkat daerah dengan rincian sebagai berikut:

PERANGKAT DAERAH	31 Des 20	Mutasi (Rp)		31 Des 21
		Penambahan	Pengurangan	
Dinas Pendidikan	(18.543.693.879,78)	(3.302.384.137,50)	0,00	(21.846.078.017,28)
Dinas Kesehatan	(403.286.372,36)	(9.381.496.203,80)	(1.415.417.620,85)	(8.369.364.955,31)
Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad	(5.809.431.004,88)	0,00	(5.809.431.004,88)	0,00
Rumah Sakit Jiwa Tampan	(354.734.312,61)	0,00	(354.734.312,61)	0,00
Rumah Sakit Petala Bumi	(173.794.331,00)	0,00	(173.794.331,00)	0,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	(1.373.640.617,87)	(374.710.410,50)	0,00	(1.748.351.028,37)
Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	(1.779.318.768,00)	0,00	0,00	(1.779.318.768,00)
Dinas Perhubungan	(86.587.500,00)	(24.806.250,00)	0,00	(111.393.750,00)
Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	(3.069.729.494,30)	(222.628.141,40)	(66.179.919,00)	(3.226.177.716,70)
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(694.723.740,99)	(12.166.750,00)	0,00	(706.890.490,99)
Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	(497.578.215,45)	0,00	0,00	(497.578.215,45)
Dinas Kebudayaan	(27.637.500,00)	(35.516.250,00)	0,00	(63.153.750,00)
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	(2.680.240.720,67)	(39.035.962,14)	0,00	(2.719.276.682,81)
Dinas Kelautan Dan Perikanan	(171.000.000,00)	0,00	0,00	(171.000.000,00)
Dinas Pariwisata	(799.894.079,85)	0,00	0,00	(799.894.079,85)
Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura	(396.574.836,00)	(67.181.250,00)	0,00	(463.756.086,00)

PERANGKAT DAERAH	31 Des 20	Mutasi (Rp)		31 Des 21
		Penambahan	Pengurangan	
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	(446.112.000,00)	0,00	0,00	(446.112.000,00)
Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	(50.334.900,00)	0,00	0,00	(50.334.900,00)
Dinas Perkebunan	(1.125.492.743,00)	0,00	0,00	(1.125.492.743,00)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	(1.735.093.119,77)	(21.831.250,00)	0,00	(1.756.924.369,77)
PPKD	(188.338.989,00)	0,00	(188.338.989,00)	0,00
Badan Pendapatan Daerah	(4.026.235.138,33)	(3.093.750,00)	0,00	(4.029.328.888,33)
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	(311.261.215,01)	(223.739.062,12)	0,00	(535.000.277,13)
Badan Kepegawaian Daerah	(235.694.302,64)	0,00	0,00	(235.694.302,64)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(709.650.000,00)	(24.500.000,00)	0,00	(734.150.000,00)
Sekretariat Daerah	(1.322.641.274,98)	(44.715.534,12)	0,00	(1.367.356.809,10)
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	(72.284.375,00)	(10.553.125,00)	0,00	(82.837.500,00)
TOTAL AKUMULASI AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD	**(47.085.003.431,49)**	**(13.788.358.076,58)**	**(8.007.896.177,34)**	**(52.865.465.330,73)**

5.5.36 Aset Lainnya - Aset Lain-Lain

Nilai perolehan Aset Lainnya - Aset Lain-lain tahun 2020 dan tahun 2021 sebesar Rp191.027.412.828,23 dan Rp241.448.893.286,04.

Rincian Aset Lain-Lain per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 per Organisasi Perangkat Daerah yakni sebagai berikut:

PERANGKAT DAERAH	31-Des-20 (Rp)	Mutasi (Rp)		31-Des-21 (Rp)
		Penambahan	Pengurangan	
Dinas Pendidikan	9.553.761.695,69	0,03	0,00	9.553.761.695,72
Dinas Kesehatan	0,00	42.862.302.576,03	0,00	42.862.302.576,03
Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad	36.749.394.913,48	0,00	36.749.394.913,48	0,00
Rumah Sakit Jiwa Tampan	4.234.138.190,65	0,00	4.234.138.190,65	0,00
Rumah Sakit Petala Bumi	1.386.223.766,70	0,00	1.386.223.766,70	0,00

PERANGKAT DAERAH	31-Des-20 (Rp)	Mutasi (Rp)		31-Des-21 (Rp)
		Penambahan	Pengurangan	
Satuan Polisi Pamong Praja	2.908.465.566,13	0,00	0,00	2.908.465.566,13
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	7.160.200.459,87	9.670.092.648,57	0,00	16.830.293.108,44
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	5.274.198.389,66	663.698.799,15	0,00	5.937.897.188,81
Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	369.902.500,00	0,00	0,00	369.902.500,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Ketahanan Pangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	5.649.955.221,30	0,00	0,00	5.649.955.221,30
Dinas Perhubungan	11.968.458.240,00	0,00	0,00	11.968.458.240,00
Dinas Kebudayaan	211.981.372,60	180.384.665,90	0,00	392.366.038,50
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.057.202.246,00	2.650.580.452,25	1.805.400,00	4.705.977.298,25
Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	451.233.806,98	57.465.986,18	0,00	508.699.793,16
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	2.409.271.435,08	0,00	0,00	2.409.271.435,08
Dinas Kelautan Dan Perikanan	14.218.222.164,64	4.066.520.169,12	21.045.000,00	18.263.697.333,76
Dinas Pariwisata	9.377.643.605,41	3.365.717.981,20	704.506.629,00	12.038.854.957,61
Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	282.000.000,00	3.545.672.992,19	0,00	3.827.672.992,19
Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura	5.838.994.448,59	18.105.663.176,38	0,00	23.944.657.624,97
Dinas Perkebunan	5.238.841.356,93	0,00	0,00	5.238.841.356,93
Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	22.192.860.970,90	0,00	0,00	22.192.860.970,90
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	0,00	3.494.870.684,06	0,00	3.494.870.684,06
Badan Pendapatan Daerah	1.490.633.880,00	0,00	0,00	1.490.633.880,00

PERANGKAT DAERAH	31-Des-20 (Rp)	Mutasi (Rp)		31-Des-21 (Rp)
		Penambahan	Pengurangan	
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	1.032.864.936,39	4.149.941.570,69	556.788.834,11	4.626.017.672,97
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	3.734.291.050,00	0,00	0,00	3.734.291.050,00
PPKD	568.708.031,80	0,00	568.708.031,80	0,00
Badan Kepegawaian Daerah	6.560.499.035,08	0,00	0,00	6.560.499.035,08
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.618.387.893,05	0,00	0,00	4.618.387.893,05
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.339.089,02	568.708.031,80	0,00	574.047.120,82
Badan Penghubung	3.470.038.429,09	0,00	200.000.000,00	3.270.038.429,09
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	883.361.567,89	1.031.803.990,00	0,00	1.915.165.557,89
Inspektorat	2.700.592.972,00	0,00	0,00	2.700.592.972,00
Sekretariat Daerah	13.547.373.614,00	0,00	0,00	13.547.373.614,00
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.882.371.979,30	430.667.500,00	0,00	5.313.039.479,30
JUMLAH ASET LAIN-LAIN	**191.027.412.828,23**	**94.844.091.223,55**	**44.422.610.765,74**	**241.448.893.286,04**

5.5.37 Aset Lainnya - Akumulasi Penyusutan Aset Lain - lain

Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar (Rp189.603.032.627,31) dan (Rp148.175.982.789,82) terdapat pada Perangkat Daerah dengan rincian sebagai berikut:

PERANGKAT DAERAH	31-Des-2020 (Rp)	Mutasi (Rp)		31-Des-2021 (Rp)
		Penambahan	Pengurangan	
Dinas Kesehatan	0,00	(56.096.423.174,97)	(15.095.039.111,03)	(41.001.384.063,94)
Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad	(36.341.945.429,34)	0,00	(36.341.945.429,34)	0,00
Rumah Sakit Jiwa Tampan	(3.056.224.246,18)	0,00	(3.056.224.246,18)	0,00
Rumah Sakit Petala Bumi	(1.381.885.550,36)	0,00	(1.381.885.550,36)	0,00

PERANGKAT DAERAH	31-Des-2020 (Rp)	Mutasi (Rp)		31-Des-2021 (Rp)
		Penambahan	Pengurangan	
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	(5.263.003.389,66)	0,00	0,00	(5.263.003.389,66)
Satuan Polisi Pamong Praja	(2.886.202.830,61)	0,00	0,00	(2.886.202.830,61)
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	(7.160.200.459,87)	(9.626.088.860,58)	0,00	(16.786.289.320,45)
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(2.057.202.246,00)	(1.970.041.827,25)	(1.805.400,00)	(4.025.438.673,25)
Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	(369.446.000,00)	0,00	0,00	(369.446.000,00)
Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	(5.588.817.471,30)	0,00	0,00	(5.588.817.471,30)
Dinas Perhubungan	(5.756.814.460,00)	0,00	0,00	(5.756.814.460,00)
Dinas Kebudayaan	(121.131.872,60)	(180.384.665,90)	0,00	(301.516.538,50)
Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	(450.230.665,67)	(46.265.648,68)	0,00	(496.496.314,35)
Dinas Pariwisata	(9.311.880.787,63)	(978.875.996,80)	(704.506.629,00)	(9.586.250.155,43)
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	(2.409.271.435,08)	0,00	0,00	(2.409.271.435,08)
Dinas Kelautan Dan Perikanan	(9.494.906.439,64)	(3.696.857.789,02)	(21.045.000,00)	(13.170.719.228,66)
Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	(282.000.000,00)	(2.265.702.717,92)	0,00	(2.547.702.717,92)
Dinas Perkebunan	(5.138.950.806,10)	0,00	0,00	(5.138.950.806,10)
Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura	(5.828.264.311,25)	(15.608.522.735,84)	0,00	(21.436.787.047,09)
Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	(8.098.770.200,72)	(0,42)	0,00	(8.098.770.201,14)
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	(3.731.369.250,00)	0,00	0,00	(3.731.369.250,00)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	(968.197.055,55)	(3.509.040.055,72)	(492.120.953,27)	(3.985.116.158,00)
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	0,00	(3.280.947.193,57)	0,00	(3.280.947.193,57)

PERANGKAT DAERAH	31-Des-2020 (Rp)	Mutasi (Rp)		31-Des-2021 (Rp)
		Penambahan	Pengurangan	
Badan Pendapatan Daerah	(1.328.145.253,04)	0,00	0,00	(1.328.145.253,04)
PPKD	(568.708.031,80)	0,00	(568.708.031,80)	0,00
Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	(2.402.589,99)	(768.708.031,80)	(200.000.000,00)	(571.110.621,79)
Badan Kepegawaian Daerah	(6.545.543.621,38)	0,00	0,00	(6.545.543.621,38)
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	(3.954.341.826,62)	0,00	0,00	(3.954.341.826,62)
Badan Penghubung	(3.470.038.429,09)	0,00	(200.000.000,00)	(3.270.038.429,09)
Badan Keatuan Bangsa Dan Politik	(850.069.685,04)	(1.031.803.990,00)	0,00	(1.881.873.675,04)
Inspektorat	(2.700.592.972,00)	0,00	0,00	(2.700.592.972,00)
Sekretariat Daerah	(8.249.790.194,00)	0,00	0,00	(8.249.790.194,00)
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	(4.809.635.279,30)	(430.667.500,00)	0,00	(5.240.302.779,30)
JUMLAH AKUMULASI ASET LAIN-LAIN	**(148.175.982.789,82)**	**(99.490.330.188,47)**	**(58.063.280.350,98)**	**(189.603.032.627,31)**

Kewajiban

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp314.292.012.303,66 dan Rp234.272.884.343,43, dengan rincian sebagai berikut:

5.5.38 Kewajiban Jangka Pendek - Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp242.215.636,00 dan Rp40.000,00 dapat dirinci sebagai berikut:

a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) – Utang PPh Pusat

Uraian	31-Des-20 (Rp)	Pemungutan Tahun 2021 (Rp)	Penyetoran Tahun 2021 (Rp)	31-Des-21 (Rp)
PPh 21	0,00	103.178.082.368,00	103.173.821.568,00	4.260.800,00
PPh 22	0,00	6.792.718.451,00	6.792.008.730,00	709.721,00
PPh 23	40.000,00	7.956.957.742,00	7.956.392.492,00	605.250,00
PPh 25	0,00	16.632.647.913,00	16.613.641.201,00	19.006.712,00
Jumlah	**40.000,00**	**134.560.406.474,00**	**134.535.863.991,00**	**24.582.483,00**

b. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) – Utang PPN Pusat

Uraian	31-Des-20 (Rp)	Pemungutan Tahun 2021 (Rp)	Penyetoran Tahun 2021 (Rp)	31-Des-21 (Rp)
PPN Pusat	0,00	147.661.741.208,00	147.444.108.055,00	217.633.153,00
Jumlah	**0,00**	**147.661.741.208,00**	**147.444.108.055,00**	**217.633.153,00**

Utang perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Tahun 2021 terdapat pada OPD sebagai berikut:

SKPD	PPh 21	PPh22	PPh23	PPh25	PPN Pusat	Jumlah
Dinas Pendidikan	4.260.800,00	709.721,00	565.250,00	19.006.712,00	217.633.153,00	242.175.636,00
Dinas Kesehatan	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Jumlah	**4.260.800,00**	**709.721,00**	**605.250,00**	**19.006.712,00**	**217.633.153,00**	**242.215.636,00**

5.5.39 Kewajiban Jangka Pendek - Pendapatan Diterima dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp583.219.147,84 dan Rp13.394.628.808,55. Pendapatan Diterima Dimuka pada Tahun 2021 terdiri dari penerimaan sewa atas penggunaan kekayaan daerah yaitu sewa tempat sebesar Rp583.219.147,84 dengan rincian sebagai berikut:

No	SKPD	Penyewa	Periode Sewa	Nilai Perjanjian	Saldo Per 31 Desember 2021 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2020 (Rp)
1	Dinas Kesehatan					
	1. BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad	Kantor Kas PT Bank Riau Kepri	1/1/2020– 31/12/2022 (1.096 hari)	195.000.000,00	64.940.693,43	129.881.386,86
		ATM PT.Bank Riau Kepri	1/1/2020 – 31/12/2022 (1.096 hari)	105.000.000,00	34.968.065,69	69.936.131,39
		Kantor Kas PT.BRI (Persero)	1/8/2018 – 31/7/2021 (1.096 hari)	178.200.000,00	0,00	34.469.343,07
		ATM PT.BRI (Persero)	1/8/2021 – 31/7/2023 (730 hari)	118.800.000,00	93.900.821,92	0,00
		ATM PT.BRI (Persero)	1/10/2019 – 30/9/2021 (731 hari)	67.200.000,00	0,00	25.096.580,03
		ATM PT.BRI (Persero)	1/10/2021 – 30/9/2023 (730 hari)	67.200.000,00	58.730.958,90	0,00
		ATM PT. BNI	1/1/2021 – 31/12/2022 (730 hari)	67.200.000,00	33.600.000,00	0,00
		PT. Global Citra Tama	14/7/2021 – 14/7/2026 (731 hari)	125.000.000,00	113.362.541,07	0,00
	2. Rumah Sakit Jiwa Tampan	ATM Bank Mandiri	1/12/2018 - 30/11/2021 (1096 hari)	44.550.000,00	0,00	13.617.016,42
	3. Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi	Kantor Kas PT Bank Riau Kepri	3/1/2019 - 3/1/2021 (732 hari)	70.000.000,00	0,00	286.885,25
		ATM Bank Riau	3/1/2019 - 3/1/2021 (732 hari)	45.000.000,00	0,00	184.426,23
		Kantor Kas Bank Riau	3/1/2021 - 3/1/2023 (730 hari)	70.000.000,00	35.287.671,23	0,00
		ATM Bank Riau	3/1/2021 - 3/1/2023 (730 hari)	45.000.000,00	22.684.931,51	0,00
			Sub Jumlah	**1.198.150.000,00**	**457.475.683,75**	**273.471.769,25**

No	SKPD	Penyewa	Periode Sewa	Nilai Perjanjian	Saldo Per 31 Desember 2021 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2020 (Rp)
2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	ATM Bank Riau	25/09/2019 - 24/09/2021 (731 hari)	40.000.000,00	0,00	14.610.123,12
		ATM Bank Riau	25/09/2021 - 24/09/2023 (730 hari)	40.000.000,00	34.630.136,99	0,00
		Kantin Zhafira	25/11/2021 - 24/11/2022 (365 hari)	10.000.000,0	8.986.301,37	0,00
		Kantin Buk Gusni	21/09/2021 - 20/09/2022 (365 hari)	10.000.000,0	7.205.479,45	0,00
			Sub Jumlah	**100.000.000,00**	**50.821.917,81**	**14.610.123,12**
3	Badan Pendapatan Daerah	Kantor Kas PT Bank Riau Kepri di Kantor UPT Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru Kota	17/5/2020-16/5/2021 (365 hari)	30.000.000,00	0,00	11.178.082,19
		ATM PT Bank Riau Kepri di Kantor UPT Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru Kota	17/05/2020-16/05/2021 (365 hari)	20.000.000,00	0,00	7.452.054,80
		Kantor Kas PT Bank Riau Kepri di Kantor UPT Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga	17/05/2020-16/05/2021 (365 hari)	30.000.000,00	0,00	11.178.082,19
		ATM PT Bank Riau Kepri di Kantor UPT Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga	17/05/2020-16/05/2021 (365 hari)	20.000.000,00	0,00	7.452.054,80

No	SKPD	Penyewa	Periode Sewa	Nilai Perjanjian	Saldo Per 31 Desember 2021 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2020 (Rp)
		PT BRI (Persero) di Kantor UPT Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga	13/12/2020-12/12/2021 (365 hari)	20.000.000,00	0,00	19.287.671,23
		Kantor Kas PT Bank Riau Kepri di Kantor UPT Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru Kota	17-05-2021 sd 16-05-2022 (365 hari)	30.000.000,00	11.095.890,41	0,00
		ATM PT Bank Riau Kepri di Kantor UPT Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru Kota	17-05-2021 sd 16-05-2022 (365 hari)	20.000.000,00	7.397.260,27	0,00
		Kantor Kas PT Bank Riau Kepri di Kantor UPT Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga	17-05-2021 sd 16-05-2022 (365 hari)	30.000.000,00	11.095.890,41	0,00
		ATM PT Bank Riau Kepri di Kantor UPT Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga	17-05-2021 sd 16-05-2022 (365 hari)	20.000.000,00	7.397.260,27	0,00
		Kantor Kas PT BRI (Persero) di Kantor UPT Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru Kota	17-05-2021 sd 16-05-2022 (365 hari)	30.000.000,00	164.383,56	0,00
		ATM PT BRI (Persero) di Kantor UPT Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru Kota	17-05-2021 sd 16-05-2022 (365 hari)	20.000.000,00	109.589,04	0,00
			Sub Jumlah	**270.000.000,00**	**37.260.273,97**	**56.547.945,21**

No	SKPD	Penyewa	Periode Sewa	Nilai Perjanjian	Saldo Per 31 Desember 2021 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2020 (Rp)
4	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	Sewa Lahan oleh PT Tower Bersama	10/7/2013 – 10/7/2023 (3653 hari)	50.000.000,00	7.610.183,41	12.606.077,20
			Sub Jumlah	**50.000.000,00**	**7.610.183,41**	**12.606.077,20**
5	Badan Penghubung	ATM Bank Riau	06/05/2019 - 05/05/2022 (1096 hari)	90.000.000,00	10.018.248,18	40.155.109,49
			Sub Jumlah	**90.000.000,00**	**10.018.248,18**	**40.155.109,49**
6	Sekretariat Daerah	Sewa Tanah untuk Bangunan Tower/Antena BTS dan Shelter Jl. Bintara	2/05/2017 - 2/05/2022 (1827 hari)	150.000.000,00	10.016.420,36	39.983.579,64
		Sewa Tanah untuk Bangunan Tower/Antena BTS dan Shelter di Taman Kayu Putih Jl. Sambu	2/05/2017 - 2/05/2022 (1827 hari)	150.000.000,00	10.016.420,36	39.983.579,64
			Sub Jumlah	**300.000.000,00**	**20.032.840,72**	**79.967.159,28**
			Total (1)	**2.008.150.000,00**	**583.219.147,84**	**477.358.183,55**

Penerimaan atas pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp12.917.270.625,00 dengan rincian sebagai berikut:

SKPD	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2021 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2020 (Rp)
Badan Pendapatan Daerah	**Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Tahun 2021 yg dibayar Tahun 2020**	**0,00**	**12.900.035.625,00**
	A-1 Sedan, Jeep, Minibus (Pribadi) - LO	0,00	7.754.745.625,00
	A-2 Sedan, Jeep, Minibus (Umum) - LO	0,00	192.883.500,00
	B-1 Bus, Micro Bus (Pribadi) – LO	0,00	20.121.000,00
	B-2 Bus, Micro Bus (Umum) – LO	0,00	87.134.000,00
	C-1 Truck, Light Truck, Pick Up (Pribadi) – LO5	0,00	2.934.729.000,00
	C-2 Truck, Light Truck, Pick up (Umum) - LO	0,00	544.491.000,00
	Kendaraan Bermotor Roda 2 – LO	0,00	1.356.631.500,00

SKPD	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2021 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2020 (Rp)
	Kendaraan Bermotor Roda 3 – LO	0,00	9.300.000,00
	Pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Tahun 2021 yg dibayar Tahun 2020	**0,00**	**17.235.000,00**
	A-1 Sedan, Jeep, Minibus (Pribadi) - LO	0,00	3.855.000,00
	C-1 Truck, Light Truck, Pick Up (Pribadi) - LO	0,00	10.800.000,00
	C-2 Truck, Light Truck, Pick up (Umum) - LO	0,00	2.580.000,00
	Total (2)	**0,00**	**12.917.270.625,00**
	Jumlah	**583.219.147,84**	**13.394.628.808,55**

5.5.40 Kewajiban Jangka Pendek - Utang Belanja

Jumlah Utang Belanja per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp313.405.097.064,82 dan Rp220.733.582.879,88. Utang Belanja merupakan kewajiban Pemerintah Provinsi Riau atas barang/ jasa yang telah diterima dari pihak ketiga namun sampai dengan tahun anggaran berakhir belum dibayar. Pada akhir Tahun 2021 masih terdapat SKPD yang terlambat mengajukan SPM ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk proses SP2D dan barang dan jasa sudah diterima Pemerintah Provinsi Riau namun belum dibayar, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	31-Des-20 (Rp)	Mutasi (Rp)		30-Des-21 (Rp)
		Penambahan	Pengurangan	
Utang Belanja Pegawai	22.223.733.100,00	0,00	22.223.733.100,00	0,00
Utang Belanja barang dan jasa	101.348.241.969,58	146.183.921.244,48	92.375.797.958,58	155.156.365.255,48
Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	651.875.180,00	861.572.847,00	648.200.080,00	865.247.947,00
Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.391.862.425,52	0,00	0,00	2.391.862.425,52
Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.580.307.428,70	49.208.467,00	372.505.209,26	3.257.010.686,44
Utang transfer pemerintah daerah lainnya	90.537.562.776,08	241.160.168.414,46	179.963.120.440,16	151.734.610.750,38
Jumlah	**220.733.582.879,88**	**388.254.870.972,94**	**295.583.356.788,00**	**313.405.097.064,82**

Penjelasan masing-masing Utang Belanja per 31 Desember 2021 dan 2020, yakni sebagai berikut.

a. Utang Belanja Pegawai

Utang belanja pegawai per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp0,00 dan Rp22.223.733.100,00 terdapat pada daftar berikut.

SKPD	Uraian	Rekanan	Utang Per 31Desember 2021 (Rp)	Utang Per 31 Desember 2020 (Rp)
Dinas Pendidikan	Utang Belanja Pegawai Tunjangan Profesi Guru Bulan Desember Tahun 2020		0,00	21.982.585.600,00
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	Pembayaran honor penjaga HWLR dan ARR 11 orang x 9 bln @ 2.400.000	Muchlas Abror, ST Cs	0,00	237.600.000,00
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Bidang Tata Ruang dan Tata Bangunan	ARMAN, BE Cs	0,00	750.000,00
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Bidang Tata Ruang dan Tata Bangunan	DEDY ZULHERI, ST Cs	0,00	950.000,00
	Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan dan Pejabat Pengadaan Barang dan JAsa pada Bidang Tata Ruang dan Tata Bangunan	BUDI HARTONO RB, ST Cs	0,00	1.847.500,00
Jumlah			**0,00**	**22.223.733.100,00**

b. Utang Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp155.156.365.255,48 dan Rp101.348.241.969,58, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	31-Des-20 (Rp)	Mutasi (Rp)		31-Des-21 (Rp)
		Penambahan	Pengurangan	
Utang Belanja Barang	97.885.959.751,58	141.971.932.194,02	88.446.097.587,58	151.411.794.358,02
Utang Belanja Jasa	3.197.784.493,00	3.860.840.514,46	3.644.640.685,00	3.413.984.322,46
Utang Belanja Pemeliharaan	14.597.725,00	4.988.850,00	0,00	19.586.575,00

Uraian	31-Des-20	Mutasi (Rp)		31-Des-21
	(Rp)	Penambahan	Pengurangan	(Rp)
Utang Belanja Perjalanan Dinas (Badan Penghubung)	21.900.000,00	0,00	0,00	21.900.000,00
Utang Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	228.000.000,00	346.159.686,00	285.059.686,00	289.100.000,00
Jumlah	**101.348.241.969,58**	**146.183.921.244,48**	**92.375.797.958,58**	**155.156.365.255,48**

Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2021 dan 2020 menurut OPD dapat dijelaskan sebagai berikut:

SKPD	Uraian	Rekanan	Utang Per 31 Desember 2021 (Rp)	Utang Per 31 Desember 2020 (Rp)
Dinas Pendidikan	Pemberian Penghargaan Kepada Siswa, Tenaga Pendidik dan Kependidikan Berprestasi seProvinsi Riau		228.000.000,00	228.000.000,00
Dinas Kesehatan	Utang Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan (dinkes)	CV. GATRA CONSULTANT	20.000.000,00	20.000.000,00
	Utang Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	RS AULIA	40.742.834,00	0,00
	Utang Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	CV. Sanjorie	4.149.458,46	0,00
	Utang belanja jasa yang diberikan kepada masyarakat	PMC	61.100.000,00	0,00
	Belanja Penggantian Suku Cadang (RSJ)	PT. Agung Toyota	3.085.900,00	3.085.900,00
	Pembayaran Belanja Jasa Kantor (BPJS Ketenagakerjaan) untuk bulan Desember Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi Provinsi Riau TA. 2021	BPJS Ketenagakerjaan	496.368,00	0,00
	Pembayaran Belanja Jasa Kantor (BPJS Ketenagakerjaan) untuk bulan Desember Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi Provinsi Riau TA. 2021	BPJS Ketenagakerjaan	3.324.510,00	0,00
	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD		151.171.591.645,02	97.636.685.916,58
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	Pekerjaan pengawasan Kegiatan Pembangunan Balai Adat Suku Piliang Desa Koto Lubuk Jambi Kec. Kuantan Mudik Kab. Kuansing	CV Bina Pratama	14.468.071,00	14.468.071,00
	Pekerjaan Pengawasan Kegiatan Pembangunan Mesjid Baiturrahim Desa Pebaun Hilir Kec.Kuantan Mudik Kab.Kuansing	CV Rancang Bangun	0,00	12.892.000,00
	Pekerjaan Pengawasan Kegiatan Pembangunan Mesjid Tawakal Jl. Puncak Sari Kel. Sri Meranti Kec. Rumbai Pekanbaru	CV Multi Prima Riau	32.985.000,00	32.985.000,00
	Kegiatan Pengelolaan UPT Air Minum Pekanbaru Selatan pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelola Air Minum Dinas CIPTADA Provinsi Riau Tahun Anggaran 2016.	PT MITRA UTAMA ESTUARI	48.650.000,00	48.650.000,00

SKPD	Uraian	Rekanan	Utang Per 31 Desember 2021 (Rp)	Utang Per 31 Desember 2020 (Rp)
	Pembayaran Termyn I dan Terakhir sebesar 100% untuk Pekerjaan Fisik Pembangunan Mesjid Al- Busthan Dusun Lubuk Meriak Desa Kuala Gasib Kecamatan Koto Gasib	CV FAJAR INSANI	15.642.750,00	15.642.750,00
	Mutasi dari PKPP		54.690.114,00	54.690.114,00
	MUTASI DARI PKPP (Belanja Pemeliharaan)	CV MUDA BERJAYA	9.800.000,00	9.800.000,00
Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	Utang Belanja Jasa Perawatan Bangunan	CV WAHANA MITRA PERSADA	0,00	4.988.850,00
	Utang Pemeliharaan Gedung dan bangunan- Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Kantor	CV WAHANA MITRA PERSADA	4.988.850,00	0,00
Sekretariat Daerah	Pembayaran Hutang Kegiatan Perawatan dan Pemeliharaan Gedung Kantor dan Rumah Dinas Jabatan Tahun 2008,2009,2010 dan 2011 Berdasrakan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor: 2954/K/Pdt/2016 tanggal 14 Desember 2016	PT Yogi Pratama (Dahulu CV.Yogi Pratama)	4.797.725,00	4.797.725,00
Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	Likuidasi Utang Belanja Barang dan Jasa dari KPID		1.359.749,00	1.359.749,00
	Likuidasi Utang Belanja Barang dan Jasa dari Badan Pengelola Perbatasan		2.319.553,00	2.319.553,00
	Pembayaran belanja penggantian suku cadang berdasarkan SPK nomor 278/SPK-PL/PEM/2011 tanggal 30 November 2011	CV Sama Mau Senang	54.500.000,00	54.500.000,00
Badan Penghubung	Kegiatan Pagelaran Seni budaya Melayu		12.360.000,00	12.360.000,00
	Kegiatan Pagelaran Seni budaya Melayu (belanja perjalanan dinas)		21.900.000,00	21.900.000,00
Total (1)			**151.810.952.527,48**	**98.179.125.628,58**

Utang Belanja Barang dan Jasa pada Dinas Kesehatan per 31 Desember 2021 sebesar Rp154,435,995,637.48, terdapat Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp151.171.591.645,02, dengan rincian sebagai berikut:

1. Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD RSUD Arifin Achmad sebesar Rp138.664.989.921,50
2. Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD RSJ Tampan sebesar Rp366.151.680,52
3. Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD RSUD Petala Bumi sebesar Rp12.140.450.043,00

Berikut penjelasan beberapa utang yang masih belum dibayarkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Riau:

1. Utang Belanja Barang dan Jasa pada Dinas Pendidikan belum dibayar hingga saat ini disebabkan karena tidak dianggarkan untuk pembayaran utang belanja barang dan jasa pada APBD Tahun 2021.
2. Utang Belanja Barang dan Jasa pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga belum dibayar disebabkan karena tidak ada penagihan dari pihak ketiga hingga saat ini.
3. Utang Belanja Barang dan Jasa pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah belum dibayar per 31 Desember 2021 disebabkan karena pihak ketiga tidak dapat diketahui keberadaannya, dan tidak ada penagihan dari pihak ketiga tersebut sampai dengan 31 Desember 2021.
4. Utang Belanja Barang dan Jasa pada Badan Penghubung masih belum dibayar disebabkan karena adanya kelalaian PPTK pada Tahun 2015 seperti tidak mengusulkan pencairan. Pada Tahun 2016 sudah di ajukan anggaran pembayaran Hutang Pagelaran Tahun 2015, tetapi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah hanya bersedia membayar hutang yang bersifat LS, untuk itu pada Tahun 2021 sisa utang belanja barang dan jasa kegiatan pagelaran seni budaya melayu Tahun 2015 berjumlah Rp34.260.000,00. Penyelesaian administrasi saat ini masih dalam proses meminta surat penyataan kepada pelaksana kerja agar tidak menuntut pembayaran pekerjaan yang tercatat pada utang pagelaran Tahun 2015.

Berikut ini rincian utang belanja listrik, telepon, internet dan air menurut OPD per 31 Desember 2021:

SKPD	Utang Tagihan Rekening Listrik Per 31 Desember 2021 (Rp)	Utang Tagihan Rekening Telepon dan internet Per 31 Desember 2021 (Rp)	Utang Tagihan Rekening Air Per 31 Desember 2021 (Rp)	Total Utang Belanja per 31 Desember 2021 (Rp)
Dinas Pendidikan	137.712.877,00	0,00	0,00	137.712.877,00
Dinas Kesehatan	1.103.644.734,00	66.565.328,00	41.621.600,00	1.211.831.662,00
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	0,00	0,00	0,00	0,00
Satuan Polisi Pamong Praja	1.241.346,00	16.146.965,00	0,00	17.388.311,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	31.270.519,00	1.171.750,00	0,00	32.442.269,00
Dinas Sosial	26.565.518,00	0,00	0,00	26.565.518,00
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00	0,00

SKPD	Utang Tagihan Rekening Listrik Per 31 Desember 2021 (Rp)	Utang Tagihan Rekening Telepon dan internet Per 31 Desember 2021 (Rp)	Utang Tagihan Rekening Air Per 31 Desember 2021 (Rp)	Total Utang Belanja per 31 Desember 2021 (Rp)
Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	13.509.832,00	0,00	0,00	13.509.832,00
Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura	67.417.703,00	5.376.340,00	0,00	72.794.043,00
Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	41.940.082,00	34.771.636,00	0,00	76.711.718,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	18.683.745,00	1.369.000,00	0,00	20.052.745,00
Dinas Perhubungan	40.669.854,00	3.480.870,00	0,00	44.150.724,00
Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	175.860,00	0,00	175.860,00
Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	144.678.008,00	5.327.820,00	0,00	150.005.828,00
Dinas Kebudayaan	23.894.416,00	1.971.000,00	0,00	25.865.416,00
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	92.761.209,00	2.928.860,00	167.000,00	95.857.069,00
Dinas Kelautan Dan Perikanan	88.404.559,00	3.191.660,00	0,00	91.596.219,00
Dinas Pariwisata	31.778.310,00	0,00	0,00	31.778.310,00
Dinas Perkebunan	30.603.437,00	0,00	0,00	30.603.437,00
Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	47.027.278,00	6.104.300,00	150.000,00	53.281.578,00
Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	33.348.507,00	9.120.386,00	0,00	42.468.893,00
Sekretariat Daerah	738.640.401,00	50.657.315,00	0,00	789.297.716,00
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	65.042.133,00	785.223,00	0,00	65.827.356,00
Badan Pendapatan Daerah	147.035.082,00	21.077.219,00	0,00	168.112.301,00
Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Kepegawaian Daerah	37.179.071,00	1.454.648,00	0,00	38.633.719,00
Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia	13.062.026,00	2.395.600,00	0,00	15.457.626,00
Badan Penghubung	43.683.432,00	8.880.525,00	1.503.610,00	54.067.567,00
Inspektorat	26.728.779,00	1.473.852,00	0,00	28.202.631,00
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	11.021.503,00	0,00	0,00	11.021.503,00
Total (2)	**3.057.544.361,00**	**244.426.157,00**	**43.442.210,00**	**3.345.412.728,00**
Jumlah (1+2)				**155.156.365.255,48**

c. Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 dan 2020 masing masing sebesar Rp865.247.947,00 dan Rp651.875.180,00 terdapat pada daftar berikut.

SKPD	Uraian	Rekanan	Utang Per 31 Desember 2021 (Rp)	Utang Per 31 Desember 2020 (Rp)
Dinas Kesehatan	Utang Belanja Modal BLUD		861.572.847,00	648.200.080
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Pembayaran Retensi Sebesar 5% Pekerjaan Pembuatan Dinding Partisi Ruangan Kantor Unit Pengelola Air Minum Pekanbaru	CV. INDAH TATA KOTA	3.675.100,00	3.675.100,00
Jumlah			**865.247.947,00**	**651.875.180,00**

Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Dinas Kesehatan per 31 Desember 2021 sebesar Rp861.572.847,00, merupakan Utang Belanja Modal BLUD sebesar Rp861.572.847,00 pada RSUD Arifin Achmad.

d. Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 dan 2020 masing masing Rp2.391.862.425,52 dan Rp2.391.862.425,52 dengan rincian sebagai berikut.

SKPD	Uraian	Rekanan	Utang Per 31Desember 2021 (Rp)	Utang Per 31 Desember 2020 (Rp)
Dinas Pendidikan	Pembayaran 100% dari Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pagar SMKN 1 Perikanan Dumai	CV. PANCURAN TUJUH ABADI	150.641.084,52	150.641.084,52
	Pembayaran Retensi 5% dari Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pagar SMKN 1 Perikanan Dumai	CV. PANCURAN TUJUH ABADI	9.346.140,00	9.346.140,00
Dinas Kesehatan (RSUD Arifin Achmad)	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Rawat Inap Anak (Fisik Pembangunan)	PT. Amarta Karya	1.520.778.415,00	1.520.778.415,00
	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Rawat Inap Anak (Biaya Perkara)	PT. Amarta Karya	225.038.550,00	225.038.550,00
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Gudang Bahan Bakar Minyak di Lokasi IPA dan INTAKE pada Bidang UPT Pengelolaan Air Minum Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Sumber Daya Air Provinsi Riau Tahun Anggaran 2016.	CV. INDAH TATA KOTA	9.400.200,00	9.400.200,00
	Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Gudang Bahan Bakar Minyak di Lokasi IPA dan INTAKE pada Bidang UPT Pengelolaan Air Minum Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Sumber Daya Air Provinsi Riau Tahun Anggaran 2016.	CV. AINI MANDIRI	5.176.000,00	5.176.000,00
	Pembayaran Retensi sebesar 5% Pekerjaan Pembangunan Ruang Pertemuan Kedatangan	CV WIDYA KARYA	44.139.861,00	44.139.861,00

Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	Sisa Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata di KPHP Model Minas Tahura UPT KPHP Model Tahura sebesar 36,044%	CV. ALFARIZA PRATAMA dan CV. RIAU NETWORK	407.460.175,00	407.460.175,00
Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	Pembayaran Angsuran Tahap I (Terakhir 100%) dari Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Hall Olahraga Bina Riau Baru	CV Althis Konsultan	19.882.000,00	19.882.000,00
	Total		**2.391.862.425,52**	**2.391.862.425,52**

e. Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp3.257.010.686,44 dan Rp3.580.307.428,70, dengan rincian sebagai berikut:

SKPD	Uraian	Rekanan	Utang Per 31 Desember 2021 (Rp)	Utang Per 31 Desember 2020 (Rp)
Dinas Kesehatan	Pembayaran retensi 5% pekerjaan belanja modal instalasi pengolahan limbah radioaktif pembangunan IPAL	CV BERKAH KALIMNATAN INDONESIA	49.208.467,00	0,00
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	Pembayaran Sertifikat Bulanan (MC) No. 05 (Sisa Pekerjaan yang dijamin dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak)	CV NUANSA BANGUN PERSADA	0,00	89.265.808,00
	Pembayaran Retensi 5% Kegiatan Preservasi Jembatan Provinsi Wilayah I Pemeliharaan Jembatan Fly Over Simpang Jalan Tuanku Tambusai Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020.	CV NUANSA BANGUN PERSADA	0,00	50.735.445,00
	Termin II (Terakhir) sebesar 100% (Seratus persen) dari Pekerjaan Fisik Pengadaan dan Pemasangan Pipa Transmisi PE 100 Diameter 200 mm dan 300 mm lokasi Kota Pekanbaru	PT Daya Hasta Multi Perkasa	1.902.637.000,00	1.902.637.000,00
	Retensi sebesar 5% (Lima persen) dari Pekerjaan Fisik Pengadaan dan Pemasangan Pipa Transmisi PE 100 Diameter 200 mm dan 300 mm lokasi Kota Pekanbaru	PT Daya Hasta Multi Perkasa	366.784.400,00	366.784.400,00
	Termin II sebesar 100% (Seratus persen) dari Pekerjaan Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Transmisi PE 100 Diameter 200 mm dan 300 mm lokasi Kota Pekanbaru	CV Alumni Bumi Tuah Consultant	33.795.300,00	33.795.300,00
	Retensi 5% dari pekerjaan rehabilitasi daerah rawa siak kecil blok A, B, C, D	CV MUTIARA RIAU	47.904.650,00	47.904.650,00

SKPD	Uraian	Rekanan	Utang Per 31 Desember 2021 (Rp)	Utang Per 31 Desember 2020 (Rp)
	Pembayaran Termyn I dan Terakhir 61,78% Pekerjaan Pembangunan Drainase Kabupaten Siak Kegiatan Pembangunan Drainase Kabupaten Siak Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Dinas CIPTADA Provinsi Riau Tahun Anggaran 2016.	PT FITRI INDAH GEMILANG	44.243.308,00	44.243.308,00
	Pembayaran retensi 5% dari Pekerjaan Rehabilitasi dan Peningkatan Daerah Irigasi Sei. Silam Kabupaten Kampar pada Kegiatan Rehabilitasi dan Peningkatan Daerah Irigasi Sei. Silam Kabupaten Kampar Bidang Sumber Daya Air Dinas CIPTADA Provinsi Riau, Tahun Anggaran 2016	CV MUTIARA RIAU	0,00	37.138.755,06
	Pembayaran Termin I Terakhir 100% dari Pekerjaan Pemasangan Listrik Baru Instalasi Linstrik Tranmisi/Intake Pada Bidang Unit Pelaksana teknis (UPT) Pengelola Air Minum Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber Daya Air Provinsi Riau Tahun Anggaran 2016	CV JA.68	199.200.000,00	199.200.000,00
	Pembayaran Pertama/Terakhir 100% Pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Kualitas PSU Kawasan Permukiman Kelurahan Kota Batu Reteh	CV MANDALA SIASAM	0,00	166.820.000,00
	Pembayaran Retensi 5% Pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Kualitas PSU Kawasan Permukiman Kelurahan Sungai Salak	CV MANDALA SIASAM	0,00	8.780.000,00
	Pembayaran Retensi 5% Pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Kualitas PSU Kawasan Permukiman Kelurahan Lubuk Gaung 3	PT SUNGAI SEMBILAN SEJATI	0,00	9.490.000,00
	Pembayaran Pertama/Terakhir 100%Pembangunan/Peningkatan Kualitas PSU Kawasan Permukiman Kelurahan Labuh Baru Barat 3	CV AMILIN TIGA DUA	0,00	285.000,00
	Pembayaran Retensi 5% Pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Kualitas PSU Kawasan Permukiman Kelurahan Labuh Baru Barat 3	CV AMILIN TIGA DUA	15.000,00	15.000,00
	Pembayaran Pertama/Terakhir 100% Pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Kualitas PSU Kawasan Permukiman Kelurahan Serembah Jaya.	CV YAHYA ABADI	0,00	73.150,00
	Pembayaran Retensi Sebesar 5% Pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Kualitas PSU Kawasan Permukiman Kelurahan Serembah Jaya	CV YAHYA ABADI	3.850,00	3.850,00
	Pembayaran Pertama/Terakhir 100% Pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Kualitas PSU Kawasan Permukiman Kelurahan Kepenghuluan Sekeladi 1	CV MARINI	0,00	8.967.050,00
	Pembayaran Retensi Sebesar 5% Pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Kualitas PSU Kawasan Permukiman Kelurahan Kepenghuluan Sekeladi 1	CV MARINI	471.950,00	471.950,00

SKPD	Uraian	Rekanan	Utang Per 31 Desember 2021 (Rp)	Utang Per 31 Desember 2020 (Rp)
	Pembayaran Pertama dan Terakhir Sebesar 100% Pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Kualitas PSU Kawasan Permukiman Kelurahan Melayu Besar 4	CV BERLIAN BERSAMA	0,00	0,7
	Pembayaran Retensi Sebesar 5% Pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Kualitas PSU Kawasan Permukiman Kelurahan Melayu Besar 4	CV BERLIAN BERSAMA	0,04	0,04
	Pembayaran Pertama dan Terakhir Sebesar 100% Pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Kualitas PSU Kawasan Permukiman Kelurahan Melayu Besar 5	CV NIZAM KURNIA	0,00	0,5
	Pembayaran Retensi Sebesar 5% Pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Kualitas PSU Kawasan Permukiman Kelurahan Melayu Besar 5	CV NIZAM KURNIA	0,03	0,03
	Pembayaran Pertama/Terakhir sebesar 100% Pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Kualitas PSU Kawasan Permukiman Kelurahan Rimba Melintang 6	CV KARYA KANIA	0,00	950.000,00
	Pembayaran Retensi sebesar 5% Pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Kualitas PSU Kawasan Permukiman Kelurahan Rimba Melintang 6	CV KARYA KANIA	50.000,00	50.000,00
	Fisik Peningkatan Kualitas Infranstruk Permukiman Kawasan Kumuh Kampung Tualang Kab. Siak dan Pengawan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Pemukiman Kawasan Kumuh Kampung Tualang Kab. Siak	CV TUNAS PRATAMA JAYA (fisik)	539.060.861,37	539.060.861,37
	Pengawasan Peningkatan Kualitas Infranstruk Permukiman Kawasan Kumuh Kampung Tualang Kab. Siak dan Pengawan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Pemukiman Kawasan Kumuh Kampung Tualang Kab. Siak	CV SARGASSO CONSULTANT	68.042.000,00	68.042.000,00
Dinas Kelautan Dan Perikanan	Pembayaran Hutang Retensi pada Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	CV TIGA BINTANG	5.593.900,00	5.593.900,00
	TOTAL		**3.257.010.686,44**	**3.580.307.428,70**

f. Utang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp151.734.610.750,38 dan Rp90.537.562.776,08, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	31-Des-20 (Rp)	Mutasi (Rp)		31-Des-21 (Rp)
		Penambahan	Pengurangan	
Utang Transfer Bagi Hasil Pajak	89.425.557.664,08	150.622.605.638,38	89.425.557.664,08	150.622.605.638,38
Utang Transfer Bagi Hasil Retribusi	167.376.000,00	0,00	0,00	167.376.000,00
Utang Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	944.629.112,00	0,00	0,00	944.629.112,00
Jumlah	**90.537.562.776,08**	**150.622.605.638,38**	**89.425.557.664,08**	**151.734.610.750,38**

Dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Kabupaten/ Kota per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp150.622.605.638,38 dan Rp89.425.557.664,08 dengan rincian:

Kabupaten/kota	31-Des-21 (Rp)	31-Des-20 (Rp)
Kota Pekanbaru	21.097.152.798,00	10.816.076.034,04
Kota Dumai	9.656.723.625,00	4.975.810.077,39
Kabupaten Bengkalis	11.261.555.087,51	5.874.301.616,51
Kabupaten Indragiri Hulu	13.937.061.636,44	10.612.809.346,44
Kabupaten Indragiri Hilir	10.911.218.727,19	6.345.129.652,19
Kabupaten Kampar	11.668.953.832,00	9.460.944.146,42
Kabupaten Kuansing	13.529.407.393,18	7.512.210.670,18
Kabupaten Pelalawan	10.800.908.936,00	2.277.091.102,01
Kabupaten Rokan Hulu	11.096.339.975,08	7.735.301.497,08
Kabupaten Rokan Hilir	9.199.749.527,00	5.260.522.339,71
Kabupaten Siak	21.793.741.465,98	13.820.876.325,98
Kabupaten Kepulauan Meranti	5.669.792.635,00	4.734.484.856,13
Jumlah	**150.622.605.638,38**	**89.425.557.664,08**

Pelunasan Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Kabupaten/ Kota per 31 Desember 2021 sebesar Rp89.425.557.664,08 yaitu Utang Bagi Hasil PKB, BBN KB, PBB KB dan AP (TW IV Oktober-November 2020) sebesar Rp89.425.557.664,08 dengan rincian Keputusan dan nilai utang sebagai berikut:

No	Kab/Kota	Jenis	Kep. Gubernur No: Kpts 2049/XII/2020 tgl. 21 Desember 2020 TW IV PKB, BBN KB, PBB KB, AP (Okt-Nov 2020)	Utang Per 31 Desember 2020	Pelunasan SP2D	Tanggal SP2D
1	2	3	4	5 = 4	6	7
1	Kota Pekanbaru	Rokok	0,00	0,00		
		PKB	10.801.748.840,04	10.801.748.840,04	02622/SP2D/LS/III/2021	12 Juli 2021
		BBN KB	0,00	0,00		
		PBB KB	0,00	0,00		
		AP	14.327.194,00	14.327.194,00	02622/SP2D/LS/III/2021	12 Juli 2021
	Sub Jumlah		**10.816.076.034,04**	**10.816.076.034,04**		
2	Kota Dumai	Rokok	0,00	0,00		
		PKB	3.712.540.389,39	3.712.540.389,39	02623/SP2D/LS/III/2021	12 Juli 2021
		BBN KB	0,00	0,00		
		PBB KB	1.263.269.688,00	1.263.269.688,00	02623/SP2D/LS/III/2021	12 Juli 2021
		AP	0,00	0,00		
	Sub Jumlah		**4.975.810.077,39**	**4.975.810.077,39**		
3	Kab Bengkalis	Rokok	0,00	0,00		
		PKB	4.100.125.752,51	4.100.125.752,51	02624/SP2D/LS/III/2021	12 Juli 2021
		BBN KB	0,00	0,00		
		PBB KB	1.751.770.845,00	1.751.770.845,00	02624/SP2D/LS/III/2021	12 Juli 2021
		AP	22.405.019,00	22.405.019,00	02624/SP2D/LS/III/2021	12 Juli 2021
	Sub Jumlah		**5.874.301.616,51**	**5.874.301.616,51**		
4	Kab. Indragiri Hulu	Rokok	0,00	0,00		
		PKB	3.191.787.248,44	3.191.787.248,44	02625/SP2D/LS/III/2021	12 Juli 2021
		BBN KB	1.466.552.012,00	1.466.552.012,00	02625/SP2D/LS/III/2021	12 Juli 2021
		PBB KB	5.860.761.792,00	5.860.761.792,00	02625/SP2D/LS/III/2021	12 Juli 2021
		AP	93.708.294,00	93.708.294,00	02625/SP2D/LS/III/2021	12 Juli 2021
	Sub Jumlah		**10.612.809.346,44**	**10.612.809.346,44**		
5	Kab. Indragiri Hilir	Rokok	0,00	0,00		

No	Kab/Kota	Jenis	Kep. Gubernur No: Kpts 2049/XII/2020 tgl. 21 Desember 2020 TW IV PKB, BBN KB, PBB KB, AP (Okt-Nov 2020)	Utang Per 31 Desember 2020	Pelunasan SP2D	Tanggal SP2D
1	2	3	4	5 = 4	6	7
		PKB	2.383.530.358,19	2.383.530.358,19	02626/SP2D/LS/III/2021	12 Juli 2021
		BBN KB	0,00	0,00		
		PBB KB	3.960.775.338,00	3.960.775.338,00	02626/SP2D/LS/III/2021	12 Juli 2021
		AP	823.956,00	823.956,00	02626/SP2D/LS/III/2021	12 Juli 2021
	Sub Jumlah		**6.345.129.652,19**	**6.345.129.652,19**		
6	Kab. Kampar	Rokok	0,00	0,00		
		PKB	4.416.002.840,42	4.416.002.840,42	03350/SP2D/LS/III/2021	06 Agustus 2021
		BBN KB	0,00	0,00		
		PBB KB	4.947.492.312,00	4.947.492.312,00	03350/SP2D/LS/III/2021	06 Agustus 2021
		AP	97.448.994,00	97.448.994,00	03350/SP2D/LS/III/2021	06 Agustus 2021
	Sub Jumlah		**9.460.944.146,42**	**9.460.944.146,42**		
7	Kab. Kuantan Singingi	Rokok	0,00	0,00		
		PKB	2.896.089.101,18	2.896.089.101,18	02627/SP2D/LS/III/2021	12 Juli 2021
		BBN KB	0,00	0,00		
		PBB KB	4.616.121.569,00	4.616.121.569,00	02627/SP2D/LS/III/2021	12 Juli 2021
		AP	0,00	0,00		
	Sub Jumlah		**7.512.210.670,18**	**7.512.210.670,18**		
8	Kab. Pelalawan	Rokok	0,00	0,00		
		PKB	1.876.893.289,01	1.876.893.289,01	03351/SP2D/LS/III/2021	06 Agustus 2021
		BBN KB	0,00	0,00		
		PBB KB	0,00	0,00		
		AP	400.197.813,00	400.197.813,00	03351/SP2D/LS/III/2021	06 Agustus 2021
	Sub Jumlah		**2.277.091.102,01**	**2.277.091.102,01**		
9	Kab. Rokan Hulu	Rokok	0,00	0,00		
		PKB	3.850.647.051,08	3.850.647.051,08	02628/SP2D/LS/III/2021	12 Juli 2021
		BBN KB	0,00	0,00		
		PBB KB	3.884.654.446,00	3.884.654.446,00	02628/SP2D/LS/III/2021	12 Juli 2021
		AP	0,00	0,00		
	Sub Jumlah		**7.735.301.497,08**	**7.735.301.497,08**		

No	Kab/Kota	Jenis	Kep. Gubernur No: Kpts 2049/XII/2020 tgl. 21 Desember 2020 TW IV PKB, BBN KB, PBB KB, AP (Okt-Nov 2020)	Utang Per 31 Desember 2020	Pelunasan SP2D	Tanggal SP2D
1	2	3	4	5 = 4	6	7
10	Kab. Rokan Hilir	Rokok	0,00	0,00		
		PKB	3.233.254.509,71	3.233.254.509,71	02630/SP2D/LS/III/2021	12 Juli 2021
		BBN KB	0,00	0,00		
		PBB KB	2.005.591.279,00	2.005.591.279,00	02630/SP2D/LS/III/2021	12 Juli 2021
		AP	21.676.551,00	21.676.551,00	02630/SP2D/LS/III/2021	12 Juli 2021
	Sub Jumlah		**5.260.522.339,71**	**5.260.522.339,71**		
11	Kab. Siak	Rokok	0,00	0,00		
		PKB	3.718.665.318,98	3.718.665.318,98	02631/SP2D/LS/III/2021	12 Juli 2021
		BBN KB	1.673.279.242,00	1.673.279.242,00	02631/SP2D/LS/III/2021	12 Juli 2021
		PBB KB	8.369.765.005,00	8.369.765.005,00	02631/SP2D/LS/III/2021	12 Juli 2021
		AP	59.166.760,00	59.166.760,00	02631/SP2D/LS/III/2021	12 Juli 2021
	Sub Jumlah		**13.820.876.325,98**	**13.820.876.325,98**		
12	Kab. Kep. Meranti	Rokok	0,00	0,00		
		PKB	2.136.591.253,13	2.136.591.253,13	02654/SP2D/LS/III/2021	13 Juli 2021
		BBN KB	0,00	0,00		
		PBB KB	2.553.903.888,00	2.553.903.888,00	02654/SP2D/LS/III/2021	13 Juli 2021
		AP	43.989.715,00	43.989.715,00	02654/SP2D/LS/III/2021	13 Juli 2021
	Sub Jumlah		**4.734.484.856,13**	**4.734.484.856,13**		
		Jumlah	**89.425.557.664,08**	**89.425.557.664,08**		

Penambahan Utang Berdasarkan Keputusan Gubernur No : Kpts 1382/XII/2021 tgl. 20 Desember 2021 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaran Bermotor dan Pajak Air Permukaan Triwulan IV (Oktober-November) untuk Kabupaten /Kota se Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp24.740.087.694,38 dan penambahan Utang Berdasarkan Keputusan Gubernur No : Kpts 756/IV/2022 tgl. 8 April 2022 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaran Bermotor dan Pajak Air Permukaan Triwulan IV (Desember 2021) untuk Kabupaten /Kota se Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp125.882.517.944,00.

No	Kab/Kota	Jenis	Kep. Gubernur No : Kpts.1382/XII/2021 tgl. 20 Desember 2021 TW IV PKB, BBN KB, PBB KB, AP (Okt-Nov 2021)	Kep. Gubernur No : Kpts.Kpts: 756/IV/2022 tgl. 8 April 2022 TW IV PKB, BBN KB, PBB KB, AP (Desember 2021)	Utang Per 31 Desember 2021
1	2	3	4	5	6=4+5
1	Kota Pekanbaru	Rokok	0,00	0,00	0,00
		PKB	0,00	8.715.673.132,00	8.715.673.132,00
		BBN KB	0,00	5.492.153.993,00	5.492.153.993,00
		PBB KB	0,00	6.809.028.329,00	6.809.028.329,00
		AP	0,00	80.297.344,00	80.297.344,00
	Sub Jumlah		**0,00**	**21.097.152.798,00**	**21.097.152.798,00**
2	Kota Dumai	Rokok	0,00	0,00	0,00
		PKB	0,00	2.690.492.585,00	2.690.492.585,00
		BBN KB	0,00	2.004.702.813,00	2.004.702.813,00
		PBB KB	0,00	4.867.170.924,00	4.867.170.924,00
		AP	0,00	94.357.303,00	94.357.303,00
	Sub Jumlah		**0,00**	**9.656.723.625,00**	**9.656.723.625,00**
3	Kab Bengkalis	Rokok	0,00	0,00	0,00
		PKB	0,00	3.380.306.947,00	3.380.306.947,00
		BBN KB	775.699.744,51	2.667.114.843,00	3.442.814.587,51
		PBB KB	0,00	4.347.243.458,00	4.347.243.458,00
		AP	0,00	91.190.095,00	91.190.095,00
	Sub Jumlah		**775.699.744,51**	**10.485.855.343,00**	**11.261.555.087,51**
4	Kab. Indragiri Hulu	Rokok	0,00	0,00	0,00
		PKB	1.606.723.812,44	2.505.603.399,00	4.112.327.211,44
		BBN KB	3.626.036.266,00	2.038.389.318,00	5.664.425.584,00
		PBB KB	0,00	4.035.828.866,00	4.035.828.866,00
		AP	0,00	124.479.975,00	124.479.975,00
	Sub Jumlah		**5.232.760.078,44**	**8.704.301.558,00**	**13.937.061.636,44**
5	Kab. Indragiri Hilir	Rokok	0,00	0,00	0,00
		PKB	0,00	2.035.405.962,00	2.035.405.962,00
		BBN KB	2.902.282.061,19	1.662.941.493,00	4.565.223.554,19
		PBB KB	0,00	4.206.859.786,00	4.206.859.786,00
		AP	0,00	103.729.425,00	103.729.425,00
	Sub Jumlah		**2.902.282.061,19**	**8.008.936.666,00**	**10.911.218.727,19**

No	Kab/Kota	Jenis	Kep. Gubernur No : Kpts.1382/XII/2021 tgl. 20 Desember 2021 TW IV PKB, BBN KB, PBB KB, AP (Okt-Nov 2021)	Kep. Gubernur No : Kpts.Kpts: 756/IV/2022 tgl. 8 April 2022 TW IV PKB, BBN KB, PBB KB, AP (Desember 2021)	Utang Per 31 Desember 2021
1	2	3	4	5	6=4+5
6	Kab. Kampar	Rokok	0,00	0,00	0,00
		PKB	0,00	3.440.433.198,00	3.440.433.198,00
		BBN KB	0,00	3.017.639.793,00	3.017.639.793,00
		PBB KB	0,00	5.044.863.334,00	5.044.863.334,00
		AP	0,00	166.017.507,00	166.017.507,00
	Sub Jumlah		**0,00**	**11.668.953.832,00**	**11.668.953.832,00**
7	Kab. Kuantan Singingi	Rokok	0,00	0,00	0,00
		PKB	2.429.576.514,18	2.282.914.809,00	4.712.491.323,18
		BBN KB	3.407.273.686,00	1.844.067.543,00	5.251.341.229,00
		PBB KB	0,00	3.427.625.295,00	3.427.625.295,00
		AP	0,00	137.949.546,00	137.949.546,00
	Sub Jumlah		**5.836.850.200,18**	**7.692.557.193,00**	**13.529.407.393,18**
8	Kab. Pelalawan	Rokok	0,00	0,00	0,00
		PKB	0,00	2.621.692.273,00	2.621.692.273,00
		BBN KB	0,00	2.293.337.320,00	2.293.337.320,00
		PBB KB	0,00	5.469.631.544,00	5.469.631.544,00
		AP	0,00	416.247.799,00	416.247.799,00
	Sub Jumlah		**0,00**	**10.800.908.936,00**	**10.800.908.936,00**
9	Kab. Rokan Hulu	Rokok	0,00	0,00	0,00
		PKB	0,00	2.898.396.417,00	2.898.396.417,00
		BBN KB	1.525.120.298,08	2.663.326.968,00	4.188.447.266,08
		PBB KB	0,00	3.897.994.565,00	3.897.994.565,00
		AP	0,00	111.501.727,00	111.501.727,00
	Sub Jumlah		**1.525.120.298,08**	**9.571.219.677,00**	**11.096.339.975,08**
10	Kab. Rokan Hilir	Rokok	0,00	0,00	0,00
		PKB	0,00	2.550.469.650,00	2.550.469.650,00
		BBN KB	0,00	2.328.618.768,00	2.328.618.768,00
		PBB KB	0,00	4.219.701.256,00	4.219.701.256,00
		AP	0,00	100.959.853,00	100.959.853,00
	Sub Jumlah		**0,00**	**9.199.749.527,00**	**9.199.749.527,00**

No	Kab/Kota	Jenis	Kep. Gubernur No : Kpts.1382/XII/2021 tgl. 20 Desember 2021 TW IV PKB, BBN KB, PBB KB, AP (Okt-Nov 2021)	Kep. Gubernur No : Kpts.Kpts: 756/IV/2022 tgl. 8 April 2022 TW IV PKB, BBN KB, PBB KB, AP (Desember 2021)	Utang Per 31 Desember 2021
1	2	3	4	5	6=4+5
11	Kab. Siak	Rokok	0,00	0,00	0,00
		PKB	4.286.515.160,98	2.801.884.135,00	7.088.399.295,98
		BBN KB	4.180.860.151,00	2.350.041.318,00	6.530.901.469,00
		PBB KB	0,00	7.800.707.346,00	7.800.707.346,00
		AP	0,00	373.733.355,00	373.733.355,00
	Sub Jumlah		**8.467.375.311,98**	**13.326.366.154,00**	**21.793.741.465,98**
12	Kab. Kep. Meranti	Rokok	0,00	0,00	0,00
		PKB	0,00	1.652.255.912,00	1.652.255.912,00
		BBN KB	0,00	1.294.588.671,00	1.294.588.671,00
		PBB KB	0,00	2.638.372.881,00	2.638.372.881,00
		AP	0,00	84.575.171,00	84.575.171,00
	Sub Jumlah		**0,00**	**5.669.792.635,00**	**5.669.792.635,00**
		Jumlah	**24.740.087.694,38**	**125.882.517.944,00**	**150.622.605.638,38**

Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Per 31 Desember 2021 sebesar Rp150.622.605.638,38.

	Kab/Kota	Jenis	Utang Per 31 Desember 2020	Kep. Gubernur No : Kpts 2049/XII/2020 tgl. 21 Desember 2020 TW IV PKB, BBN KB, PBB KB, AP (Okt-Nov 2020)	Kep. Gubernur No : Kpts.1382/XII/2021 tgl. 20 Desember 2021 TW IV PKB, BBN KB, PBB KB, AP (Okt-Nov 2021)	Kep. Gubernur No : Kpts.Kpts: 756/IV/2022 tgl. 8 April 2022 TW IV PKB, BBN KB, PBB KB, AP (Desember 2021)	Utang Per 31 Desember 2021
1	2	3	4	5	6	7	8= 4 - 5 +6+7
1	Kota Pekanbaru	Rokok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PKB	10.801.748.840,04	10.801.748.840,04	0,00	8.715.673.132,00	8.715.673.132,00
		BBN KB	0,00	0,00	0,00	5.492.153.993,00	5.492.153.993,00
		PBB KB	0,00	0,00	0,00	6.809.028.329,00	6.809.028.329,00
		AP	14.327.194,00	14.327.194,00	0,00	80.297.344,00	80.297.344,00
	Sub Jumlah		**10.816.076.034,04**	**10.816.076.034,04**	**0,00**	**21.097.152.798,00**	**21.097.152.798,00**
2	Kota Dumai	Rokok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PKB	3.712.540.389,39	3.712.540.389,39	0,00	2.690.492.585,00	2.690.492.585,00
		BBN KB	0,00	0,00	0,00	2.004.702.813,00	2.004.702.813,00
		PBB KB	1.263.269.688,00	1.263.269.688,00	0,00	4.867.170.924,00	4.867.170.924,00
		AP	0,00	0,00	0,00	94.357.303,00	94.357.303,00

	Kab/Kota	Jenis	Utang Per 31 Desember 2020	Kep. Gubernur No : Kpts 2049/XII/2020 tgl. 21 Desember 2020 TW IV PKB, BBN KB, PBB KB, AP (Okt-Nov 2020)	Kep. Gubernur No : Kpts.1382/XII/2021 tgl. 20 Desember 2021 TW IV PKB, BBN KB, PBB KB, AP (Okt-Nov 2021)	Kep. Gubernur No : Kpts.Kpts: 756/IV/2022 tgl. 8 April 2022 TW IV PKB, BBN KB, PBB KB, AP (Desember 2021)	Utang Per 31 Desember 2021
1	2	3	4	5	6	7	8= 4 - 5 +6+7
	Sub Jumlah		**4.975.810.077,39**	**4.975.810.077,39**	**0,00**	**9.656.723.625,00**	**9.656.723.625,00**
3	Kab Bengkalis	Rokok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PKB	4.100.125.752,51	4.100.125.752,51	0,00	3.380.306.947,00	3.380.306.947,00
		BBN KB	0,00	0,00	775.699.744,51	2.667.114.843,00	3.442.814.587,51
		PBB KB	1.751.770.845,00	1.751.770.845,00	0,00	4.347.243.458,00	4.347.243.458,00
		AP	22.405.019,00	22.405.019,00	0,00	91.190.095,00	91.190.095,00
	Sub Jumlah		**5.874.301.616,51**	**5.874.301.616,51**	**775.699.744,51**	**10.485.855.343,00**	**11.261.555.087,51**
4	Kab. Indragiri Hulu	Rokok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PKB	3.191.787.248,44	3.191.787.248,44	1.606.723.812,44	2.505.603.399,00	4.112.327.211,44
		BBN KB	1.466.552.012,00	1.466.552.012,00	3.626.036.266,00	2.038.389.318,00	5.664.425.584,00
		PBB KB	5.860.761.792,00	5.860.761.792,00	0,00	4.035.828.866,00	4.035.828.866,00
		AP	93.708.294,00	93.708.294,00	0,00	124.479.975,00	124.479.975,00
	Sub Jumlah		**10.612.809.346,44**	**10.612.809.346,44**	**5.232.760.078,44**	**8.704.301.558,00**	**13.937.061.636,44**
5	Kab. Indragiri Hilir	Rokok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PKB	2.383.530.358,19	2.383.530.358,19	0,00	2.035.405.962,00	2.035.405.962,00
		BBN KB	0,00	0,00	2.902.282.061,19	1.662.941.493,00	4.565.223.554,19
		PBB KB	3.960.775.338,00	3.960.775.338,00	0,00	4.206.859.786,00	4.206.859.786,00
		AP	823.956,00	823.956,00	0,00	103.729.425,00	103.729.425,00
	Sub Jumlah		**6.345.129.652,19**	**6.345.129.652,19**	**2.902.282.061,19**	**8.008.936.666,00**	**10.911.218.727,19**
6	Kab. Kampar	Rokok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PKB	4.416.002.840,42	4.416.002.840,42	0,00	3.440.433.198,00	3.440.433.198,00
		BBN KB	0,00	0,00	0,00	3.017.639.793,00	3.017.639.793,00
		PBB KB	4947492312,000	4947492312,000	0,00	5.044.863.334,00	5.044.863.334,00
		AP	97448994,000	97448994,000	0,00	166.017.507,00	166.017.507,00
	Sub Jumlah		**9.460.944.146,42**	**9.460.944.146,42**	**0,00**	**11.668.953.832,00**	**11.668.953.832,00**
7	Kab. Kuantan Singingi	Rokok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PKB	2.896.089.101,18	2.896.089.101,18	2.429.576.514,18	2.282.914.809,00	4.712.491.323,18
		BBN KB	0,00	0,00	3.407.273.686,00	1.844.067.543,00	5.251.341.229,00
		PBB KB	4.616.121.569,00	4.616.121.569,00	0,00	3.427.625.295,00	3.427.625.295,00

	Kab/Kota	Jenis	Utang Per 31 Desember 2020	Kep. Gubernur No : Kpts 2049/XII/2020 tgl. 21 Desember 2020 TW IV PKB, BBN KB, PBB KB, AP (Okt-Nov 2020)	Kep. Gubernur No : Kpts.1382/XII/2021 tgl. 20 Desember 2021 TW IV PKB, BBN KB, PBB KB, AP (Okt-Nov 2021)	Kep. Gubernur No : Kpts.Kpts: 756/IV/2022 tgl. 8 April 2022 TW IV PKB, BBN KB, PBB KB, AP (Desember 2021)	Utang Per 31 Desember 2021
1	2	3	4	5	6	7	8= 4 - 5 +6+7
		AP	0,00	0,00	0,00	137.949.546,00	137.949.546,00
	Sub Jumlah		**7.512.210.670,18**	**7.512.210.670,18**	**5.836.850.200,18**	**7.692.557.193,00**	**13.529.407.393,18**
8	Kab. Pelalawan	Rokok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PKB	1.876.893.289,01	1.876.893.289,01	0,00	2.621.692.273,00	2.621.692.273,00
		BBN KB	0,00	0,00	0,00	2.293.337.320,00	2.293.337.320,00
		PBB KB	0,00	0,00	0,00	5.469.631.544,00	5.469.631.544,00
		AP	400.197.813,00	400.197.813,00	0,00	416.247.799,00	416.247.799,00
	Sub Jumlah		**2.277.091.102,01**	**2.277.091.102,01**	**0,00**	**10.800.908.936,00**	**10.800.908.936,00**
9	Kab. Rokan Hulu	Rokok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PKB	3.850.647.051,08	3.850.647.051,08	0,00	2.898.396.417,00	2.898.396.417,00
		BBN KB	0,00	0,00	1.525.120.298,08	2.663.326.968,00	4.188.447.266,08
		PBB KB	3.884.654.446,00	3.884.654.446,00	0,00	3.897.994.565,00	3.897.994.565,00
		AP	0,00	0,00	0,00	111.501.727,00	111.501.727,00
	Sub Jumlah		**7.735.301.497,08**	**7.735.301.497,08**	**1.525.120.298,08**	**9.571.219.677,00**	**11.096.339.975,08**
10	Kab. Rokan Hilir	Rokok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PKB	3.233.254.509,71	3.233.254.509,71	0,00	2.550.469.650,00	2.550.469.650,00
		BBN KB	0,00	0,00	0,00	2.328.618.768,00	2.328.618.768,00
		PBB KB	2.005.591.279,00	2.005.591.279,00	0,00	4.219.701.256,00	4.219.701.256,00
		AP	21.676.551,00	21.676.551,00	0,00	100.959.853,00	100.959.853,00
	Sub Jumlah		**5.260.522.339,71**	**5.260.522.339,71**	**0,00**	**9.199.749.527,00**	**9.199.749.527,00**
11	Kab. Siak	Rokok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PKB	3.718.665.318,98	3.718.665.318,98	4.286.515.160,98	2.801.884.135,00	7.088.399.295,98
		BBN KB	1.673.279.242,00	1.673.279.242,00	4.180.860.151,00	2.350.041.318,00	6.530.901.469,00
		PBB KB	8.369.765.005,00	8.369.765.005,00	0,00	7.800.707.346,00	7.800.707.346,00
		AP	59.166.760,00	59.166.760,00	0,00	373.733.355,00	373.733.355,00
	Sub Jumlah		**13.820.876.325,98**	**13.820.876.325,98**	**8.467.375.311,98**	**13.326.366.154,00**	**21.793.741.465,98**
12	Kab. Kep. Meranti	Rokok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PKB	2.136.591.253,13	2.136.591.253,13	0,00	1.652.255.912,00	1.652.255.912,00
		BBN KB	0,00	0,00	0,00	1.294.588.671,00	1.294.588.671,00
		PBB KB	2.553.903.888,00	2.553.903.888,00	0,00	2.638.372.881,00	2.638.372.881,00

	Kab/Kota	Jenis	Utang Per 31 Desember 2020	Kep. Gubernur No : Kpts 2049/XII/2020 tgl. 21 Desember 2020 TW IV PKB, BBN KB, PBB KB, AP (Okt-Nov 2020)	Kep. Gubernur No : Kpts.1382/XII/2021 tgl. 20 Desember 2021 TW IV PKB, BBN KB, PBB KB, AP (Okt-Nov 2021)	Kep. Gubernur No : Kpts.Kpts: 756/IV/2022 tgl. 8 April 2022 TW IV PKB, BBN KB, PBB KB, AP (Desember 2021)	Utang Per 31 Desember 2021
1	2	3	4	5	6	7	8= 4 - 5 +6+7
		AP	43.989.715,00	43.989.715,00	0,00	84.575.171,00	84.575.171,00
	Sub Jumlah		**4.734.484.856,13**	**4.734.484.856,13**	**0,00**	**5.669.792.635,00**	**5.669.792.635,00**
		Jumlah	**89.425.557.664,08**	**89.425.557.664,08**	**24.740.087.694,38**	**125.882.517.944,00**	**150.622.605.638,38**

2) Utang Transfer Bagi Hasil Retribusi merupakan Retribusi Izin Usaha Perikanan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Perikanan. Dari retribusi tersebut, 30% dibagikan untuk Kabupaten/ Kota penghasil yang belum ditransfer Pemerintah Provinsi Riau, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Saldo 31-Des-14
Kabupaten Bengkalis	750.000,00	1.830.000,00	1.470.000,00	4.050.000,00
Kabupaten Indragiri Hilir	6.555.000,00	19.920.000,00	83.442.000,00	109.917.000,00
Kabupaten Rokan Hilir	20.269.500,00	16.623.000,00	14.274.000,00	51.166.500,00
Kabupaten Kepulauan Meranti	997.500,00	585.000,00	660.000,00	2.242.500,00
Jumlah	**28.572.000,00**	**38.958.000,00**	**99.846.000,00**	**167.376.000,00**

Saldo utang transfer bagi hasil retribusi per 31 Desember 2014 Rp167.376.000,00 sampai dengan per 31 Desember2021 tidak ada perkembangan.

3) Utang Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya terdiri dari:

Kab/ Kota	Jembatan Timbang		Pas Pelabuhan Roro			Saldo 31 Des 2014
	2012	2013	2011	2012	2013	
1	2	3	4	5	6	7=2+3+4+5+6
Kota Dumai	0,00	0,00	18.272.720,00	41.092.980,00	38.284.880,00	97.650.580,00
Kabupaten Bengkalis	0,00	0,00	17.395.852,00	34.621.920,00	34.694.760,00	86.712.532,00
Kabupaten Rokan Hulu	224.940.000,00	535.326.000,00	0,00	0,00	0,00	760.266.000,00

Kab/ Kota	Jembatan Timbang		Pas Pelabuhan Roro			Saldo 31 Des 2014
	2012	2013	2011	2012	2013	
1	2	3	4	5	6	7=2+3+4+5+6
Jumlah	**224.940.000,00**	**535.326.000,00**	**35.668.572,00**	**75.714.900,00**	**72.979.640,00**	**944.629.112,00**

Saldo utang transfer bagi hasil pendapatan lainnya per 31 Desember 2014 Rp944.629.112,00 sampai dengan per 31 Desember 2021 tidak ada perkembangan.

5.5.41 Kewajiban Jangka Pendek - Utang Jangka Pendek Lainnya

Jumlah Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp61.480.455,00 dan Rp144.632.655,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	31-Des-20	Mutasi (Rp)		30-Des-21
	(Rp)	Penambahan	Pengurangan	(Rp)
Utang Klaim Pelayanan Jamkesda Provinsi Riau Kepada Pihak Ketiga	61.552.200,00	0,00	61.552.200,00	0,00
Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi	21.600.000,00	0,00	21.600.000,00	0,00
Utang PFK Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	61.480.455,00	0,00	0,00	61.480.455,00
Jumlah	**144.632.655,00**	**0,00**	**83.152.200,00**	**61.480.455,000**

Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan reklas pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2021. Penjelasan masing-masing Utang Jangka Pendek Lainnya tersebut adalah sebagai berikut:

a) Utang jangka pendek lainnya merupakan kewajiban Provinsi Riau atas barang/jasa yang telah diterima dari pihak ketiga namun sampai dengan 31 Desember 2020 belum dibayar. Nilai utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2020 berupa klaim pelayanan kesehatan dan obat pasien JAMKESDA sebesar Rp61.552.200,00 telah dibayar pada Tahun 2021 yang terdiri dari:

Uraian	31-Des-20 (Rp)	Mutasi (Rp)		31-Des-21 (Rp)
		Penambahan	Pengurangan	
Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad	0,00	0,00	0,00	0,00
Rumah Sakit Jiwa Tampan	0,00	0,00	0,00	0,00
Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi	0,00	0,00	0,00	0,00
Eka Hospital	452.200,00	0,00	452.200,00	0,00
RSCM	0,00	0,00	0,00	0,00
PMC	61.100.000,00	0,00	61.100.000,00	0,00
TOTAL UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA	**61.552.200,00**	**0,00**	**61.552.200,00**	**0,00**

b) Utang kelebihan pembayaran retribusi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada tahun 2020 sebesar Rp21.600.000,00 telah dibayar pada Tahun 2021.

Rincian mutasi tambah dan kurang Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Uraian	31-Des-20 (Rp)	Mutasi (Rp)		31-Des-21 (Rp)
		Penambahan	Pengurangan	
Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi	21.600.000,00	0,00	21.600.000,00	0,00
Jumlah	**21.600.000,00**	**0,00**	**21.600.000,00**	**0,00**

c) Potongan Pajak Tahun Anggaran 2010 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah diterbitkan SKTJM tanggal 07 Juni 2013 yang merupakan reklasifikasi dari pengembalian investasi yakni:

Uraian	31-Des-20 (Rp)	Mutasi (Rp)		31-Des-21 (Rp)
		Penambahan	Pengurangan	
Utang Pajak perangkat daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	61.480.455,00	0,00	0,00	61.480.455,00
Jumlah	**61.480.455,00**	**0,00**	**0,00**	**61.480.455,00**

Utang Pajak Perangkat Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah belum dibayar hingga saat ini disebabkan karena pihak yang dianggap bertanggung jawab telah pensiun dan tidak berada di kota Pekanbaru.

5.5.42 Ekuitas

Ekuitas Akhir per 31 Desember 2021 sebesar Rp32.347.067.347.275,80 diperoleh dari ekuitas awal sebesar Rp32.811.787.287.703,70 ditambah dengan defisit LO sebesar (Rp105.411.318.321,38) ditambah dengan dampak kumulatif perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar sebesar (Rp359.308.622.106,62) **(Catatan 5.4)**.

5.6 PENJELASAN LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai Saldo Awal Kas, Penerimaan Kas, Pengeluaran Kas dan Saldo Akhir Kas selama satu tahun anggaran. Laporan Arus Kas disajikan dengan pendekatan atas Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Investasi Non keuangan, Aktivitas Pembiayaan, dan Aktivitas Non Anggaran sampai dengan 31 Desember 2021. Arus Kas Bersih selama tahun anggaran berkenaan, ditambah saldo awal Kas Daerah, merupakan saldo akhir Kas Daerah yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Bendahara Pengeluaran.

Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum, maka Laporan Arus Kas Badan Layanan umum Daerah dikonsolidasi dengan Bendahara Umum Daerah mulai tahun 2018.

Saldo Akhir kas yang dikuasai BUD tidak termasuk sisa dana kas yang dikuasai oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran pada OPD.

Sisa kas di bendahara OPD adalah sisa dana yang berasal dari arus kas keluar BUD sesuai dengan SP2D dan/atau penerimaan daerah yang belum disetor ke BUD. Namun demikian sisa dana kas di bendahara OPD merupakan bagian dari kas daerah yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum disetor ke BUD.

Laporan Arus Kas meliputi:

1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas dari Aktivitas Operasi mencerminkan informasi mengenai kemampuan dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari pihak ketiga. Aktivitas operasi Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021 dan 2020 sebagai berikut:

Uraian	31 Des 2021 (Rp)	31 Des 2020 (Rp)
Arus Kas Masuk	9.382.977.510.805,44	8.622.784.660.906,57
Arus Kas Keluar	7.913.249.088.197,18	7.253.460.881.024,79
Jumlah	**1.469.728.422.608,26**	**1.369.323.779.881,78**

Realisasi Arus Kas dari Aktivitas Operasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp 1.469.728.422.608,26 atau naik sebesar Rp-100.404.642.726,48 dibanding dengan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.369.323.779.881,78 yang dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut:

1) Arus Kas Masuk

Saldo Arus Kas Masuk untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp 9.382.977.510.805,44 merupakan arus kas masuk atas aktivitas operasi terdiri dari:

5.6.1 Pendapatan Pajak Daerah

Arus Kas Masuk dari Pendapatan Pajak Daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp 3.327.500.336.694,85 Arus kas masuk tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp 544.078.972.751,85 atau 8,90 % jika dibandingkan dengan arus kas masuk dari Pendapatan Pajak Daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 sebesar Rp 2.783.421.363.943,00.. Rincian arus kas masuk dari Pendapatan Pajak Daerah sampai dengan 31 Desember 2021 dengan rincian:

Uraian	31 Des 2021 (Rp)	31 Des 2020 (Rp)
Pajak Kendaraan Bermotor	1.224.103.784.037,00	1.109.838.807.024,00
Pajak Kendaraan di Atas Air	0,00	9.877.800,00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	887.056.637.195,00	558.925.504.891,00
Bea Balik Nama Kendaraan Diatas Air	0,00	0,00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	764.782.831.375,85	645.163.654.363,00
Pajak Air Permukaan	44.805.652.197,00	34.695.707.476,00
Pajak Rokok	406.751.431.890,00	434.787.812.389,00
Jumlah	**3.327.500.336.694,85**	**2.783.421.363.943,00**

5.6.2 Pendapatan Retribusi

Arus Kas Masuk dari Pendapatan Retribusi Daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp 13.790.515.597,00. Arus kas masuk tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp 1.310.124.347,00 atau 4,99 % jika dibandingkan dengan arus kas masuk dari Pendapatan Retribusi Daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 sebesar Rp 12.480.391.250,00. Rincian

arus kas masuk dari Pendapatan Retribusi Daerah sampai dengan 31 Desember 2021 dengan rincian:

Uraian	31 Des 2021 (Rp)	31 Des 2020 (Rp)
Retribusi Pelayanan Kesehatan	2.294.591.000,00	1.841.654.150,00
Retribusi Pelayanan Pendidikan	16.550.000,00	28.640.000,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	5.346.827.820,00	5.819.348.050,00
Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggarahan/villa	76.175.000,00	65.500.000,00
Retribusi Penyeberangan Di Air	2.681.418.000,00	2.261.851.000,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	2.919.019.477,00	1.762.053.500,00
Retribusi Usaha Pertanian	0,00	83.010.000,00
Retribusi Usaha Perikanan	106.343.300,00	111.024.550,00
Retribusi Izin Trayek	0,00	153.830.000,00
Retribusi Izin Kerja	0,00	353.480.000,00
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	1.000.000,00	0,00
Retribusi Tempat Khusus Parkir	3.110.000,00	0,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	0,00	0,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.340.000,00	0,00
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	112.400.000,00	0,00
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	231.741.000,00	0,00
Jumlah	**13.790.515.597,00**	**12.480.391.250,00**

5.6.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Arus Kas Masuk dari Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp 117.417.430.069,00. Arus kas masuk tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp 28.974.928.318,00 atau 14,08% jika dibandingkan dengan arus kas masuk dari Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 sebesar Rp 88.442.501.751,00. Rincian arus kas masuk dari Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sampai dengan 31 Desember 2021 dengan rincian:

Uraian	31 Des 2021(Rp)	31 Des 2020 (Rp)
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	**0,00**	**88.442.501.751,00**
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT. Bank Riau Kepri	0,00	72.111.540.339,00

Uraian	31 Des 2021(Rp)	31 Des 2020 (Rp)
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT. PER	0,00	0,00
Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada PT. PIR	0,00	0,00
Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada PT. ASKRIDA	0,00	188.102.294,00
Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada PT. BSP	0,00	14.968.190.889,00
Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada PT. SPKR/JAMKRIDA	0,00	0,00
Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada PT. SPR	0,00	1.174.668.229,00
Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Koperasi	**0,00**	**0,00**
Bagian Sisa Hasil Usaha atas Penyertaan Modal Koperasi	0,00	0,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta (SHU SWAMITRA Bukopin Tahun Buku 2020)	0,00	0,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	106.036.309.281,00	0,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	11.381.120.788,00	0,00
Jumlah	**117.417.430.069,00**	**88.442.501.751,00**

5.6.4 Lain-lain PAD yang sah

Arus Kas Masuk dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp 591.736.281.682,59 Arus kas masuk tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp 142.944.694.129,02 atau 13.74% jika dibandingkan dengan arus kas masuk dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 sebesar Rp 448.791.587.553,57. Rincian arus kas masuk dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sampai dengan 31 Desember 2021 dengan rincian

Uraian	31 Des 2021 (Rp)	31 Des 2020 (Rp)
Penerimaan Jasa Giro	0,00	7.790.782.252,80
Pendapatan Bunga	0,00	53.813.194.054,44
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	64.590.278.982,37	3.349.100.000,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.316.823.457,38	2.244.947.719,40
Pendapatan Denda Pajak	0,00	40.514.813.811,00
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	0,00	1.559.643.705,00
Pendapatan dari Pengembalian	0,00	8.819.408.810,92

Uraian	31 Des 2021 (Rp)	31 Des 2020 (Rp)
Pendapatan BLUD	398.596.404.087,90	325.064.154.861,65
Penerimaan Lain-Lain	0,00	5.367.561.799,23
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Koperasi	0,00	267.980.539,13
Hasil Kerja Sama Daerah	10.132.000,00	0,00
Jasa Giro pada Kas Daerah	8.468.442.839,00	0,00
Jasa Giro pada Kas di Bendahara	894.478.561,00	0,00
Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	256.516.428,00	0,00
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	99.509.107,84	0,00
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	67.663.558.590,10	0,00
Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	44.097.290.577,00	0,00
Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	1.408.461.324,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan	74.281.326,00	0,00
Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	4.258.868.416,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	1.079.000,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	156.986,00	0,00
Jumlah	**591.736.281.682,59**	**448.791.587.553,57**

5.6.5 Dana Bagi Hasil Pajak

Saldo Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp 1.394.547.926.246,00 merupakan arus masuk sampai dengan 31 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	31 Des 2021 (Rp)	31 Des 2020 (Rp)
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	1.155.819.524.234,00	521.098.325.997,00
DBH PPh Pasal 21	229.147.667.300,00	0,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	9.580.656.700,00	0,00
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	78.012,00	0,00
Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21	0,00	236.113.297.970,00
Bagi Hasil dari Upah Pungut Pajak Bumi dan Bangunan (UP-PBB)	0,00	-
Bagi Hasil dari Cukai Tembakau	0,00	1.363.700,00
Jumlah	**1.394.547.926.246,00**	**757.212.987.667,00**

Arus kas masuk tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp 637.334.938.579,00 atau 29,62% jika dibandingkan dengan arus kas masuk dari Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 sebesar Rp 757.212.987.667,00.

5.6.6 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Saldo Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp 446.588.672.066,00 merupakan arus masuk sampai dengan 31 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	31 Des 2021 (Rp)	31 Des 2020 (Rp)
Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan		367.847.900,00
Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan		22.226.166.219,00
Bagi Hasil dari Dana Reboisasi		4.772.087.046,00
Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-rent)		720.610.395,00
Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)		7.799.214.533,00
Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi		1.024.329.791.086,00
Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi		15.469.674.385,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	357.703.979.000,00	
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	11.406.366.606,00	
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	939.635.175,00	
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	11.394.865.371,00	
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	56.235.083.743,00	
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)	1.520.990.334,00	
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	7.387.751.837,00	
Jumlah	**446.588.672.066,00**	**1.075.685.391.564,00**

Arus kas masuk tersebut mengalami penurunan sebesar minus Rp 629.096.719.498,00 atau 41,33% jika dibandingkan dengan arus kas masuk dari Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 sebesar Rp1.075.685.391.564,00.

5.6.7 Dana Alokasi Umum

Saldo Penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 1.455.383.959.000,00 Arus kas masuk tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp 23.034.681.000,00 atau 0.80% jika

dibandingkan dengan arus kas masuk dari Dana Alokasi Umum (DAU) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 sebesar Rp 1.432.349.278.000,00. Rincian arus kas masuk dari Dana Alokasi Umum (DAU) sampai dengan 31 Desember 2021 dengan rincian Jumlah dan Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	31 Des 2021 (Rp)	31 Des 2020 (Rp)
Dana Alokasi Umum (DAU)	1.455.383.959.000,00	1.432.349.278.000,00
Jumlah	**1.455.383.959.000,00**	**1.432.349.278.000,00**

5.6.8 Dana Alokasi Khusus

Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 1.995.755.980.446,00 Arus kas masuk tersebut mengalami penurunan sebesar minus Rp 5.150.560.728,00 atau 0,13% jika dibandingkan dengan arus kas masuk dari Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 sebesar Rp 2.000.906.541.174,00. Rincian arus kas masuk dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sampai dengan 31 Desember 2021 dengan rincian Jumlah dan Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	31 Des 2021 (Rp)	31 Des 2020 (Rp)
Dana Alokasi Khusus Fisik	**254.119.352.389,00**	**254.332.990.347,00**
DAK Fisik Reguler	194.875.310.675,00	116.425.943.887,00
DAK Fisik Penugasan	59.244.041.714,00	136.311.685.460,00
DAK Fisik Afirmasi	0,00	1.595.361.000,00
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	**1.741.636.628.057,00**	**1.746.573.550.827,00**
DAK Non Fisik-BOS Reguler	1.430.410.284.000,00	1.476.440.020.000,00
DAK Non Fisik-BOS Afirmasi	18.060.000.000,00	0,00
DAK Non Fisik-BOS Kinerja	9.050.000.000,00	0,00
DAK Non Fisik-TPG PNSD	275.564.331.000,00	251.012.907.000
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.473.000.000,00	655.500.000
DAK Non Fisik-TKG PNSD	892.302.000,00	1.411.413.000
DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	701.146.177,00	2.450.000.000
DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya	1.301.400.864,00	0,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	0,00	12.337.128.527,00
DAK Non Fisik-PK2UKM	2.131.649.256,00	2.113.111.300,00

Uraian	31 Des 2021 (Rp)	31 Des 2020 (Rp)
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.064.817.760,00	153.471.000,00
DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	533.102.000,00	0,00
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	454.595.000,00	0,00
Jumlah	**1.995.755.980.446,00**	**2.000.906.541.174,00**

5.6.9 Dana Penyesuaian

Dana Penyesuaian Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp32.468.699.000,00. Arus kas masuk tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp12.225.081.000,00 atau 23,19% jika dibandingkan dengan arus kas masuk dari Dana Penyesuaian untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 sebesar Rp20.243.618.000,00. Rincian arus kas masuk dari Dana Penyesuaian sampai dengan 31 Desember 2021 dengan rincian:

Uraian	31 Des 2021 (Rp)	31 Des 2020 (Rp)
Dana Penyesuaian	32.468.699.000,00	20.243.618.000,00
Jumlah	**32.468.699.000,00**	**20.243.618.000,00**

5.6.10 Lain – Lain Pendapatan yang Sah

Saldo Lain – Lain Pendapatan yang Sah sebesar Tahun Anggaran 2021 Rp 7.787.710.004,00. Arus kas masuk tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp 4.536.710.000,00 atau 41,10% jika dibandingkan dengan arus kas masuk dari Lain – Lain Pendapatan yang Sah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 sebesar Rp3.251.000.004,00. Rincian arus kas masuk dari Lain – Lain Pendapatan yang Sah sampai dengan 31 Desember 2021 dengan rincian:

Uraian	31 Des 2021 (Rp)	31 Des 2020 (Rp)
Pendapatan Hibah dari Pemerintah.	2.735.000.004,00	0,00
Pendapatan Hibah dari PT. Jasa Raharja	0,00	3.251.000.004,00
Pendapatan lainnya	0,00	0,00
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	5.052.710.000,00	0,00
Jumlah	**7.787.710.004,00**	**3.251.000.004,00**

2) Arus Keluar Kas

Saldo Arus Keluar Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 7.913.249.088.197,18 Arus kas keluar tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp 659.788.207.172,39 atau 4,35% jika dibandingkan dengan arus kas keluar untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 sebesar Rp7.253.460.881.024,79. Rincian arus kas keluar atas aktivitas operasi sampai dengan 31 Desember 2021 terdiri dari:

Indeks	Uraian	31 Des 2021 (Rp)	31 Des 2020 (Rp)
	ARUS KELUAR KAS		
5.6.11	Belanja Pegawai	2.213.182.776.667,00	2.153.065.317.382,00
5.6.12	Belanja Barang dan Jasa	2.448.186.175.191,09	2.077.147.295.142,17
5.6.13	Hibah	1.349.812.571.315,43	1.270.812.795.429,70
5.6.14	Bantuan Sosial	51.810.530.000,00	29.005.785.174,00
5.6.15	Belanja Tak Terduga	245.808.686,00	99.091.636.754,00
5.6.16	Bagi Hasil Pajak Daerah ke Kab/Kota	1.498.191.320.346,70	1.194.074.600.669,92
5.6.17	Bantuan Keuangan kepada Kab/Kota	193.927.652.104,96	295.460.920.473,00
5.6.18	Bantuan Keuangan kepada Desa	157.892.253.886,00	134.802.530.000
	Jumlah	**7.913.249.088.197,18**	**7.253.460.881.024,79**

2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan Tahun Anggaran 2021 dan 2020 sebesar minus Rp 1.018.431.081.153,37 dan minus Rp 919.205.405.570,52 merupakan arus kas bersih yang berasal dari aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas selama Tahun Anggaran 2021 dan 2020 yang dilaksanakan dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi derngan tujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah Provinsi Riau kepada masyarakat di masa yang akan datang, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	31 Des 2021 (Rp)	31 Des 2020 (Rp)
Arus Masuk Kas	23.997.100,00	40.188.000,00
Arus Keluar Kas	1.018.455.078.253,37	919.245.593.570,52
	(1.018.431.081.153,37)	**(919.205.405.570,52)**

Arus Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan bersumber dari :

a) Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan

Saldo Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 23.997.100,00 Arus Kas Masuk Aktivitas Investasi Non Keuangan tersebut mengalami penurunan sebesar minus Rp 16.190.900,00 atau 25,23% jika dibandingkan dengan arus kas masuk untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 sebesar sebesar Rp40.188.000,00. Rincian arus kas masuk atas aktivitas inventasi non keuangan sampai dengan 31 Desember 2021, meliputi :

Indeks	Uraian	31 Des 2021 (Rp)	31 Des 2020 (Rp)
5.6.19	Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin	23.997.100,00	40.188.000,00
	Jumlah	**23.997.100,00**	**40.188.000,00**

b) Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan

Saldo Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 1.018.455.078.253,37 Arus Kas Keluar Aktivitas Investasi Non Keuangan tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp 99.209.484.682,85 atau 5,12% jika dibandingkan dengan arus kas keluar untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 sebesar Rp919.245.593.570,52. Rincian arus kas keluar atas aktivitas inventasi non keuangan sampai dengan 31 Desember 2021 terdiri dari:

Indeks	Uraian	31 Des 2021 (Rp)	31 Des 2020 (Rp)
5.6.20	Belanja Tanah	801.221.880,00	10.060.769.600,00
5.6.21	Belanja Peralatan dan Mesin	259.296.406.464,29	281.774.431.712,00
5.6.22	Belanja Gedung dan Bangunan	239.980.341.418,23	172.213.274.099,21
5.6.23	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	470.432.878.695,85	403.654.823.625,31
5.6.24	Belanja Aset Tetap Lainnya	47.944.229.795,00	51.395.454.534,00
5.6.25	Belanja Aset Lainnya	0,00	146.840.000,00
	Jumlah	**1.018.455.078.253,37**	**919.245.593.570,52**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada Pernyataan Nomor 03 Paragraf 24:

”arus masuk kas dari aktivitas investasi aset non keuangan terdiri dari penjualan aset tetap dan penjualan aset lainnya”, sehingga laporan arus kas pada arus kas masuk dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terdapat realisasi Pendapatan sebesar Rp 591.736.281.682, 59 yang direklasifikasi ke arus kas masuk dari aktivitas investasi non keuangan.

3. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pembiayaan Tahun Anggaran 2021 dan 2020 sebesar Rp 985.766.821,00 dan Rp 349.500.000,00 yang merupakan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan Tahun Anggaran 2021 dan 2020 yang terdiri dari:

Uraian	31 Des 2021 (Rp)	31 Des 2020 (Rp)
Arus Masuk Kas	985.766.821,00	349.500.000,00
Arus Keluar Kas	0.00	0,00
Jumlah	**985.766.821,00**	**349.500.000,00**

a) Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pembiayaan

Saldo Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pembiayaan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 985.766.821,00 Arus Kas Masuk Aktivitas Pembiayaan tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp 636.266.821,00, atau 47,65% jika dibandingkan dengan arus kas masuk untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 sebesar Rp349.500.000,00. Rincian arus kas masuk atas Aktivitas Pembiayaan sampai dengan 31 Desember 2021 bersumber dari:

Indeks	Uraian	31 Des 2021 (Rp)	31 Des 2020 (Rp)
5.6.26	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	985.766.821,00	349.500.000,00
	Jumlah	**985.766.821,00**	**349.500.000,00**

b) Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pembiayaan

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pembiayaan tahun 2021 dan 2020 sebesar Rp0,00.

4. Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran

Arus Masuk kas dari Aktivitas Non Anggaran tahun 2021 dan 2020 sebesar minus Rp 4.361.693.767,72 dan minus Rp 1.136.392.334,00 yang merupakan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan dengan rincian sebagai berikut tahun 2021 dan 2020 sebesar:

Uraian	31 Des 2021 (Rp)	31 Des 2020 (Rp)
Arus Masuk Kas	288.887.842.348,00	602.210.060.046,00
Arus Keluar Kas	293.249.536.115,72	603.346.452.380,00
Jumlah	**(4.361.693.767,72)**	**(1.136.392.334,00)**

Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran bersumber dari:

a) Arus Masuk Kas dari Aktivitas Non Anggaran

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Non Anggaran tahun 2021 dan 2020 sebesar Rp 288.887.842.348,00 dan Rp 602.210.060.046,00 diperoleh dari:

Indeks	Uraian	31 Des 2021 (Rp)	31 Des 2020 (Rp)
5.6.27	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	282.127.395.009,00	545.171.306.114,00
5.6.28	Penerimaan Dana Talangan BLUD	0,00	20.619.478.702,88
5.6.29	Penerimaan Sisa Kas Bendahara Pengeluaran Tahun Lalu	6.714.553.539,00	35.717.179.407,00
5.6.30	Penerimaan Kas Bendahara Penerimaan Tahun Lalu	45.853.700,00	13.576.700,00
5.6.31	Penerimaan Sisa Kas Lainnya Tahun Lalu	40.000,00	
5.6.32	Beban Dibayar Dimuka tahum sebelumnya	0,00	688.519.122,12
	Jumlah	**288.887.842.348,00**	**602.210.060.046,00**

b) Arus Keluar Kas dari Aktivitas Non Anggaran

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Non Anggaran tahun 2021 dan 2020 sebesar Rp. 293.249.536.115,72 dan Rp 603.346.452.380,00 diperoleh dari:

Indeks	Uraian	31 Des 2021 (Rp)	31 Des 2020 (Rp)
5.6.33	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	281.885.179.373,00	545.171.266.114,00
5.6.34	Pengembalian Dana Talangan BLUD	0,00	51.412.555.127,00
5.6.35	Sisa Kas Bendahara Pengeluaran Tahun Berjalan	11.159.549.221, 72	6.714.593.639,00
5.6.36	Sisa Kas Bendahara Penerimaan Tahun Berja	21.908.350,00	45.583.700,00
5.6.37	Sisa Kas Lainnya Tahun Berjalan	182.859.171,00	2.183.800,00
5.6.38	Pengeluaran PFK tahun sebelumnya	40.000	2.183.800,00
	Jumlah	**293.249.536.115,72**	**603.346.452.380,00**

5. Kenaikan/ Penurunan Kas

Kenaikan/ Penurunan Kas selama periode berjalan tahun 2021 dan 2020 sebesar:

Uraian	31 Des 2021 (Rp)	31 Des 2020 (Rp)
Kenaikan (Penurunan) Kas selama Periode	447.921.414.508,17	449.331.481.977,26
Jumlah	**447.921.414.508,17**	**449.331.481.977,26**

Kenaikan/ Penurunan Kas dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	31 Des 2021 (Rp)	31 Des 2020 (Rp)
Arus kas dari aktivitas operasi	1.469.728.422.608,26	1.369.323.779.881,78
Arus kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan	(1.018.431.081.153,37)	(919.205.405.570,52)
Arus kas dari aktivitas pembiayaan	985.766.821,00	349.500.000,00
Arus kas dari aktivitas non anggaran	(4.361.693.767,72)	(1.136.392.334,00)
Kenaikan/Penurunan Kas	**447.921.414.508,17**	**449.331.481.977,26**

5.6.39 Saldo Awal Kas tahun 2021 dan 2020 masing - masing sebesar Rp 524.923.582.106,73 dan Rp 75.592.100.129,47.

5.6.40 Saldo Akhir Kas Rekening BUD, BLUD dan BOS tahun 2021 dan 2020 masing- masing sebesar Rp 972.844.996.614,90 dan Rp 524.923.582.106,73 merupakan kenaikan (penurunan) bersih kas selama periode ditambah dengan saldo awal di kas daerah. Rincian kas di BUD dapat dilihat pada **lampiran 2.a** dan kas di BLUD dapat dilihat pada **lampiran 2.d**.

5.6.41 Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp 11.159.549.221,72 adalah jumlah keseluruhan uang dibendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2021 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	3,935,044,145.00
	Dinas Pendidikan (BOS)	6.779.532.116,00
2	Dinas Kesehatan	123,957,249.00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan.	31,639,026.72
4	Dinas Pertenakan dan Kesehatan Hewan	14,400.00
5	Sekretariat Daerah	257,611,908.00
6	Badan Pendapatan Daerah	20,600,127.00
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	11,150,250.00
	Jumlah	**11.159.549.221,72**

5.6.42 Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp 21.908.350,00 adalah jumlah keseluruhan uang dibendahara Penerimaan per 31 Desember 2021.

5.6.43 Saldo Akhir Kas Lainnya sebesar Rp 182.859.171,00 adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Des 2021 (Rp)	Keterangan
Dinas Pendidikan	182,814,899.00	Bunga BOS
Dinas Kesehatan	40,000.00	Utang PFK
Dinas Kelautan dan Perikanan	4,272.00	Jasa Giro
Jumlah	**182,859,171.00**	

Saldo kas daerah pada akhir tahun 2021 dan 2020 yang berada dalam penguasaan BUD, Bendahara OPD/BLUD dan BOS sebagai berikut:

Uraian	31 Des 2021 (Rp)	31 Des 2020 (Rp)
Kas di BUD, BLUD dan BOS	972.844.996.614,90	524.923.582.106,73
Kas di Bendahara Pengeluaran	11.159.549.221,72	6.714.553.639,00
Kas di Bendahara Penerimaan	21.908.350,00	45.853.700,00
Kas di Lainnya	182.859.171,00	40.000,00
Jumlah	**984.209.313.357,62**	**531.684.029.445.73**

Kas di BUD terdiri dari:

Uraian	31 Des 2021 (Rp)	31 Des 2020 (Rp)
Bank	845.931.634.123,86	453.718.643.193,59
Deposito	0,00	0,00
Hasil Rekonsiliasi	0,00	0,00
Jumlah	**845.931.634.123,86**	**453.718.643.193,59**

Penjelasan Selisih Laporan Realisasi Anggaran dengan Laporan Arus Kas

Terdapat perbedaan pendapatan antara Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan Laporan Arus Kas (LAK) dengan rincian sebagai berikut:

No	Akun	LRA (Rp)	LAK (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5 =3-4
	Pendapatan			
1	Lain-lain PAD yang sah	591.760.278.782,59	591.736.281.682,59	23.997.100.00
	Jumlah	**591.760.308.782,59**	**591.736.311.682,59**	**23.997.100.00**

Selisih antara Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas sebesar Rp 23.997.100,00 merupakan Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah yang terdapat selisih antara Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas sebesar Rp 23.997.100,00. Selisih ini merupakan pendapatan dari penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat sebesar Rp 23.997.100,00 yang direklasifikasi ke Arus Kas Masuk Aktivitas Investasi Non Keuangan.

BAB 6

PENJELASAN ATAS INFORMASI - INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Gambaran Umum Pemerintah Provinsi Riau

Pembentukan Provinsi Riau ditetapkan dengan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957, yang kemudian diundangkan dalam Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, Provinsi Riau memiliki luas area sebesar 87.023,66 km^2. Keberadaannya membentang dari lereng Bukit Barisan sampai dengan Selat Malaka, Terletak antara 01°05'00" Lintang Selatan sampai 02°25'00" Lintang Utara atau antara 100°00'00" Bujur Timur 105°05'00" Bujur Timur. Daerah Riau beriklim tropis basah rata-rata curah hujan berkisar antara 1.000-3.000 mm per tahun yang dipengaruhi oleh musim kemarau dan musim hujan. Di daerah daratan terdapat 15 sungai, diantaranya ada 4 sungai yang mempunyai arti penting sebagai prasarana perhubungan yaitu:

a. Sungai Siak (300 Km) dengan kedalaman 8 – 12 m;
b. Sungai Rokan (400 Km) dengan kedalaman 6 – 8 m;
c. Sungai Kampar (400 Km) dengan kedalaman lebih kurang 6 m; dan
d. Sungai Indragiri (500 Km) dengan kedalaman 6 – 8 m.

Provinsi Riau memiliki 12 Kabupaten/ Kota dengan 169 kecamatan dan 1.875 Desa/ Kelurahan, dapat dilihat pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1

Luas Wilayah Kabupaten/ Kota Provinsi Riau

Kabupaten/ Kota	Ibukota	Luas (km^2)	Persentase Luas	Kecamatan	Desa/ Kelurahan
Kuantan Singingi	Teluk Kuantan	5.259,36	6,04	15	229
Indragiri Hulu	Rengat	7.723,80	8,88	14	194
Indragiri Hilir	Tembilahan	12.614,78	14,50	20	236
Pelalawan	Pangkalan Kerinci	12.758,45	14,66	12	118
Siak	Siak Sri Indrapura	8.275,18	9,51	14	131
Kampar	Bangkinang	10.983,47	12,62	21	250
Rokan Hulu	Pasir Pangaraian	7.588,13	8,72	16	145
Bengkalis	Bengkalis	6.975,41	8,02	11	155

Kabupaten/ Kota	Ibukota	Luas (km^2)	Persentase Luas	Kecamatan	Desa/ Kelurahan
Rokan Hilir	Bagan Siapi-Api	8.881,59	10,21	18	198
Kepulauan Meranti	Selat Panjang	3.707,84	4,26	9	103
Pekanbaru	Pekanbaru	632,27	0,73	12	83
Dumai	Dumai	1.623,38	1,87	7	33
	Jumlah	**87.023,66**	**100,00**	**169**	**1.875**

6.2 Kepemimpinan Daerah

Pemerintah Provinsi Riau berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 460 Pekanbaru. Dalam pelaksanaan tugasnya, Gubernur dibantu oleh Sekretaris Daerah serta Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Riau adalah sebagai berikut.

	2021	2020
Gubernur Riau	Syamsuar	Syamsuar
Wakil Gubernur	Edy Nasution	Edy Nasution
Sekretaris Daerah	S.F Haryanto	Yan Prana Jaya Indra Rasyid

Visi Riau pada RPJMD 2019-2024 yaitu "***Terwujudnya Provinsi Riau Sebagai Pusat Perekonomian & Kebudayaan Melayu Dalam Lingkungan Masyarakat yang Agamis, Sejahtera Lahir dan Bathin di Asia Tenggara Tahun 2025***".

Arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah di Provinsi Riau seperti yang tercantum di dalam dokumen RPJMD Provinsi Riau 2019-2024 yang diuraikan ke dalam 12 Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Provinsi Riau sebagai pusat kegiatan perekonomian adalah mendorong dan membangun kegiatan dan prasarana ekonomi serta menciptakan pusat-pusat lintasan darat, laut dan udara bagi Pulau Sumatera, Indonesia, dan Kawasan Selat Malaka;

2. Mewujudkan perekonomian yang berkelanjutan dan berdaya saing adalah meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dan pendapatan daerah berbasis pada potensi sumber daya daerah terbarukan melalui pengembangan sektor ekonomi unggulan di luar minyak dan gas serta ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal dan masyarakat;
3. Mewujudkan keseimbangan pembangunan antar wilayah adalah mempersempit disparitas pembangunan antar wilayah melalui pendistribusian pembangunan pusat-pusat kegiatan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, mengintegrasikan infrastruktur transportasi antar moda, mendistribusikan pembangunan prasarana wilayah lainnya, dan pembangunan sumberdaya manusia yang seimbang antar wilayah di Provinsi Riau;
4. Mewujudkan kerja sama pembangunan antar wilayah adalah membangun dan memperkuat koordinasi dan kerja sama pembangunan antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi, antar Provinsi, dan antar negara dalam bidang infrastruktur, ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan;
5. Meningkatkan kemampuan dan kompetensi pemerintah daerah adalah membangun dan memperkuat tata kelola pemerintah dan pembentukan aparatur yang berkemampuan tinggi, profesional, bersih dan beribawa;
6. Mewujudkan dukungan sistem informasi pembangunan yang handal adalah membangun sistem informasi pembangunan, pendapatan dan informasi yang lengkap, akurat dan dapat diakses oleh seluruh pihak melalui pemanfaatan teknologi maju guna mendukung pembangunan;
7. Mewujudkan masyarakat Riau yang mandiri dan sejahtera adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan sumber daya manusia Riau melalui pendidikan, pelayanan kesehatan, pembinaan etika, moral dan budaya serta meningkatkan kehidupan sosial-ekonomi melalui pemberdayaan dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan;
8. Mewujudkan kebudayaan melayu sebagai payung kebudayaan adalah penyediaan sarana dan prasarana pusat referensi dan pusat promosi kebudayaan melayu dan membina serta memberdayakan budaya melayu sebagai alat pemersatu tanpa menghilangkan jati diri dalam rangka mewujudkan masyarakat Riau yang maju, mandiri, dan berdaya saing;
9. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berakhlak adalah meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai moral dan agama dalam kehidupan masyarakat untuk mewujudkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan bermasyarakat yang toleran, rukun, dan damai;

10. Mewujudkan keamanan dan kenyamanan masyarakat adalah membangun kondisi yang kondusif bagi kehidupan dan kegiatan perekonomian, sosial, politik, dan kebudayaan bagi seluruh masyarakat di Provinsi Riau;
11. Mewujudkan lingkungan yang lestari adalah mengendalikan dan memulihkan kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan guna mendukung pembangunan Provinsi Riau yang berkelanjutan; dan
12. Mewujudkan masyarakat madani adalah mempercepat penegakan supremasi hukum, hak asasi manusia, dan kehidupan masyarakat yang demokratis.

Arah kebijakan pembangunan ekonomi Provinsi Riau Tahun 2021 dengan mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2021 adalah penyesuaian prioritas dan fokus pembangunan Provinsi Riau Tahun 2021 sebagai berikut :

1. Pengembangan Industri:
    a. Revitaliasi dan Kemitraan Industri Kecil Menengah dan Koperasi;
    b. Hilirisasi Industri yang Mengolah Hasil-hasil Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Kelautan dan Pertambangan;
    c. Pemulihan Produktivitas Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (SIKIM); dan
    d. Percepatan Kawasan Industri Prioritas.

2. Pengembangan Pertanian:
    a. Peningkatan Ketahanan Pangan;
    b. Pemenuhan Ketersediaan Pangan; dan
    c. Peningkatan Kegiatan Padat Karya.

3. Pengembangan Pariwisata:
    a. Penyelenggaraan even pariwisata berskala Nasional dan Internasional yang telah terbukti memiliki tingkat kunjungan Wisman dan Wisnus yang tinggi;
    b. Pembangunan infrastruktur difokuskan pada destinasi wisata yang telah siap untuk dikunjungi;
    c. Diversifikasi destinasi dan atraksi belum diperlukan pada masa pemulihan namun lebih di fokuskan pada penguatan destinasi dan atraksi wisata yang telah eksis.
    d. Penguatan sektor pariwisata melalui kerjasama dengan industri dan jasa kepariwisataan; dan
    e. Pemulihan usaha ekonomi kreatif terutama di sektor UMKM.

4. Infrastruktur Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan:
   a. Infrastruktur untuk mendukung pemulihan ekonomi sektor industri, pariwisata dan investasi;
   b. Infrastruktur untuk mendukung penguatan kesehatan masyarakat; dan
   c. Infrastruktur untuk pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Pengembangan SDM Yang Beriman, Berkualitas Dan Berdaya Saing:
   a. Peningkatan pelayanan dasar Pendidikan;
   b. Peningkatan pelayanan dasar kesehatan; dan
   c. Penurunan Tingkat Pengangguran.

Dalam melaksanakan tugasnya terdapat tiga organisasi perangkat staf pemerintahan daerah yaitu Sekretaris Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dan Inspektorat Daerah serta Dinas/ Lembaga/ Badan dan UPT yang terkait dalam menjalankan roda pemerintah dan pembangunan yang menjadi kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing 15.097 dan 15.191 orang, dengan rincian pada Tabel 6.3.

Tabel 6.2

Jumlah PNS Tahun 2017 s.d. 2021

Golongan	Tahun 2021	Tahun 2020	Tahun 2019	Tahun 2018	Tahun 2017
Golongan IV	3724	3.927	3.494	3.317	3.577
Golongan III	9623	9.637	9.287	8.697	10.344
Golongan II	1590	1.575	1.630	1.408	2.016
Golongan I	52	52	45	65	72
PPPK	0	0	0	0	0
Jumlah	**15.097**	**15.191**	**14.456**	**13.487**	**16.009**

Tabel 6.3

Rincian Pegawai Tahun 2021

GOLONGAN/ RUANG	ESELON				NON ESELON				JUMLAH
	I	II	III	IV	TENAGA FUNGSIONAL			PELAKSANA	
					PENDIDIKAN	KESEHATAN	LAINNYA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Golongan IV/ e						9			**9**
Golongan IV/ d	1	17			1	15	8	6	**48**
Golongan IV/ c		17	5		14	41	40	24	**141**
Golongan IV/ b		12	140	8	1.111	39	64	83	**1.457**

GOLONGAN/ RUANG	ESELON				NON ESELON				JUMLAH
	I	II	III	IV	TENAGA FUNGSIONAL			PELAKSANA	
					PENDIDIKAN	KESEHATAN	LAINNYA		
Golongan IV/ a		1	105	185	1.366	62	110	240	**2.069**
Jumlah Golongan IV	**1**	**47**	**250**	**193**	**2.492**	**166**	**222**	**353**	**3.724**
Golongan III/ d			46	379	1.468	230	180	941	**3.244**
Golongan III/ c			4	197	1.510	163	117	773	**2.764**
Golongan III/ b				61	754	160	170	1.417	**2.562**
Golongan III/ a					88	93	52	820	**1.053**
Jumlah Golongan III			**50**	**637**	**3.820**	**646**	**519**	**3.951**	**9.623**
Golongan II/ d					3	44	30	590	**667**
Golongan II/ c					3	12	12	549	**576**
Golongan II/ b					1	1	6	256	**264**
Golongan II/ a						2	10	71	**83**
Jumlah Golongan II					**7**	**59**	**58**	**1466**	**1590**
Golongan I/ d								29	**29**
Golongan I/ c								15	**15**
Golongan I/ b								6	**6**
Golongan I/ a								2	**2**
Jumlah Golongan I								**52**	**52**
PPPK					108				**108**
Jumlah PPPK					**108**				**108**
Total Jumlah Pegawai	**1**	**47**	**300**	**830**	**6.427**	**871**	**799**	**5.822**	**15.097**

6.3 Strategi Pemerintah Provinsi Riau dalam Peristiwa Penanganan Bencana Non Alam Covid -19

6.3.1 Dasar Pemikiran dan Pedoman Penanganan Bencana Non Alam COVID-19

> *"Pandemi virus Corona (Covid-19) menjadi pukulan berat bagi perekonomian Indonesia. Inilah situasi yang saya sampaikan apa adanya. Banyak orang kehilangan pekerjaan di seluruh dunia dan berjuang bertahan hidup.* ***Dalam menghadapi ujian dan cobaan ini kita tidak boleh menyerah."***
>
> ***Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia***

Sesuai arahan Presiden Republik Indonesia terkait penanganan COVID-19 dengan menitikberatkan kepada seluruh Pemerintah Daerah yang tergabung dalam gugus tugas penanganan Pandemi yang disebabkan oleh infeksi virus *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS Cov-2)* yang menyerang sistem pernafasan dan merupakan jenis terbaru dari tujuh virus corona yang pernah di temukan yaitu : HCoV-OC43, HCoV-229E, HCoV-NL63, HCoV-HKU1, MERS-CoV dan SARS-CoV.

Virus Corona adalah kumpulan virus yang dapat menginfeksi sistem pernafasan dengan banyak kasus menyebabkan infeksi pernafasan ringan, seperti flu namun tidak hanya berhenti disitu virus corona yang populer dengan istilah COVID-19 juga dapat menyebabkan infeksi pernafasan berat, seperti infeksi paru-paru (*pneumonia*). COVID-19 memiliki beberapa perbedaan dengan SARS dan MERS, antara lain dalam tingkat penularan yang sangat cepat serta belum terpenuhinya ketersediaan vaksin. COVID-19 menjadi ancaman serius pada kesehatan publik yang dapat menimbulkan kematian.

Penanganan Pandemi COVID-19 untuk kemudian di terapkan secara komprehensif dan holistik yaitu:

1) Memangkas rencana belanja yang tidak prioritas;
2) Melakukan *Refocusing* kegiatan dan Realokasi anggaran;
3) Menjamin ketersediaan bahan pokok dan mempertahankan daya beli masyarakat; dan
4) Melaksanakan terlaksananya Jaring Pengaman Sosial yaitu dengan cara:

a. Pelaksanaan tepat sasaran, data kelompok penerima manfaat *by name, by address*, sehingga tepat dan akurat melibatkan komponen RT/ RW, Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah sehingga bantuan bisa tepat;
b. Sesegera mungkin, secepat mungkin, tepat, dan cepat; dan
c. Mekanisme penyaluran jaring pengaman sosial dilakukan seefisien mungkin, menggunakan cara-cara praktis, tidak berbelit-belit, dan menyulitkan masyarakat.

5) Stimulus ekonomi yang dikeluarkan harus betul-betul tepat sasaran; dan
6) Restrukturisasi Kredit bagi UMKM terdampak berupa:
   a. Penundaan pembayaran kredit;
   b. Pemberian tambahan kredit modal kerja ;
   c. Skema baru dalam pembiayaan;
   d. Ditambahkan ke dalam bantuan sosial paket sembako; dan
   e. Usaha Mikro dan Kecil:
      - Sektor Pertanian
      - Industri rumah tangga
      - Warung dan rumah makan.

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Lembaga telah menerbitkan regulasi dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19. Mulai dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, Lembaga Negara Badan Penanggulangan Bencana hingga Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa. Baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri sampai pada Instruksi Menteri yang dijabarkan dalam daftar regulasi yang menjadi acuan bagi Pemerintah Provinsi Riau dalam menangani peristiwa Bencana Non Alam COVID-19 sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/ atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/ atau stabilitas sistem keuangan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Faktual Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia;
9. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19;
10. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 19/ PMK.07/ 2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Alokasi Umum dan Dana Insentif Daerah Tahun anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan COVID-19;
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 23/ PMK.03/ 2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19;
16. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/ KM.7/ 2020 tentang Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan/ atau Penanganan COVID-19;
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
18. Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penjelasan Pelaksanaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan COVID-19;
19. Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembuktian Kualifikasi/Klarifikasi dan Negosiasi pada Pemilihan Penyedia dalam Masa Wabah COVID-19;
20. Surat Edaran Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Nomor SE-6/ KD2/ 2020 tentang Tata Cara Reviu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atas Pengadaan Barang/Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19;

21. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/ 2622/ SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah;
22. Surat Edaran Kementerian Keuangan RI Nomor S-247/ MK.07/ 2020 Tentang Penghentian Proses Pengadaan Barang/Jasa Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun anggaran 2020 (selain bidang kesehatan dan bidang pendidikan);
23. Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri RI Nomor 905/ 2622/ SJ tentang Penghentian Proses Pengadaan Barang/Jasa Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun anggaran 2020 (selain bidang kesehatan dan bidang pendidikan);
24. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi No 8 Tahun 2020 tentang Penggunaan Anggaran Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Terkait Dengan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi; dan
25. Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.750/ IV/ 2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Akibat Virus Corona di Provinsi Riau Tahun 2020.

Selanjutnya bahwa kondisi Pandemi COVID-19 yang terjadi secara global termasuk di Provinsi Riau telah berdampak luar biasa bagi kesehatan dan mengakibatkan perlambatan ekonomi nasional maupun regional. Dampak pandemi COVID-19 juga mengakibatkan penerimaan daerah baik yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD), dana transfer pusat dan sumber pendapatan lainnya mengalami koreksi yang cukup besar. Sementara pada sisi belanja diperlukan optimalisasi sumber daya fiskal untuk mendukung upaya penanganan kesehatan, penyediaan jaring pengaman sosial dan upaya strategis pemulihan ekonomi.

Kondisi tersebut mengakibatkan dilakukannya penyesuaian proyeksi pendapatan daerah, *refocusing*, dan realokasi belanja daerah. *Refocusing* dan realokasi sebagaimana dimaksud menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja. Selanjutnya seperti yang diketahui tantangan Pemerintah Provinsi Riau berada pada beberapa variabel yang menentukan

yaitu cepat serta masifnya penyebaran COVID-19 dari berbagai *cluster*, kesadaran masyarakat dalam menetapkan **protokol kesehatan dan menerapkan Pola Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS) masih belum tercipta secara ideal,** masih di temukan ketidakjujuran masyarakat yang masuk ke daerah dari perjalanan di zona merah sehingga tidak terdeteksi sebagai ODP, sarana prasarana kesehatan yang tidak mencukupi dalam penanganan pasien dalam jumlah besar. Sehingga hal yang demikian membutuhkan peran dan kerjasama semua pihak untuk memutus mata rantai, penanganan pada saat pandemi dan pasca pandemi COVID-19.

Realitas persoalan yang kompleks dan berlangsung dalam waktu yang cepat membutuhkan upaya percepatan dalam hal penanggulangan dan pecegahan penyebaran COVID-19 oleh karenanya Pemerintah Provinsi Riau telah merealisasikan dalam hal :

1. **Pembentukan Gugus Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Provinsi Riau;**
2. **Penyiapan Sarana Prasarana Kesehatan, Alat Kesehatan dengan melakukan;**
    a. Penetapan 48 Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu di Provinsi Riau;
    b. Penyediaan tenaga medis dan paramedis penanganan pasien COVID-19;
    c. Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka upaya penanggulangan COVID-19 di Provinsi Riau;
    d. Pemenuhan Kebutuhan sarana prasarana penanganan pasien COVID-19; dan
    e. Mempersiapkan sarana dan prasarana Labkesda dalam pemeriksaan sampel swab pasien secara mandiri untuk segera mendapatkan persetujuan Kemenkes RI.
3. **Pencegahan dalam rangka memutus Rantai COVID-19**
    a. Menghimbau masyarakat untuk menerapkan *social distancing*, *physical distancing* dan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
    b. Mengatur sistem kerja ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;

c. Menghentikan sementara transportasi laut dan udara ke negara tetangga;
d. Rapat bersama gugus tugas percepatan penangangan COVID-19 Provinsi Riau dengan gugus tugas Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau; dan
e. Surat Edaran kepada seluruh pimpinan Perusahaan untuk penerapan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

4. **Penetapan Siaga Darurat sesuai Keputusan Gubernur Riau Nomor KPTS.596/ III/ 2020 tanggal 17 Maret 2020;**
5. **Melakukan upaya pergeseran anggaran untuk penanganan COVID-19; dan**
6. **Koordinasi dengan Kabupaten/Kota, Instansi vertikal, MUI dan/ atau oragisasi keagamaan, paguyuban, dll untuk percepatan penanganan COVID-19.**

Pemerintah Provinsi Riau juga telah memberlakukan kebijakan dalam penanganan kasus COVID-19 sebagai bentuk ikhtiar berupa :

1. Seluruh masyarakat yang masuk ke Provinsi Riau, akan mendapatkan Kartu Kewaspadaan Kesehatan/ *Health Alert Card* (HAC) dan menjadi ODP termasuk yang tidak bergejala dipantau oleh Puskesmas;
2. Seluruh PDP dirawat di RS Rujukan dan mendapatkan *treatment* sesuai Protokol pengobatan;
3. Pasien PDP hasil swab yang konfirmasi positif langsung di rawat di RSUD Arifin Ahmad atau Rumah Sakit Rujukan Lainnya dan mendapatkan penanganan pengobatan sebagai pasien positif sesuai Protokol pengobatan pasien konfirmasi Positif COVID-19;
4. Laboratorium Bio Molekuler yang telah dioperasikan dapat mempercepat penanganan pasien, sehingga mampu mengefisienkan biaya, waktu serta tenaga. Kapasitas saat ini sudah mencapai 400-500 sampel per hari;
5. Pemberian bantuan keuangan khusus ke Kabupaten/ Kota, kelurahan dan desa untuk percepatan penanganan COVID-19;
6. Melakukan *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran APBD 2021 sesuai dengan arahan Presiden untuk percepatan penanganan COVID-19 dalam hal penanganan kesehatan, jaring pengaman sosial dan pemulihan ekonomi;

7. Pengawasan ketat terhadap orang pada *check point* perbatasan di Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Jambi; dan
8. Melaksanakan *Rapid test* terhadap karyawan perusahaan dan pedagang pasar serta melakukan swab di terhadap ODP (Orang dalam pemantauan) dan warga hasil *tracing* dari petugas di daerah.

Dalam konteks arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah Tahun 2021, Pemerintah Provinsi Riau mengambil kebijakan terhadap pendapatan yang diarahkan kepada upaya mengoptimalkan seluruh potensi penerimaan, namun tetap mempertimbangkan kondisi perekonomian masyarakat yang terdampak wabah COVID-19. Kebijakan pemberian relaksasi pembayaran pajak daerah dan pemberian keringanan denda atas pokok pajak daerah merupakan bentuk stimulus fiskal yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat akibat menurunnya kemampuan ekonomi dalam masa pandemi.

Perubahan kebijakan belanja Tahun 2021 diarahkan untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam upaya pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan maupun dampak Pandemi COVID-19. Dalam rangka penanganan COVID-19 mengharuskan Pemerintah Daerah untuk melakukan penyesuaian anggaran belanja pegawai, belanja barang/ jasa dan belanja modal. Pemerintah Provinsi Riau memberikan prioritas alokasi belanja kepada program yang secara nyata berkontribusi pada pencapaian 5 (lima) prioritas pembangunan Provinsi Riau Tahun 2021.

6.3.2 Dampak *refocusing*/ realokasi anggaran terhadap kemampuan keuangan daerah Provinsi Riau

6.3.2.1 Analisa dampak *refocusing*/ realokasi anggaran terhadap Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau

Komponen Pendapatan Provinsi Riau dari sektor Pendapatan Asli daerah berupa Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan komponen pendapatan yang melibatkan kegiatan perekonomian masyarakat. Disisi lain pandemi COVID-19 telah berdampak luas pada kegiatan di berbagai sektor lapangan usaha dimana menggerus sektor konsumsi

masyarakat yang diakibatkan oleh turunnya kemampuan daya beli sebagai bentuk dari perubahan pola kehidupan, salah satunya terjadi akibat diberlakukannya peraturan protokol kesehatan yang secara otomatis membatasi kegiatan masyarakat untuk melakukan aktifitas kehidupan secara normal sebelum pandemi COVID-19 melanda.

Pergeseran anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau terhadap Anggaran Pendapatan juga memiliki korelasi terhadap penanganan kegiatan infrastruktur. Hal ini terjadi karena adanya penurunan dari alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Pemerintah Pusat. Untuk menyikapi kejadian bencana non alam peristiwa pandemi COVID-19 Pemerintah Provinsi Riau terlebih dahulu melakukan perbaikan instrumen hukum sebagai bentuk langkah konkrit untuk memastikan adanya kepastian hukum bagi kegiatan pengelolaan keuangan daerah khususnya di Propinsi Riau.

Pandemi COVID-19 selain berdampak pada sektor pendapatan daerah sektor belanja daerah pun terkena dampaknya. Hampir seluruh pemerintah daerah di Indonesia harus melakukan perombakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2021 yang telah disusun dan di tetapkan. Hal ini telah menyebabkan terjadinya pergeseran anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Riau pada Tahun Anggaran 2021.

Secara garis besar berada pada tiga titik fokus kegiatan yaitu :

1. **Penanganan Kesehatan** dengan melakukan implementasi kegiatan pada:
   a. Penyediaan Biaya Pelayanan Kesehatan;
   b. Penanggulangan Krisis Kesehatan COVID-19;
   c. Insentif Tenaga Kesehatan (Bantuan Operasional Kesehatan Tahap III) (DAK);
   d. Penanganan COVID-19 (RSUD Arifin Achmad);
   e. Penanganan COVID-19 (RSUD PetalaBumi);
   f. Penanganan COVID-19 (RS JiwaTampan);
   g. Penanganan Kesehatan;
   h. Penyediaan Penginapan Untuk Tim Medis;
   i. Penyediaan Makanan dan Minuman di Wilayah Perbatasan;

j. Operasional Posko Perbatasan dan Pintu Masuk;
k. Operasional Keamanan dalam Penetapan PSBB (TNI dan POLRI);
l. Sekretariat Gugus Tugas;
m. Publikasi Penanganan COVID-19;
n. Pendampingan APH dan APIP dalam Penanganan COVID-19; dan
o. Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/ Kota untuk Kelurahan.

2. **Penanganan Dampak Ekonomi** yang meliputi**:**
   a. Pengadaan Bahan Pangan dan Kebutuhan Pokok;
   b. Pemberian Insentif (pengurangan/ pembebasan pajak daerah, perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban pajak, perpanjangan kewajiban pembayaran dana bergulir);
   c. Pemberian Stimulus (penguatan modal usaha kepada pelaku UMKM dan mikro, khusus dalam hal ini Pemerintah Propinsi Riau telah melakukan penyaluran bantuan kepada UMKM yang telah diverifikasi dengan meningkatkan pelayanan melalui pemanfaatan teknologi di bidang digital yaitu menggunakan *website* **Mata UMKM** bekerjasama dengan pihak BPKP Perwakilan Provinsi Riau); dan
   d. Penanganan Dampak Ekonomi Lainnya.

3. **Penyediaan Jaring Pengaman Sosial** dialokasikan dana yang meliputi:
   a. Bantuan Sosial Langsung Tunai;
   b. Bantuan Langsung Tunai;
   c. Operasional Bantuan Langsung Tunai; dan
   d. Penyediaan Dapur Umum.

Bantuan lainnya yang disalurkan oleh Pemerintah Provinsi Riau ke Pemerintah Kabupaten/ Kota berupa:

1. Bantuan Keuangan ke Desa;
2. Bantuan Keuangan Kabupaten/ Kota Untuk Dialokasikan ke 169 Kecamatan dalam hal ini di peruntukan sebagai administrasi Penunjang Kesehatan Belanja Barang Kesehatan, Belanja Modal Alat semprot disinspektan, pendataan warga yang

terdampak ekonomi, Penyuluhan dan *Monitoring* untuk pencegahan COVID-19; dan

3. Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/ Kota.

6.3.2.2 Analisa dampak *refocusing*/ realokasi anggaran terhadap kemampuan Pemerintah Daerah membayar hutang pihak ketiga dan tingkat kolektibilitas piutang pihak ketiga

"Ada setidaknya dua jenis coronavirus yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS-CoV) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS-CoV). Novel coronavirus (2019-nCoV) adalah virus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus corona adalah zoonosis (ditularkan antara hewan dan manusia). Penelitian menyebutkan bahwa SARS-CoV ditransmisikan dari kucing luwak (civet cats) ke manusia dan MERS-CoV dari unta ke manusia. Beberapa coronavirus yang dikenal beredar pada hewan namun belum terbukti menginfeksi manusia. ***Mari Masyarakat Riau Bersatu Memutus Rantai Penyebaran Virus Covid-19"***

Drs. H. Syamsuar M.Si
Gubernur Riau
Dalam Rangka Percepatan Penanganan Pandemi Covid-19

Untuk dampak *refocusing*/ realokasi anggaran terhadap kemampuan Pemerintah Daerah Provinsi Riau melakukan pembayaran hutang kepada pihak ketiga tidak berdampak secara signifikan, hal ini disebabkan oleh kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Riau memprioritaskan melakukan pembayaran kewajiban terlebih dahulu dalam menyelesaikan kewajiban.

Kemampuan bayar terhadap piutang Pemerintah Provinsi Riau oleh pihak ketiga pada masa Pandemi COVID-19 memerlukan analisis yang seksama dengan menggunakan metode yang terukur, hal ini disebabkan oleh variabel Pandemi COVID-19 merupakan variabel yang bersifat intervening, jika persamaan yang di bangun adalah dampak Pendapatan-LO yang di lihat dari tingkat kolektibilitas piutang pada masa pandemi COVID-19.

Di sisi lain komponen piutang Pemerintah Daerah Provinsi Riau yang terdiri dari Piutang Pendapatan dan Piutang Lain-lain secara karakteristik organisasi yang bersifat pelayanan publik (*public oriented*) tentu memiliki perbedaan dengan karakteristik Piutang dengan organisasi yang memiliki karakter *profitable* ataupun yang bergerak di sektor jasa keuangan.

Piutang Pendapatan antara lain berupa Piutang Retribusi, Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Piutang Lain-lain PAD yang sah, dan Piutang Transfer. Piutang Lain-lain yaitu Bagian Lancar Tagihan Penjualan tidak mengalami perubahan terhadap perhitungan kolektibilitas.

6.3.3 Dasar Hukum *Refocusing* dan Realokasi Anggaran

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan COVID-19, pada pasal 3 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Untuk mempertegas kebijakan, selanjutnya Pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *refocusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19. Dalam lingkup Pemerintah Daerah telah disusun regulasi-regulasi terkait penanganan dampak penularan COVID-19 antara lain sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 74 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 74);
2. Peraturan Gubernur Riau Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 74 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 Nomor 8);

Pencapaian vaksinasi COVID-19 Provinsi Riau Tahap I, II dan III bagi Tenaga Kesehatan, Lansia dan Pelayan Publik adalah:

a. Capaian vaksinasi 1 COVID-19 di Provinsi Riau per tanggal 27 Desember 2021 mencapai 74,1% dan capaian vaksinasi 2 Covid-19 mencapai 40,8%. Kabupaten/kota yang memiliki capaian vaksinasi 1 COVID-19 di atas 75% adalah Kota Dumai (81,09%) dan Kota Pekanbaru (95,60%). Kabupaten/kota yang memiliki capaian vaksinasi 2 Covid-19 di atas 75% adalah Kota Pekanbaru (75,54%).

b. Pencapaian vaksinasi Covid-19 bagi Tenaga Kesehatan dengan sasaran 32.923 orang, dengan vaksinasi dosis pertama sebesar 45.606 (138,5%), vaksinasi dosis kedua sebesar 43.268 (131,4%) dan vaksinasi dosis ketiga sebesar 25.633 (77,9%).

c. Pencapaian vaksinasi COVID-19 bagi Lansia dengan sasaran 322.466 orang, dengan vaksinasi dosis pertama sebesar 167.937 (52,08%) dan vaksinasi dosis kedua sebesar 83.845 (26,00%).

d. Pencapaian vaksinasi COVID-19 bagi Pelayan Publik dengan sasaran 349.418 orang, dengan vaksinasi dosis pertama sebesar 522.460 (149,52%) dan vaksinasi dosis kedua sebesar 473.108 (135,40%).

e. Pencapaian vaksinasi COVID-19 bagi Masyarakat Umum dengan sasaran 3.451.350 orang, dengan vaksinasi dosis pertama sebesar 2.212.679 (64,11%) dan vaksinasi dosis kedua sebesar 1.003.004 (29,06%).

f. Pencapaian vaksinasi COVID-19 bagi Ibu Hamil dengan sasaran 29.418 orang, dengan vaksinasi dosis pertama sebesar 166 (0,56%) dan vaksinasi dosis kedua sebesar 119 (0,41%).

g. Pencapaian vaksinasi COVID-19 bagi Disabilitas dengan vaksinasi dosis pertama sebesar 166 (0,00%) dan vaksinasi dosis kedua sebesar 119 (0,00%).

h. Pencapaian vaksinasi COVID-19 bagi Masyarakat berumur 12-17 Tahun dengan sasaran 684.190 orang, dengan vaksinasi dosis pertama sebesar 568.589 (83,10%) dan vaksinasi dosis kedua sebesar 313.276 (45,79%).

Sumber : Riau.go.id

3. Peraturan Gubernur Riau Nomor 4 Tahun 2020 Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 74 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 Nomor 17);
4. Peraturan Gubernur Riau Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 74 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 Nomor 26);
5. Peraturan Gubernur Riau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 74 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 Nomor 32);
6. Peraturan Gubernur Riau Nomor 50 tahun 2021 Tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 74 Tahun

2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 Nomor 50); dan

7. Peraturan Gubernur Riau Nomor 56 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 74 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 Nomor 56).

BAB 7
P E N U T U P

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2021 disajikan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Teknis pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Riau No 67 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 104 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Riau Berbasis Akrual. Setiap entitas akuntansi diwajibkan untuk menyusun Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan. Khusus untuk entitas akuntansi yang menerapkan pola Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), selain menyusun laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan, juga menyusun Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan SAL.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021 yang dapat kami sampaikan. Kami terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan yang lebih baik dan akurat, sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintah yang bersih *(good governance and clean goverment).*

PEKANBARU, MEI 2022

GUBERNUR RIAU

SYAMSUAR